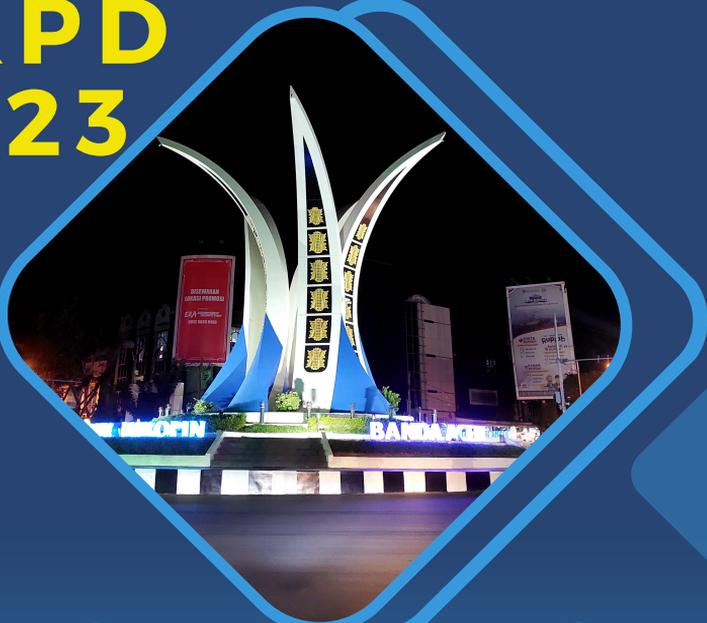




**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2023**

**RKPD
2023**



**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
2022**



WALIKOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 22 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA BANDA ACEH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan ...

- dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
18. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12) sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 102);
19. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2023;
20. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2009 Nomor 4 Seri E Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2018 Nomor 2);
21. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 11);
22. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 1);
23. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2023.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2023 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Kota Banda Aceh untuk Periode 1 (satu) tahun dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Program Pembangunan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2023 memuat:
 - a. rancangan kerangka ekonomi Kota Banda Aceh;
 - b. prioritas pembangunan Kota Banda Aceh;
 - c. rencana kerja dan pendanaan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun; dan
 - d. kebijakan pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak pandemi *corona virus disease* 19 di Kota Banda Aceh.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
 - a. pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyempurnakan Rencana Kerja OPD Tahun 2023; dan
 - b. pedoman bagi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2023.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 06 Juli 2022 M
07 Dzulhijjah 1443 H



Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 06 Juli 2022 M
07 Dzulhijjah 1443 H

Si SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,



BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2022 NOMOR 22...



LAMPIRAN – PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR : 22 TAHUN 2022
TANGGAL : 6 JULI 2022

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	I
DAFTAR TABEL.....	VIII
DAFTAR GAMBAR	XIII
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	3
1.3 Hubungan Antar Dokumen.....	5
1.4 Maksud dan Tujuan	6
1.5 Sistematika Dokumen RKPD.....	6
BAB II.....	1
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	1
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah	1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi	1
2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi	1
2.1.1.2 Topografi.....	2
2.1.1.3 Geomorfologi	3
2.1.1.4 Geologi.....	4
2.1.1.5 Hidrologi	4
2.1.1.6 Klimatologi	5
2.1.1.7 Penggunaan Lahan	6
2.1.1.8 Potensi Pengembangan Wilayah	8
2.1.1.8.1 Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota	9
2.1.1.9 Wilayah Rawan Bencana.....	14
2.1.1.10 Demografi.....	16
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	19
2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan pemerataan Ekonomi.....	19
A. Pertumbuhan PDRB	19
B. Laju Inflasi	23
C. PDRB Perkapita.....	23
D. Kemiskinan	25
2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial	27
A. Angka Melek Huruf (AMF)	27
B. Angka Rata-Rata Lama Sekolah	28
C. Persentase Balita Gizi Buruk / Kurang.....	28
D. Angka Usia Harapan Hidup.....	29
E. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.....	30
F. Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	32
G. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	33



Handwritten mark



2.1.2.3	Fokus Seni Budaya dan Olahraga	34
A.	Kebudayaan	34
1.	Jumlah Grup Kesenian	34
B.	Pemuda dan Olahraga	34
1.	Jumlah Klub Olahraga.....	34
2.1.3	Aspek Pelayanan Umum	35
2.1.3.1	Fokus Layanan Urusan Keistimewaan	35
A.	Syariat Islam	35
1.	Kemampuan Baca Al-Quran Siswa Tingkat Sekolah Menengah	36
2.	Kemampuan Baca Tulis Arab Jawi Siswa Sekolah.....	36
3.	Frekuensi Kegiatan Syiar dan Dakwah di Masyarakat	37
4.	Jumlah Masjid yang Memenuhi Standar Kebersihan, Ketertiban, dan Asesibel	39
B.	Pendidikan Dayah	41
1.	Jumlah Dayah, Guru dan Santri	41
C.	Baitul Mal	44
1)	Penerimaan Zakat, Infaq dan Shadaqah	44
2)	Penyaluran Zakat, Infaq, dan Shadaqah	44
D.	Majelis Permusyawaratan Ulama.....	45
1)	Jumlah Fatwa, Himbauan, Tausyiah yang Ditetapkan Sesuai Dengan Ketentuan Syariat.....	46
2)	Kewenangan MPU :	47
E.	Majelis Adat Aceh	48
F.	Majelis Pendidikan Daerah.....	49
1.	Tugas Pokok MPD.....	49
2.	Fungsi MPD.....	50
3.	Kewenangan MPD.....	50
2.1.3.2	Fokus Layanan Wajib Dasar.....	50
A.	Pendidikan	50
1.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).....	50
2.	Angka Partisipasi Kasar (APK)	51
3.	Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT)	52
4.	Angka Partisipasi Murni (APM)	52
5.	Angka Partisipasi Sekolah (APS)	53
6.	Angka Putus Sekolah (APtS).....	54
7.	Angka Melanjutkan (AM).....	54
8.	Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar	55
9.	Rasio Guru/ Murid Sekolah Pendidikan Dasar	55
10.	Jumlah Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang tercapai.....	56
11.	Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV.....	57
B.	Kesehatan	58
1.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup	58
2.	Angka Kelangsungan Hidup Bayi.	59
3.	Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup	59
4.	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	60
5.	Rasio Posyandu per Satuan Balita.....	60
6.	Rasio Fasilitas Kesehatan per Satuan Penduduk.....	61
7.	Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk	62
8.	Rasio Dokter per Satuan Penduduk.....	62
9.	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani.....	63





10.	Cakupan Desa/ Gampong <i>Universal Child Immunization</i> (UCI).....	64
11.	Persentase Balita Gizi Buruk dan Stunting	65
12.	Cakupan Imunisasi Campak Bayi	66
13.	Jumlah Kasus Campak.....	67
14.	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC.....	67
15.	Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk)	68
16.	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	68
17.	Penderita Diare yang Ditangani	70
18.	Angka Kesakitan Malaria (<i>Annual Parasit Incidence</i>).....	70
19.	Jumlah Kasus Baru HIV	71
20.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin.....	72
C.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	72
1.	Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	72
2.	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	74
3.	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/ Pembangunan Aliran Air Tidak Tersumbat	75
4.	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	77
5.	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Ber HPL/ HGB	81
6.	Rasio Bangunan ber IMB per Satuan Bangunan	82
7.	Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya	83
8.	Ketaatan terhadap RTRW.....	83
D.	Perumahan dan Kawasan Permukiman	84
1.	Ketersediaan Rumah Layak Huni	84
2.	Kawasan Kumuh	84
E.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	85
1.	Cakupan Pelayanan Penanggulangan Kebakaran Kota	87
2.	Tingkat Waktu Tanggap (<i>Response Time Rate</i>) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).....	88
F.	Sosial	89
1)	PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial.....	90
2)	PMKS yang Mendapat Pembinaan Dalam dan Luar Panti	91
3)	Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	91
4)	Jumlah Penyandang Disabilitas	92
2.1.3.3	Fokus layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	93
A.	Tenaga Kerja	93
1)	Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Per Tahun	94
2)	Pencari Kerja yang Ditempatkan	95
3)	Perselisihan Buruh Dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Hubungan Industrial.....	95
B.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	96
1)	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan	96
2)	Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	97
3)	Kota Layak Anak	97
4)	Perluasan Jaringan Khususnya Untuk Panti dan Pusat Rehabilitasi.....	98
5)	Cakupan Penegakan Dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Penyelesaian Kasus Melalui Litigasi dan Non Litigasi	99
C.	Pangan.....	100





1)	Ketersediaan Pangan Utama	100
D.	Lingkungan hidup	100
3)	Indeks Kualitas Air (IKA)	105
4)	Capaian Pengurusan dan Pengawasan izin Dokumen Lingkungan..	107
5)	Rasio Tempat Pembuangan Sampah Persatuan penduduk	108
6)	Pemanfaatan Gas Metana dari TPA Gampong Jawa.....	109
7)	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	110
9)	Penghargaan Adipura	112
10)	Persentase Penerangan Jalan Umum.....	112
E.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	113
1)	Rasio Penduduk ber KTP per Satuan Penduduk.....	113
F.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	115
1)	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa	115
2)	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Mukim	117
3)	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	119
4)	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK.....	121
5)	Persentase PKK aktif.....	123
6)	Persentase Posyandu aktif	123
7)	Presentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Keuchik Langsung (Pilchiksung)	124
8)	Pelaksanaan Pemerintahan Kecamatan dan Kota.....	125
9)	Presentase Capaian Pengelolaan Keuangan Gampong yang baik.....	126
10)	Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	127
11)	Persentase Capaian Pengelolaan Aset Gampong.....	128
12)	Persentase Capaian Penataan Administrasi Pemerintahan Mukim/ Gampong yang baik	129
G.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	129
1)	Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga	129
2)	Ratio Akseptor KB	130
H.	Perhubungan.....	130
1)	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum.....	130
2)	Rasio Izin Trayek	131
3)	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum	131
4)	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis.....	132
5)	Angkutan Darat.....	132
6)	Kepemilikan KIR Angkutan Umum	133
7)	Rambu-rambu	133
I.	Komunikasi dan Informatika.....	134
J.	Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan.....	136
1)	Persentase Koperasi Aktif.....	136
2)	Jumlah BPR/ LKM	136
3)	Jumlah Pasar yang Sudah Berfungsi Secara Optimal.....	137
K.	Penanaman Modal	138
1)	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/ PMA).....	138
2)	Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	138
L.	Kepemudaan dan Olahraga.....	139
1)	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif.....	139
2)	Pembinaan Atlet dan Pelatih	140
3)	Organisasi Kepemudaan dan Pembinaan Pemuda	140





2.1.3.4	Fokus Layanan Urusan Pilihan	141
A.	Pariwisata	141
1)	Kunjungan Wisata	141
2)	Bidang Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif	142
B.	Peternakan	144
C.	Perindustrian	145
1)	Jumlah IKM yang Mendapatkan Bantuan Perbankan.....	145
2)	Jumlah IKM yang Mampu Melakukan Pemasaran Komoditi	146
3)	Jumlah Produk yang Menunjang Program <i>One Village One Product</i> (OVOP)	147
D.	Kelautan dan Perikanan.....	149
1)	Produksi Perikanan	149
2.1.3.5	Fokus Penunjang Urusan Pemerintahan.....	150
A.	Pengawasan	150
2.1.3.6	Fokus Otonomi Daerah	151
A.	Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri	151
1)	LSM, Ormas dan OKP Terdaftar	151
2)	Kegiatan Pembinaan Politik daerah	152
3)	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	153
2.1.4	Aspek Daya Saing Daerah.....	154
2.1.4.1.	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	154
1)	Jenis, Kelas, dan Jumlah Restoran	154
2)	Jenis Kelas dan Jumlah Hotel dan Penginapan.....	155
2.1.4.2.	Fokus Iklim Berinvestasi.....	157
1)	Lama Proses Perizinan	157
2)	Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha.....	159
2.1.4.3.	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur.....	159
1)	Rasio panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Kota Banda Aceh	159
2)	Jumlah Orang/Barang (Penumpang) yang Terangkut Angkutan Umum	160
3)	Jumlah Orang/Barang (Penumpang) Melalui Dermaga/ Bandara/ Terminal.....	160
2.2	Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2022.....	166
2.3	Permasalahan Pembangunan.....	235
2.3.1.	Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	236
2.3.2.	Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	237
A.	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	237
1.	Pendidikan	237
2.	Kesehatan	237
3.	Pekerjaan Umum	237
A.	Penyediaan Air Bersih.....	237
B.	Drainase	238
C.	Pemeliharaan Jalan Kota	238
D.	Permasalahan Tata Ruang	238
4.	Perumahan.....	238
5.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	238
6.	Sosial	239
B.	Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar	239





1.	Tenaga Kerja	239
2.	Memperkuat Upaya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	239
3.	Ketahanan Pangan	239
4.	Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	239
5.	Pemberdayaan Masyarakat Desa	240
6.	Perhubungan.....	240
7.	Komunikasi dan Informatika.....	240
8.	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	240
C.	Urusan Pelayanan Pilihan	240
1.	Industri.....	240
2.	Kelautan dan Perikanan.....	241
D.	Penunjang Urusan.....	241
1.	Perencanaan Pembangunan	241
2.	Keuangan.....	241
3.	Pengawasan	241
E.	Otonomi Daerah	241
1.	Otonomi Daerah Pemerintahan Umum, Administrasi, Keuangan Daerah, Kepegawaian	241
2.	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.....	241
F.	Urusan Keistimewaan.....	241
1.	Syariat Islam	241
BAB III.....		1
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH		1
3.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	1
3.1.1	Kondisi dan Arah Perekonomian Nasional.....	1
3.1.2	Kondisi dan Arah Perekonomian Aceh	2
3.1.3	Kondisi dan Arah Perekonomian Kota Banda Aceh.....	4
3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	10
3.2.1	Pendapatan Daerah	12
3.2.1.1.	Pendapatan Asli Daerah	15
3.2.1.2.	Dana Transfer.....	16
3.2.1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	17
3.2.2	Arah Kebijakan Belanja Daerah.....	17
3.2.3	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	20
BAB IV.....		1
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH		1
4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan	2
4.2	Permasalahan dan Isu Strategis.....	3
4.3	Program Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh yang Mendukung IKU	4
4.4	Arah Kebijakan Pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2023	16
4.5	Tema dan Prioritas Pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2023.....	17
4.6	Keterkaitan Program Prioritas Pembangunan Kota Banda Aceh dengan Pembangunan Prioritas Provinsi Aceh dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023	18
4.7	Program Prioritas Kota Banda Aceh Tahun 2023	23





4.8	Konsistensi Prioritas Pembangunan dengan Program Prioritas Kota Banda Aceh Tahun 2023	57
4.9	Konsistensi Prioritas Pembangunan Aceh dengan Program Prioritas Kota Banda Aceh Tahun 2023	74
4.10	Konsistensi Prioritas Pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2023 Pendukung Prioritas Nasional Tahun 2023.....	79
BAB V.....		1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH		1
BAB VI.....		1
KEBIJAKAN PEMULIHAN EKONOMI DALAM PENANGANAN DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 19		1
BAB VII.....		1
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....		1
7.1	Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Realisasi Capaian 2021	1
7.2	Indeks Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Capaian Tahun 2021	2
7.3	Capaian Prestasi Pembangunan Pemerintah Kota Banda Aceh.....	15
7.4	Inovasi Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2022	16
1.	Nama Inovasi dan Dasar Hukum	16
2.	Mitra Kerja Inovasi PELITA HATI.....	17
3.	Latar Belakang Inovasi PELITA HATI.....	19
4.	Tujuan Inovasi PELITA HATI.....	20
5.	Sasaran Inovasi PELITA HATI	20
6.	Input, Output, Outcome, Benefit dan Impact.....	21
7.	Tahapan dan Proses Inovasi Pelita Hati bagi Masyarakat	22
8.	Persyaratan Untuk Mengajukan Akta Kelahiran Terintegrasi (Akte Kelahiran, KK dan KIA) melalui Aplikasi Si Hati Online	22
9.	Tahapan dan Proses Inovasi Pelita Hati Bagi Calon Mitra Kerja:.....	22
10.	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.....	23
BAB VIII.....		1
PENUTUP		1





DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Luas dan Persentase Wilayah Kecamatan di Kota Banda Aceh.....	1
Tabel 2. 2 Nama Sungai dan Panjang Alirannya di Kota Banda Aceh	5
Tabel 2. 3 Kondisi Klimatologi Kota Banda Aceh Tahun 2021	6
Tabel 2. 4 Jenis Penggunaan Lahan di Kota Banda Aceh Tahun 2021	7
Tabel 2. 5 Penggunaan Lahan Eksiting - Lahan Belum Terbangun	8
Tabel 2. 6 Rencana Pusat-Pusat Pelayanan Kota Banda Aceh.....	10
Tabel 2. 7 Jumlah Penduduk Kota Banda Aceh Berdasarkan Kelompok Umur	17
Tabel 2. 8 Indikator Kependudukan Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021.....	18
Tabel 2. 9 Nilai dan Kontribusi dalam PDRB Tahun 2017 s.d 2021 Atas Dasar	20
Tabel 2. 10 Nilai dan Kontribusi dalam PDRB Tahun 2017 s.d 2021 Atas Dasar	21
Tabel 2. 11 Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRBTahun 2017 s.d 2021...21	
Tabel 2. 12 Distribusi PDRB Kota Banda Aceh Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) ..22	
Tabel 2. 13 Kondisi Ketenagakerjaan Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021	30
Tabel 2. 14 Jenis Pelatihan yang dilakukan Disnaker Kota Banda Aceh.....	31
Tabel 2. 15 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2017-2021	32
Tabel 2. 16 Capaian Kebudayaan Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021	34
Tabel 2. 17 Perkembangan Olahraga Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021	35
Tabel 2. 18 Persentase Siswa Menengah Pertama yang Mampu Baca Al-Qur'an	36
Tabel 2. 19 Persentase Siswa Yang Mampu Baca Tulis Arab Jawi	36
Tabel 2. 20 Frekuensi Syiar dan Dakwah di Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021	38
Tabel 2. 21 Jumlah Masjid yang Memenuhi Standar Kebersihan, Ketertiban dan....	39
Tabel 2. 22 Jumlah Peserta MTQ Kota Banda Aceh Berdasarkan Cabang MT yang..40	
Tabel 2. 23 Jumlah Dayah, Guru dan Santri Tahun 2017-2021	41
Tabel 2. 24 Jenis dan Tipe Dayah di Kota Banda Aceh Tahun 2019.....	42
Tabel 2. 25 Penerimaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah pada Baitul Mal.....	44
Tabel 2. 26 Jumlah Rumah Dhuafa yang Dibangun Kota Banda Aceh	45
Tabel 2. 27 Jumlah Penerima Beasiswa Miskin Kota Banda Aceh	45
Tabel 2. 28 Keputusan, Hasil Penelitian, Surat Edaran, Rekomendasi/Saran/	46
Tabel 2. 29 Keputusan Keulamaan.....	47
Tabel 2. 30 Perkembangan Angka Pendidikan yang Ditamatkan Kota	52
Tabel 2. 31 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Kota Banda Aceh	53
Tabel 2. 32 Angka Putus Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan	54
Tabel 2. 33 Perkembangan Angka Melanjutkan Kota Banda Aceh.....	54
Tabel 2. 34 Jumlah Standar Nasional Pendidikan di Kota Banda Aceh	57
Tabel 2. 35 Perkembangan Guru Memenuhi Kualifikasi S-1/D-IV	57
Tabel 2. 36 Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021 ..59	
Tabel 2. 37 Perkembangan Rasio Pelayanan Posyandu Per-Satuan Balita	61
Tabel 2. 38 Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021.....	61
Tabel 2. 39 Perkembangan Rasio Rumah Sakit Per-Satuan Penduduk	62
Tabel 2. 40 Perkembangan Rasio Dokter Per-Satuan Penduduk	63
Tabel 2. 41 Persentase Stunting Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021	66
Tabel 2. 42 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TB	68
Tabel 2. 43 Sebaran Kasus DBD Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021.....	69
Tabel 2. 44 Jumlah Kasus HIV dan AIDS di Kota Banda Aceh Tahun 2021	71
Tabel 2. 45 Panjang Ruas Jalan Berdasarkan Status (Jalan Nasional, Provinsi	73
Tabel 2. 46 Status Kondisi Jalan Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021	73
Tabel 2. 47 Persentase Panjang Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase	74





Tabel 2. 48 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kota Banda Aceh, 2017-2021 ...	74
Tabel 2. 49 Kondisi Drainase di Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021	76
Tabel 2. 50 Persentase Panjang Jalan Yang Memiliki Trotoar dan Drainase.....	77
Tabel 2. 51 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah	81
Tabel 2. 52 Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan Kota Banda Aceh	82
Tabel 2. 53 Jumlah Ruang Publik yang Tersedia Tahun 2017-2021.....	83
Tabel 2. 54 Rasio Ketaatan Terhadap RTRW Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021 ...	83
Tabel 2. 55 Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Tahun 2017-2021.....	84
Tabel 2. 56 Luas Kawasan Kumuh Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021 (dalam Ha)	85
Tabel 2. 57 Persentase Penegakan Perda Kota Banda Aceh Tahun 2018-2021.....	85
Tabel 2. 58 Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kota Banda Aceh	86
Tabel 2. 59 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman, dan.....	87
Tabel 2. 60 Cakupan Pelayanan Penanggulangan Kebakaran Kota Banda Aceh	88
Tabel 2. 61 Tingkat Waktu Tanggap Darurat (Response Time) Layanan.....	88
Tabel 2. 62 Jumlah Kasus Kebakaran Tahun 2017 – 2021	89
Tabel 2. 63 Penyandang Masalah Sosial Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021.....	89
Tabel 2. 64 Jangkauan KPM dan Jumlah Bantuan Diterima Kota Banda Aceh.....	90
Tabel 2. 65 Penerima Bantuan Sosial dalam Masa Tanggap Darurat.....	92
Tabel 2. 66 Jumlah Penyandang Disabilitas Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021 ...	92
Tabel 2. 67 Jenis pelatihan yang dilakukan Disnaker Kota Banda Aceh.....	93
Tabel 2. 68 Jumlah Penyelesaian Perselisihan Antara Pekerja dan Pengusaha	94
Tabel 2. 69 Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan Kota Banda Aceh	95
Tabel 2. 70 Jumlah Sarana Hubungan Industrial yang Telah Mendapatkan.....	95
Tabel 2. 71 Persentase Pegawai Negeri Sipil Laki-laki dan Perempuan	96
Tabel 2. 72 Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Kota Banda Aceh.....	97
Tabel 2. 73 Indikator Kota Layak Anak yang Dicapai Kota Banda Aceh.....	98
Tabel 2. 74 Mitra P2TP2A Kota Banda Aceh, 2021	98
Tabel 2. 75 Ketersediaan Pangan Utama Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021	100
Tabel 2. 76 Realisasi Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2018-2021	101
Tabel 2. 77 Rincian Skor Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2020	101
Tabel 2. 78 Rincian Jumlah Responden Survey Kepuasan Masyarakat terhadap...	102
Tabel 2. 79 Nilai Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan DLHK3	102
Tabel 2. 80 Persentase Capaian Menurunnya TPS Liar Tahun 2017-2021	105
Tabel 2. 81 Capaian Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Banda Aceh	105
Tabel 2. 82 Indeks Kualitas Air Kota Banda Aceh Tahun 2019	106
Tabel 2. 83 Capaian Izin/Rekomendasi Lingkungan Hidup pada Tahun 2017-2021	108
Tabel 2. 84 Rasio Tempat Pembuangan Sampah Persatuan Penduduk (persen).....	109
Tabel 2. 85 Realisasi Sampah terkelola Tahun 2018-2021.....	109
Tabel 2. 86 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota Banda Aceh	110
Tabel 2. 87 Capaian Luas RTH Ramah Anak Kota Banda Aceh.....	111
Tabel 2. 88 Penghargaan Adipura Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021	112
Tabel 2. 89 Persentase Penerangan Jalan Umum Kota Banda Aceh	113
Tabel 2. 90 Rasio Kepemilikan KTP Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021.....	114
Tabel 2. 91 Kepemilikan Akta Kelahiran Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021	115
Tabel 2. 92 Tabel Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021	116
Tabel 2. 93 Tabel Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Mukim Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021	118
Tabel 2. 94 Kelompok Binaan LPM Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021	120
Tabel 2. 95 Kelompok Binaan PKK Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021.....	122





Tabel 2. 96	PKK Aktif Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021	123
Tabel 2. 97	Jumlah Posyandu Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021	123
Tabel 2. 98	Strata Posyandu di Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021	124
Tabel 2. 99	Partisipasi Masyarakat dalam Pilchiksung Kota Banda Aceh	125
Tabel 2. 100	Data Mukim Dalam Kota	125
Tabel 2. 101	Fasilitasi Dana Pembangunan Untuk Gampong Kota Banda Aceh.....	126
Tabel 2. 102	Capaian Pengelolaan Keuangan Gampong yang Baik.....	127
Tabel 2. 103	Fasilitasi Permodalan Bagi Usaha Mikro Kecil Melalui Program.....	128
Tabel 2. 104	Capaian Pengelolaan Aset Gampong Tahun 2017-2021	128
Tabel 2. 105	Capaian Penataan Administrasi Pemerintahan Mukim/ Gampong	129
Tabel 2. 106	Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga Kota Banda Aceh	129
Tabel 2. 107	Ratio Akseptor KB Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021	130
Tabel 2. 108	Rasio Izin Trayek Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021	131
Tabel 2. 109	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021	132
Tabel 2. 110	Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/ Terminal Bis Kota Banda Aceh	132
Tabel 2. 111	Persentase Angkutan Darat Tahun 2017-2021	132
Tabel 2. 112	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum Kota Banda Aceh.....	133
Tabel 2. 113	Persentase Pemasangan Rambu Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021	134
Tabel 2. 114	Nilai Pemeringkatan Pemerintahan Berbasis Elektronik.....	134
Tabel 2. 115	Persentase website OPD yang aktif Kota Banda Aceh.....	135
Tabel 2. 116	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi	135
Tabel 2. 117	Persentase Koperasi Aktif Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021	136
Tabel 2. 118	Perkembangan jumlah BPR/ LKM Kota Banda Aceh.....	137
Tabel 2. 119	Kondisi Pasar Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021	137
Tabel 2. 120	Jumlah Investor yang Berinvestasi Tahun 2017-2021	138
Tabel 2. 121	Nilai Realisasi PMDN dan PMA Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021..	139
Tabel 2. 122	Jumlah Organisasi Pemuda di Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021 ..	140
Tabel 2. 123	Data Cabang Olahraga dan Atlit Binaan Dispora.....	140
Tabel 2. 124	Jenis dan Jumlah Unit Usaha Ekonomi Kreatif Kota Banda Aceh	143
Tabel 2. 125	Populasi Ternak Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021	144
Tabel 2. 126	Jumlah Produksi Daging Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021	144
Tabel 2. 127	Perkembangan Industri Kecil dan Menengah Tahun 2017-2021.....	145
Tabel 2. 128	Perkembangan Industri Kecil dan Nilai Investasi	146
Tabel 2. 129	Cakupan jenis produk IKM yang akan diseleksi sebagai produk	148
Tabel 2. 130	Produksi Ikan di Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021 (Dalam Ton) ...	149
Tabel 2. 131	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat	150
Tabel 2. 132	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun 2017-2021.....	150
Tabel 2. 133	Jumlah LSM Aktif Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021	151
Tabel 2. 134	Jumlah Ormas yang Terdaftar, Ormas Tidak Aktif dan Ormas Aktif ..	152
Tabel 2. 135	Jumlah OKP yang Terdaftar, OKP Tidak Aktif dan OKP Aktif	152
Tabel 2. 136	Target dan Realisasi Kegiatan Pembinaan Politik Daerah.....	153
Tabel 2. 137	Target dan Realisasi Penyuluhan Pencegahan Peredaran/	153
Tabel 2. 138	Jumlah Restoran, Rumah Makan dan Cafe	154
Tabel 2. 139	Kelas dan Jumlah Penginapan/ Hotel Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021.....	156
Tabel 2. 140	Lama Proses Pemenuhan Komitmen dan Proses Perizinan	157
Tabel 2. 141	Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Investasi Tahun 2017-2021 ...	159
Tabel 2. 142	Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Kota Banda Aceh.....	160
Tabel 2. 143	Jumlah Orang/Barang (Penumpang) yang Terangkut	160





Tabel 2. 144 Jumlah Orang/Barang (Penumpang) Melalui Dermaga/ Bandara/....	161
Tabel 2. 145 Jumlah Terminal Angkutan Penumpang/Barang Kota Banda Aceh...	161
Tabel 2. 146 Rasio Jumlah Lulusan S1/S2/S3 per-satuan Penduduk	162
Tabel 2. 147 Rasio Ketergantungan Penduduk Produktif terhadap Penduduk	162
Tabel 2. 148 Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2021	163
Tabel 2. 149 Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2021	164
Tabel 2. 150 Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum.....	164
Tabel 2. 151 Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat	165
Tabel 2. 152 Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Ketenteraman,.....	165
Tabel 2. 153 Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Sosial Tahun 2021	165
Tabel 2. 154 Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai Triwulan I Tahun 2022 per Dinas	167
Tabel 2. 155 Permasalahan Pembangunan Kota Banda Aceh Berhubungan	236
Tabel 3. 1 PDRB ADHB dan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha	5
Tabel 3. 2 Laju Inflasi Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Nasional.....	7
Tabel 3. 3 Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin.....	8
Tabel 3. 4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Banda Aceh 2018-2021.....	9
Tabel 3. 5 Proyeksi/Target Pendapatan Kota Banda Aceh Tahun 2022	12
Tabel 3. 6 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024.....	18
Tabel 3. 7 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2020 s.d Tahun 2024	20
Tabel 4. 1 Hubungan Tujuan, Tujuan Indikator dan Sasaran Pembangunan Kota Banda Aceh Berdasarkan RPD Kota Banda Aceh Tahun 2023- 2026.....	2
Tabel 4. 2 Program Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh yang Mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) Berdasarkan RPD Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026.....	5
Tabel 4. 3 Arah Kebijakan Pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2023	16
Tabel 4. 4 Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Aceh, dan Kota Banda Aceh Tahun 2023.....	17
Tabel 4. 5 Keterkaitan Program Prioritas Kota Banda Aceh dengan Program Prioritas Provinsi Aceh dan Program Prioritas Nasional Tahun 2023.....	18
Tabel 4. 6 Program Prioritas Kota Banda Aceh Tahun 2023.....	23
Tabel 4. 7 Konsistensi Prioritas Pembangunan Kota Banda Aceh dengan Program Prioritas Kota Banda Aceh Tahun 2023	58
Tabel 4. 8 Konsistensi Program Prioritas Aceh dengan Program Prioritas Kota Banda Aceh Tahun 2023.....	74
Tabel 4. 9 Konsistensi Program Prioritas Kota Banda Aceh dengan Program Prioritas Nasional Tahun 2023.....	79
Tabel 4. 10 Program Pembangunan Daerah Tahun 2023.....	90
Tabel 5.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah	2
Tabel 6. 1 Perkembangan Covid-19 di Kota Banda Aceh Berdasarkan Kecamatan per-23 Desember 2021	1
Tabel 7. 1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota	1
Tabel 7. 2 Indikator Kinerja Daerah Pemerintah Kota Banda Aceh terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	3
Tabel 7. 3 Penghargaan Pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2021/2022.....	15





Tabel 7. 4 Perkembangan Akta Kelahiran Hasil Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Kota Banda Aceh Tahun 2019-2021	18
Tabel 7. 5 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk.....	20
Tabel 7. 6 Input, Output, Outcome, Benefit, dan Impact	21
Tabel 7. 7 Target dan Realisasi Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran	22





DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Dokumen RPJMN 2020-2024, RKPA 2023 dan RPD Kota Banda Aceh 2023-2026	2
Gambar 1. 2 Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam Penyusunan RKPD Tahun 2023	3
Gambar 1. 3 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan	6
Gambar 2. 1 Masjid Raya Baiturrahman Kota Banda Aceh	1
Gambar 2. 2 Peta Wilayah Administrasi Kecamatan di Kota Banda Aceh	2
Gambar 2. 3 Peta Kemiringan Lereng Banda Aceh	3
Gambar 2. 4 Kondisi Geologi Kota Banda Aceh	4
Gambar 2. 5 Hidrologi Kota Banda Aceh	5
Gambar 2. 6 Peta Penggunaan Lahan Eksisting Kota Banda Aceh	7
Gambar 2. 7 Peta Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota Banda Aceh	9
Gambar 2. 8 Kawasan Pengembangan Kawasan Masjid Raya Baiturrahman	11
Gambar 2. 9 Rencana Pengembangan Central Bussiness District (CBD) Keudah	12
Gambar 2. 10 Konsep Pengembangan Jembatan Keudah-Peunayong	13
Gambar 2. 11 Rencana Pembangunan Nurul Arafah Islamic Center	13
Gambar 2. 12 Peta Bahaya Angin Puting Beliung Kota Banda Aceh	14
Gambar 2. 13 Peta Bahaya Banjir Kota Banda Aceh	15
Gambar 2. 14 Kawasan Bahaya Gempa Kota Banda Aceh	15
Gambar 2. 15 Kawasan Bahaya Tsunami Kota Banda Aceh	16
Gambar 2. 16 Grafik Jumlah Pertumbuhan Penduduk Kota Banda Aceh	16
Gambar 2. 17 Jumlah Penduduk Kota Banda Aceh Berdasarkan Jenis Kelamin	17
Gambar 2. 18 Pertumbuhan Ekonomi Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan	19
Gambar 2. 19 Grafik Laju Inflasi Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Nasional	23
Gambar 2. 20 PDRB Per Kapita Kota Banda Aceh ADHB Tahun 2017-2021	24
Gambar 2. 21 Pertumbuhan PDRB Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021	24
Gambar 2. 22 Garis Kemiskinan Kota Banda Aceh dan Provinsi Aceh	26
Gambar 2. 23 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kota Banda Aceh	26
Gambar 2. 24 Perkembangan Angka Melek Huruf Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh	27
Gambar 2. 25 Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah Kota Banda Aceh,	28
Gambar 2. 26 Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk/Kurang Kota Banda Aceh	29
Gambar 2. 27 Angka Harapan Hidup Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021	29
Gambar 2. 28 Grafik Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	31
Gambar 2. 29 Jumlah Pencari Kerja Tahun 2017 – 2021	32
Gambar 2. 30 Indeks Pembangunan Manusia Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh,	33
Gambar 2. 31 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Banda Aceh,	33
Gambar 2. 32 Perkembangan Siswa PAUD Kota Banda Aceh Tahun 2016-2020	50
Gambar 2. 33 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (%) Kota Banda Aceh	51
Gambar 2. 34 Perkembangan Angka Partisipan Kota Banda Aceh	53
Gambar 2. 35 Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah	55
Gambar 2. 36 Rasio Guru/Murid Kota Banda Aceh Tahun 2017 – 2021	56
Gambar 2. 37 Perkembangan AKB Banda Aceh Tahun 2017-2021	58
Gambar 2. 38 Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup	59
Gambar 2. 39 Angka Kasus Kematian Ibu di Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021 ..	60





Gambar 2. 40 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021.....	63
Gambar 2. 41 Cakupan Desa/Gampong <i>Universal Child Immunization</i> (UCI).....	64
Gambar 2. 42 Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk/Kurang Tahun 2017-2021.....	65
Gambar 2. 43 Cakupan Kasus Campak Bayi Tahun 2017-2021.....	66
Gambar 2. 44 Jumlah Kasus Campak Tahun 2017-2021.....	67
Gambar 2. 45 Kasus Kematian Akibat DBD Tahun 2017-2021.....	69
Gambar 2. 46 Penderita Diare yang Ditangani Tahun 2017-2021.....	70
Gambar 2. 47 Angka Kesakitan Malaria Tahun 2017-2021.....	71
Gambar 2. 48 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin..	72
Gambar 2. 49 Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik Tahun 2018 - 2021.....	74
Gambar 2. 50 Jumlah Rumah Tangga yang Bersanitasi Tahun 2017 - 2021.....	75
Gambar 2. 51 Peta Pembagian Zona Drainase Kota Banda Aceh.....	76
Gambar 2. 52 Walikota Banda Aceh, H. Aminullah Usman, SE. Ak, MM.....	78
Gambar 2. 53 Peta Rencana Zona Wilayah Pelayanan Teknis PDAM Tirta Daroy.....	79
Gambar 2. 54 Peta Rencana Jaringan Air Bersih Kota Banda Aceh Tahun 2029.....	80
Gambar 2. 55 Cakupan Pelayanan Air Minum di Kota Banda Aceh.....	81
Gambar 2. 56 Jumlah Bangunan ber IMB Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021.....	82
Gambar 2. 57 Data PMKS Disetiap Kecamatan Kota Banda Aceh.....	91
Gambar 2. 58 Penyelesaian Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Tahun 2021...	99
Gambar 2. 59 Nilai Setiap Pelayanan DLHK3 Tahun 2020.....	104
Gambar 2. 60 Jumlah Izin/ Rekomendasi Lingkungan Tahun 2017-2021.....	108
Gambar 2. 61 Pencapaian Persentase Luas RTH Publik Kota Banda Aceh.....	111
Gambar 2. 62 RTH Ramah Anak Hutan Kota Tibang.....	112
Gambar 2. 63 Peningkatan Jumlah Lampu PJU Kota Banda Aceh.....	113
Gambar 2. 64 Jumlah Penumpang Angkutan Umum Kota Banda Aceh.....	130
Gambar 2. 65 Persentase Koperasi Aktif Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021.....	136
Gambar 2. 66 Rangkuman Data Statistik Kepariwisata Kota Banda Aceh.....	141
Gambar 2. 67 Jumlah Wisatawan Nusantara dan Mancanegara Kota Banda Aceh Tahun 2017-2020.....	142
Gambar 2. 68 Grafik Jumlah IKM yang Mampu Melakukan Pemasaran.....	146
Gambar 2. 69 Produk Unggulan Kota Banda Aceh Tahun 2021.....	147
Gambar 2. 70 Walikota Banda Aceh, H. Aminullah Usman, SE. Ak, MM dan Ketua PKK Kota Banda Aceh, Hj. Nurmiati Mengunjungi stand.....	148
Gambar 2. 71 Jumlah Produk yang Menunjang OVOP Kota Banda Aceh.....	149
Gambar 2. 72 Produksi Ikan Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021 (dalam Ton).....	149
Gambar 2. 73 Walikota Banda Aceh, H. Aminullah Usman, SE. Ak, MM.....	155
Gambar 2. 74 DPMPSTP Banda Aceh Raih Penghargaan Pelayanan prima dari.....	159
Gambar 6. 1 Perkembangan Covid-19 di Kota Banda Aceh Berdasarkan Kecamatan per-23 Desember 2021.....	2





BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 telah mengatur sistem perencanaan pembangunan nasional di Indonesia secara sistematis dan terintegrasi, yaitu keselarasan perencanaan pembangunan antar ruang (waktu) maupun antar level pemerintahan. Perencanaan pembangunan berdasar pada ruang lingkup waktu dapat dibedakan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk kurun waktu 20 tahun; Rencana Pembangunan Daerah (RPD) untuk kurun waktu 5 (lima) tahun; dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka pendek kurun waktu 1 (satu) tahunan.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengamanatkan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Serentak pada Tahun 2024. Bagi daerah yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan telah habis masa jabatan pada tahun 2022 dan 2023, diwajibkan untuk menyusun RPD Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 sebagai landasan dan pedoman pelaksanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah yang Berakhir Pada Tahun 2022, berkewajiban untuk menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 yang lebih lanjut untuk Kota Banda Aceh disebut Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026.

RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2023 ini disusun melalui tahapan sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Rancangan Awal RKPD;
- 2) Penyusunan Rancangan RKPD;
- 3) Penyusunan Rancangan Akhir RKPD; dan
- 4) Penetapan Peraturan Walikota Banda Aceh tentang RKPD.

Di samping itu, penyusunan RKPD dilakukan dengan menggunakan pendekatan teknokratis, politis, partisipatif, *bottom-up* dan *top-down*.

1. Pendekatan teknokratis yaitu dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah oleh lembaga atau perangkat daerah yang secara fungsional bertugas untuk menyusun perencanaan pendapatan, perencanaan belanja dan perencanaan pembiayaan
2. Pendekatan politis dilaksanakan dengan memperhatikan pokok pokok pikiran yang bersumber dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
3. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan pembangunan (*stakeholders*) antara lain melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
4. Proses *bottom-up* dilakukan secara berjenjang mulai dari gampong, kecamatan, kota, provinsi dan nasional.
5. Proses *top-down* menekankan bahwa tema, arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah mengacu pada tema, arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

Dalam penyusunan RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2023 ini, penetapan program dan kegiatan prioritas juga mengacu kepada kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu "*Money Follow Program*". Di samping pelaksanaan





Musrenbang berjenjang mulai dari Musrenbang Gampong, Kecamatan dan Musrenbang tingkat Kota, Kota Banda Aceh juga melakukan Forum Konsultasi Publik. Forum Konsultasi Publik ini dilaksanakan bertujuan untuk menghimpun aspirasi atau harapan masyarakat terhadap tujuan, sasaran dan program pembangunan Kota Banda Aceh. Forum ini juga yang menjadi dasar penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) yang mana merupakan dasar penyusunan APBK Banda Aceh.

Dalam mewujudkan perencanaan yang baik dan terintegrasi, seluruh dokumen perencanaan harus saling mendukung pencapaian kinerja satu sama lain. RKPD disusun sebagai penjabaran arah kebijakan tahunan selama 5 (lima) tahun yang tertuang dalam RPJMD sesuai dengan program tahunan. RKPD berisi Rencana Kerja (Renja) seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada tahun yang bersangkutan yang didasarkan pada arahan dan program prioritas yang telah dirumuskan pada Rancangan Awal RKPD. Atas dasar ini, maka masing-masing SKPD/OPD memiliki arahan/tema pembangunan yang jelas setiap tahunnya. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.

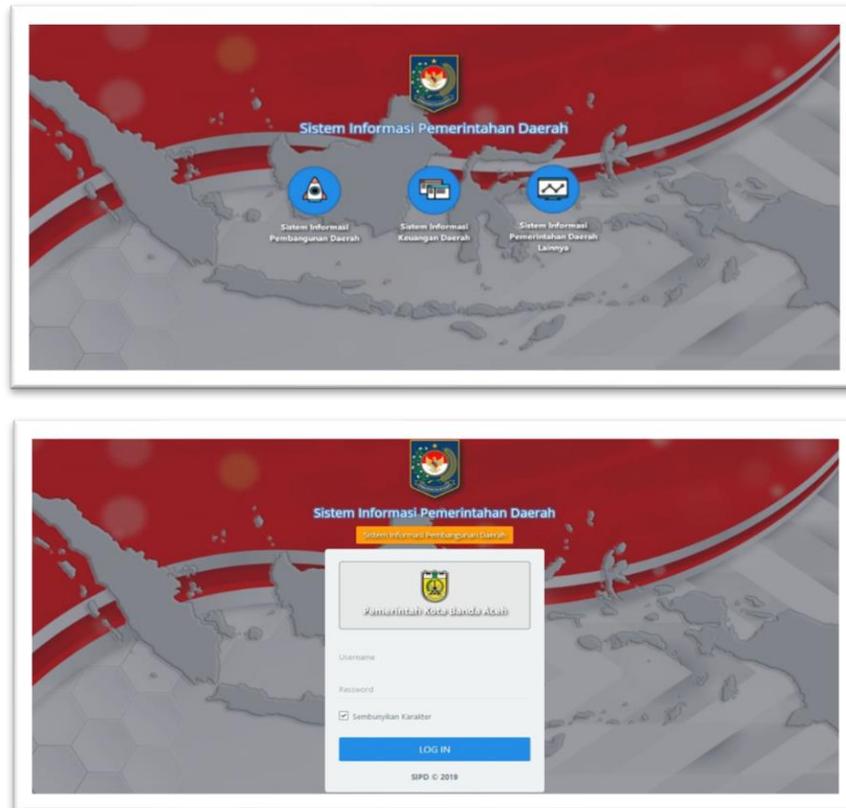
RKPD merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2023 mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan yang sudah ada yaitu RPJM Nasional Tahun 2020-2024, RPA Tahun 2023-2026, dan RPD Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026, terutama dilihat dari keterkaitan prioritas pembangunan, kebijakan dan arah pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023.



Gambar 1. 1 Dokumen RPJMN 2020-2024, RKPA 2023 dan RPD Kota Banda Aceh 2023-2026

Sesuai dengan amanah Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, penyusunan RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2023 ini dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Tahun ini merupakan tahun ketiga proses penerapan aplikasi SIPD dalam penyusunan RKPD Tahun 2023.





Gambar 1. 2 Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam Penyusunan RKPD Tahun 2023

Penerapan aplikasi SIPD dalam penyusunan RKPD Tahun 2023, baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia bertujuan untuk mewujudkan sistem pemerintahan daerah yang transparan, partisipatif, efektif dan efisien dalam perencanaan dan penganggaran di daerah yang terintegrasi.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2023 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;





12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, maka redaksional SKPD diganti menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional Tahun 2020-2024;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah;
28. Permendagri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023;
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;



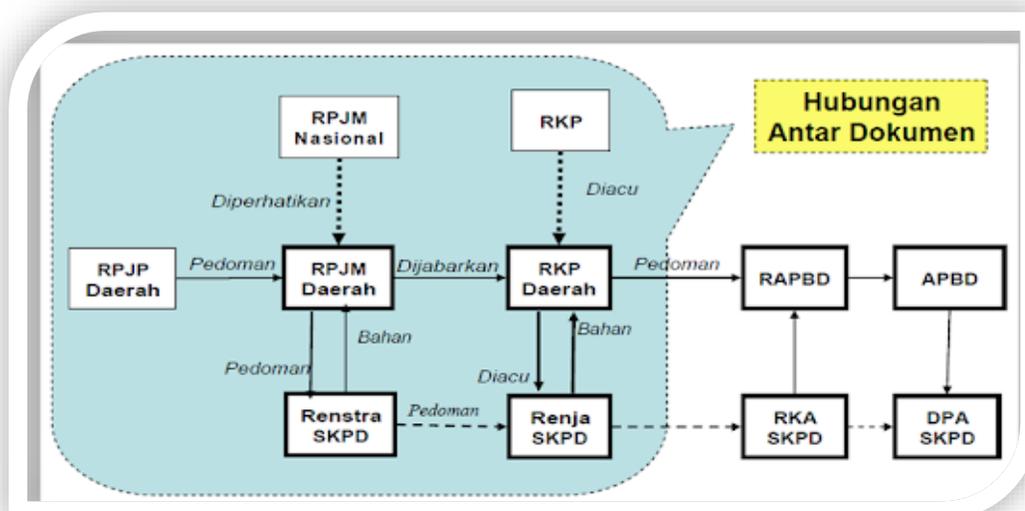


31. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus;
32. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032;
33. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRWA) Tahun 2013-2033;
34. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus;
35. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2022;
36. Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
37. Peraturan Gubernur Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2023;
38. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Kota Banda Aceh Tahun 2007-2027;
39. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;
40. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029;
41. Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026;

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Penyusunan dokumen RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2023 berpegang pada dokumen perencanaan baik di tingkat provinsi maupun nasional. Adapun dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pendukung penyusunan RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2023, yaitu: RPJM Nasional Tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Nasional Tahun 2023; RPA Tahun 2023-2026 dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Aceh Tahun 2023; serta RPJP Kota Banda Aceh Tahun 2007-2027 dan RPD Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026. Untuk mengetahui secara rinci tentang hubungan antar dokumen dalam penyusunan RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2023 ini dapat dilihat pada Gambar 1.3 di bawah ini:





Gambar 1.3 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2023 ini adalah untuk mewujudkan konsistensi, integrasi dan sinergi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan serta menjadi pedoman dalam pembangunan Kota Banda Aceh untuk tahun 2023.

Tujuan penyusunan RKPD Kota Banda Aceh 2023 adalah:

1. Sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2023 dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
2. Sebagai pedoman penyempurnaan rancangan Renja SKPD Tahun 2023;
3. Sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
4. Untuk memastikan bahwa APBD telah disusun berlandaskan RKPD.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang penyusunan RKPD, dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan penyusunan RKPD, serta sistematika dokumen RKPD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menguraikan gambaran umum kondisi daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPD, dan permasalahan pembangunan daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menguraikan tentang kondisi ekonomi tahun 2021, perkiraan tahun 2022 dan tantangan serta prospek perekonomian tahun 2023, arah kebijakan ekonomi daerah serta arah kebijakan keuangan daerah.





BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menguraikan secara eksplisit prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2021, dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, tujuan dan sasaran pembangunan, serta prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2023, serta kebijakan penanganan pandemi *Covid-19*.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPD.

BAB VI KEBIJAKAN PEMULIHAN EKONOMI DALAM PENANGANAN DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE – 19 DI DAERAH ACEH

Bab ini menguraikan tentang kebijakan pemulihan ekonomi akibat *pandemic* sesuai amanat pasal 2 ayat (2) tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2022.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini menguraikan tentang penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VIII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

Aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah secara umum digunakan untuk menggambarkan kondisi suatu daerah. Aspek-aspek tersebut juga akan digunakan untuk menggambarkan kondisi Kota Banda Aceh di dalam dokumen RKPD 2023. Berikut merupakan gambar Masjid Raya Baiturrahman yang menjadi ikon sekaligus kebanggaan Kota Banda Aceh.



Gambar 2. 1 Masjid Raya Baiturrahman Kota Banda Aceh

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Secara geografis, letak Kota Banda Aceh sebagai ibukota Provinsi Aceh sangat strategis. Kota Banda Aceh berada di bagian barat Indonesia dengan letak geografis berada antara 05°30' – 05°35' LU dan 95°30' – 99°16' BT. Kota ini terdiri dari 9 (sembilan) Kecamatan dengan 90 Gampong. Luas wilayah Kota Banda Aceh secara administratif adalah 61,36 km² atau 6136 Ha, namun berdasarkan hasil digitasi GIS Citra Satelit Resolusi Tinggi pada Tahun 2015, luas wilayah Kota Banda Aceh secara spasial mengalami perubahan luas wilayah yaitu menjadi 59,002 km². Berkurangnya luas wilayah tersebut akibat adanya bagian daratan di pesisir sepanjang garis pantai Kota Banda Aceh yang masuk ke area perairan laut dan penyesuaian tapal batas gampong setelah terjadinya bencana Tsunami 2004. Luas wilayah administrasi Kota dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini:

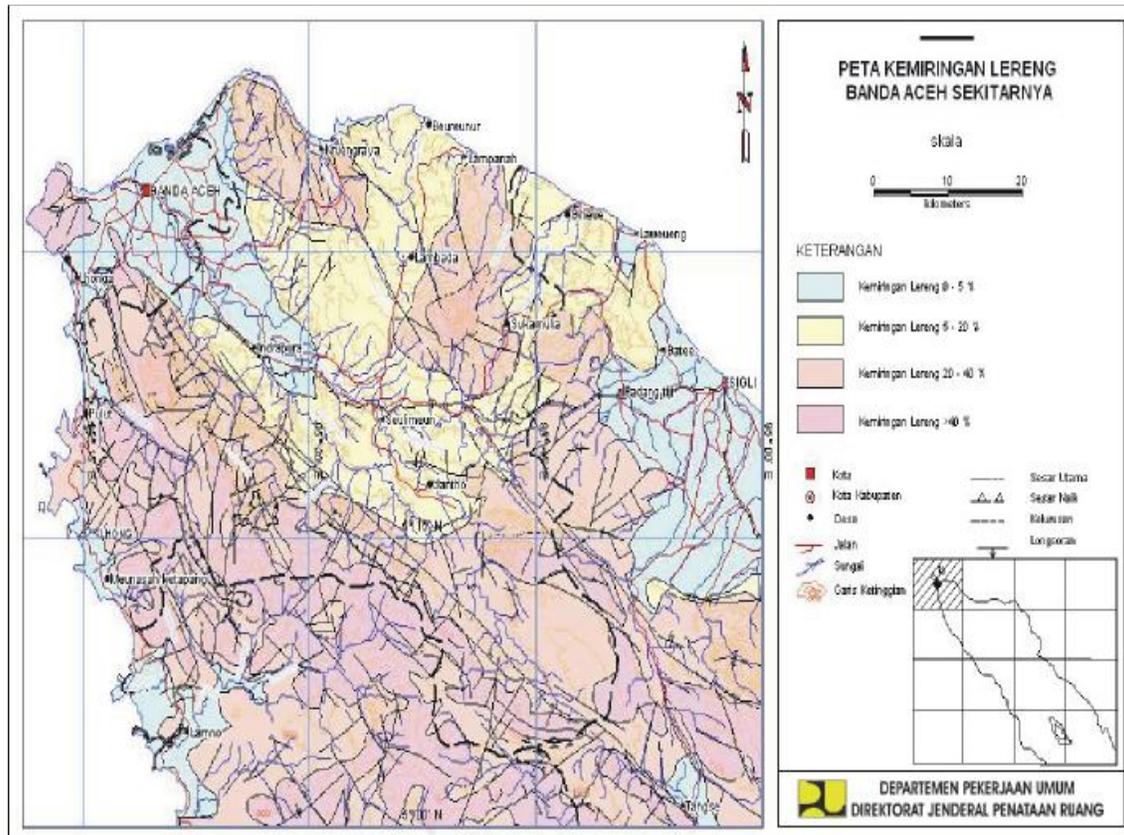
Tabel 2. 1 Luas dan Persentase Wilayah Kecamatan di Kota Banda Aceh

No	Kecamatan	Luas Secara administrasi		Luas secara Digitasi Spasial	
		(Km ²)	Persentase	(Km ²)	Persentase
1	Kec. Meuraxa	7,260	11,83	8,459	14,34%
2	Kec. Baiturrahman	4,540	7,40	4,142	7,02%
3	Kec. Kuta Alam	10,050	16,38	9,587	16,25%
4	Kec. Syiah Kuala	14,240	23,21	13,591	23,03%
5	Kec. Ulee Kareng	6,150	10,02	5,182	8,78%
6	Kec. Banda Raya	4,790	7,81	4,949	8,39%
7	Kec. Kuta Raja	5,210	8,49	3,889	6,59%
8	Kec. Lueng Bata	5,340	8,7	4,445	7,53%
9	Kec. Jaya Baru	3,780	6,16	4,759	8,07%
Jumlah		61,360	100,00	59,002	100,00

Sumber : Kota Banda Aceh Dalam Angka 2022



permukaan laut baik pada saat pasang maupun surut air laut. Lebih jelasnya gambaran kondisi topografi kota Banda Aceh dapat dilihat pada Gambar 2.3.



Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2018)

Gambar 2. 3 Peta Kemiringan Lereng Banda Aceh

Berdasarkan Gambar 2.3 di atas dapat dilihat bahwa Kota Banda Aceh terletak pada dataran rendah dengan kemiringan 0-5%.

2.1.1.3 Geomorfologi

Secara umum geomorfologi wilayah Kota Banda Aceh terletak di atas formasi batuan vulkanis tertier (sekitar Gunung Seulawah dan Pulau Breueh), formasi batuan sedimen, formasi endapan batu (di sepanjang Kr. Aceh), formasi batuan kapur (di bagian timur), formasi batuan vulkanis tua terlipat (dibagian selatan), formasi batuan sedimen terlipat dan formasi batuan dalam. Geomorfologi daerah pesisir Kota Banda Aceh secara garis besar dibagi menjadi dataran yang terdapat di pesisir pantai utara dari Kecamatan Kuta Alam hingga sebagian Kecamatan Kuta Raja, dan pesisir pantai yang terletak di wilayah barat atau sebagian Kecamatan Meuraxa. Daerah dataran di pesisir Kota Banda Aceh secara umum terbentuk dari endapan sistim marin yang merupakan satuan unit yang berasal dari bahan endapan (aluvial) marin yang terdiri dari pasir, lumpur dan kerikil. Kelompok ini dijumpai di dataran pantai yang memanjang sejajar dengan garis pantai dan berupa jalur-jalur beting pasir resen dan subresen. Beting pasir resen berada paling dekat dengan laut dan selalu mendapat tambahan baru yang berupa endapan pasir, sedangkan beting pasir subresen dibentuk oleh bahan-bahan yang berupa endapan pasir tua, endapan sungai, dan bahan-bahan aluvial/ koluvial dari daerah sekitarnya.



2.1.1.4 Geologi

Secara geologis, Pulau Sumatera dilalui oleh patahan aktif yang memanjang dari Banda Aceh di utara hingga Lampung di selatan, yang dikenal sebagai Sesar Semangko (*Semangko Fault*). Oleh karenanya daerah yang terlintasi patahan ini rentan terhadap gempa dan longsor. Berada pada pertemuan Plate Euroasia dan Australia berjarak ± 130 km dari garis pantai barat sehingga daerah ini rawan terhadap Tsunami. Litologi Kota Banda Aceh merupakan susunan batuan yang kompleks, terdiri dari batuan sedimen, meta sedimen, batu gamping, batuan hasil letusan gunung api, endapan alluvium, dan intrusi batuan beku, dan secara umum dibagi atas 4 (empat) kelompok, yaitu :

1. Alluvium
2. Batuan Kuartar (sedimen dan volkanik)
3. Batuan Tersier (sedimen dan volkanik)
4. Batuan metasedimen, malihan, dan terobosan Pra-Tersier

Untuk mengetahui kondisi geologi Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Gambar 2.4 di bawah ini.



Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2018)

Gambar 2. 4 Kondisi Geologi Kota Banda Aceh

Pada Gambar 2.4 di atas menunjukkan ruas-ruas patahan Semangko di Pulau Sumatera dan juga kedudukan-nya terhadap Kota Banda Aceh. Kota Banda Aceh diapit oleh dua patahan di Barat dan Timur kota, yaitu patahan Darul Imarah dan Darussalam, dan kedua patahan yang merupakan sesar aktif tersebut diperkirakan bertemu pada pegunungan di Tenggara Kota.

2.1.1.5 Hidrologi

Terdapat 7 (tujuh) sungai yang melalui Kota Banda Aceh yang berfungsi diantaranya sebagai daerah aliran sungai dan sumber air baku dan kegiatan perikanan. Wilayah Kota Banda Aceh memiliki air tanah yang bersifat asin, payau dan tawar. Daerah dengan air tanah asin terdapat pada bagian utara dan timur kota sampai ke tengah kota. Air payau berada di bagian tengah kota membujur dari timur ke barat. Sedangkan wilayah yang memiliki air tanah tawar berada di bagian selatan kota membentang dari Kecamatan Baiturrahman sampai Kecamatan Jaya Baru, Kecamatan Lueng Bata, Kecamatan Ulee Kareng dan Kecamatan Banda Raya. Untuk mengetahui nama sungai dan panjang alirannya, dapat dilihat pada Tabel 2.2 di bawah ini.





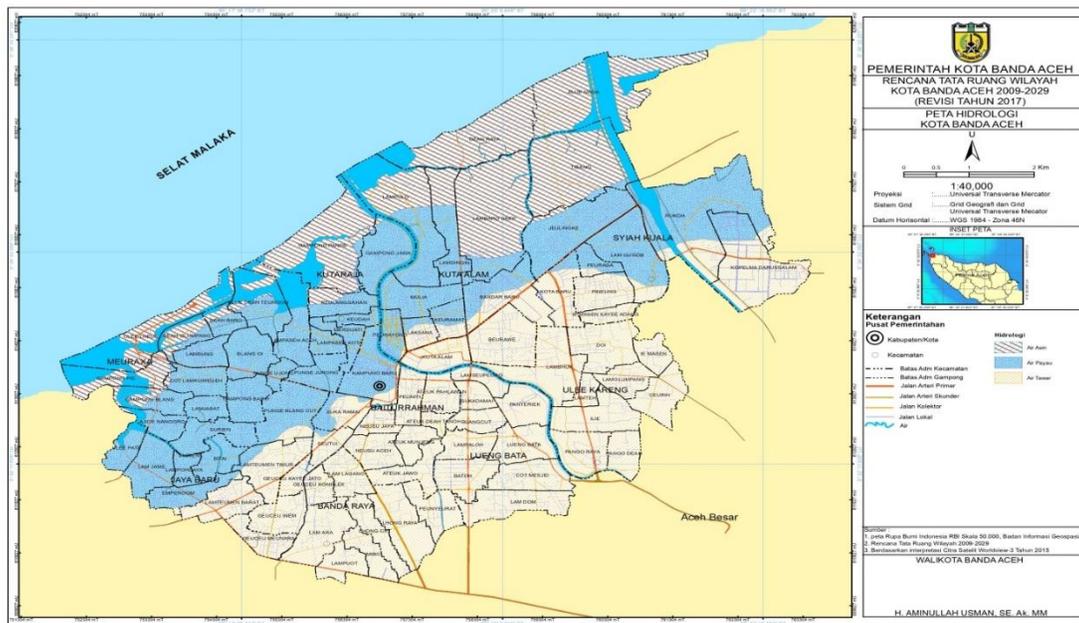
Tabel 2. 2 Nama Sungai dan Panjang Alirannya di Kota Banda Aceh

No	Nama Sungai	Panjang (Km)
1	Krueng Aceh	723,60
2	Krueng Daroy	3,60
3	Krueng Doy	2,00
4	Krueng Neng	4,10
5	Krueng Lueng Paga	26,33
6	Krueng Tanjong	2,25
7	Krueng Titi Panjang	1,60
8	Krueng Kon Keumeh	3,27
9	Krueng Geunasen	1,25

Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2018)

Tabel 2.2 di atas menunjukkan bahwa Krueng Aceh merupakan sungai yang terpanjang alirannya, yaitu 723,69 Km, sedangkan Krueng Geunasen merupakan sungai yang terpendek alirannya, yaitu hanya sepanjang 1,25 Km. Secara umum permasalahan yang dihadapi adalah terjadinya pendangkalan sungai yang dapat menyebabkan terjadinya banjir pada musim hujan. Di samping itu, permasalahan lainnya adalah pemanfaatan lahan oleh masyarakat disepanjang aliran sungai hulu dan hilir yang dapat mengganggu lancarnya aliran sungai khususnya pada saat hujan.

Untuk mengetahui hidrologi Kota Banda Aceh, dapat dilihat pada Peta Hidrologi Kota Banda Aceh pada Gambar 2.5 berikut ini:



Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029

Gambar 2. 5 Hidrologi Kota Banda Aceh

2.1.1.6 Klimatologi

Menurut Schmidt dan Ferguson, untuk menentukan tipe iklim adalah dengan menghitung angka perbandingan antara rata-rata bulan kering (BK) dengan bulan basah (BB) dikali 100%. Bulan kering ditandai dengan jumlah curah hujan kurang dari 60 mm, sedangkan bulan basah adalah jumlah curah hujan di atas 100 mm. Kondisi iklim Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Tabel 2.3.





Tabel 2. 3 Kondisi Klimatologi Kota Banda Aceh Tahun 2021

No	Bulan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan (hari)	Suhu (°C)	Kelembaban (%)
1	Januari	16.8	3	27	79
2	Februari	121.5	9	26.8	79
3	Maret	56.7	7	27.4	80
4	April	133.4	14	27.1	84
5	Mei	388.9	21	27	86
6	Juni	124.9	10	27.3	80
7	Juli	177.6	10	26.8	82
8	Agustus	95.1	7	27.4	78
9	September	109.1	13	26.6	81
10	Oktober	101.2	14	26.8	78
11	November	225.9	20	26	88
12	Desember	284.8	18	26	87
	Jumlah	1835.9	146	-	-
	Rata-rata	153.0	12.2	26.9	81.8

Sumber : Kota Banda Aceh Dalam Angka, 2022

Tabel 2.3 di atas menunjukkan bahwa curah hujan Kota Banda Aceh terbesar pada Tahun 2021 terjadi pada Bulan Mei yaitu sebesar 388,9 mm dan curah hujan terendah terjadi pada Bulan Januari sebesar 16,8 mm yang berlangsung selama 3 (tiga) hari. Hari hujan terlama terjadi pada bulan Mei dan Bulan November, masing-masing selama 21 dan 20 hari. Secara keseluruhan, Jumlah curah hujan selama tahun 2020 yaitu sebesar 1835,9 mm, dengan rata-rata 153 mm/bulan. Rata-rata suhu udara pada Tahun 2021 adalah 26,9°C dengan kelembaban rata-rata sebesar 81,8%. Dari hasil perbandingan BK dan BB didapatkan nilai Q sebesar 0,20 yang menunjukkan tipe iklim pada Kota Banda Aceh termasuk iklim tipe B (iklim basah).

2.1.1.7 Penggunaan Lahan

Berdasarkan kondisi saat ini, kecenderungan perkembangan Kota Banda Aceh lebih mengarah pada bagian timur dan bagian selatan kota. Di bagian timur, berada di wilayah Ulee Kareeng dan sekitarnya. Kawasan Ulee Kareeng, saat ini telah didominasi oleh aktivitas perdagangan dan jasa dan aktivitas permukiman. Kawasan Ulee Kareeng semakin berkembang akibat adanya pergeseran atau perembetan perkembangan fisik kota dikarenakan kawasan ini tidak ikut terkena dampak bencana tsunami. Ditambah dengan lokasinya yang tidak jauh dari kawasan pusat pendidikan yakni Kopelma Darussalam (IAIN, dan Unsyiah) dan Lampoh Keudee (Universitas Abulyama), kemudian menarik aktivitas lain seperti permukiman yang terlihat dari tingginya alih fungsi lahan dari ex-persawahan menjadi permukiman – permukiman baru. Sedangkan untuk bagian selatan, perkembangan fisik kota sebagian bahkan telah merembet hingga ke wilayah kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar. Hal ini dikarenakan secara administratif, wilayah yang mengalami perkembangan berbatasan langsung dengan kabupaten Aceh Besar. Adapun perkembangan dibagian selatan ini meliputi sebagian wilayah kecamatan Baiturrahman (Neusu) dan kecamatan Banda Raya (Lamlagang, Lhong Raya, Lampeuot), dan wilayah Batoh dan Lamdom.

Perkembangan fisik kota dibagian selatan ini salah satunya dilatar belakangi karena bagian selatan ini tidak terkena dampak langsung bencana tsunami 2004 silam. Adapun aktivitas yang berkembang di bagian selatan ini meliputi aktivitas permukiman yang perdagangan dan jasa, permukiman dan olahraga (keberadaan





Di samping itu, untuk mengetahui secara rinci penggunaan lahan eksisting-lahan belum terbangun dapat dilihat pada Tabel 2.5 di bawah ini:

Tabel 2. 5 Penggunaan Lahan Eksiting - Lahan Belum Terbangun Kota Banda Aceh

No	Penggunaan Lahan	Luas	
		Hektar	%
1	Air/Sungai	573.82	21.00
2	Hutan Kota	19.46	0.71
3	Jalur Hijau Jalan	58.15	2.13
4	Jalur Hijau Sungai	20.55	0.75
5	Kawasan Hutan Bakau	308.84	11.30
6	Kawasan Pariwisata	33.29	1.22
7	Kebun	179.41	6.56
8	Lahan Terbuka Produktif	801.61	29.33
9	Pemakaman	22.85	0.84
10	Ruang Terbuka Hijau	431.31	15.78
11	Sawah	9.57	0.35
12	Sempadan Pantai	37.85	1.38
13	Sempadan Sungai	102.16	3.74
14	Taman Kota	37.06	1.36
15	Taman Pulau Jalan	0.61	0.02
16	Tambak	96.53	3.53
	Total	2733.08	100.00

Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029

Kawasan belum terbangun pemanfaatannya antara lain area air/sungai, RTH (hutan kota dan taman kota, RTH lainnya), sempadan pantai, sempadan sungai, jalur hijau sungai, jalur hijau jalan, taman pulau jalan, kebun masyarakat, lahan kosong masyarakat, lahan pemakaman, sawah, tambak, hutan bakau dan kawasan wisata. Area yang belum terbangun di wilayah Kota Banda Aceh dengan luasan 2.763,08 Ha atau 46,83 persen dari luas wilayah Kota Banda Aceh. Area yang belum terbangun didominasi oleh area lahan terbuka produktif, area air/sungai dan ruang terbuka hijau.

Berdasarkan analisis pemanfaatan lahan eksisting area terbangun dan area belum terbangun di Kota Banda Aceh dengan menggunakan Citra Satelit keluaran Februari Tahun 2015, bahwa area terbangun mencapai 53,17 persen dan lahan belum terbangun 46,83 persen dari luas wilayah kota. Hal tersebut menunjukkan bahwa kecenderungan pembangunan fisik di wilayah Kota Banda Aceh semakin pesat setiap tahunnya. Oleh karena itu proses perkembangan fisik wilayah kota perlu diantisipasi terhadap daya dukung dan daya tampung terhadap proses pemanfaatan lahan serta perlu diantisipasi ketersediaan ruang terbuka hijau yang berkelanjutan untuk keseimbangan ekosistem lingkungan di wilayah Kota Banda Aceh.

2.1.1.8 Potensi Pengembangan Wilayah

Dalam Sistem Perkotaan Nasional, Kota Banda Aceh ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) sebagaimana yang dikemukakan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Kebijakan status PKN juga sudah ditetapkan di dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Nomor 4 Tahun 2009 tentang RTRW Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029.





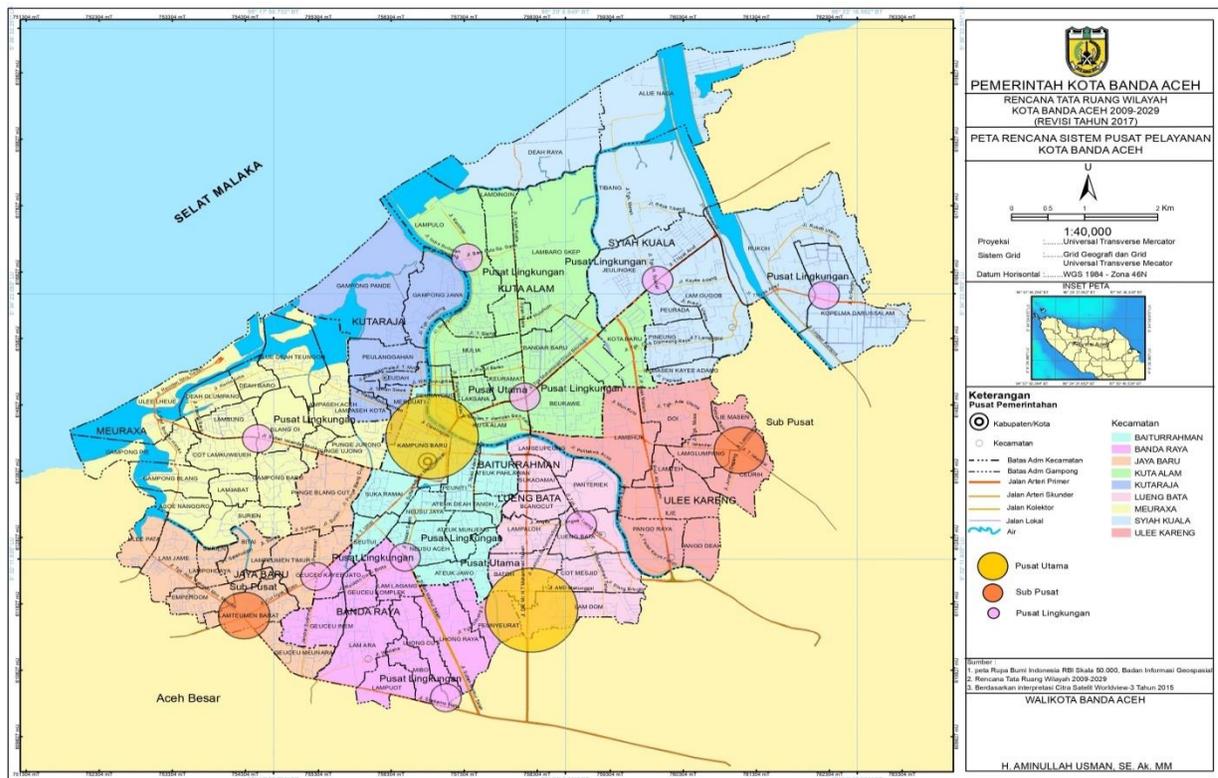
Penetapan Kota Banda Aceh sebagai PKN di dalam RTRW-Nasional merupakan suatu potensi kebijakan pengembangan wilayah Kota Banda Aceh untuk menjadi skala prioritas Nasional dalam pembangunan nasional.

2.1.1.8.1 Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota

Rencana sistem pusat pelayanan dimaksudkan untuk memperjelas hirarki kota sesuai dengan struktur kota yang ditetapkan sehingga diperoleh suatu sistem pemanfaatan ruang yang optimal untuk setiap bagian kota. Dalam realitanya, pengembangan sistem pusat pelayanan akan mempermudah masyarakat kota untuk mendapatkan pelayanan sarana dan prasarana perkotaan.

Dalam sistem struktur ruang Kota Banda Aceh, dikembangkan dengan Sistem Pusat Pelayanan Perkotaan terdiri :

1. Pusat Kota Lama Pasar Aceh – Peunayong
2. Pusat Kota Baru Batoh/Lamdom
3. Sub Pusat Kota Lamtemen
4. Sub Pusat Kota Ulee Kareng



Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029

Gambar 2. 7 Peta Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota Banda Aceh

Untuk lebih jelas mengenai sistem pusat pelayanan Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Gambar 2.7 Peta Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota Banda Aceh dan Tabel 2.6 Rencana pusat-pusat Pelayanan Kota Banda Aceh berikut ini.



**Tabel 2. 6 Rencana Pusat-Pusat Pelayanan Kota Banda Aceh**

No	Pusat Pelayanan / Subpusat Pelayanan/ Unit Lingkungan	Fungsi	Skala Pelayanan
A.	Pusat Kota		
1.	Peunayong / Kampung Baru (Pusat Kota Lama)	<ul style="list-style-type: none">• Pusat pemerintahan Kota Banda Aceh• Perdagangan dan Jasa• Perkantoran	Regional & Kota
2.	Batoh/Lamdom (Pusat Kota Baru)	<ul style="list-style-type: none">• Pusat pemerintahan / perkantoran yang baru• Pusat perdagangan dan jasa• Permukiman	Regional Regional & Kota
B.	Sub Pusat Kota		
1.	Lamtemen	<ul style="list-style-type: none">• Perdagangan dan Jasa• Permukiman	Regional dan Lokal
2.	Ulee Kareng	<ul style="list-style-type: none">• Perdagangan dan jasa• Permukiman	Kota dan lokal
C.	Pusat Lingkungan		
1.	Lampulo	<ul style="list-style-type: none">• Pelabuhan ikan• Galangan kapal• Industri pengolahan ikan• Perumahan nelayan	Regional & Kota
2.	Jambo Tape	<ul style="list-style-type: none">• Pusat Pemerintahan Prov Aceh & Perkantoran Provinsi Aceh (eksisting)• Perdagangan dan jasa	Regional Kota dan Lokal
3.	Neusu	<ul style="list-style-type: none">• Perdagangan dan jasa• Permukiman	Kota dan lokal
4.	Kopelma Darussalam	<ul style="list-style-type: none">• Pendidikan• Perdagangan dan jasa	Regional Kota dan lokal
5	Jeulingke	<ul style="list-style-type: none">• Pusat Pemerintahan Prov Aceh & Perkantoran Provinsi Aceh (eksisting)• Perdagangan dan jasa• Permukiman	Regional Kota dan Lokal
6	Lueng Bata	<ul style="list-style-type: none">• Perdagangan dan jasa• Permukiman	Kota dan lokal
7	Mibo	<ul style="list-style-type: none">• Pusat Pemerintahan dan Perkantoran Kota Banda Aceh• Perdagangan dan jasa• Permukiman	Kota dan Lokal
8	Blang Oi	<ul style="list-style-type: none">• Perdagangan dan jasa• Permukiman• Perikanan• Pelabuhan• Wisata	Kota dan lokal Regional dan Lokal
9	Lamteumen	<ul style="list-style-type: none">• Perkantoran• Perdagangan dan jasa• Permukiman	Regional, Kota dan lokal

Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2018)

Rencana pengembangan kawasan pusat kota lama Kota Banda Aceh bertujuan untuk meningkatkan nilai *heritage* kawasan Pusat Kota Lama sehingga meningkatkan nilai historis Kota Banda Aceh. Beberapa kawasan yang menjadi perhatian dalam rencana ini adalah:

1. Pengembangan Kawasan Masjid Raya Baiturrahman

Pengembangan Kawasan Masjid Raya Baiturrahman bertujuan untuk meningkatkan nilai historis dan memberikan citra baru terhadap *landmark* Provinsi Aceh, sehingga kawasan ini dapat terpadu sebagai kawasan *heritage* dengan kawasan komersial Kota Banda Aceh yang memiliki nilai yang tinggi terhadap fungsi dan citra



kawasan. Salah satu aspek yang menjadi pertimbangan terhadap pengembangan kawasan ini adalah peningkatan *landmark* Kota Banda Aceh dan Provinsi Aceh serta mendukung penataan kawasan *water front city*, dimana Sungai Krueng Aceh dan jembatan Pante Pirak menjadi salah satu gerbang masuk ke kawasan Masjid Raya Baiturrahman. Adapun luas kawasan yang akan digunakan untuk area pengembangan Masjid Raya Baiturrahman ini adalah sekitar 12,08 Ha, sebagaimana yang ditunjukkan pada Gambar 2.8 berikut ini:



Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2018)

Gambar 2. 8 Kawasan Pengembangan Kawasan Masjid Raya Baiturrahman Kota Banda Aceh

2. Pengembangan Kawasan CBD Peunayong

Rencana Pengembangan Kawasan CBD Peunayong terdiri atas dua rencana pengembangan; (1) Pengembangan Kawasan Terminal Keudah, yang terintegrasi dengan zona komersial; dan (2) Pengembangan Jembatan Penyebrangan Pedestrian Keudah-Peunayong. Pengembangan kawasan ini adalah untuk me-revitalisasi kawasan Pusat Kota Lama kawasan Peunayong.

3. Pengembangan Kawasan Terminal Keudah

Pengembangan Kawasan Terminal Keudah bertujuan untuk meningkatkan penggunaan transportasi publik di Kota Banda Aceh, meningkatkan akses dan kenyamanan publik terhadap transportasi publik. Rencana pengembangan kawasan ini mengadaptasikan konsep *mix-use building*, dimana Kawasan Terminal Keudah akan diarahkan untuk menjadi kawasan *one-stop shopping*, sehingga kawasan ini mampu untuk menjadi titik transit bagi pengguna angkutan umum. Kawasan ini juga akan diarahkan untuk memiliki ruang parkir yang luas dan terintegrasi dengan sisi Barat (Jl. Tentara Pelajar) sebagai pintu masuk dan sisi Timur (Jl. Cut Mutia) sebagai pintu keluar. Untuk lebih jelasnya mengenai rencana pengembangan kawasan ini dapat dilihat pada Gambar 2.9 berikut ini:



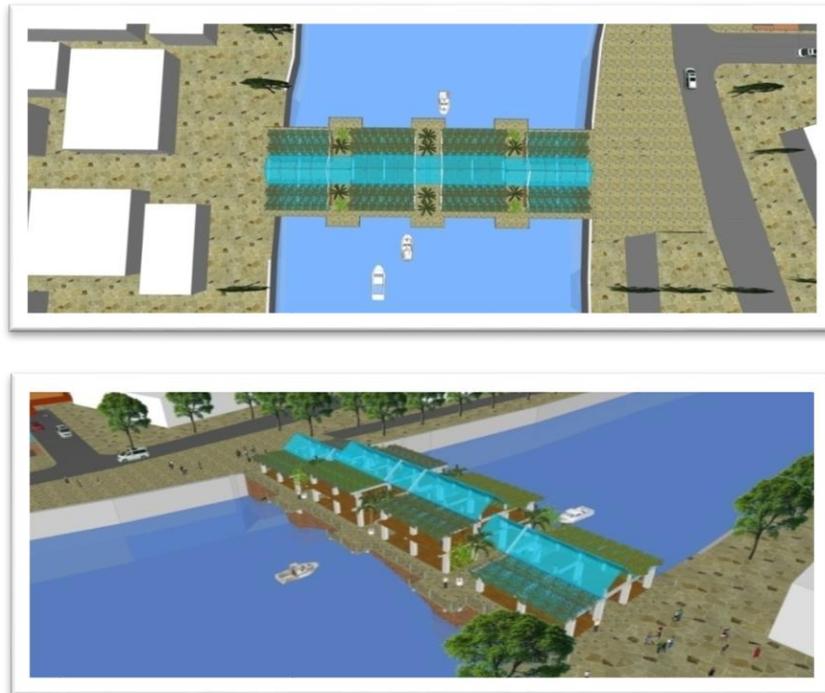


Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2018)

Gambar 2. 9 Rencana Pengembangan Central Bussiness District (CBD) Keudah Kota Banda Aceh

4. Rencana Jembatan Penyebrangan Pedestrian Keudah Peunayong

Jembatan penyebrangan pedestrian Keudah-Peunayong direncanakan selain fungsinya sebagai jembatan penyebrangan pedestrian, juga akan memiliki fungsi sebagai daya tarik antara Peunayong dan Keudah, jembatan ini diarahkan untuk dapat menciptakan ruang publik yang terpadu dengan kawasan perdagangan dan jasa (dengan spesialisasi kuliner; restoran, warung kopi, dan cafe). Konsep rencana pengembangan ini dapat dilihat pada Gambar 2.10 berikut ini :



Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2018)

Gambar 2. 10 Konsep Pengembangan Jembatan Keudah-Peunayong Kota Banda Aceh

5. Rencana Lanjutan Pembangunan Nurul Arafah Islamic Center

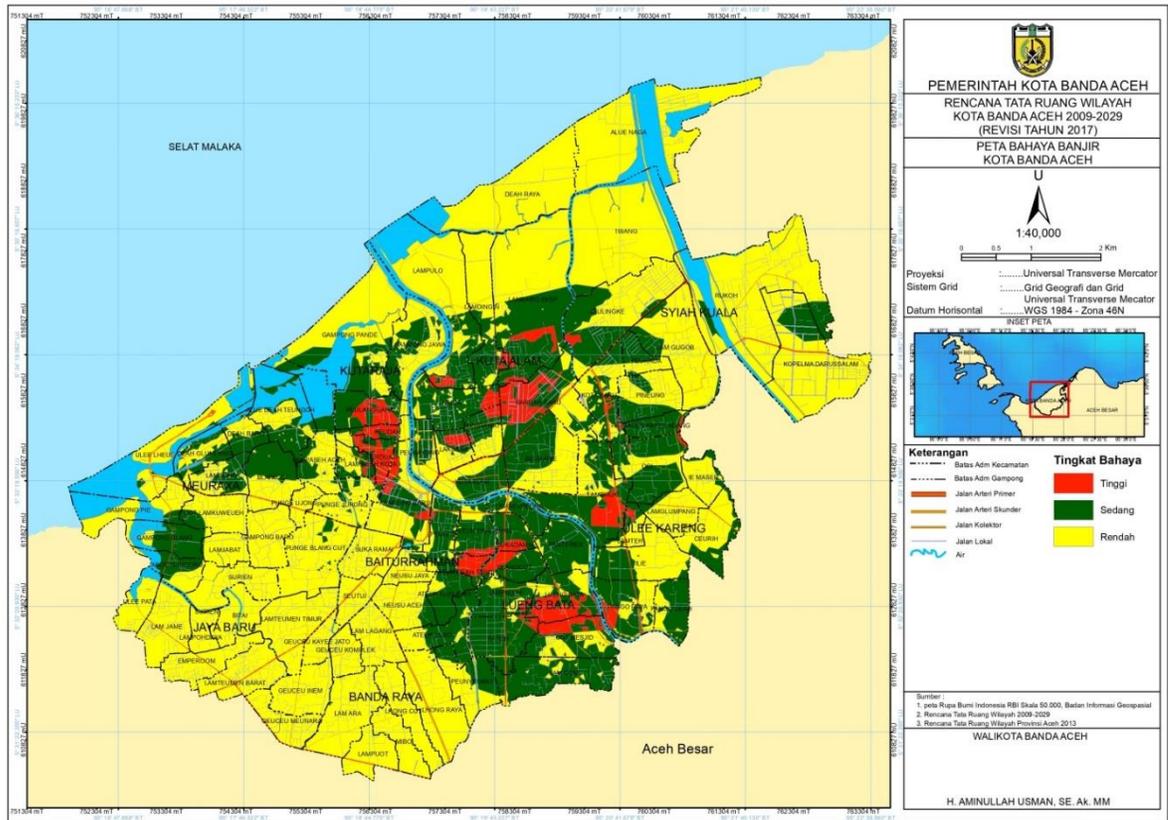
Rencana pembangunan Nurul Arafah Islamic Center telah diselesaikan dokumen perencanaan pembangunannya dan pembebasan sebahagian lahan lokasi pembangunan. Lokasi Nurul Arafah Islamic Center berada di kawasan Ulee Lheu Kecamatan Meuraxa. Rencana pembiayaan pembangunan Nurul Arafah Islamic Center ini bersumber dari pemerintah pusat dan investor. Gambar rencana pembangunan Nurul Arafah Islamic Center ini dapat dilihat pada Gambar 2.11.



Sumber: Dinas PUPR Kota Banda Aceh, 2021

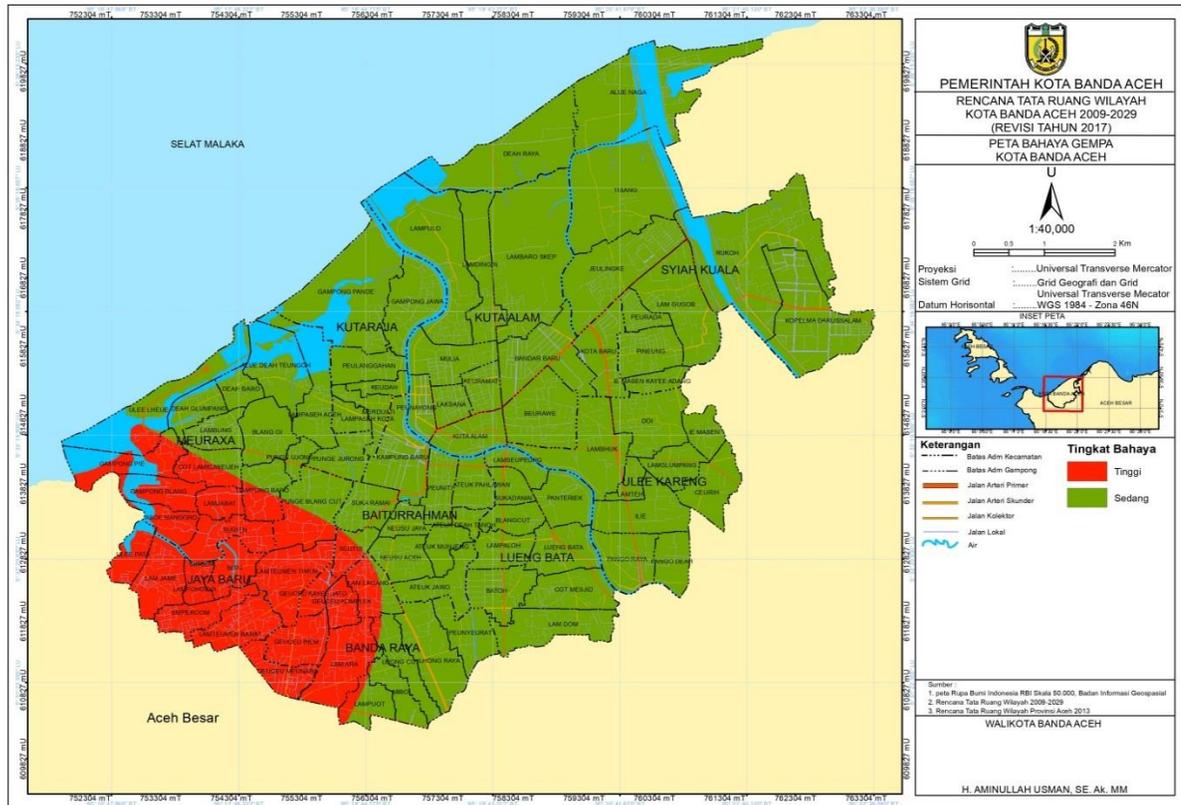
Gambar 2. 11 Rencana Pembangunan Nurul Arafah Islamic Center





Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2018)

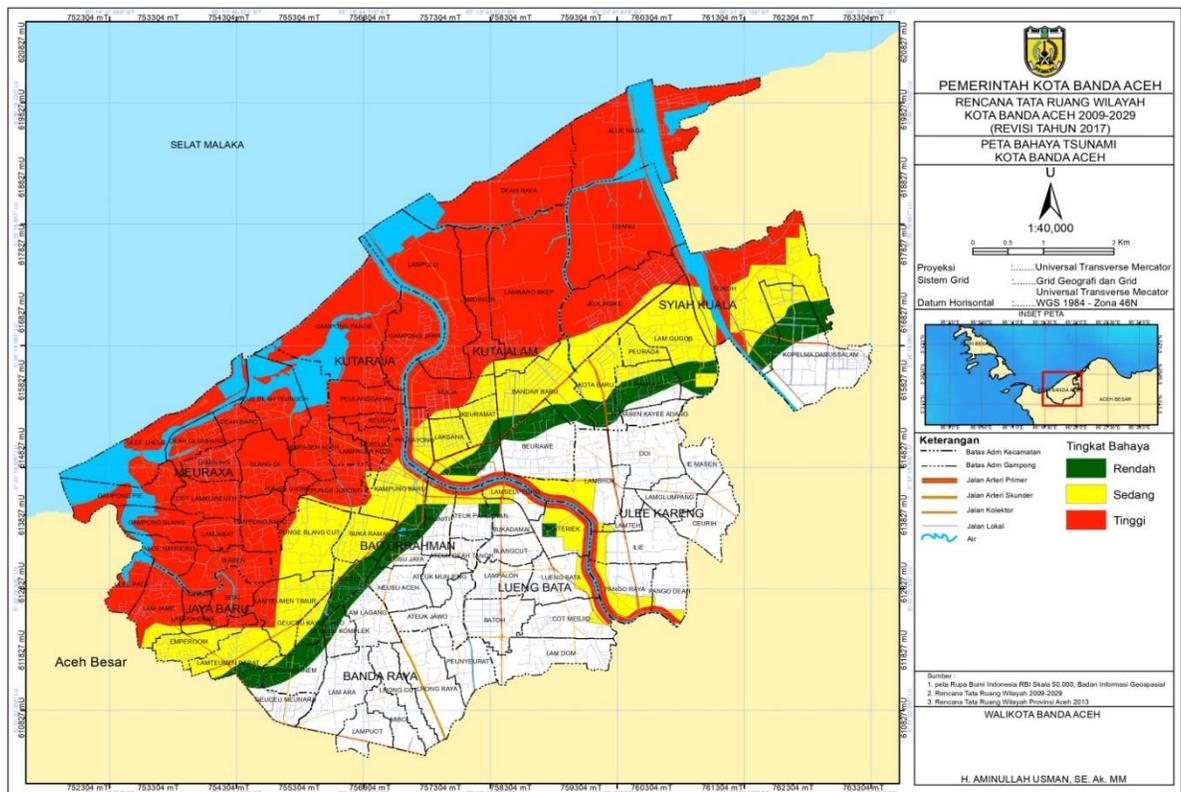
Gambar 2. 13 Peta Bahaya Banjir Kota Banda Aceh



Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2018)

Gambar 2. 14 Kawasan Bahaya Gempa Kota Banda Aceh



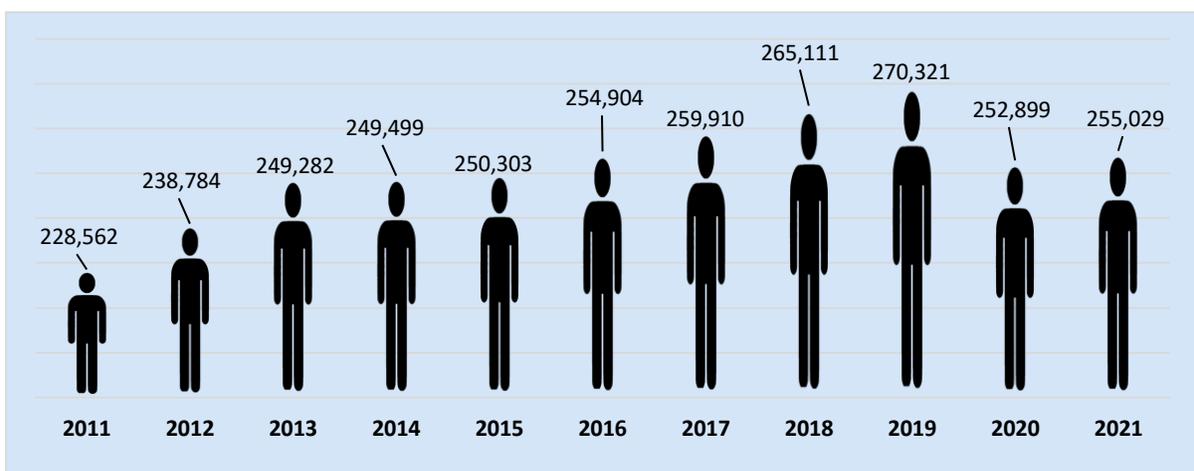


Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2018)

Gambar 2. 15 Kawasan Bahaya Tsunami Kota Banda Aceh

2.1.1.10 Demografi

Jumlah penduduk adalah penduduk yang tercatat sebagai warga Kota Banda Aceh. Jumlah penduduk Kota Banda Aceh pada tahun 2021 sebanyak 255.029 jiwa. Secara rinci peningkatan jumlah penduduk Kota Banda Aceh dari Tahun 2011 sampai Tahun 2021 dapat dilihat pada Gambar 2.16 di bawah ini:



Sumber : Kota Banda Aceh dalam Angka (Beberapa Tahun), 2022

Gambar 2. 16 Grafik Jumlah Pertumbuhan Penduduk Kota Banda Aceh Tahun 2011-2021

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk tertinggi pada tahun 2019 sebesar 270.321 jiwa. Pada tahun 2020, jumlah penduduk Kota Banda Aceh sebanyak 252.899 jiwa menurun dari pada tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena sensus penduduk dilakukan oleh BPS pada bulan September 2020 bersamaan dengan terjadinya pandemic Covid-19. Berdasarkan penjelasan BPS Kota Banda Aceh, penurunan jumlah penduduk Kota Banda Aceh tahun 2020 terjadi akibat





sebahagian besar proses belajar mengajar di Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta dilakukan secara daring selama masa *Covid-19* di tahun 2020. Pada masa *Covid-19*, sebahagian besar mahasiswa PTN/PTS tidak berada di Kota Banda Aceh dan melakukan kegiatan daring dari kampung halaman masing-masing. Di samping itu, survei penduduk oleh BPS dilakukan secara *de vakt*o. Pada tahun 2021 jumlah penduduk Kota Banda Aceh kembali meningkat menjadi 255.029 jiwa.

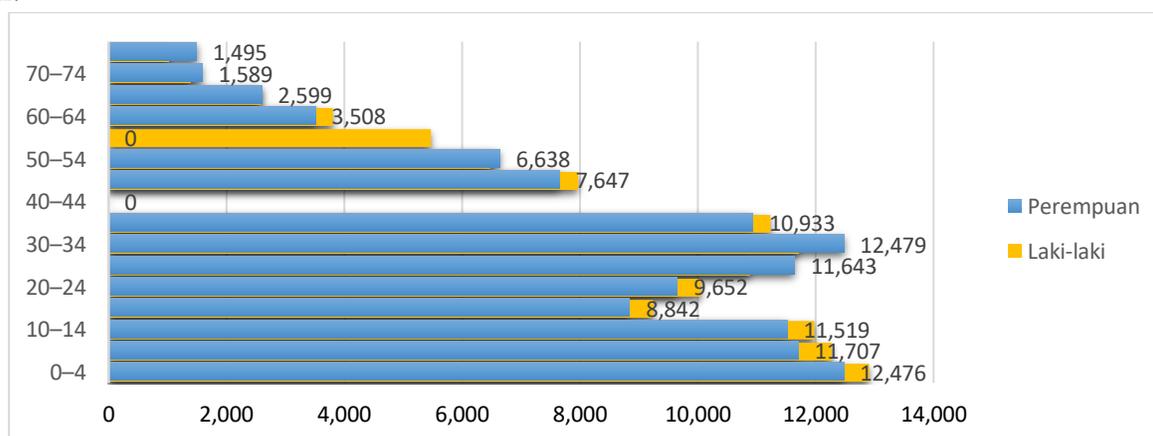
Data terkait jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin di Kota Banda Aceh Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.7 di bawah ini:

Tabel 2. 7 Jumlah Penduduk Kota Banda Aceh Berdasarkan Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin di Kota Banda Aceh Tahun 2021

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Total Penduduk	Persentase (%)
0-4	12.908	12.476	25.384	10.06
5-9	12.264	11.707	23.971	9.52
10-14	11.976	11.519	23.495	9.33
15-19	9.238	8.842	18.080	7.17
20-24	10.054	9.652	19.706	7.81
25-29	10.884	11.643	22.527	8.88
30-34	11.722	12.479	24.079	9.52
35-39	11.226	10.933	21.937	8.67
40-44	9.530	8.590	17.879	7.07
45-49	7.965	7.647	15.248	6.03
50-54	6.479	6.638	12.726	5.03
55-59	5.475	5.180	10.310	4.08
60-64	3.801	3.508	7.013	2.77
65-69	2.589	2.599	4.960	1.96
70-74	1.397	1.589	2.822	1.12
75+	1.024	1.495	2.425	0.96
Total	128.532	125.464	252.899	100.00

Sumber : Kota Banda Aceh Dalam Angka, 2022

Data terkait jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin di Kota Banda Aceh Tahun 2021 dapat dilihat pada Gambar 2.17 di bawah ini:



Sumber : Kota Banda Aceh dalam Angka, 2022

Gambar 2. 17 Jumlah Penduduk Kota Banda Aceh Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021





Tabel 2.7 dan Gambar 2.17 di atas menunjukkan bahwa berdasarkan kelompok umur, Sebagian besar penduduk Kota Banda Aceh berada pada kelompok kelompok umur 30-34 tahun sebesar 24.201 jiwa. Pada Tahun 2021 jumlah penduduk Kota Banda sebanyak 255.029 jiwa yang terdiri dari 128.532 jiwa laki-laki (50,40%) dan 126.497 jiwa perempuan (49,60%).

Permasalahan kependudukan yang terjadi di Kota Banda Aceh saat ini tidak jauh berbeda dengan kota-kota lain di Indonesia yang menjadi ibukota provinsi. Salah satu masalah yang terjadi ialah perpindahan penduduk dari daerah lain di Provinsi Aceh ke Kota Banda Aceh yang menyebabkan bertambahnya penduduk yang melakukan kegiatan ekonomi dan kegiatan lainnya di ibukota Provinsi. Daya tarik Kota Banda Aceh yang memiliki prasarana dan sarana yang relatif lebih baik dan berkualitas di bidang pendidikan, kesehatan, pariwisata, ekonomi, sosial dan bidang lainnya, telah menyebabkan bertambahnya jumlah penduduk di Ibukota Provinsi Aceh. Permasalahan lainnya yang muncul akibat perpindahan penduduk ini adalah meningkatnya permasalahan sosial yang selalu dihadapi oleh Pemerintah Kota Banda Aceh. Sehingga, Pemerintah Kota Banda Aceh harus memiliki program dan kegiatan prioritas dan strategis untuk mengatasi semua permasalahan kependudukan di tahun-tahun berikutnya.

Di samping itu, untuk mengetahui indikator kependudukan Kota Banda Aceh yang meliputi jumlah, pertumbuhan, kepadatan, dan sex ratio penduduk dapat dilihat pada Tabel 2.8 berikut ini:

Tabel 2. 8 Indikator Kependudukan Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah	Jiwa	259.910	265.11	270.321	252.899	255.029
Pertumbuhan	%	1,96	2,00	1,97	1,21	1,72
Kepadatan	Ribu Jiwa/ km ²	4,24	4,32	4,41	4,12	4,10
Sex Ratio	%	106,00	105,93	105,84	102	100,24

Sumber : BPS Kota Banda Aceh, 2022

Laju pertumbuhan penduduk Kota Banda Aceh mengalami peningkatan di tahun 2017 sampai dengan 2018, namun mengalami penurunan di tahun 2019 dan terus menurun di tahun 2020. Di tahun 2021, mengalami kenaikan kembali dari 1,21 menjadi 1,72 persen. Kepadatan penduduk Kota Banda Aceh mencapai 4.240 jiwa per km² di tahun 2017 dan terjadi penurunan sampai dengan tahun 2021 menjadi 4.100 jiwa per km². Penurunan jumlah kepadatan penduduk ini memberikan arti bahwa terjadinya pengurangan jumlah penduduk di daerah tersebut.

Ratio penduduk Kota Banda Aceh berdasarkan jenis kelamin masih didominasi oleh penduduk laki-laki dibandingkan dengan perempuan di tahun 2021. Data dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, ratio penduduk berdasarkan jenis kelamin menurun dari 106 menjadi 100,24. Artinya jumlah penduduk perempuan hampir menyamai jumlah penduduk laki-laki. Data tahun 2020 dan 2021 menunjukkan jumlah penduduk laki-laki mengalami penurunan dari 127.435 jiwa menjadi 125.795 jiwa dan jumlah penduduk perempuan meningkat dari 125.464 jiwa menjadi 125.493 jiwa.



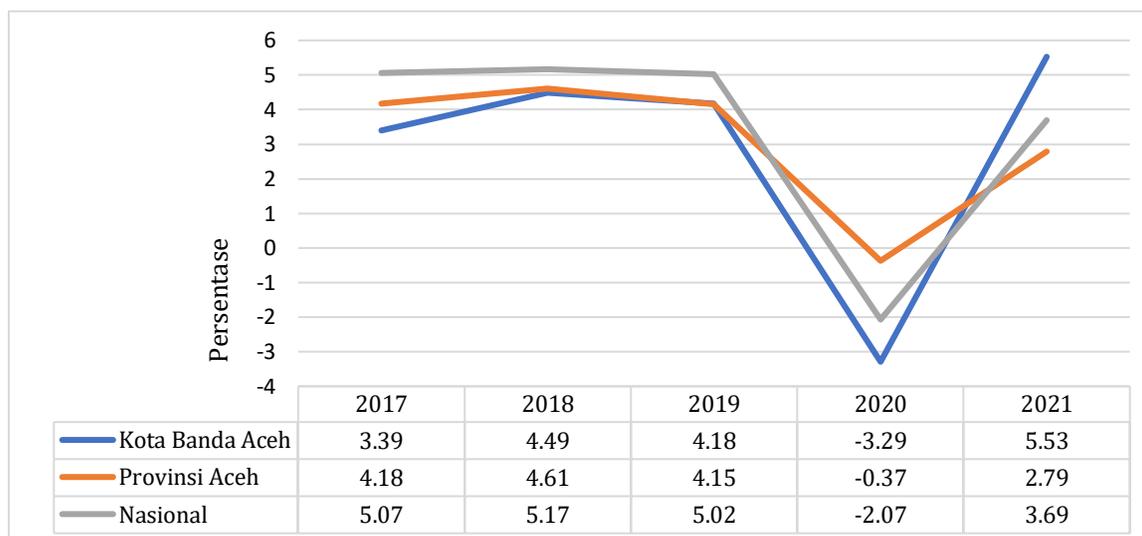


2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan pemerataan Ekonomi

A. Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Untuk mengetahui pertumbuhan PDRB Kota Banda Aceh selama periode 2016-2021 dapat dilihat pada Gambar 2.18 berikut ini:



Sumber : Kota Banda Aceh dalam Angka, 2022

Gambar 2. 18 Pertumbuhan Ekonomi Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2016-2021

Perekonomian Kota Banda Aceh sebagai kesatuan ekonomi yang menyeluruh digambarkan dengan PDRB menunjukkan trend yang fluktuatif. Setelah sempat mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada tahun 2016, namun perekonomian Kota Banda Aceh pada tahun 2017 mengalami pelambatan dari 6,31 menjadi 3,39. Kemudian pada tahun 2018 mulai membaik atau meningkat 1.1 persen dibandingkan tahun 2017. Hal ini didukung dengan adanya geliat pertumbuhan kegiatan ekonomi pada sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib. Namun, pertumbuhan ekonomi Kota Banda Aceh mengalami pelambatan kembali pada tahun 2019 dan 2020 akibat dari pandemi *Covid-19* yang menghambat berbagai kegiatan ekonomi di Kota Banda Aceh. Seluruh sektor mengalami pelambatan yang pada akhirnya menurunkan secara drastis pertumbuhan ekonomi di Kota Banda Aceh. Pelambatan terjadi pada tahun 2019 sebanyak 0.31 persen dibandingkan tahun 2018. Selanjutnya menurun drastis menjadi -3.29 di tahun 2020. Namun walau demikian, pasca pandemic *Covid-19*, pertumbuhan PDRB Kota Banda Aceh kembali meningkat menjadi 5,53 persen pada tahun 2021 yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang terus membaik.

Menurunnya nilai PDRB menunjukkan penurunan kinerja perekonomian. Pandemi *Covid-19* telah mengakibatkan penurunan perekonomian Kota Banda Aceh yang dilihat dari nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku selama lima tahun terakhir. PDRB ADHB secara rata-rata mengalami kenaikan sebesar Rp 497.160 milyar per tahun selama kurun waktu 2016-2020. Pada tahun 2020 PDRB meningkat sebesar Rp 2,48 triliun dari tahun 2016. Kenaikan PDRB selama 4 tahun terakhir disebabkan adanya peningkatan administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib. Selanjutnya sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor.





Kota Banda Aceh adalah pusat ibukota Provinsi Aceh menjadi tempat beraktivitas Pemerintahan Provinsi Aceh. Struktur Kota Banda Aceh hingga tahun 2020 masih didominasi oleh sektor jasa yakni Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dan kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Kedua kategori tersebut memiliki peranan yang besar hingga 43,15 persen terhadap pembentukan PDRB (masing-masing 23,11 persen dan 20,04 persen). Namun peranan kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor cenderung berkurang dari tahun ke tahun selama empat tahun terakhir (2017-2020).

Real estate dan jasa pendidikan mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir mengalahkan sektor konstruksi yang mengalami pelambatan akibat pandemi *Covid-19*. Pengerjaan beberapa proyek infrastruktur berskala besar seperti Trans Studio Mall yang terhenti akibat pandemi *Covid-19* menjadi kegagalan dalam kegiatan ekonomi sebagai penyumbang nilai tambah yang besar sekaligus meningkatkan percepatan laju pertumbuhan ekonomi Kota Banda Aceh secara keseluruhan.

Terdapat empat sektor yang tumbuh di atas 10 persen (dua digit) pada tahun 2021 yakni sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (23,73 persen), perdagangan besar dan eceran: reparasi mobil dan sepeda motor (21,11 persen). Sedangkan sektor lainnya masih dibawah 10 persen.

Tabel 2. 9 Nilai dan Kontribusi dalam PDRB Tahun 2017 s.d 2021 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Banda Aceh (Juta)

No	Sektor	2017		2018		2019		2020		2021	
		(Rp)	%								
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	169.581,90	1,02	196.534,68	1,12	219.587,40	1,18	235.258,97	1,29	253.950,00	1,27
2	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Industri Pengolahan	375.895,67	2,25	397.586,03	2,26	391.352,99	2,11	374.717,93	2,05	434.440,00	2,18
4	Pengadaan Listrik dan Gas	57.299,52	0,34	62.381,39	0,35	68.619,20	0,37	70.512,82	0,39	71.940,00	0,36
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	21.275,00	0,13	22.666,94	0,13	30.672,74	0,17	30.268,36	0,17	30.020,00	0,15
6	Konstruksi	1.094.651,67	6,56	1.109.652,67	6,30	1.123.549,33	6,05	1.275.724,80	6,98	1.194.850,00	5,99
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.581.302,77	21,46	3.736.127,84	21,20	3.877.084,47	20,88	3.665.509,40	20,04	4.208.230,00	21,11
8	Transportasi dan Pergudangan	1.779.691,32	10,66	1.698.411,74	9,64	1.685.943,99	9,08	1.233.937,57	6,75	1.714.520,00	8,60
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	675.797,24	4,05	755.782,47	4,29	831.088,67	4,48	772.038,32	4,22	767.320,00	3,85
10	Informasi dan Komunikasi	972.007,03	5,82	910.508,03	5,17	910.234,03	4,90	999.394,57	5,44	999.340,00	5,01
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	505.976,13	3,03	530.561,63	3,01	608.614,93	3,28	621.614,75	3,40	621.350,00	3,12
12	Real Estate	1.289.289,06	7,73	1.439.289,06	8,17	1.598.126,94	8,61	1.593.839,00	8,72	1.604.640,00	8,05
13	Jasa Perusahaan	403.150,50	2,42	425.150,50	2,41	463.428,00	2,50	454.110,00	2,48	475.350,00	2,38
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.791.531,33	22,72	4.131.531,33	23,45	4.280.948,72	23,05	4.226.810,00	23,11	4.729.950,00	23,73
15	Jasa Pendidikan	1.035.561,44	6,20	1.212.461,44	6,88	1.375.476,67	7,41	1.533.452,80	8,39	1.548.020,00	7,77
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	621.140,74	3,72	650.140,74	3,69	724.413,67	3,90	809.385,26	4,43	875.690,00	4,39
17	Jasa lainnya	315.068,20	1,89	341.068,20	1,94	380.133,74	2,05	396.017,58	2,17	403.010,00	2,02
	PDRB	16.689.219,38	100	17.619.854,62	100	18.569.275,19	100	18.287.592,13	100	19.932.650,00	100

Sumber: BPS Kota Banda Aceh, 2022

Dalam perubahan nilai PDRB atas dasar harga berlaku masih terdapat pengaruh perubahan harga sehingga dapat memberikan pengertian yang salah akan perkembangan perekonomian. Untuk itu agar dapat melihat perkembangan riil PDRB maka digunakan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) dengan tahun dasar 2012. Nilai PDRB ADHK Kota Banda Aceh pada tahun 2020 sebesar Rp 14,66 Juta, naik pada tahun 2021 sebesar 15,45 juta.





Tabel 2. 10 Nilai dan Kontribusi dalam PDRB Tahun 2017 s.d 2021 Atas Dasar Harga Konstan Kota Banda Aceh (Juta)

No	Sektor	2017		2018		2019		2020		2021	
		(Rp)	%								
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	138.368,42	0,99	148.509,89	1,02	162.470,76	1,07	170.013,74	1,16	170.110,00	1,10
2	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Industri Pengolahan	291.771,30	2,09	316.357,08	2,17	322.743,91	2,13	305.463,39	2,08	315.960,00	2,04
4	Pengadaan Listrik dan Gas	54.989,23	0,39	59.366,07	0,41	65.084,77	0,43	68.836,54	0,47	68.740,00	0,44
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	13.485,07	0,10	13.760,07	0,09	18.293,41	0,12	17.816,63	0,12	16.670,00	0,11
6	Konstruksi	963.815,81	6,92	964.615,81	6,63	965.826,09	6,37	1.049.201,14	7,15	1.019.220,00	6,60
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.916.498,17	20,93	3.020.064,45	20,75	3.099.741,43	20,44	2.890.617,62	19,71	3.073.180,00	19,87
8	Transportasi dan Pergudangan	1.757.196,81	12,61	1.778.835,45	12,22	1.816.923,93	11,98	1.281.757,15	8,74	1.711.310,00	11,07
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	463.636,66	3,33	498.013,96	3,42	528.232,09	3,48	464.693,46	3,17	447.920,00	2,90
10	Informasi dan Komunikasi	1.130.418,50	8,11	1.131.419,50	7,77	1.137.489,77	7,50	1.288.756,98	8,79	1.350.920,00	8,74
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	357.925,43	2,57	361.944,70	2,49	406.394,70	2,68	415.505,15	2,83	400.820,00	2,59
12	Real Estate	953.265,58	6,84	1.038.134,38	7,13	1.133.057,86	7,47	1.127.917,00	7,69	1.315.070,00	8,51
13	Jasa Perusahaan	323.968,16	2,32	340.959,76	2,34	359.843,18	2,37	345.917,00	2,36	348.240,00	2,25
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.962.550,37	21,26	3.162.532,67	21,73	3.257.167,17	21,48	3.206.042,00	21,86	3.346.180,00	21,65
15	Jasa Pendidikan	824.337,57	5,91	896.333,17	6,16	984.078,93	6,49	1.068.331,84	7,28	1.065.120,00	6,89
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	522.854,28	3,75	543.850,28	3,74	597.275,19	3,94	654.528,10	4,46	669.860,00	4,33
17	Jasa lainnya	262.020,09	1,88	282.220,03	1,94	310.354,93	2,05	310.890,33	2,12	315.030,00	2,04
	PDRB	13.937.101,46	100	14.556.917,28	100	15.164.978,10	100	14.666.288,07	100	15.454.370,00	100

Sumber: BPS Kota Banda Aceh, 2022

Bila dibandingkan untuk setiap lapangan usaha/ sektor ekonomi, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 pada masing-masing lapangan usaha ada yang meningkat namun ada juga yang mengalami penurunan dibandingkan di tahun 2019. Peningkatan laju pertumbuhan terbesar dialami sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib. Sektor ini mengalami peningkatan laju pertumbuhan sebesar 21,65 persen dibandingkan tahun 2020. Terdapat dua kategori berdasarkan PDRB ADHB dan ADHK yang tumbuh di atas 10 persen (dua digit) pada tahun 2021. Untuk PDRB ADHB, dua sektor tersebut yakni administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (23,75 persen) dan perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (21,11 persen). Sedangkan untuk PDRB ADHK juga hanya dua sektor dengan nilai persentase yang berbeda administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (21,65 persen) dan perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (19,87 persen).

Tabel 2. 11 Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2017 s.d 2021 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Harga Konstan (ADHK) Kota Banda Aceh

No	Sektor	2017		2018		2019		2020		2021	
		HB (%)	HK (%)								
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,02	0,99	1,12	1,02	1,18	1,07	1,29	1,16	1,27	1,10
2	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Industri Pengolahan	2,25	2,09	2,26	2,17	2,11	2,13	2,05	2,08	2,18	2,04
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,34	0,39	0,35	0,41	0,37	0,43	0,39	0,47	0,36	0,44
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,13	0,10	0,13	0,09	0,17	0,12	0,17	0,12	0,15	0,11
6	Konstruksi	6,56	6,92	6,30	6,63	6,05	6,37	6,98	7,15	5,99	6,60
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	21,46	20,93	21,20	20,75	20,88	20,44	20,04	19,71	21,11	19,87
8	Transportasi dan Pergudangan	10,66	12,61	9,64	12,22	9,08	11,98	6,75	8,74	8,60	11,07
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,05	3,33	4,29	3,42	4,48	3,48	4,22	3,17	3,85	2,90





No	Sektor	2017		2018		2019		2020		2021	
		HB (%)	HK (%)								
10	Informasi dan Komunikasi	5,82	8,11	5,17	7,77	4,90	7,50	5,44	8,79	5,01	8,74
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,03	2,57	3,01	2,49	3,28	2,68	3,40	2,83	3,12	2,59
12	Real Estate	7,73	6,84	8,17	7,13	8,61	7,47	8,72	7,69	8,05	8,51
13	Jasa Perusahaan	2,42	2,32	2,41	2,34	2,50	2,37	2,48	2,36	2,38	2,25
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	22,72	21,26	23,45	21,73	23,05	21,48	23,11	21,86	23,73	21,65
15	Jasa Pendidikan	6,20	5,91	6,88	6,16	7,41	6,49	8,39	7,28	7,77	6,89
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,72	3,75	3,69	3,74	3,90	3,94	4,43	4,46	4,39	4,33
17	Jasa lainnya	1,89	1,88	1,94	1,94	2,05	2,05	2,17	2,12	2,02	2,04
	PDRB	100									

Sumber: BPS Kota Banda Aceh, 2022

Untuk Distribusi PDRB berdasarkan pengeluaran dipengaruhi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga yang menunjukkan kontributor terbesar pada tahun 2016 sampai dengan 2020. Komponen ini terlihat mendominasi dalam PDRB yang melebihi 50 persen.

Tabel 2. 12 Distribusi PDRB Kota Banda Aceh Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Pengeluaran dan Laju Pertumbuhan PDRB Kota Banda Aceh Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Pengeluaran Tahun 2016-2020

Komponen	2016		2017		2018		2019		2020	
	HB (%)	HK (%)	HB (%)	HK (%)						
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	59,58	5,14	61,01	4,99	60,31	3,27	59,75	3,74	N/A	N/A
Pengeluaran Konsumsi LNPR	1,39	9,42	1,57	14,87	1,59	3,89	1,67	9,19	N/A	N/A
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	45,36	(23,10)	44,22	3,71	42,78	1,15	42,67	4,84	N/A	N/A
Pembentukan Modal Tetap Bruto	42,31	52,46	27,79	(32,21)	27,28	0,94	26,67	1,01	N/A	N/A
Perubahan Inventori	0,29	-	3,92	-	0,87	-	0,49	-	N/A	N/A
Net Ekspor	(27,83)	-	(20,10)	-	(15,93)	-	(15,23)	-	N/A	N/A
P D R B	100	5,93	100	3,29	100	4,49	100	4,18	N/A	N/A

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, 2021

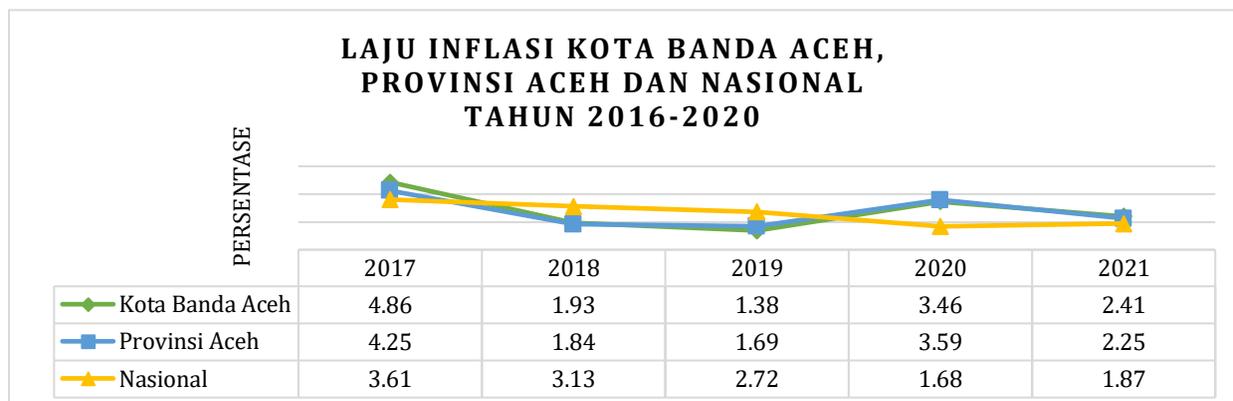
Di tahun 2016 sampai dengan 2019 peningkatan PDRB juga dipengaruhi oleh pengeluaran konsumsi pemerintah. Kenaikan kontribusi dalam komponen pengeluaran pemerintah mencapai 40-an persen. Komponen pembentukan modal tetap bruto mencapai 20-an persen. Namun, kontribusi net ekspor menurun dari negatif 27,83 persen menjadi negatif 15,23 persen. Pengeluaran pemerintah selain belanja modal juga mengalami refocusing anggaran akibat dari Pandemi COVID-19. Hal ini menyebabkan rendahnya serapan anggaran sehingga kontribusi komponen pengeluaran pemerintah terhadap pembentukan PDRB hanya sebesar 42,67 persen di tahun 2019. Kontribusi ini sangat menurun sedikit dari tahun sebelumnya yang mencapai 42,78 persen dimana tahun 2018. Penurunan kontribusi juga dialami komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang turun menjadi 59,75 persen dari tahun sebelumnya yaitu 60,31 persen.





B. Laju Inflasi

Laju inflasi adalah kenaikan atau penurunan inflasi dari periode ke periode atau dari tahun ke tahun. Laju inflasi di Kota Banda Aceh mengalami penurunan jika dibandingkan dari tahun 2017 sampai dengan 2021. Untuk mengetahui perbandingan tingkat inflasi di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Nasional selama periode 2017-2021 dapat dilihat pada Gambar 2.19 di bawah ini:



Sumber : Kota Banda Aceh dalam Angka (Beberapa Tahun), 2022

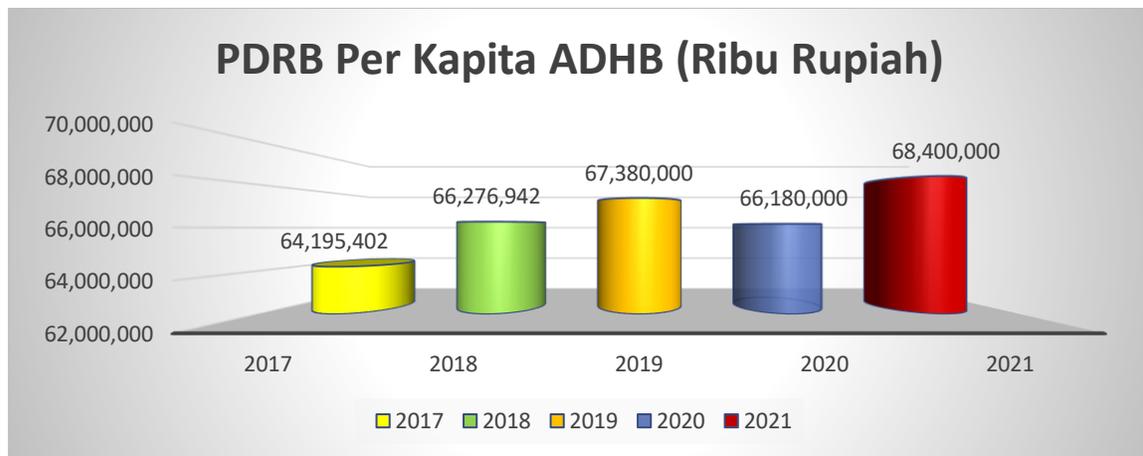
Gambar 2. 19 Grafik Laju Inflasi Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2017-2021

Gambar di atas menunjukkan laju inflasi Kota Banda Aceh pada tahun 2021 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2017. Pada tahun 2021 laju inflasi Kota Banda Aceh lebih tinggi dibandingkan laju inflasi Provinsi Aceh dan Nasional. Fluktuasi dari laju inflasi yang terjadi di Kota Banda Aceh menunjukkan adanya kejutan/shock yang disebabkan faktor-faktor penyebab inflasi baik dari sisi permintaan (masyarakat) atau yang lebih dikenal dengan istilah tarikan dari sisi permintaan (*demand pull inflation*) ataupun dari sisi penawaran (pelaku usaha) atau dikenal dengan istilah dorongan dari sisi penawaran (*cost push inflation*). Perhitungan inflasi ini menggunakan Indeks Harga Konsumen baru dengan tahun dasar 2012 sejak tahun 2014. Perbedaan perhitungan tahun dasar ini juga membedakan cakupan kota, paket komoditas, dan diagram timbang. IHK adalah salah satu indikator ekonomi yang sering digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga (inflasi/deflasi) di tingkat konsumen.

C. PDRB Perkapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari PDRB Per-Kapita yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh sebab itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita dan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. Semakin tinggi pendapatan per kapita sering dikaitkan dengan semakin baiknya tingkat kesejahteraan penduduk di daerah tersebut. PDRB per-Kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Untuk mengetahui nilai PDRB Per-Kapita Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021 atas dasar harga berlaku dapat dilihat pada Gambar 2.20 di bawah ini:





Sumber : BPS Kota Banda Aceh Tahun 2022

Gambar 2. 20 PDRB Per Kapita Kota Banda Aceh ADHB Tahun 2017-2021

Gambar 2.20 di atas menunjukkan bahwa PDRB per-Kapita Kota Banda Aceh atas dasar harga berlaku selama periode Tahun 2017 sampai Tahun 2019 mengalami kenaikan yang signifikan. Pada Tahun 2019, PDRB per-kapita Kota Banda Aceh atas dasar harga berlaku sebesar 67,380 juta rupiah. Pada Tahun 2020 PDRB per-kapita Kota Banda Aceh menurun menjadi 66,180 juta rupiah. Hal ini dikarenakan pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)* yang melanda dunia, negara dan daerah sejak akhir Tahun 2019 yang lalu hingga saat ini, secara langsung membawa dampak negatif terhadap upaya meningkatkan pertumbuhan PDRB. Pada Tahun 2021 PDRB per-kapita Kota Banda Aceh kembali meningkat menjadi 68,400 juta rupiah.

Di samping itu, untuk mengetahui pertumbuhan PDRB per-Kapita Kota Banda Aceh atas dasar harga konstan dapat dilihat pada Gambar 2.21 di bawah ini:



Sumber : BPS Kota Banda Aceh (Beberapa Tahun), 2022

Gambar 2. 21 Pertumbuhan PDRB Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021

Berdasarkan Gambar 2.21 di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRB per-kapita Kota Banda Aceh atas dasar harga konstan Tahun 2017 sampai Tahun 2021 berfluktuasi setiap tahunnya. PDRB pada Tahun 2017 sampai 2019 masing-masing sebesar 3.39, 4.49 dan 4.18. PDRB pada Tahun 2020 menurun cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga menjadikan nilai PDRB pada Tahun 2020 merupakan PDRB terendah jika dibandingkan dengan tahun-tahun lainnya. Penurunan PDRB ini disebabkan karena adanya pandemi *Covid-19* yang melemahkan aktivitas perekonomian. Tahun 2021 PDRB Kota Banda Aceh kembali meningkat sebesar 5.53.





D. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensional yang melingkupi banyak faktor termasuk ketidakmampuan akses secara ekonomi, sosial, budaya, politik dan partisipasi dalam masyarakat. Arti kemiskinan lebih dari sekedar rendahnya tingkat pendapatan atau konsumsi seseorang dari indikator kesejahteraan terukur seperti garis kemiskinan, namun berkaitan juga dengan ketidakmampuan untuk mencapai aspek di luar pendapatan (*non-income factors*) seperti akses kebutuhan dasar, misalnya kesehatan, pendidikan, air bersih dan sanitasi. Mengingat multidimensionalnya permasalahan kemiskinan, penanganannya memerlukan pendekatan yang sistemik, terpadu dan menyeluruh.

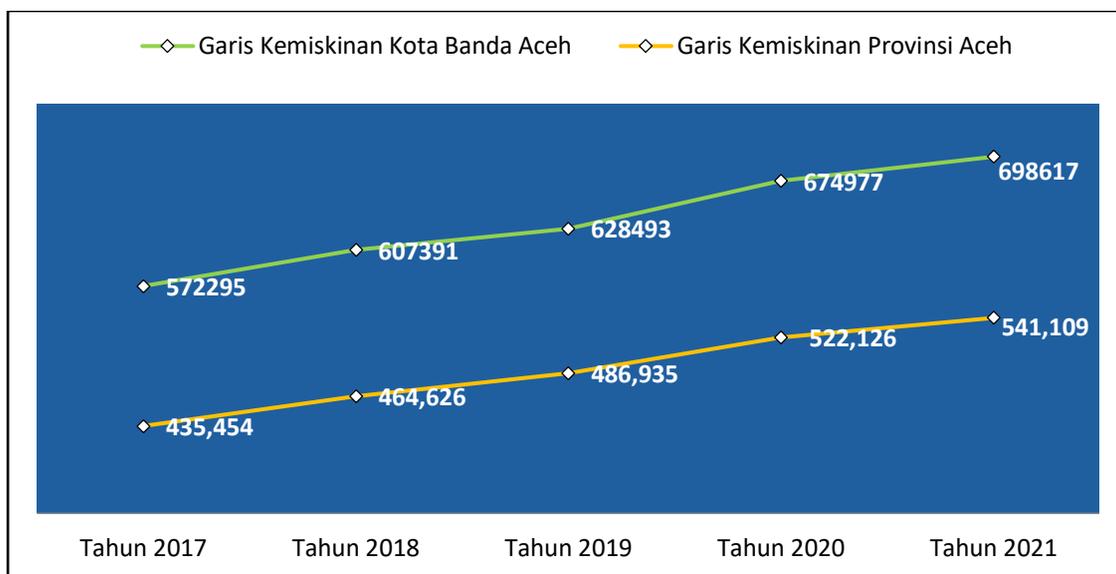
Kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin yang dipengaruhi oleh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Standar minimum disusun berdasarkan kondisi hidup suatu negara pada waktu tertentu. Dalam hal ini, perhatian terfokus pada golongan penduduk “termiskin” yang ditetapkan misalnya 20 persen atau 40 persen lapisan terendah dari total penduduk yang telah diurutkan menurut pendapatan/ pengeluaran. Kelompok ini merupakan penduduk relatif miskin. Ukuran kemiskinan relatif sangat tergantung pada distribusi pendapatan/pengeluaran penduduk sehingga dengan menggunakan definisi ini berarti “orang miskin selalu hadir bersama kita”. dengan menggunakan definisi ini, penduduk miskin di suatu negara kaya dapat dikategorikan sebagai penduduk sejahtera di negara berkembang seperti Indonesia. (Ravallion, 1998 : 26).

Selain itu, juga dikenal terminologi kemiskinan lain seperti kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Soetandyo Wignjosoebroto dalam “Suyanto (1995:59) mendefinisikan bahwa “Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang ditengarai atau didalihkan bersebab dari kondisi struktur, atau tatanan kehidupan yang tak menguntungkan”. Dikatakan tak menguntungkan karena tatanan itu tak hanya menyebabkan kemiskinan, akan tetapi juga melanggengkan kemiskinan di dalam masyarakat.

Kemiskinan kultural disebabkan oleh faktor-faktor adat dan budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang sehingga ia tetap melekat dengan indikator kemiskinan. Dalam hal ini, faktor-faktor adat dan budaya justru menyebabkan seseorang tetap dalam kemiskinan. Hal ini seperti yang dialami oleh suku terasing yang terikat dengan tradisi sosio-kultural seperti suku Badui, suku Dayak di pedalaman Kalimantan dan lain-lain. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan demikian, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan dapat diinterpretasikan sebagai jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Untuk mengetahui Garis Kemiskinan Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Gambar 2.22 di bawah ini:





Sumber : Banda Aceh dalam Angka Tahun (Beberapa Tahun), 2022

Gambar 2. 22 Garis Kemiskinan Kota Banda Aceh dan Provinsi Aceh Tahun 2017-2021

Gambar 2.22 di atas membandingkan antara garis kemiskinan Kota Banda Aceh dan garis kemiskinan Provinsi Aceh. Berdasarkan gambar diatas terlihat bahwa garis kemiskinan Kota Banda Aceh berada di atas garis kemiskinan Provinsi Aceh selama periode 2017-2021. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran per-kapita per-bulan penduduk Kota Banda Aceh lebih tinggi dari pengeluaran per-kapita penduduk Provinsi Aceh. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per-kapita per-bulan di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Meskipun garis kemiskinan Kota Banda Aceh masih lebih baik jika dibandingkan dengan Provinsi Aceh, namun garis kemiskinan Kota Banda Aceh selama periode 2017-2021 terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Dimana Tahun 2017 meningkat menjadi Rp 572.295 per bulan. Begitu juga untuk 4 (empat) tahun berikutnya (2019-2021), Garis Kemiskinan Kota Banda Aceh meningkat lagi menjadi masing-masing Rp 607.391; Rp 628.493; Rp 674.977; dan 698.617;. Salah satu faktor yang menyebabkan tingginya garis kemiskinan di Kota Banda Aceh selama ini adalah pengaruh mahalannya harga barang dan jasa yang mengakibatkan kenaikan harga umum.

Di samping itu, untuk mengetahui perkembangan tingkat kemiskinan di Kota Banda Aceh selam periode 2017-2021 dapat dilihat pada Gambar 2.23 di bawah ini:



Sumber : Banda Aceh dalam Angka Tahun (Beberapa Tahun), 2022

Gambar 2. 23 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021



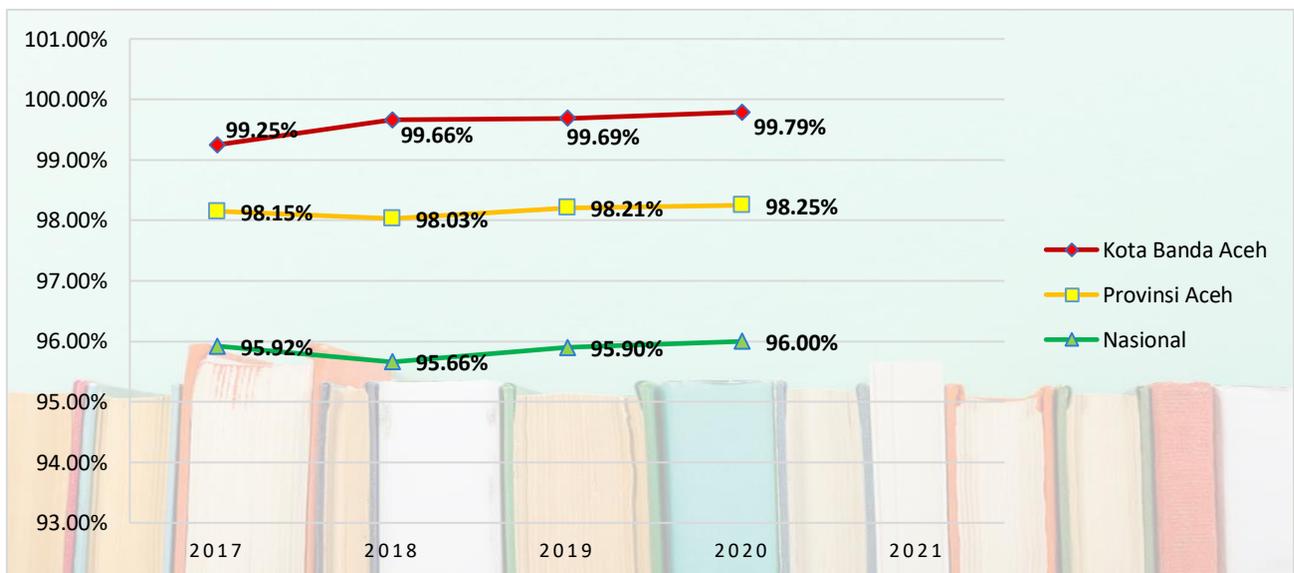


Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase penduduk miskin Kota Banda Aceh selama 5 tahun terakhir terus mengalami penurunan dari 7,44 persen di tahun 2017 menjadi 6,77 persen pada tahun 2021. Ini merupakan perkembangan yang sangat menggembirakan karena Kota Banda Aceh terus menuju pemberantasan kemiskinan. Dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional, angka kemiskinan Kota Banda Aceh masih lebih rendah dibandingkan keduanya. tingkat kemiskinan Aceh di 2021 sebesar 15,33 persen dan nasional sebesar 10,14 persen.

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

A. Angka Melek Huruf (AMF)

Angka Melek Huruf adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis. Angka Melek Huruf menjadi acuan pengembangan pendidikan di suatu daerah. Upaya pembangunan dan pengembangan pendidikan pada umumnya lebih diarahkan pada usaha memperluas kesempatan memperoleh pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan. Untuk mencapai hal tersebut pemerintah berupaya menyediakan sarana wajib belajar 6 tahun yang dicanangkan tahun 1984 menjadi wajib belajar 9 tahun yang dimulai tahun 1994. Dengan demikian diharapkan tingkat pendidikan penduduk menjadi lebih baik dan jumlah penduduk buta huruf akan berkurang terutama pada usia sekolah (7-18 tahun). Perkembangan AMH di Kota Banda Aceh, Aceh dan nasional, dapat dilihat pada Gambar 2.24 di bawah ini:



Sumber : BPS Kota Banda Aceh, BPS Aceh, dan BPS Pusat, 2022

Gambar 2. 24 Perkembangan Angka Melek Huruf Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2017-2021

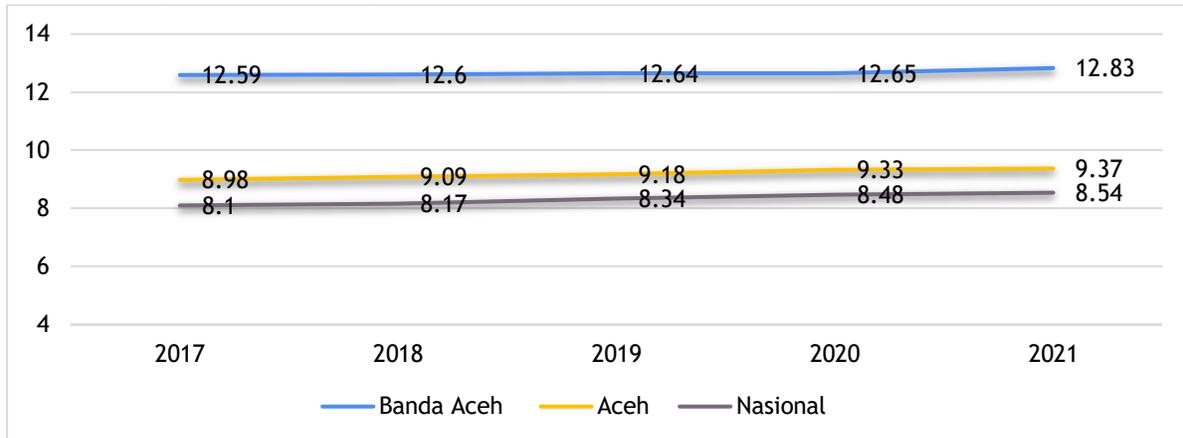
Berdasarkan Gambar 2.24 di atas, dapat dilihat persentase penduduk berumur 15 tahun keatas yang mampu baca tulis di Kota Banda Aceh pada tahun 2016-2020 terus meningkat. Secara rata-rata, perkembangan angka melek huruf di Kota Banda Aceh sebesar 99,58 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas masyarakat Kota Banda Aceh sudah sangat baik dari sisi literasi. Nyaris tidak ada penduduk Kota Banda Aceh yang tidak mampu baca tulis. Ini menunjukkan sistem pendidikan dasar yang dijalankan di Kota Banda Aceh telah berjalan efektif. Jika dibandingkan dengan Provinsi Aceh dan Nasional, Kota Banda Aceh memiliki angka melek huruf yang lebih tinggi daripada keduanya.





B. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Salah satu variabel dari komponen IPM yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat pendidikan penduduk suatu wilayah adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (tahun). Indikator ini menunjukkan sampai pada jenjang pendidikan apa secara umum tingkat pendidikan penduduk dewasa di suatu daerah. RLS merupakan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Grafik berikut menggambarkan perbandingan kondisi angka rata-rata lama sekolah di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dan Nasional selama lima tahun terakhir.



Sumber : BPS Kota Banda Aceh, BPS Aceh, dan BPS Pusat, 2022

Gambar 2. 25 Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dan Nasional Tahun 2017-2021

Rata-rata lama sekolah penduduk Kota Banda Aceh mencapai 12,83 tahun pada tahun 2021, artinya penduduk Kota Banda Aceh usia 15 tahun ke-atas sudah menyelesaikan pendidikan SMA sederajat. Angka rata-rata lama sekolah sejak tahun 2017-2021 di Kota Banda Aceh menunjukkan trend yang meningkat. Angka rata-rata tersebut mengalami peningkatan dari 12,59 tahun pada tahun 2017 menjadi 12,83 tahun pada tahun 2021. Pencapaian angka pada tahun 2017 sampai dengan 2021 tersebut sudah memenuhi target pencapaian nasional rata-rata 12 tahun. Jika dibandingkan dengan Provinsi Aceh dan Nasional, penduduk usia sekolah di Kota Banda Aceh mendapatkan masa pendidikan jauh lebih lama dibandingkan rata-rata lama sekolah pada Provinsi Aceh dan Nasional.

C. Persentase Balita Gizi Buruk / Kurang

Penanganan masalah gizi sangat terkait dengan strategi dalam menciptakan SDM yang sehat, cerdas, dan produktif. Upaya peningkatan SDM yang berkualitas dimulai dengan cara penanganan pertumbuhan anak sebagai bagian dari keluarga dengan asupan gizi dan perawatan yang baik. Oleh karena status gizi mempengaruhi kecerdasan, daya tahan tubuh terhadap penyakit, kematian bayi, kematian ibu dan produktivitas kerja. Anak-anak umur 0-5 tahun merupakan golongan yang paling rawan terhadap gizi, anak-anak biasanya menderita bermacam-macam infeksi serta berada dalam status gizi rendah bahkan buruk. Gambar 2.26 berikut ini menunjukkan jumlah kasus Balita Gizi Buruk/Kurang di Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021 :





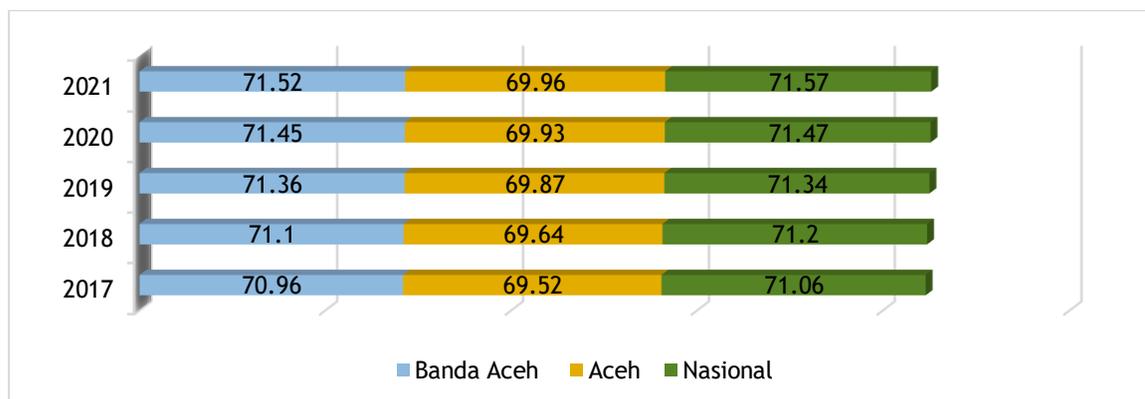
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, 2022

Gambar 2. 26 Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk/Kurang Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021

Gambar 2.26 di atas menunjukkan jumlah balita gizi buruk/kurang di Kota Banda Aceh selama periode 2017-2021 cenderung mengalami peningkatan, kecuali pada Tahun 2020 dimana terjadi penurunan jumlah kasus menjadi 10 kasus dari tahun sebelumnya sebanyak 12 kasus. Kemudian pada Tahun 2021, jumlah kasus mengalami peningkatan menjadi 24 kasus. Pada Tahun 2018 dan 2019 sistem pelaporan sudah menggunakan aplikasi e-PPBGM (elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat), dimana data pemantauan status gizi anak sudah semakin akurat, sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya masih menggunakan mode pencatatan dan pelaporan manual. Namun, peningkatan kasus juga berarti tugas besar bagi tenaga kesehatan untuk meningkatkan upaya sejak promotif, kuratif dan rehabilitatif. Hingga saat ini semua kasus yang ditemukan sudah ditangani 100 persen. Ditemukan lebih banyak kasus gizi buruk/kurang bagi anak balita yang ditelantarkan atau disebabkan karena penyakit penyerta dimana diprioritaskan penyembuhan bagi penyakitnya terlebih dahulu baru secara bertahap faktor kecukupan gizi dapat ditingkatkan.

D. Angka Usia Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan. Gambar 2.27 menggambarkan perkembangan angka harapan hidup di Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021 dibandingkan dengan angka harapan hidup Provinsi Aceh dan Nasional:



Sumber : BPS Kota Banda Aceh, BPS Aceh, dan BPS Pusat, 2022

Gambar 2. 27 Angka Harapan Hidup Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021





Angka harapan hidup di Kota Banda Aceh secara konstan mengalami peningkatan dari 70,96 tahun 2017 menjadi 71,52 tahun 2021. Peningkatan AHH sejak 2017 sampai dengan 2021 menunjukkan derajat kesehatan penduduk Kota Banda Aceh sudah membaik. Gambaran perbandingan perkembangan AHH antara Banda Aceh, Aceh, dan Nasional pada tahun 2017– 2021 terlihat Kota Banda Aceh masih dibawah nasional namun sudah diatas Provinsi Aceh. Namun pencapaian tersebut tetap harus terjaga dan diupayakan terus meningkat karena Kota Banda Aceh masih dibawah nasional. Oleh karenanya program-program peningkatan derajat kesehatan masyarakat harus tetap dijalankan.

E. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survey. Dengan kata lain, TPAK adalah persentase jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. TPAK dapat mengidentifikasi besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi di suatu wilayah.

Tenaga kerja yang merupakan modal dasar dalam menggerakkan roda pembangunan pada suatu negara ataupun daerah. Sumber daya manusia yang berkualitas akan mempercepat pertumbuhan ekonomi kearah yang lebih tinggi. Permasalahan ketenagakerjaan menjadi isu disetiap daerah sehingga harus mendapatkan perhatian yang serius dari berbagai pihak baik pemerintah maupun swasta. Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah pokok yang harus merangkul swasta untuk bersama-sama mengurangi dan menuntaskan masalah ketenagakerjaan di Indonesia khususnya di Banda Aceh. Banyak yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan diantaranya dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan ketenagakerjaan. Kebijakan-kebijakan tersebut diwujudkan dalam usaha konkret, yaitu memperluas kesempatan kerja dan lapangan kerja serta meningkatkan mutu tenaga kerja. Gambaran kondisi ketenagakerjaan Kota Banda Aceh pada tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 13 Kondisi Ketenagakerjaan Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021

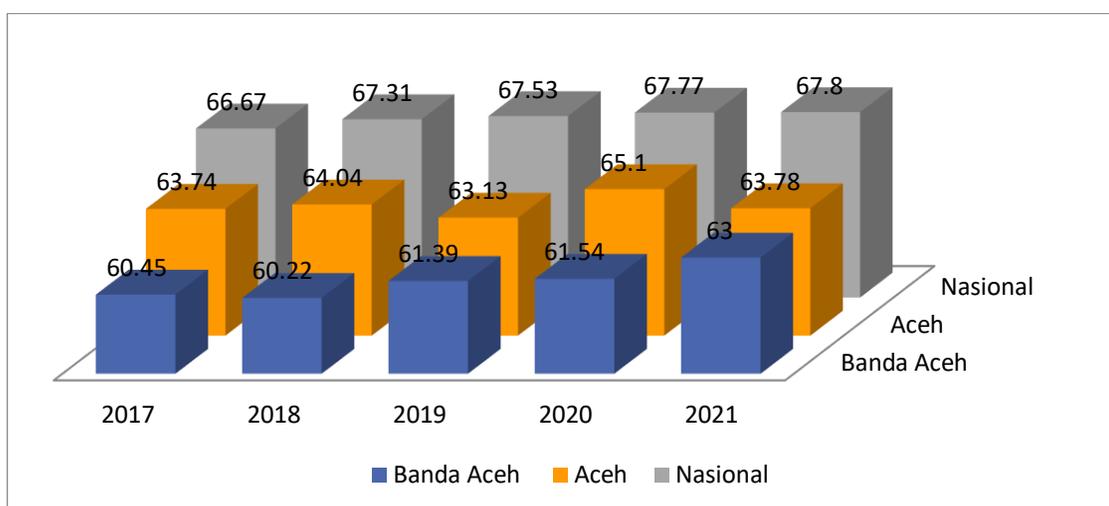
No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Angkatan Kerja (jiwa)	119.439	122.810	126.580	131.147	136.675
	- Bekerja	110.184	114.342	117.822	118.637	124.460
	- Pengangguran	9.255	8.925	8.758	12.510	12.215
2	Bukan Angkatan Kerja (jiwa)	78.157	78.934	79.605	79.605	80.277
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	60,45	60,22	61,39	61,54	63
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	7,75	7,29	6,92	9,54	8,94

Sumber : Badan Pusat Statitik Kota Banda Aceh, 2022

Data BPS untuk jumlah angkatan kerja di Kota Banda Aceh pada tahun 2017 tercatat 119.439 jiwa, pada tahun 2018 meningkat menjadi 122.810 jiwa. Jumlah angkatan kerja terus meningkat sampai dengan 2021 menjadi 136.675 jiwa.



Peningkatan jumlah angkatan kerja atau Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tersebut tidak dibarengi dengan perluasan lapangan kerja atau kapasitas produksi, akibatnya jumlah pengangguranpun meningkat seiring dengan peningkatan jumlah angkatan kerja. Jumlah pengangguran merupakan masalah yang sangat serius dan sangat mempengaruhi kondisi daerah, karena jumlah pengangguran merupakan indikator majunya perekonomian suatu daerah yang dapat menunjukkan tingkat distribusi pendapatan yang merata atau tidak di daerah tersebut. Selain masih terbatasnya lapangan pekerjaan, pengangguran di kota Banda Aceh disebabkan juga oleh beberapa faktor seperti arus urbanisasi dari daerah kabupaten lain ke Kota Banda Aceh untuk mencari pekerjaan, skill yang masih kurang dari pencari kerja yang tidak sesuai dengan standar dunia kerja dan masih kurangnya minat pencari kerja untuk berwirausaha secara mandiri.



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Gambar 2. 28 Grafik Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2017 – 2021

Dari Gambar 2.28 di atas, perkembangan TPAK setiap tahunnya semakin meningkat di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dan Nasional. TPAK Kota Banda Aceh selama beberapa tahun terakhir selalu lebih rendah daripada Provinsi Aceh dan Nasional. Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh sebagai dinas yang berhubungan langsung dengan pengangguran telah melakukan usaha-usaha pelatihan untuk meningkatkan keterampilan pencari kerja setiap tahunnya melalui BLK Kota Banda Aceh. Pelatihan-pelatihan yang telah dilakukan setiap tahun nya adalah sebagai berikut :

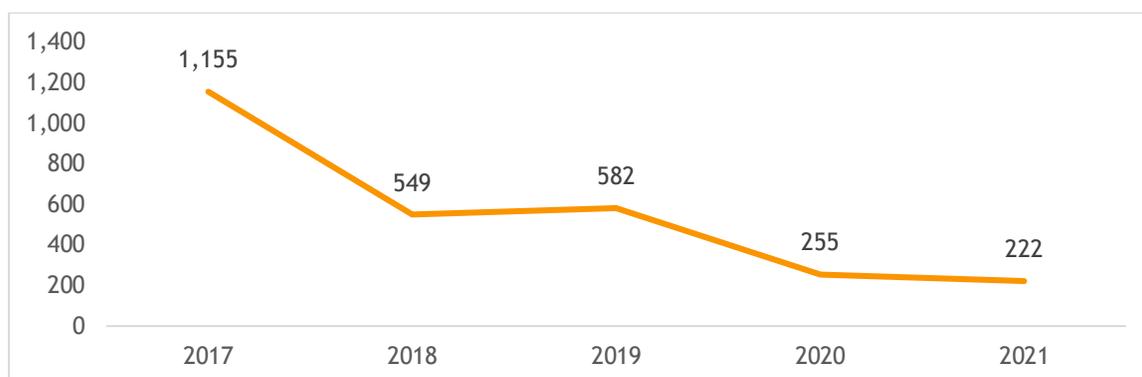
Tabel 2. 14 Jenis Pelatihan yang dilakukan Disnaker Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021

Kejuruan Pelatihan	Tahun					Jumlah
	2017	2018	2019	2020	2021	
Menjahit	20	102	96	80	32	410
Teknisi Cooling System	0	32	32	16	0	100
Teknisi Sepeda Motor	0	48	48	32	16	164
Las Listrik	20	32	32	32	36	172
Kewirausahaan Membuat Kue	40	102	102	32	32	270
Tata Rias dan Kecantikan	32	32	32	0	0	112
Operator Alat Berat	16	0	0	0	0	16
Pangkas	0	0	0	0	0	16
English for Tour Guides	0	20	20	0	0	20
Penggambaran Auto CD	0	0	0	0	16	32
Jumlah	128	362	362	192	132	1.312

Sumber: Disnaker Kota Banda Aceh, 2022



Tabel 2.14 menunjukkan secara rata-rata dalam 5 tahun terakhir (2017-2021), Pemerintah Kota Banda Aceh hanya mampu memberikan pelatihan untuk pengangguran/pencari kerja sebanyak 262 orang per tahun. Jika dibandingkan dengan rata-rata jumlah pencari kerja yang mencapai 552 orang per tahun, maka Kota Banda Aceh belum bisa memenuhi keseluruhan pencari kerja untuk mengikuti pelatihan yang diberikan. Jumlah pencari kerja di Kota Banda Aceh untuk periode 2017-2021 terlihat dalam gambar berikut:



Sumber: Disnaker Kota Banda Aceh, 2022

Gambar 2. 29 Jumlah Pencari Kerja Tahun 2017 – 2021

Pemerintah Kota Banda Aceh terus meningkatkan perbandingan antara jumlah pencari kerja terdaftar dengan pelatihan yang diberikan. Walaupun persentase antara para pencari kerja dengan pelatihan yang diberikan persentasenya masih belum mencapai 50 persen, namun jumlah capaian yang telah mencapai 47,5 persen menjadi keberhasilan Kota Banda Aceh.

F. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/ penduduk). Dengan kata lain, IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. IPM dapat digunakan sebagai data strategis untuk mengukur kinerja Pemerintah. Di Indonesia, IPM juga merupakan salah satu faktor penentu Dana Alokasi Umum (DAU).

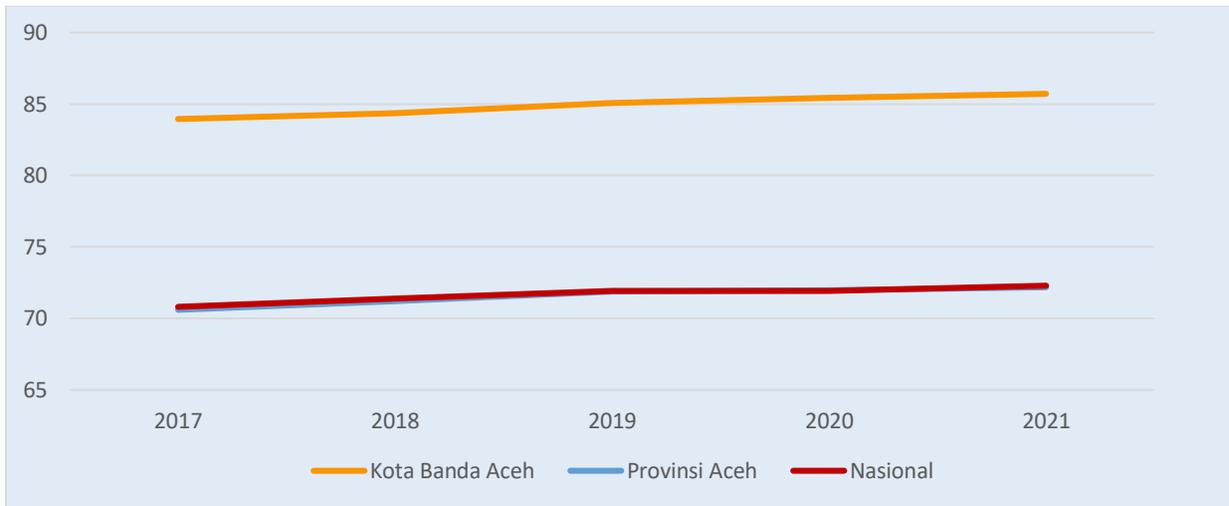
IPM digunakan dengan mengukur 3 dimensi, yaitu kesehatan, pengetahuan dan standar hidup layak. Ada 4 indikator yang digunakan yaitu angka harapan hidup saat lahir, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita disesuaikan. IPM juga dapat digunakan untuk membandingkan kualitas pembangunan manusia lintas daerah dan tingkat administrasi. IPM Kota Banda Aceh dibandingkan dengan Propinsi Aceh dan Nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 15 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2017-2021

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	IPM Nasional	70,81	71,39	71,92	71,94	72,29
2	IPM Provinsi Aceh	70,60	71,19	71,90	71,99	72,18
3	IPM Kota Banda Aceh	83,95	84,37	85,07	85,41	85,71
4	Pertumbuhan IPM Kota Banda Aceh	0,26	0,50	0,82	0,40	0,35

Sumber: BPS Kota Banda Aceh, BPS Aceh, dan BPS Pusat, 2022





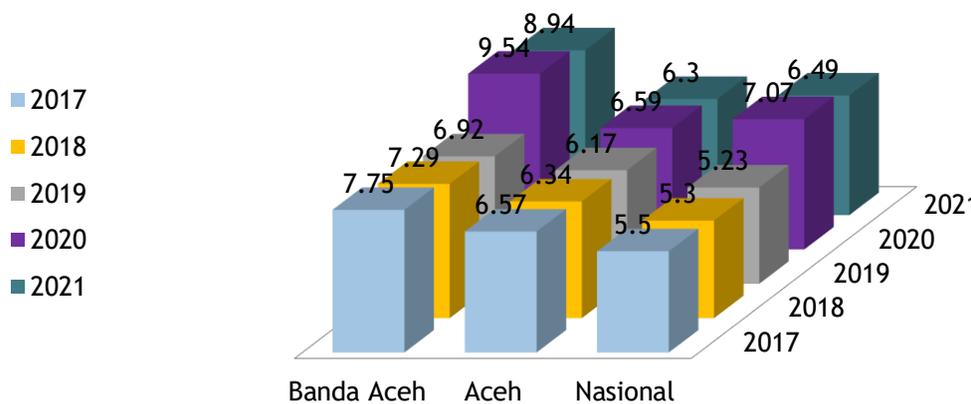
Sumber: BPS Kota Banda Aceh, BPS Aceh, dan BPS Pusat, 2022

Gambar 2. 30 Indeks Pembangunan Manusia Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dan Nasional Tahun 2017-2021

Berdasarkan Tabel 2.15 dan Gambar 2.30 di atas, dapat diketahui bahwa IPM Kota Banda Aceh menunjukkan trend yang terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Kota Banda Aceh terus membaik seiring berjalannya waktu. IPM Kota Banda Aceh telah melewati IPM Aceh dan Nasional. Kesenjangan IPM antara Banda Aceh dan Propinsi Aceh menunjukkan adanya kesenjangan kualitas pembangunan manusia antara Kota Banda Aceh dan kabupaten lainnya di Propinsi Aceh. Kesenjangan ini adalah salah satu pemicu tingginya migrasi penduduk terutama tenaga kerja ke Kota Banda Aceh.

G. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran merupakan masalah serius yang dihadapi berbagai negara di dunia, tingginya angka pengangguran akan berakibat pada lambannya jalan perekonomian. Pengangguran merupakan salah satu penyakit ekonomi yang harus dapat diatasi dengan baik. Pengangguran yang terlalu besar membawa efek terhadap permasalahan sosial kemasyarakatan, seperti meningkatnya angka kemiskinan, memperlambat proses pembangunan, meningkatnya angka kriminalitas dan lain sebagainya. Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terbuka terhadap jumlah angkatan kerja. Untuk mengetahui perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2017 – 2021 dapat dilihat pada Gambar 2.31 berikut ini:



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Gambar 2. 31 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2017-2021





Dari gambar diatas dapat dilihat Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Banda Aceh mengalami peningkatan dari 7,75 persen pada tahun 2017 menjadi 8,94 persen pada tahun 2021. Jika dibandingkan dengan TPT Provinsi Aceh dan Nasional, kondisi pengangguran di Kota Banda Aceh pada tahun 2017 sampai dengan 2021 berada diatas keduanya. Tingkat pengangguran yang tinggi ini, terutama di tahun 2020 dan 2021 sangat dipengaruhi dengan melambatnya kondisi ekonomi Kota Banda Aceh yang terimbas dengan adanya pandemi *Covid-19*. Selain dari pandemi *Covid-19*, faktor pendukung yang menjadi pemicu meningkatnya tingkat pengangguran terbuka di Kota Banda Aceh adalah kurang tersedianya lapangan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian dan kemampuan sebagian angkatan kerja. Hal ini berdampak pada melambatnya perekonomian Kota Banda Aceh, ditambah lagi dengan kondisi melambatnya perekonomian secara nasional.

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

A. Kebudayaan

1. Jumlah Grup Kesenian

Kota Banda Aceh memiliki adat-istiadat serta berbagai kesenian yang menggambarkan dinamika yang ada dalam masyarakat, sekaligus sebagai potensi yang dimiliki masyarakat. Pengembangan seni budaya diharapkan dapat menjadi pendorong berkembangnya potensi daerah. Untuk mengetahui capaian kebudayaan Kota Banda Aceh yang diukur berdasarkan jumlah sanggar kesenian per 10.000 penduduk periode Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.16 di bawah ini:

Tabel 2. 16 Capaian Kebudayaan Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021

No	Capaian Pembangunan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk.	66	70	73	73	73

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh, 2022

Tabel 2.16 di atas menunjukkan bahwa jumlah sanggar kesenian mengalami peningkatan dari tahun 2017 hingga tahun 2019. Jumlah grup kesenian tahun 2018 meningkat dibandingkan tahun 2017, dan terus meningkat di tahun 2019 sampai dengan 2021 menjadi 73 grup. Pemerintah Kota Banda Aceh akan terus melakukan pemberdayaan dan pembinaan terhadap sanggar-sanggar seni yang ada di Kota Banda Aceh untuk bisa tampil pada pentas seni budaya di tingkat Provinsi Aceh dan Nasional.

B. Pemuda dan Olahraga

1. Jumlah Klub Olahraga

Pembangunan pemuda dan olahraga bertujuan untuk membangun penduduk yang sehat secara jasmani dan rohani dan pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas, terutama generasi muda. Pembangunan pemuda dan olahraga di Kota Banda Aceh dilakukan dengan melakukan pemberdayaan pemuda dan olahraga melalui dorongan, dukungan dan pembinaan.

Pemerintah Kota Banda Aceh terus berusaha meningkatkan pembinaan olahraga melalui Dinas Pemuda dan Olahraga dan instansi terkait lainnya dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Untuk mengetahui perkembangan olahraga di Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.17 di bawah ini:





Tabel 2. 17 Perkembangan Olahraga Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021

No	Capaian Pembangunan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Klub Olahraga Per 10.000 Penduduk.	-	148	148	151	6
2	Jumlah Gedung Olahraga Per 10.000 Penduduk.	1	3	3	4	1

Sumber: Dispora Kota Banda Aceh, 2022

Berdasarkan Tabel 2.17 di atas dapat diketahui bahwa indikator kinerja olahraga mengalami peningkatan. Klub Olahraga per 10.000 penduduk di Kota Banda Aceh pada Tahun 2016 berjumlah 32 Klub, dan mengalami peningkatan signifikan menjadi 148 klub pada Tahun 2018 dan 2019. Pada Tahun 2020, jumlah ini menjadi 151 klub, menjadi mengalami penambahan sebanyak 3 klub dibandingkan pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 jumlah klub olahraga per 100.00 penduduk. Tahun 2017 tidak tersedia data. Hal ini disebabkan adanya perubahan kelembagaan yang menangani urusan kepemudaan dan olahraga dari Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga (Disdikpora) menjadi Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora). Untuk indikator gedung olahraga per 10.000 penduduk di Kota Banda Aceh, pada tahun 2017 jumlahnya 1 gedung dan mengalami peningkatan menjadi 3 gedung pada tahun 2018 dan tahun 2019. Pada tahun 2020 jumlah gedung olahraga menjadi 4 unit. Tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 1 gedung olahraga.

Secara keseluruhan, capaian indikator perkembangan olahraga di Kota Banda Aceh sudah baik. Namun demikian, perlu dilakukan pembangunan dan pembinaan yang berkelanjutan. Selain untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Dispora Jumlah Sarana dan Prasarana yang Sesuai Standar, juga untuk menghasilkan atlet-atlet berprestasi baik tingkat lokal, nasional maupun internasional.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Keistimewaan

A. Syariat Islam

Urusan keagamaan merupakan salah satu urusan yang memiliki kedudukan signifikan dalam keseluruhan tatanan kehidupan di Provinsi Aceh. Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, pelaksanaan Syariat Islam di Aceh telah memiliki payung hukum yang kuat. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 ini merupakan pengakuan negara terhadap keistimewaan dan kekhususan Aceh. Pelaksanaan Syariat Islam meliputi ibadah, ahwal alsyakhshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), qadha' (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam yang ketentuannya diatur dalam qanun (peraturan daerah). Kota Banda Aceh memiliki posisi strategis dalam pelaksanaan Syariat Islam ini. Sebagai Ibukota Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh menjadi barometer terhadap penerapan Syariat Islam. Kota Banda Aceh yang memiliki penduduk heterogen, merupakan tempat berkumpulnya orang dengan suku, adat istiadat, budaya, dan agama berbeda, sangat rentan terhadap pengaruh-pengaruh negatif.





1. Kemampuan Baca Al-Quran Siswa Tingkat Sekolah Menengah

Dalam implementasi Syariat Islam di Kota Banda Aceh, kemampuan baca Al-Qur'an siswa di Tingkat Sekolah Menengah dijadikan sebagai salah satu keberhasilan dalam menerapkan Syariat Islam di Aceh umumnya dan Kota Banda Aceh khususnya. Untuk mengetahui persentase siswa Menengah Pertama yang mampu baca Al-Qur'an di Kota Banda Aceh selama periode Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.18 berikut ini:

Tabel 2. 18 Persentase Siswa Menengah Pertama yang Mampu Baca Al-Qur'an Kota Banda Aceh, 2017-2021

No	Capaian Pembangunan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase siswa SMP dan SMA yang mampu Baca Al-quran	95,25	95,04	95,43	94,18	94,48

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

Berdasarkan Tabel 2.18 di atas dapat diketahui bahwa persentase siswa menengah pertama (SMP) yang mampu baca Al-Qur'an dari tahun 2016 hingga 2018 berfluktuasi. Namun persentase mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 94,18 persen dan pada tahun 2020 persentasenya adalah 94,48 persen. Sebagai catatan, data tahun 2016 merupakan persentase siswa SMPD dan SMA yang mampu baca Al-quran. Sejak tahun 2017 SMA tidak lagi menjadi kewenangan Kota Banda Aceh.

Walaupun persentase siswa menengah pertama berfluktuasi, namun secara keseluruhan angka ini menunjukkan capaian yang sangat baik karena persentasenya melampaui angka 90 persen. Pencapaian ini tidak terlepas dari program diniyah dan tahfiz yang telah diselenggarakan pada jenjang SMP sejak tahun 2012.

2. Kemampuan Baca Tulis Arab Jawi Siswa Sekolah

Kemampuan Baca Tulis Arab Jawi bagi siswa sekolah juga dijadikan salah satu metode untuk mengetahui sejauh mana Syariah Islam itu mampu diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Banda Aceh. Untuk mengetahui persentase siswa yang mampu baca tulis Arab Jawi dapat dilihat pada Tabel 2.19 berikut ini:

Tabel 2. 19 Persentase Siswa Yang Mampu Baca Tulis Arab Jawi Kota Banda Aceh, 2016-2020

No	Capaian Pembangunan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Siswa Yang Mampu Baca Tulis Arab Jawi	88,26	87,47	88,85	89,16	83,57

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

Tabel 2.19 di atas menggambarkan bahwa persentase siswa yang mampu baca tulis Arab Jawi di Kota Banda Aceh selama periode 2016-2020 berfluktuasi dan mengalami penurunan dimana pada tahun 2016 persentasenya adalah 88,26, turun menjadi 83,57 pada tahun 2020. Penurunan ini disebabkan karena tidak efektifnya pelaksanaan pembelajaran pada tahun 2020 karena pembatasan Pembelajaran Tatap





Muka (PTM) karena wabah *Covid-19*. PTM ditiadakan dan sebagai penggantinya adalah program belajar daring (BDR) dan sistem shift yang arah pembelajaran tidak untuk meningkatkan mutu belajar tetapi lebih diarahkan kepada pengembangan karakter dan life skill siswa. Hal tersebut memberi dampak menurunnya angka capaian siswa yang mampu baca tulis arab jawi.

Dukungan terhadap program diniyah dan tahfiz yang telah diselenggarakan sejak tahun 2012 akan terus dilakukan untuk meningkatkan persentase siswa yang mampu baca tulis arab jawi.

3. **Frekuensi Kegiatan Syiar dan Dakwah di Masyarakat**

Kegiatan syiar dan dakwah di masyarakat merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam (DSI). DSI melaksanakan kegiatan penguatan pemahaman dan pengamalan syariat Islam yang dirangkai dalam beberapa kegiatan, yaitu:

1. Safari dakwah (Safda) yang dilaksanakan setiap malam Ahad mulai Maghrib sampai Isya dengan mendatangi masjid-masjid secara bergantian dalam wilayah Kota Banda Aceh dengan sasaran utama yaitu meningkatkan kesadaran beribadah terutama shalat berjamaah dan membangun tanggung jawab bersama penegakkan syariat Islam dilingkungan masing-masing.
2. Dakwah umum Jumatan merupakan kegiatan unggulan pada Tahun 2015-2019 dengan mendatangkan penceramah kondang yang memiliki dedikasi tinggi untuk menginspirasi masyarakat Kota Banda Aceh dalam berdakwah.
3. Safari Da'iyah (Sa'idah) dilaksanakan oleh Da'iyah Kota Banda Aceh setiap ba'da Jumat di masjid-masjid dalam Kota Banda Aceh secara bergantian. Adapun sasaran kegiatan ini adalah ibu rumah tangga dengan menekankan pada penguatan fungsi ibu sebagai madrasatul'ula, membangun semangat beribadah dalam ruangan (memotivasi keluarga untuk shalat berjamaah) dan mencegah generasi muda dari kerusakan moral. Kegiatan ini pertama sekali dilaksanakan pada Tahun 2016,
4. Kajian pejabat, kegiatan ini dilakukan sebagai strategi peningkatan pemahaman dan pengamalan syariat Islam bagi pejabat Kota Banda Aceh agar dapat mengaktualisasikan nilai-nilai syariat dalam program kerja dinas masing-masing. Kajian ini bersifat konseptual, teoritik dan aplikatif.
5. Safari dakwah sekolah adalah safari dakwah di sekolah yang dilaksanakan setiap Jumat pagi di sekolah-sekolah dalam wilayah Kota Banda Aceh secara bergantian. Kegiatan ini melibatkan Da'i Kota Banda Aceh, kelompok kerja Da'i Penyelamatan Generasi Muda Islam (PGMI) dengan fokus kepada membangun semangat belajar, menghindari generasi muda dari pornografi dan narkoba.
6. Ceramah penyejuk hati dilaksanakan pada bulan Ramadhan bekerjasama dengan 10 radio selama 29 hari dan melibatkan da'i Kota Banda Aceh. Kegiatan ini ditayangkan menjelang berbuka puasa bagi masyarakat Kota Banda Aceh.





7. Dakwah Da'iyah Ramadhan yaitu kegiatan yang dilaksanakan oleh Da'iyah Kota Banda Aceh pada Bulan Ramadhan di masjid/meunasah di 90 gampong dalam wilayah Kota Banda Aceh. Kegiatan ini dilaksanakan di pagi hari pada pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai. Materi yang disampaikan berkisar masalah Fiqih Ramadhan, Tauhid dan Tasawuf dengan sasaran ibu-ibu majelis taklim gampong
8. Inspektur Upacara (IRUP) ke sekolah. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin sebagai IRUP di sekolah-sekolah dalam Kota Banda Aceh. Kegiatan ini sebagai wujud sosialisasi pelaksanaan qanun-qanun Syariat Islam serta pembangunan moralitas generasi muda.
9. Pelaksanaan Pengajian dan Zikir, Kegiatan ini merupakan kegiatan unggulan di Dinas Syariat Islam untuk menunjang misi Walikota Banda Aceh menjadikan Banda Aceh sebagai Kota Zikir. Kegiatan ini dilaksanakan di Pendopo Walikota Banda Aceh dan Masjid-Masjid dalam Wilayah Kota Banda Aceh.
10. Dakwah Warung Kopi, yaitu kegiatan dakwah yang dilaksanakan di warung-warung kopi mengingat Banda Aceh sebagai Kota Seribu Warung Kopi. Dengan banyaknya pengunjung merupakan salah satu langkah strategis untuk kegiatan usaha dakwah dilaksanakan. Tujuannya agar pelanggan warung tersebut dapat mendapatkan dakwah dan informasi keislaman.
11. Dakwah Keliling dilakukan secara rutin dalam rangka mensosialisasikan informasi – informasi Syariat Islam agar diketahui oleh masyarakat Kota Banda Aceh secara cepat dan sesuai dengan momen-momen yang ada. Agar masyarakat dapat mengetahui dan berpartisipasi dalam penegakan Syariat Islam.
12. Dakwah Online adalah salah satu kegiatan dakwah yang dilaksanakan melalui Media Sosial agar tersebarinya informasi keislaman dengan cepat dan meluas.

Untuk mengetahui frekwensi Syiar dan Dakwah yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam di Kota Banda Aceh selama periode Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.20 berikut ini:

Tabel 2. 20 Frekuensi Syiar dan Dakwah di Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021

No	Kegiatan	Frekwensi Pelaksanaan Pertahun (Kali)					Jumlah	%
		2017	2018	2019	2020	2021		
1	Safari Dakwah (Safda) Malam Minggu	44	44	44	44	36	212	10,44
2	Dakwah Umum Jumat	5	0	0	0	0	5	0,25
3	Safari Da'iyah (Jumat Siang)	44	44	44	32	44	208	10,25
4	Kajian Pejabat (Jumat Malam)	6	0	0	0	0	6	0,30
5	Safari Dakwah Sekolah	20	18	18	8	15	79	3,89
6	Ceramah Penyejuk Hati	290	290	290	0	0	870	42,86
7	Dakwah Da'iyah Ramadhan	90	90	90	0	0	270	13,30
8	IRUP ke Sekolah	15	15	0	0	0	30	1,48
9	Pelaksanaan Pengajian dan Zikir	0	33	28	15	5	81	3,99
10	Dakwah Warung Kopi	0	10	10	5	1	26	1,28
11	Dakwah Keliling	0	44	44	40	15	143	7,04
12	Dakwah Online	0	0	0	100	0	100	4,93
Total		514	588	568	236	124	2.030	100,00

Sumber : Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, 2022





Tabel 2.20 di atas menunjukkan bahwa selama periode 2017-2021, kegiatan syiar dan dakwah yang terbanyak dilakukan dalam rangka meningkatkan Syariat Islam di Kota Banda Aceh adalah kegiatan ceramah penyejuk hati yang dilakukan sebanyak 870 kegiatan (42,86%), diikuti oleh kegiatan dakwah da'iyah ramadhan sebanyak 270 kegiatan (13,30%), safari dakwah malam minggu sebanyak 212 kegiatan (10,44%), dan safari da'iyah (jumat siang) sebanyak 208 kegiatan (10,25%).

4. Jumlah Masjid yang Memenuhi Standar Kebersihan, Ketertiban, dan Aseksibel

Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh melaksanakan pembinaan manajemen kebersihan masjid berupa kegiatan pembinaan dan perlombaan kebersihan masjid. Kegiatan ini dilaksanakan setiap tahun dengan mengikut sertakan 9 masjid yang mewakili 9 (sembilan) kecamatan dalam wilayah Kota Banda Aceh. Kegiatan Lomba Kebersihan dan Ketertiban Masjid telah dilaksanakan sejak Tahun 2008. Untuk mengetahui jumlah masjid yang memenuhi standar kebersihan, ketertiban dan aksesibilitas dapat dilihat pada Tabel 2.21 di bawah ini :

Tabel 2. 21 Jumlah Masjid yang Memenuhi Standar Kebersihan, Ketertiban dan Aksesibilitas Tahun 2017-2021

No	Tahun	Jumlah Masjid	Masjid yang Memenuhi Standar Kebersihan	Masjid yang Ramah Disabilitas
1	2017	98	30	1
2	2018	112	33	3
3	2019	113	36	3
4	2020	114	36	3
5	2021	115	36	3

Sumber : Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, 2022

Berdasarkan Tabel 2.21 di atas menunjukkan bahwa selama periode Tahun 2017-2021, jumlah masjid di Kota Banda Aceh sudah mencapai 115 masjid yang tersebar di 9 (sembilan) kecamatan. Pada Tahun 2018-2021 terjadi penambahan jumlah masjid masing-masing 1 (satu) buah masjid. Di samping itu, dapat diketahui bahwa dari 115 masjid, terdapat 36 masjid yang memenuhi standar kebersihan dan 3 masjid yang ramah disabilitas.

Permasalahan yang dihadapi adalah masih terbatasnya jumlah masjid yang memenuhi standar kebersihan dan masjid yang ramah disabilitas. Atas dasar ini, maka Pemerintah Kota Banda Aceh untuk tahun anggaran depan akan mengutamakan program dan kegiatan prioritas di bidang Syariat Islam dalam rangka untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan dengan melakukan langkah-langkah strategis untuk menjadikan masjid sebagai tempat ibadah yang nyaman dan aman. Di samping itu, masjid juga dapat dinikmati oleh para penyandang disabilitas, sejalan dengan keinginan Pemerintah Kota Banda Aceh untuk menciptakan pembangunan yang inklusif. Masjid yang memenuhi standar kebersihan dan keamanan serta ramah bagi penyandang disabilitas akan mendorong perkembangan pariwisata.

5. Musabaqah Tilawah Quran (MTQ)

Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) merupakan ajang kreativitas bagi para qari-qariah, hafizh-hafizah, pensyarah dan penghapal Al-Qur'an. Khususnya untuk Kota Banda Aceh kegiatan MTQ sudah dilaksanakan secara kontinu setiap 2 (dua) tahun sekali dan sampai saat ini telah dilaksanakan sebanyak 35 kali. Demikian pula halnya dengan MTQ Aceh yang dilaksanakan secara rutin setiap dua tahun sekali yaitu pada setiap tahun ganjil. Untuk mengetahui secara rinci jumlah peserta MTQ





dari Kota Banda Aceh berdasarkan cabang-cabang MTQ yang diperlombakan dalam MTQ Tingkat Provinsi Aceh selama periode Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.22 di bawah ini:

Tabel 2. 22 Jumlah Peserta MTQ Kota Banda Aceh Berdasarkan Cabang MT yang diperlombakan dalam MTQ Tingkat Provinsi Aceh Tahun 2017-2021

No	Cabang-Cabang MTQ	2017	2018	2019	2020	2021
1	Tilawah	18	*)	17	*)	**)
2	Tafsir	6	*)	6	*)	**)
3	Tahfizh	10	*)	10	*)	**)
4	Fahmil Qur'an	6	*)	6	*)	**)
5	Syarhil Qur'an	6	*)	6	*)	**)
6	Khattil Qur'an	8	*)	8	*)	**)
7	MMQ	2	*)	2	*)	**)
	Total	56	-	55	-	**)

Sumber : Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, 2022

*) MTQ Tingkat Provinsi dilaksanakan pada Tahun Ganjil

***) Tidak dapat dilaksanakan MTQ Tingkat Provinsi dikarenakan Pandemi Covid-19 dan rencananya akan dilaksanakan pada Tahun 2022.

Tabel 2.22 di atas menunjukkan bahwa selama periode 2017-2021 Kota Banda Aceh mengikutsertakan seluruh cabang perlombaan MTQ pada MTQ Provinsi Aceh. Jumlah peserta untuk masing-masing cabang umumnya sama, kecuali untuk Cabang Tilawah, Syahril Qur'an dan Khattil Qur'an. Selama periode ini, Kota Banda Aceh sudah mengikutsertakan 158 peserta di MTQ Provinsi Aceh.

Dalam MTQ ini, Kota Banda Aceh memperoleh Peringkat 5 dari 23 kabupaten/kota yang mengikuti MTQ Tingkat Provinsi Aceh di Kabupaten Pidie Tahun 2019. Untuk mengikuti MTQ tersebut DSI telah melakukan pembinaan secara berkesinambungan yaitu TC Berjalan, TC Terpusat dan Try Out MTQ terhadap kafilah MTQ yang akan mengikuti MTQ Tingkat Provinsi Aceh di Kabupaten Pidie.

Permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan MTQ ini adalah penurunan realisasi capaian yang disebabkan oleh beberapa permasalahan, yaitu:

1. Rekrutmen dan pengkaderan

- 1) Masih kurangnya proses rekrutmen peserta mulai dari tingkat gampong, kecamatan dan tingkat Kota. MTQ tingkat Kecamatan mulai dilaksanakan Tahun 2018 sedangkan MTQ tingkat Gampong Tahun 2019.
- 2) Selama ini masih fokus pada beberapa cabang khusus saja seperti cabang Tilawah dan Tahfidz sedangkan cabang lain masih minim pengkaderan.
- 3) Belum adanya lembaga pendidikan khusus Ulumul Quran di Banda Aceh seperti MUQ di kabupaten/kota lain

2. Mekanisme pembinaan

1) Mekanisme pembinaan yang dilakukan Tahun 2019 meliputi 4 tahapan:

- Tahapan seleksi dan rekrutmen dengan menyeleksi juara 1,2,3 pada MTQ kecamatan pada Tahun 2018 di Kecamatan Banda Raya dan mencari bibit-bibit potensial lainnya berdasarkan rekomendasi dari dewan juri MTQ 2018 dan lembaga atau instansi pendidikan lainnya.
- Tahapan TC/pembinaan berjalan dilaksanakan 20 kali pertemuan masing-masing pertemuan 2 jam pelajaran.
- Tahapan TC/pembinaan Terpusat dilaksanakan 10 hari yang terbagi dalam 2 tahap (tahap 1 dan tahap 2)
- Tryout yang dilaksanakan sehari penuh dengan menampilkan seluruh cabang perlombaan.





- 2) Tahun 2019 khusus khatt pernah direncanakan mengirim calon peserta ke luar daerah namun terkendala dengan kesempatan peserta untuk mengikutinya, Alternatif lain mendatangkan pelatih dari luar namun waktu dan kesempatan belum terlaksana.

Tahun 2021 tidak dilaksanakan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) dan akan dilaksanakan pada tahun 2022. Untuk permasalahan yang telah disebutkan diatas, maka Pemerintah Kota Banda Aceh akan mengutamakan program dan kegiatan prioritas yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas peserta MTQ, sarana dan prasarana lain yang diperlukan dengan melakukan pembinaan secara berkelanjutan dan sistematis di bawah binaan LPTQ Kota Banda Aceh. Mengingat MTQ Tingkat Provinsi Aceh akan diadakan kembali pada Tahun 2021, maka langkah-langkah persiapan untuk meningkatkan realisasi target yang telah ditentukan dilakukan melalui:

- 1) Keberlanjutan pelaksanaan MTQ secara berjenjang mulai dari tingkat gampong sampai dengan kecamatan, langkah yang dilakukan mengalokasikan dana pembinaan MTQ di Tingkat Gampong dan Kecamatan.
- 2) Perhatian khusus pada cabang-cabang lainnya dalam hal pengkaderan langkah yang dilakukan dengan mengirimkan peserta cabang khat, tilawah dan tahfizh belajar keluar daerah.
- 3) Penguatan lembaga pendidikan khusus Ulumul Quran di Kota Banda Aceh dengan membentuk UPTD PPQ di Kota Banda Aceh.
- 4) Penguatan mental dan motivasi khusus bagi peserta MTQ dengan memberikan pelatihan penguatan mentalitas melalui sistem muhasabah dan outbound.
- 5) Monitoring dan evaluasi secara berkala dari pimpinan dengan senantiasa memantau perkembangan dan proses pembinaan terhadap kafilah.

B. Pendidikan Dayah

1. Jumlah Dayah, Guru dan Santri

Dayah memiliki peran dalam peningkatan sumber daya manusia terutama dalam mewujudkan Banda Aceh sebagai Kota Gemilang. Dalam konteks Banda Aceh saat ini dayah di Banda Aceh dibagi dengan 2 tipe dayah yaitu Salafi (tradisional) dan Terpadu (modern). Saat ini semua guru Dayah belum bersertifikasi karena belum ada format dari instansi pemerintah. Untuk itu perlu dipikirkan langkah-langkah strategis guna mewujudkan sertifikasi guru dayah. Terkait dengan akreditasi dayah saat ini dilakukan oleh Pemerintah Aceh. Berdasarkan Data dari Dinas Pendidikan Dayah Aceh hanya ada 4 (empat) Dayah yang telah terakreditasi yaitu Darul Ulum, Babun Najah, Inshafuddin dan Al Ishlah Al-Aziziyah. Jumlah dayah, jumlah guru dan jumlah santri Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.23 di bawah ini:

Tabel 2. 23 Jumlah Dayah, Guru dan Santri Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Dayah	29	32	42	45	38
2	Guru	693	719	899	901	819
3	Santri	5.875	5.890	6.404	6.451	5.934
Rasio Guru/Santri		1 : 8	1 : 8	1 : 7	1 : 7	1:7

Sumber: Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh, 2022





Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2021 jumlah dayah turun menjadi 38 dayah dibandingkan tahun 2020 sebanyak 45 dayah. Penurunan tersebut karena setelah dilakukan evaluasi terhadap dayah-dayah yang terdaftar dan dikategorikan sebagai dayah terdapat 7 dayah yang dikeluarkan dari katagori dayah sesuai dengan standar dayah di Kota Banda Aceh. Penurunan jumlah dayah tersebut mengakibatkan penurunan jumlah guru dan santri.

Sampai dengan tahun 2021, tenaga pengajar yang tersedia di 38 Dayah sebesar 819 Guru. Sementara Jumlah Santri nya sebesar 5934 Santri. Apabila ditinjau dari sisi rasio antara guru dan santri pada Dayah di Kota Banda Aceh selama periode 2017-2021 juga menggambarkan rasio yang relatif baik dan memadai. Meningkatnya jumlah dayah, guru, dan santri menjadi potensi besar dalam mendukung terciptanya Kota Syari'at Islam dalam rangka menyongsong Banda Aceh sebagai Kota Gemilang. Hal ini menjadi peluang dalam mewujudkan sinergisitas antara ulama dengan umara.

Untuk mengetahui jenis dan tipe Dayah di Kota Banda Aceh Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.24 berikut ini:

Tabel 2. 24 Jenis dan Tipe Dayah di Kota Banda Aceh Tahun 2019

No.	Nama Dayah	Alamat		Jenis Dayah	Tipe
		Gampong	Kecamatan		
1	Darul Ulum	Keuramat	Kuta Alam	Terpadu	A
2	Dayah Inshafuddin	Lambaro Skep	Kuta Alam	Terpadu	A
3	Dayah Al-Ikhlas	Beurawe	Kuta Alam	Salafiyah	Non Tipe
4	Raudhatul Muttaqin	Gp.Jawa Kec Kuta Raja	Kutaraja	Salafiyah	Non Tipe
5	Raudhatul Jannah	Ateuk Jawo	Baiturrahman	Salafiyah	Non Tipe
6	Markas Al Ishlah Al-Aziziah	Lueng Bata	Luengbata	Terpadu	B
7	Bustanul Amilin Ad-Daudiyah	Gp Blang Cut	Luengbata	Salafiyah	Non Tipe
8	Madinatul Fata	Lampeuot	Banda Raya	Salafiyah	B
9	Darul Muktari	Lhong Cut	Banda Raya	Salafiyah	Non Tipe
10	Darul Hijrah	Lamlagang	Banda Raya	Salafiyah	Non Tipe
11	Liwaul Mukhlisin	Lamlagang	Banda Raya	Salafiyah	Non Tipe
12	Fauzul karimah	Lam lagang	Banda Raya	Salafiyah	Non Tipe
13	Darul Anshar	Lamlagang	Banda Raya	Salafiyah	Non Tipe
14	Nidhamul Fata	Lamlagang	Banda Raya	Salafiyah	C
15	Babunnajah	Doy	Ulee Kareng	Terpadu	B
16	Darul Mu'allimin	Doy	Ulee Kareng	Salafiyah	Non Tipe
17	Darul Amin	Desa Ilie	Ulee Kareng	Salafiyah	Non Tipe
18	Raudhatul Jannah	Gp.Ilie	Ulee Kareng	Salafiyah	Non Tipe
19	Al-Islahiyah	Lambuk	Ulee Kareng	Salafiyah	Non Tipe
20	Darul Faizin	Lambuk	Ulee Kareng	Salafiyah	Non Tipe
21	Raudhatul Hikmah	Pango Raya	Ulee Kareng	Salafiyah	Non Tipe
22	Nurusshadiqah	Lamglumpang	Ulee Kareng	Salafiyah	Non Tipe
23	Dayah BTRG	Ceurih	Ulee Kareng	Salafiyah	Non Tipe
24	Babul Jannah	Ceurih	Ulee Kareng	Salafiyah	Non Tipe
25	Budi Muthmainnah	Ceurih	Ulee Kareng	Salafiyah	Non Tipe
26	Mabdaul Ulum Al-Aziziyah	Lamtemen Timur	Jaya Baru	Salafiyah	Non Tipe
27	Darul Fikri	Cot Lamkuweuh	Meuraxa	Salafiyah	Non Tipe
28	Mishrul Huda Malikussaleh	Lamjamee	Jaya Baru	Salafiyah	Non Tipe
29	Darul Mini Aceh	Alue Naga	Syiah Kuala	Salafiyah	Non Tipe
30	Mudhiatul Fata	Lampaseh Aceh	Kutaraja	Salafiyah	Non Tipe





No.	Nama Dayah	Alamat		Jenis Dayah	Tipe
		Gampong	Kecamatan		
31	Raudhatul Wustha	Bitai	Jaya Baru	Salafiyah	Non Tipe
32	Bahrul Fata	Deah Raya	Syiah Kuala	Salafiyah	Non Tipe
33	Al Fatani Darussalam	Punge Blang Cut	Jaya Baru	Salafiyah	Non Tipe
34	Nurul Falah Jadidah Aceh	Mibo	Banda Raya	Salafiyah	Non Tipe
35	Al Athiyah	Beurawe	Kuta Alam	Terpadu	Non Tipe
36	Bustanul Huda	Lambaro Skep	Kuta Alam	Salafiyah	Non Tipe
37	Baital Atiq	Bitai	Jaya Baru	Salafiyah	Non Tipe
38	Sirathal Mustaqim Misrul Muarrif Al Aziziyah	Surien	Meuraxa	Salafiyah	Non Tipe
39	Tahfidz Al Hanifi	Lamdingin	Kuta Alam	Salafiyah	Non Tipe
40	Al Mukmin	Lamgugop	Syiah Kuala	Salafiyah	Non Tipe
41	Al Huda	Emperom	Jaya Baru	Salafiyah	Non Tipe

Sumber: Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh, 2021

*) Untuk Tahun 2021 Akreditasi Dayah belum diterbitkan oleh Majelis Akreditasi Dayah Aceh (MADA)

Tipologi dayah pada tabel 2.24 diatas merupakan data tahun 2019, tipologi dayah tahun 2020 tidak dilakukan karena menunggu terbentuknya Majelis Akreditasi Dayah Aceh. Pada tahun 2021 akreditasi dayah belum diterbitkan oleh Majelis Akreditasi Dayah Aceh (MADA). Pengurus Majelis Akreditasi Dayah Aceh dikukuhkan tahun 2021. Penentuan Tipologi Dayah di seluruh Kab/Kota di Aceh dilakukan oleh Dinas Pendidikan Dayah (Disdik Dayah Aceh). Langkah awal sebelum melakukan penilaian Tipologi Dayah, Disdik Dayah Aceh melakukan rakor terpadu Dayah dengan melibatkan Disdik Dayah Kab/Kota dan Kanmenag Kab/Kota pada Tahun 2018.

Pada Tahun 2018 Disdik Dayah Banda Aceh mengusulkan 32 Dayah untuk diakreditasi dasar inilah kemudian Disdik Dayah Aceh membagikan borang Akreditasi kepada 32 Dayah yang ada di Banda Aceh. Tim Akreditasi melakukan survey di dayah yang ada di Banda Aceh. dari 32 Dayah yang ada di Banda Aceh pada Tahun 2018, hanya 16 Dayah yang mengembalikan borang Akreditasi (borang adalah instrumen penilaian akreditasi yang harus diisi). Sehingga pada saat keluarnya sertifikat Akreditasi Dayah di Tahun 2019 hanya 16 Dayah yang terakreditasi.

Tahun 2019 Adanya peningkatan Jumlah Dayah di Banda Aceh menjadi 42 Dayah. Dari 42 Dayah yang telah mendapat pengakuan Akreditasi hanya 6 Dayah yaitu: Darul Ulum (Areditasi A), Dayah Inshafuddin (Akreditasi A), Babun Najah (Akreditasi A), Markaz Al Ishlah Al Aziziyah (Akreditasi B), Madinatul Fata (Akreditasi B), serta Nidhamul Fata (Akreditasi C), sementara selebihnya dikualifikasi Dayah Non Tipe (Balai Pengajian).

Sejalan dengan telah dibentuknya Majelis Akreditasi Dayah, maka pelaksanaan Akreditasi Dayah di Tahun 2021, nantinya akan dilakukan pertengahan tahun 2022. Pola pendekatan Akreditasi Dayah Tahun 2021 berbeda dengan tahun 2018. Dimana Borang akreditasinya diklasifikasi menjadi tiga yaitu: Dayah Salafiyah (tradisional) Dayah Terpadu (Modern) serta Dayah Tahfidz. Pasca Akreditasi Dayah nantinya Disdik Dayah Banda Aceh akan melakukan evaluasi dimana Dayah yang nontipe akan dikualifikasi sebagai Balai Pengajian dan akan dihilangkan dalam data base dayah. Langkah ini dilakukan agar memudahkan dalam pembinaan kedepan. Sehingga yang benar-benar katagori dayah yang masuk dalam data base dayah, dayah non tipe akan dimasukkan kedalam data base Balai Pengajian.





C. Baitul Mal

Baitul Mal adalah Lembaga Daerah Non Struktural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan syariat, dan bertanggung jawab kepada Walikota. Badan Pelaksana Baitul Mal Kota Banda Aceh terdiri atas 4 (empat) Bidang, yaitu: 1) Bagian Pengumpulan; 2) Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan; 3) Bagian Sosialisasi dan Pembinaan,; serta 4) Bagian perwalian dan Harta Agama.

1) Penerimaan Zakat, Infaq dan Shadaqah

Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Baitul Mal terus meningkatkan upaya penerimaan zakat dari masyarakat. Sejak tahun 2017 penerimaan zakat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan, seiring dengan kesadaran dan kepercayaan masyarakat untuk membayar zakat di lembaga amil zakat pemerintah yaitu Baitul Mal Kota Banda Aceh. Selain zakat penghasilan, zakat perniagaan, infaq dan sadaqah. Baitul Mal juga melaksanakan pemotongan zakat pada setiap SP2D belanja daerah sesuai ketentuan yang telah ditetapkan melalui peraturan Walikota. Untuk mengetahui secara rinci tentang penerimaan zakat, infaq, dan sadaqah pada Baitul Mal di Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.25 di bawah ini:

Tabel 2. 25 Penerimaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah pada Baitul Mal Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021

Thn	Target	Realisasi Penerimaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (Ribu)				
		Zakat Penghasilan	Zakat Perniagaan	Infaq	Shadaqah	Jumlah
2017	18.604.500.000	11.142.052.723	2.406.302.868	1.083.732.234	7.856.690	14.639.943.416
2018	18.604.500.000	13.637.978.329	2.302.095.736	1.209.527.170	6.100.985	17.155.702.285
2019	19.604.500.000	14.011.017.230	1.175.188.643	1.268.791.804	6.360.321	16.461.357.998
2020	22.064.260.000	13.714.128.368	1.554.162.106	1.631.728.035	2.573.489	16.902.591.999
2021	24.349.130.000	11.182.953.209	1.275.607.379	1.640.282.993	4.430.860	14.103.274.443

Sumber : Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh, 2022

Berdasarkan Tabel 2.25 di atas menunjukkan realisasi penerimaan zakat, infaq dan sadaqah. Dari seluruh realisasi penerimaan yang ada, persentase penerimaan zakat yang berasal dari zakat penghasilan dan perniagaan masih lebih besar daripada penerimaan infaq dan sadaqah. Permasalahan yang dihadapi dalam upaya untuk meningkatkan sumber penerimaan dari zakat, infaq dan shadaqah di Kota Banda Aceh berkaitan dengan perencanaan, pendistribusian dan penerima zakat, infaq dan shadaqah.

2) Penyaluran Zakat, Infaq, dan Shadaqah

Penyaluran zakat, infaq dan shadaqah Kota Banda Aceh salah satunya dilakukan melalui pembangunan rumah dhuafa. Untuk mengetahui pembangunan Rumah Dhuafa dapat dilihat pada Tabel 2.26 di bawah ini:





Tabel 2. 26 Jumlah Rumah Dhuafa yang Dibangun Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021

Tahun	Jumlah Rumah (Unit)
2017	24
2018	24
2019	19
2020	20
2021	20
Jumlah	107

Sumber : Baitul Mal Kota Banda Aceh, 2022

Berdasarkan Tabel 2.26 di atas dapat diketahui bahwa selama periode 2017-2021 jumlah zakat, infaq dan shadaqah untuk telah digunakan untuk pembangunan rumah dhuafa sebanyak 107 rumah yang jumlahnya berfluktuasi setiap tahunnya. Penyaluran bantuan untuk pembangunan rumah dhuafa ini sangat bermanfaat bagi kaum dhuafa karena rumah merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari.

Permasalahan yang dihadapi adalah banyaknya kaum dhuafa yang membutuhkan bantuan rumah dhuafa sementara kemampuan keuangan yang bersumber dari zakat, infaq dan shadaqah masih sangat terbatas. Atas dasar ini maka pembangunan rumah dhuafa untuk kaum dhuafa harus berdasarkan kepada prioritas yang membutuhkannya.

Di samping itu, zakat, infaq dan shadaqah di Kota Banda Aceh juga diberikan dalam bentuk beasiswa untuk masyarakat miskin. Adapun jumlah penerima beasiswa miskin yang berasal dari penerimaan zakat di Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Tabel 2.27 di bawah ini:

Tabel 2. 27 Jumlah Penerima Beasiswa Miskin Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021 (jiwa)

Tahun	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA	Beasiswa ½ penuh	Beasiswa Tahfidz	Beasiswa santri Salafi	Total
2017	989	926	50	193	19	47	3.849
2018	991	926	64	199	15	39	2.234
2019	995	939	632	295	14	43	2.917
2020	991	992	87	396	13	39	2.506
2021	1.000	1.000	100	299	0	48	2.447
Jumlah	4.966	4.783	933	1.382	61	216	13.953

Sumber : Baitul Mal Kota Banda Aceh, 2022

Berdasarkan Tabel 2.27 di atas dapat diketahui bahwa jumlah penerima beasiswa miskin di Kota Banda Aceh yang bersumber dari zakat pada tahun 2017 dengan total penerima 3.849 jiwa. Beasiswa diberikan untuk berbagai tingkat pendidikan mulai dari SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA. Beasiswa juga diberikan untuk beasiswa tahfidz dan santri salafi. Pada tahun 2021, jumlah penerima beasiswa berkurang menjadi 2.447 siswa.

D. Majelis Permusyawaratan Ulama

Majelis Permusyawaratan Ulama yang disingkat dengan MPU adalah suatu lembaga independen dan bukan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dan DPRK. MPU merupakan wadah untuk meningkatkan peran ulama dalam pembangunan Kota





Banda Aceh. MPU merupakan mitra kerja Pemerintahan Daerah dan DPRK dalam perumusan Kebijakan Daerah, yang berfungsi ” memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan berdasarkan Syariat Islam serta memberikan nasehat dan bimbingan kepada masyarakat berdasarkan Syariat Islam ”. Sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama, maka MPU Kota Banda Aceh mempunyai tugas:

- 1) Memberi masukan, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Kota Banda Aceh dan DPRK dalam menetapkan kebijakan berdasarkan Syariat Islam
- 2) Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan daerah berdasarkan Syariat Islam
- 3) Melakukan pengkaderan Ulama.
- 4) Melakukan pemantauan dan kajian terhadap dugaan adanya penyimpangan kegiatan keagamaan yang meresahkan masyarakat serta melaporkannya kepada MPU.

Di samping itu, kewenangan MPU juga melaksanakan dan mengamankan fatwa yang dikeluarkan oleh MPU Aceh dan memberikan pertimbangan dan masukan kepada Pemerintah Kota Banda Aceh yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami.

1) Jumlah Fatwa, Himbuan, Tausiyah yang Ditetapkan Sesuai Dengan Ketentuan Syariat

MPU Kota Banda Aceh telah melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan secara proposional dan terstruktur pada sistem perencanaan, dan telah pula melakukan kegiatan yang didasari pada prakarsa insidental, temporal dan profesionalisme keulamaan dengan mengeluarkan keputusan keulamaan. Berikut Jumlah keputusan, hasil penellitian, surat edaran, rekomendasi/ saran/ nasehat, arahan, himbuan dan tausiyah yang dikeluarkan MPU Kota Banda Aceh selama periode Tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel 2.28 berikut ini :

Tabel 2. 28 Keputusan, Hasil Penelitian, Surat Edaran, Rekomendasi/Saran/ Nasehat, Arahan, Himbuan dan Tausiyah Yang Dikeluarkan MPU Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun					Jumlah
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Keputusan	-	-	10	1	-	11
2	Hasil Penelitian	1	-	1	-	-	2
3	Surat Edaran	-	-	-	-	-	0
4	Rekomendasi/Saran/Nasehat	1	-	4	4		9
5	Surat Arahan	-	-	15	-	-	15
6	Himbuan	-	-	-	9	-	9
7	Tausiyah	-	-	-	8	6	14
Jumlah		2	-	30	22	6	60

Sumber: Sekretariat MPU Kota Banda Aceh, 2022

Berdasarkan Tabel 2.28 di atas menunjukkan bahwa MPU Kota Banda Aceh selama periode Tahun 2017-2021 telah mengeluarkan 11 keputusan, 2 hasil penelitian, 0 surat edaran, 9 rekomendasi/saran/nasehat, 15 surat arahan, 9 himbuan dan 14 tausiyah.





2) Kewenangan MPU :

Kewenangan MPU Kota Banda Aceh terdiri dari:

- (1) Melaksanakan dan mengamankan fatwa yang dikeluarkan oleh MPU Aceh;
- (2) Memberikan pertimbangan dan masukan kepada Pemerintah Kota Banda Aceh yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami.

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh telah melaksanakan segenap kegiatan yang telah direncanakan secara proposional dan terstruktur pada sistem perencanaan, dan telah pula melakukan kegiatan yang didasari pada prakarsa insidental, temporal dan profesionalisme keulamaan dengan mengeluarkan Keputusan Keulamaan pada Tabel 2.29 di bawah ini :

Tabel 2. 29 Keputusan Keulamaan

No	Tahun	Keterangan
1	2016	a. Surat Keputusan hasil Mudzakah Ulama MPU Kota Banda Aceh dengan tema " Melalui Mudzakah Ulama Kita Tingkatkan Peran Pemerintah dalam Penetapan Mekanisme Pasar yang Syar'i"
		b. Surat keputusan hasil Rapat Kerja MPU Kota Banda Aceh dengan tema " Kemitraan MPU dan Pemerintah Kota dalam Meningkatkan Kinerja yang Bersyariah di Kota Banda Aceh"
		c. Surat Keputusan hasil Lokakarya Ulama dengan tema " Melalui Lokakarya Ulama Kota banda Aceh Kita Aktualisasikan Praktek Penyembelihan Yang Halal dan Higienis "
		d. Hasil Penelitian tentang Gampong Syariat di Kota Banda Aceh
		e. Tausiyah tentang Larangan Perayaan Valentine Day Bagi Umat Islam
		f. Rekomendasi MPU tentang Produk Makanan Halalan Thayyiban kepada Pemerintah Aceh
		g. Surat Arahan Kepada Pemko Banda Aceh tentang Hasil pembahasan terhadap penulisan Kaligrafi Asma'al-Husna pada Tugu Simpang Lima Kota Banda Aceh
		h. Surat Arahan kepada Pimpinan PT. Bintang Perkasa Indah Motor
		i. Surat Arahan kepada Ketua Stand-Up Comedy Banda Aceh
		j. Surat Arahan kepada Pimpinan CV. Cipta Bintang Manajemen
		k. Surat Arahan kepada CV. Mahkota Production selaku penyelenggara konser musik religi
		l. Surat Arahan kepada Pimpinan Boesa Management selaku penyelenggara Aceh Fashion Week
		m. Surat Arahan kepada Pimpinan CV. Mahkota Production selaku penyelenggara acara Signature Moment
2	2017	a. Hasil Penelitian Pemahaman dan Kesiapan Masyarakat terhadap Konsep Wisata Halal
		b. Rumusan hasil Mudzakah Ulama tentang wakaf tunai menuju pemberdayaan ekonomi umat
3	2018	a. Tidak ada keputusan apapun pada Tahun 2018 dikarenakan belum terbentuknya pengurusan baru MPU
4	2019	a. Surat Arahan untuk Kegiatan Malam Resepsi HUT Kota Banda Aceh ke-841
		b. Surat Arahan untuk Kegiatan PLN Aceh tentang "BUMN Hadir untuk Negeri di Provinsi Aceh Tahun 2019"
		c. Surat Arahan Kegiatan untuk Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh tentang "Pekan Kreatif Banda Aceh Tahun 2019"
		d. Surat Arahan Kegiatan untuk Bank Indonesia tentang " Festival Ekonomi dan Keuangan Syariah Aceh (Fesa) 2019"
		e. Surat Arahan Kegiatan untuk PT Era Baru Mandiri tentang " Amazing Muharram Hijrah & Ukhuwah"
		f. Surat Arahan kepada Dinas PU Kota Banda Aceh untuk Pembangunan Tugu Tauhid di Ulee Lheue
		g. Surat Arahan Kegiatan untuk Dinas Perhubungan Aceh tentang "Malam Keakraban Hari Perhubungan Nasional Tahun 2019"
		h. Surat Arahan Kegiatan untuk Zawiyah Nurun Nabi "Zikir Akbar, Shalawat dan Doa Bersama Masyarakat Kota Banda Aceh
		i. Surat Arahan Kegiatan untuk Teater Wanito Ngunandiko Yogyakarta
		j. Surat Arahan Kegiatan untuk Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh tentang "Banda Aceh Coffee Festival"
		k. Surat Arahan Kegiatan untuk Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh tentang "Aceh Agro Expo"





No	Tahun	Keterangan
		l. Surat Arahan Kegiatan untuk Dinas Koperasi dan UKM Aceh tentang "Aceh UMKM Expo 2019"
		m. Surat Arahan Kegiatan untuk BRI (Persero), Tbk tentang "Pesta Rakyat Simpedes BRI Tahun 2019"
		n. Surat Arahan Kegiatan untuk Gudang Garam tentang "Pawai Budaya Bersama Gudang Garam"
		o. Surat Arahan Kegiatan untuk Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh tentang "Kutaraja Festival"
		p. Keputusan Plt. Ketua MPU Kota Banda Aceh Nomor 451/01/2019 tentang Pelaksanaan Musyawarah Ulama Pembentukan MPU Tahun 2019
		q. Keputusan Plt. Ketua MPU Kota Banda Aceh Nomor 451/02/2019 tentang Penetapan Tim Penguji Baca Kitab Calon Anggota MPU Kota Banda Aceh, pada Musyawarah Ulama Kota Banda Aceh Tahun 2019
		r. Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 152 Tahun 2019 tentang Penetapan Anggota MPU Kota Banda Aceh Masa Khidmat 2019-2024
		s. Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 155 Tahun 2019 tentang Penetapan Pimpinan MPU Kota Banda Aceh Masa Khidmat 2019-2024
		t. Keputusan Ketua MPU Kota Banda Aceh Nomor 451/010/2019 tentang Pelaksanaan Sidang Paripurna - I Tahun 2019 MPU Kota Banda Aceh
		u. Keputusan Ketua MPU Kota Banda Aceh Nomor 451/011/2019 tentang Pembentukan Komisi-Komisi MPU Kota Banda Aceh Masa Khidmat 2019-2024
		v. Keputusan Ketua MPU Kota Banda Aceh Nomor 017/2019 tentang Pedoman Zakat Fitrah Tahun 2019
		w. Keputusan Ketua MPU Kota Banda Aceh Nomor 024/2019 tentang Identifikasi Aliran Sesat dan Wahabi Salafi
		x. Keputusan Ketua MPU Kota Banda Aceh Nomor 451/026 /2019 tentang Pelaksanaan Sidang Paripurna - II Tahun 2019 MPU Kota Banda Aceh
		y. Keputusan Ketua MPU Kota Banda Aceh Nomor 451/031/2019 tentang Pelaksanaan Sidang Paripurna - III Tahun 2019 MPU Kota Banda Aceh
		z. Saran dan nasehat tentang penolakan kedatangan DR. Firanda Andirja Lc, MA
		aa. Saran dan nasehat tentang Fungsi Masjid di Kota Banda Aceh
5	2020	a. Tausiyah MPU Kota Banda Aceh tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Siaga darurat <i>Corona virus Disease (Covid-19)</i> di Kota Banda Aceh
		b. Tausiyah MPU Kota Banda Aceh tentang Penyelenggaraan Ibadah Ramadhan Dalam Situasi pandemi <i>Corona Virus Disease (Covid-19)</i> di Kota Banda Aceh
6	2021	a. Tausiyah MPU tentang penyelenggaraan Ibadah Ramadhan dalam situasi pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) di Kota Banda Aceh
		b. Tausiyah MPU tentang Peperangan Ghaza Palestina dan Pencegahan COVID-19
		c. Tausiyah MPU tentang pelaksanaan Qurban 1441 h dan pelaksanaan ibadah sesuai protocol kesehatan di masa pandemic Covid-19
		d. Tausiyah MPU tentang Pemilihan Geuchik Langsung
		e. Tausiyah MPU tentang pemberian tahun Hijriah pada surat dinas
		f. Tausiyah MPU tentang Qanun penyelenggaraan pariwisata natal Kota Banda Aceh

Sumber : Sekretariat MPU Kota Banda Aceh, 2022

Sertifikasi produk halal dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dengan lembaga pelaksana Lembaga Pengkajian Pangan dan Obat-obatan, Kosmetika dan Makanan (LPPOM). Untuk mendapatkan sertifikasi tersebut, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan ke LPPOM MPU Aceh. Adapun persyaratan yang harus disiapkan oleh pelaku usaha sebagai pemohon, antara lain: KTP, Profil Perusahaan, matrik bahan baku dan diagram alur proses produksi. Tata cara sertifikasi halal dimulai dengan menyampaikan pengajuan permohonan sertifikasi halal kepada LPPOM MPU, melengkapi persyaratan yang diminta dan penjadwalan audit.

E. Majelis Adat Aceh

Adat dan Adat Istiadat merupakan salah satu pilar Keistimewaan Aceh, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun





2008 Tentang Lembaga Adat. Dengan demikian, Pemerintahan Aceh wajib melaksanakan pembangunan di bidang Adat dan Adat Istiadat.

Lembaga keistimewaan Aceh yang melaksanakan pembangunan bidang Adat Istiadat adalah Majelis Adat Aceh (MAA), sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, dan Qanun nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga-lembaga Adat. Selanjutnya, dikuatkan keberadaan Sekretariatnya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 33 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh.

Majelis Adat Aceh Kota Banda Aceh dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 48 Tahun 2011 untuk mengisi Keistimewaan Aceh dibidang Adat Istiadat yang merupakan seperangkat nilai-nilai keyakinan sosial yang tumbuh dan berakar dalam kehidupan masyarakat Aceh. Adat Istiadat tersebut telah memberikan sumbangan yang sangat berharga terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat. Majelis Adat Aceh Kota Banda Aceh merupakan lembaga non struktural berbasis masyarakat dan bersifat independen yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Kota Dalam menentukan kebijakan di bidang adat serta untuk melestarikan, membina, mengkaji dan mengembangkan Adat-istiadat.

F. Majelis Pendidikan Daerah

Majelis Pendidikan Daerah (MPD) merupakan sebuah lembaga setingkat Musyawarah Pimpinan Daerah sebagaimana lembaga Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU/MUI) dan Majelis Adat Aceh (MAA). Lembaga ini hanya ada di Aceh sebagai sebuah kekhususan Aceh yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia. MPD adalah lembaga yang mengkhususkan diri dalam urusan pendidikan. MPD Banda Aceh merupakan lembaga yang bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan satuan pendidikan maupun lembaga pemerintah lainnya. MPD lahir sejak Tahun 1990 di Banda Aceh yaitu sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 420/435/1990. Kemudian juga dilahirkan di seluruh kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

MPD Kota Banda Aceh telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan mutu Pendidikan khususnya Pendidikan dalam bidang agama islam yang diwujudkan dalam kurikulum Pendidikan diniyah mulai dari tingkat Pendidikan dasar sampai dengan menengah diseluruh wilayah Kota Banda Aceh, disamping itu peran lembaga ini juga memberikan berbagai pertimbangan kepada Pemerintah kota Banda Aceh dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.

1. Tugas Pokok MPD

- 1) Memberi pendapat dan pertimbangan mengenai pendidikan
- 2) Menyusun konsep-konsep pengembangan sistem pendidikan Islami
- 3) Mengawasi dan menilai pelaksanaan kebijakan dan program pendidikan
- 4) Menampung aspirasi masyarakat mengenai pendidikan dan mendorong partisipasi mereka dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan
- 5) Meningkatkan mutu dan menjaga standar mutu pendidikan di Provinsi Aceh





2. Fungsi MPD

- 1) Sebagai badan pemikir (*Think tank body*)
- 2) Sebagai badan pemberi pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah mengenai pendidikan (*advisory body*)
- 3) Sebagai badan penggerak masyarakat untuk berpartisipasi dalam membangun dan meningkatkan mutu pendidikan (*motivating body*)
- 4) Sebagai badan pengawas pelaksanaan kebijakan dan program-program pendidikan (*controlling body*)
- 5) Sebagai badan mediator antara masyarakat dan pemerintah serta antara sekolah, keluarga dan masyarakat (*mediating body*)

3. Kewenangan MPD

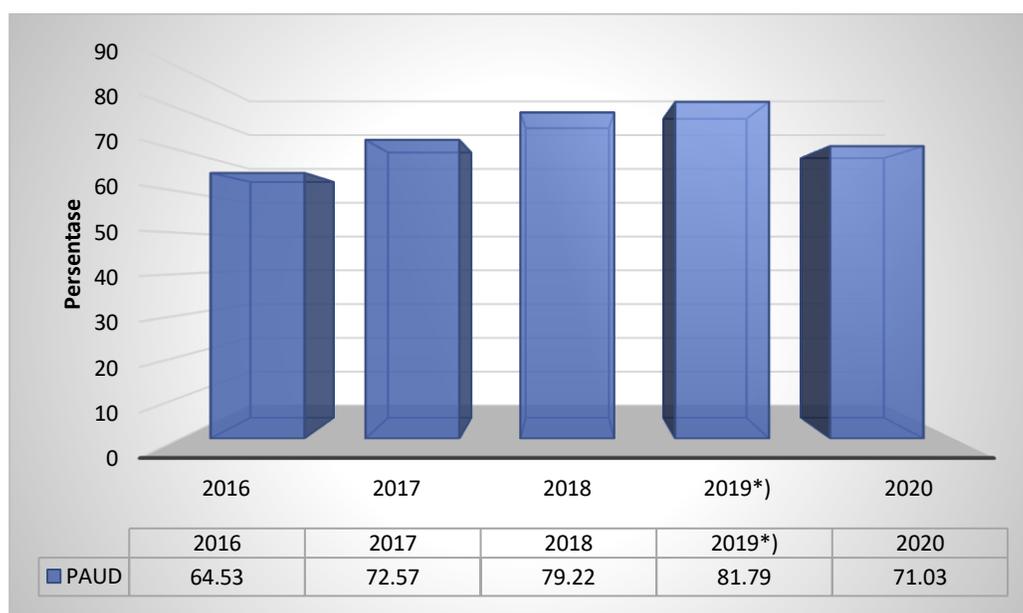
- 1) Mengawasi dan menilai penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan, baik negeri maupun swasta.
- 2) Memberikan pendapat dan pertimbangan dalam menyusun rancangan anggaran pendidikan Provinsi Aceh.
- 3) Menjaga standar mutu pendidikan.
- 4) Mengembangkan sistem pendidikan Islami di Provinsi Aceh.

2.1.3.2 Fokus Layanan Wajib Dasar

A. Pendidikan

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rancangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Pendidikan PAUD terdiri dari Taman Kanak-Kanak (TK) usia 4-6 tahun, Kelompok Bermain (KB) usia 2-4 tahun, Taman Penitipan Anak (TPA) usia 0-2 tahun, dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) usia 0-6 tahun. Perkembangan siswa PAUD di Kota Banda Aceh Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Gambar 2.32 berikut:



Sumber: Profil Pendidikan Kota Banda Aceh, 2021

*) Data 2019 disesuaikan

Gambar 2. 32 Perkembangan Siswa PAUD Kota Banda Aceh Tahun 2016-2020





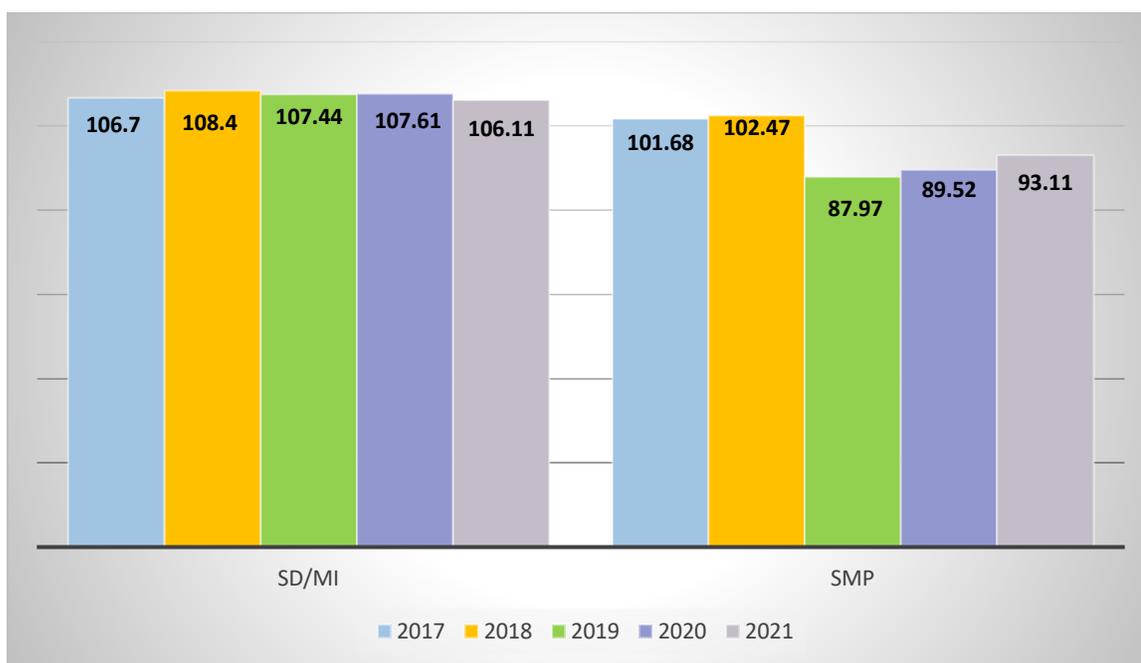
Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa perkembangan PAUD pada tahun ajaran 2017 mengalami peningkatan sebesar 72,57 persen dibanding Tahun 2016 dan angka ini mengalami peningkatan hingga tahun 2019 dimana angkanya menjadi 81,79 persen. Peningkatan yang signifikan ini terjadi karena diberlakukannya pendataan siswa secara online dengan Aplikasi Dapodik PAUD pada semester Ganjil Tahun 2016/2017. PAUD sudah dapat mengisi data secara langsung setelah dapodiknya aktif. Hasil penginputan data kedalam Dapodik merupakan syarat yang mempengaruhi jumlah dana DAK Non Fisik BOP PAUD yang akan dialokasikan oleh pemerintah.

Namun persentase siswa PAUD mengalami penurunan drastis pada tahun 2020 dimana angkanya mencapai 71,03 persen. Penurunan ini terjadi, karena beberapa faktor diantaranya adalah orang tua enggan mendaftarkan anaknya terkait situasi pandemi *Covid-19* dan kendala ekonomi. Adanya asumsi bahwa pembelajaran di PAUD dapat dilakukan di rumah sehingga tak perlu mendaftarkan anak ke sekolah. Seperti Taman Kanak-kanak banyak yang dikelola oleh pihak yayasan dan sektor swasta yang sehingga harus bayar. Taman Kanak-kanak Negeri yang berjumlah 6 (enam) belum optimal menjangkau seluruh kecamatan di Kota Banda Aceh. Dengan kebijakan pelaksanaan belajar dari Rumah (BDR) juga menyebabkan orang tua tidak mendaftarkan anak di pendidikan PAUD.

2. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Nilai APK yang tinggi menandakan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur atau melebihi umur yang seharusnya.

Untuk mengetahui Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Banda Aceh untuk jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs dapat dilihat pada Gambar 2.32 di bawah ini:



Sumber: Profil Pendidikan Kota Banda Aceh, 2022

Gambar 2. 33 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (%) Kota Banda Aceh Tahun 2017–2021





Berdasarkan Gambar 2.33 diatas dapat diketahui bahwa APK di jenjang SD/MI di Kota Banda Aceh cenderung mengalami fluktuasi selama periode 2017-2021. Pada tahun 2017 APK di jenjang SD/MI sebesar 106,7 persen sedangkan pada tahun 2021 sebesar 106,11 persen. Status APK untuk jenjang SMP/MTS mengalami fluktuasi dari Tahun 2017-2021, dengan persentase terbesar berada pada tahun 2018 yaitu sebesar 102,47 persen.

3. Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT)

Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT) adalah persentase jumlah penduduk, baik yang masih sekolah maupun tidak sekolah lagi, menurut pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan. Tinggi rendahnya tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk mempunyai pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung. Artinya semakin tinggi jenjang pendidikan seseorang, kemungkinan untuk memperoleh pekerjaan juga semakin besar dan dapat berpengaruh pada tingkat kesejahteraan. Sedangkan pengaruh tidak langsung akan terlihat pada pola pikir masyarakat, karena semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkan, maka cara berpikir juga akan lebih maju dan mudah menerima perubahan. Tabel 2.30 menunjukkan APT di Kota Banda Aceh pada tingkat SD/MI dan SMP/MTs Kota Banda Aceh selama periode 2017-2021 sebagai berikut ini:

Tabel 2. 30 Perkembangan Angka Pendidikan yang Ditamatkan Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021

No	Jenjang Pendidikan	2017	2018	2019	2020	2021
1	SD/MI					
1)	Jumlah siswa Lulusan di jenjang pendidikan SD/MI	4.217	5.035	5.771	5.703	5.611
2)	Jumlah Siswa Tkt. VI	4.218	5.035	5.771	5.703	5.611
3)	APT SD/MI	99,97	100	100	100	100
2	SMP/MTs					
1)	Jumlah siswa lulusan di jenjang SMP/MTs	4.471	4.427	4.417	5.237	4.874
2)	Jumlah siswa Tkt. III	4,471	4.432	4.420	5.237	4.874
3)	APT SMP/MTs	100	99,89	99,93	100	100

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh, 2022

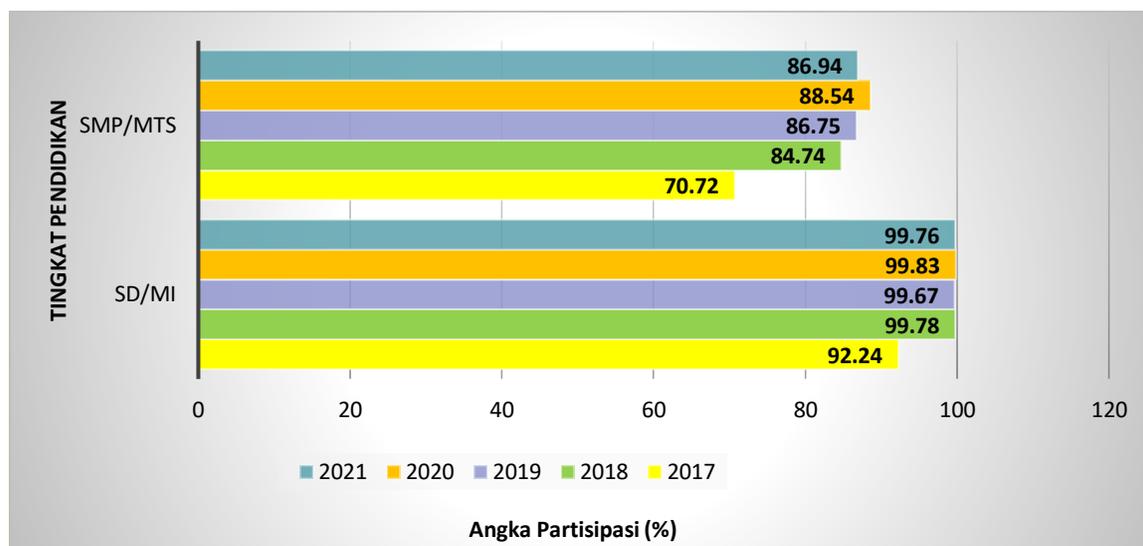
Berdasarkan Tabel 2.30 di atas dapat dilihat bahwa APT pada jenjang SD/MI serta SMP/MTs di Kota Banda Aceh dari tahun 2017-2021 mengalami sedikit fluktuasi. Angka pendidikan yang ditamatkan di Kota Banda Aceh pada tingkat SD/MI dan SMP/MTs tahun 2020/2021 mencapai 100 persen yang artinya pencapaian tingkat kelulusan sudah sangat baik. APT selama kurun waktu 2017/2018 – 2020/2021 terus meningkat sehingga mencapai 100 persen.

4. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Angka Partisipasi Murni (APM) digunakan untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu, yang dibagi dalam tiga kelompok jenjang pendidikan yaitu SD untuk penduduk usia 7-12 tahun, SMP untuk penduduk usia 13-15 tahun, dan SMA untuk penduduk usia 16-18 tahun. Penyebaran sekolah untuk jenjang SD/MI sampai SMP/MTs sudah merata dan menjangkau seluruh wilayah Kota Banda Aceh sampai ke daerah pinggiran kota.



Gambar 2.34 berikut ini menggambarkan perkembangan APM untuk tingkat pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021:



Sumber : Profil Pendidikan Kota Banda Aceh, 2022

Gambar 2. 34 Perkembangan Angka Partisipasi Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021

Berdasarkan Gambar 2.34 di atas dapat diketahui bahwa APM SD/MI cenderung mengalami peningkatan dari Tahun 2017-2021. Pada tahun 2017, APM SD/MI sebesar 92,24 persen dan pada tahun 2021 angkanya mengalami peningkatan menjadi 99,76 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sekitar 99,76 persen penduduk di Kota Banda Aceh yang berusia 7-12 tahun bersekolah tepat waktu dijenjang SD/MI pada Tahun 2020.

Sementara itu APM untuk tingkat pendidikan SMP/MTs berfluktuasi dari tahun 2017-2021. Pada tahun 2017 APM SMP/MTs adalah 70,72 persen dan mengalami kenaikan sampai tahun 2020 yang persentasenya sebesar 88,54 persen. Angka ini mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 86,94 persen. Untuk jenjang pendidikan SMA/SMK/MA, data yang tersedia hanya dari Tahun 2016 karena pada tahun berikutnya dialihkan wewenangannya ke Pemerintah Provinsi Aceh. Untuk jenjang SMA/SMK/MA sejak tahun 2017 dialihkan kewenangannya ke Pemerintah Provinsi Aceh.

5. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan rasio anak yang masih sekolah pada usia tertentu (usia sekolah) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sama tanpa memperhatikan jenjang pendidikan yang sedang dijalani. APS juga merupakan indikator yang digunakan sebagai petunjuk keberhasilan program wajib belajar. Program wajib belajar dikatakan berhasil jika nilai APS umur 7 – 12 tahun lebih dari 95 persen dan APS umur 13 – 15 tahun lebih dari 70 persen. Tabel 2.31 berikut ini menunjukkan perkembangan APS di Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021:

Tabel 2. 31 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021

No	Jenjang Pendidikan	2017	2018	2019	2020	2021
1	APS SD/MI (usia 7 -12 tahun)	100,00	100,00	99,95	99,99	99,98
2	APS SMP/MTs (usia 13 – 15 tahun)	100,00	100,00	100,00	99,89	99,99

Sumber : BPS Kota Banda Aceh, 2022





Berdasarkan tabel 2.31 ini diketahui bahwa pada tahun ajaran 2021 APS usia 7 – 12 tahun sebesar 99,98 persen. Sedangkan untuk APS usia 13 – 15 tahun di tahun 2021 mencapai 99,99 Angka tersebut menunjukkan pencapaian APS usia 13 – 15 tahun dan APS usia 7 – 12 tahun sudah melebihi standar yang ditetapkan.

6. Angka Putus Sekolah (APtS)

Angka Putus Sekolah mencerminkan anak-anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu, hal ini sering digunakan sebagai salah satu indikator berhasil/tidaknya pembangunan dibidang pendidikan. Penyebab utama putus sekolah antara lain karena kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan anak sebagai investasi masa depannya; kondisi ekonomi orang tua yang miskin; dan adanya keterbatasan si anak. Tabel 2.32 berikut ini menggambarkan Angka Putus Sekolah berdasarkan jenjang pendidikan di Kota Banda Aceh Tahun 2021:

Tabel 2. 32 Angka Putus Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan Kota Banda Aceh Tahun 2021

No.	Kecamatan	Putus Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan									Keterangan
		7-12 thn			13-15 thn			16-18 thn			
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1	Meuraxa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Baiturrahman	-	-	-	1	-	1	-	-	-	
3	Kuta Alam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Syiah Kuala	-	-	-	1	-	1	-	-	-	
5	Kuta Raja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Ulee Kareng	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
7	Lueng Bata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Banda Raya	-	-	-	1	1	2	-	-	-	
9	Jaya Baru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	3	2	5	-	-	-	

Sumber: Profil Pendidikan Kota Banda Aceh, 2022

Jumlah siswa yang tidak mampu melanjutkan pendidikannya atau putus sekolah pada tahun 2021 mengalami penurunan. Dari data yang diperoleh bahwa di kecamatan Banda Raya yang masih sedikit lebih banyak untuk siswa putus sekolah. Sedangkan di Kecamatan Baiturrahman, Syiah Kuala, dan Ulee Kareng. Menurut jenis kelamin kelompok siswa laki-laki memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk meninggalkan sekolah dibandingkan siswa perempuan.

7. Angka Melanjutkan (AM)

Angka Melanjutkan Sekolah (AM) ialah persentase jumlah penduduk yang tidak bersekolah lagi pada suatu jenjang dan ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Di Kota Banda Aceh, jumlah lulusan SD yang melanjutkan ke SMP dan jumlah lulusan SMP yang melanjutkan ke SMA dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 33 Perkembangan Angka Melanjutkan Kota Banda Aceh T.A 2016/2017-2020/2021 (Dalam Persen)

No	Jenjang Pendidikan	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
1	SMP/MTs/Paket B	105,75	72,92	89,80	91,82	100
2	SMA/SMK/MA/Paket C	138,50	0	0	0	0

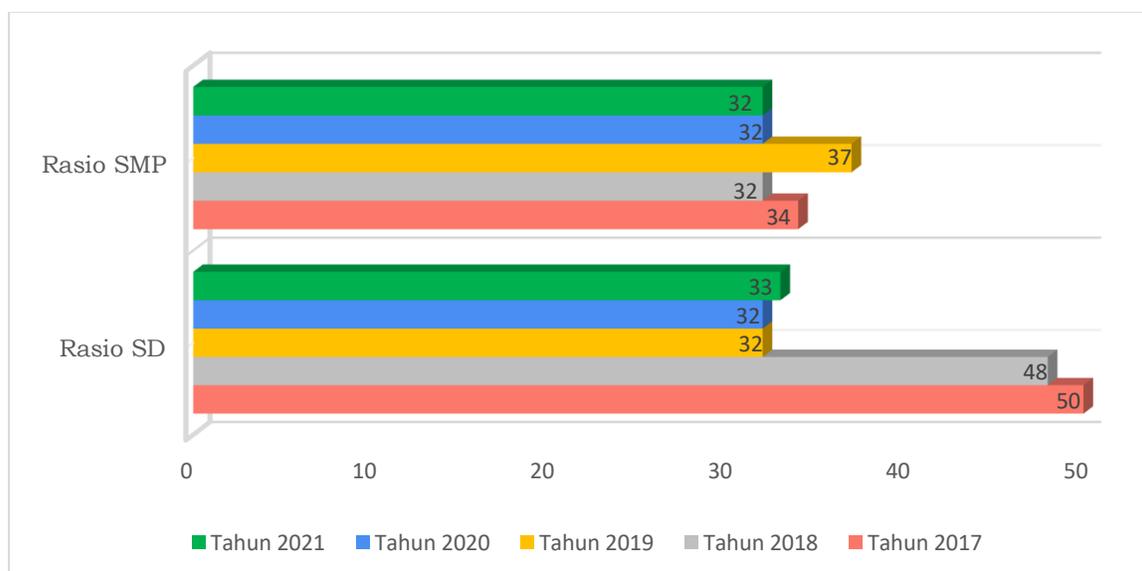
Sumber : Profil Pendidikan Kota Banda Aceh, 2022



Tabel 2.33 di atas menunjukkan perkembangan AM di Kota Banda Aceh selama periode Tahun Ajaran 2016/2017-2020/2021 untuk jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B berfluktuasi. Pada Tahun Ajaran 2016/2017, angka melanjutkan untuk tingkat SMP/MTs/Paket B sebesar 105,75 persen, sedangkan pada Tahun Ajaran 2020/2021 sebanyak 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Banda Aceh sebagai Ibukota Provinsi Aceh memiliki daya tarik di bidang pendidikan bagi warga di Aceh dan sekitar Kota Banda Aceh. Hal ini juga menunjukkan bahwa tingginya tingkat kesadaran masyarakat akan pendidikan. Perlu dicermati tingginya AM bisa saja terjadi karena adanya lulusan SD/MI dari kabupaten/kota lain khususnya Aceh Besar yang melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs di Kota Banda Aceh.

8. Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar

Rasio Ketersediaan Sekolah adalah jumlah sekolah per 10.000 jumlah penduduk usia sekolah. Rasio ini mengindikasikan kemampuan seluruh sekolah yang ada di suatu daerah untuk menampung semua penduduk usia sekolah. Untuk mengetahui rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah di Kota Banda Aceh selama periode 2017-2021 dapat pada Gambar 2.35 di bawah ini:



Sumber: Profil Pendidikan Kota Banda Aceh, 2022

Gambar 2. 35 Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Kota Banda Aceh Tahun 2017 – 2021

Berdasarkan Gambar 2.35 di atas dapat diketahui bahwa rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah baik jenjang SD/MI dan SMP/MTs berfluktuasi dari tahun 2017-2021. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah untuk jenjang SD/MI sebesar 1 : 33. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketersediaan SD/MI sudah ideal. Jenjang pendidikan SMP/MTs sebesar 1 : 32. Kondisi ini menunjukkan tingkat ketersediaan SMP/MTs sudah cukup baik.

9. Rasio Guru/ Murid Sekolah Pendidikan Dasar

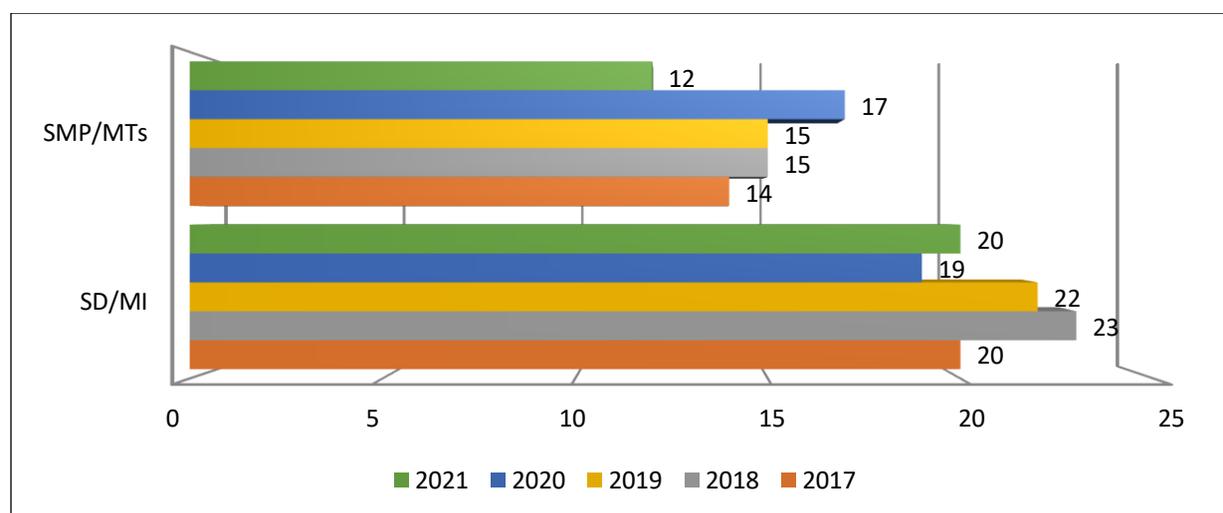
Pelayanan pendidikan dapat diamati dari rasio guru terhadap murid. Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru per 1.000 jumlah murid. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Selain itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru yang mulai berlaku efektif tahun ajaran 2016/2017 menetapkan tunjangan profesi akan didapatkan oleh guru jika



mengajar di satuan pendidikan dengan rasio minimal jumlah peserta didik terhadap guru adalah sebagai berikut :

- untuk TK, RA, atau yang sederajat 1 : 15;
- untuk SD atau yang sederajat 1 : 20;
- untuk MI atau yang sederajat 1 : 15;
- untuk SMP atau yang sederajat 1 : 20;
- untuk MTs atau yang sederajat 1 : 15;
- untuk SMA atau yang sederajat 1 : 20;
- untuk MA atau yang sederajat 1 : 15;
- untuk SMK atau yang sederajat 1 : 15; dan
- untuk MAK atau yang sederajat 1 : 12

Untuk mengetahui rasio guru/murid di Kota Banda Aceh selama periode 2017-2021 dapat dilihat pada Gambar di bawah ini:



Sumber : Profil Pendidikan Kota Banda Aceh, 2022

Gambar 2. 36 Rasio Guru/Murid Kota Banda Aceh Tahun 2017 – 2021

Selama tahun 2017 hingga tahun 2021, dibandingkan standar nasional terlihat bahwa rasio guru terhadap siswa pada per-jenjang sekolah sudah memenuhi standar minimal. Pencapaian ini sangat menggembirakan. Sudah saatnya Kota Banda Aceh tidak hanya melihat rasio jumlah kuantitas guru terhadap murid saja namun perlu melihat rasio jumlah ketersediaan guru menurut mata pelajaran yang ada di SD/MI dan SMP/MTs. Hal ini untuk mendapatkan pemerataan yang proporsional di setiap sekolah dan bisa meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Banda Aceh.

10. Jumlah Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang tercapai

Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu yang bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Pemerintah menetapkan standar nasional pendidikan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan meliputi 8 SNP, yaitu : 1) standar isi, 2) standar kompetensi lulusan, 3) standar proses 4) standar pendidik dan tenaga kependidikan, 5) standar sarana dan prasarana, 6) standar pengelolaan, 7) standar pembiayaan, dan 8) standar penilaian pendidikan.





Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 11 menyatakan bahwa dengan diberlakukannya Standar Nasional Pendidikan, maka pemerintah memiliki kepentingan untuk memetakan sekolah/madrasah menjadi sekolah/ madrasah yang sudah atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan sekolah/madrasah yang belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan. Pencapaian SNP di Kota Banda Aceh dari tahun 2020 sampai 2021 mengalami penurunan secara rata-rata. Pada tahun 2020, capaian untuk SNP SD dan SMP mencapai 94 persen dan 90,64 persen. Namun pada tahun 2021, capaian SNP mengalami penurunan secara rata-rata. Pada SNP SD capaian yang diberikan adalah 85,27 persen dan SMP adalah 81,71 persen. Penurunan SNP ini harus segera menjadi perhatian Pemerintah Kota Banda Aceh khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk kembali meningkatkan pencapaian delapan indikator SNP tersebut. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 34 Jumlah Standar Nasional Pendidikan di Kota Banda Aceh

No	Indikator SNP	2020				2021			
		Nilai Capaian SNP		Capaian SNP (%)		Nilai Capaian SNP		Capaian SNP (%)	
		SD	SMP	SD	SMP	SD	SMP	SD	SMP
1.	Standar Kompetensi Lulusan	6,98	6,99	99,71	99,86	6,27	6,02	89,57	86,00
2.	Standar Isi	6,96	6,96	99,43	99,43	5,84	5,48	83,43	78,29
3.	Standar Proses	6,97	6,98	99,57	99,86	5,80	5,59	82,86	79,86
4.	Standar Penilaian Pendidikan	6,99	6,99	99,86	99,86	6,32	6,03	90,29	86,14
5.	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	5,88	5,85	84,00	83,00	6,72	6,44	96,00	92,00
6.	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	5,07	4,57	72,43	58,14	4,98	4,96	71,14	70,86
7.	Standar Pengelolaan Pendidikan	6,91	6,44	98,71	85,29	6,17	5,76	88,14	82,29
8.	Standar Pembiayaan	6,96	6,97	99,43	99,71	5,65	5,48	80,71	78,29
Rata-rata SD dan SMP		6,59	6,47	94,14	90,64	5,97	5,72	85,27	81,71

Sumber: Disdikbud Kota Banda Aceh, 2022

11. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Guru merupakan salah satu komponen pendidikan yang memegang penting dalam menjamin mutu pendidikan. Oleh karena itu, guru dituntut untuk mempunyai kualifikasi yang relevan dan kompetensi yang teruji yang dinyatakan dengan sertifikat profesi untuk dapat mewujudkan kinerja yang bermutu.

Kualifikasi akademik guru pada satuan pendidikan jalur formal mencakup kualifikasi akademik yang dimiliki oleh para guru. Dari data perkembangan guru yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV terus mengalami peningkatan. Perkembangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 35 Perkembangan Guru Memenuhi Kualifikasi S-1/D-IV Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021 (Dalam Persen)

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021	Keterangan
Guru yang Memenuhi Kualifikasi SI/ D-IV	82,00	69,16	86,96	89,07	90,59	Tidak termasuk Guru Depag

Sumber : Profil Pendidikan Kota Banda Aceh, 2022

Peningkatan jumlah guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan strata-1 dan diploma-4 terus mengalami peningkatan di sekolah yang ada di Kota Banda Aceh. Namun, diharapkan kualifikasi pendidikan guru yang memenuhi S-1 dan D-IV bisa





mencapai 100 persen sehingga diharapkan kualitas pendidikan di Kota Banda Aceh bisa menjadi lebih baik.

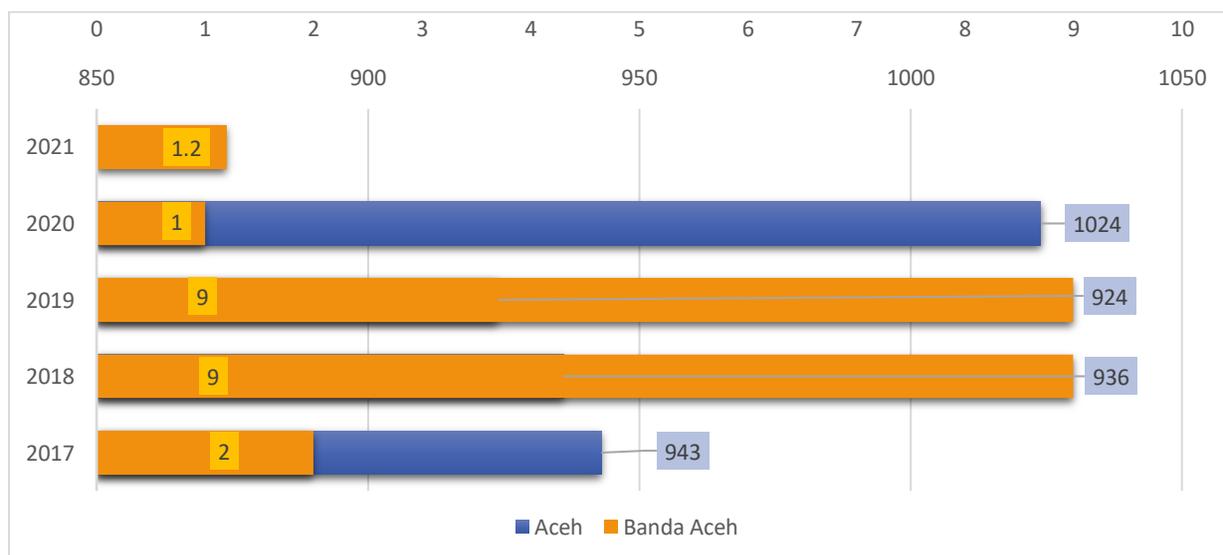
B. Kesehatan

1. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup

Salah satu indikator utama kesehatan adalah Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB). Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Banyak faktor yang dikaitkan dengan naik turunnya angka kematian bayi, diantaranya :

- 1) masih ada ibu dengan penyakit penyerta yang ingin hamil tanpa direncanakan dengan baik;
- 2) masih rendahnya kepedulian dan keterampilan petugas dalam penatalaksanaan ibu hamil dan bayi;
- 3) kurangnya kepedulian keluarga terhadap ibu hamil dan masih rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap perawatan bayi;
- 4) wanita usia subur (WUS) yang menderita Kurang Energi Kronis (KEK) dan anemia kurang mendapat perhatian sehingga saat hali akan menimbulkan risiko bagi janin yang dikandung.

Sampai dengan akhir tahun 2021 Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Banda Aceh sebesar 1,2 per 1000 kelahiran hidup, atau sebanyak 6 kasus yang dilaporkan. Jumlah ini merupakan capaian luar biasa mengingat target awal yang ditetapkan pada awal perencanaan 5 tahunan atau RPJMD adalah sebesar 3 per 1000 kelahiran hidup, dari 2 per 1000 kelahiran hidup sebagai kondisi dasar di tahun 2017. Ada banyak faktor yang mempengaruhi AKB tetapi tidak mudah untuk menemukan faktor yang paling dominan. Tersedianya berbagai fasilitas atau faktor aksesibilitas dan pelayanan kesehatan dengan tenaga medis yang terampil, serta kesediaan masyarakat untuk merubah kehidupan tradisional ke norma kehidupan modern dalam bidang kesehatan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap tingkat AKB. Untuk mengetahui perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Banda Aceh selama periode Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Gambar 2.37 di bawah ini:



Sumber : Profil Kesehatan Kota Banda Aceh, 2022

Gambar 2. 37 Perkembangan AKB Banda Aceh Tahun 2017-2021

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan angka kematian bayi di Kota Banda Aceh mengalami peningkatan. Walaupun masih lebih rendah jika



dibandingkan dengan angka kematian bayi di Provinsi Aceh, namun angka trend yang meningkat ini perlu mendapat perhatian dari pihak terkait. Diperlukan usaha dari pihak terkait untuk terus berupaya menurunkan angka kematian bayi.

2. Angka Kelangsungan Hidup Bayi.

Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun. Angka kelangsungan hidup bayi = (1-AKB). Angka kematian bayi dihitung dengan jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Untuk lebih jelasnya mengenai perkembangan Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) di Kota Banda Aceh selama periode Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.36 di bawah ini :

Tabel 2. 36 Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021

Capaian Indikator Kinerja Pembangunan	Rumus	Capaian Setiap Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Angka Kelangsungan Hidup Bayi	$AKHB = (1 - AKB)$	998	998	998	998	999

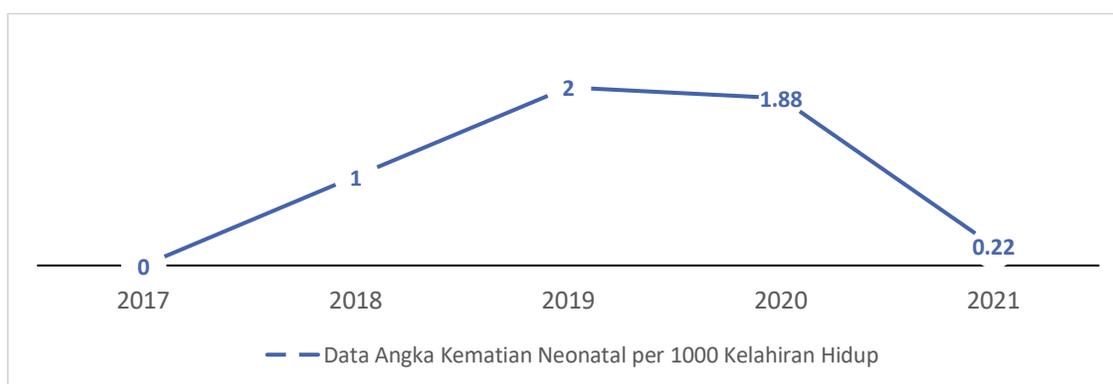
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, 2022

Berdasarkan Tabel 2.36 dapat disimpulkan bahwa Angka kelangsungan hidup bayi di kota Banda Aceh dalam 5 tahun terakhir stabil dan meningkat di tahun 2021 yang mencapai 999. Adanya peningkatan terhadap angka kelangsungan hidup bayi dapat tercapai di sebabkan oleh beberapa faktor, yang pertama meningkatkan mutu SDM kesehatan dengan pelatihan dan akreditasi fasilitas kesehatan, kedua dengan melakukan penguatan manajemen dan sistem informasi (seluruh kematian dilakukan audit), ketiga meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat (melalui program indonesia sehat dengan pendekatan keluarga /PIS-PK) dan hal lain peningkatan sistem rujukan, menjamin terintegrasinya pelayanan kesehatan primer, sekunder, dan tersier.

3. Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Neo-Natal adalah kematian yang terjadi sebelum bayi berumur satu bulan atau 28 hari, per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. Kematian neonatal umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan.

Untuk mengetahui perkembangan Angka Kematian Neonatal di Kota Banda Aceh selama periode Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Gambar 2.38 di bawah ini:



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, 2022

Gambar 2. 38 Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup Tahun 2017-2021



Berdasarkan Gambar 2.38 di atas, angka kematian neonatal di Kota Banda Aceh pada Tahun 2021 hanya terdapat 0,22, turun dari tahun 2020. Angka ini berkaitan dengan upaya untuk mengurangi angka kematian neonatal melalui program pelayanan kesehatan ibu hamil, misalnya program pemberian pil besi dan suntikan anti tetanus.

4. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Ibu Melahirkan yang dilaporkan pada tahun 2021 cukup tinggi yakni sebesar 5 per 100.000 kelahiran hidup, atau sebanyak 118 kasus. Hal ini dipengaruhi faktor masih kurangnya ibu-ibu yang memeriksakan kesehatan pasca melahirkan, sehingga berbagai faktor penyebab tidak terpantau dan dukungan suplemen yang tersedia tidak diakses. Hal ini juga dipengaruhi oleh adanya tata cara adat yang memberikan larangan atau pantangan-pantangan makanan bagi ibu pasca melahirkan sehingga menyebabkan suplai gizi yang sangat dibutuhkan untuk pemulihan ibu serta kesiapan menyusui menjadi kurang. Untuk mengetahui perkembangan Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Banda Aceh selama periode Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Gambar 2.39 di bawah ini:



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, 2022

Gambar 2. 39 Angka Kasus Kematian Ibu di Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021

Berdasarkan Gambar 2.39 di atas menunjukkan angka kematian ibu di Kota Banda Aceh menunjukkan peningkatan dari 2017 sampai dengan 2021. Hal ini perlu mendapat perhatian dari pihak terkait agar angka kematian ibu ini bisa menurun.

5. Rasio Posyandu per Satuan Balita

Posyandu merupakan salah satu upaya pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh, dari dan bersama masyarakat, untuk memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat guna memperoleh pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak balita. Jadi posyandu adalah upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat. Posyandu dibentuk bertujuan untuk :

1. Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (ibu Hamil, melahirkan dan nifas)
2. Membudayakan NKKBS.
3. Meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB serta kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera.
4. Berfungsi sebagai Wahana Gerakan Reproduksi Keluarga Sejahtera, Gerakan Ketahanan Keluarga dan Gerakan Ekonomi Keluarga Sejahtera.



Tujuan pembentukan posyandu tersebut didukung dengan 5 kegiatan pokok posyandu, yaitu :

1. KIA
2. KB
3. Imunisasi
4. Gizi
5. Penanggulangan Diare.

Tabel 2. 37 Perkembangan Rasio Pelayanan Posyandu Per-Satuan Balita Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021

Tahun	Jumlah Posyandu	Jumlah Balita	Rasio
2017	113	20.653	1 : 182
2018	113	21.739	1 : 192
2019	114	20.838	1 : 182
2020	114	27.572	1 : 241
2021	114	11.323	1 : 99

Sumber Statistik Banda Aceh, 2022

Perkembangan rasio pelayanan posyandu di Kota Banda Aceh untuk per-satuan balita terus meningkat. Dari tahun 2017 yang hanya bisa melayani 1 posyandu untuk 182 balita, maka pada tahun 2001 sudah bisa melayani 1 posyandu untuk 99 balita. Jumlah ini sangat menggembirakan karena setiap gampong semakin sadar untuk berperan aktif untuk memantau dan menjaga terus kesehatana balita yang ada di lingkungannya melalui layanan Posyandu.

6. Rasio Fasilitas Kesehatan per Satuan Penduduk

Jumlah fasilitas kesehatan menggambarkan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan sarana pelayanan kesehatan. Fasilitas pelayanan dan sarana pelayanan kesehatan yang dimaksud ialah ; Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes, Puskesmas Keliling, Pos KIA, Balai Pengobatan dan lain-lain. Jumlah fasilitas kesehatan yang tersedia di Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Tabel 2.38 berikut:

Tabel 2. 38 Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021

Fasilitas Kesehatan	2017	2018	2019	2020	2021
Rumah Sakit Umum	12	13	13	13	14
Rumah Bersalin	7	7	7	7	7
Puskesmas	11	11	11	11	11
Puskesmas Pembantu	27	27	27	27	27
Polindes/Poskedes	34	34	34	34	34
Posyandu	113	113	114	114	114
Klinik/Balai Kesehatan	33	33	39	39	54
Puskesmas Keliling	7	7	7	7	7

Sumber: Kota Banda Aceh Dalam Angka, 2022

Pembangunan bidang kesehatan antara lain bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Pelayanan kesehatan dasar yang diterapkan di Indonesia memegang peranan penting dalam pemberian layanan kesehatan yang dapat menjangkau wilayah-wilayah pedesaan. Untuk mencapai tujuan pelayanan kesehatan yang terjangkau, maka sarana dan prasarana pelayanan kesehatan harus tersedia atau tersebar di setiap kecamatan. Melalui upaya tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan yang





lebih baik. Berdasarkan Tabel 2.38 di atas dapat dilihat bahwa Kota Banda Aceh saat ini telah memiliki 11 puskesmas, 27 puskesmas pembantu, 34 polindes/poskedes, 114 posyandu, 54 klinik/balai kesehatan, dan 7 puskesmas keliling yang tersebar di 9 kecamatan dan 90 gampong.

7. Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk

Rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan rujukan kepada masyarakat memiliki peran strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan kesehatan dibidang pelayanan langsung seperti Rumah sakit, bertujuan untuk meningkatkan mutu, cakupan dan efisiensi pelaksanaan rujukan medik dan rujukan kesehatan secara terpadu serta meningkatkan dan memantapkan manajemen pelayanan kesehatan yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan penilaian.

Pelayanan kesehatan rumah sakit di Kota Banda Aceh telah menunjukkan kinerja yang baik. Ketersediaan rumah sakit baik rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta sudah tersebar dan mencukupi untuk pelayanan kesehatan rujukan. Dengan adanya program BPJS dan JKA pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat sudah memberikan pelayanan yang maksimal.

Tabel 2. 39 Perkembangan Rasio Rumah Sakit Per-Satuan Penduduk Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Rumah Sakit (Umum+Swasta)	12	13	13	13	14
Jumlah Penduduk	259,913	265,111	268,156	252,899	276,223
Rasio	0,063877315	1 : 22	0,0628125	1 : 21	1 : 18

Sumber : Kota Banda Aceh Dalam Angka, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pelayanan kesehatan rumah sakit masih memenuhi standar rasio rumah per-satuan penduduk. Idealnya satu rumah sakit melayani seratus ribu penduduk, sementara data diatas menunjukkan rata-rata rumah sakit melayani penduduk dibawah seratus ribu penduduk. Namun over capacity pelayanan dapat terjadi apabila banyaknya pasien dari luar wilayah Kota Banda Aceh yang dirujuk ke rumah sakit di Banda Aceh terutama rumah sakit pemerintah.

8. Rasio Dokter per Satuan Penduduk

Rasio Dokter per 100.000 Penduduk adalah Dokter yang memberikan pelayanan kesehatan di suatu wilayah (di Puskesmas, Rumah Sakit, dan sarana pelayanan kesehatan lain) per 100.000 penduduk. Ketersediaan jumlah dokter memberikan gambaran pelayanan kesehatan dari sisi kuantitas tenaga medis terhadap masyarakat. Pola hidup yang semakin berubah terutama diperkotaan menjadikan masyarakat rentan terhadap gejala penyakit maupun keluhan kesehatan lainnya yang membutuhkan penanganan dokter. Kota Banda Aceh sebagai pusat pelayanan kesehatan di Provinsi Aceh memiliki beban besar dalam pelayanan kesehatan terutama penyediaan tenaga medis. Tabel berikut menggambarkan kondisi pelayanan dokter terhadap penduduk di Kota Banda Aceh.





Tabel 2. 40 Perkembangan Rasio Dokter Per-Satuan Penduduk Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021

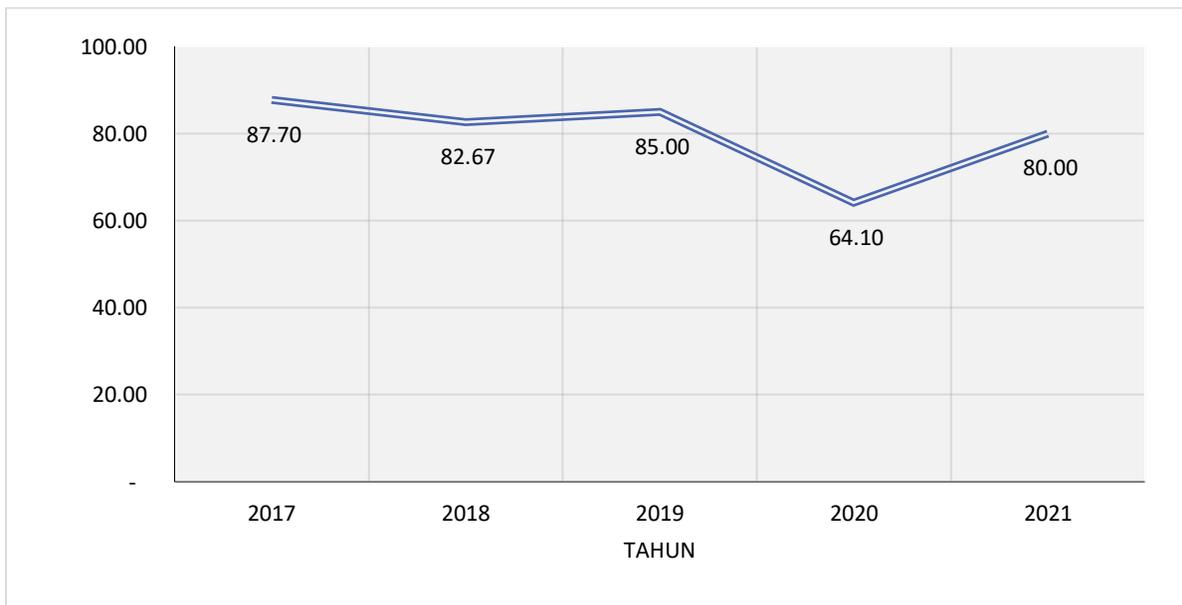
Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Praktik Dokter Perorangan	724	585	637	469	697
Jumlah Penduduk	259,913	265,111	268,156	276,304	276,223
Rasio/100.000 penduduk	1 : 29	1 : 14	1 : 33	1 : 16	1 : 32

Sumber: BPS Kota Banda Aceh dan Profil Kesehatan Kota Banda Aceh, 2022

Tabel 2.40 diatas menunjukkan bahwa jumlah dokter yang tersedia di Kota Banda Aceh cenderung menurun sejak tahun 2017 sampai dengan 2021. Penurunan jumlah dokter terbesar terjadi pada tahun 2020 yang diakibatkan karena pandemi Covid-19. Namun, pada tahun 2021 jumlah dokter kembali meningkat. Jika dilihat dari rasio dokter per satuan penduduk di Kota Banda Aceh pada tahun 2017 sampai dengan 2021 menunjukkan jumlah dokter yang ada di Kota Banda Aceh sudah sangat cukup dalam melayani 100.000 penduduk. Bahkan rasio ini sangat kecil yang artinya di tahun 2021, 1 orang dokter melayani 32 penduduk.

9. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

Masa kehamilan merupakan masa yang sangat menentukan bagi si anak yang dikandungnya, menjaga kesehatan dan asupan makanan bergizi adalah suatu keharusan yang tidak boleh dilupakan oleh ibu hamil. Berbagai masalah kesehatan dapat dialami oleh ibu hamil, dan jika tidak ditangani dengan baik maka dapat saja hal tersebut mengganggu kesehatan baik si ibu hamil maupun janin yang dikandungnya. Beberapa ibu hamil dapat tergolong dalam kasus risiko tinggi (risti) atau mengalami komplikasi dalam kehamilan sehingga memerlukan pelayanan kesehatan rujukan. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani merupakan salah satu indikator kinerja bidan. Untuk mengetahui cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani pada Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Gambar 2.40 dibawah ini:



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, 2022

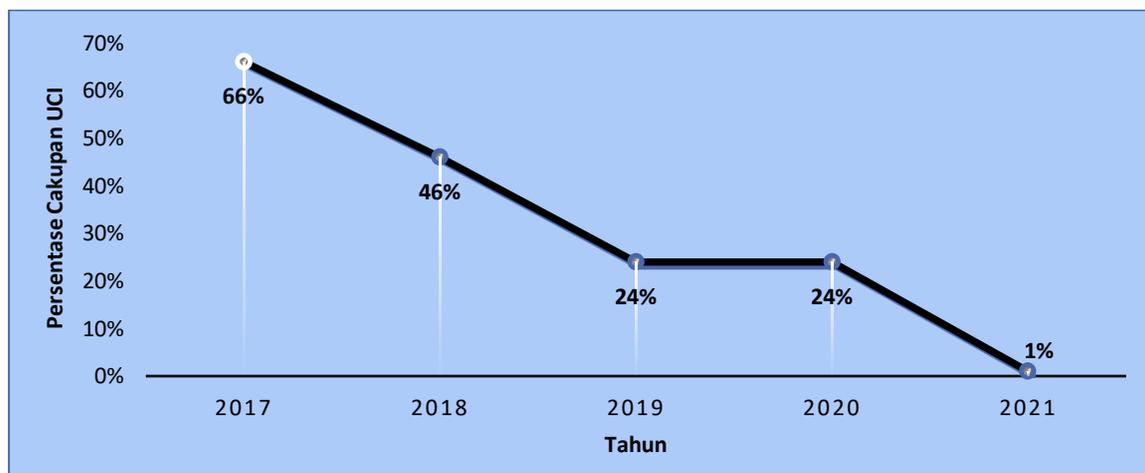
Gambar 2. 40 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021



Berdasarkan Gambar 2.40 di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2017-2021, cakupan ibu hamil yang mengalami komplikasi kebidanan yang ditangani mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2017 cakupan sebesar 87,7%, pada 2018 sebesar 82,67, pada Tahun 2019 sebesar 85% dan pada Tahun 2020 sebesar 64,1%. Pada tahun 2021 cakupan komplikasi kebidanan di kota Banda Aceh sebesar 80 %, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, kondisi ini masih belum tercapai maksimal mengingat target yang ditetapkan adalah sebesar 75%, atau hanya tercapai 85,47%. Hal ini menunjukkan masih perlunya dilakukan upaya-upaya untuk mengoptimalkan penanganan komplikasi kebidanan dan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan untuk meningkatkan kinerja bidan.

10. Cakupan Desa/ Gampong *Universal Child Immunization* (UCI)

Pencapaian *Universal Child Immunization* (UCI) pada dasarnya merupakan suatu gambaran terhadap cakupan bayi (0-11 bulan) yang telah mendapatkan imunisasi dasar secara lengkap yang meliputi BCG, DPT, Polio, Hepatitis B dan campak. Bila cakupan UCI dikaitkan dengan batasan wilayah tertentu, berarti dalam wilayah tersebut dapat digambarkan besarnya tingkat kekebalan masyarakat terhadap penularan PD3I (Penyakit Dapat Dicegah Dengan Imunisasi). Salah satu target keberhasilan program imunisasi adalah tercapainya UCI secara merata pada bayi di seluruh gampong. Untuk mendapatkan gambaran secara lengkap jumlah gampong UCI dari Tahun 2017-2021 di Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Gambar 2.41 berikut ini:



Sumber: Profil Kesehatan Aceh, 2022

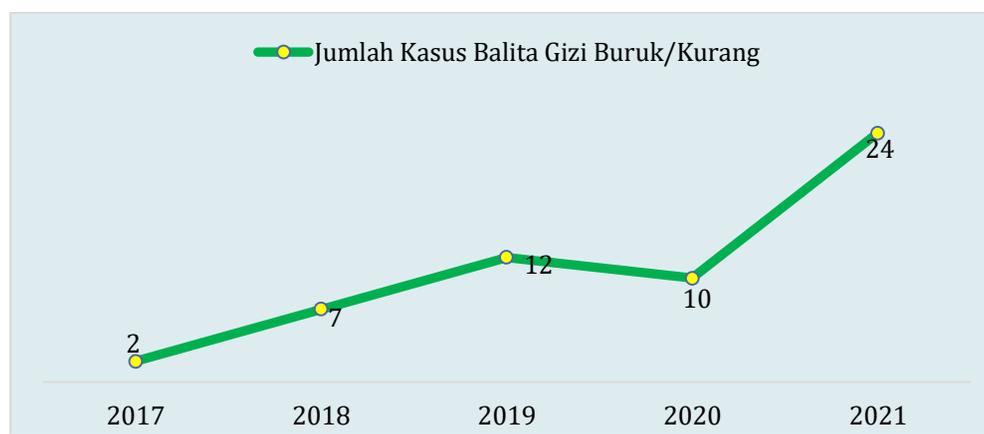
Gambar 2. 41 Cakupan Desa/Gampong *Universal Child Immunization* (UCI) Tahun 2017-2021 Kota Banda Aceh

Berdasarkan Gambar 2.41 diatas, dari Tahun 2017-2021 jumlah gampong yang telah melaksanakan UCI bagi bayi 0-11 bulan mengalami penurunan drastis. Pada Tahun 2016 jumlah gampong yang menjalani UCI atau seluruh bayi yang ada di gampong tersebut telah diimunisasi lengkap adalah 82 persen dari 90 gampong yang ada di Kota Banda Aceh, terus menurun hingga Tahun 2021 hanya tercapai sebesar 1 persen dari 90 gampong yang ada. Rendahnya pencapaian gampong UCI ini perlu mendapatkan perhatian yang serius, kondisi adanya penolakan masyarakat terhadap kehalalan imunisasi serta adanya kedaruratan pandemic Covid-19 di tahun 2020 dan 2021 yang lebih memfokuskan pada capaian vaksin menjadi faktor penyebab utama. Peningkatan cakupan dan pemerataan pelayanan imunisasi sampai ke seluruh gampong di Kota Banda Aceh perlu terus diupayakan. Hal ini untuk memastikan target minimal 80 persen bayi yang ada di seluruh gampong telah mendapatkan lima imunisasi dasar lengkap sesuai yang diisyaratkan oleh Kementerian Kesehatan.



11. Persentase Balita Gizi Buruk dan Stunting

Gizi buruk adalah suatu keadaan kekurangan konsumsi zat gizi yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi protein dalam makanan sehari-hari, yang ditandai dengan berat dan tinggi badan tidak sesuai umur (dibawah rata-rata) dan harus ditetapkan oleh tenaga medis. Penanganan masalah gizi sangat terkait dengan strategi dalam menciptakan SDM yang sehat, cerdas, dan produktif. Upaya peningkatan SDM yang berkualitas dimulai dengan cara penanganan pertumbuhan anak sebagai bagian dari keluarga dengan asupan gizi dan perawatan yang baik. Oleh karena status gizi mempengaruhi kecerdasan, daya tahan tubuh terhadap penyakit, kematian bayi, kematian ibu dan produktivitas kerja. Anak-anak umur 0–5 tahun merupakan golongan yang paling rawan terhadap gizi, anak-anak biasanya menderita bermacam-macam infeksi serta berada dalam status gizi rendah bahkan buruk. Berikut Gambar 2.42 jumlah kasus Balita Gizi Buruk/ Kurang Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021 :



Sumber: Profil Kesehatan Kota Banda Aceh, 2022

Gambar 2. 42 Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk/Kurang Tahun 2017-2021

Berdasarkan Gambar 2.42 di atas menunjukkan jumlah kasus balita gizi buruk/kurang pada tahun 2021 sebanyak 24 kasus, lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 yaitu hanya 10 kasus. Sejak tahun 2017-2021 jumlah kasus Balita Gizi Buruk/Kurang mengalami fluktuasi, hal ini terjadi karena adanya perubahan sistem pelaporan dari Puskesmas. Sejak tahun 2018 sistem pelaporan sudah menggunakan aplikasi e-PPBGM (elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat), dimana data pemantauan status gizi anak sudah semakin akurat. Sementara itu, pada tahun-tahun sebelumnya masih menggunakan mode pencatatan dan pelaporan manual. Kecenderungan peningkatan kasus ini akan menjadi tugas besar bagi tenaga kesehatan untuk meningkatkan upaya sejak promotif, kuratif dan rehabilitatif. Sampai dengan saat ini, semua kasus yang ditemukan sudah ditangani 100%. Namun demikian, masih ditemukan beberapa kasus gizi buruk/kurang bagi anak balita yang belum tertangani secara maksimal yang disebabkan oleh penyakit penyerta.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, kondisi kekurangan gizi dalam waktu yang lama dapat menyebabkan kondisi gagal tumbuh pada tubuh dan otak, atau yang dikenal dengan istilah stunting. Stunting merupakan kondisi anak yang gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis dan berlangsung lama. Umumnya stunting terjadi pada 1000 hari pertama atau saat anak berada di dalam kandungan hingga usia 2 tahun. Berbeda dengan gizi buruk/kurang, stunting berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Untuk mengetahui persentase stunting di Kota Banda Aceh tahun 2017-2021, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Tabel 2. 41 Persentase Stunting Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021

Tahun	Jumlah Balita	Stunting	Persentase (%)
2017	20.758 ^{*)}	235	1.13
2018	20.137 ^{*)}	65	0.32
2019	20.846 ^{*)}	211 ^{*)}	1.01
2020	17.922	197	1.10
2021	21.699	186	0.85

Sumber: Laporan Rutin dan Survey PSG Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, 2022

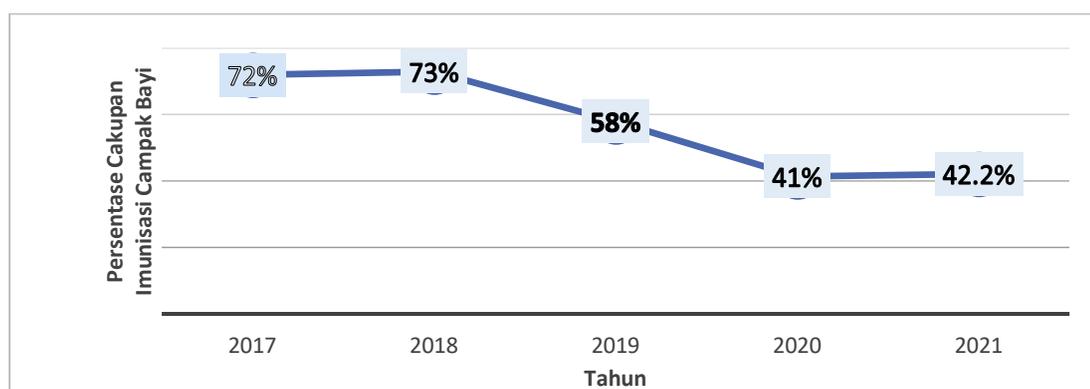
^{*)} Data tahun 2017-2019 disesuaikan

Berdasarkan Tabel 2.41 di atas dapat dilihat pada tahun 2021 persentase stunting di Kota Banda Aceh mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 persentase stunting di Kota Banda Aceh sebesar 0,85%, sedangkan tahun 2020 sebesar 1,10%. Jumlah balita yang mengalami stunting di Kota Banda Aceh tahun 2021 sebanyak 186 jiwa.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di atas, Pemerintah Kota Banda Aceh perlu melakukan upaya mengatasi gizi buruk/kurang dan stunting pada anak. Tingginya angka gizi buruk/kurang dan stunting ini juga terjadi sebagai akibat dari kemiskinan. Walaupun kemiskinan dan kesehatan adalah dua hal yang berbeda, namun dalam banyak kasus hal ini sangatlah berkaitan. Oleh karena itu perlu dilakukan peningkatan pelayanan kesehatan dan pengurangan angka kemiskinan secara bersamaan. Usaha-usaha promotif dan preventif perlu diprioritaskan dalam membangun kesehatan anak dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penanganan secara komprehensif memerlukan sinergisitas kegiatan antara perangkat daerah dan masyarakat.

12. Cakupan Imunisasi Campak Bayi

Salah satu penyakit yang termasuk ke dalam golongan PD3I (Penyakit Menular yang dapat di Cegah dengan Imunisasi) adalah campak. Penyakit campak (*Measles*) adalah salah satu penyakit yang sangat menular. Cakupan imunisasi campak pada bayi Kota Banda Aceh dari Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Gambar 2.43:



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, 2022

Gambar 2. 43 Cakupan Kasus Campak Bayi Tahun 2017-2021

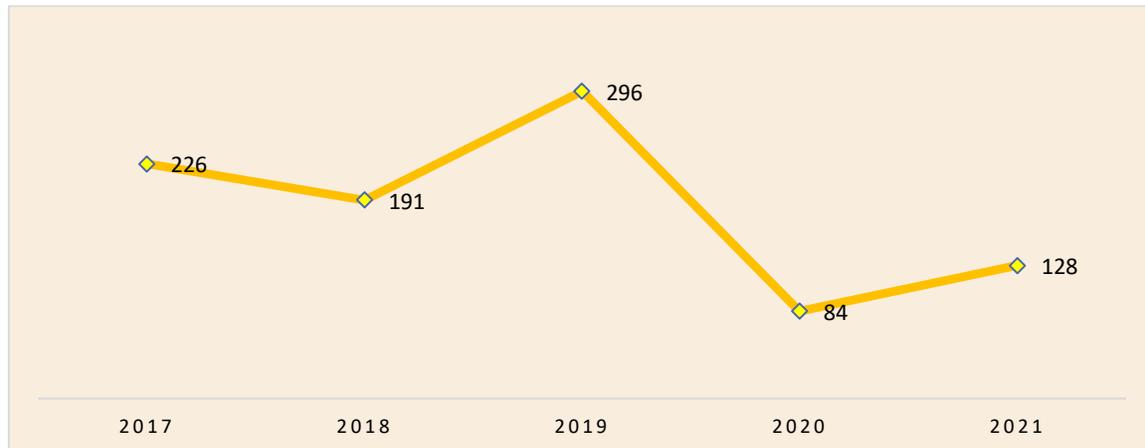
Pada Gambar 2.43 di atas dapat dilihat bahwa tidak semua bayi yang ada di Kota Banda Aceh telah mendapatkan imunisasi campak. Cakupan bayi yang mendapatkan imunisasi campak adalah terus menurun, dengan angka terendah terjadi pada Tahun 2020 (41 persen) dan Tahun 2021 sebesar 1.394 bayi dari 6.563 bayi di tahun tersebut, atau 42,2 persen. Penurunan cakupan imunisasi campak dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah keengganan orang tua untuk melakukan imunisasi campak pada bayi dan adanya kekhawatiran masyarakat terhadap legalitas kehalalan bahan imunisasi.





13. Jumlah Kasus Campak

Campak yang juga dikenal dengan sebutan *Morbili* atau Measles, merupakan salah satu penyakit yang sangat mudah menular yang disebabkan oleh virus. Gejala penyakit campak adalah demam tinggi, bercak kemerahan pada kulit (*rash*) disertai dengan batuk dan/atau pilek dan/atau mata merah (*conjunctivitis*). Penyakit ini sering menyebabkan kejadian luar biasa (KLB). Penyakit ini tidak bisa diobati, namun pengobatan yang dapat diberikan kepada penderita hanya bersifat suportif. Tapi, penyakit ini dapat dicegah dengan imunisasi. Berikut Gambar 2.44 memperlihatkan jumlah kasus campak di Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021 :



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, 2022

*) Data 2018 dan 2019 disesuaikan

Gambar 2. 44 Jumlah Kasus Campak Tahun 2017-2021

Gambar 2.44 menunjukkan jumlah kasus campak berfluktuasi dari Tahun 2017-2021, dimana lonjakan tertinggi terjadi pada Tahun 2019 dengan jumlah kasus 296 kasus. Angka ini terus berfluktuasi hingga Tahun 2021 sebesar 128 kasus dengan insiden rate suspek campak sebesar 46,3 persen per 100.000 penduduk. Cakupan imunisasi campak sangat penting untuk mencegah penyakit ini dan menutup kesenjangan sehingga tidak ada daerah yang dapat menjadi sumber penularan. Cakupan imunisasi yang tinggi dan merata minimal 95% dapat membentuk *herd immunity* dan memutus rantai penularan penyakit campak.

14. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC

Tuberkulosis (TB) merupakan penyakit menular yang menyerang paru-paru dan bisa berdampak pada bagian tubuh lainnya. TB menyebar melalui udara dan bila tidak diobati dapat menyebabkan 50 persen orang yang terinfeksi meninggal. Penemuan pasien bertujuan untuk mendapatkan pasien TB melalui serangkaian kegiatan dari mulai penjarangan terhadap terduga pasien TB. Pemeriksaan fisik dan laboratoris dilakukan untuk menentukan klasifikasi penyakit serta tipe pasien TB.

Dalam menilai kemajuan atau keberhasilan program pengendalian TB digunakan beberapa indikator. Indikator utama program pengendalian TB secara Nasional ada 2, yaitu:

1. Cakupan Penemuan Kasus TB (*Case Notification Rate* = CNR)
2. Angka Keberhasilan Pengobatan TB (*Treatment Success Rate* = TSR).

Dari Tabel 2.42 berikut dapat dilihat cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TB di Kota Banda Aceh pada periode Tahun 2017-2021 :





Tabel 2. 42 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TB Kota Banda Aceh Tahun 2017-20

Tahun	Cakupan Penemuan Kasus TB (Case Notification Rate = CNR)	Angka Keberhasilan Pengobatan TB (Treatment Success Rate = TSR)
2017	300.94	100%
2018	177	100%
2019	255	97,9%*)
2020	147	91,7%
2021	435	81,32%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, 2022

*) Data tahun 2019 disesuaikan

Dari Tabel 2.42 di atas dapat dilihat bahwa Cakupan penemuan kasus TB (CNR) di Kota Banda Aceh dari Tahun 2017 sampai 2021 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2017 kasus TB sebesar 300,94 kasus per 100.000 penduduk, menurun pada Tahun 2018 menjadi sebesar 177 kasus. Kasus TB kembali naik pada tahun 2019 sebesar 255 kasus per 100.000 penduduk. Pada Tahun 2021, data terakhir penemuan kasus TB sebesar 435 kasus dan merupakan angka tertinggi pada periode lima tahun tersebut. Perbedaan angka terhadap penemuan kasus disebabkan karena sistem penjarangan kasus TB disarana pelayanan kesehatan dari sebelumnya dilakukan secara pasif (sistem menunggu di layanan kesehatan) menjadi aktif (sistem mencari langsung ke masyarakat) sehingga lebih banyak kasus yang ditemukan. Sedangkan Penurunan kasus TB disebabkan karena mulai sadarnya masyarakat dalam melaporkan kasus TB sehingga dapat ditangani dengan cepat dan didukung juga dengan fasilitas dan sumber daya manusia di sarana pelayanan kesehatan.

Angka Keberhasilan Pengobatan TB Kota Banda Aceh pada Tahun 2017 dan 2018 sebesar 100 persen. Namun pada Tahun 2019-2021 masing-masing terjadi penurunan menjadi 97,9%, 91,7%, dan 81,32% lebih disebabkan karena tidak adanya data konfirmasi terkait pasien sembuh. Data diatas menunjukkan bahwa target kesembuhan pasien sudah melebihi target nasional yaitu 80 persen. Tercapainya keberhasilan ini didukung oleh kepatuhan pengobatan pasien, selain itu penemuan pasien dilakukan dengan kegiatan aktif di puskesmas untuk memantau pasien melalui kegiatan BOK dan Pemberian Makanan Tambahan pada pasien.

15. Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk)

Sejak 2017 hingga 2021, tidak ditemukan lagi kasus kematian dikarenakan penyakit TB, adapun pada Tahun 2021 ditemukan 15 kasus terdeteksi namun tidak menyebabkan kematian. Proporsi kasus TB yang diobati dan sembuh mencapai 95%, sisanya masih dalam proses pengobatan. Perilaku atau pola hidup pasien serta adanya komplikasi dengan penyakit lainnya menjadi faktor pendorong terjadinya kasus kematian, juga peran pemerintah terkait dengan tingginya angka keberhasilan pengobatan (Success Rate) TB BTA+ (Bahan Tahan Asam) dengan selalu tersedianya obat di fasilitas kesehatan tingkat pertama.

16. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Penyakit demam berdarah *dengue* (DBD) adalah penyakit infeksi virus yang ditularkan oleh nyamuk aedes aegypti. Penyakit DBD masih merupakan salah satu penyakit yang menjadi masalah kesehatan di Indonesia. Hal ini bisa disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya tingginya curah hujan sehingga banyak terjadi genangan air pada wadah atau tempat yang dapat menampung air hujan sebagai tempat perindukan nyamuk DBD di lingkungan luar sekitar rumah, faktor yang lainnya juga dapat dilihat dari tingkat pengetahuan, pemahaman dan kepedulian serta





Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di masyarakat yang masih rendah, bisa dikarenakan tidak mengetahui ataupun tidak mempunyai kesempatan untuk memantau tempat-tempat perindukan nyamuk DBD yang ada di dalam rumah, seperti ditempat penampungan air dispenser, kulkas, bak mandi, vas bunga, talang air yang tersumbat dan lain lain. Hal ini menjadi salah satu faktor berkembang biaknya nyamuk DBD secara cepat.

Tabel 2. 43 Sebaran Kasus DBD Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021 (dalam Orang)

Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021
Kuta Alam	32	13	49	14	3
Lueng Bata	32	7	34	9	1
Meuraxa	15	23	41	11	4
Syiah Kuala	26	15	60	15	0
Ulee Kareng	21	6	36	6	3
Banda Raya	25	11	31	14	1
Jaya Baru	37	13	42	15	0
Kuta Raja	11	11	13	2	0
Baiturrahman	37	17	38	12	0
Total	236	111	344	98	12

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, 2022

Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kota Banda Aceh pada tahun 2021 bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jauh mengalami penurunan, dimana pada tahun 2017 (236 kasus), tahun 2018 (111 kasus), tahun 2019 mencapai angka tertinggi di 344 kasus yang dilaporkan. Namun di tahun 2020 menurun menjadi 98 kasus dan pada tahun 2021 menjadi 13 kasus.

Penanggulangan DBD yang masih sangat efektif adalah dengan melakukan Gerakan 3M Plus, yaitu Menguras, Menutup dan Mengubur serta Menghindari Gigitan Nyamuk. Pengasapan atau *fogging* hanya membunuh nyamuk dewasa saja, sedangkan jentik nyamuk DBD masih tetap bertahan hidup dan menjadi nyamuk dewasa setelah beberapa hari kemudian. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengawasan dan pemberantasan tempat-tempat perindukan nyamuk DBD dengan cara Pemberdayaan Masyarakat melalui Kader JUMANTIK = Juru Pemantau Jentik.

Berikut pada Gambar 2.45 dapat dilihat kasus kematian DBD di Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021 :



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, 2022

Gambar 2. 45 Kasus Kematian Akibat DBD Tahun 2017-2021



Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD sangat memuaskan yakni 100%, hal ini disebabkan karena DBD merupakan penyakit musiman yang dapat dicegah melalui pola hidup bersih dan sehat, dilaksanakan melalui promosi kesehatan lingkungan yang terus menerus.

Adapun kasus kematian akibat DBD terjadi pada Tahun 2017 dan 2019 masing-masing sebanyak 1 kasus disebabkan karena pasien terlambat melaporkan ke fasilitas kesehatan sehingga terlambat mendapatkan penanganan. Pada tahun 2020 jumlah kasus DBD mengalami penurunan menjadi 98 kasus dan tidak ada kasus kematian yang disebabkan oleh DBD.

17. Penderita Diare yang Ditangani

Penyakit diare masih menjadi salah satu masalah Kesehatan yang menjadi fokus pemerintah, karena penyakit ini masih sering timbul dalam bentuk Kejadian Luar Biasa (KLB) dan disertai dengan angka kematian yang tinggi. Diare juga menjadi salah satu penyebab sebagian besar kematian pada anak usia dibawah lima tahun di Indonesia. Berikut akan tersedia data terkait Penderita Diare yang Ditangani di Kota Banda Aceh, dimana Penderita diare yang ditangani adalah jumlah penderita yang datang dan dilayani di Puskesmas. Berikut pada Gambar 2.46 dapat dilihat penderita diare yang ditangani di Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021 :



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, 2022

Gambar 2. 46 Penderita Diare yang Ditangani Tahun 2017-2021

Berdasarkan Gambar 2.46 di atas terjadi peningkatan jumlah penderita diare yang ditangani dari Tahun 2017 hingga Tahun 2021, dimana pada Tahun 2017 jumlahnya adalah 2.653 penderita dan mengalami peningkatan hingga 3.283 kasus pada Tahun 2019. Pada tahun 2020 jumlah penderita diare mengalami penurunan sebesar 1391 kasus, dan pada 2021 sebanyak 1.713 kasus, terdiri atas 1.376 kategori semua umur dan 337 kasus balita. Angka-angka tersebut diatas merupakan angka penderita yang dilayani oleh 11 puskesmas, umumnya pasien diberikan oralit dan zinc serta melakukan pengobatan lanjutan di rumah.

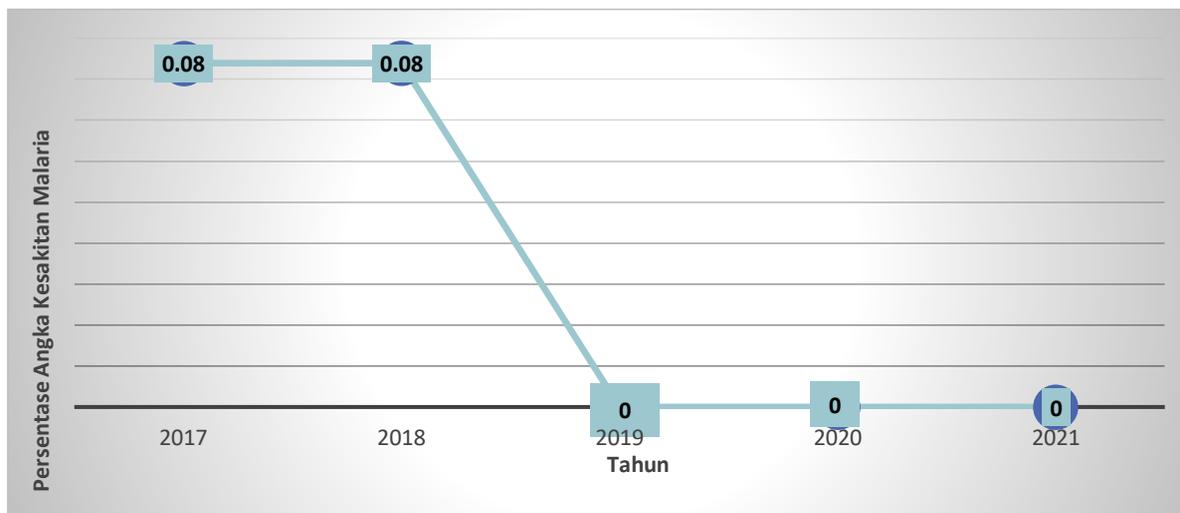
18. Angka Kesakitan Malaria (*Annual Parasit Incidence*)

Malaria merupakan penyakit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk *Anopheles* betina yang mengandung *Plasmodium* didalamnya. Penyakit ini harus ditangani dengan cepat, karena dapat menimbulkan komplikasi dan menyebabkan kematian. Prevalensi Malaria atau Angka Kesakitan Malaria (*Annual Parasit Incidence*) dihitung dari banyaknya kasus malaria yang baru dengan yang lama dibagi jumlah penduduk di wilayah Kota Banda Aceh. Angka Kesakitan Malaria digunakan untuk menentukan tingkat endemisitas atau tingkat penularan malaria di suatu daerah.





Kasus malaria yang dimaksud disini adalah kasus malaria dengan diagnosa positif yaitu kasus dengan gejala klinis malaria. Berikut pada Gambar 2.47 dapat dilihat angka kesakitan malaria di Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021 :



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, 2022

Gambar 2. 47 Angka Kesakitan Malaria Tahun 2017-2021

Berdasarkan Gambar 2.47, sejak Tahun 2017 hingga 2021 bisa diasumsikan kasus kesakitan malaria di Kota Banda Aceh adalah rendah. Pada Tahun 2019 hingga 2021 angka kesakitan malaria per 1.000 penduduk di Kota Banda Aceh adalah 0, sedangkan jumlah kasus positif hanya sebanyak 2 kasus dari 122 suspect yang dikonfirmasi melalui hasil laboratorium.

19. Jumlah Kasus Baru HIV

HIV (*Human Immunodeficiency Syndrome*) menyebabkan penyakit AIDS (*Acquired Immunodeficiency Syndrome* (AIDS)) dan dapat ditularkan melalui hubungan seksual yang tidak aman, beresiko, jarum suntik yang digunakan bersama, produk darah dan cairan tubuh serta dari ibu hamil yang positif HIV dapat menularkan kepada bayinya. Berikut pada Tabel 2.44 dapat dilihat jumlah kasus HIV dan AIDS di Kota Banda Aceh Tahun 2021 :

Tabel 2. 44 Jumlah Kasus HIV dan AIDS di Kota Banda Aceh Tahun 2021

No	Kelompok Umur	H I V				Aids			
		L	P	L+P	Proporsi Kelompok Umur	L	P	L+P	Proporsi Kelompok Umur
1	≤ 4 Tahun	0	0	0	0	0	0	0	0
2	5 - 14 Tahun	1	0	1	0	0	0	0	0
3	15 - 19 Tahun	1	0	1	0	0	0	0	0
4	20 - 24 Tahun	15	0	15	0	1	0	1	0
5	25 - 49 Tahun	23	1	24	0	18	1	19	0
6	≥ 50 Tahun	0	0	0	0	1	0	1	0
Jumlah		40	1	41	0	20	1	21	0

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, 2022



Berdasarkan Tabel 2.44 di atas dapat dilihat kasus HIV di Kota Banda Aceh dalam kurun waktu Tahun 2021 terdapat 41 kasus HIV dengan rincian pada kelompok umur 5-14 tahun sejumlah 1 kasus, Kelompok umur 15-19 tahun sejumlah 1 kasus, Kelompok umur 20-24 tahun sejumlah 15 kasus dan 24 kasus pada kelompok umur 25-49 tahun. Sebanyak 41 kasus hanya 1 kasus yang berjenis kelamin perempuan. Dari jumlah penderita HIV tersebut, sebanyak 20 orang berjenis kelamin laki-laki dan 1 orang berjenis kelamin perempuan positif mengidap AIDS. Kegiatan pengendalian HIV/AIDS untuk menghentikan epidemi AIDS di Kota Banda Aceh diperlukan untuk mencegah kematian yang disebabkan oleh keadaan yang berkaitan dengan AIDS.

20. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin adalah jumlah rujukan pasien masyarakat miskin dibagi dengan jumlah pasien masyarakat miskin kali 100 di wilayah dalam kurun waktu yang sama. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan sudah berbasis hak seluruh masyarakat sehingga tidak membedakan lagi berdasarkan tingkat sosial ekonominya. Berikut pada Gambar 2.48 dapat dilihat cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin di Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021 :



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, 2022

Gambar 2. 48 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021

Berdasarkan Gambar 2.48 di atas, cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin menunjukkan tren yang menurun. Jumlah tertinggi penderita yang ditangani pada tahun 2017 sebanyak 19 kasus dan terendah pada Tahun 2016 sebanyak 9 kasus. Pada tahun 2020 cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin menurun dari tahun sebelumnya sebesar 11 kasus. Penurunan cakupan ini terjadi sejak Tahun 2018-2020 yang dapat diasumsikan karena jumlah penderita yang turun atau kurangnya pelayanan yang memadai bagi pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat miskin. Cakupan ini tergantung pada kondisi kesehatan masyarakat miskin sehingga cakupannya tidak 100 persen. Namun demikian pasien masyarakat miskin yang datang ke sarana kesehatan semuanya tertangani dengan baik. Pada tahun 2021 data tentang cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin tidak tersedia.

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik

Pembangunan infrastruktur jalan di Kota Banda Aceh mutlak diperlukan, mengingat peran dan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial Kota Banda Aceh. Jalan mempunyai peranan penting dalam bidang ekonomi, sosial





budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Artinya infrastruktur jalan merupakan urat nadi perekonomian suatu wilayah, hal ini disebabkan perannya dalam menghubungkan serta meningkatkan pergerakan manusia, dan barang.

Panjang ruas jalan dibedakan berdasarkan status/kewenangan pembinaannya yang dikelompokkan menjadi Jalan Nasional, Jalan Propinsi, dan Jalan Kota. Jalan Nasional pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat (Kementerian PUPR), Jalan Provinsi pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Aceh (Dinas PUPR Propinsi Aceh), dan Jalan Kota yang pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah Kota (Dinas PUPR Kota Banda Aceh). Dari Tabel 2.45 berikut dapat dilihat panjang ruas jalan berdasarkan status di Kota Banda Aceh Tahun 2021 :

Tabel 2. 45 Panjang Ruas Jalan Berdasarkan Status (Jalan Nasional, Provinsi dan Kota) Kota Banda Aceh Tahun 2021

Status Jalan		
Nasional (Km)	Provinsi (Km)	Kota (Km)
32,56	22,61	620,960

Sumber : Dinas PUPR Kota Banda Aceh, 2022

Berdasarkan Tabel 2.45 di atas dapat dilihat dari total panjang ruas jalan nasional, yang termasuk jalan provinsi sebesar 22,61 Km dan jalan Kota Banda Aceh sebesar 620,960 Km. Kondisi ruas jalan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam kondisi baik, sedang, rusak ringan dan rusak berat. Kondisi jalan yang baik/ rusak merupakan ukuran yang dapat menggambarkan baik buruknya operasional lalu lintas berupa kecepatan, waktu tempuh (efiensi waktu), kenyamanan, pandangan bebas, keamanan dan keselamatan Jalan. Berikut pada Tabel 2.46 dapat dilihat status kondisi jalan di Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021:

Tabel 2. 46 Status Kondisi Jalan Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021

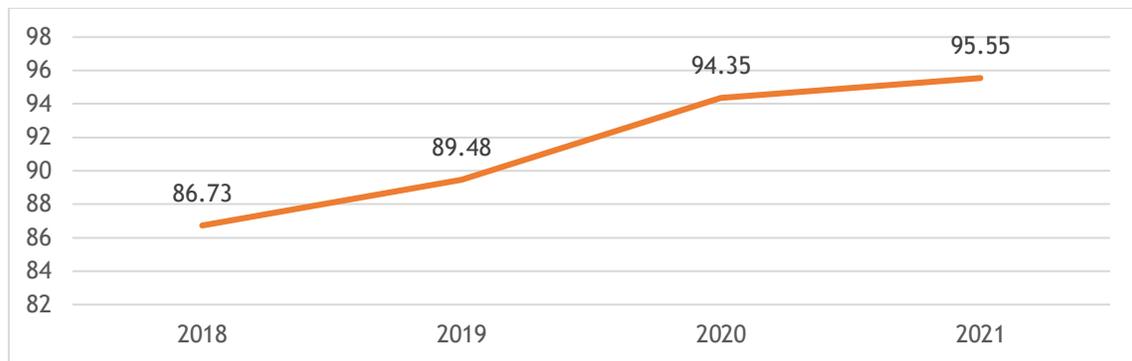
Tahun	Panjang Jalan (km) (SK No. 221A Thn 2010)	Kondisi Ruas Jalan							
		Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat	
		Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
2017	707,343	569.780	80,55	92.110	13,02	31.470	4,44	13.983	1,97
2018	707,343	542.712	76,73	97.596	13,80	61.297	8,67	5.738	0,81
2019	707,343	558.634	78,98	101.646	14,37	42.365	5,99	4.698	0,66
2020	620.960	585.890	94,35	22.329	3,59	10.795	1,74	1.949	0,31
2021	620.960	591.030	95,18	18.891	3,04	9.112	1,47	1.926	0,31

Sumber : Dinas PUPR Kota Banda Aceh, 2022

Tabel diatas menunjukkan menunjukkan status kondisi jalan Kota Banda Aceh pada tahun 2021, 95,18 persen dalam kondisi baik, 3,04 persen dalam kondisi sedang 1,47 persen dalam kondisi rusak ringan, dan hanya 0,31 persen dalam keadaan rusak berat.

Pertumbuhan sosial, ekonomi, dan pembangunan di kota Banda Aceh sebagai ibukota Provinsi Aceh sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan infrastruktur jalan yang memperlancar, merangsang dan memacu aktifitas pembangunan. Saat ini panjang jalan di Kota Banda Aceh 620,960 km dengan kondisi baik 95,55 persen.





Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh, 2022

Gambar 2. 49 Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik Tahun 2018 - 2021

Gambar di atas terlihat bahwa trend panjang jaringan jalan dalam kondisi baik sejak tahun 2018 sampai dengan 2021 terus menunjukkan peningkatan.

Dari total jalan yang ada di Kota Banda Aceh, panjang jalan yang memiliki trotoar mengalami peningkatan dari tahun 2017 yang sebelumnya 23,753 km menjadi 59,435 km di tahun 2021. Walaupun mengalami peningkatan namun jika melihat persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase di Kota Banda Aceh masih sangat kecil. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah Kota Banda Aceh untuk menyediakan trotoar dan drainase untuk menciptakan Kota Banda Aceh yang bebas dari banjir. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.47.

Tabel 2. 47 Persentase Panjang Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase (km)	23,753	59,435	59,435	59,435	59,435
Panjang seluruh jalan kota (km)	707,343	707,343	707,343	620,960	620,960
Persentase	3,36	8,40	8,40	9,57	9,57

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh, 2022

2. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Sektor sanitasi yang mencakupi bidang air limbah, persampahan dan drainase merupakan salah satu sektor pelayanan publik yang mempunyai kaitan erat dengan kesehatan masyarakat. Rendahnya kualitas sanitasi menjadi salah satu faktor bagi menurunnya derajat kesehatan masyarakat.

Pengembangan sanitasi Kota Banda Aceh bertujuan untuk meningkatkan kondisi infrastruktur serta pelayanan sanitasi menyeluruh sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota. Persentase rumah tinggal yang berakses air bersih/sanitasi di Kota Banda Aceh dari Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.48 di bawah ini:

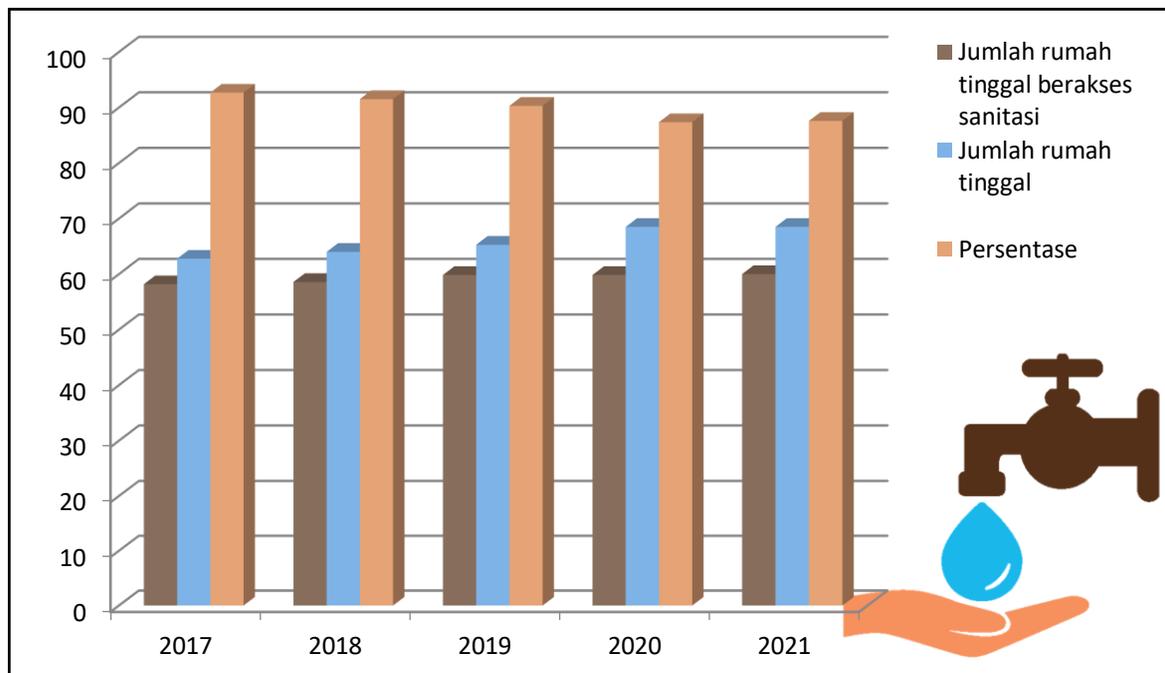
Tabel 2. 48 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kota Banda Aceh, 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi	58.176	58.576	59.848	59.848	59.998
2.	Jumlah rumah tinggal	62.774	65.228	66.280	68.507	68.507
3.	Persentase	92.68	89,80	90,30	87,36	87,58

Sumber : Dinas PUPR Kota Banda Aceh, 2022

Berikut pada Gambar 2.50 dapat dilihat Persentase rumah tinggal yang berakses air bersih/sanitasi di Kota Banda Aceh dari Tahun 2017-2021:





Sumber : Dinas PUPR Kota Banda Aceh, 2022

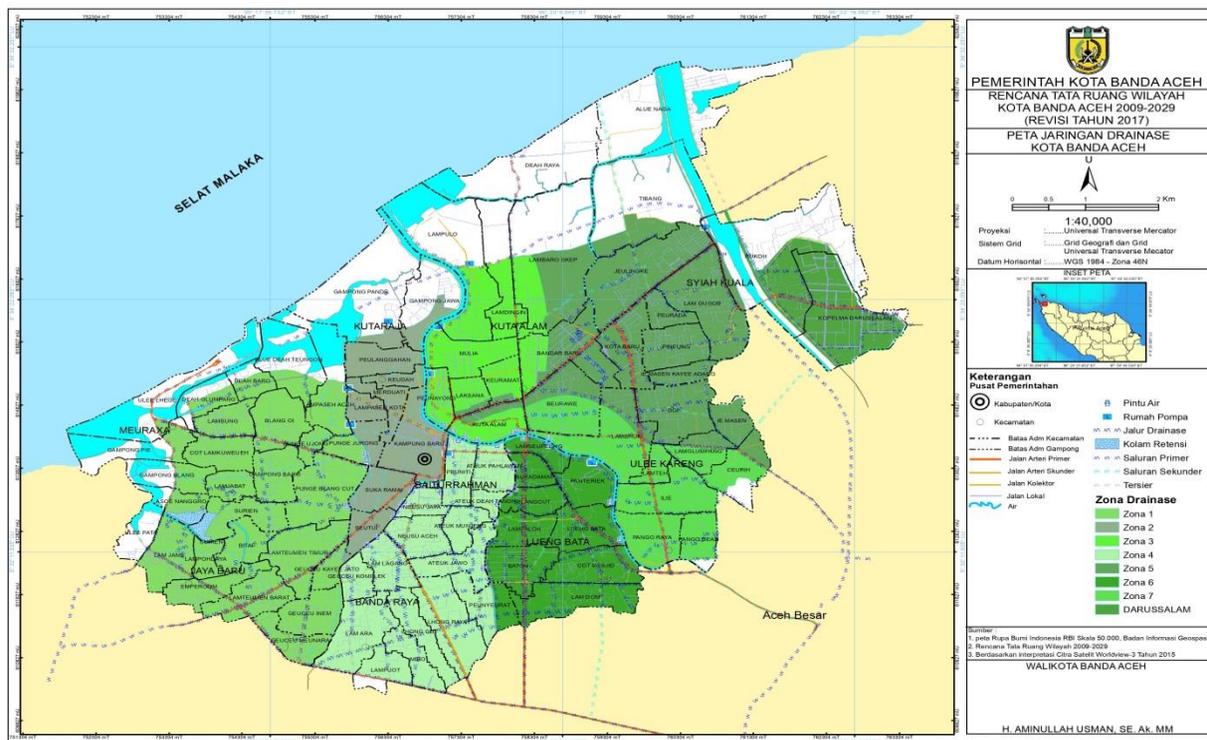
Gambar 2. 50 Jumlah Rumah Tangga yang Bersanitasi Tahun 2017 - 2021

Berdasarkan Tabel 2.48 dan Gambar 2.50 persentase rumah tinggal yang berakses sanitasi pada tahun 2017 mencapai 92,68 persen. Namun pada tahun 2021, jumlah rumah tinggal yang berakses sanitasi menurun menjadi 87,58 persen. Penurunan ini menjadi perhatian Kota Banda Aceh dan perlu ditingkatkan karena seharusnya jumlah rumah tinggal bersanitasi perlu untuk terus ditingkatkan per tahunnya, hingga mencapai 100 persen.

3. Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/ Pembangunan Aliran Air Tidak Tersumbat

Pengembangan sistem drainase di Kota Banda Aceh harus mempertimbangkan kondisi geografis yang relatif datar dan berada pada kawasan pesisir sehingga Kota Banda Aceh termasuk salah satu kota pantai. Rata-rata kondisi topografi berada pada elevasi 0,80 meter di atas permukaan air laut dan memiliki bentuk permukaan lahan relatif datar dengan kemiringan (lereng) antara 2-8 persen. Pengembangan sistem drainase juga harus mempertimbangkan kondisi daratan yang merupakan dataran banjir Krueng Aceh. Sungai Krueng Aceh mengalir melalui Kota Banda Aceh dan memiliki anak sungai seperti Krueng Daroy, krueng Doy dan Krueng Neng yang berfungsi sebagai saluran drainase alam yang menjadi outlet dari saluran-saluran drainase yang ada. Peta Pembagian Zona Drainase Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Gambar 2.51 :





Sumber : Dinas PUPR Kota Banda Aceh, 2021

Gambar 2. 51 Peta Pembagian Zona Drainase Kota Banda Aceh

Akibat kondisi topografi yang relatif datar, Kota Banda Aceh sangat rentan terhadap banjir kiriman, banjir genangan dan banjir pasang air laut. Oleh karena itu diperlukan saluran drainase yang baik. Untuk lebih jelasnya kondisi drainase Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Tabel 2.49:

Tabel 2. 49 Kondisi Drainase di Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021

Tahun	Panjang Total Drainase (km)		Kondisi Drainase							
	Makro	Mikro	Baik (km)		Sedang (km)		Rusak Ringan (km)		Rusak Berat (km)	
			Makro	Mikro	Makro	Mikro	Makro	Mikro	Makro	Mikro
2017	186,61	2.248,24	155,72	1.729,37	5,80	48,910	21,82	465,96	3,26	4
2018	188,90	2.258,90	157,38	1.745,34	5,80	47,673	22,95	461,91	2,75	4
2019	189,70	2.260,40	159,46	1.769,64	5,80	45,941	22,95	440,82	1,51	4
2020	190,30	2.262,55	160,48	1.812,13	5,80	45,858	22,95	400,56	1,09	4
2021	191,83	2.263,30	191,69	1.821,78	5,80	44,570	22,95	392,91	9,04	4

Sumber : Dinas PUPR Kota Banda Aceh, 2022

Berdasarkan Tabel 2.49 di atas dapat dilihat bahwa panjang total drainase makro dan mikro mengalami peningkatan sejak Tahun 2017 hingga Tahun 2021. Pada Tahun 2021 panjang total drainase makro adalah 191,83 km yang mengalami penambahan panjang sejak Tahun 2017. Begitu juga dengan panjang total drainase mikro di Tahun 2021 sepanjang 2263,30 km yang bertambah panjang dari Tahun 2017. Tahun 2021 sebesar 191,69 km drainase makro berada dalam kondisi baik. Sedangkan drainase mikro dengan kondisi baik sebesar 1821,78 km. Drainase makro yang rusak terus mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh penanganan yang baik terhadap pengelolaan sistem drainase terutama jaringan saluran drainase sehingga saluran drainase yang berfungsi dengan baik dapat terus meningkat. Panjang drainase mikro yang rusak konstan sejak Tahun 2017 hingga Tahun 2021, yaitu sepanjang 4,00 km.





Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan yang diatur di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan meliputi upaya perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, pemeliharaan, pemantauan dan evaluasi sistem fisik dan non fisik drainase perkotaan. Adapun Sistem teknis drainase perkotaan yang dilakukan oleh Dinas PUPR Kota Banda Aceh tidak hanya meliputi jaringan drainase perkotaan yang terdiri dari saluran induk/primer, saluran sekunder, saluran tersier, saluran local saja. Namun juga penanganan terhadap bangunan peresapan, bangunan tampungan beserta sarana pelengkapannya yang berhubungan secara sistemik dengan jaringan saluran drainase.

Dalam perencanaan drainase terdapat banyak faktor yang perlu pertimbangan seperti pendangkalan saluran (sedimentasi), limbah, sampah dan pasang surut air laut. Pada tempat-tempat tertentu seperti pada pertemuan drainase dengan badan air (*receiving waters*) khususnya di dekat pantai perlu direncanakan bangunan kolam pengumpul yang dilengkapi dengan pompa.

Pembagian zonasi drainase ini dilakukan berdasarkan sungai yang ada di Kota Banda Aceh. Pembuangan akhir dari drainase pada zona 1 diarahkan menuju Kr. Neng dan Kr. Doy, Zona 2 menuju Kr. Aceh dan Kr. Doy. Zona 3 menuju Kr. Aceh, Zona 4 menuju Kr. Daroy dan Kr. Lueng Paga, Zona 5 menuju Kr. Titi Panyang dan Kr. Cut, Zona 6 menuju Kr. Lueng Paga dan Kr. Tanjung, Zona 7 dan Zona 8 menuju Kr. Aceh dan Kr. Cut. Tabel 2.50 menunjukkan persentase panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase di Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021.

Tabel 2. 50 Persentase Panjang Jalan Yang Memiliki Trotoar dan Drainase Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase (km)	23.753	59.435	59.435	59.435	59.435
Panjang seluruh jalan kota (km)	707.343	707.343	707.343	620.960	620.960

Sumber : Dinas PUPR Kota Banda Aceh, 2022

Berdasarkan Tabel 2.50 di atas, perbandingan panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase pada Tahun 2021 sebesar 59.435 km. Panjang seluruh jalan kota pada Tahun 2021 sebesar 620.960 km. Namun, angka ini masih rendah dan perlu dilakukan pemeliharaan dan pembangunan jalan yang memiliki trotoar dan drainase yang masih harus ditingkatkan.

4. Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Kebutuhan akan air bersih saat ini meningkat dengan tajam sejalan pertambahan jumlah penduduk, pertumbuhan kegiatan ekonomi dan meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya air minum untuk hidup sehat. Dilain pihak, kapasitas sarana dan prasarana sistem penyediaan air minum yang ada saat ini sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan air minum masyarakat, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas produksi dan jaringan pipa distribusi air minum.

Sumber air yang digunakan oleh PDAM Tirta Daroy adalah dari Krueng Aceh, sungai terbesar yang membelah Kota Banda Aceh. Untuk menaikan muka air dan menjaga adanya *intrusi* air laut kedalam sungai Krueng Aceh telah terpasang unit bendung karet. Upaya-upaya untuk tetap menjaga kuantitas air dan kualitas air yang



baik harus dilaksanakan dengan strategi yang jelas dan program kegiatan yang baik, antara lain dengan:

- Menjaga kualitas air baku agar tetap memenuhi daya dukungnya dengan melakukan monitoring secara rutin;
- Menindak tegas tanpa ada tawar menawar pada semua industri dan atau lainnya yang membuang limbah cairnya ke badan air sehingga kualitas mengalami penurunan;
- Melakukan pengamanan terhadap kawasan daerah pengaliran sungai, agar tetap menjadi daerah tangkapan air yang baik bagi Sungai Krueng Aceh;
- Melakukan koordinasi dengan Pihak BWS Sumatera 1 sebagai pemilik kewenangan atas Krueng Aceh di Bawah Wilayah Sungai Aceh-Meureudu.



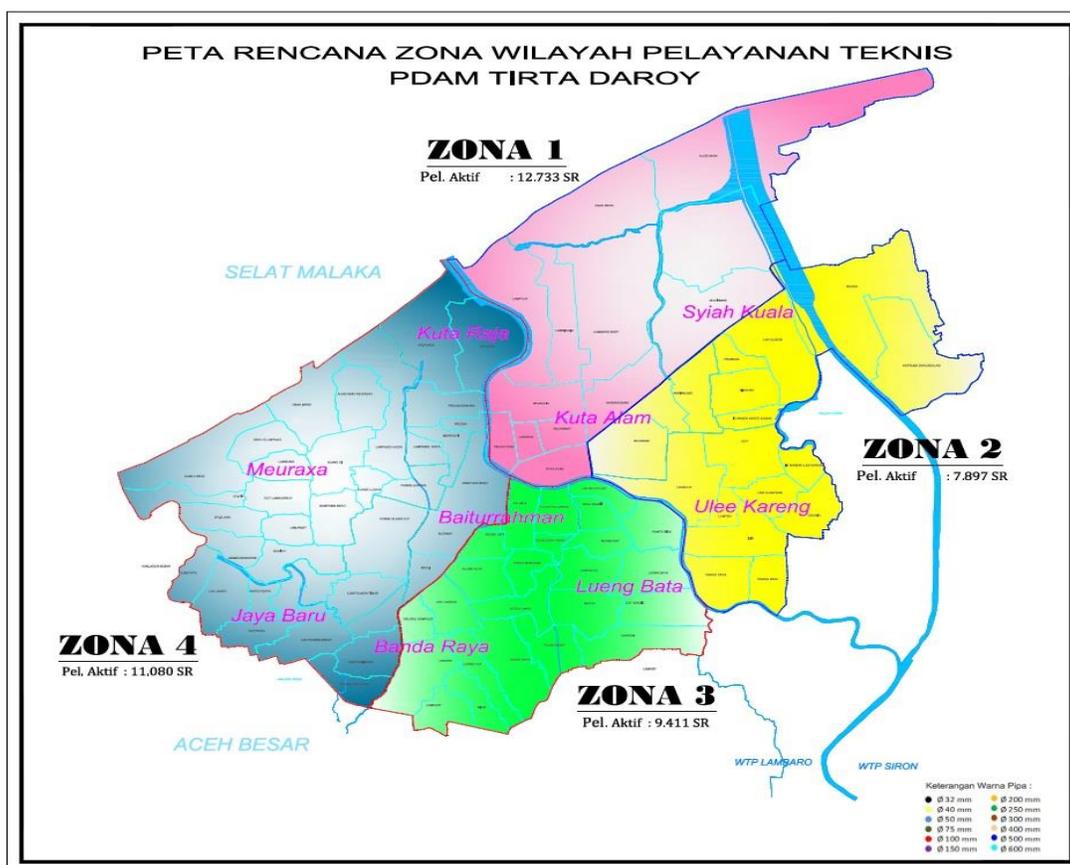
Sumber : Humas Kota Banda Aceh, 2022

**Gambar 2. 52 Walikota Banda Aceh, H. Aminullah Usman, SE. Ak, MM
Melakukan Sidak WTP Tirta Daroy di Lambaro**

Untuk mendukung terlaksananya sistem penyediaan air minum dengan baik, maka sistem pendistribusian dan pola pelayanan air minum Kota Banda Aceh pun harus mengikuti pertumbuhan kepadatan kota yang terus meningkat. Salah satunya dengan membentuk Zona Distribusi untuk membagi blok pelayanan secara teknis perpipaan. Tujuan pembentukan Zona Distribusi, antara lain :

1. Standar Pelayanan 4 K dapat tercapai dan terlaksana dengan baik;
2. Memudahkan dalam manajemen pengelolaan;
3. Memudahkan dalam manajemen pemeliharaan;
4. Meminimalisir tingginya tingkat kehilangan air (NRW).

Peta rencana zona wilayah pelayanan teknis PDAM Tirta Daroy dan Peta rencana jaringan air bersih Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Gambar 2.53 dan 2.54:



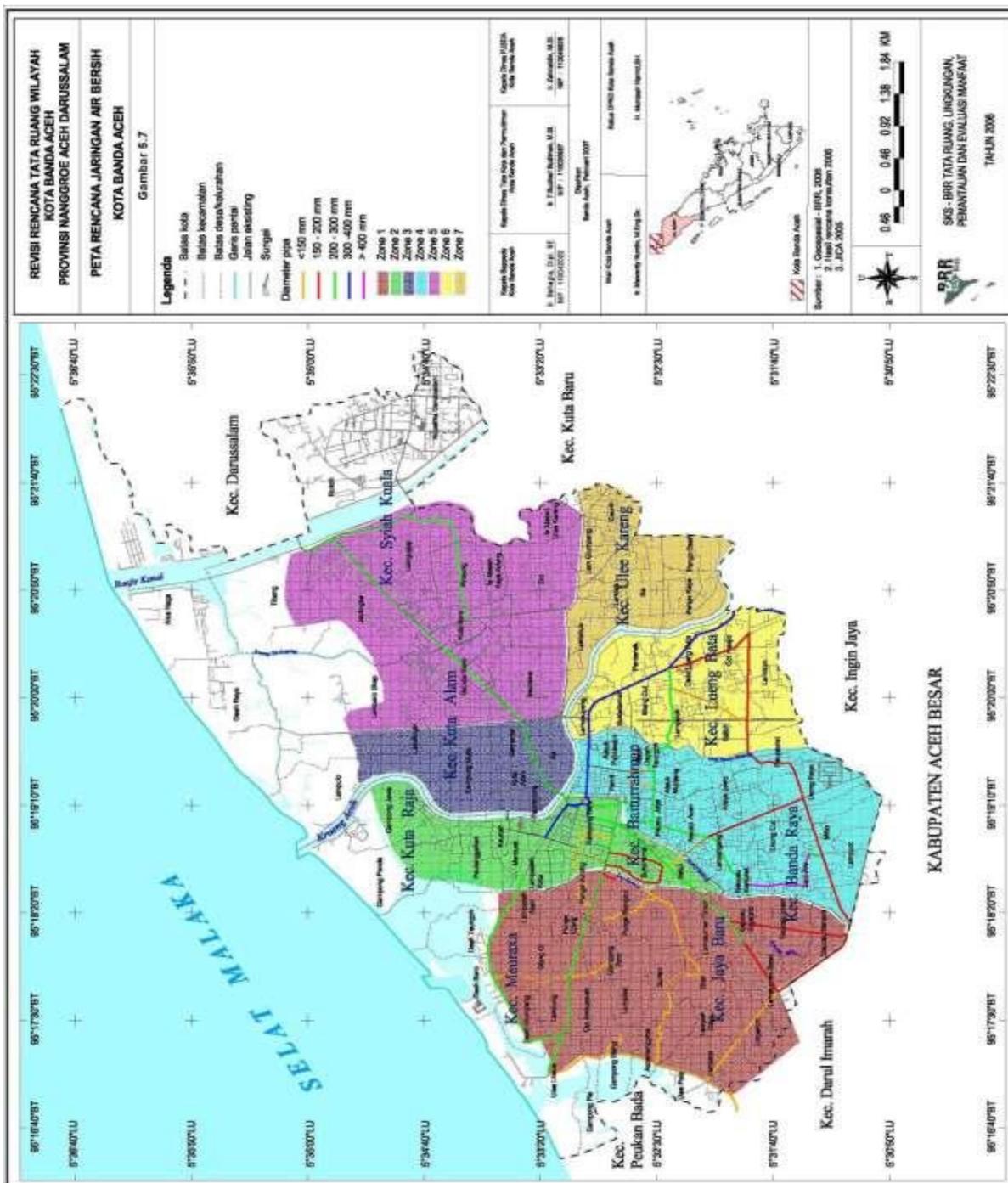
Sumber : PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh Tahun 2017

Gambar 2. 53 Peta Rencana Zona Wilayah Pelayanan Teknis PDAM Tirta Daroy

Sumber air yang digunakan oleh PDAM Tirta Daroy adalah dari Krueng Aceh, sungai terbesar yang membelah Kota Banda Aceh. Untuk menjaga adanya intrusi air laut kedalam sungai Krueng Aceh telah terpasang unit bendung karet. Namun demikian, kondisi bendung karet saat ini dalam keadaan rusak dan membutuhkan perbaikan atau pembangunan unit yang baru. Saat ini pemerintah Kota Banda Aceh melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera 1 tengah merencanakan pembangunan bendung karet baru sehingga kualitas air baku dapat terjaga dengan optimal.

Berdasarkan data tahun 2008, pada tahun 2007 debit Sungai Krueng Aceh 177,88m³/detik atau dengan rata-rata per-bulan sebesar 14,82 m³/detik, sehingga sungai Krueng Aceh sebagai sumber air baku yang potensial bagi penyediaan air bersih Kota Banda Aceh dan perlu dijaga dengan baik, karena air permukaan sangat rawan terhadap pengaruh pencemaran. Upaya-upaya untuk tetap menjaga kuantitas air dan kualitas air yang baik harus dilaksanakan dengan strategi yang jelas dan program kegiatan yang baik, antara lain dengan:

- Menjaga kualitas air baku agar tetap memenuhi daya dukungnya dengan melakukan monitoring secara rutin,
- Menindak tegas tanpa ada tawar-menawar pada semua industri dan atau lainnya yang membuang limbah cairnya ke badan air sehingga kualitas mengalami penurunan,
- Melakukan pengamanan terhadap kawasan daerah pengaliran sungai, agar tetap menjadi daerah tangkapan air yang baik bagi Sungai Krueng Aceh.



Sumber: Dinas PUPR Kota Banda Aceh, 2008

Gambar 2. 54 Peta Rencana Jaringan Air Bersih Kota Banda Aceh Tahun 2029

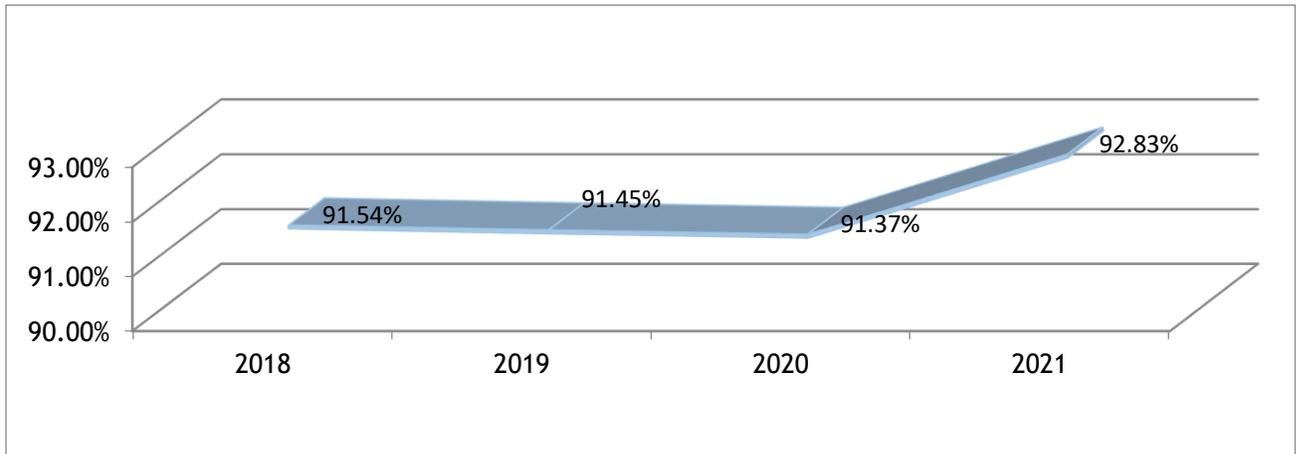
Salah satu solusi yang bisa ditawarkan dalam masalah ini adalah pemanfaatan Sungai Sarah sebagai sumber air bersih untuk warga Kota Banda Aceh. Sungai Sarah lebih tepat untuk menjadi sumber air karena masih alami dan belum tercemar. Walau begitu pemerintah Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar harus mengkomunikasikan hal ini dengan baik, karena sungai Sarah berada di wilayah Aceh Besar.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum disebutkan bahwa setiap pelanggan air minum berhak memperoleh pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan.





Data Tahun 2018-2021 menunjukkan persentase cakupan pelayanan air minum di Kota Banda Aceh telah mencapai 92,83 persen. Walaupun persentase menunjukkan kenaikan namun cakupan layanan ini belum mencapai 100 persen. Untuk itu, Pemerintah Kota Banda Aceh masih perlu untuk memberikan cakupan layanan air minum kepada penduduknya sampai dengan 100 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber : Dinas PUPR Kota Banda Aceh, PDAM Tirta Daroy, 2022

Gambar 2. 55 Cakupan Pelayanan Air Minum di Kota Banda Aceh Tahun 2018-2021

5. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Ber HPL/ HGB

Ruang Terbuka Hijau (*Green Openspaces*) adalah kawasan atau areal permukaan tanah yang didominasi oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi perlindungan habitat tertentu, dan atau sarana lingkungan/ kota, dan atau pengamanan jaringan prasarana, dan atau budidaya pertanian. Selain untuk meningkatkan kualitas atmosfer, menunjang kelestarian air dan tanah, Ruang Terbuka Hijau (*Green Openspaces*) di tengah-tengah ekosistem perkotaan juga berfungsi untuk meningkatkan kualitas lansekap kota.

Hasil identifikasi dan analisis Luas RTH yang dimiliki Pemerintah Kota Banda Aceh di 9 (sembilan) kecamatan dari Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.51 berikut ini:

Tabel 2. 51 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Luas Ruang Terbuka Hijau	1.258,80	779,42*	779,42*	779,42	779,42
2	Luas wilayah	6.136	5.903,42	5.903,42	5.903,42	5.903,42
3	Rasio Ruang Terbuka Hijau (2:1) (%)	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20

Sumber: Dinas PUPR Kota Banda Aceh, 2022

Target capaian Ruang terbuka hijau yang ideal adalah 30 persen dari luas wilayah, yaitu 10 persen RTH private dan 20 persen RTH Publik. Adapun luas RTH publik Tahun 2021 yang ada di Kota Banda Aceh saat ini baru mencapai 13,20% persen dari luas kota. Ini belum memenuhi RTH yang ditetapkan. Perlu upaya pemerintah Kota Banda Aceh untuk mensiasati pemenuhan RTH.



6. Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan

Jumlah bangunan di Kota Banda Aceh Tahun 2021 sebanyak 75.273 unit. Bangunan di Kota Banda Aceh yang terbangun sebelum tahun 2004 (sebelum terjadinya bencana Tsunami) tidak memiliki akurasi yang lengkap terhadap dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB) mengingat banyak arsip IMB yang hilang pasca terjadinya tsunami. Pasca tsunami terjadinya pertumbuhan bangunan yang begitu pesat dari tahun ke tahun, bahkan pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi tahun 2005 sampai dengan 2009 adanya pertumbuhan bangunan antara 2.000 unit sampai dengan 3.000 unit bangunan setiap tahunnya. Data bangunan yang memiliki IMB di Kota Banda Aceh, untuk bangunan yang telah terbangun sebelum tahun 2004 diprediksikan 50% memiliki IMB, sedangkan pasca tsunami pada saat rehab dan rekon pembangunan bangunan yang memiliki IMB sebanyak ±60% bangunan telah melakukan pengurusan IMB dari jumlah yang dibangun.

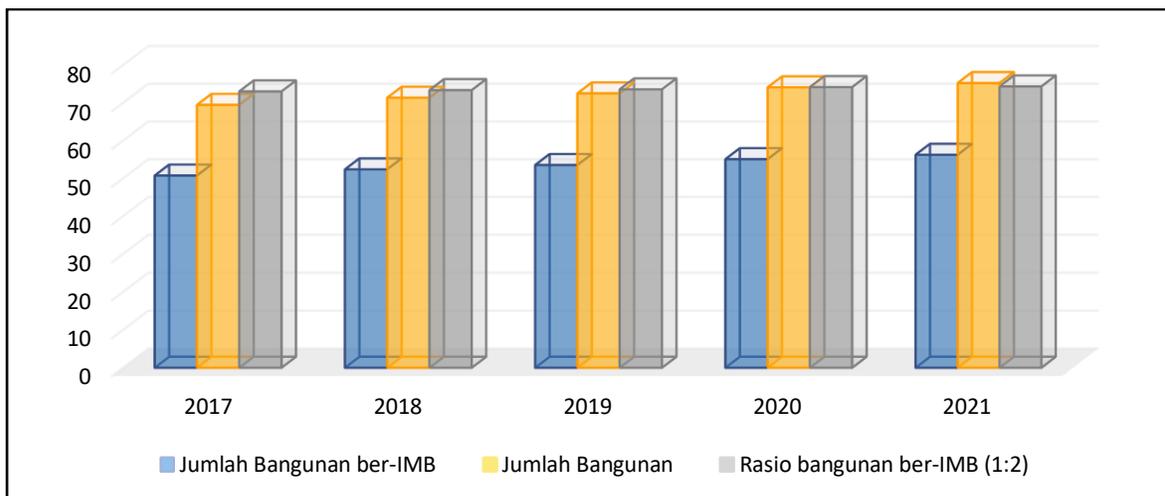
Analisis data bangunan yang memiliki IMB di Kota Banda Aceh, dikaji dengan perkiraan persentase pada bangunan yang terbangun sebelum tahun 2004 dan dikombinasikan dengan data bangunan yang mengurus IMB baik bangunan telah ada maupun bangunan yang dibangun baru dari tahun ke tahun. Rasio bangunan ber-IMB di Kota Banda Aceh tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.52 berikut ini:

Tabel 2. 52 Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Bangunan ber-IMB	50.771	52.408	53.555	55.108	56.271
2	Jumlah Bangunan	69.497	71.389	72.536	74.139	75.273
3	Rasio bangunan ber-IMB (1:2)	73,05	73,40	73,60	74,20	74,37

Sumber : Dinas PUPR Kota Banda Aceh, 2022

Rasio bangunan ber-IMB di Kota Banda Aceh tersebut dapat dilihat Gambar 2.56 berikut ini:



Sumber : Dinas PUPR Kota Banda Aceh, 2022

Gambar 2. 56 Jumlah Bangunan ber-IMB Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021

Berdasarkan Tabel 2.52 dan Gambar 2.56 di atas dapat dilihat persentase jumlah bangunan yang memiliki IMB dari tahun 2017-2021 mengalami peningkatan. Artinya hampir 75 persen jumlah bangunan yang ada di Kota Banda Aceh sudah memiliki izin bangunan. Meski terjadi peningkatan pada persentase ini, pemerintah Kota Banda Aceh tetap perlu melakukan pengawasan agar terciptanya tata letak bangunan di Kota Banda Aceh yang teratur dan nyaman.



7. Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya

Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengeluarkan perizinan pemanfaatan ruang mengacu pada RTRW Kota Banda Aceh. Jumlah ruang publik yang tersedia dari Tahun 2017 hingga Tahun 2021 di Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Tabel 2.53 berikut ini:

Tabel 2. 53 Jumlah Ruang Publik yang Tersedia Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Ruang Publik yg Tersedia	779,42	779,42	779,42	779,42	779,42
2	Ruang Publik yg Berubah Fungsi	0	0	0	0	0
3	Ruang Publik yg Berubah Peruntukannya (%)	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas PUPR Kota Banda Aceh, 2022

Berdasarkan Tabel 2.53 di atas, selama kurun Tahun 2017-2021 pemanfaatan ruang publik seluas 779,42 Ha di Kota Banda Aceh belum berubah fungsinya untuk pemanfaatan lainnya.

8. Ketaatan terhadap RTRW

Berdasarkan Undang-undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Berdasarkan undang-undang tersebut, Pemerintah Kota Banda Aceh melakukan Penataan Ruang yang berpijak pada kondisi dan potensi wilayah dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ditetapkan dalam Qanun (Perda) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029.

Pembangunan yang dilaksanakan dalam pengembangan Kota Banda Aceh yang mengacu pada Qanun tersebut seperti penyesuaian pemanfaatan lahan berdasarkan pola ruang dan struktur ruang yang ada dalam Qanun RTRW Kota Banda Aceh. Salah satu indikator ketaatan terhadap RTRW Kota adalah pelaksanaan pembangunan baik bangunan pemerintah, bangunan swasta, bangunan masyarakat yang dibangun sesuai dengan peruntukan kawasan yang ditetapkan dalam RTRW Kota Banda Aceh. Peningkatan pemahaman dalam implementasi penyelenggaraan penataan ruang dilakukan dengan upaya-upaya sosialisasi penataan ruang kepada setiap *stakeholder*, sehingga diprediksikan setiap tahunnya ditargetkan adanya peningkatan kesesuaian pembangunan dengan rencana pola ruang yang telah ditetapkan dan berimplikasi pada peningkatan rasio ketaatan terhadap RTRW. Rasio ketaatan masyarakat terhadap RTRW dapat dilihat pada Tabel 2.54 berikut:

Tabel 2. 54 Rasio Ketaatan Terhadap RTRW Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021 (dalam Persen)

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Realisasi RTRW	71,07	73,41	73,83	78,57	81,07
2	Rencana Peruntukan RTRW	100	100	100	100	100
3	Rasio (1/2)	0,71	0,73	0,74	0,79	0,81

Sumber: Dinas PUPR Kota Banda Aceh, 2022





Tabel 2.54 di atas menunjukkan dari Tahun 2017 sampai dengan 2021 realisasi pemanfaatan ruang sesuai RTRW mengalami peningkatan. Peningkatan ini terjadi melalui perizinan IMB, pengawasan dan penertiban secara rutin oleh Tim Pengawasan Bangunan di Dinas PUPR. Ketaatan terhadap RTRW ini menunjukkan adanya kesadaran masyarakat tentang rencana tata ruang kota yang ada serta keterbukaan informasi tentang tata ruang.

D. Perumahan dan Kawasan Permukiman

1. Ketersediaan Rumah Layak Huni

Kota Banda Aceh sebagai ibukota Propinsi Aceh menjadi pusat pendidikan dan perekonomian berupa pusat-pusat perdagangan dan jasa dan berbagai tempat wisata. Dampak dari aktifitas tersebut adalah meningkatnya jumlah penduduk yang diikuti oleh meningkatnya kebutuhan rumah tangga. Rumah layak huni didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta Kesehatan penghuninya. Dalam mewujudkan perumahan yang layak huni, dukungan dan bantuan dari pemerintah dalam penyediaan rumah layak huni menjadi penting. Hingga saat ini, persentase cakupan rumah layak huni di Kota Banda Aceh sudah cukup tinggi. Hal ini terlihat seperti tercantum pada Tabel 2.55 dibawah ini.

Tabel 2. 55 Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Rumah	63.806	66.024	67.613	68.507	54.689
2	Jumlah Rumah Layak Huni	63.480	64.144*)	65.852*)	64.314	50.424
	Persentase	99,44	97,875	98,13	93,88	92,20

Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banda Aceh, 2022

Jumlah rumah layak huni pada tahun 2017 telah mencapai 63.480 unit. Namun, jumlah rumah layak huni pada tahun 2021 menurun menjadi 50.424 unit. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan dalam mengidentifikasi rumah layak huni sebelum tahun 2020. Namun, ini tetap menjadi permasalahan yang perlu diselesaikan oleh pemerintah melalui dinas terkait dimana jika dibandingkan antara jumlah rumah dengan jumlah rumah layak huni yang ada di tahun 2021, masih ada 7,80 persen lagi rumah yang belum layak huni di Kota Banda Aceh.

2. Kawasan Kumuh

Kota Banda Aceh belum sepenuhnya terlepas dari permasalahan kualitas lingkungan pemukiman. Keluhan yang paling sering disampaikan mengenai permukiman masyarakat miskin adalah rendahnya kualitas lingkungan dan kesehatan yang harus ditangani melalui kegiatan penataan kawasan permukiman. Pemukiman kumuh, yang sering disebut sebagai *slump area*, berpotensi menimbulkan banyak masalah perkotaan seperti masalah lingkungan, kesehatan, dan perilaku menyimpang, seperti kejahatan dan penyakit sosial lainnya.

Tertatanya kawasan permukiman kumuh akan memberikan manfaat terhadap lingkungan, yaitu:

1. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan mengurangi kekumuhan
2. Mengurangi dampak pencemaran lingkungan
3. Mengurangi tingkat bahaya pada saat bencana
4. Mengurangi dampak banjir yang kerap terjadi karena tidak tersedianya drainase lingkungan yang layak





Berdasarkan hasil Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) di Tahun Anggaran 2021, luas area permukiman kumuh mengalami penurunan dari 461,48 ha menjadi 451 ha. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan yang telah dilakukan di berbagai wilayah permukiman kumuh sudah baik. Namun perlu juga dilakukan upaya pencegahan agar tidak ada penambahan lokasi kumuh di Kota Banda Aceh. Diharapkan Kota Banda Aceh bisa mewujudkan terciptanya kotaku (kota tanpa kumuh) sehingga target 0% daerah kumuh dapat terwujud.

Untuk lebih jelasnya luas kawasan kumuh di Kota Banda Aceh Tahun 2017 hingga Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.56 berikut ini:

Tabel 2. 56 Luas Kawasan Kumuh Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021 (dalam Ha)

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	537,19	485,29	21,06	461,48	451,40
2	Luas Wilayah (Ha)	59.002	59.002	59.002	59.002	59.002
3	Luas Penanganan (Ha)	51,9	464,23	16,16	4,90	N/A
4	Sisa Luas Kawasan (Ha)	485,29	21,06	4,90	456,58	451,40

Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banda Aceh, 2022

Berdasarkan Tabel 2.56 di atas, luas kawasan kumuh pada Tahun 2017 sampai dengan 2019 terus menurun. Pada tahun 2020, luas kawasan kumuh meningkat yang disebabkan karena perbedaan dalam penilaian kawasan kumuh. Sejak tahun 2020, luas kawasan kumuh dihitung tidak hanya dalam penanganan kawasan kumuh saja, namun telah menambahkan luas kawasan yang berpotensi kumuh dan perlu dicegah menjadi kawasan kumuh.

Pembangunan kawasan permukiman kumuh yang perlu ditekankan adalah pada pembangunan sarana prasarana dasar permukiman seperti jalan, drainase, pengelolaan sampah dan lampu jalan. Tentunya hal ini sangat bermanfaat bagi masyarakat karena kebutuhan dasar dari sarana prasarana permukiman merupakan hal utama terkait dengan kegiatan sehari-hari masyarakat, yaitu meningkatnya akses masyarakat dari kawasan permukiman ke pusat aktifitas perekonomian berupa pertokoan dan pasar.

E. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Dalam rangka mewujudkan ketenteraman, dan ketertiban umum salah satu yang dilakukan Satuan Polisi & Wilayatul Hisbah (Satpol PP & WH) adalah penegakan peraturan daerah (Perda)/Qanun. Persentase penegakan Perda/Qanun dari Tahun 2018 hingga Tahun 2021 pada Tabel 2.57 sebagai berikut:

Tabel 2. 57 Persentase Penegakan Perda Kota Banda Aceh Tahun 2018-2021

No	Uraian	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah penyelesaian penegakan perda (kasus)	372	762	421	436
2	Jumlah pelanggaran perda (kasus)	531	920	421	436
3	Persentase penegakan perda (persen)	70,06	82,83	100	100

Sumber : Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, 2022

Tabel 2.57 di atas menunjukkan dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021 realisasi persentase penegakan Perda/ Qanun Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Persentase penegakan perda yang terbesar terjadi di tahun 2020 dan 2021 yang mencapai 100 persen. Sedangkan persentase terkecil terjadi tahun 2018 sebesar 70,06 persen dimana dari 531 jumlah pelanggaran perda yang dapat diselesaikan sebanyak 372 penegakan perda.





Tercapainya persentase penegakan Perda/Qanun dipengaruhi oleh tingginya volume jam kerja yang telah diterapkan dengan mengoptimalkan 6 (enam) regu Pol PP Putra, 1 (satu) regu Pol PP Putri, 3 (tiga) regu WH Putra, 1 (satu) regu WH Putra, 2 (dua) regu malam (kalong) yang bertugas mulai pukul 08.00 s/d 06.00 keesokan harinya. Tugas ini juga didukung tim pengintai pelanggaran syariat yang berjumlah 6 (enam) personil secara bergantian serta pendampingan langsung dari personil Intel Kodam Iskandar Muda baik dalam upaya penyelidikan, investigasi maupun melakukan pengamanan tertutup bagi personil Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh.

Komposisi rasio patroli pengawasan Perda/Qanun meliputi patroli ke masing-masing kecamatan yang terindikasi adanya pelanggaran Perda/Perwal/Qanun. Target utamanya adalah pembebasan kawasan bebas PKL, melakukan penindakan terhadap anak-anak sekolah yang bolos, menertibkan anak jalanan/punk, penertiban Gepeng (gelandangan dan pengemis) atau PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial). Patroli juga menertibkan dan memberhentikan bangunan tanpa IMB, serta melakukan sosialisasi terhadap kawasan bebas asap rokok. Sedangkan dalam penegakan qanun syariat islam, Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh berhasil menertibkan kawasan jalan pembangunan (gang mabuk) dari lokalisasi PSK, terminal keudah dari lokalisasi PSK, waria, dan gay serta wilayah –wilayah lainnya yang sering teridentifikasi terjadinya pelanggaran Qanun Syariat Islam dalam Wilayah Hukum Kota Banda Aceh.

Sejak Tahun 2018 Satpol PP dan WH telah memasukkan cakupan petugas Linmas (perlindungan Masyarakat) kedalam IKU (Indikator Kinerja Utama) sebagai salah satu capaian kinerja yang harus terealisasi dan memerlukan perhatian khusus mengingat satlinmas merupakan garda terdepan dalam pemeliharaan kantrantibmas di masing-masing gampong. Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kota banda Aceh Tahun 2017 hingga Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.58 di bawah ini:

Tabel 2. 58 Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	0	5	5	5,72	5,26

Sumber : Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, 2022

Tabel 2.58 di atas menunjukkan cakupan petugas perlindungan masyarakat sejak 2017-2021. Pada Tahun 2018 sampai 2019 berjumlah 5 orang per gampong. Dimulai pembentukannya pada Tahun 2018, Kota Banda Aceh telah merekrut dan mengukuhkan sebanyak 450 personil Satlinmas yang berasal dari 90 gampong yang ada di Kota Banda Aceh dengan cakupan rata-rata per gampong sebanyak 5 Orang hingga Tahun 2019, sedangkan tahun 2020 dan 2021 Satpol PP dan WH masing-masing merekrut rata-rata 5,72 dan 5,26 dari 90 gampong yang ada di Kota Banda Aceh.

Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017, tugas dan fungsi Linmas hanya dibebankan pada saat penyelenggaraan Pilkada dan Pemilu Pilpres, sehingga dalam mencapai target cakupannya tidak dapat menjadi tolak ukur yang signifikan karena pembentukan Satlinmas pada Gampong-gampong tidak definitif atau difungsikan secara musiman hanya pada saat pemilu dan Pilkada.





Penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh yaitu tindakan preventif non yustisial sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. Pelanggaran terhadap perda/ qanun yang mengandung unsur pidana, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh melalui PPNS meneruskan proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk lebih terperinci tingkat penyelesaian pelanggaran K3 dari Tahun 2018 hingga Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.59 berikut:

Tabel 2. 59 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan Kota Banda Aceh Tahun 2018-2021 (dalam Persen)

No	Uraian	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah penyelesaian pelanggaran K3 (kasus)	126	241	66	163
2.	Jumlah pelanggaran K3 (kasus)	129	273	66	164
3.	Persentase penyelesaian K3 (%)	97,67	88,28	100	99,40

Sumber : Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, 2022

Tabel 2.59 di atas menunjukkan tingkat penyelesaian pelanggaran K3 meningkat dari Tahun 2018 hingga Tahun 2021. Pada Tahun 2018 sampai dengan 2021, persentase penyelesaian K3 terus mengalami peningkatan. Sampai dengan tahun 2021, dari 164 pelanggaran K3, sebanyak 163 kasus berhasil diselesaikan. Hanya 1 kasus belum berhasil diselesaikan. Tingkat penyelesaian kasus di Tahun 2021 sebesar 99,40 persen dari total kasus. Di samping itu, pada tahun 2024 akan diadakan kegiatan Pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Legislatif (Pileg), Pilkada dan Pilchiksung, ini merupakan kegiatan sosialisasi menyeluruh kepada masyarakat, Pilpers, Pileg, Pilkada direncanakan akan dilaksanakan pada Tahun 2024. Sedangkan Pilchiksung di Kota Banda Aceh akan dilaksanakan khusus kepada Kepala Desa atau keuchik yang direncanakan akan diadakan serentak pada tahun 2023 dan 2025.

1. Cakupan Pelayanan Penanggulangan Kebakaran Kota

Cakupan Pelayanan Penanggulangan Kebakaran yang selanjutnya disingkat PPK adalah sumber daya yang berpotensi kebakaran yang perlu mendapat perlindungan dari bahaya kebakaran yang membentuk Wilayah Manajemen Kebakaran, selanjutnya disebut WMK oleh daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai wilayah yurisdik urusan pemerintahannya. WMK bertujuan untuk mendukung pengurangan risiko kebakaran pada lingkungan dan/atau kawasan berpotensi kebakaran antara lain: pemukiman, perindustrian/ pabrik, bangunan gedung, hutan dan lahan maupun kebakaran lainnya seperti pda kawasan tertentu pertambangan, depot bahan bakar minyak dan atau bahan yang sangat mudah terbakar, pelabuhan, bandara dan lingkungan yang memiliki potensi kebakaran lainnya.

Rumus Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran yaitu:

$$\frac{\Sigma \text{Luas WMK (luas lingkaran)}}{\Sigma \text{luas potensi kebakaran}} \times 100 \%$$

$$\frac{6 \text{ WMK (7.5)}}{\Sigma \text{luas potensi kebakaran}} \times 100 \%$$

$$61,36$$

$$= 73,34 \%$$





Oleh Karena itu Kota Banda Aceh harus membentuk 2 (dua) WMK lagi untuk Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran 100 %.

$$\frac{8 \text{ WMK } (7,5) \times 100 \%}{61,36} = 97,78 \%$$

Cakupan pelayanan penanggulangan kebakaran di Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.60 berikut ini:

Tabel 2. 60 Cakupan Pelayanan Penanggulangan Kebakaran Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021

Tahun	Wilayah Manajemen Kebakaran (km ²)			Luas Kota Banda Aceh (km ²)	Persentase (%)
2017	19,64	5	Pos	61,36	160,04
2018	19,64	5	Pos	61,36	160,04
2019	19,64	5	Pos	61,36	160,04
2020	19,64	5	Pos	61,36	160,04
2021	19,64	5	Pos	61,36	160,04

Sumber : DPKP Kota Banda Aceh, 2022

Berdasarkan Tabel 2.60 di atas, Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kota Banda Aceh sejak 2017 sampai dengan 2021 masih memiliki 5 pos.

2. **Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)**

Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) Daerah Layanan WMK adalah pelayanan Pemadam Kebakaran pada saat Tanggap Darurat yang efektif, dan bereaksi cepat dan tepat tiba dilokasi kejadian kebakaran untuk pengurangan risiko kebakaran dengan waktu minimal yang diperlukan, dimulai saat menerima informasi dari warga/penduduk sampai tiba ditempat kejadian kebakaran, yang langsung melakukan tindakan pemadaman api, penyelamatan jiwa dan harta benda. Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) adalah rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 15 (lima belas) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada pemukiman, bangunan gedung, pabrik/ industri yang tidak lebih dari 60 (enam puluh) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada kawasan hutan dan lahan dengan jumlah kejadian kebakaran di WMK.

Tabel 2. 61 Tingkat Waktu Tanggap Darurat (*Response Time*) Layanan

Tahun	Kasus di WMK yang Tanggap 15 Menit	Kasus Kebakaran Dalam WMK	Persentase(%)
2017	58	58	86,56
2018	42	42	100
2019	26	26	100
2020	48	48	100
2021*	50	50	100

*Tahun 2021 adalah data per 31 November 2022

Data tingkat waktu tanggap darurat layanan untuk kebakaran di Kota Banda Aceh sejak tahun 2017 sampai dengan 2021 terus membaik. Seluruh kasus kebakaran yang terjadi di Kota Banda Aceh, pelayanan DPKP sudah memenuhi waktu tanggap darurat mencapai 100 persen.





Jumlah kasus kebakaran sejak tahun 2017–2021 adalah 395 kasus, yang didominasi oleh perumahan/permukiman sebanyak 140 kasus, kemudian bangunan perkantoran sebanyak 139 kasus, dan hutang/ilalang sebanyak 116 kasus.

Tabel 2. 62 Jumlah Kasus Kebakaran Tahun 2017 – 2021

No	Jenis Kebakaran	2017	2018	2019	2020	2021*
1	Bangunan Perkantoran Pemerintah/ Swasta	36	7	7	20	43
2	Perumahan/pemukiman penduduk.	34	13	30	17	24
3	Hutan/ ilalang/ semak bulukar	15	13	59	3	7
	JUMLAH	85	33	96	40	74

Sumber : DPKP Kota Banda Aceh, 2022

Jika dilihat trend kasus setiap tahunnya untuk tahun 2017-2021, jumlah kasus kebakaran di tahun 2017 adalah 85 kasus dan kemudian menurun menjadi 33 kasus di tahun 2018. Namun pada tahun 2019 kembali meningkat dan kemudian menurun pada tahun 2020 dan 2021.

F. Sosial

Aspek sosial berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 tahun 2012 dapat dilihat dari 2 (dua) sisi yaitu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Sedangkan PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam masyarakat memang terdapat masalah sosial tetapi perlu diakui bahwa potensi penyelesaiannya juga berasal dari masyarakat. Oleh karena itu perlu pembinaan yang baik dan tepat dari pemerintah sebagai pengayom masyarakat. Tabel 2.63 berikut menyajikan jenis PMKS dan jumlah penyandangannya di Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021:

Tabel 2. 63 Penyandang Masalah Sosial Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021

No	Jenis Permasalahan Sosial	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Anak dengan Kecacatan	98	98	98	98	-
2	Anak Yatim, Piatu, dan Anak Yatim Piatu	2.077	2.080	2.080	2.080	-
3	Anak Terlantar	37	30	13	21	44
4	Anak Bermasalah Hukum	40	52	108	51	31
5	Anak Jalanan	30	45	55	50	14
6	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	930	930	930	930	-
7	Lanjut Usia Terlantar	7	5	3	11	15
8	Lanjut Usia	2.490	2.490	2.495	439	43
9	Penyandang Disabilitas	477	477	477	389	202
10	Pengemis	69	65	103	132	95
11	Gelandangan	5	4	3	47	17
12	Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan	2	2	3	NA	NA
13	Korban Penyalahgunaan NAPZA	18	18	15	NA	NA
14	Fakir Miskin #(rumah tangga)	12.777	12.777	12.777	12.253	24.250
15	Keluarga Rentan ##(rumah tangga)	2.044	2.044	2.044	3.214	-

Sumber: Dinas Sosial Kota Banda Aceh, 2022

#Data Diperoleh Dari DTKS (Penetapan Oktober 2021 Data DTKS Kota Banda Aceh bertambah dikarenakan terjadinya penggabungan Jenis Bantuan seperti PKH, BPNT, BST dan PBI menurut penjelasan dari Pusdatin dan Data DTKS dan bisa berubah ubah pada saat pengesahan perbulan).





##'Data Diperoleh Dari DTKS (Penetapan Oktober 2021 Data DTKS Kota Banda Aceh) Dari Desil Ke IV / Tingkat Kesejahteraan Keluarga Rentan Miskin namun untuk penetapan Oktober 2021 belum memperoleh perekapan perankingan dari Pusat sehingga belum diperoleh angka jumlah keluarga rentan untuk Tahun 2021.

Berdasarkan Tabel 2.63 di atas dapat dilihat dari 26 kategori PMKS sesuai Permensos Nomor 8 Tahun 2012, hanya teridentifikasi 15 kategori saja yang ada di Kota Banda Aceh. Tabel diatas menunjukkan adanya penurunan yang signifikan dari jumlah gelandangan pada tahun 2021 sebanyak 17 orang. Jumlah pengemis juga menunjukkan penurunan, dimana pada Tahun 2021 jumlahnya turun 95 orang.

1) **PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial**

Bantuan Sosial (Bansos) adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan bersifat selektif, yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. PMKS sesuai karakteristiknya merupakan kelompok masyarakat terbawah yang dalam penanganannya sangat ketergantungan dengan dan perlu diberikan bantuan sosial untuk dapat mempertahankan kehidupannya. Penanganan PMKS adalah melalui proses rehabilitasi yang terdiri dari rehabilitasi dasar dan rehabilitasi lanjutan. Rehabilitasi dasar lebih kepada pemenuhan kebutuhan dasar, sedangkan rehabilitasi lanjutan memberikan peningkatan kapasitas sebagai modal dasar memenuhi kebutuhannya sendiri.

Secara Nasional, pemerintah memberlakukan Sistem Jaminan Sosial Nasional melalui Kementerian Sosial, diantaranya melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) serta model bantuan lainnya. PKH merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dengan pendampingan program-program tersebut, diharapkan terjadi perubahan perilaku yang mendukung tercapainya kondisi sejahtera dalam keluarga. Dalam jangka pendek bantuan sosial ini diharapkan mampu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga (dampak konsumsi langsung), dan dalam jangka panjang merupakan investasi generasi masa depan yang lebih baik melalui peningkatan kesehatan dan pendidikan (dampak pengembangan modal manusia). Tabel 2.64 berikut memberikan gambaran jumlah KPM di Kota Banda Aceh beserta jumlah total bantuan yang diterima Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022:

Tabel 2. 64 Jangkauan KPM dan Jumlah Bantuan Diterima Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021

No	Tahun	Jumlah Kecamatan	Jumlah Gampong	Jumlah KPM	Jumlah Bantuan (Rupiah)
1	2017	9	90	2.520	4.750.010.000
2	2018	9	90	4.776	1.273.493.600
3	2019	9	90	4.521	2.392.300.000
4	2020	9	90	6.968	34.340.705.000
5	2021	9	90	12.282	25.849.750.000

Sumber: Dinas Sosial Kota Banda Aceh, 2022

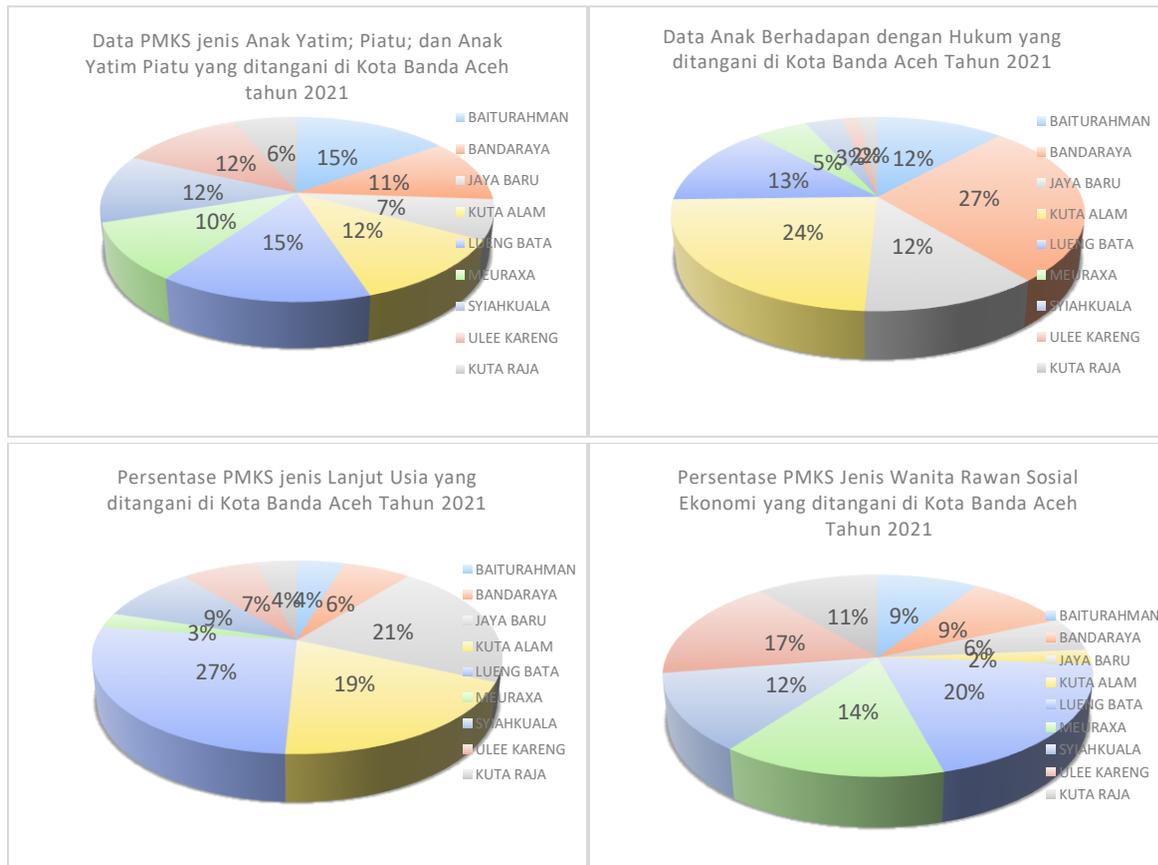
Data Tabel 2.64 diatas menunjukkan pada adanya peningkatan cakupan (*coverage*) dari jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari tahun 2017-2021. Jumlah KPM tertinggi pada Tahun 2021 sebanyak 12.282 Kepala Keluarga dari 90 gampong selaku penerima bantuan PKH. Jumlah bantuan pada Tahun 2021 sebesar Rp. 25.849.750.000.



2) PMKS yang Mendapat Pembinaan Dalam dan Luar Panti

Berkaitan dengan PMKS penanganan yang sifatnya dalam panti sepenuhnya menjadi kewenangan dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten lebih pada penanganan PMKS di luar panti. Hal ini berdampak pada kondisi nyata dimana banyak Kota/Kabupaten yang harus mengubah model dan sistem pelayanannya kepada pelayanan luar panti.

Pemerintah Kota Banda Aceh memiliki Panti Asuhan Nirmala yang pada Tahun 2019 berubah menjadi Lembaga Pelayanan Kesejahteraan Sosial (LPKS) yang melayani dampingan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Sedangkan untuk penanganan dan rehabilitasi PMKS di Kota Banda Aceh adalah tersedianya Rumah Singgah.



Sumber : Dinas Sosialis Kota Banda Aceh, 2022

Gambar 2. 57 Data PMKS Disetiap Kecamatan Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021

Gambar diatas menunjukkan data PMKS yang tersebar disetiap kecamatan di Kota Banda Aceh. Dari gambar diatas dapat dilihat jumlah PMKS jenis anak yatim, piatu dan anak yatim piatu yang ditangani di kota banda aceh tahun 2021 tertinggi pada kecamatan Baiturrahman dan Lueng Bata.

3) Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat

Dalam konteks bencana, pertama kali yang harus dilakukan setelah evakuasi adalah melakukan upaya tanggap darurat yang salah satunya menyediakan dukungan permakanan, sandang dan penampungan sementara. Penanganan terhadap korban bencana dilakukan Kota Banda Aceh melalui Dinas Sosial dengan cara memberikan bantuan untuk meringankan kemalangan yang diderita masyarakat. Tabel 2.65 di bawah ini menunjukkan penerima bantuan sosial dalam masa tanggap darurat dari Tahun 2017 hingga Tahun 2021:





Tabel 2. 65 Penerima Bantuan Sosial dalam Masa Tanggap Darurat Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
Jenis Bencana	Banjir	Angin Kencang	Banjir	Kebakaran dan Banjir	Kebakaran dan Angin Kencang
Penerima	41 KK	24 KK	18 KK	95 KK	20 KK
Sumber Dana	APBK	APBK	APBK	APBK	APBK

Sumber : Dinas Sosial Kota Banda Aceh, 2022

#'- Angin Kencang = 1 KK (7 Jiwa); '- Kebakaran = 19 KK (73 Jiwa)

Tabel 2.65 di atas menunjukkan Dinas Sosial sejak Tahun 2017-2021 telah memberikan bantuan tanggap cepat darurat untuk korban banjir, kebakaran dan angin kencang yang dananya berasal dari APBK melalui kegiatan penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa. Banda Aceh rawan terhadap ancaman bencana kebakaran, angin kencang/puting beliung dan banjir, sehingga sebagian besar penerima bantuan adalah korban bencana kebakaran dan banjir.

4) Jumlah Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Dukungan pemerintah baik berupa kebijakan maupun upaya langsung dalam bentuk program dan kegiatan yang mendukung terciptanya kemandirian bagi penyandang disabilitas sangat diperlukan. Pada tingkatan yang berat, yang dapat diupayakan adalah adanya dukungan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas yakni suatu proses untuk meningkatkan fungsi sosial penyandang disabilitas secara optimal dan membantu proses integrasi sosial penyandang disabilitas di masyarakat. Jumlah penyandang disabilitas di Kota Banda Aceh sejak Tahun 2017 hingga Tahun 2021 pada Tabel 2.66 sebagai berikut:

Tabel 2. 66 Jumlah Penyandang Disabilitas Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021

Jenis Kecacatan	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Cacat Fisik	227	234	234	133	285
Cacat Mental	135	135	135	38	0
Cacat Ganda	110	127	127	152	38
Jumlah	472	496	496	323	323

Sumber: Dinas Sosial Kota Banda Aceh, 2022

Tabel 2.66 di atas menunjukkan jumlah penyandang disabilitas baik cacat fisik, cacat mental dan cacat ganda dari Tahun 2017 hingga Tahun 2021 bersifat fluktuatif. Tahun 2018 jumlah penyandang disabilitas meningkat dari tahun sebelumnya yaitu berjumlah 496 orang. Pada tahun 2020 dan 2021, jumlah penyandang disabilitas menurun dari tahun sebelumnya yang berjumlah 323 orang penyandang disabilitas dengan berbagai jenis kecacatan. Tahun 2021 terus diupayakan pemenuhan data untuk dapat menjadi pedoman pemberian bantuan sesuai dengan kebutuhan, karena sebagian penyandang disabilitas dapat mandiri dan dilibatkan secara inklusi dalam membangun kemandiriannya.





2.1.3.3 Fokus layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

A. Tenaga Kerja

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat karena meliputi dimensi ekonomi dan sosial yang luas. Dengan bekerja, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan ekonomi mereka sesuai kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki, selain itu bekerja juga melibatkan aspek sosial seperti aktualisasi diri, melakukan kontak sosial, serta pengakuan masyarakat terhadap kemampuan individu yang bersangkutan.

Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh sebagai Dinas yang berhubungan langsung dengan pengangguran telah melakukan usaha-usaha pelatihan untuk meningkatkan keterampilan pencari kerja setiap tahunnya melalui BLK Kota Banda Aceh. Pelatihan-pelatihan yang telah dilakukan setiap tahun nya adalah pada Tabel 2.67 sebagai berikut :

Tabel 2. 67 Jenis pelatihan yang dilakukan Disnaker Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021 (dalam Orang)

Kejuruan Pelatihan	Tahun					Jumlah
	2017	2018	2019	2020	2021	
Menjahit	20	102	96	80	32	410
Teknisi Cooling System	0	32	32	16	0	100
Teknisi Sepeda Motor	0	48	48	32	16	164
Las Listrik	20	32	32	32	36	172
Kewirausahaan Membuat Kue	40	102	102	32	32	270
Tata Rias dan Kecantikan	32	32	32	0	0	112
Operator Alat Berat	16	0	0	0	0	16
Pangkas	0	0	0	0	0	16
English for Tour Guides	0	20	20	0	0	20
Penggambaran Auto CD	0	0	0	0	16	32
Jumlah	128	362	362	192	132	1.312

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh, 2022

Tabel 2.67 di atas menunjukkan bahwa jumlah pelatihan yang diadakan oleh Dinas Tenaga Kerja dari tahun 2017-2021 menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya, sedangkan pada tahun 2021 jumlah pelatihan menurun yaitu berjumlah 132 pelatihan. Las listrik merupakan jenis pelatihan yang paling banyak dilakukan dan pelatihan teknisi cooling system, pelatihan tata rias dan kecantikan, pelatihan operator alat berat, pelatihan pangkas dan pelatihan english for tour guides menempati jumlah terendah di tahun 2021.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2017-2021), Pemerintah Kota Banda Aceh secara rata-rata hanya mampu memberikan pelatihan untuk pengangguran/pencari kerja sebanyak 262 orang per tahun. Kendala utamanya adalah keterbatasan anggaran Pemerintah Kota Banda Aceh. Walaupun demikian Dinas Tenaga Kerja berupaya mencari sumber-sumber dana lain seperti dari APBN dan APBA untuk membiayai pelaksanaan pelatihan agar dapat melatih lebih banyak pengangguran lagi.





1) Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Per Tahun

Hubungan antara pengusaha dan pekerja telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam suatu hubungan industrial. Undang-undang tersebut mendefinisikan bahwa “Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang berdasarkan nilai nilai Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Oleh karena itu, apabila terjadi suatu perselisihan maka telah diatur pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI).

Kota Banda Aceh sebagai kota yang terus berkembang juga menjadi pemangku kepentingan dalam hal ini. Dimana dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial pemerintah merupakan mediator dalam penyelesaian perselisihan. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial di lakukan pada Dinas Tenaga Kerja melalui peran serta Mediator dan Konsiliator. Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh memiliki tenaga Mediator sebanyak 1 (satu) orang dan tenaga Konsiliator sebanyak 1 (satu) orang yang merupakan konsiliator Provinsi Aceh diperbantukan di Kota Banda Aceh.

Pada periode 2017–2021 sebanyak 795 kasus. Metode penyelesaian kasus perselisihan dapat dilakukan dengan bipartit atau tripartit yang melibatkan mediator dan konsiliator bahkan jika tidak selesai maka dapat diselesaikan pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Jumlah penyelesaian perselisihan antara pekerja dan pengusaha di Kota Banda Aceh sejak Tahun 2017 hingga Tahun 2021 adalah pada Tabel 2.68 berikut ini:

Tabel 2. 68 Jumlah Penyelesaian Perselisihan Antara Pekerja dan Pengusaha Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021

Jenis Kasus/Perkara yang Masuk	Tahun																				Keterangan Jumlah			
	2017				2018				2019				2020				2021							
	J	M	K	P	J	M	K	P	J	M	K	P	J	M	K	P	J	M	K	P	J	M	K	P
Perselisihan Hubungan Kerja	15	14	1	0	15	10	0	5	21	19	0	2	631	30	0	10	52	30	0	29	795	127	1	50

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh, 2022

*Tahun 2021 adalah data per 31 November 2021

Keterangan :

J : Jumlah

M : Mediator

K : Konsiliator

P : Pengadilan PHI

Pada tahun 2020 terjadi peningkatan jumlah kasus yang sangat besar yaitu 631 kasus. Hal ini terjadi karena pandemi telah menyebabkan perusahaan harus melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Namun demikian Sebagian besar masalah dapat diselesaikan secara bipartite di tingkat perusahaan dan pekerja sehingga jumlah kasus yang harus di mediasi oleh pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja hanya 30 kasus dan hanya 10 kasus yang perlu anjuran untuk diselesaikan melalui pengadilan.

Informasi pada tabel tersebut juga menunjukkan bahwa pada tahun 2017 kasus perselisihan dapat diselesaikan dengan menggunakan mediator dan konsiliator sehingga tidak ada yang perlu diselesaikan pada pengadilan. Namun, pada periode





berikutnya yaitu 2018 sampai dengan 2021 terdapat kasus yang harus diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

2) Pencari Kerja yang Ditempatkan

Tenaga kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja diidentifikasi melalui Kartu Tanda Pencari Kerja (Kartu AK 1). Para pencari kerja ini kemudian akan difasilitasi untuk mendapatkan pekerjaan melalui pengantar kerja atau pun Job Fair yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja. Pencari kerja terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh yang ditempatkan selama 5 (Lima) tahun dari Tahun 2017 sampai Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.69 berikut:

Tabel 2. 69 Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021

No	Keterangan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Tenaga Kerja Terdaftar	1155	549	582	255	222
2	Tenaga Kerja Ditempatkan	376	381	332	105	116
	Persentase	32,55	69,39	57,04	41,17	52,25

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh, 2022

Dari Tabel 2.69 di atas dapat dilihat bahwa persentase penempatan tenaga kerja sangat berfluktuasi, hal ini tergantung pada factor tenaga kerja yang terdaftar dan jumlah lowongan kerja yang tersedia. Kondisi pada tahun 2021 menunjukkan bahwa 52,25 persen pencari kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja telah berhasil mendapatkan pekerjaan dan ditempatkan.

3) Perselisihan Buruh Dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Hubungan Industrial

Selama kurun waktu 2017 – 2021, perselisihan antara Buruh dan Pengusaha dengan pemerintah di sebut dengan perselisihan kepentingan. Perselisihan kepentingan ini timbul dalam hubungan kerja karena kondisi ekonomi yang memburuk akibat pandemi yang menyebabkan perusahaan harus melakukan PHK terhadap pekerja. Perselisihan ini telah dapat diselesaikan baik melalui metode penyelesaian bipartite, melalui mediator dan hanya sedikit yang diselesaikan pada tingkat pengadilan hubungan industrial. Jumlah sarana hubungan industrial yang telah mendapatkan pengesahan dan pencatatan di Kota Banda Aceh dari Tahun 2017 hingga Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.70 berikut ini:

Tabel 2. 70 Jumlah Sarana Hubungan Industrial yang Telah Mendapatkan Pengesahan dan Pencatatan Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021

No.	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1	PKWT/PKWTT	149	434	864	217	1565
2	PP/PKB	5	21	54	23	25
3	Serikat Pekerja/Serikat Buruh	7	6	4	25	23
4	LKS Bipartit	1	2	1	1	4

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh, 2022

Berdasarkan Tabel 2.70 diatas, secara garis besar terlihat adanya kecenderungan peningkatan pengesahan dan pencatatan sarana hubungan industrial mulai dari Tahun 2017 sampai Tahun 2021. Sementara itu untuk pengesahan dan pencatatan sarana Serikat Pekerja/Serikat Buruh jumlahnya berfluktuasi dan sarana LKS Bipartit jumlahnya meningkat di tahun 2021.





Sejak Tahun 2017 Dinas Tenaga Kerja telah melaksanakan pengesahan dan pencatatan sarana hubungan industrial dan sudah terdata pada database Aplikasi SISNAKER (Sistim Informasi ketenagakerjaan). Sedangkan Tahun 2015 dan Tahun 2016 belum terorganisir. Agar tertibnya kelangsungan dan suasana bekerja dalam hubungan industrial, maka perlu adanya peraturan-peraturan yang mengatur hubungan kerja yang harmonis dan kondusif.

B. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Pelaksanaan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Banda Aceh secara resmi baru dimulai sejak dibentuknya Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (PPKB) melalui Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh. Di bidang pemberdayaan perempuan, upaya-upaya meningkatkan pemberdayaan perempuan adalah melalui kegiatan perumusan kebijakan dan fasilitasi aspek pengembangan kemampuan dan kemandirian perempuan dalam perempuan, antara lain :

- 1) tersedianya Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 52 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Musrena;
- 2) pengajuan Draft Qanun Kota Ramah Gender;
- 3) memfasilitasi terbentuknya organisasi perempuan di tingkat masyarakat, yaitu Women Development Center (WDC) dan Balee Inong; memfasilitasi terbentuknya Pokja PUG dan Tim Vocal Point

1) Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan

Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai yang bekerja untuk pemerintah baik pada pemerintah pusat maupun daerah. Proses penerimaan pegawai negeri ini mengikuti ketetapan pemerintah dan berlaku di seluruh Indonesia dan dapat bekerja di berbagai tingkat pemerintahan setelah lulus tanpa memandang perbedaan gender. Demikian juga pegawai negeri sipil yang bekerja untuk Kota Banda Aceh. Tabel 2.71 berikut menggambarkan persentase pegawai negeri sipil (PNS) laki-laki dan perempuan dari Tahun 2017-2021:

Tabel 2. 71 Persentase Pegawai Negeri Sipil Laki-laki dan Perempuan Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021*
Jumlah Pegawai Negeri Sipil	4.307	4.191	4.272	4.255	4.161
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Laki-laki	1.455	1.414	1.422	1.400	1.358
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Perempuan	2.852	2.777	2.852	2.855	2.803
Persentase Laki-laki	33,8	33,7	33,3	32,9	32,64
Persentase Perempuan	66,2	66,3	66,8	67,1	67,36

Sumber : Kota Banda Aceh Dalam Angka, 2022

*Tahun 2021 adalah data per 31 November 2021

Periode tahun 2017 sampai dengan 2019 jumlah pegawai negeri sipil perempuan sudah mencapai 66 persen dan menjadi 67 persen pada tahun 2020 dan 2021 atau dengan kata lain dua per tiga dari total pegawai negeri sipil Kota Banda Aceh adalah perempuan. Hal ini menggambarkan tidak adanya perbedaan gender dalam penerimaan pegawai negeri sipil pada Pemerintah Kota Banda Aceh.

Sampai saat ini belum ada ketentuan resmi mengenai komposisi pegawai negeri yang ideal antara laki-laki dan perempuan. Dalam hal penerimaan pegawai negeri sipil seharusnya mengikuti kebutuhan dari pemerintah daerah itu sendiri dan proses penerimaan juga mengikuti kemampuan pelamar bukan berdasarkan gender.





2) Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Keluarga merupakan unit terkecil dalam bernegara tetapi merupakan unit yang utama dalam penentuan kesejahteraan. Perhatian terhadap perlindungan anak dan perempuan dalam rumah tangga telah menjadi sorotan utama dan menjadi factor penting dalam aspek kesejahteraan. Undang-Undang no. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga secara khusus dikeluarkan demi kepentingan ini. Oleh karena itu, rasio Kekerasan dalam Rumah Tangga menjadi indicator penting dalam aspek kesejahteraan. Rasio Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) secara definisi adalah jumlah KDRT dibagi dengan jumlah rumah tangga dikali 100. Perkembangan rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga ditunjukkan oleh tabel berikut.

Tabel 2. 72 Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Perempuan	0,23	0,12	0,10	0,05	NA
Anak	0,13	0,09	0,10	0,04	NA

Sumber : DP3AP2KB Kota Banda Aceh, 2022

*Tahun 2021 adalah data per 31 November 2021

Berdasarkan Tabel 2.72 di atas dapat dilihat Tren Rasio KDRT terus menurun dalam periode 2017-2021. Penurunan ini merupakan hal yang menggembirakan yang menggambarkan bahwa penanganan terhadap KDRT semakin baik dari tahun ke tahun. Kondisi ini dapat dicapai dengan koordinasi yang baik antara para pemangku kepentingan dan terbentuknya system jejaring yang baik terutama dengan Balee Inong yang sampai dengan 2016 sudah terbentuk sebanyak 19 Balee Inong.

Penurunan rasio karena meningkatnya kesadaran masyarakat untuk peduli dan mau terlibat dalam upaya pencegahan dan sistem perlindungan yang dibangun di tingkat gampong dan kecamatan, yakni PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) yang sudah tertata dengan baik. Namun demikian upaya-upaya pencegahan KDRT akan terus dilakukan. Sementara penyelesaian pengaduan dan penanganan kasus untuk perlindungan perempuan dan anak dari KDRT adalah sebesar 100 persen dihitung melalui jumlah pengaduan kasus KDRT dibagi dengan jumlah kasus yang ditangani dikali 100 persen. Begitupun cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum sebesar 100 persen.

3) Kota Layak Anak

Kota Layak Anak merupakan istilah yang diperkenalkan pertama kali oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan pada Tahun 2005 melalui Kebijakan Kota Layak Anak. Pembentukan Kota Layak Anak merupakan salah satu bentuk komitmen perlindungan hak dan perlindungan anak. Kabupaten/Kota merupakan salah satu pemangku kepentingan untuk tercapainya Indonesia Layak Anak (IDOLA) tahun 2030. Pencapaian ini diukur dengan 31 indikator KLA yang terbagi dalam 5 klaster yaitu Hak Sipil dan Kebebasan, Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar, Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, dan Perlindungan khusus.

Pemenuhan standar KLA yang ingin dicapai melalui beberapa tingkatan. Peringkat yang ditetapkan menunjukkan posisi keberhasilan kabupaten/kota dalam mewujudkan KLA. Kategori penilaian yang diberikan meliputi Score 500-600: Pratama; Score 601-700: Madya; Score 701-800: Nindya; Score 801-900:Utama; Score





901-1000: KLA. Pencapaian yang diraih Kota Banda Aceh periode 2017-2021 diperlihatkan pada Tabel 2.73 berikut:

Tabel 2. 73 Indikator Kota Layak Anak yang Dicapai Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Indikator KLA yang dicapai	503.3	645	764	764	792

Sumber : Dinas P3AP2KB Kota Banda Aceh, 2022

Berdasarkan Tabel 2.73 di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator KLA dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 Kota Banda Aceh sudah mencapai predikat Pratama sebagai Kota Layak Anak dengan skor 503,3. Selanjutnya menjadi peringkat Madya pada tahun 2018 dan mulai 2019 hingga 2021 sudah berada pada peringkat Nindya. Peningkatan peringkat dari tahun ke tahun menunjukkan komitmen yang kuat bagi Pemerintah Kota Banda Aceh untuk mewujudkan Banda Aceh sebagai Kota Layak Anak (KLA). Namun demikian, masih diperlukan upaya, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak (PHPA).

4) Perluasan Jaringan Khususnya Untuk Panti dan Pusat Rehabilitasi

Jaringan kerja P2TP2A semakin luas karena sesuai kebutuhan korban /survivor yang memerlukan berbagai layanan. Karena kasus semakin beragam dan persoalan yang kompleks dituntut adanya pengembangan mitra kerja, sehingga sistem layanan lebih solid dan tidak tumpang tindih. Tabel 2.74 berikut adalah daftar mitra P2TP2A hingga Tahun 2021:

Tabel 2. 74 Mitra P2TP2A Kota Banda Aceh, 2021

No	Nama Mitra
1	Rumah Sakit
2	Puskesmas
3	Pol PP dan WH
4	Kepolisian-Polresta (Unit PPA)
5	Dinas Sosial
6	Dinas Pendidikan
7	Dinas Kesehatan
8	Dinas Syariat Islam
9	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
10	Baitul Mal
11	Mahkamah Syariah
12	Kejaksaan
13	Pengadilan
14	LBH anak
15	The Nanny Children Center (TNCC)
16	Balee Inong (20 BI)
17	PKK
18	Lembaga Swadaya Masyarakat
19	Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS)
20	Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI)
21	Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) (5 LKSA)
22	Forum Anak





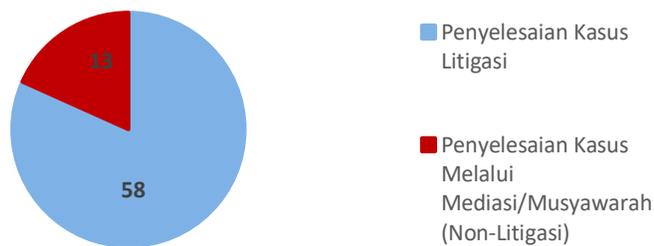
23	BNN
24	Dayah Baitil Atiq
25	Kementerian Agama
26	Dinas Pendidikan Dayah
27	Kemenkumham
28	Rumah Tahanan Lhoknga (Khusus Perempuan)
29	Aparatur Gampong
30	Lembaga layanan lainnya.

Sumber : Dinas P3AP2KB Kota Banda Aceh, 2022

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa P2TP2A dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh stakeholder dari berbagai institusi. Kerjasama lintas sektoral ini diharapkan dapat memberikan pelayanan yang komprehensif dan maksimal bagi penyelesaian permasalahan perempuan dan anak.

5) Cakupan Penegakan Dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Penyelesaian Kasus Melalui Litigasi dan Non Litigasi

Dalam menyelesaikan kasus, biasanya terdapat dua jalur yang dapat dilakukan bagi pihak yang bersengketa yaitu jalur Litigasi dan Non-Litigasi. Yang dimaksud dengan Litigasi adalah bentuk penanganan kasus melalui jalur proses di pengadilan baik kasus perdata maupun pidana, sedangkan Non-Litigasi adalah penyelesaian masalah hukum diluar proses pengadilan. Penyelesaian kasus melalui jalur Litigasi dan mediasi/musyawarah (Non-Litigasi) pada Tahun 2021 disajikan pada Gambar 2.58 :



Sumber : Dinas P3AP2KB Kota Banda Aceh, 2021

Gambar 2. 58 Penyelesaian Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Tahun 2021

Berdasarkan Gambar 2.58 diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah kasus kekerasan perempuan dan anak di Kota Banda Aceh pada Tahun 2021 adalah 71 kasus. Sebanyak jumlah 58 kasus selesai secara Litigasi baik di pengadilan negeri maupun mahkamah syariah. Sedangkan kasus yang diselesaikan melalui mediasi/musyawarah (Non-Litigasi) yang tersebar pada 9 kecamatan sebanyak 13 kasus dari keseluruhan jumlah kasus. Sisanya sebanyak 32 kasus masih dalam proses litigasi. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua kasus kekerasan perempuan dan anak diselesaikan melalui pengadilan. Upaya pengadilan biasanya ditempuh untuk jenis kasus gugat cerai, KDRT berat (fisik), kekerasan seksual serta eksploitasi orang tua atau dewasa terhadap anak. Selain itu penyelesaian Non-Litigasi juga mendorong perangkat gampong, tuhapeut, Balee Inong dan PKK untuk berpartisipasi aktif sehingga mekanisme perlindungan berbasis komunitas dapat berjalan efektif. Untuk itu P2TP2A Madani melakukan audiensi dan asistensi ke 20 Balee Inong yang tersebar di 9 Kecamatan di Kota Banda Aceh.





C. Pangan

1) Ketersediaan Pangan Utama

Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Kebutuhan pangan dihitung berdasarkan Neraca Bahan Makanan (NBM) untuk memastikan bahan pangan tersedia dengan cukup di Kota Banda Aceh. Ketersediaan pangan utama di Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.75 berikut ini:

Tabel 2. 75 Ketersediaan Pangan Utama Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021

Urusan	Rumus	2017	2018	2019	2020	2021
Ketersediaan pangan utama	$\frac{\text{Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per tahun (Kg)}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$	-	105,15 Kg/ Thn	100,60 Kg/ Thn	121,31 Kg/Thn	-

Sumber : DP2KP Kota Banda Aceh, 2022

Ketersediaan pangan untuk penduduk di Kota Banda Aceh pada tahun 2018 adalah 105, 15 kg/tahun per jiwa dan pada tahun 2020 telah menjadi 121,31 kg/tahun per jiwa. Penetapan ketersediaan pangan ini masih diproyeksi dengan konsumsi beras, dimana cadangan beras yang perlu disediakan oleh kota berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 11/ Permentan/ Kn.130/I/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa penentuan Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten/kota (CBPK) ditentukan oleh jumlah penduduk; konsumsi beras per kapita per tahun; dan proporsi terhadap cadangan beras nasional. Selanjutnya dijelaskan juga bahwa perhitungan dilakukan sebagai berikut.

Cadangan Beras Pemerintah Kab/Kota (CBPK) "Y" =

$80\% \times \text{cadangan beras total provinsi "X"} \times \text{rasio jumlah penduduk kab/kota "Y" terhadap jumlah penduduk Provinsi "X"}$.

Ketetapan terkini untuk Kota Banda Aceh adalah 102 ton per tahun yang dicadangkan oleh provinsi Aceh. Penggunaan cadangan ini dapat digunakan untuk keperluan seperti terjadinya kondisi rawan pangan atau bencana yang harus mendapatkan penanganan cepat tanggap. Cadangan pangan yang juga disediakan untuk keperluan tersebut selain beras antara lain berupa telur, minyak, gula, tepung dan mie instant.

D. Lingkungan hidup

1) Survey Kepuasan Masyarakat

Pada Tahun 2008 DLHK3 membuka 10 (sepuluh) pelayanan yang terdiri dari; (1) pelayanan sewa alat berat; (2) pelayanan sedot tinja; (3) pelayanan sampah medis; (4) pelayanan kebersihan; (5) pelayanan pemasangan lampu jalan; (6) pelayanan pemangkasan pohon; (7) pelayanan sewa taman sari; (8) pelayanan rekomendasi lingkungan; (9) pelayanan retribusi sampah; dan (10) pelayanan izin magang penelitian.

Pelayanan DLHK3 mengenai pelayanan sampah medis dihapuskan sehingga jumlah layanan pada Tahun 2019 hanya ada 9 (sembilan) pelayanan. Penghapusan pelayanan sampah medis dikarenakan pelayanan sampah medis sudah ditangani oleh pihak ketiga. DLHK3 tidak lagi melakukan pemusnahan sampah medis. Kinerja dari 9 pelayanan DLHK3 Banda Aceh tersebut dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survey Kepuasan. Capaian survey kepuasan masyarakat terhadap layanan DLHK3 Tahun 2018 sampai 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.76:





Tabel 2. 76 Realisasi Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2018-2021

No	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Target dan Capaian			
		2018	2019	2020	2021
1	Target	Baik	Baik	Sangat Baik	-
2	Realisasi	Baik	Baik	Sangat Baik	-
3	Persentase Capaian	100 %	100 %	100 %	-

Sumber : DLHK3 Kota Banda Aceh, 2022

Tabel diatas menunjukkan pada Tahun 2018 dan 2019 melalui pengisian kuisioner yang dilakukan oleh masyarakat yang menerima layanan DLHK3 diperoleh nilai kepuasan terhadap pelayanan DLHK3 adalah “Baik” dan pada tahun 2020 menjadi “Sangat Baik” dengan nilai skor 81,28. Sedangkan untuk tahun 2021, berdasarkan laporan hasil evaluasi sistem akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh tahun 2019 No. 700/193 oleh inspektorat Kota Banda Aceh, merekomendasikan penyesuaian terhadap dokumen perencanaan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh tahun 2017 -2022. Oleh karena itu, DLHK3 Banda Aceh telah merevisi renstra tahun 2017 – 2022 sehingga Indikator Kinerja Survey Kepuasan Masyarakat tidak termasuk dalam target dan capaian kinerja DLHK3 2017 - 2022.

Rincian skor hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan DLHK3 Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.77:

Tabel 2. 77 Rincian Skor Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2020

Sasaran	Indikator Kinerja			%
	Uraian	Target	Realisasi	
Meningkatnya kepuasan masyarakat	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Sangat Baik (IKM = 81,26-100)	Sangat Baik (IKM = 81,28)	100%

Sumber : DLHK3 Kota Banda Aceh, 2021

Sedangkan untuk tahun 2021, berdasarkan laporan hasil evaluasi sistem akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh tahun 2019 No. 700/193 oleh inspektorat Kota Banda Aceh, merekomendasikan penyesuaian terhadap dokumen perencanaan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh tahun 2017 -2022. Oleh karena itu, DLHK3 Banda Aceh telah merevisi renstra tahun 2017 – 2022 sehingga Indikator Kinerja Survey Kepuasan Masyarakat tidak termasuk dalam target dan capaian kinerja DLHK3 2017 - 2022. Oleh karena itu, tidak dilakukan survey terhadap 10 (sepuluh) pelayanan yang terdiri dari; (1) pelayanan sewa alat berat; (2) pelayanan sedot tinja; (3) pelayanan sampah medis; (4) pelayanan kebersihan; (5) pelayanan pemasangan lampu jalan; (6) pelayanan pemangkasan pohon; (7) pelayanan sewa taman sari; (8) pelayanan rekomendasi lingkungan; (9) pelayanan retribusi sampah; dan (10) pelayanan izin magang penelitian.

Berdasarkan tabel 2.78 Survey kepuasan masyarakat dilakukan kepada 343 responden secara random terhadap semua masyarakat yang pernah mendapatkan pelayanan dari DLHK3 Banda Aceh. Berikut penjabaran jumlah responden berdasarkan jenis kelamin, pendidikan dan perkerjanya.

Survey kepuasan masyarakat dilakukan kepada 343 responden secara random terhadap semua masyarakat yang pernah mendapatkan pelayanan dari





DLHK3 Banda Aceh. Berikut penjabaran jumlah responden berdasarkan jenis kelamin, pendidikan dan perkerjanya.

Tabel 2. 78 Rincian Jumlah Responden Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan DLHK3 Tahun 2020

JK (Jenis Kelamin)		PT (Perguruan Tinggi)	
Laki - Laki	230	1. SD Kebawah	2
Perempuan	113	2. SMP	14
JUMLAH	343	3. SMA	167
PU (Pekerjaan Utama)		4. D1-D2-D3	53
1. PNS/TNI/Polri	43	5. S-1	101
2. Pegawai Swasta	48	6. S-2 Keatas	6
3. Wiraswasta/Usahawan	107	JUMLAH	343
4. Pelajar/Mahasiswa	31		
5. Lainnya	114		
JUMLAH	343		

Sumber : DLHK3 Kota Banda Aceh, 2021

Sedangkan untuk tahun 2021, berdasarkan laporan hasil evaluasi sistem akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh tahun 2019 No. 700/193 oleh inspektorat Kota Banda Aceh, merekomendasikan penyesuaian terhadap dokumen perencanaan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh tahun 2017 -2022. Oleh karena itu, DLHK3 Banda Aceh telah merevisi renstra tahun 2017 – 2022 sehingga Indikator Kinerja Survey Kepuasan Masyarakat tidak termasuk dalam target dan capaian kinerja DLHK3 2017 - 2022. Oleh karena itu, tidak dilakukan survey terhadap 10 (sepuluh) pelayanan yang terdiri dari; (1) pelayanan sewa alat berat; (2) pelayanan sedot tinja; (3) pelayanan sampah medis; (4) pelayanan kebersihan; (5) pelayanan pemasangan lampu jalan; (6) pelayanan pemangkasan pohon; (7) pelayanan sewa taman sari; (8) pelayanan rekomendasi lingkungan; (9) pelayanan retribusi sampah; dan (10) pelayanan izin magang penelitian.

Berikut penjabaran hasil perolehan nilai survey terhadap mutu kinerja pelayanan DLHK3 Banda Aceh dapat dilihat pada tabel 2.79:

Tabel 2. 79 Nilai Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan DLHK3 Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan	Nilai Konversi Ikm Per Unit	Kinerja Unit Pelayanan	Mutu Kinerja
1	Pelayanan Sewa Alat Berat	92,23	Sangat Baik	A
2	Pelayanan Rekomendasi Lingkungan	82,66	Sangat Baik	A
3	Pelayanan Sedot Tinja	80,67	Baik	B
4	Pelayanan Kebersihan	79,82	Baik	B
5	Pelayanan Pemasangan Lampu Jalan Umum	81,09	Baik	B
6	Pelayanan Pemangkasan Pohon	78,23	Baik	B





No	Jenis Pelayanan	Nilai Konversi Ikm Per Unit	Kinerja Unit Pelayanan	Mutu Kinerja
7	Pelayanan Sewa Taman Sari	81,14	Baik	B
8	Pelayanan Retribusi Sampah	76,07	Baik	B
9	Pelayanan Izin Magang Penelitian	79,61	Baik	B
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan DLHK3			81,28	A
			Sangat Baik	

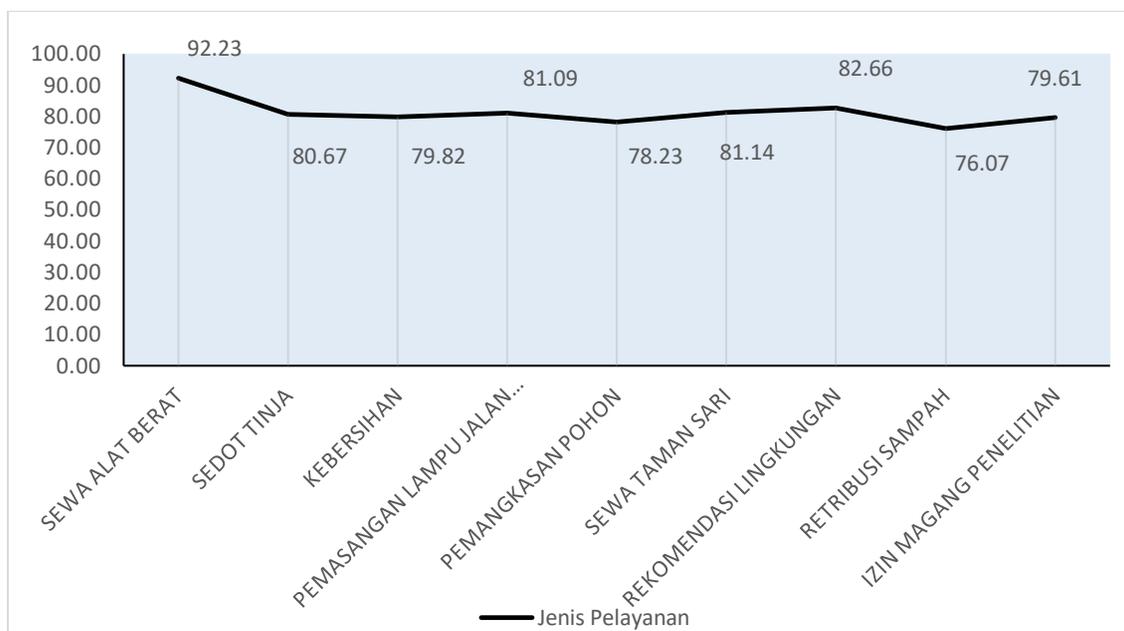
Sumber: DLHK3 Kota Banda Aceh, 2021

Sedangkan untuk tahun 2021, berdasarkan laporan hasil evaluasi sistem akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh tahun 2019 No. 700/193 oleh inspektorat Kota Banda Aceh, merekomendasikan penyesuaian terhadap dokumen perencanaan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh tahun 2017 -2022. Oleh karena itu, DLHK3 Banda Aceh telah merevisi renstra tahun 2017 – 2022 sehingga Indikator Kinerja Survey Kepuasan Masyarakat tidak termasuk dalam target dan capaian kinerja DLHK3 2017 - 2022. Oleh karena itu, tidak dilakukan survey terhadap 10 (sepuluh) pelayanan yang terdiri dari; (1) pelayanan sewa alat berat; (2) pelayanan sedot tinja; (3) pelayanan sampah medis; (4) pelayanan kebersihan; (5) pelayanan pemasangan lampu jalan; (6) pelayanan pemangkasan pohon; (7) pelayanan sewa taman sari; (8) pelayanan rekomendasi lingkungan; (9) pelayanan retribusi sampah; dan (10) pelayanan izin magang penelitian.

Dari 9 (sembilan) jenis pelayanan yang disurvei, pelayanan sewa alat berat (92,23 : Sangat Baik) dan pelayanan rekomendasi lingkungan (82,66) memiliki skor yang paling tinggi. Sedangkan skor paling rendah diperoleh oleh pelayanan retribusi sampah (76,07 : Baik) dan pelayanan pemangkasan pohon (78,23 : Baik). Secara rinci, pada pelayanan sewa alat berat, unsur yang mendapatkan skor paling tinggi adalah kesesuaian antara biaya pelayanan yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan oleh DLHK3 (Skor 3,8 dari skala 4). Sedangkan unsur paling rendah adalah keamanan pelayanan serta kesopanan dan keramahan petugas (skor 3,6 dari skala 4).

Hasil perolehan nilai setiap pelayanan DLHK3 Banda Aceh dapat dilihat pada gambar 2.59 dibawah ini:





Sumber: DLHK3 Kota Banda Aceh, 2021

Gambar 2. 59 Nilai Setiap Pelayanan DLHK3 Tahun 2020

Sedangkan untuk tahun 2021, berdasarkan laporan hasil evaluasi sistem akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh tahun 2019 No. 700/193 oleh inspektorat Kota Banda Aceh, merekomendasikan penyesuaian terhadap dokumen perencanaan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh tahun 2017 -2022. Oleh karena itu, DLHK3 Banda Aceh telah merevisi renstra tahun 2017 – 2022 sehingga Indikator Kinerja Survey Kepuasan Masyarakat tidak termasuk dalam target dan capaian kinerja DLHK3 2017 - 2022. Oleh karena itu, tidak dilakukan survey terhadap 10 (sepuluh) pelayanan yang terdiri dari; (1) pelayanan sewa alat berat; (2) pelayanan sedot tinja; (3) pelayanan sampah medis; (4) pelayanan kebersihan; (5) pelayanan pemasangan lampu jalan; (6) pelayanan pemangkasan pohon; (7) pelayanan sewa taman sari; (8) pelayanan rekomendasi lingkungan; (9) pelayanan retribusi sampah; dan (10) pelayanan izin magang penelitian.

Secara umum dapat disimpulkan kinerja pelayanan lingkungan, kebersihan, dan keindahan kota adalah baik (81,28) dengan skor terendah yaitu 3,04 dari skala 4 pada unsur kesesuaian antara biaya pelayanan pada unit pelayanan retribusi sampah. Sedangkan skor tertinggi yaitu 3,69 dari skala 4 dicapai oleh unsur ketepatan pelaksanaan terhadap jadwal waktu pelayanan pada unit pelayanan sewa alat berat. Dari penjelasan indikator tersebut, capaian kinerja dari Sasaran Strategis 1 ini adalah 100%. Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan program ini sebesar Rp. 45.274.942.104,- dengan realisasinya Rp. 43.990.962.568,- (97,16%).

2) Menurunnya Jumlah TPS Liar

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya membuat beberapa tempat menjadi tempat penampungan sementara (TPS) liar yang berserakan di Kota Banda Aceh. DLHK3 Banda Aceh telah menyediakan wadah sampah yang tersebar di beberapa lokasi untuk tempat penampungan sampah sementara dari masyarakat. Namun masyarakat masih saja membuang sampahnya di TPS liar yang seringkali terlihat berserakan di sepanjang jalan raya, terminal, pasar, jembatan, halte, perbatasan dan tempat-tempat umum lainnya. Secara keseluruhan terdapat 140 titik TPS Liar yang ada di Kota Banda Aceh. Persentase capaian menurunnya TPS liar Tahun 2017 sampai Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 2. 80 berikut ini:





Tabel 2. 80 Persentase Capaian Menurunnya TPS Liar Tahun 2017-2021

No	Menurunnya TPS Liar	Target dan Capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Target	-	20 titik	20 titik	20 titik	65 titik
2	Realisasi	-	28 titik	36 titik	47 titik	65 titik
3	Persentase Capaian Menurunnya TPS Liar	-	140 %	180 %	235 %	100%

Sumber: DLHK3 Kota Banda Aceh, 2022

Berdasarkan Tabel 2.80 di atas dapat dilihat bahwa persentase capaian menurunnya TPS liar hanya ada dari tahun 2018-2021, hal ini dikarenakan indikator tersebut belum digunakan pada tahun 2016-2017. Tahun 2018 target menurunnya TPS liar sebanyak 20 titik. Realisasi yang dicapai pada tahun yang sama sebanyak 28 titik. Atas dasar ini dapat diketahui persentase capaian menurunnya TPS Liar pada tahun 2018 sebesar 140%. Pada tahun 2019, target menurunnya TPS liar sebanyak 20 titik. Realisasi yang dicapai sebanyak 36 titik. Dapat diketahui pada tahun 2019, persentase capaian menurunnya TPS liar sebesar 180%. Untuk tahun 2020, target menurunnya TPS liar sebanyak 20 titik. Realisasi yang dicapai sebanyak 47 titik. Atas dasar ini dapat diketahui persentase capaian menurunnya TPS Liar pada tahun 2020 sebesar 235%. Pada Tahun 2021 Persentase capaian menurunnya TPS Liar sebesar 100%. Berdasarkan capaian di atas dapat diketahui bahwa selama periode 2018-2021, realisasi menurunnya TPS liar melebihi target yang ditetapkan.

3) Indeks Kualitas Air (IKA)

Kualitas air secara umum menunjukkan mutu atau kondisi air yang dikaitkan dengan suatu kegiatan atau keperluan tertentu. capaian indeks kualitas air (IKA) Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel 2.81:

Tabel 2. 81 Capaian Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021

No	Indeks Kualitas Air (IKA)	Target dan Capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Target	-	Tercemar Ringan	Tercemar Ringan	Baik	N/A
2	Realisasi	-	Tercemar Ringan (Sedang)	Tercemar Ringan	Tidak Teruji Karena Covid-19	N/A
3	Persentase Capaian	-	100 %	100 %	0 %	N/A

Sumber: DLHK3 Kota Banda Aceh, 2022

Berdasarkan Tabel 2.81 di atas, indikator untuk indeks kualitas air mulai ditetapkan sejak tahun 2018, sehingga data untuk indeks kualitas air pada taun 2016-2017 tidak tersedia. Pelaksanaan pengukuran IKA di Kota Banda Aceh Tahun 2018 dan 2019 sangat baik dan telah mencapai realisasi 100 persen. Pada Tahun 2018 pengukuran IKA dilakukan pada air sungai, air limbah, air hujan, air sumur dan air laut berdasarkan parameter fisika dan kimia. Sedangkan untuk Tahun 2019 pengukuran IKA dilakukan pada 5 buah sungai dengan 20 titik lokasi yang berbeda. Namun ditahun 2020 pengujian kualitas air sungai tidak dapat dilaksanakan karena anggaran dialihkan untuk penanganan Covid-19. Sedangkan untuk tahun 2021,





berdasarkan laporan hasil evaluasi sistem akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh tahun 2019 No. 700/193 oleh inspektorat Kota Banda Aceh, merekomendasikan penyesuaian terhadap dokumen perencanaan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh tahun 2017 -2022. Oleh karena itu, DLHK3 Banda Aceh telah merevisi renstra tahun 2017 – 2022 sehingga Indikator Kinerja Indeks Kualitas Air (IKA) tidak termasuk dalam target dan capaian kinerja DLHK3 2017-2022.

Tabel 2.82 berikut menunjukkan IKA Kota Banda Aceh Tahun 2019 yang diukur pada kelima sungai tersebut:

Tabel 2. 82 Indeks Kualitas Air Kota Banda Aceh Tahun 2019

Nama Sungai	Lokasi Sampel	STORET		IP		IKA Existing		IKA-INA	
Krueng Aceh	Bawah Jembatan Surabaya	0,000	Ringan	3,491	Ringan	1,035	Ringan	70,414	Cukup Baik
Krueng Aceh	Bawah Jembatan Pango	0,000	Ringan	1,887	Ringan	1,971	Ringan	65,113	Sedang
Krueng Aceh	Bawah Jembatan Peunayong	0,000	Ringan	1,188	Ringan	1,032	Ringan	64,992	Sedang
Krueng Aceh	Bawah Jembatan Pante Pirak	0,000	Ringan	1,363	Ringan	1,067	Ringan	62,655	Sedang
Krueng Neng	Bawah Jembatan Lamteumen	0,000	Sedang	7,023	Sedang	2,962	Ringan	46,428	Marginal
Krueng Lueng Paga	Bawah Jembatan Gampong Ateuk Jawo	0,000	Sedang	7,688	Sedang	2,757	Ringan	54,659	Sedang
Krueng Lueng Paga	Bawah Jembatan Tahu Stadion Harapan Bangsa	0,000	Sedang	5,951	Sedang	2,451	Ringan	57,528	Sedang
Krueng Lueng Paga	Bawah Jembatan Pak Sen Sp. Surabaya	0,000	Sedang	5,120	Sedang	2,585	Ringan	55,663	Sedang
Krueng Doy	Bawah Jembatan Teuku Umar	0,000	Ringan	2,952	Ringan	3,124	Ringan	56,177	Sedang
Krueng Doy	Bawah Jembatan Fatahillah	0,000	Sedang	8,261	Sedang	2,800	Ringan	63,034	Sedang
Krueng Doy	Bawah Jembatan Tahu Solo	0,000	Sedang	8,467	Sedang	1,724	Ringan	63,449	Sedang
Krueng Doy	Bawah Jembatan Lampaseh	0,000	Ringan	2,709	Ringan	2,837	Ringan	46,657	Marginal
Krueng Doy	Bawah Jembatan Punge Jurong	0,000	Sedang	7,213	Sedang	2,275	Ringan	47,435	Marginal





Nama Sungai	Lokasi Sampel	STORET		IP		IKA Existing		IKA-INA	
Krueng Doy	Bawah Jembatan RRI	0,000	Ringan	2,028906173	Ringan	0,90223758	Memenuhi	66,274	Sedang
Krueng Daroy	Bawah Jembatan Peuniti	0,000	Ringan	2,014	Ringan	2,163	Ringan	54,602	Sedang
Krueng Daroy	Bawah Jembatan Putroe Phang	0,000	Ringan	4,261876933	Ringan	0,69516482	Memenuhi	55,665	Sedang
Krueng Daroy	Bawah Jembatan Pendopo	0,000	Ringan	4,145337149	Ringan	1,64345809	Ringan	61,464	Sedang
Krueng Daroy	Bawah Jembatan POM	0,000	Sedang	6,333469375	Sedang	2,05049927	Ringan	52,204	Sedang
Krueng Daroy	Bawah Jembatan Keutapang	0,000	Ringan	2,672822315	Ringan	2,84555864	Ringan	55,317	Sedang
Krueng Daroy	Bawah Jembatan Geucheu Komplek	0,000	Ringan	4,411509254	Ringan	3,12902225	Ringan	57,792	Sedang

Sumber: DLHK3 Kota Banda Aceh, 2020

Sedangkan untuk tahun 2021, berdasarkan laporan hasil evaluasi sistem akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh tahun 2019 No. 700/193 oleh inspektorat Kota Banda Aceh, merekomendasikan penyesuaian terhadap dokumen perencanaan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh tahun 2017 -2022. Oleh karena itu, DLHK3 Banda Aceh telah merevisi renstra tahun 2017 – 2022 sehingga Indikator Kinerja Indeks Kualitas Air (IKA) tidak termasuk dalam target dan capaian kinerja DLHK3 2017 - 2022. Oleh karena itu, data Indeks Kualitas Air (IKA) tahun 2021 tidak tersedia.

Berdasarkan Tabel 2.82 di atas dapat dilihat bahwa pengukuran IKA pada Tahun 2019 menggunakan 4 metode yakni metode STORET, metode Indeks Pencemaran (IP), metode IKA Existing dan metode IKA-INA. Hasil akhir dari metode IKA Existing menunjukkan angka 52.00 hal ini berarti kualitas air di Kota Banda Aceh saat ini termasuk dalam katagori “Cemar Ringan”. Pada tahun 2020 pengujian kualitas air sungai tidak dapat dilaksanakan karena anggaran dialihkan untuk penanganan Covid-19.

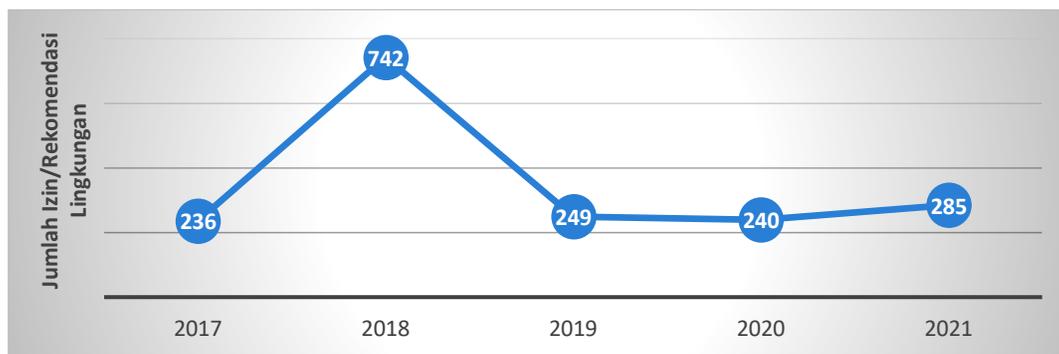
Nilai IKA dipengaruhi oleh berbagai variable antara lain: (a) penurunan beban pencemaran serta upaya pemulihan (restorasi) pada beberapa sumber air; (b) ketersediaan dan fuktuasi debit air yang dipengaruhi oleh perubahan fungsi lahan serta faktor cuaca lokal, iklim regional dan global; (c) penggunaan air; dan (d) serta tingkat erosi dan sedimentasi. Selain itu setiap metode dalam mengukur kualitas air juga dapat menunjukkan hasil yang berbeda karena perbedaan tingkat sensitivitas setiap metode dalam menggambarkan kualitas suatu badan perairan, yakni melalui tingkat toleransi setiap indeks tersebut terhadap kualitas suatu badan perairan.

4) Capaian Pengurusan dan Pengawasan izin Dokumen Lingkungan

Dalam melakukan usaha ataupun kegiatan, terdapat peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi. Dalam konteks peraturan lingkungan hidup, terdapat



beberapa jenis dokumen yang harus dibuat oleh pelaku usaha/kegiatan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan dari dampak yang ditimbulkan oleh usaha/kegiatan yang dilakukan. Sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menyebutkan bahwa “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan”. Hal serupa juga diperjelas lagi dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Jumlah izin/rekomendasi lingkungan hidup pada Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Gambar 2.60:



Sumber : DLHK3 Kota Banda Aceh, 2022

*) Data tahun 2018 disesuaikan

Gambar 2. 60 Jumlah Izin/ Rekomendasi Lingkungan Tahun 2017-2021

Capaian izin/rekomendasi lingkungan hidup pada tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.83 dibawah ini:

Tabel 2. 83 Capaian Izin/Rekomendasi Lingkungan Hidup pada Tahun 2017-2021

No	Dokumen	Capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	SPPL	205	686	229	226	270
2	UKL-UPL/DPLH	31	56 ^{*)}	20	14	15
Total		236	742	249	240	285

Sumber : DLHK3 Kota Banda Aceh, 2022

*) Data tahun 2018 disesuaikan

Gambar 2.60 dan Tabel 2.83 menunjukkan jumlah usaha/kegiatan di Kota Banda Aceh yang telah mengurus dokumen lingkungan hidup cenderung naik dari tahun-tahun sebelumnya, bahkan pada Tahun 2018 jumlahnya meningkat drastis. Pada tahun 2019-2020 menurun kemungkinan disebabkan dengan adanya pandemi Covid-19. Pada Tahun 2021 jumlah usaha/kegiatan yang telah membuat dokumen lingkungan kembali meningkat yaitu sebanyak 285 usaha/kegiatan dengan rincian SPPL (Dokumen lingkungan berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup) sebanyak 270 usaha/kegiatan, UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya pemantauan Lingkungan Hidup/DPLH) sebanyak 15 usaha/kegiatan.

5) Rasio Tempat Pembuangan Sampah Persatuan penduduk

Daya Tampung TPS per satuan penduduk tidak mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena alokasi dana yang kecil untuk pembelian kontainer dan komunal, juga sulitnya mendapatkan lokasi kontainer/wadah komunal di dalam wilayah gampong karena warga belum bersedia meminjamkan lahan mereka untuk penempatan wadah tersebut. Rasio tempat pembuangan sampah per satuan penduduk Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.84 di bawah ini:



Tabel 2. 84 Rasio Tempat Pembuangan Sampah Persatuan Penduduk (persen) Tahun 2017-2021

Indikator	Target dan Realisasi	Target Capaian Setiap Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk	Target	46,93	-	-	-	-
	Realisasi	36,57	-	-	-	-

Sumber : DLHK3 Kota Banda Aceh, 2022

Berdasarkan Tabel 2.84 di atas terlihat bahwa rasio tempat pembuangan sampah per satuan penduduk pada Tahun 2017 belum mencapai target yang diharapkan. Target setiap tahunnya 227 wadah komunal berukuran 660 Liter yang harus disediakan namun Pemerintah Kota Banda Aceh (DLHK3) hanya mampu mampu mengalokasikan 30-50 Wadah komunal untuk ditempatkan pada jalan utama saja. Indikator kinerja pada rasio tempat pembuangan sampah persatuan penduduk seperti pada tabel 2.84 ini tidak digunakan lagi sejak Tahun 2018. Hal ini menyesuaikan dengan indikator pengelolaan sampah terbaru yang ditetapkan secara nasional yaitu melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (Jaktranas) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Berdasarkan hal tersebut maka realisasi sampah terkelola pada tahun 2018-2021 dapat dilihat pada tabel 2.85 dibawah ini:

Tabel 2. 85 Realisasi Sampah terkelola Tahun 2018-2021

Indikator	Target dan Capaian	Target Capaian setiap Tahun			
		2018	2019	2020	2021
Persentase Sampah yang terkelola	Target	91 %	90 %	97%	98%
	Realisasi	95,94 %	92,87 %	93,12 %	97,78%

Sumber: DLHK3 Kota Banda Aceh, 2022

Banda Aceh telah menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah melalui Peraturan Walikota No. 46 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kota Banda Aceh dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Penetapan kebijakan tersebut berlaku sejak 2018 hingga 2025, yang menetapkan target penanganan dan pengurangan sampah. Jumlah volume sampah dalam penanganan dan pengurangan sampah tersebut merupakan jumlah sampah terkelola. Sampah yang terkelola pada tahun 2018 sebesar 95,54 % menurun 92,87 % pada tahun 2019, akibat pemisahan data antara sampah Kota Banda Aceh dan Aceh Besar yang masuk di TPA Gampong Jawa. Namun pada tahun 2021 persentase sampah terkelola naik signifikan menjadi 97,78 % akibat pemberantasan TPS Liar yang berasal dari gampong-gampong di wilayah Kota Banda Aceh.

6) Pemanfaatan Gas Metana dari TPA Gampong Jawa

TPA Kota Banda Aceh menerima sampah yang masuk setiap harinya sebesar 160 - 170 ton diperkirakan mampu menghasilkan gas metan dengan kapasitas 4.000 m³/hari bila pengumpulannya dilakukan secara optimal. Di tahun 2015 pemerintah kota Banda Aceh melalui DK3 telah melakukan upaya pengumpulan dan pemanfaatan gas metan di TPA dengan memasang 12 pipa pengumpul gas vertikal tambahan dimana sebelumnya sudah terpasang 6 pipa pengumpul, sehingga saat ini gas metan sudah dapat dikumpulkan dari 18 pipa pengumpul vertikal yang ada. Untuk tahap pertama DK3 telah mengumpulkas gas metan TPA dari 4 pipa pengumpul vertikal dan telah berhasil disalurkan melalui 2 unit compressor yang dihidupkan secara bergantian ke 23 rumah penduduk yang ada di sekitar TPA yaitu masyarakat Gampong Jawa. DK3 menargetkan pada tahun 2017 gas metan yang dihasilkan TPA





Kota Banda Aceh dapat disalurkan ke 100 rumah warga Gp. Jawa sebagai salah satu bentuk kompensasi Pemerintah Kota Banda Aceh bagi masyarakat yang tinggal di dekat lokasi TPA.

Hal yang membedakan program pemulihan gas metan TPA yang dilakukan oleh Kota Banda Aceh dengan daerah lainnya adalah pengumpulan gas metan TPA Kota Banda Aceh dilakukan pada lahan TPA yang masih aktif dengan tetap memperhatikan faktor-faktor keamanan dan kemudahan operasional alat berat pada lahan urug. Masyarakat Gp. Jawa penerima gas metan gratis dari TPA Kota Banda Aceh sangat senang dan merasakan manfaat yang cukup besar dari gas metan yang mereka terima. Bahkan salah seorang masyarakat mengatakan bahwa sejak adanya gas metan dari TPA, penggunaan elpiji 3 kg di rumahnya dapat dihemat dari 3 tabung/bulan menjadi hanya 1 tabung /bulan. Pemakaian elpiji masih dilakukan untuk mengantisipasi keperluan memasak pada saat jadwal distribusi harian dihentikan. Selama ini jadwal penyaluran gas metan dari TPA mulai pukul 08.00 s/d 12.000 dan 15.00 s/d 17.30.

Pemerintah Kota saat ini sedang mendorong masyarakat penerima manfaat gas metan gratis ini untuk memanfaatkan gas metan tidak hanya untuk kebutuhan memasak sehari-hari, tetapi juga untuk membantu meningkatkan ekonomi keluarga melalui kegiatan usaha rumah tangga (home industry) berbasis bahan bakar gas seperti usaha membuat nasi bungkus, membuat keripik, kacang goreng, dsb untuk dititipkan di warung-warung.

7) **Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau**

Pengelolaan ruang terbuka hijau mengaju pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 5/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Dimana ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 persen dari luas wilayah kota. Berikut Tabel 2.86 rincian pencapaian RTH publik Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021 berdasarkan jenis komponen RTH:

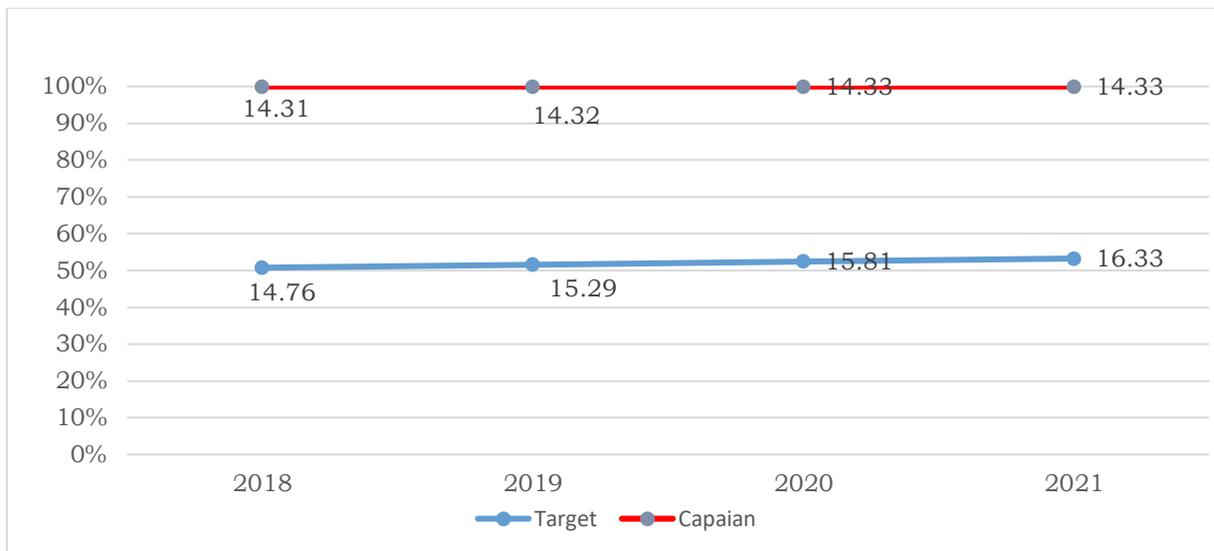
Tabel 2. 86 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021

No	Jenis RTH Publik	Luas (Ha) 2017	Luas (Ha) 2018	Luas (Ha) 2019	Luas (Ha) 2020	Luas (Ha) 2021*
1	RTH Taman Kota	52,71	66,71	58,56	58,59	58,59
2	RTH Hutan kota	27,06	39,36	32,95	33,00	33,00
3	RTH Lapangan Olah Raga	57,23	57,23	57,23	58,56	58,56
4	RTH Jalur Hijau Jalan	40,92	46,52	43,85	43,86	43,86
5	RTH Makam	20,87	20,87	21,66	22,77	22,77
6	RTH Sabuk Hijau/RTH-Pengaman	129,54	129,54	183,58	183,58	183,58
7	Hutan Bakau	483,90	483,90	445,47	445,48	445,48
Jumlah luasan RTH Total		812,23	844,13	843,30	845,84	845,84
Luas Kota Banda Aceh		5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
Presentase luas RTH terhadap Luas Kota Banda Aceh		13,76	14,31	14,29	14,34	14,34

Sumber : DLHK3 Kota Banda Aceh, 2022

Berdasarkan Tabel 2.86 menunjukkan menunjukkan bahwa Kawasan RTH Kota Banda Aceh sudah sulit untuk diperluas, hanya 14 persen sejak 2018 sampai saat ini. Kondisi ini memerlukan kebijakan yang lebih agresif dan bijaksana apabila ingin mencapai target yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Gambar 2.61 menunjukkan target dan realisasi RTH publik dari Tahun 2018 hingga 2021:





Sumber: DLHK3 Kota Banda Aceh, 2021

Gambar 2. 61 Pencapaian Persentase Luas RTH Publik Kota Banda Aceh Periode 2018-2021

Gambar 2.61 menunjukkan penambahan jalur hijau masih belum memenuhi target yang ditetapkan dari periode tahun 2018-2021. Pada tahun 2018 target seluas 14,76 persen dengan realisasi 14,31 persen. Tahun 2021 realisasi meningkat menjadi 14,33 persen, walaupun masih dibawah target. Hal ini disebabkan belum tersedianya anggaran untuk peruntukan pembebasan lahan, yang ditargetkan seluas 5.8 Ha untuk mencapai 16,33 persen dari luas wilayah Kota Banda Aceh pada tahun 2021. Pada Tahun 2021 DLHK3 lebih fokus pada pemeliharaan RTH dan penataan RTH yang sudah ada yang memerlukan sarana dan prasarana penunjang dan pemenuhan RTH Ramah Anak.

8) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Ramah Anak

Menambah fasilitas RTH ramah anak merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh suatu wilayah kota yang sedang berkembang. Berbagai upaya terus dilakukan untuk mencapai target realisasi lahan RTH ramah anak, capaian luas RTH Ramah Anak Kota Banda Aceh Tahun 2017 hingga Tahun 2021 disajikan pada Tabel 2.87 berikut ini:

Tabel 2. 87 Capaian Luas RTH Ramah Anak Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021

No	Luas Ruang Terbuka Hijau Ramah Anak	Target dan Capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Target	-	10 %	20 %	30 %	40 %
2	Realisasi	-	0 %	10 %	10 %	10 %
3	Persentase Capaian	-	0 %	50 %	33 %	25 %

Sumber: DLHK3 Kota Banda Aceh, 2022

Berdasarkan Tabel 2.87 di atas data tahun 2017 tidak tersedia karena realisasi lahan RTH ramah anak baru dimulai sejak tahun 2018. Persentase capaian RTH Ramah Anak pada Tahun 2018 adalah 0 persen dari yang di targetkan sebesar 10 persen. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, persentase RTH ramah anak Kota Banda Aceh pada Tahun 2019 mencapai 50% dari target. Pada tahun 2021 Target luas RTH ramah Anak sebesar 40% dengan persentase capaian sebesar 25 %. Gambar 2.62 menunjukkan kondisi di Hutan Kota Tibang:





Sumber: DLHK3 Kota Banda Aceh, 2022

Gambar 2. 62 RTH Ramah Anak Hutan Kota Tibang

9) Penghargaan Adipura

Penghargaan Adipura adalah penghargaan untuk kota yang berhasil mengelola kebersihan dan lingkungan hidup. Penghargaan ini diberikan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup untuk memacu pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan. Kriteria pemilihan meliputi kriteria fisik dan non fisik. Tabel 2.88 berikut adalah target dan capaian penghargaan Adipura Tahun 2017 sampai Tahun 2021:

Tabel 2. 88 Penghargaan Adipura Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021

Kinerja	Perhitungan Indikator	Target/capaian	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Meraih Adipura	Nilai Fisik dan Non Fisik Adipura	Target	Berhasil	Berhasil	Berhasil	Berhasil	Berhasil
		Capaian	Berhasil	Gagal	Masih menunggu pengumuman dari KLHK	Masih menunggu pengumuman dari KLHK	Masih menunggu pengumuman dari KLHK

Sumber : DLHK3 Kota Banda Aceh, 2022

** Tahun berjalan

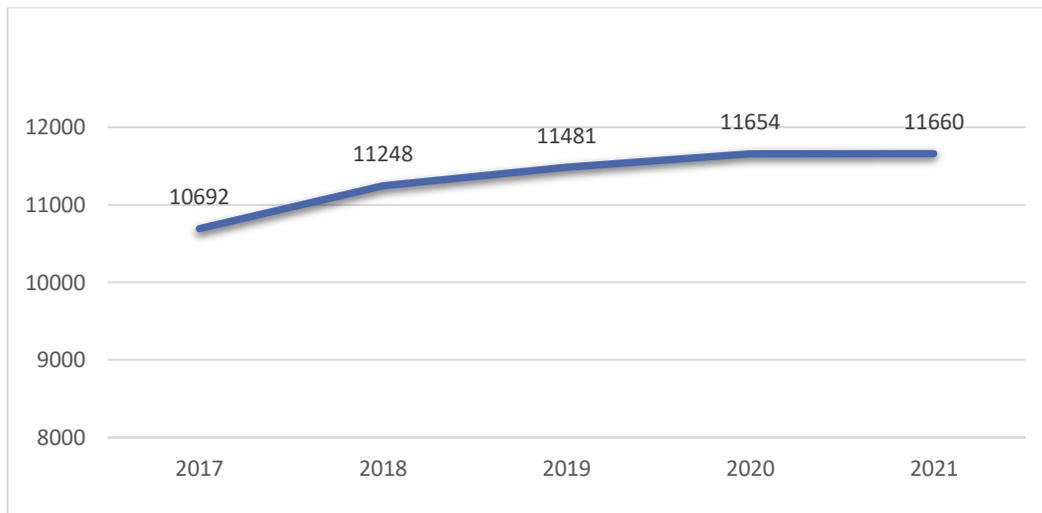
Data di atas menunjukkan bahwa target meraih Adipura pada tahun 2017 berhasil direalisasikan. Namun, pada tahun-tahun berikutnya target yang ditetapkan belum dapat diraih. Kondisi ini disebabkan oleh perubahan lokasi TPA dari TPA Kota Banda Aceh sekarang sampah dibawa ke TPA regional di Blang Bintang, Aceh Besar, sehingga pengelolaan tidak dapat diatur oleh pemerintah kota lagi.

10) Persentase Penerangan Jalan Umum

Seiring berjalannya waktu kebutuhan akan penerangan jalan umum terus meningkat. Data jumlah LPJU di Kota Banda Aceh hingga Tahun 2017 adalah 10.692



Unit. Pada Tahun 2018 bertambah sebesar 556 unit lampu sehingga total lampu jalan hingga 2018 adalah sebanyak 11.248 Unit. Pada Tahun 2019 dilakukan pemasangan lampu baru sebanyak 457 unit yang terdiri dari pemasangan lampu baru 345 unit dan retrofit lampu dari mercury ke LED sebanyak 112 unit sehingga menjadi 11.481 unit. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan Jumlah Lampu PJU sebesar 11.660 unit. Untuk lebih jelasnya persentase capaian penerangan jalan umum dari tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Gambar 2.63 berikut:



Sumber: DLHK3 Kota Banda Aceh, 2022

Gambar 2. 63 Peningkatan Jumlah Lampu PJU Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021

Tabel 2.89 menunjukkan persentase capaian Penerangan Jalan Umum (PJU) Kota Banda Aceh tahun 2017-2021:

Tabel 2. 89 Persentase Penerangan Jalan Umum Kota Banda Aceh Tahun 2018-2021

No	Persentase Cakupan Penerangan Jalan Umum	Target dan Capaian			
		2018	2019	2020	2021
1	Target	79,96 %	81,38 %	82,79 %	84,20 %
2	Realisasi	79,51 %	81,16 %	82,38 %	82,42 %
3	Persentase Capaian	99,45 %	99,72 %	99,50 %	97,88 %

Sumber : DLHK3 Kota Banda Aceh, 2022

Tabel diatas menunjukkan persentase capaian penerangan jalan umum hampir seratus persen dari yang ditargetkan dari Tahun 2018 hingga Tahun 2020, namun pada tahun 2021 persentase capaian menurun sebesar 97,88%.

E. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1) Rasio Penduduk ber KTP per Satuan Penduduk

Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan identitas resmi bagi warga negara Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Kartu identitas ini dapat dimiliki apabila warga sudah mencapai umur 17 tahun atau sudah menikah. Menurut peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal, 1 point 14 bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi *chip* yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) diproses secara komputerisasi dan





dilengkapi cip yang berfungsi untuk menyimpan biodata, sidik jari dan tanda tangan. Rasio kepemilikan KTP di Kota Banda Aceh dari Tahun 2017 hingga 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.90 di bawah ini:

Tabel 2. 90 Rasio Kepemilikan KTP Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021*
Jumlah KTP Elektronik yang diterbitkan	155.063	131.173	139.640	165.307	167.922
Jumlah Wajib KTP Elektronik	172.387	2845	3072	165.415	169.097
Rasio	90	95,30	99,48	99,93	99,31

Sumber : Disdukcapil Kota Banda Aceh, 2022

*Tahun 2021 adalah data per 31 November 2021

Tabel 2.90 di atas menunjukkan bahwa rasio kepemilikan KTP dari Tahun 2017-2021 meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa Kota Banda Aceh sudah menyelesaikan perekaman KTP-el hingga 99,31 persen pada tahun 2021.

2) **Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 penduduk**

Pemerintah Kota Banda Aceh melakukan berbagai upaya percepatan dan perluasan cakupan pencatatan kelahiran melalui sosialisasi, upaya proaktif, pelayanan yang terjangkau dan bekerjasama dengan klinik serta tenaga pembantu kelahiran baik medis maupun non medis. Pelayanan dilakukan dengan menyediakan pelayanan melalui aplikasi online untuk pencatatan kelahiran yang menjangkau tingkat gampong dan semua layanan yang disediakan tidak dipungut biaya (gratis).

Akta Kelahiran menjadi isu global dan sangat asasi karena menyangkut identitas diri dan status kewarganegaraan. Disamping itu Akta Kelahiran merupakan hak identitas seseorang sebagai perwujudan Konvensi Hak Anak (KHA) dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Akta Kelahiran bersifat universal, karena hal ini terkait dengan pengakuan negara atas status keperdataan seseorang. Selain itu jika seorang anak manusia yang lahir kemudian identitasnya tidak terdaftar, kelak akan menghadapi berbagai masalah yang akan berakibat pada negara, pemerintah dan masyarakat. Dalam perspektif KHA, negara harus memberikan pemenuhan hak dasar kepada setiap anak, dan terjaminnya perlindungan atas keberlangsungan, tumbuh kembang anak.

UU No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan mengatur lebih lanjut tentang pemberian akta kelahiran. Menurut UU tersebut setiap bayi yang lahir, 60 hari setelah itu harus dicatat dan diberikan akta kelahiran. Untuk mewujudkan ini, Pemerintah Kota Banda Aceh juga melakukan berbagai upaya percepatan dan perluasan cakupan pencatatan kelahiran, antara lain: sosialisasi, upaya proaktif dengan pelayanan yang terjangkau dan bekerjasama dengan klinik serta tenaga pembantu kelahiran, terakhir melakukan kemudahan pelayanan dengan meluncurkan aplikasi online untuk pencatatan kelahiran yang menjangkau hingga tingkat gampong. Semua layanan yang disediakan tidak dipungut biaya (gratis). Jumlah kepemilikan akte kelahiran dan jumlah kelahiran di Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.91 di bawah ini:





Tabel 2. 91 Kepemilikan Akta Kelahiran Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah kutipan akta kelahiran yang diterbitkan sampai dengan tahun.	103.097	123.779	131.173	139.640	146.878
Jumlah kelahiran yang terjadi sampai dengan tahun.	2.543	5.781	2.845	3.072	2.713

Sumber : Disdukcapil Kota Banda Aceh, 2022

Berdasarkan Tabel 2.91 di atas dapat dilihat jumlah akte kelahiran yang diterbitkan cenderung meningkat setiap tahunnya. Jumlah Kutipan akta kelahiran yang diterbitkan tertinggi pada tahun 2021 sebesar 146.878. Sementara itu angka kelahiran cenderung berfluktuasi setiap tahunnya. Dapat dilihat bahwa jumlah kutipan akta kelahiran yang diterbitkan jauh melebihi dari jumlah angka kelahiran. Hal ini disebabkan banyaknya penduduk yang belum memiliki akta kelahiran membuat akta kelahiran.

F. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1) Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa

Sarana dan prasarana perkantoran desa merupakan pendukung seluruh aktifitas pemerintahan di desa/gampong. Kondisi sarana dan prasarana yang baik akan sangat mempengaruhi layanan yang diberikan oleh aparat gampong bagi masyarakat. Selama Tahun 2017 sampai dengan 2021 data cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintah desa yang baik dapat dilihat pada Tabel 2.92 berikut:



**Tabel 2. 92 Tabel Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021**

No	Kecamatan	Jumlah gampong	2017		2018		2019		2020		2021	
			jumlah kantor pemerintahan Gampong yang baik	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintah Gampong yang baik	jumlah kantor pemerintahan Gampong yang baik	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintah Gampong yang baik	jumlah kantor pemerintahan Gampong yang baik	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintah Gampong yang baik	jumlah kantor pemerintahan Gampong yang baik	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintah Gampong yang baik	jumlah kantor pemerintahan Gampong yang baik	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintah Gampong yang baik
1	Baiturrahman	10	10	100.00	10	100	10	100	10	100	10	90
2	Kuta Alam	11	10	90.91	10	90.91	10	90.91	10	90.91	11	100
3	Meuraxa	16	16	100.00	16	100	16	100	16	100	16	100
4	Syiah Kuala	10	9	90.00	9	90	9	90	9	90	10	100
5	Lueng Bata	9	9	100.00	9	100	9	100	9	100	9	100
6	Kutaraja	6	6	100.00	6	100	6	100	6	100	6	100
7	Banda Raya	10	10	100.00	10	100	10	100	10	100	10	100
8	Jaya Baru	9	8	88.89	8	88.89	9	100	9	100	9	100
9	Ulee Kareng	9	9	100.00	9	100	9	100	9	100	9	100
Jumlah se-Kota Banda Aceh		90	87	96,67	87	96,67	88	97.78	88	97.78	90	100

Sumber : DPMG Kota Banda Aceh, 2022

*Tahun 2021 adalah data per 31 November 2021



Berdasarkan informasi dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan cakupan sarana dan prasarana di gampong-gampong di Kota Banda Aceh. Pada tahun 2017 sampai dengan 2018 masih terdapat 3 gampong yang kondisi sarana dan prasarananya belum baik. Namun, pada tahun 2019 dan 2020 hanya 2 gampong saja yang belum baik kondisi sarana dan prasarananya. Pada tahun 2021 seluruh gampong sudah mempunyai sarana dan prasarana yang baik kondisinya sehingga cakupan sarana dan prasarana perkantoran gampong sudah mencapai 100 persen. Cakupan yang sudah sangat baik ini haruslah diikuti oleh layanan yang juga dapat memuaskan keperluan masyarakat gampong. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah berupa bangunan fisik perkantoran dan juga sarana seperti mobile, peralatan kantor dan akses internet.

Permasalahan yang dialami sebelumnya antara lain untuk kecamatan Kuta Alam, Gampong Peunayong, kantor geuchiek adalah ruko milik pemko. Kecamatan Syiah Kuala Gampong Kopelma Darussalam, terjadi perselisihan kepemilikan dengan pihak lain dan saat ini digunakan gedung pkk bersama. Pada kecamatan Jaya Baru, Gampong Ulee Pata, kantor kecil sulit melakukan pelayanan. Sekarang sudah mendapat gedung baru dan fasilitas lengkap. Sedangkan di Kecamatan Baiturahman, Gampong Peuniti: kantor di rubuhkan tetapi tidak dapat di bangun kembali karena pada wilayah tersebut hanya boleh dibangun toko dan bukan perkantoran.

2) **Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Mukim**

Mukim merupakan bentuk keistimewaan Aceh yang diterapkan dalam pemerintahan. Kota Banda Aceh secara khusus menuangkan peran mukim dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 tahun 2021 tentang Pemerintahan Mukim. Dalam qanun ini dituangkan bahwa terdapat fungsi mukim diantaranya pengoordinasian penyelenggaraan pemerintah gampong dalam mukim, penyelenggaraan pelaksanaan Syariat Islam, pengoordinasian pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan berdemokrasi secara inklusif dan berkeadilan gender, penyelesaian sengketa adat yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat gampong, dan juga termasuk pengawasan fungsi lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam dalam mukim. Fungsi ini dapat dilaksanakan dengan apabila didukung oleh sarana dan prasarana yang baik. Selama Tahun 2017-2021 jumlah kantor mukim yang baik dapat dilihat pada Tabel 2.93 di bawah ini:





Tabel 2. 93 Tabel Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Mukim Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021

No	Kecamatan	Jumlah mukim	2017		2018		2019		2020		2021	
			Jumlah kantor mukim yang baik	Cakupan sarana prasarana perkantoran mukim yang baik	Jumlah kantor mukim yang baik	Cakupan sarana prasarana perkantoran mukim yang baik	Jumlah kantor mukim yang baik	Cakupan sarana prasarana perkantoran mukim yang baik	Jumlah kantor mukim yang baik	Cakupan sarana prasarana perkantoran mukim yang baik	Jumlah kantor mukim yang baik	Cakupan sarana prasarana perkantoran mukim yang baik
1	Baiturrahman	2	0	0.00	0	0	2	100	2	100	2	100
2	Kuta Alam	2	1	50.00	1	50	1	50	1	50	1	50
3	Meuraxa	2	1	50.00	1	50	1	50	1	50	1	50
4	Syiah Kuala	3	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Lueng Bata	1	1	100.00	1	100	1	100	1	100	1	100
6	Kutaraja	1	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Banda Raya	2	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Jaya Baru	2	1	50.00	1	50	1	50	1	50	1	50
9	Ulee Kareng	2	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah se-Kota Banda Aceh		17	4	23.53	4	23.53	6	35.29	6	35.29	6	

Sumber : DPMG Kota Banda Aceh, 2022



Berdasarkan Tabel 2.93 di atas, Cakupan sarana dan prasarana perkantoran mukim pada tahun 2017 adalah 23,53 persen yang berarti baru 4 mukim yang memiliki sarana dan prasarana perkantoran yang baik. Namun, kondisi ini terus diperbaiki sehingga tahun 2020 dan 2021 sudah menjadi 35,29 persen.

3) Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan lembaga/wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah gampong dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan. Sedangkan kelompok binaan LPM adalah kelompok masyarakat yang dibina oleh LPM sebagai mitra pemerintah gampong dalam mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan, misalnya kelompok pemuda/karangtaruna, remaja mesjid dan lain-lain.

Jumlah Kelompok binaan LPM dalam Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Tabel 2.94 berikut ini:





Tabel 2. 94 Kelompok Binaan LPM Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021

No	Kecamatan	2017			2018			2019			2020			2021		
		Jumlah LPM	Jumlah Kelompok Binaan	Rata-rata Jumlah LPM	Jumlah LPM	Jumlah Kelompok Binaan	Rata-rata Jumlah LPM	Jumlah LPM	Jumlah Kelompok Binaan	Rata-rata Jumlah LPM	Jumlah LPM	Jumlah Kelompok Binaan	Rata-rata Jumlah LPM	Jumlah LPM	Jumlah Kelompok Binaan	Rata-rata Jumlah LPM
1	Baiturrahman	10	21	2.10	10	21	2.1	10	21	2.1	10	21	2.1	10	21	2.1
2	Kuta Alam	11	25	2.27	11	25	2.27	11	25	2.27	11	25	2.27	11	25	2.27
3	Meuraxa	16	30	1.88	16	30	1.88	16	30	1.88	16	30	1.88	16	30	1.88
4	Syiah Kuala	10	22	2.20	10	22	2.2	10	22	2.2	10	22	2.2	10	22	2.2
5	Lueng Bata	9	22	2.44	9	22	2.44	9	22	2.44	9	22	2.44	9	22	2.44
6	Kutaraja	6	14	2.33	6	14	2.33	6	14	2.33	6	14	2.33	6	14	2.33
7	Banda Raya	10	22	2.20	10	22	2.2	10	22	2.2	10	22	2.2	10	22	2.2
8	Jaya Baru	9	20	2.22	9	20	2.22	9	20	2.22	9	20	2.22	9	20	2.22
9	Ulee Kareng	9	20	2.22	9	20	2.22	9	20	2.22	9	20	2.22	9	20	2.22
Jumlah se-Kota Banda Aceh		90	196	2.18												

Sumber : DPMG Kota Banda Aceh, 2022

*Tahun 2021 adalah data per 31 November 2021



Dari Tabel 2.94 diatas terlihat bahwa sejak tahun 2017 sampai saat ini tiap gampong mempunyai 1 LPM dan setiap LPM mempunyai 2 kelompok binaan. Hal ini mencerminkan aktifitas dalam gampong tersebut. Apabila dapat ditingkatkan lagi jumlah kelompok binaannya maka akan menunjukkan penambahan aktifitas yang terorganisir dengan baik di setiap gampong.

4) Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 5/2007 Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa/Lurah dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Tugas Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. menyusun rencana kerja PKK Desa/Kelurahan, sesuai dengan basil Rakerda Kabupaten/Kota;
- b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
- c. menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun/Lingkungan, RW, RT dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
- d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
- e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
- f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
- g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa/kelurahan;
- h. membuat laporan basil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat;
- i. melaksanakan tertib administrasi; dan
- j. mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat.

Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai fungsi:

- a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
- b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing Gerakan PKK

Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP. PKK) Kota Banda Aceh melaksanakan pembinaan secara berjenjang dari TP. PKK Kecamatan sampai TP. PKK Gampong. Selanjutnya TP. PKK Gampong membina kelompok PKK Dusun dan Kelompok Dasa Wisma. Kelompok binaan PKK merupakan kelompok-kelompok masyarakat yang berada di bawah Tim Penggerak PKK Gampong yang terdiri dari Kelompok PKK Dusun, Kelompok Dasa Wisma, Kelompok UP2K dan lain-lain. Jumlah Kelompok PKK Dusun dan Dasawisma adalah sesuai dengan jumlah dusun dan dasawisma yang ada di gampong.





Tabel 2. 95 Kelompok Binaan PKK Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021

No	Kecamatan	2017			2018			2019			2020			2021		
		Jumlah PKK	Jumlah Kelompok Binaan	Rata-rata Jumlah PKK												
1	Baiturrahman	11	470	42.73	11	470	42.73	11	424	38.55	11	412	37.45	11	412	37.45
2	Kuta Alam	12	460	38.33	12	460	38.33	12	431	35.92	12	341	28.42	12	341	28.42
3	Meuraxa	17	266	15.65	17	266	15.65	17	312	18.35	17	361	21.24	17	361	21.24
4	Syiah Kuala	11	428	38.91	11	428	38.91	11	407	37.00	11	321	29.18	11	321	29.18
5	Lueng Bata	10	269	26.90	10	269	26.9	10	310	31.00	10	405	40.50	10	405	40.50
6	Kutaraja	7	153	21.86	7	153	21.86	7	166	23.71	7	324	46.29	7	324	46.29
7	Banda Raya	11	270	24.55	11	270	24.55	11	336	30.55	11	239	21.73	11	239	21.73
8	Jaya Baru	10	318	31.80	10	318	31.8	10	310	31.00	10	309	30.90	10	309	30.90
9	Ulee Kareng	10	328	32.80	10	328	32.8	10	347	34.70	10	350	35.00	10	350	35.00
Jumlah se-Kota Banda Aceh		99	2.962	29,92	99	2.962	29,92	99	3.043	30.74	99	3.062	30,93	99	3.062	30,93

Sumber : DPMG Kota Banda Aceh, 2022



Berdasarkan Tabel 2.95 diatas terlihat bahwa TP PKK Kota Banda Aceh terdiri dari 90 TP PKK gampong, 9 TP PKK kecamatan sehingga jumlah TP PKK adalah 99 yang dibina oleh TP PKK kota. Kelompok binaan TP sehingga berjumlah 100 untuk kota. TP PKK membina Dasawisma, UP2K (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga), Posyandu balita & lansia), Posbindu, Jumantik (Juru Mantau Jentik). Pada tabel di atas dapat dibahwa terdapat 3.062 kelompok binaan yang ada di seluruh Kota Banda Aceh. Jumlah kelompok binaan ini dapat berubah karena karena ada peleburan di tingkat desa tergantung kondisi desa.

5) **Persentase PKK aktif**

Berdasarkan pembinaan, jumlah PKK aktif meningkat setiap tahun, karena dukungan dari pemerintah gampong melalui Dana ADG dan Dana Desa. Jumlah PKK aktif di Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.96 berikut:

Tabel 2. 96 PKK Aktif Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah TP. PKK	100	100	100	100	100
2	Jumlah TP. PKK tidak aktif	-	-	-	-	-
3	Jumlah TP. PKK aktif (1-2)	100	100	100	100	100
4	Persentase	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber : DPMG Kota Banda Aceh, 2022

*Tahun 2021 adalah data per 31 November 2021

Berdasarkan Tabel 2.96 di atas dapat dilihat bahwa dari tahun 2017-2021 semua TP.PKK yang ada di Banda Aceh adalah TP.PKK aktif. Keaktifan TP PKK menunjukkan bahwa tugas dan fungsi yang telah diamanahkan kepada TP PKK telah dilaksanakan dengan baik terutama dalam membantu mewujudkan keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

6) **Persentase Posyandu aktif**

Posyandu merupakan bentuk kegiatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas kesehatan pada tingkat gampong dan kegiatan ini diawasi oleh petugas kesehatan di gampong tersebut. Keaktifan kegiatan Posyandu dapat menjadi indikator kualitas kesehatan pada tingkat gampong. Berikut adalah gambaran jumlah Posyandu aktif yang ada di Kota Banda Aceh.

Tabel 2. 97 Jumlah Posyandu Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021

No	Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021
		Jumlah Posyandu Aktif				
1	Baiturrahman	18	18	19	19	19
2	Kuta Alam	15	15	15	15	15
3	Meuraxa	18	18	18	18	18
4	Syiah Kuala	12	12	12	12	12
5	Lueng Bata	9	9	9	9	9
6	Kutaraja	6	6	6	6	6
7	Banda Raya	10	10	10	10	10
8	Jaya Baru	16	16	16	16	16
9	Ulee Kareng	9	9	9	9	9
	Jumlah se-Kota Banda Aceh	113	113	114	114	114

Sumber : DPMG Kota Banda Aceh, 2022





Pada tahun 2017 dan 2018 jumlah Posyandu aktif adalah 113 unit dan setelah itu menjadi 114 unit mulai 2019 sampai 2021. Pada tahun 2019 terjadi penambahan posyandu aktif di kecamatan Baiturahman. Keaktifan posyandu diklasifikasikan berdasarkan jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh posyandu tersebut. Posyandu Pratama adalah posyandu yang masih belum memiliki kegiatan rutin, Posyandu Madya adalah posyandu yang memiliki kegiatan rutin lebih dari 8 kali per tahun dengan minimal 5 orang kader tetapi cakupan kegiatan utama masih di bawah 50%. Selanjutnya, Posyandu Purnama merupakan posyandu yang sudah dapat melaksanakan kegiatan lebih dari 8 kali per tahun, dengan rata-rata jumlah kader sebanyak lima orang atau lebih, cakupan kelima kegiatan utamanya lebih dari 50%, mampu menyelenggarakan kegiatan pengembangan, serta telah memperoleh dana sehat yang berasal dari swadaya masyarakat dipergunakan untuk upaya kesehatan di Posyandu. Peringkat tertinggi yang ingin dicapai adalah Posyandu Mandiri, yaitu Posyandu yang sudah dapat melaksanakan kegiatan lebih dari 8 kali per tahun, dengan rata-rata jumlah kader sebanyak lima orang atau lebih, cakupan kelima kegiatan utamanya lebih dari 50%, mampu menyelenggarakan kegiatan pengembangan, serta telah memperoleh dana sehat yang berasal dari swadaya masyarakat dan kelompok usaha bersama (usaha dikelola oleh masyarakat) yang dipergunakan untuk upaya kesehatan di Posyandu.

Posyandu dalam Kota Banda Aceh memiliki strata yang berbeda-beda, tergantung pada pencapaian indikator tingkat perkembangan posyandu. Strata Posyandu dalam Kota Banda Aceh selama 5 tahun sejak Tahun 2017 sampai tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.98 berikut ini:

Tabel 2. 98 Strata Posyandu di Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021

No	Strata Posyandu	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pratama	3	3	4	0	1
2	Madya	87	89	89	90	88
3	Purnama	24	22	22	24	25
4	Mandiri	0	0	0	0	0
Jumlah		114	114	115	114	114

Sumber : DPMG Kota Banda Aceh, 2022

*Tahun 2021 adalah data per 31 November 2021

Berdasarkan Tabel 2.98 di atas tahun 2017 Kota Banda Aceh mempunyai 3 Posyandu Pratama, 87 Posyandu Madya, dan 24 Posyandu Purnama, sedangkan pada akhir periode yaitu tahun 2021 jumlah posyandu dengan peringkat Pratama hanya tinggal 1 posyandu dan Posyandu Madya dan Posyandu Purnama telah bertambah menjadi 88 dan 25 posyandu.

7) Presentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Keuchik Langsung (Pilchiksung)

Fasilitasi pemilihan kepala desa di Kota Banda Aceh dilaksanakan melalui kegiatan Pemilihan Keuchik (kepala desa) Langsung (Pilchiksung). Persentase partisipasi masyarakat dalam pilchiksung dihitung dengan jumlah masyarakat yang ikut pemilihan pada pilchiksung dibagi jumlah masyarakat yang telah memiliki hak pilih (DPT) dikali 100 persen. Jumlah desa pelaksana Pilchiksung, jumlah daftar pemilih tetap, jumlah pemilih dan partisipasi masyarakat dari Tahun 2017 sampai dengan 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.99 berikut :





Tabel 2. 99 Partisipasi Masyarakat dalam Pilchiksung Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Desa Pelaksana Pilchiksung	Gampong	15	16	22	0	24
2	Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Orang	28,108	29,620	24,999	0	40,651
3	Jumlah Pemilih	Orang	16,059	18,067	17,058	0	25,513
4	Partisipasi Masyarakat	%	57.13	61.00	68.23	0	62.76

Sumber : DPMG Kota Banda Aceh, 2022

*Tahun 2021 adalah data per 31 November 2021

Berdasarkan Tabel 2.99 di atas dapat dilihat bahwa Pada tahun 2020 tidak ada pemilihan Geuchiek secara langsung (pilchiksung) karena tahun ini adalah masa transisi untuk pemilihan serentak. Jadwal pemilihan Geuchiek untuk Kota Banda Aceh adalah tahun 2021, 2023, dan 2025. Dimasa penyesuaian pemilihan geuchiek maka ditunjuk pejabat sementara sebagai pelaksana tugas Geuchiek.

8) Pelaksanaan Pemerintahan Kecamatan dan Kota

Pemerintah Kota Banda Aceh telah memiliki gedung pemerintahan yang unik dan megah. Kemegahan tersebut diiringi dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang bersih dan berwibawa serta pelayanan yang optimal bagi warga kota. Sampai tahun 2017, sesuai dengan SOTK Baru Pemerintah Kota Banda Aceh telah memiliki 44 satuan kerja (termasuk 9 kecamatan). Tabel 2.100 menunjukkan secara lebih rinci, jumlah gampong dan mukim menurut kecamatan dalam Kota Banda Aceh:

Tabel 2. 100 Data Mukim Dalam Kota

No	Kecamatan		Nama Mukim	Jumlah Gampong
1	2		3	4
1	Baiturrahman	1	Baiturrahman	5
		2	Putro Phang	5
2	Kuta Alam	3	Kuta Alam	5
		4	Lam Kuta	6
3	Meuraxa	5	Meuraxa	8
		6	Tgk. Chik Lamjabat	8
4	Syiah Kuala	7	Tgk. Syeh Abdurrauf	4
		8	Tgk.Chik di Lamnyong	2
		9	Kayee Adang	4
5	Lueng Bata	10	Lueng Bata	9
6	Kutaraja	11	Tgk. Dianjong	6
7	Banda Raya	12	Banda Jaya	4
		13	Lam Ara	6
8	Jaya Baru	14	Pos Blang	5
		15	Lambaro Banda	4
9	Ulee Kareng	16	Simpang Tujoh	4
		17	Poeteumeureuhom	5

Sumber : DPMG Kota Banda Aceh, 2022

*Tahun 2021 adalah data per 31 November 2021

Berdasarkan Tabel 2.100 di atas dapat dilihat bahwa Secara administratif Kota Banda Aceh terdiri atas 9 kecamatan, 90 gampong, dan 17 mukim, dari 90 gampong di Kota Banda Aceh, 16 gampong atau sekitar 17,78 persen terdapat di Kecamatan Meuraxa. Selanjutnya disusul Kecamatan Kuta Alam sebanyak 11 gampong (12,22 persen). Kemudian, tiga kecamatan masing-masing memiliki 10 gampong, meliputi Banda Raya, Baiturrahman, dan Syiah Kuala. Tiga kecamatan





lainnya, seperti Jaya Baru, Lueng Bata, dan Ulee Kareng, masing-masing memiliki 9 gampong. Adapun Kuta Raja hanya memiliki 6 gampong (6,67 persen).

Sebagaimana halnya kabupaten/ kota lainnya di Aceh, di Kota Banda Aceh terdapat pula mukim yang fungsinya dinilai penting dalam mendorong perkembangan aktivitas sosial-kemasyarakatan di gampong dan kecamatan. Dari 17 mukim yang ada di Banda Aceh, 3 mukim terdapat di Kecamatan Syiah Kuala. Di Kecamatan Lueng Bata dan Kuta Raja masing-masing memiliki 1 mukim dan kecamatan lainnya memiliki masing-masing 2 mukim.

Dari 17 mukim yang ada di Banda Aceh, 3 mukim terdapat di Kecamatan Syiah Kuala. Di Kecamatan Lueng Bata dan Kuta Raja masing-masing memiliki 1 mukim dan kecamatan lainnya memiliki masing-masing 2 mukim.

9) Presentase Capaian Pengelolaan Keuangan Gampong yang baik

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 menyebutkan bahwa Pendapatan Desa bersumber dari:

- pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada poin (b) lebih dikenal dengan nama Dana Desa (DD), sedangkan alokasi Dana Desa pada poin (d) untuk Provinsi Aceh dikenal dengan nama Alokasi Dana Gampong (ADG). ADG paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Sementara itu, untuk Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota poin (c) paling sedikit 10 persen dari pajak dan retribusi daerah. Untuk lebih jelasnya besaran Dana pembangunan untuk gampong Tahun 2017 s/d Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.101 berikut :

Tabel 2. 101 Fasilitasi Dana Pembangunan Untuk Gampong Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Alokasi Dana Gampong (ADG)	57.280.292.476	57.736.964.520	58.357.906.650	48.862.057.710	57.111.381.200
2	Dana Desa (DD)	70.923.443.000	64.464.666.000	74.192.333.000	75.977.398.000	77.702.442.000
3	Dana Bagi Hasil Pajak Daerah	5.048.550.000	6.336.885.233	6.993.885.233	6.064.790.652	5.142.160.652
4	Dana Bagi Hasil Restribusi Daerah	2.527.597.700	2.639.828.700	3.031.474.257	2.565.987.274	2.565.987.274
	Jumlah	135.779.883.176	131.178.344.453	142.575.599.140	133,470.233.636	142.521.971.126

Sumber : DPMG Kota Banda Aceh, 2022

*Tahun 2021 adalah data per 31 November 2021





Berdasarkan Tabel 2.101 di atas dapat dilihat bahwa ADG untuk gampong yang berada dalam wilayah Kota Banda Aceh pada periode tahun 2017-2021 berkisar antara 48,86 milyar rupiah sampai dengan 58,35 milyar rupiah. Alokasi terendah terjadi pada tahun 2020 dimana pada tahun ini dampak pandemi *Covid-19* sudah sangat terasa sehingga mempengaruhi pendapatan Kota Banda Aceh yang berakibat pada dana gampong yang dialokasikan pada APBD juga berkurang. Demikian juga untuk Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah menurun akibat pandemi pada tahun 2020 dan 2021.

Walaupun alokasi dana untuk gampong mengalami penurunan akibat pandemi, kemampuan gampong dalam mengelola dana gampong telah menjadi lebih baik dari tahun ke tahun. Capaian pengelolaan keuangan gampong dapat dilihat pada Tabel 2.102 berikut:

Tabel 2. 102 Capaian Pengelolaan Keuangan Gampong yang Baik Tahun 2017-2021

Uraian (%)	2017	2018	2019	2020	2021
Capaian Pengelolaan Keuangan Gampong yang baik	25%	30%	30%	47%	64,44%

Sumber : DPMG Kota Banda Aceh, 2022

Pada awal periode capaian pengelolaan keuangan gampong relatif masih rendah. Kemampuan aparat gampong dalam mengelola dana gampong mengalami beberapa kendala dan belum mampu memenuhi kriteria cakupan yang baik yaitu Perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Kendala yang dialami antara lain dari segi perencanaan sering terlambat akibat ketidakharmonisan dengan tuha peut gampong; penatausahaan, kelengkapan berkas/dokumen pencairan; pelaksanaan, perubahan harga barang, menyebabkan perubahan proses pengadaan. Akibatnya mempengaruhi proses pertanggungjawaban. Pergantian geuchiek dapat menyebabkan kapasitas aparat yang juga berbeda dan bermasalah dengan proses perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Untuk itu perlu upaya peningkatan kapasitas aparatur gampong di bidang pengelolaan keuangan gampong perlu dilaksanakan secara berkesinambungan. Upaya berkesinambungan ini kemudian berdampak kepada membaiknya capaian pengelolaan keuangan gampong yang hanya 25 persen di awal periode menjadi 64,44 persen pada tahun 2021.

10) **Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat (PUEM) dilaksanakan melalui fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dengan pemberian dana revolving (dana bergulir). Pemerintah Kota Banda Aceh bekerja sama dengan BPRS Baiturrahman sejak Tahun 2009 telah melaksanakan program PUEM dengan tingkat suku bunga 6 persen per tahun. Pada Tahun 2013 Program PUEM ini dihentikan dan digantikan dengan PUEM Al Qardhul Hasan (pinjaman tanpa bunga) sejak Tahun 2015. Untuk lebih jelasnya Jumlah Penyaluran Dana Bergulir dan jumlah penerima permodalan melalui program PUEM dari Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.103 berikut:





Tabel 2. 103 Fasilitasi Permodalan Bagi Usaha Mikro Kecil Melalui Program PUEM Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Penyaluran Dana Bergulir (Rp)	1.627.000.000	839.000.000	227.000.000	187.000.000	N/A
2	Jumlah Penerima (orang)	396	206	48	40	N/A

Sumber : Diskop, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh, 2022

Tabel 2.103 di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2017-2018 permohonan masyarakat diajukan ke DPMG kemudian DPMG mendisposisikan ke BPRS dan dilakukan studi kelayakan peminjaman, setelah verifikasi maka penerima di sk kan dari DPMG. Namun, sejak 2019 sampai dengan 2021 debitur mengajukan pembiayaan ke LKMS Mahirah dan setelah diverifikasi dan dianggap layak menerima dana bergulir maka setelah itu DPMG mengeluarkan SK penerima. Dengan demikian penurunan jumlah penerima bantuan PUEM berhubungan dengan kemampuan usaha mikro tersebut dalam memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh LKMS Mahirah.

11) Persentase Capaian Pengelolaan Aset Gampong

Definisi asset desa yang diuraikan dalam Undang-undang no 6 tahun 2014 dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa. Selanjutnya juga dijelaskan bahwa pengelolaan kekayaan milik desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. Pengelolaan kekayaan milik desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa. Oleh karena itu kemampuan aparat gampong dalam mengelola asset desa menjadi indikator penting dalam pembangunan di gampong. Presentase Capaian Pengelolaan Aset Gampong yang baik di Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Tabel 2.104 berikut:

Tabel 2. 104 Capaian Pengelolaan Aset Gampong Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Capaian Pengelolaan Aset Gampong (%)	25	27	37	40	44,44

Sumber : DPMG Kota Banda Aceh, 2022

*Tahun 2021 adalah data per 31 November 2021

Capaian yang diraih pada awal periode belum begitu menggembirakan. Kapasitas aparat gampong dalam mengelola asset ini masih perlu untuk ditingkatkan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah kemampuan dalam inventarisir barang, laporan asset sangat kurang dilakukan oleh desa. Kemampuan ini terus diupayakan oleh DPMG sebagai OPD yang membantu gampong melalui program pelatihan pelaporan asset. Upaya ini kemudian menunjukkan adanya peningkatan kemampuan aparat gampong yang terlihat dari meningkatnya capaian pengelolaan asset gampong diakhir periode yaitu tahun 2021 yang mencapai 44,44 persen. Namun, tentu belum dapat berpuas diri dengan capaian ini. Perlu upaya peningkatan kapasitas aparatur gampong di bidang pengelolaan aset gampong perlu dilaksanakan secara berkesinambungan.





12) Persentase Capaian Penataan Administrasi Pemerintahan Mukim/ Gampong yang baik

Administrasi Pemerintahan Mukim/ Gampong merupakan bagian dari tata kelola pemerintahan mukim/gampong. Penyusunan perencanaan gampong, pengelolaan keuangan dan aset gampong, penyusunan profil gampong, pembuatan produk hukum gampong dan pelaksanaan administrasi pemerintahan mukim/gampong akan dapat berjalan baik bila gampong memiliki SDM yang baik. Capaian Penataan Administrasi Pemerintahan Mukim/Gampong yang baik dapat dilihat pada Tabel 2.105 berikut :

Tabel 2. 105 Capaian Penataan Administrasi Pemerintahan Mukim/ Gampong Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Penataan Administrasi Pemerintahan Mukim/Gampong (%)	25	30	38	45	59,81

Sumber : DPMG Kota Banda Aceh, 2022

Dari Tabel 2.105 di atas dapat dilihat bahwa capaian penataan administrasi pemerintahan mukim/gampong terus mengalami peningkatan dari tahun 2017-2021, meskipun capaian tersebut masih tergolong rendah. Capaian Penataan Administrasi Pemerintahan Mukim/Gampong pada tahun 2021 sebesar 59,81%. Untuk itu perlu upaya peningkatan kapasitas aparatur mukim/gampong dalam penataan administrasi pemerintahan perlu dilaksanakan secara berkesinambungan.

G. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1) Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga

Program Keluarga Berencana sudah berjalan cukup baik di Kota Banda Aceh, hal ini karena dalam pelaksanaan program dan kegiatan didukung pendanaan yang lumayan yakni dari Dana Alokasi Khusus (DAK) KB. Saat ini secara prasarana telah tersedia 5 (lima) pos KB yang dibangun dari dana tersebut, secara sarana telah sangat baik yakni tersedianya berbagai kelengkapan operasional yang mendukung kader dalam pelayanan KB hingga ke tingkat gampong. Berikut Tabel 2.106 rata-rata jumlah anak per keluarga di Kota Banda Aceh dari Tahun 2017-2021:

Tabel 2. 106 Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Rata-rata Jumlah Anak Per-Keluarga	1,7	1,31*)	1,35*)	1,57	N/A

Sumber : DP3AP2KB Kota Banda Aceh, 2022

*) Data 2018 dan 2019 disesuaikan

Berdasarkan Tabel 2.106 di atas dapat dilihat rata-rata jumlah anak di Kota Banda Aceh sejak tahun 2017 sampai 2021 tidak mencapai 2 orang anak per keluarga. Hal ini di satu sisi menunjukkan keberhasilan dalam pembatasan jumlah anak, namun di sisi lain juga perlu digali lebih dalam penyebab mengapa keluarga di Kota Banda Aceh tidak memiliki anak lebih dari 2 orang per keluarga. Hal ini perlu dilakukan agar Kota Banda Aceh dapat memperoleh dampak positif dari bonus demografi dan tetap mempertahankan kesejahteraan masyarakatnya.





2) Ratio Akseptor KB

Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB (laki-laki dan perempuan) dalam periode 1 (satu) tahun per 1000 pasangan usia subur pada tahun yang sama. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Rasio akseptor KB dari Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.107 berikut ini:

Tabel 2. 107 Ratio Akseptor KB Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase PUS/Rasio Akseptor KB	45,43	46,21	45,21	55,76	69,01*

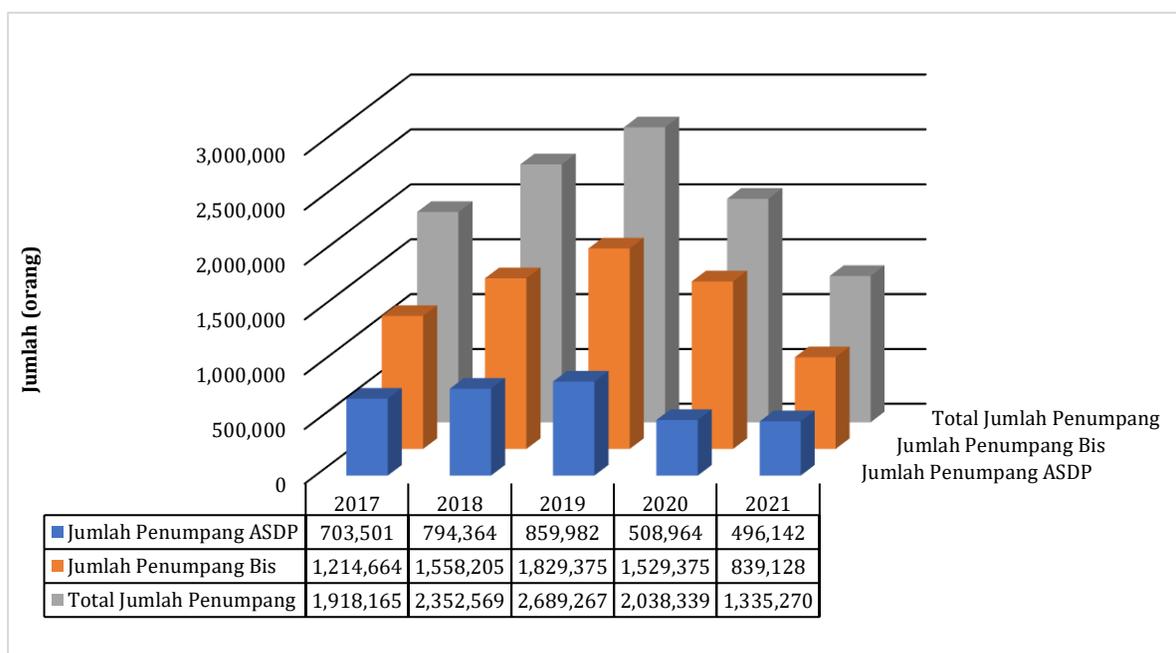
Sumber : DP3AP2KB Kota Banda Aceh, 2022

Berdasarkan Tabel 2.107 di atas menunjukkan data akseptor KB di Kota Banda Aceh mengalami trend yang positif atau meningkat. Kondisi ini menunjukkan peningkatan jumlah Pasangan Usia Subur yang menjadi akseptor KB dimana pada tahun 2017 hanya 45,43 persen menjadi 69,01 persen di tahun 2021. Kenaikan ini disebabkan karena kesadaran masyarakat bahwa penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yang tingkat keberhasilannya lebih tinggi daripada metode kontrasepsi insidental seperti; kondom, pil, dan suntik. Selain itu, banyak kelompok pasangan usia subur yang belum terlayani (*unmet-need*).

H. Perhubungan

1) Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Angkutan umum merujuk kepada pengangkutan orang dan atau barang oleh kendaraan umum baik berupa mobil/bis penumpang ataupun kapal/pesawat. Layanan angkutan ini diperlukan untuk memperlancar aktifitas masyarakat sehingga dapat meningkatkan sektor ekonomi dan non ekonomi. Penggunaan jasa angkutan umum oleh masyarakat di Kota Banda Aceh pada periode tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Gambar 2.64 dibawah ini:



*) Data tahun 2017-2019 disesuaikan

**Data Untuk Tahun 2021 (status data bulan Nopember 2021)

Sumber: Bidang LLAJ Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, 2022

Gambar 2. 64 Jumlah Penumpang Angkutan Umum Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021





Gambar 2.64 di atas menunjukkan jumlah penumpang angkutan umum di Kota Banda Aceh dari tahun ke tahun terus meningkat kecuali tahun 2020 dan 2021 dimana pandemi terjadi. Penambahan jumlah penumpang terjadi pada angkutan bis dan juga ASDP tahun 2017-2019, ketika PPKM diberlakukan untuk mencegah penularan pada tahun 2020-2021 maka tingkat mobilitas penduduk juga berkurang yang terlihat dari berkurangnya jumlah penumpang angkutan umum baik di darat (bis) maupun di air (ASDP).

2) Rasio Izin Trayek

Izin Trayek adalah izin yang diberikan kepada badan atau perorangan untuk menyediakan layanan penumpang umum. Pemberian izin trayek angkutan umum oleh Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Perhubungan dilakukan agar masyarakat mendapatkan angkutan umum yang layak dan aman untuk di naiki.

Rasio izin trayek di Kota Banda Aceh dari Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.108 berikut ini :

Tabel 2. 108 Rasio Izin Trayek Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Izin Trayek perkotaan (jln kendaraan)	198	172	207	210	22
2.	Izin Trayek perdesaan	-	-	-	-	-
3.	Izin Trayek (KPS)	19	12	37	24	22
4.	Jumlah penduduk	259.913*)	265.111	270.321*)	275.800	Belum tersedia
5.	Rasio Izin Trayek	0,08	0,06	0,08	0,08	**

Sumber : Bidang LLAJ Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh

Catatan : *Data Untuk Tahun 2021 (status data bulan Nopember 2021)

** Rasio Izin Trayek belum dapat dihitung karena data penduduk Tahun 2021 belum tersedia

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa terjadi penurunan jumlah izin trayek perkotaan pada tahun 2021 yaitu turun dari 210 kendaraan menjadi 22 kendaraan saja. Hal ini terjadi karena pada tahun ini masa izin trayek yang diberikan telah berakhir dan tidak diperpanjang. Izin trayek dikeluarkan untuk masa 5 tahun, jika sudah habis masa berlaku maka dapat diajukan kembali. Sementara itu, Izin trayek KPS merupakan izin trayek yang masa berlakunya adalah 6 bulan sampai dengan 1 tahun dan melekat pada kendaraan.

3) Jumlah Uji Kir Angkutan Umum

Uji Kir adalah rangkaian pengujian kelayakan bagi kendaraan bermotor. Hal ini dilakukan dengan tujuan menjamin keselamatan pengguna kendaraan bermotor terutama bagi angkutan umum. Peraturan uji KIR tertuang dalam Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) secara khusus menyebutkan pada Pasal 53 ayat 1 yaitu "Uji berkala wajib dilakukan untuk mobil penumpang umum dan mobil barang, bus, mobil berkereta gandengan dan berkereta tempelan yang beroperasi di jalan". Untuk lebih jelasnya jumlah uji Kir angkutan umum di Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Tabel 2.109:





Tabel 2. 109 Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021

No	Angkutan Umum	2017			2018			2019			2020			2021		
		Jmlh	Jmlh KIR	%	Jmlh	Jmlh KIR	%	Jmlh	Jmlh KIR	%	Jmlh	Jmlh KIR	%	Jmlh	Jmlh KIR	%
1	Mobil penumpang umum	103	72	34,95*)	104	57	27,40*)	74	30	20,27*)	74	14	9,46	22	12	27,27
2	Mobil bus	1.295	1.402	54,13*)	1.446	2.074	71,72*)	1.637	2.150	65,67*)	1.817	1.581	43,51	1.513	1.845	60,97
3	Mobil barang	4.881	7.408	75,89*)	5.446	6.748	61,95*)	5.958	7.353	61,71*)	6.348	4.871	38,37	4.835	3.434	35,51
4	Kereta gandengan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Kereta tempelan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	6.279	8.882	70,73	7.053	8.879	63,46	7.669	9.533	62,15	8.267	6.529	39,49	6.430	5.392	41,93

Sumber : Bidang LLAJ Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh

Catatan : *Data Untuk Tahun 2021 (status data bulan Nopember 2021)

** Rasio Izin Trayek belum dapat dihitung karena data penduduk Tahun 2021 belum tersedia

Permasalahan yang muncul disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan uji KIR pada kendaraan bermotor serta banyaknya pemilik kendaraan yang melakukan uji KIR pada daerah lain. Strategi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan melakukan sosialisai kepada masyarakat terhadap pentingnya melakukan uji KIR sesuai waktu yang telah ditetapkan untuk menghindari terjadinya kecelakaan, strategi lainnya adalah melakukan operasi ketertiban angkutan umum/ razia bekerja sama dengan pihak kepolisian.

4) Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Pada Tahun 2017 sampai Tahun 2021 jumlah pelabuhan ASDP berjumlah 1 (satu) unit yaitu berada di Kecamatan Meuraxa bernama Pelabuhan Ulee Lheue. Pelabuhan ini juga sebagai pelabuhan penyeberangan yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran. Jumlah terminal bis adalah 3 (tiga) unit yaitu:

1. Terminal Penumpang Type A (Batoh)
2. Terminal Penumpang Type B (Lueng Bata)
3. Terminal Penumpang Type C (APK Keudah)

Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.110 dibawah ini:

Tabel 2. 110 Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/ Terminal Bis Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah pelabuhan ASDP	1	1	1	1	1
2.	Jumlah pelabuhan udara	-	-	-	-	-
3.	Jumlah terminal bis	3	3	3	3	3
	Jumlah	4	4	4	4	4

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, 2022

5) Angkutan Darat

Jumlah angkutan darat dan penumpang menjadi data penting untuk melihat arus penumpang di Kota Banda Aceh. Jumlah angkutan darat dan penumpang di Kota Banda Aceh dari Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.111 berikut ini:

Tabel 2. 111 Persentase Angkutan Darat Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Angkutan darat	944	944	965	1.058	1.535
2	Jumlah penumpang Angkutan Darat	1.214.664	1.133.403*)	1.453.613*)	1.529.375	839.128
3	Persentase (%)	0,08	0,16	0,11	0,12	0,18

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, 2022

*) Data tahun 2018-2019 disesuaikan





Berdasarkan Tabel 2.111 di atas menunjukkan persentase angkutan darat dengan jumlah penumpang dari Tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021 persentase angkutan darat mengalami kenaikan sebesar 0,18% dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah angkutan darat dan jumlah penumpang darat pada tahun 2021 masing-masing sebesar 1.535 dan 839.128.

6) Kepemilikan KIR Angkutan Umum

Kir merupakan prasyarat yang penting dalam penyediaan armada angkutan umum. Persentase kepemilikan Kir angkutan umum dihitung berdasarkan jumlah angkutan umum yang memiliki Kir dibagi dengan jumlah angkutan umum dikali 100 persen. Persentase angkutan umum yang melakukan uji Kir di Kota Banda Aceh dari Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.112 berikut ini:

Tabel 2. 112 Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021*
1	Jumlah angkutan umum yg memiliki KIR	4.441	4.440	4.767	4.252	5.392
2	Jumlah angkutan umum	6.279	7.053	7.669	6.743	6.430
Persentase (%)		70,73	62,95	62,16	63,06	83,86

Sumber : Bidang LLAJ dan UPTD PKB Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh

Catatan : *Data Untuk Tahun 2021 (status data bulan Nopember 2021)

Berdasarkan Tabel 2.112 di atas, Persentase kepemilikan KIR angkutan umum mengalami fluktuasi dari tahun 2017-2021. Pada tahun 2017 jumlah angkutan umum yang memiliki KIR sebesar 4.441, menurun pada tahun 2020 sebesar 4.252. jumlah angkutan umum yang memiliki KIR kembali meningkat pada tahun 2021 sebesar 5.392.

Setiap angkutan umum wajib melakukan uji KIR sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun, namun tidak semua angkutan umum di Kota Banda Aceh yang melakukan uji KIR sebanyak 2 (dua) kali, hal ini disebabkan oleh:

1. Angkutan Kota sebagian besar sudah tidak beroperasi lagi
2. Kendaraan dalam keadaan rusak/tidak jalan lagi
3. Kendaraan melakukan numpang uji pada daerah lain
4. Kendaraan yang telah di mutasi tidak mencabut berkas uji
5. Kendaraan yang beroperasi dijalan tidak melakukan pengujian tepat waktu dan perpanjangan uji bagi yang telah mati KIR nya.

Beberapa solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan diatas adalah:

1. Melakukan Pengawasan/razia terhadap kendaraan wajib uji
2. Menyurati kepada setiap perusahaan angkutan umum untuk melakukan pengujian kendaraan tepat waktu dan perpanjangan uji bagi yang telah mati KIR nya.
3. Mensosialisasikan persyaratan mutasi dan numpang uji.

7) Rambu-rambu

Rambu-rambu lalu lintas berguna untuk mengatur arus lalu lintas sekaligus meningkatkan kenyamanan dan keselamatan berkendara. Ketersediaan rambu-rambu menjadi hal yang penting bagi warga kota dan penghuninya. Ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan dihitung berdasarkan jumlah fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka) yang sudah ada dibagi dengan jumlah kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka) dikali dengan 100 persen. Tabel 2.113 berikut ini memperlihatkan persentase ketersediaan rambu-rambu di Kota Banda Aceh dari Tahun 2017-2021:





Tabel 2. 113 Persentase Pemasangan Rambu Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah pemasangan Rambu	2.104 Unit	2.237 Unit	2.305 Unit	2.325 Unit	2.424 Unit
2.	Jumlah Rambu yang seharusnya tersedia	2.250 Unit	2.360 Unit	2.360 Unit	2.360 Unit	2.360 Unit
Persentase (%)		93	94	97	98	103

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, 2022

Dari Tabel 2.113 di atas dapat dilihat bahwa fasilitas perlengkapan jalan terus bertambah dari tahun ke tahun, dimana sampai Tahun 2021 telah mencapai 103 persen, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Dalam mempertahankan kondisi ini maka diperlukan perawatan/pemeliharaan, peremajaan dan pergantian fasilitas perlengkapan jalan secara berkala dan berkesinambungan.

I. Komunikasi dan Informatika

Dalam melaksanakan program dan kegiatan di sektor komunikasi, informatika dan statistik Kota Banda Aceh, Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik merujuk pada indikator yang ingin dicapai yaitu pemeringkatan pemerintahan berbasis elektronik. Nilai pemerintahan berbasis elektronik, atau sebelumnya lebih dikenal dengan pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI), merupakan alat ukur yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat guna memetakan perkembangan e-government di seluruh Indonesia. Indikator tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan juga Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Nilai capaian indikator tersebut sejak Tahun 2017 sampai 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.114 di bawah ini:

Tabel 2. 114 Nilai Pemeringkatan Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Nilai pemeringkatan pemerintahan berbasis elektronik	2,60 (baik)	2,42 (Cukup)	2,24 (Cukup)	2,87 (Baik)	Hasil Penilaian Belum Tersedia (Penilaian Dilakukan oleh kemenpan-RB)

Sumber : Diskominfotik Kota Banda Aceh, 2022

Berdasarkan Tabel 2.114 di atas dapat dilihat bahwa dari skala 1 sampai dengan 4 (versi PeGI) dan 1-5 (Versi SPBE), terjadi peningkatan pemeringkatan pemerintahan berbasis elektronik sebesar 2,87 tahun 2020. Nilai tersebut menunjukkan terjadi peningkatan dari kategori cukup menjadi kategori baik. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan diberbagai sektor dengan memanfaatkan strategi yang lebih komprehensif dan matang dalam upaya peningkatan nilai pemeringkatan sistem pemerintah berbasis elektronik tersebut. Pada tahun 2021 nilai pemeringkatan pemerintahan berbasis elektronik hasilnya belum tersedia.

Selain program dan kegiatan yang menyangkut pelaksanaan e-government, Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Kota Banda Aceh juga melaksanakan program dan kegiatan untuk penyebaran/desiminasi informasi kepemerintahan kepada masyarakat melalui situs daring (*website*) organisasi perangkat daerah (OPD). Persentase website OPD yang aktif di Kota Banda Aceh Tahun 2017 hingga 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.115 di bawah ini:





Tabel 2. 115 Presentase website OPD yang aktif Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Presentase website OPD yang aktif (%)	80	93	93	98	91

Sumber : Diskominfotik Kota Banda Aceh, 2022

Berdasarkan Tabel 2.115 di atas presentase OPD yang situsnya (*website-nya*) aktif dari tahun ke tahun menunjukkan adanya fluktuasi dari tahun 2017-2021, dengan peningkatan tertinggi terjadi pada Tahun 2020 sebesar 98 persen.

Pemerintah Kota Banda Aceh terus berupaya agar semua OPD memiliki situs/website dan mengaktifkan situs/*website* OPD tersebut sesuai amanah Undang-undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Melalui situs/website informasi publik kepada masyarakat dapat disampaikan melalui situs/*website*. Melalui situs/website OPD yang aktif dapat dinilai keseriusan pemerintah Kota Banda Aceh dalam melakukan *city branding* kepada masyarakat luas, bukan hanya level kota, namun juga pastinya akan menyentuh level provinsi, nasional bahkan dunia internasional. OPD juga mulai melirik pemanfaatan *media social* yang memiliki segmentasi pembaca/pengikut (*followers*) yang menasar kaum muda secara luas.

Selain melakukan desiminasi informasi pemerintahan secara daring (online), Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik juga melaksanakan desiminasi dan pemberdayaan komponen masyarakat melalui kelompok informasi masyarakat gampong atau yang lebih dikenal dengan KIG. Pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Gampong (KIG) ditargetkan di dalam SPM yaitu sebesar 50%, dihitung berdasarkan Jumlah KIG dibagi dengan Jumlah kecamatan yang ada pada kabupaten/ kota dikali 100%. Cakupan pelaksanaan KIG di Kota Banda Aceh dapat dilihat melalui Tabel 2.116 dibawah ini:

Tabel 2. 116 Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat Tingkat Kecamatan Kota Banda Aceh, 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan (%)	100	100	100	100	100

Sumber : Diskominfotik Kota Banda Aceh, 2022

Tabel 2.116 di atas menunjukkan bahwa realisasi cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat gampong di tingkat kecamatan hingga dari tahun 2017-2021 mencapai 100 persen berada diatas nilai SPM yang telah ditetapkan. Selain itu penerapan kebijakan yang disampaikan dalam KIG perlu didukung oleh semua *stakeholder*. Kebutuhan pengembangan website-website gampong dan tenaga IT di gampong sudah selayaknya di dukung oleh pemerintah Kota Banda Aceh. Saran dari permasalahan yang timbul yaitu harus adanya alokasi dana untuk kebijakan yang disampaikan dalam KIG salah satunya seperti perlu adanya web site gampong dimana butuh dana untuk sarana dan prasarana pendukung web tersebut.





J. Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

1) Persentase Koperasi Aktif

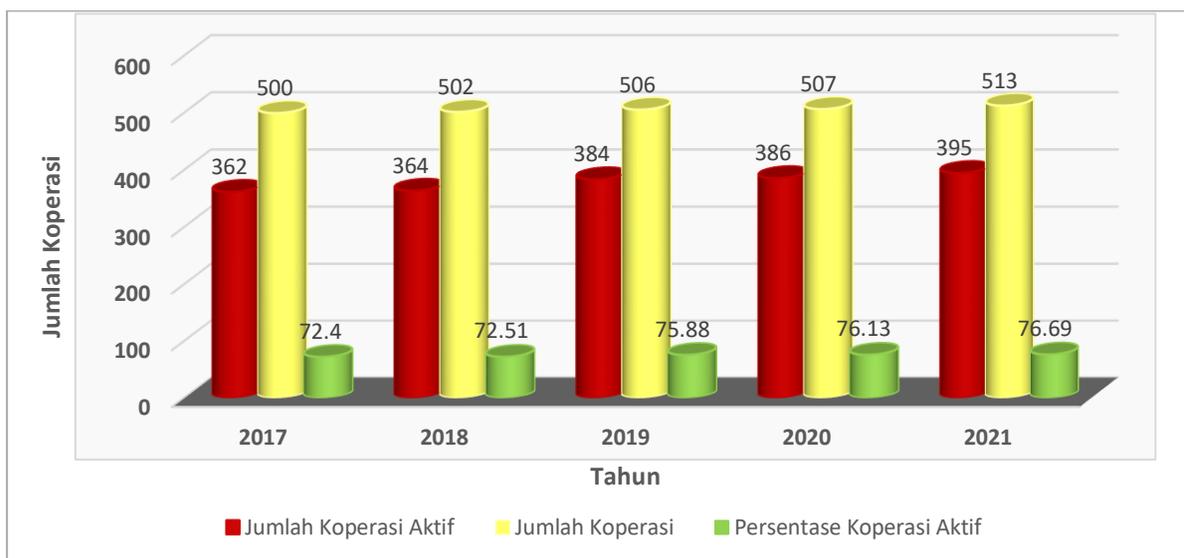
Bapak Koperasi Indonesia, Mohammad Hatta, menyatakan bahwa koperasi adalah soko guru perekonomian Indonesia. Peran ini diberikan karena koperasi merupakan bentuk usaha yang mencerminkan sikap khas bangsa Indonesia yang saling tolong menolong dan selalu begotong royong. Oleh karena itu berbagai upaya dilakukan untuk memfasilitasi masyarakat dalam menggiatkan koperasi. Kota Banda Aceh turut mendorong tumbuhnya dan aktifnya koperasi dalam pemberdayaan ekonomi anggota koperasi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Perkembangan koperasi aktif di Kota Banda Aceh selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.117 di bawah ini:

Tabel 2. 117 Persentase Koperasi Aktif Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Koperasi Aktif	362	364	384	386	395
2	Jumlah Koperasi	500	502	506	507	513
3	Persentase Koperasi Aktif	72,4	72,51	75,88	76,13	76,69

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh, 2022

Perkembangan koperasi aktif di Kota Banda Aceh selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar 2.65 di bawah ini:



Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh, 2022

Gambar 2. 65 Persentase Koperasi Aktif Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021

Tabel 2.117 dan Gambar 2.65 menunjukkan persentase koperasi aktif di kota Banda Aceh mengalami peningkatan tiap tahunnya dengan rata-rata persentase koperasi aktif per tahun 74,72 persen dari total koperasi yang dibentuk. Peningkatan jumlah koperasi aktif dari awal periode yaitu tahun 2017 adalah 72,4 persen bertambah menjadi 76,69 persen pada akhir periode tahun 2021. Perkembangan koperasi selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan dari 500 jumlah koperasi aktif menjadi 513 koperasi.

2) Jumlah BPR/ LKM

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sebagai sebuah lembaga keuangan telah mampu mengangkat pertumbuhan ekonomi kota Banda Aceh bagi para pelaku ekonomi lemah, dimana pembiayaan atau kredit yang diberikan kepada masyarakat tanpa peraturan yang ketat. Namun demikian, BPR dan LKM menghadapi permasalahan berupa permodalan keuangan mikro sangat terbatas sementara masih banyak UMKM (usaha mikro kecil menengah) yang





mebutuhkan modal dari LKM. Perkembangan jumlah BPR/ LKM dari Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.118 di bawah ini:

Tabel 2. 118 Perkembangan jumlah BPR/ LKM Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021 (November)
1	Jumlah seluruh UMKM	9.591	10.944	12.012	15.107	16.970
2	Jumlah BPR/LKM	4	4	4	4	4

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh, 2022

Berdasarkan Tabel 2.118 di atas dapat dilihat jumlah UMKM di Kota Banda Aceh mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sedangkan jumlah BPR/LKM tidak mengalami peningkatan sejak Tahun 2017 hingga 2021, konstan pada angka 4. Untuk meningkatkan jumlah BPR/LKM perlu dilakukan upaya-upaya yang dapat mengembangkan BPR/LKM sehingga lebih banyak BPR/LKM yang dapat membantu peningkatan UMKM.

3) Jumlah Pasar yang Sudah Berfungsi Secara Optimal

Pasar-pasar di Kota Banda Aceh masih berfungsi dengan sangat baik. Namun, perkembangan zaman dan pembangunan ekonomi menuntut perubahan terutama dari sisi tata ruang dan keindahan kota. Dengan sebab itu maka beberapa lokasi pasar perlu dipindahkan atau diremajakan sehingga menimbulkan beberapa pasar yang tertunda untuk berfungsi dengan baik. Berikut kondisi pasar di Kota Banda Aceh yang sudah berfungsi dengan baik dan belum. Untuk lebih jelasnya, kondisi pasar di Kota Banda Aceh dari Tahun 2017 sampai Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.119 di bawah ini:

Tabel 2. 119 Kondisi Pasar Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021

No	Nama Pasar	Pasar yang sudah berfungsi optimal					Pasar yang belum berfungsi				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pasar Aceh	V	V	V	V	V	-	-	-	-	-
2	Pasar Gp. Baru	V	V	V	V	V	-	-	-	-	-
3	Pasar Seutui	V	V	V	V	V	-	-	-	-	-
4	Pasar Peuniti	V	V	V	V	V	-	-	-	-	-
5	Pasar Kartini	V	V	V	V	-	-	-	-	-	V
6	Pasar Ikan	V	V	V	V	-	-	-	-	-	V
7	Pasar Daging	V	V	V	V	-	-	-	-	-	V
8	Pasar Bumbu	V	V	V	V	-	-	-	-	-	V
9	Pasar Unggas	V	V	V	V	-	-	-	-	-	V
10	Pasar Nasabe	V	V	V	V	-	-	-	-	-	V
11	Pasar Rex	V	V	V	V	-	-	-	-	-	V
12	Pasar Ulee Kareng	-	-	-	-	-	V	V	V	V	V
13	Pasar Newtown	-	V	-	-	-	V	-	V	V	V
14	Pasar Pusat Kuliner dan Souvenir	-	V	-	-	-	V	-	V	V	V
15	Pasar Kuliner Ulee Lheue	V	V	-	-	-	-	-	V	V	V
16	Pasar Al-Mahirah Lamdingin	-	-	-	V	V	V	V	V	-	-
17	Pasar Rakyat - Batoh	-	-	V	V	-					
18	Pasar Rakyat Ulee Lheu										
Total		12	14	12	14	5	4	2	5	4	11

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh, 2022





Berdasarkan Tabel 2.119 di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2021 ada 11 pasar yang belum berfungsi secara optimal yaitu Pasar Kartini, Pasar Ikan, Pasar Daging, Pasar bumbu, pasar unggas, Pasar Nasabe, Pasar Rex, Pasar Ulee Kareng, Pasar Newtown, Pasar Pusat Kuliner dan Souvenir, dan Pasar Kuliner Ulee Lhee. Pasar Kuliner Ulee Lhee yang dibangun dengan sumber dana APBN, pada Tahun 2018 sudah difungsikan sebagai wisata kuliner. Tetapi pada Tahun 2019-2021 kondisi sudah kosong (tidak berfungsi).

Pasar Newton yang dibangun dengan dana bantuan dari Dana Otsus dan hibah Pertamina, terdiri dari 2 bangunan gedung. Pada Tahun 2018 Gedung A difungsikan sebagai tempat wisata kuliner dan gedung B khusus lantai 2 sudah dimanfaatkan menjadi kantor PDAM Kota Banda Aceh. Sedangkan Tahun 2019-2021 gedung ini sudah kosong. Pasar pusat kuliner dan souvenir di Pango yang dibangun atas bantuan dana Otsus pada Tahun 2018 sudah dimanfaatkan menjadi wisata kuliner dan souvenir, sedangkan pada Tahun 2019-2021 pasar ini sudah kosong.

K. Penanaman Modal

1) Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/ PMA)

Sesuai dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 27 Tahun 2018 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Banda Aceh, RUPM menjadi acuan perencanaan semua sektor yang dapat dijadikan sebagai perencanaan kegiatan penanaman modal oleh pihak swasta. Ada enam potensi/peleuang yang bisa dikembangkan di Kota Banda Aceh, yaitu 1). perdagangan, jasa dan koperasi; 2). industri; 3). Infrastruktur; 4). pariwisata; 5). energy dan 6). perikanan dan kelautan.

Sejak diberlakukannya Sistem Online Single Submission (OSS) pada Tahun 2018 terjadi peningkatan jumlah investor yang berinvestasi di Kota Banda Aceh. Jumlah investor yang berinvestasi di Kota Banda Aceh Tahun 2017 hingga Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.120 di bawah ini:

Tabel 2. 120 Jumlah Investor yang Berinvestasi Tahun 2017-2021

Tahun	PMDN	PMA
2017	22	0*
2018	72*	10*
2019	74*	13*
2020	798	8
2021	804	15

Sumber : DPMPTSP Kota Banda Aceh, 2022

*) Data tahun 2016-2019 disesuaikan

Tabel 2.120 di atas menunjukkan jumlah investor yang berinvestasi di Kota Banda Aceh baik yang berasal dari PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) maupun yang berasal dari PMA (Penanaman Modal Asing) menunjukkan tren meningkat. Pada investasi yang berasal dari PMDN, terjadi peningkatan yang signifikan pada tahun 2021 sebesar 804 investor. Jumlah investor yang berasal dari PMA juga meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 15 investor.

2) Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Investasi adalah indikator penting dalam pertumbuhan ekonomi. Investasi merupakan variable yang dapat merefleksikan besarnya aktifitas ekonomi saat ini dan di masa hadapan. Berbagai upaya dilakukan untuk menciptakan yang kondusif bagi





investor untuk melakukan investasi, apalagi untuk wilayah Aceh yang pernah mengalami masa konflik dan bencana alam besar. Kota Banda Aceh yang juga merupakan ibu kota provinsi Aceh menjadi wajah keamanan investasi bagi Aceh secara keseluruhan, keberhasilan investasi di Kota Banda Aceh akan mencerminkan keamanan dan profitabilitas yang tinggi bagi para investor. Tabel 2.121 berikut menyajikan nilai realisasi investasi PMDN dan PMA di Kota Banda Aceh selama lima tahun sejak Tahun 2017:

Tabel 2. 121 Nilai Realisasi PMDN dan PMA Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021

Tahun	PMDN (Rp)	PMA (Rp)	Jumlah PMDN dan PMA (Rp)	Jumlah Investor
2017	118.166.350.000	-	118.166.350.000	22
2018	62.474.407.981	186.176.268.012	248.650.675.993	82
2019	185.577.364.240	380.740.108.449	566.317.472.689	87
2020	257.206.290.684	2.000.000.000	259.206.290.684	806
2021	227.945.665.191	156.381.146.842	384.326.812.033	1081

Sumber : DPMPTSP Kota Banda Aceh, 2022

Pelayanan Perizinan yang selama ini dilakukan secara *offline* saat ini berubah menjadi online, dimana investor/pelaku usaha dapat mendaftarkan izinnya secara mandiri melalui kemudahan teknologi informasi yang diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau yang lebih dikenal dengan *Online Single Submission* (OSS) merupakan terobosan dalam mempercepat proses perizinan kepada investor/pelaku usaha.

DPMPTSP Kota Banda Aceh sejak 1 Agustus 2019 telah menjalankan OSS dalam proses perizinan. Namun masih banyak kendala yang dihadapi oleh investor/pelaku usaha dalam mendaftarkan tempat usahanya dan menginput data usahanya melalui Sistem OSS maupun kendala dalam penginputan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) pada LKPM Online. Hal ini disebabkan masih kurangnya sosialisasi dan pelatihan yang diberikan bagi para investor/pelaku usaha, khususnya dalam Wilayah Kota Banda Aceh. Pergantian sistem pelaporan ini mempengaruhi pencatatan investasi di Kota Banda Aceh khususnya bagi Penanaman Modal Dalam Negeri sehingga terlihat pada tahun 2018 terjadi penurunan jumlah investasi PMDN yang dilaporkan. Namun, setelah masa transisi ini berlalu dapat dilihat bahwa jumlah investasi terutama PMDN menjadi lebih tercatat dengan baik. Untuk Penanaman Modal Asing tidak melalui sistem Kota Banda Aceh tetapi tercatat pada sistem di badan penanaman modal pusat.

Pencatatan terhadap nilai investasi ini adalah pencatatan atas nilai asset tetap, dimana nilai asset tetap berarti pembentukan modal tetap bruto (*gross fixed capital formation*) yang terjadi di Kota Banda Aceh. Dengan demikian mempunyai dampak yang berjangka menengah dan panjang untuk pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu diharapkan akan selalu bertambah dan bergerak aktif dalam mendorong investasi terpengaruh (*induced investment*) lainnya.

L. **Kepemudaan dan Olahraga**

1) **Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif**

Organisasi Kepemudaan (OKP) adalah lembaga yang menghimpun segenap potensi anak muda baik mahasiswa maupun anak sekolah yang masuk kategori pemuda bahkan mereka yang tidak menjadi anak terdidik. Organisasi kepemudaan ini berdiri bersama dengan visi dan struktur kepemimpinan, budaya dan model





aktualisasi ide dan gagasannya. Tabel 2.122 berikut menggambarkan jumlah OKP yang aktif di Kota Banda Aceh dalam kurun waktu 2017-2021:

Tabel 2. 122 Jumlah Organisasi Pemuda di Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021

No	Tahun	Jumlah Organisasi Pemuda
1	2017	69
2	2018	68
3	2019	53*)
4	2020	53*)
5	2021	54

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh, 2022

*) Data 2018 dan 2019 disesuaikan

Dari Tabel 2.122 tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 terdapat 69 OKP di Kota Banda Aceh yang terdaftar di Dispora Banda Aceh. Jumlah tersebut mengalami penurunan pada tahun 2018 berjumlah 68 OKP. Pada tahun 2021, OKP di Kota Banda Aceh berjumlah 54 OKP.

2) Pembinaan Atlet dan Pelatih

Olah raga sebagai sarana untuk mencapai prestasi tentu harus direncanakan dan dibina dengan baik. Pembinaan olahraga adalah sistem pembibitan yang melibatkan individu atlet dalam pembangun keprofesionalan diri melalui sistem yang telah ditetapkan dengan tujuan prestasi. Pada tahun 2021 Kota Banda Aceh sudah memiliki 11 cabang olah raga yang dibina secara khusus dengan para pelatih yang berlisensi. Berikut data cabang olah raga dan atlit yang dibina Kota Banda Aceh tahun 2021.

Tabel 2. 123 Data Cabang Olahraga dan Atlit Binaan Dispora Kota Banda Aceh Tahun 2021

No	Cabang olahraga	Jumlah atlit	Jumlah pelatih		
			Memiliki lisensi	Belum memiliki lisensi	Total
1	Atletik	12	4	1	5
2	Sepak bola	18	4	1	5
3	Bola voly	24	4	2	6
4	Bola basket	24	4	2	6
5	Pencak silat	14	4	1	5
6	Bulu tangkis	7	2	1	3
7	Tenis lapangan	8	3	-	3
8	Tenis meja	8	3	-	3
9	Karate	12	3	2	5
10	Taekwondo	12	3	2	5
11	Panahan	8	2	3	5
Total		147	36	15	51

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh, 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa saat ini atlit binaan di Kota Banda Aceh ada 147 atlit dengan 51 pelatih. Atlit terbanyak adalah dari cabang olah raga Basket dan Voly sebanyak 24 orang masing-masing cabang olah raga dan yang paling sedikit adalah bulu tangkis hanya sebanyak 7 orang atlit.

3) Organisasi Kepemudaan dan Pembinaan Pemuda

Organisasi Kepemudaan (OKP) adalah lembaga yang menghimpun segenap potensi anak muda baik mahasiswa maupun anak sekolah yang masuk kategori pemuda. Organisasi kepemudaan ini berdiri bersama dengan visi dan struktur kepemimpinan, budaya dan model untuk mengaktualisasikan ide dan gagasannya.



Berdasarkan data dari Dinas Pemuda dan Olahraga pada Tahun 2021 terdapat 54 OKP di Kota Banda Aceh.

2.1.3.4 Fokus Layanan Urusan Pilihan

A. Pariwisata

1) Kunjungan Wisata

Kota Banda Aceh memiliki posisi yang sangat strategis untuk pengembangan kepariwisataan karena sebagai ibukota, Pemerintah Provinsi Aceh sangat giat mempromosikan kepariwisataan Kota Banda Aceh dan merupakan tempat penyelenggaraan event pariwisata baik tingkat daerah maupun tingkat nasional. Gambar 2.66 di bawah ini menunjukkan rangkuman data statistik kepariwisataan pada Tahun 2021:



Sumber : Kota Banda Aceh dalam Angka, 2022

Gambar 2. 66 Rangkuman Data Statistik Kepariwisataan Kota Banda Aceh Tahun 2021

Berdasarkan data pada Gambar 2.66 di atas dapat dilihat bahwa terdapat delapan jumlah wisatawan baik wisatawan nusantara maupun mancanegara sudah mulai membaik pasca terjadinya pandemi *Covid-19*. Salah satu destinasi wisata yang banyak dikunjungi yaitu Museum tsunami. Pada tahun 2021 pengunjung museum tsunami juga semakin meningkat dimana pengunjung domestik berjumlah 98.518 orang dan pengunjung asing berjumlah 34 orang.

Kunjungan wisatawan mancanegara ke Kota Banda Aceh didominasi oleh wisatawan dari negara tetangga Malaysia di urutan pertama, disusul RRC, Jerman, Australia, Perancis, dan negara lainnya. Tingginya minat wisatawan Malaysia berkunjung di Kota Banda Aceh disebabkan antara lain karena persamaan budaya antara Malaysia dan Aceh, faktor keamanan yang sudah lebih baik, banyaknya situs sejarah, tersedianya destinasi yang bernuansa islami dan kuliner yang halal. Gambar 2.67 berikut menunjukkan jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara ke Kota Banda Aceh dari Tahun 2017 hingga Tahun 2021:





Sumber : Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, 2021

Gambar 2. 67 Jumlah Wisatawan Nusantara dan Mancanegara Kota Banda Aceh Tahun 2017-2020

Berdasarkan Gambar 2.67 diatas jumlah kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara menunjukkan tren peningkatan hingga tahun 2019. Pencapaian ini menunjukkan kota Banda Aceh sudah menjadi salah satu kota kunjungan wisatawan yang diminati. Pencapaian ini terwujud karena adanya berbagai event-event promosi wisata yang diselenggarakan sepanjang tahun maupun diselenggarakan oleh stakeholder lainnya di Banda Aceh. Promosi wisata yang berkesinambungan dan pembenahan destinasi wisata akan lebih mendorong tumbuh dan berkembangnya sektor ekonomi kreatif. Meningkatnya kunjungan wisatawan telah dapat menambah investasi disektor pariwisata, seperti pembangunan Transmart Studio, Hotel Kyriad 2, Mes Sabang menjadi Hotel Sabang, BSSD Keudah, dan Hotel Trans Kita.

Pada tahun 2020, jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara mengalami penurunan yang signifikan masing-masing sebesar 140.557 orang dan 3.244 orang. Penurunan wisatawan tersebut disebabkan adanya pandemi *Covid-19*. Pariwisata merupakan sektor yang paling terdampak pandemi *Covid-19*. Hal ini terlihat dari jumlah kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara mengalami penurunan drastis. Meskipun kondisi pandemi *Covid-19* belum reda di Kota Banda Aceh, namun kunjungan wisatawan nusantara tercatat meningkat pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020. Masih rendahnya wisatawan mancanegara disebabkan Aceh belum membuka penerbangan Internasional.

2) Bidang Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif

Geliat pariwisata di Kota Banda Aceh mulai tumbuh dan berkembang dan hingga saat ini telah menjadi salah satu destinasi wisata yang sangat diminati oleh wisatawan domestik maupun mancanegara, Sebagai salah satu kota yang tergabung dalam Jaringan Kota Pusaka Indonesia, Kota Banda Aceh memiliki beberapa landmark wisata seperti, Mesjid Raya Baiturrahman, Museum tsunami, lokasi pemakaman massal korban tsunami, PLTD apung, boat diatas rumah, pantai cermin Ulee Lheue, Pintoe Khop, dan lokasi lainnya yang menjadi daya tarik bagi wisatawan.

Berkembangnya teknologi informasi dewasa ini yang lebih dikenal dengan media sosial menjadi bagian yang sangat penting dalam hal mempromosikan pariwisata Kota Banda Aceh. Dengan maraknya medsos ini ada banyak hal yang bisa





dilakukan dengan cara yang kreatif, cepat dan tepat, yang mana pemanfaatan teknologi informasi yang sudah canggih sangat membantu penyebaran promosi pariwisata oleh para generasi muda seperti artikel-artikel atau blog tulisan tentang indahnya kota yang lengkap disertai dengan photo-photo dengan tujuan untuk menarik wisatawan.

Dengan semakin meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Banda Aceh, maka pemerintah kota terus memaksimalkan dan meningkatkan infrastruktur dan pelayanan kepariwisataan melalui segala aspek. Kerja sama lintas sektoral telah dilakukan oleh Dinas Pariwisata dengan stakeholder lainnya untuk melakukan sinergisitas kegiatan pembangunan yang dapat mendukung perkembangan kepariwisataan di Kota Banda Aceh. Dinas Pariwisata juga melakukan kerjasama dengan masyarakat untuk mengembangkan ekonomi kreatif dan pengembangan pariwisata. Pengembangan ekonomi kreatif ini akan mendukung berkembangnya UMKM, pegiat seni, pelaku usaha kecil, pengusaha kuliner, sanggar dan komunitas, perfileman dan musik, percetakan, dan pengrajin tradisional. Tabel 2.124 dibawah ini menunjukkan jenis dan jumlah unit usaha ekonomi kreatif di Banda Aceh Tahun 2019.

Tabel 2. 124 Jenis dan Jumlah Unit Usaha Ekonomi Kreatif Kota Banda Aceh Tahun 2019

Jenis Ekonomi Kreatif	Jumlah Unit Usaha
Kuliner	12
Kriya	15
Fashion	10
Seni Pertunjukan	36
Seni Rupa	10
Musik	12
Televisi dan Radio	3
Aplikasi dan Game	4
Periklanan	4
Penerbitan	11
Desain Produk	3
Film, Animasi dan Video	5
Photografi	3
Arsitektur	1
Total Unit Usaha	129

Sumber: Katalog Ekonomi Kreatif Banda Aceh 2020

Catatan: Tahun 2020 tidak dilakukan pendataan Jenis dan Jumlah Unit Usaha Ekonomi Kreatif Kota Banda Aceh

Berdasarkan Tabel 2.124 di atas pada Tahun 2019 terdapat 14 jenis ekonomi kreatif yang berkembang di Kota Banda Aceh dengan jumlah unit usaha berjumlah 129. Seni pertunjukan, kriya, kuliner dan musik menempati jumlah unit usaha terbesar, masing-masing 36, 15 dan 12 unit usaha, sedangkan jumlah unit usaha terkecil adalah arsitektur, fotografi, desain produk dan televisi dan radio. Pada tahun 2020 dan 2021 tidak dilaksanakan kegiatan pendataan jenis dan jumlah usaha ekonomi kreatif disebabkan pandemi Covid-19.





B. Peternakan

Kawasan peternakan di Kota Banda Aceh lebih luas terutama di Kecamatan Ulee Kareng, Kecamatan Lueng Bata dan Kecamatan Syiah Kuala. Pengembangan peternakan di Kota Banda Aceh sangat tergantung pada lahan yang tersedia, sedangkan lahan peternak di Kota Banda Aceh semakin menurun karena telah terjadi konversi lahan atau telah diperuntukkan untuk pembangunan lain. Populasi ternak di Kota Banda Aceh dari Tahun 2017 hingga Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.125 di bawah ini:

Tabel 2. 125 Populasi Ternak Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021

No.	Tahun	Jenis Ternak		
		Sapi/ Kerbau	Kambing/ Domba	Unggas
1.	2017	-	94,49	825,74
2.	2018	408,81	86,63	1.587,54
3.	2019	927,14	52,24	1.652.56
4.	2020	501,86	61,21	1.711,52
5.	2021	282,65	23,40	1.819,04

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, 2022

➤ Permasalahan

Kita ketahui bahwa Kota Banda Aceh bukan kawasan produsen ternak, lahan-lahan di Kota Banda Aceh sudah berubah fungsi sehingga lahan semakin lama semakin berkurang dan apabila populasi ternak di Kota Banda Aceh semakin meningkat maka akan terjadi pencemaran lingkungan dan juga konflik sosial.

➤ Tingginya harga daging

Masalah tingginya harga daging bukan terjadi di Kota Banda Aceh saja akan tetapi telah meluas bahkan seluruh Indonesia. Salah satu tingginya harga daging karena permintaan sangat meningkat apalagi di Kota Banda Aceh pada hari-hari besar keagamaan. Lebih lanjut pemerintah saat ini sedang gencar-gencarnya untuk membangun destinasi makanan halal untuk menjamin ketenangan masyarakat Kota Banda Aceh. Dan kendala yang dihadapi saat ini belum tersedianya RPH dan RPU yang representatif di Kota Banda Aceh yang menyebabkan meningkatnya pencemaran lingkungan. Dalam hal ini pemerintah perlu membangun Rumah Potong Hewan (RPH) dan Rumah Potong Unggas (RPU) yang presentatif sesuai ketentuan Nomor Kontrol Veteriner (NKV) di Kota Banda Aceh menuju destinasi makanan yang ASUH.

Sedangkan terkait jumlah produksi daging di Kota Banda Aceh, dalam kurun waktu 2017-2021, terlihat beberapa perubahan, seperti ditunjukkan Tabel 2.126 di bawah ini.

Tabel 2. 126 Jumlah Produksi Daging Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021

No	Produksi Daging (Kg)	2017	2018	2019	2020	2021
1	Sapi/ Kerbau	801.000	661.600	668.779	1.021.000	2.278*
2	Kambing/ Domba	92.898	102.096	53.216	59.100	1.377*
3	Unggas	825.742	1.561.856	1.639.529	1.572.000	716.842*

Sumber : DP2KP Kota Banda Aceh, 2022

*Data per Oktober 2021





Dari Tabel 2.126 di atas bisa dilihat bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir 2017-2021 terjadi fluktuasi produksi daging untuk ketiga jenis ternak dengan produksi terbesar berasal dari unggas dan produksi daging sapi/kerbau dan terendah berasal dari kambing/domba. Untuk kambing/domba, produksi dagingnya paling fluktuatif dibanding ternak lainnya. Sedangkan untuk unggas, selama Tahun 2017 sampai Tahun 2020 terus mengalami peningkatan produksi, sedangkan pada tahun 2021 jumlah produksi daging di Kota Banda Aceh mengalami penurunan. Secara umum, jumlah produksi daging dari ketiga jenis golongan hewan tersebut meningkat setiap tahunnya.

C. Perindustrian

1) Jumlah IKM yang Mendapatkan Bantuan Perbankan

Jumlah unit usaha di Kota Banda Aceh terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa Industri Kecil Menengah (IKM) di Kota Banda Aceh telah berkembang dengan sangat baik. Selain itu kemampuan industri dalam menyerap tenaga kerja yang semakin meningkat setiap tahunnya. Sebagai pusat kota jasa di Provinsi Aceh yang tidak mempunyai lahan pertanian dan perkebunan, Kota Banda Aceh lebih berfokus kepada industri yang mengandalkan ide-ide kreatif dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama. Perkembangan IKM dari tahun 2017 hingga 2021 di Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Tabel 2.125 di bawah ini:

Tabel 2. 127 Perkembangan Industri Kecil dan Menengah Tahun 2017-2021

No	Sektor	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Sektor Pangan	681	701	835	849	867
2	Sektor Sandang	550	565	689	694	699
3	Sektor Kimia	541	549	329	329	330
4	Sektor Logam	392	396	213	228	228
5	Sektor Kerajinan Umum	240	246	248	248	250
6	Sektor Jasa Lainnya	0	0	246	246	246
	Jumlah	2.404	2.457	2.560	2.594	2.620

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh, 2022

Dari Tabel 2.127 di atas terlihat bahwa industri Kecil dan Menengah di Kota Banda Aceh didominasi oleh sektor pangan pada peringkat pertama kemudian diikuti oleh sektor sandang dan kimia. Pada tahun 2021, jumlah IKM sektor pangan sebesar 867 IKM, sektor sandang sebanyak 699 dan sektor kimia sebesar 330. Ketiga sektor ini merupakan lahan utama perkembangan industri di Kota Banda Aceh sejak 2017 sampai dengan 2021.

Beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan IKM adalah persaingan usaha, pemasaran, modal, situasi ekonomi dan situasi politik. Peranan dan kebijakan pemerintah juga ikut mempengaruhi perkembangan IKM di Kota Banda Aceh karena kebijakan pemerintah merupakan penggerak jalannya IKM. Pemerintah serta lembaga terkait diharapkan bekerjasama dan menjalankan program-program pembangunan khususnya terkait dengan pengembangan IKM.

IKM memegang peranan penting dan memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi Kota Banda Aceh terutama dalam penampungan tenaga kerja, dimana sektor Industri merupakan salah satu penggerak peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan kerja. Seiring dengan bertambahnya jumlah IKM dari tahun ke tahun juga menambah penyerapan tenaga kerja pada setiap unit usaha industri. Perkembangan IKM dan nilai investasinya dapat dilihat pada Tabel 2.128 dibawah ini:





Tabel 2. 128 Perkembangan Industri Kecil dan Nilai Investasi Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021

Tahun	Unit Usaha	Tenaga Kerja (Org)	Nilai Investasi (Rp)	Nilai Produksi (Rp)	Nilai Tambah
2017	2.404	8.300	58.570.000.000	248.570.000.000	195.580.000.000
2018	2.457	7.871	123.162.000.000	115.289.700.000	109.323.700.000
2019	2.560	8.272	175.066.033.000	155.691.240.000	112.022.700.000
2020	2.594	8.373	176.696.533.000	158.009.768.000	113.478.292.000
2021	2.620	8.434	189.240.055.000	162.349.118.000	116.348.950.000

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh, 2022

Berdasarkan Tabel 2.128 di atas dapat disimpulkan bahwa peningkatan jumlah IKM dan nilai investasi dari Tahun 2017 hingga Tahun 2021 diikuti dengan peningkatan nilai tambah investasi pada periode yang sama. Nilai tambah investasi pada Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 116.348.950 dari keadaan Tahun 2020 yang berjumlah Rp. 113.478.292.000.

2) Jumlah IKM yang Mampu Melakukan Pemasaran Komoditi

Keterbatasan sumber daya alam di Kota Banda Aceh menyebabkan banyak timbulnya industri pengolahan yang komoditas bahan bakunya berasal dari Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Aceh. Besarnya permintaan pasar terhadap jenis komoditas tertentu membuat penambahan jumlah pelaku Industri kecil dan menengah yang mengolah komoditas tersebut untuk dipasarkan di dalam dan luar daerah Kota Banda Aceh. Sebagai contoh, bahan baku komoditas kopi didatangkan dari luar Kota Banda Aceh namun pengolahan dari biji sampai menjadi produk dalam kemasan di lakukan di Banda Aceh. Jumlah pelaku usaha IKM Kota Banda Aceh yang mampu melakukan pemasaran komoditi dari Tahun 2017-2020 dapat dilihat pada gambar 2.68 berikut:



Sumber : Dinas Tenaga Kerja, 2021

Gambar 2. 68 Grafik Jumlah IKM yang Mampu Melakukan Pemasaran Komoditi Tahun 2017-2020



Berdasarkan Gambar 2.68 IKM yang mampu melakukan pemasaran komoditi pada Tahun 2020 sebesar adalah sebesar 155 IKM atau 5,97 persen dari Jumlah total IKM pada tahun 2020 sebanyak 2.594 IKM. Jumlah IKM yang mampu melakukan pemasaran komoditi dari tahun 2020 ini mengalami peningkatan dari hanya sebesar 5.85 persen terhadap total IKM. Pada tahun 2021 jumlah total IKM sebanyak 2.620 IKM. Hal ini tidak terlepas dari upaya Pemerintah Kota Banda Aceh dalam meningkatkan kemandirian IKM, satu diantaranya dengan mendirikan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mahirah Muamalah. Sebagai penunjang tumbuh kembang IKM, pusat pembiayaan syariah yang ini memberikan pinjaman usaha kepada industri kecil dan menengah di Kota Banda Aceh. Ini merupakan satu solusi untuk membantu masalah permodalan usaha yang dialami oleh IKM Kota Banda Aceh. Selain itu, sebagian besar pelaku usaha IKM juga mendapatkan pinjaman modal usaha dari perbankan nasional yang ada di Kota Banda Aceh. Namun, untuk laporan jumlah pelaku IKM Kota Banda Aceh yang mendapatkan bantuan pembiayaan dari perbankan belum terdata. selanjutnya diperlukan koordinasi antara dinas terkait dengan pelaku usaha IKM dan pihak perbankan dalam rangka melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

3) Jumlah Produk yang Menunjang Program *One Village One Product* (OVOP)

Kota Banda Aceh memiliki produk unggulan daerah sebagai gambaran kemampuan daerah menghasilkan produk, menciptakan nilai, memanfaatkan sumberdaya secara nyata, memberi kesempatan kerja, mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah, memiliki prospek untuk meningkatkan produktivitas dan investasinya. Sebuah produk dikatakan unggul jika memiliki daya saing sehingga mampu untuk menangkal produk pesaing di pasar domestik dan /atau menembus pasar ekspor. Beberapa contoh produk unggulan Kota Banda Aceh dapat dilihat pada gambar 2.68 dibawah ini:



Sumber: Humas Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh, 2022

Gambar 2. 69 Produk Unggulan Kota Banda Aceh Tahun 2021

Salah satu untuk pengembangan produk unggulan daerah pendekatannya adalah melalui penetapan produk *One Village One Product* (OVOP). Hal ini sesuai dengan langkah kebijakan yang diambil Kementerian Perindustrian dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 78/M-IND/PER/2007 tentang

Peningkatan Efektifitas Pengembangan Industri Kecil dan Menengah melalui Pendekatan Satu Desa Satu Produk (One Village One Product) di Sentra.

Pada Tahun 2017, Pemerintah Kota Banda Aceh secara konsisten dan fokus dalam pembinaan produk OVOP dengan melakukan kerjasama dengan pihak Akademisi dari Universitas Syiah Kuala melalui Pusat Ekonomi Kreatif Unsyiah. Tahap awal dengan melakukan survei produk unggulan ke 90 (sembilan puluh) gampong di Kota Banda Aceh. Dari hasil survei, didapatkan 435 produk unggulan Kota Banda Aceh. Namun demikian, tidak semua produk/komoditi tersebut dapat dikategorikan sebagai produk OVOP. Untuk dapat disebut sebagai produk OVOP, suatu produk harus memenuhi kriteria sebagai produk OVOP seperti yang telah ditetapkan pada petunjuk teknis OVOP pada Menteri Perindustrian Nomor 78/M-IND/PER/2007. Seleksi dilakukan untuk menjaring produk-produk IKM di Kota Banda Aceh yang akan dikembangkan menjadi produk OVOP. Persyaratan produk yang akan diseleksi mencakup batasan produk, produsen, jenis produk, dan jumlah produk. Tabel 2.129 menjelaskan cakupan jenis produk IKM yang diseleksi sebagai produk OVOP Kota Banda Aceh:

Tabel 2. 129 Cakupan jenis produk IKM yang akan diseleksi sebagai produk OVOP Kota Banda Aceh sesuai dengan petunjuk teknis OVOP pada Menteri Perindustrian Nomor 78/M-IND/PER/2007 : (Tahun 2021)

No	Nama Produk	Nama Gampong
1	Makanan ringan	Lampulo, lambung, lhong cut
2	Minuman sari buah dan sirup buah	Lambaro skep, lamdingin, pango raya, lamteh, ulee kareng
3	Kain tenun	Lamgugob, Lamteumen
4	Batik	Lambaro Skep
5	Kerajinan anyaman	Neusu, Pango raya, lamteumen
6	Kerajinan gerabah	penyerat

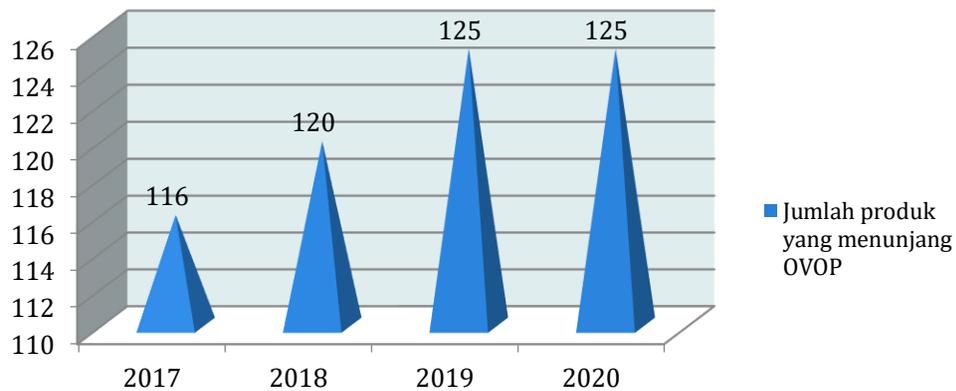
Sumber : Dinas tenaga kerja, 2022



Sumber: Humas Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh, 2022

Gambar 2. 70 Walikota Banda Aceh, H. Aminullah Usman, SE. Ak, MM dan Ketua PKK Kota Banda Aceh, Hj. Nurmiati Mengunjungi stand Dekranasda Kota Banda Aceh

Berdasarkan Tabel 2.129 di atas dapat dilihat bahwa terdapat 6 golongan produk yang dapat diajdikan atau dseleksi sebagai produk OVOP yang tersebar di 15 gampong yang ada di Kota banda Aceh. Gambar 2.71 menjelaskan jumlah Produk Unggulan Kota Banda Aceh yang menunjang produk OVOP dari Tahun 2017-2021:



Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh, 2021

Gambar 2. 71 Jumlah Produk yang Menunjang OVOP Kota Banda Aceh Tahun 2017-2020

Gambar 2.71 di atas menjelaskan jumlah produk yang menunjang OVOP di Kota Banda Aceh meningkat selama periode lima tahun sejak Tahun 2016. Jumlah pada Tahun 2016 adalah sebesar 108 IKM dan meningkat pada Tahun 2020 menjadi 125 IKM, peningkatan jumlah produk yang menunjang OVOP selama 5 tahun terakhir adalah sebesar 13.6 persen.

D. Kelautan dan Perikanan

1) Produksi Perikanan

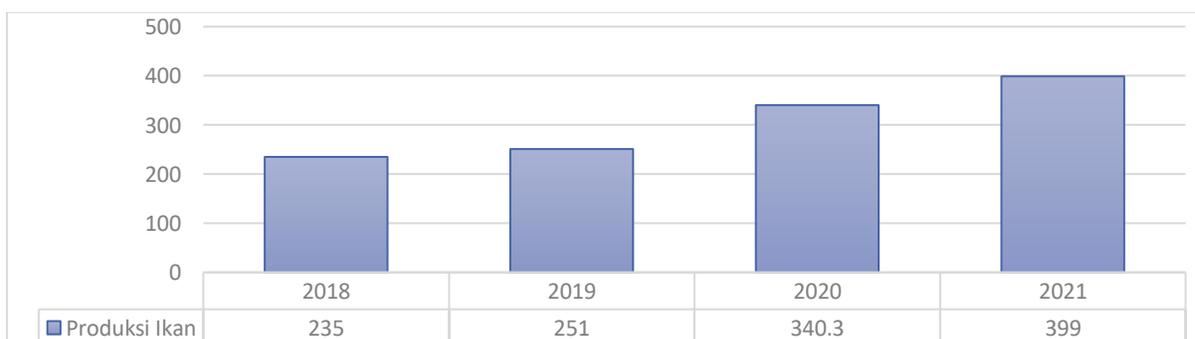
Kota Banda Aceh merupakan sentra perikanan terbesar pendaratan ikan yang terdapat di Provinsi Aceh. Produksi perikanan di Kota Banda Aceh terdiri dari perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya dari Tahun 2017 hingga Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.130 dibawah ini:

Tabel 2. 130 Produksi Ikan di Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021 (Dalam Ton)

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Produksi Ikan	10.002,64	10.419,8	11.713,426	28.499,33	981

Sumber : DP2KP Kota Banda Aceh, 2022

Produksi perikanan budidaya dari Tahun 2018 hingga Tahun 2021 dapat dilihat pada Gambar 2.72 dibawah ini:



Sumber: DP2KP Kota Banda Aceh, 2022

Gambar 2. 72 Produksi Ikan Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021 (dalam Ton)



Untuk perikanan budidaya, seperti terlihat pada Gambar 2.72 produksi perikanan budidaya di Kota Banda Aceh kurun waktu 2018-2021 mengalami peningkatan, akan tetapi tidak signifikan. Hal ini disebabkan karena sejumlah lahan yang ada di Kota Banda Aceh belum direhab pasca tsunami dan berkurangnya daya dukung lingkungan (kualitas air dan tanah) untuk perikanan tambak.

2.1.3.5 Fokus Penunjang Urusan Pemerintahan

A. Pengawasan

Penyelesaian Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) dari Pengawas Eksternal, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPKRI) dan Inspektorat Aceh, maupun Pengawas internal (Inspektorat Kota Banda Aceh) sangat tergantung pada keseriusan SKPK dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan. Penjelasan lebih lanjut terkait tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Kota Banda Aceh dijelaskan pada Tabel 2.131 berikut ini:

Tabel 2. 131 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Kota Banda Aceh	4732*)	5351*)	5865*)	6340	6827
2	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Kota Banda Aceh yang ditindak lanjuti	4642*)	5189*)	5502*)	5836	6027
3	Persentase Tindak Lanjut (%)	98,10*)	96,97*)	93,81*)	92,05	88,28

Sumber : Inspektorat Kota Banda Aceh, 2022

Berdasarkan Tabel 2.131 di atas, jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat yang ditindaklanjuti berfluktuasi dari Tahun 2017 hingga Tahun 2021. Persentase tindak lanjut hasil pengawasan tertinggi adalah pada Tahun 2017 sebesar 98,10 persen dari jumlah rekomendasi hasil pengawasan. Persentase tindak lanjut terendah terjadi pada Tahun 2021 yaitu sebesar 88,28 persen dari 6827 rekomendasi hasil pengawasan.

Selain Inspektorat Kota Banda Aceh, pengawasan juga dilakukan oleh BPK-RI (Badan Pengawas Keuangan). Jumlah rekomendasi hasil pengawasan dan tindaklanjutnya dapat dilihat pada Tabel 2.132 berikut:

Tabel 2. 132 Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan BPK	744*)	773*)	816*)	885	923
2	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan BPK yang ditindaklanjuti	624*)	674*)	700*)	755	785
3	Persentase Tindak Lanjut (%)	83,87*)	87,19*)	85,78*)	85,31	85,05

Sumber : Inspektorat Kota Banda Aceh, 2022

*) Data tahun 2017 – 2019 disesuaikan

Berdasarkan Tabel 2.132 di atas, Tindak lanjut atas hasil rekomendasi BPK yang telah dilaksanakan secara umum sudah mencapai lebih dari 80 persen pada periode 2017-2021.





2.1.3.6 Fokus Otonomi Daerah

A. Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri

1) LSM, Ormas dan OKP Terdaftar

Badan lembaga swadaya masyarakat (LSM) adalah istilah yang digunakan oleh masyarakat luas untuk menyebut organisasi yang bergerak di bidang sosial (tidak berorientasi profit) dan secara institusi tidak terikat dan/atau tidak berada di bawah organ-organ negara. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Banda Aceh mengeluarkan surat keterangan terdaftar (SKT) bagi LSM sejak Tahun 2009 hingga Tahun 2017.

Pada Tahun 2018, pengurusan SKT dilakukan pada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri. Namun demikian, pendaftaran dan verifikasi tetap dibawah Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Badan atau Lembaga Dalam Bidang Politik dan Pemerintahan Umum. Jumlah LSM yang terdaftar, LSM tidak aktif dan LSM aktif di Kota Banda Aceh dari Tahun 2017 hingga Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.133 berikut ini:

Tabel 2. 133 Jumlah LSM Aktif Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah LSM Terdaftar	3	-	1	1	4
2	Jumlah LSM Tidak Aktif	-	-	-	-	-
3	Jumlah LSM Aktif	16	-	1	18	22

Sumber : Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh, 2022

Berdasarkan Tabel 2.133 di atas dapat dilihat bahwa jumlah LSM yang mendaftar mengalami kenaikan pada tahun 2021. Pada tahun 2021, jumlah LSM terdaftar sebanyak 4, sedangkan jumlah LSM aktif berjumlah 22. Jumlah LSM aktif lebih besar dibandingkan dengan jumlah LSM terdaftar, karena selama ini Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Banda Aceh telah menjalankan program kegiatan diantaranya pembinaan organisasi kemasyarakatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2017, namun setelah keluar peraturan ini maka Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Banda Aceh tidak lagi mengeluarkan surat keterangan terdaftar tetapi hanya memverifikasi dokumen dan yang mengeluarkan Menteri dalam negeri, namun demikian kegiatan sebagaimana yang tercantum diatas tetap terlaksana.

Organisasi kemasyarakatan (Ormas) diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk beperanserta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Organisasi Kemasyarakatan dapat berbentuk LSM, yayasan dan organisasi sosial kemasyarakatan lainnya. Jumlah Ormas yang terdaftar, Ormas yang tidak aktif dan Ormas yang aktif terdapat pada Tabel 2.134 berikut:





Tabel 2. 134 Jumlah Ormas yang Terdaftar, Ormas Tidak Aktif dan Ormas Aktif Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Ormas yang terdaftar	89	4	-	2	1
2	Jumlah Ormas yang tidak aktif	-	-	-	-	-
3	Jumlah Ormas yang aktif	98*)	102*)	-	104	105

Sumber: Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kota Banda Aceh, 2022

*) Data tahun 2017-2018 disesuaikan

Berdasarkan Tabel 2.134 di atas peningkatan jumlah Ormas yang terdaftar terbesar terjadi pada Tahun 2017 yaitu sebanyak 89 Ormas, sedangkan pada tahun 2021 hanya 1 ormas yang terdaftar. Pada tahun 2021 jumlah ormas yang aktif sebesar 105 ormas, bertambah 1 ormas dari tahun sebelumnya.

Organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) memegang peranan penting dalam pembinaan mental dan potensi calon pemimpin (leadership) anggotanya. OKP juga merupakan mitra pemerintah yang mendukung pelaksanaan pembangunan, memberi masukan dan kritik membangun kepada pemerintah. Tabel 2.135 dibawah ini menunjukkan jumlah organisasi kepemudaan (OKP) yang terdaftar, OKP tidak aktif dan OKP aktif di Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021.

Tabel 2. 135 Jumlah OKP yang Terdaftar, OKP Tidak Aktif dan OKP Aktif Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah OKP yang terdaftar	3	-	-	-	-
2	Jumlah OKP yang tidak aktif	-	-	-	-	-
3	Jumlah OKP yang aktif	3	-	-	7	7

Sumber: Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kota Banda Aceh, 2022

Berdasarkan Tabel 2.135 Jumlah OKP yang terdaftar mengalami penurunan dari Tahun 2016 hingga tahun 2017, dimana pada Tahun 2016 jumlah OKP yang terdaftar sebanyak 4. Pada tahun 2018 - 2021 tidak ada OKP yang terdaftar, sedangkan pada tahun 2020 dan 2021 jumlah OKP yang aktif sebanyak 7.

LSM, Ormas dan OKP merupakan mitra kerja pemerintah dalam meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang perlu dipastikan legalitasnya dan terdaftar di Badan Kesbangpol. Oleh karena itu, Badan kesbangpol harus memastikan SKT yang telah ditetapkan oleh pada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri dilaporkan ke Badan Kesbangpol untuk pembinaan, memastikan LSM, Ormas dan OKP menjalankan organisasinya sesuai dengan fungsinya dan sebagai bahan klarifikasi apabila diperlukan terkait legalitas LSM, Ormas dan OKP bersangkutan. Badan Kesbangpol perlu memberi pemahaman kepada LSM, Ormas dan OKP terkait peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

2) Kegiatan Pembinaan Politik daerah

Dalam rangka peningkatan pemahaman hak dan kewajiban masyarakat, Badan Kesbangpol melaksanakan kegiatan pembinaan politik daerah dengan sasaran generasi muda dan merupakan pelopor perkembangan politik kedepan. Pembinaan politik ini dilaksanakan oleh KPU/KIP sebagai lembaga independen pelaksana Pemilu. Kegiatan ini dilaksanakan mulai Tahun 2017 setelah adanya SOTK (struktur organisasi dan tata kerja) baru. Target dan realisasi kegiatan pembinaan politik daerah dimaksud dapat dilihat pada Tabel 2.136 di bawah ini:





Tabel 2. 136 Target dan Realisasi Kegiatan Pembinaan Politik Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021

Uraian	Target/ Realisasi	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah peserta yang mengikuti Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	Target	75	100	100	-	-
	Realisasi	72	100	100	-	-

Sumber : Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh, 2022

Berdasarkan Tabel 2.136 jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pembinaan politik daerah pada Tahun 2018 meningkat sebesar 33,33 persen dari tahun sebelumnya yang berjumlah 75 orang. Pada tahun 2020-2021 tidak ada peserta yang mengikuti kegiatan pembinaan politik daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh telah melakukan kegiatan pembinaan politik di daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 36 Tahun 2010 tentang pedoman fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Politik melalui sosialisasi pendidikan politik kepada masyarakat, parpol, ormas, LSM, Tokoh pemuda Gampong, tuha peut gampong ujuan untuk meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Pada tahun 2020 Kegiatan Pembinaan Politik di Daerah tidak dapat dilaksanakan disebabkan kondisi daerah dalam masa pandemi Covid 19 dan terjadinya Recofusing Anggaran.

3) **Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba**

Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dapat mengakibatkan bahaya besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Dalam kenyataan tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas terutama dikalangan anak-anak, remaja dan generasi muda pada umumnya. Menanggapi hal tersebut Badan Kesbangpol melakukan kegiatan penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkotika di sekolah-sekolah wilayah Kota Banda Aceh. Kegiatan penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba adalah program kegiatan yang ada pada badan kesatuan bangsa dan politik Kota Banda Aceh sesuai dengan Undang-undang nomor 35 tahun 2006 tentang narkotika kegiatan dilakukan melalui sosialisasi dan penyuluhan.

Tabel 2.137 menunjukkan target dan realisasi penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba di Kota Banda Aceh Tahun 2017 hingga Tahun 2021:

Tabel 2. 137 Target dan Realisasi Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021

Uraian	Target/ Realisasi	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	Target	10	10	11	11	5
	Realisasi	15	16	18	11	-

Sumber : Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh, 2022





Berdasarkan Tabel 2.137 di atas dapat dilihat sejak Tahun 2017 hingga Tahun 2020 telah dilakukan penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba sebanyak 75 kali. Pada Tahun 2018, jumlah penyuluhan ini ditargetkan sebanyak 10 kali penyuluhan dan yang terealisasi sebanyak 16 kali, 11 kali dilakukan menggunakan Anggaran APBK pada Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh dan 5 kali dilaksanakan berdasarkan usulan anggota DPRK. Untuk Tahun 2020 target untuk penyuluhan narkoba ditetapkan sebanyak 11 kali dan yang terealisasi sebanyak 11 kali. Pada tahun 2021 untuk penyuluhan narkoba ditargetkan sebanyak 5 kali tetapi tidak ada yang terealisasi. Hal ini disebabkan kondisi daerah dalam masa pandemi *Covid 19* dan terjadinya *Recofusing* Anggaran.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

1) Jenis, Kelas, dan Jumlah Restoran

Pajak restoran memberikan kontribusi sebesar 4 persen pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jumlah restoran, rumah makan dan cafe di Kota Banda Aceh sejak Tahun 2017 hingga 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.138 di bawah ini:

**Tabel 2. 138 Jumlah Restoran, Rumah Makan dan Cafe
Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021**

No	Uraian	2017		2018		2019		2020		2021	
		Jumlah	Jumlah								
		usaha	Kursi								
1	Restoran	26	2,600	30	2,900	35	3,381	36	3,450	38	3,495
2	Rumah Makan	161	8,050	178	8,730	211	10,339	211	10,339	211	10,339
3	Café	364	18,200	469	23,400	562	27,538	624	30,018	624	32,572
Jumlah		551	28,850	677	35,030	808	41,258	871	43,807	873	46,406

Sumber : BPKK Kota Banda Aceh, 2022

Berdasarkan Tabel 2.138 di atas jumlah restoran, rumah makan dan café terus meningkat selama periode Tahun 2017 hingga Tahun 2021. Jumlah usaha pada Tahun 2021 sebesar 873 dibandingkan Tahun 2017 yang berjumlah 551 usaha. Jumlah usaha restoran, rumah makan dan café tertinggi adalah pada Tahun 2021 masing-masing 38, 211 dan 624. Sama halnya dengan jumlah kursi restoran, rumah makan dan café jumlahnya juga tertinggi pada Tahun 2021 masing-masing 3.495, 10.339 dan 32.572. Hal ini terjadi karena jumlah usaha restoran, rumah makan dan café yang juga meningkat.





Sumber: Humas Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh, 2021

Gambar 2. 73 Walikota Banda Aceh, H. Aminullah Usman, SE. Ak, MM menghadiri *launching* Mamesaka Coffee and Eatery

2) **Jenis Kelas dan Jumlah Hotel dan Penginapan**

Pajak hotel juga berkontribusi sebesar 4 persen pada PAD. Dengan demikian perkembangan usaha sektor hotel dan restoran di Kota Banda Aceh berperan dalam meningkatkan PAD. Untuk lebih jelasnya, kelas dan jumlah penginapan/hotel di Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.139:

**Tabel 2. 139 Kelas dan Jumlah Penginapan/ Hotel Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021**

No	Kelas	2017			2018			2019			2020			2021		
		Jlh Hotel	Jlh Kamar	Jlh Tempat Tidur	Jlh Hotel	Jlh Kamar	Jlh Tempat Tidur	Jlh Hotel	Jlh Kamar	Jlh Tempat Tidur	Jlh Hotel	Jlh Kamar	Jlh Tempat Tidur	Jlh Hotel	Jlh Kamar	Jlh Tempat Tidur
1	Bintang 4	1	159	270	1	159	270	1	159	270	1	159	270	1	159	270
2	Bintang 3	3	302	513	6	839	719	7	839	763	7	919	763	7	919	763
3	Bintang 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Bintang 1	11	440	748	12	460	778	12	460	778	14	522	928	15	558	991
5	Melati 3	14	350	420	10	350	420	10	350	420	10	350	420	10	468	565
6	Melati 2	5	175	315	6	190	345	6	190	345	6	190	345	7	252	272
7	Melati 1	8	320	576	13	370	701	13	370	701	13	421	805	14	478	913
8	Penginapan	17	340	680	33	361	713	34	361	721	34	361	721	36	506	761
Jumlah		56	2086	3522	81	2729	3946	83	2729	3998	85	2922	4252	90	3340	4535

Sumber : BPKK Kota Banda Aceh, 2022

Berdasarkan Tabel 2.139 di atas dapat dilihat jumlah hotel/penginapan di Kota Banda Aceh sejak Tahun 2017 hingga 2021 menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2017 jumlah hotel yang ada di Kota Banda Aceh sebanyak 59 hotel, meningkat menjadi 90 hotel pada tahun 2021. Jumlah hotel terbanyak pada tahun 2021 yaitu Hotel Melati 1 dengan jumlah 36 hotel. Hotel Bintang 4 tetap konstan dari tahun 2017-2021 yaitu sebanyak 1 hotel.

Jumlah kamar hotel/penginapan jumlahnya meningkat dari 2017 hingga 2021 dengan jumlah kamar hotel/penginapan pada Tahun 2021 sebanyak 3.340, meningkat dari Tahun 2017 yang berjumlah 2.086 kamar hotel/penginapan. Jumlah tempat tidur juga mengalami peningkatan dimana jumlahnya pada Tahun 2017 berjumlah 3.522 meningkat pada tahun 2021 menjadi 4.535 tempat tidur.

2.1.4.2. Fokus Iklim Berinvestasi

1) Lama Proses Perizinan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara elektronik, sejak Agustus 2018 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banda Aceh telah melakukan proses perizinan berusaha melalui sistem Online Single Submission (OSS) dan proses perizinan non berusaha dilakukan melalui Aplikasi Si Cantiku. Untuk perizinan berusaha DPMPTSP hanya memproses berkas pemenuhan komitmen agar izin yang diterbitkan OSS dapat berlaku efektif.

Tabel 2.140 berikut menggambarkan lama proses pemenuhan komitmen dan perizinan berusaha yang diproses melalui Aplikasi Si Cantiku:

Tabel 2. 140 Lama Proses Pemenuhan Komitmen dan Proses Perizinan Non Berusaha di DPMPTSP Kota Banda Aceh Tahun 2021

No.	Uraian	Lama Pengurusan (hari)	Jumlah Persyaratan (Dokumen)	Biaya Resmi (Rata-rata Maks Rp)
Proses Pemenuhan Komitmen				
1	Izin Lokasi	Sudah tidak melayani lagi izin lokasi karena sistem Online Single Submission (OSS) tidak tersedia		
Izin Lingkungan				
2	- Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL – UPL)	6 Hari kerja (Setelah mendapatkan rekomendasi dari DLHK3)	10 item Persyaratan	-
	'- Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal)			-
3	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	3 Hari kerja (Setelah mendapatkan rekomendasi dari PUPR)	9 s/d 16 dokumen persyaratan (menurut fungsi bangunan)	Rp. 20,000 per bangunan, yang membedakan hanya indeks bangunan saja





No.	Uraian	Lama Pengurusan (hari)	Jumlah Persyaratan (Dokumen)	Biaya Resmi (Rata-rata Maks Rp)
4	Sertifikat Layak Fungsi (SLF)	5 Hari kerja (Setelah mendapatkan rekomendasi dari PUPR)	10 item Persyaratan	-
Proses Perizinan Non Berusaha				
5	Izin-izin di Bidang Kesehatan	5 Hari Kerja	7 s/d 9 Item Persyaratan	-
6	Izin Kegiatan Seni dan Budaya	Sudah tidak ada pelayanan lagi mulai dari maret 2019 s/d sekarang karena pandemi		

Sumber: DPMPTSP Kota Banda Aceh, 2022

Berdasarkan Tabel 2.140 di atas dalam rangka meningkatkan iklim investasi di Kota Banda Aceh, salah satu cara yang dilakukan yaitu dengan melakukan peningkatan pelayanan perizinan melalui pemberian pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha yang sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) yang telah ditetapkan oleh Kementerian terkait perizinan masing-masing dan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP) DPMPTSP yang telah dilakukan proses revisi. Pada tabel di atas untuk proses izin lokasi sudah tidak dilayani lagi karena sistem Online Single Submission (OSS) tidak tersedia. Proses perizinan IMB dan SLF dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung Tanggal 2 Agustus 2021.

Beberapa penghargaan yang diperoleh DPMPTSP antara lain:

- Piala Citra Pelayanan Prima yang diberikan oleh Presiden RI;
- Investment Award bagi Nominasi Penyelenggara PTSP Bidang Penanaman Modal Kota Terbaik;
- Penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori "A" (berdasarkan hasil evaluasi terhadap 59 Kab/Kota sesuai dengan Keputusan Menpan RB Nomor 191 Tahun 2017 tentang Penetapan 59 Kab/Kota sebagai Role Model Penyelenggaraan Pelayanan Publik);
- Penghargaan dari Ombudsman Republik Indonesia kepada DPMPTSP atas anugerah Predikat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Penghargaan Juara I Aceh Investment Award dari Gubernur Aceh Tahun 2017;
- Penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai Role Model Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kategori Sangat Baik (A-) Tahun 2019.





Sumber: DPMPTSP Kota Banda Aceh, 2022

Gambar 2. 74 DPMPTSP Banda Aceh Raih Penghargaan Pelayanan prima dari KemenPANRB

2) Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha

Peraturan daerah (Perda) yang mendukung iklim usaha dimaksud adalah perda terkait perizinan, perda terkait dengan lalu lintas barang dan jasa dan perda terkait dengan ketenagakerjaan yang memberikan kemudahan-kemudahan berinvestasi di Kota Banda Aceh. Tabel 2.141 berikut menunjukkan qanun yang mendukung iklim investasi di Kota Banda Aceh dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 2. 141 Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Investasi Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Perda Terkait Perizinan	0	0	0	0	0

Sumber : DPMPTSP Kota Banda Aceh, 2022

Tabel 2.141 di atas menunjukkan sejak Tahun 2017 hingga 2021 tidak ada Perda yang mendukung pengembangan usaha di Kota Banda Aceh. Untuk meningkatkan dukungan terhadap perkembangan iklim usaha, saat ini Perda yang mendukung iklim usaha sedang dilakukan revisi.

2.1.4.3. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

1) Rasio panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Kota Banda Aceh

Penggunaan moda angkutan darat sangat dipengaruhi oleh jalan yang tersedia di wilayah Kota Banda Aceh. Sebagai barang publik yang merupakan bagian dari layanan public pemerintah Kota Banda Aceh, jalan raya mempunyai kapasitas tertentu agar dapat dilalui dengan nyaman. Berikut perkembangan panjang jalan dan kendaraan di Kota Banda Aceh. Pada Tabel 2.142 Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan yang ada di Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut:





Tabel 2. 142 Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Panjang Jalan (km)	762,51	765,66	765,66	765,66	620,96
2	Jumlah kendaraan	262.646	271.625	280.967	281.698	294.244
	Rasio	0,29	0,29	0,27	0,27	0,26

Sumber : Dinas PUPR Kota Banda Aceh, 2022

Tabel 2.142 di atas menunjukkan jumlah kendaraan yang melalui jalan-jalan di Kota Banda Aceh bertambah dari tahun ke tahun sementara penambahan jalan sulit dilakukan mengingat luas area kota tidak mungkin bertambah. Hal ini dapat menyebabkan kemacetan di jalan-jalan utama dalam kota. Oleh karena itu, kemacetan menjadi permasalahan yang mempunyai urgensi tinggi untuk diselesaikan dalam urusan perhubungan di Kota Banda Aceh.

2) Jumlah Orang/Barang (Penumpang) yang Terangkut Angkutan Umum

Perkembangan wilayah ditandai dengan semakin tingginya aktifitas pergerakan/mobilitas orang/barang yang terangkut angkutan umum. Jumlah orang/barang (penumpang) yang terangkut angkutan umum melalui terminal di Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Tabel 2.143 di bawah ini:

Tabel 2. 143 Jumlah Orang/Barang (Penumpang) yang Terangkut Angkutan Umum Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017		2018		2019		2020		2021	
		Angk.	Pnmpg	Angk.	Pnmpg	Angk.	Pnmpg	Angk.	Pnmpg	Angk.	Pnmpg
1	AKDP	787	815.042	787	1.187.403	796	1.463.613	901	1.097.859	1.316	665.184
2	AKAP	157	399.622	157	370.802	169	365.762	157	431.512	219	173.944
	Jumlah	944	1.214.664	944	1.558.205	965	1.829.375	1.058	1.529.375	1.535	839.128
	Jumlah Angk./Pnp X 100%	0,08		0,06		0,05		0,06		0,18	

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, 2022

Pada perhubungan jalur darat dapat dibedakan menjadi angkutan darat dalam provinsi (AKDP) dan angkutan darat antar provinsi (AKAP). Jumlah angkutan umum yang tersedia mencerminkan jumlah penumpang yang dimobilisasi. Pada Kota Banda Aceh, jumlah angkutan dari tahun ke tahun meningkat dari 944 unit angkutan umum pada tahun 2017 bertambah menjadi 1.535 angkutan umum pada tahun 2021 dengan jumlah penumpang yang dipindahkan dari 1.214.664 penumpang pada tahun 2017 menjadi 1.829.375 penumpang pada 2019 tapi kemudian menurun pada tahun 2020 dan 2021. Penurunan jumlah penumpang ini berhubungan erat dengan kebijakan PPKM yang membatasi mobilitas penduduk antar daerah.

3) Jumlah Orang/Barang (Penumpang) Melalui Dermaga/ Bandara/ Terminal

Fasilitas transportasi serta aliran orang/ barang (penumpang) melalui dermaga/ bandara/ terminal menunjukkan interaksi antar wilayah yang tercermin dari keadaan fasilitas transportasi serta aliran orang dan barang. Jaringan transportasi antar daerah yang memungkinkan bagi pemindahan barang dan jasa atau orang dari satu tempat ke tempat lainnya merupakan indikator konektivitas antara daerah yang satu dengan daerah lain. Tabel 2.144 di bawah ini menunjukkan jumlah orang/





barang (penumpang) melalui dermaga/bandara/terminal dari Tahun 2017-2021 di Kota Banda Aceh:

Tabel 2. 144 Jumlah Orang/Barang (Penumpang) Melalui Dermaga/ Bandara/ Terminal Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021**
1.	Jumlah penumpang Bis	1.214.664	1.558.205	1.829.375	1.529.375	839.128
2.	Jumlah penumpang ASDP	703.501*)	794.364*)	859.982*)	508.964	496.142
3.	Total Jumlah Penumpang	1.918.165	2.352.569	2.689.267	2.038.339	1.335.270

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, 2022

*) Data tahun 2016-2019 disesuaikan

** Data Untuk Tahun 2021 (status data bulan Nopember 2021)

Berdasarkan Tabel 2.144 pertumbuhan jumlah orang/barang (penumpang) melalui dermaga/bandara/terminal dari tahun ke tahun mengalami peningkatan kecuali tahun 2020 dan 2021 dimana pandemi terjadi. Penambahan jumlah penumpang terjadi pada angkutan bis dan juga ASDP tahun 2017-2019, ketika PPKM diberlakukan untuk mencegah penularan pada tahun 2020-2021 maka tingkat mobilitas penduduk juga berkurang yang terlihat dari berkurangnya jumlah penumpang angkutan umum baik di darat (bis) maupun di air (ASDP).

Jumlah terminal yang berada di Kota Banda Aceh saat ini telah sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan yaitu sebanyak 4 unit terminal. Rincian jumlah terminal angkutan penumpang/barang yang ada di Kota Banda Aceh yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Tabel 2.145 berikut:

Tabel 2. 145 Jumlah Terminal Angkutan Penumpang/Barang Kota Banda Aceh yang Telah Dilayani Angkutan Umum dalam Trayek Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021*
1	Terminal Penumpang AKAP Tipe-A	1	1	1	1	1
2	Terminal Penumpang AKDP Tipe-B	1	1	1	1	1
3	Terminal Penumpang AKDP Tipe-C	1	1	1	1	1
4	Terminal Barang (Mobar)	1	1	1	1	1
Jumlah		4	4	4	4	4

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, 2022

* Data sampai bulan November 2021

Dari Tabel 2.145 diatas terlihat jumlah terminal angkutan penumpang/barang yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek kota Banda Aceh pada Tahun 2017-2021 adalah berjumlah 4 (empat) terminal, yaitu Terminal Penumpang Type-A di Batoh ; Terminal AKDP Type-B L-300 Lueng Bata; Terminal Type-C APK Keudah dan Terminal Mobil Barang (Mobar) di Santan. Khusus untuk Terminal Tipe A Kota Banda Aceh, dimana mulai Tahun 2017 telah diserahkan ke Pusat yang pengelolaannya telah menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan RI, sehingga dengan sendirinya terjadi penurunan pendapatan untuk Kota Banda Aceh.





2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

2.1.4.4.1 Kualitas Tenaga Kerja

Secara umum, daya saing dan produktivitas tenaga kerja di Banda Aceh tergolong relatif rendah jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Indonesia. Salah satu yang menjadi penyebab hal ini adalah tingkat pendidikan tenaga kerja yang masih rendah, dimana pendidikan terbanyak dari tenaga kerja di Banda Aceh ialah Sekolah Menengah Atas (SMA). Rasio lulusan S1/S2/S3 per satuan penduduk di Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.146. Rasio ini menggambarkan jumlah lulusan S1/S2/S3 per satuan penduduk.

Tabel 2. 146 Rasio Jumlah Lulusan S1/S2/S3 per-satuan Penduduk Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah lulusan S1/S2/S3	34.827	34.751	36.220	37.827	38.630
2	Jumlah penduduk	251.879	244.586	245.779	248.892	251.288
3	Rasio lulusan S1/S2/S3	1 : 7,2	1 : 7,0	1 : 6,7	1 : 6,6	1 : 6,5

Sumber: Disdukcapil Kota Banda Aceh, 2022

Berdasarkan Tabel 2.146, rasio jumlah lulusan S1/S2/S3 per-satuan penduduk menurun selama periode Tahun 2017 hingga 2021, dimana pada Tahun 2017 rasio jumlah lulusan S1/S2/S3 dan jumlah penduduk adalah 1:7,2, pada Tahun 2021 angkanya turun menjadi 1:6,5. Walaupun rasio ini menurun, namun secara kuantitatif jumlah lulusan S1/S2/S3 pada Tahun 2021 ini merupakan angka kelulusan terbesar pada periode lima tahun tersebut. Pada Tahun 2021 jumlah lulusan S1/S2/S3 sebesar 38.630.

2.1.4.4.2 Ketergantungan Penduduk Produktif Terhadap Penduduk Tidak Produktif

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat digunakan untuk melihat apakah suatu daerah merupakan kategori daerah maju dengan produktivitas penduduk yang tinggi atau daerah berkembang dengan produktivitas penduduk yang masih rendah. Semakin tinggi angka rasio ketergantungan menunjukkan semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif/ tidak produktif lagi. Disisi lain, semakin rendah angka rasio menunjukkan semakin rendah beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif/ tidak produktif lagi. Tanggungan yang dimaksud dalam hal ini dapat berbentuk jaminan sosial, bantuan pensiun, serta fasilitas lainnya yang didapatkan oleh penduduk non-produktif meskipun mereka tidak bekerja. Rasio ketergantungan penduduk tidak produktif terhadap penduduk produktif di Kota Banda Aceh dari Tahun 2017 hingga Tahun 2021 secara lebih jelas terdapat pada Tabel 2.147 di bawah ini:

Tabel 2. 147 Rasio Ketergantungan Penduduk Produktif terhadap Penduduk Tidak produktif Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Penduduk Usia < 15 Tahun	71,727	169.031	167.582	75.845	75.667
2	Penduduk Usia > 64 Tahun	9,936	9.867	9.969	9.873	10.051
3	Penduduk Usia Tidak Produktif (< 15 tahun dan > 64 Tahun)	81,663	85.522	88.166	85.718	85.718
4	Penduduk Usia 15 – 64 Tahun	170,216	152.750	151.201	163.174	165.570
5	Rasio Ketergantungan	50,17	55,99	58,31	52,53	52,83

Sumber: Disdukcapil Kota Banda Aceh, 2022



Berdasarkan Tabel 2.147, rasio ketergantungan penduduk di Kota Banda Aceh pada tahun 2017 sampai dengan 2019 mengalami peningkatan, yang artinya jumlah penduduk produktif semakin banyak. Namun, pada tahun 2020 sampai dengan 2021, jumlah ini mengalami penurunan. Jika dilihat dari struktur piramida penduduk di Kota Banda Aceh, diperkirakan Kota Banda Aceh akan mendapatkan bonus demografi dimana penduduk usia 15-64 tahun menjadi lebih banyak. Bonus demografi ini tentunya memerlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mempunyai daya saing melalui berbagai keahlian dan ketrampilan.

2.1.4.5 Capaian Realisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)

SPM atau Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib dan berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran.

Dalam upaya percepatan penerapan SPM, Pemerintah Kota Banda Aceh melakukan berbagai kegiatan dan strategi yang telah ditetapkan secara nasional sesuai amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Diharapkan seluruh lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan dasar yang merupakan hak dari setiap warga negara. Adapun yang menjadi urusan wajib pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah sebagai berikut:

a. Bidang Pendidikan

Standar Pelayanan Minimal Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap peserta didik secara minimal. Terdapat lima indikator pencapaian SPM, dimana SPM urusan Pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/ kota adalah pelayanan minimal Pendidikan dasar sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.

Target pencapaian SPM bidang urusan Pendidikan untuk Kota Banda Aceh Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 2. 148 Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2021

No.	Jenis Pelayanan	Indikator	Target	Realisasi
I.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah anak usia 5-6 tahun sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD	100%	56,02
II.	Pendidikan Dasar (SD)	Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%	99,98
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional		
III.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga Negara usia 7-18 tahun belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	98,50
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional		

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh, 2022





b. Bidang Kesehatan

SPM bidang urusan kesehatan merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Adapun yang menjadi jenis pelayanan dasar pada SPM urusan kesehatan daerah Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 149 Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2021

No.	Jenis Pelayanan	Target	Realisasi
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100%	85,73%
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100%	80,22%
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100%	84,42%
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	100%	57,42%
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	100%	0%*
6.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	100%	43%
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	100%	42,05%
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100%	28%
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100%	100%
10.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa	100%	89%
11.	Pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100%	24,55%
12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	100%	86,4%

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, 2022

* Lagi berjalan

c. Bidang Pekerjaan Umum

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Pekerjaan Umum merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang menjadi urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Adapun yang menjadi jenis pelayanan dasar pada SPM urusan Bidang Pekerjaan Umum antara lain dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 150 Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan	Target	Realisasi
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	100%	83,78%
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	100%	100%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh, 2022

d. Bidang Perumahan Rakyat

Indikator kinerja SPM urusan perumahan rakyat adalah tolok ukur untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM bidang perumahan. SPM urusan perumahan rakyat di Kabupaten/ Kota mencakup 2 (dua) jenis pelayanan dasar, yang terdiri atas :



Tabel 2. 151 Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target	Realisasi
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	100%	0
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah	100%	0

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman Kota Banda Aceh, 2022

e. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

SPM urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Dalam menjalankan urusan tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah (Satpol PP dan WH), BPBD dan DPKP Kota Banda Aceh memberikan pelayanan dasar dengan menjamin dan memastikan perda/ qanun dan peraturan walikota dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Adapun target dan realisasi pencapaian SPM bidang ketentraman, keteriban umum dan perlindungan masyarakat Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini::

Tabel 2. 152 Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2021

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Target	Realisasi
1.	Pelayanan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	100%	100%
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	100%	100%
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100%	100%
4.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	100%
5.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100%	100%

Sumber : Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, BPBD Kota Banda Aceh dan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Banda Aceh, 2022

f. Bidang Sosial

SPM bidang urusan Bidang Sosial mencakup kedalam beberapa jenis pelayanan dasar, yaitu dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 153 Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Sosial Tahun 2021

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Target	Realisasi
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	100%	59,41%
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti skala	100%	100%
3.	Rehabilitasi Sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	100%	100%
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	100%	92,56
5.	Perlindungan dan jaminan pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana Kab/Kota	100%	100%

Sumber: Dinas Sosial Kota Banda Aceh, 2022





Di Kota Banda Aceh bidang urusan sosial masih menjadi tantangan yang harus diselesaikan oleh pemerintah kota saat ini. Banyaknya gelandangan dan pengemis dari luar Kota Banda Aceh yang terbukti dengan seringnya pada saat dilakukan razia dan pendataan dan ditemukan banyaknya warga yang memiliki kartu identitas diluar Kota Banda Aceh. Salah satu alasannya adalah Kota Banda Aceh merupakan ibu kota provinsi Aceh. Anggaran dan harapan sangat bergantung di Kota Banda Aceh, sehingga ini terus akan terjadi dan diperlukan berbagai cara dan sinergi dari semua pihak untuk menyelesaikan permasalahan ini.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2022

Evaluasi pelaksanaan RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2022 diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2023. RKPD Kota Banda Aceh dituangkan dalam kebijakan, program dan kegiatan tahunan. Program pembangunan yang disusun dilakukan dengan memanfaatkan seluruh sumber daya pembangunan yang ada dengan tetap memperhatikan konsistensi perencanaan jangka menengah dan jangka panjang.

Untuk menilai kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang diimplementasikan dalam RKPD dilakukan melalui proses evaluasi kinerja atau pelaksanaan pembangunan daerah melalui RKPD. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai triwulan I tahun 2022 per Dinas ditunjukkan oleh Tabel 2.154 berikut:



Kode				Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Pemutakhiran)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJM Kota Banda Aceh pada Tahun 22- 222 Kepmendagri 5		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 21		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 22)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 221								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 221		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 221 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD OPD s/d Akhir Tahun 21		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi RPJMD OPD s/d Tahun 22 (%)		OPD Penanggung Jawab			
Unsur	Bd. Unsur	Program	Kegiatan			Sub Kegiatan	Target	Rp	Kinerja	Rp	Target	Rp	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 221		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 221 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD OPD s/d Akhir Tahun 21		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi RPJMD OPD s/d Tahun 22 (%)				
													Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja		Rp	Kinerja	Rp
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	144 Sekolah	4.366.777.140	- Sekolah	-	72 Sekolah	2.017.940.600	- Sekolah	-	- Sekolah	-	- Sekolah	-	- Sekolah	-	-	-	1,425.085.024	-	-	1,425.085.024	-	71	1,425.085.024	-	33	
1	01	02	2.01	22	Pengadaan Alat Praktis dan Peraga Siswa	11 Paket	3.066.210.000	4 Paket	2.478.007.500	6 Paket	2.062.350.000	- Paket	-	- Paket	-	- Paket	-	- Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.478.007.500	-	81	
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	1. Jumlah calon peserta didik yang diterima pada SD 2. Nilai rata-rata capaian kompetensi lulusan SD 3. Jumlah lulusan SD yang mampu menghafal minimal satu Juz Al Quran	9379 Siswa 70 KKM 521 Siswa	5.783.621.550	11 Siswa - KKM - Siswa	609.355.000 - -	4736 Siswa 232 Siswa 70 KKM	2.183.690.000 - -	1.123 Siswa - KKM - Siswa	518.000.000 - -	(0) Siswa - KKM - Siswa	(121.820.000)	-	-	-	-	-	1,123	396.180.000	24	18	-	-	1.005.535.000	-	17	
1	01	02	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah siswa yang mengikuti kompetisi Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SD	640 Siswa	811.729.800	9 Siswa	6.252.500	320 Siswa	235.156.550	- Siswa	-	- Siswa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.252.500	-	1
1	01	02	2.01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD yang disediakan	410 Orang	5.947.200.000	168 Orang	2.154.000.000	205 org	2.160.350.000	- Orang	-	- Orang	-	-	-	-	-	-	0	966.000.000	0	45	-	-	3.120.000.000	-	52	
1	01	02	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD yang mencapai standar kompetensi nasional	900 Orang	787.506.300	321 Orang	912.633.780	450 Orang	2.054.172.571	- Orang	-	- Orang	-	-	-	-	-	-	0	55.047.000	0	3	-	-	967.680.780	-	123	
1	01	02	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah SD yang berakreditasi A	92 Sekolah	66.000.000	- Sekolah	-	46 Sekolah	672.194.827	- Sekolah	-	- Sekolah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah dasar	Jumlah sekolah yang mendapatkan dana BOS SD	168 Sekolah	36.881.586.293	- Sekolah	-	355.437.000	25.616.612.000	- Sekolah	-	- Sekolah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	355.437.000	-	1	
1	01	02	2.02	2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase indikator SNP yang dipenuhi satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama	80 %	45.040.624.477	35 %	12.435.877.713	34.384.167.803	- %	-	380.371.000	- %	-	1.378.949.700	-	-	-	-	0	1.739.320.700	-	-	-	-	14.195.198.413	-	32	
1	01	02	2.02	02	Penambahan ruang kelas sekolah	Jumlah ruang kelas baru SMP yang dibangun	5 Ruang	2.483.742.000	2 Ruang	1.729.361.338	2 Ruang	1.102.175.000	- Ruang	-	- Ruang	-	-	-	-	-	-	0	84.659.700	2	8	-	-	1.814.021.038	-	73	
1	01	02	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah ruang sarana prasarana SMP dan penunjang lainnya yang dibangun	10 Ruang	4.003.180.682	2 Ruang	5.250.061.760	4 Ruang	6.502.051.781	0 Ruang	126.649.000	- Ruang	-	-	-	-	-	-	0	856.778.500	5	13	-	-	6.106.840.260	-	153	
1	01	02	2.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah ruang kelas SMP yang direhabilitasi	11 Ruang	3.118.815.400	5 Ruang	1.246.679.953	5 Ruang	2.807.672.000	0 Ruang	94.171.000	- Ruang	-	-	-	-	-	-	0	94.171.000	3	3	-	-	1.340.850.953	-	43	
1	01	02	2.02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah ruang sarana prasarana SMP dan penunjang lainnya yang direhabilitasi	11 Ruang	1.008.085.000	2 Ruang	855.012.812	7 Ruang	2.649.672.000	0 Ruang	107.551.000	- Ruang	-	-	-	-	-	-	0	107.551.000	4	4	-	-	962.563.812	-	95	
1	01	02	2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah ruang kelas SMP yang disediakan lima jenis mebel	31 Ruang	236.620.000	8 Ruang	1.295.732.950	15 Ruang	956.350.000	- Ruang	-	- Ruang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.295.732.950	-	548	
1	01	02	2.02	27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah SMP yang disediakan perlengkapan penunjang pendidikan	6 Sekolah	488.880.000	3 Sekolah	132.420.000	3 Sekolah	1.800.280.000	- Sekolah	-	- Sekolah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132.420.000	-	27	
1	01	02	2.02	28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah siswa yang disediakan perlengkapan siswa SMP	210 Siswa	297.990.000	17 Sekolah	20.000.000	5 Sekolah	99.450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	99.450.000	-	19	-	-	119.450.000	-	40	
1	01	02	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah SD yang disediakan biaya personil peserta didik/Dana Penunjang Pendidikan (DPP)	38 Sekolah	3.800.895.000	- Sekolah	-	182.652.000	1.232.331.410	- Sekolah	-	- Sekolah	-	-	-	-	-	-	2	339.400.000	10	28	-	-	522.052.000	-	14	
1	01	02	2.02	35	Pengadaan Alat Praktis dan Peraga Siswa	Jumlah alat praktis dan peraga siswa SMP yang disediakan	12 Paket	4.284.000.000	- Paket	-	6 Paket	1.154.280.000	- Paket	-	- Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	1. Jumlah calon peserta didik yang diterima pada SMP 2. Nilai rata-rata capaian kompetensi lulusan SMP 3. Jumlah lulusan SMP yang mampu menghafal minimal dua Juz Al Quran	5973 Siswa 61 KKM 539 539	4.698.968.400	1.323 Siswa 5 KKM 0 %	1.064.902.000 - -	3016 Siswa 61 KKM 299 Siswa	2.015.094.920 - -	- Siswa - KKM - Bulan	- Siswa - KKM - Bulan	- Siswa - KKM - Bulan	- Siswa - KKM - Bulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.064.902.000	-	23	
1	01	02	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah siswa yang mengikuti kompetisi Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMP	656 Siswa	1.436.710.800	17 Siswa	12.286.000	328 Siswa	141.420.192	- Siswa	-	- Siswa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.286.000	-	1
1	01	02	2.02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP yang disediakan	78 Orang	1.058.400.000	24 Orang	312.000.000	39 Orang	360.350.000	5 Orang	50.000.000	0 Orang	92.000.000	-	-	-	-	-	6	142.000.000	15	39	-	-	454.000.000	-	43	
1	01	02	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SMP yang mencapai standar kompetensi nasional	400 Orang	401.507.400	20 Orang	7.554.400	200 Orang	1.538.212.500	- Orang	-	- Orang	-	-	-	-	-	-	5	35.310.500	2	2	-	-	42.864.900	-	11	
1	01	02	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah SMP yang berakreditasi A	8 Sekolah	76.983.900	- Sekolah	-	4 Sekolah	616.050.000	- Sekolah	-	- Sekolah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah sekolah yang mendapatkan dana BOS SMP	58 Sekolah	17.646.045.895	1 Sekolah	327.214.500	29 Sekolah	10.980.498.000	- Sekolah	-	- Sekolah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	327.214.500	-	2	
1	01	02	2.03	2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terakreditasi	50 %	3.272.013.889	35 %	6.196.148.247	9.920.665.300	- %	-	252.603.000	- %	-	32.992.300	-	-	-	-	0	285.595.300	-	-	-	-	6.481.743.547	-	198	
1	01	02	2.03	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah ruang kelas baru/ruang guru PAUD yang dibangun	7 Ruang	612.640.000	3 Ruang	283.865.000	4 Ruang	2.090.200.000	0 Ruang	49.500.000	- Ruang	-	-	-	-	-	-	0	49.500.000	2	2	-	-	333.365.000	-	54	
1	01	02	2.03	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah ruang sarana prasarana PAUD dan penunjang lainnya yang dibangun	2 Ruang	54.000.000	- Ruang	-	1 Ruang	1.341.725.597	- Ruang	-	- Ruang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.341.725.597	-	2.485
1	01	02	2.03	03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah ruang kelas/ruang guru satuan PAUD yang direhabilitasi	2 Ruang	274.439.800	- Ruang	-	69.700.000	762.379.000	- Ruang	-	- Ruang	-	-	-	-	-	-	0	199.054.000	-	26	-	-	268.754.000	-	98	
1	01	02	2.03	04	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah ruang sarana prasarana PAUD dan penunjang lainnya yang direhabilitasi	2 Ruang	194.400.000	- Ruang	-	1 Ruang	-	- Ruang	-	- Ruang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	01	02	2.03	07	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah ruang kelas PAUD yang disediakan lima jenis mebel	2 Ruang	135.790.000	- Ruang	-	1 Ruang	724.350.000	- Ruang	-	- Ruang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	01	02	2.03	10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah siswa PAUD yang disediakan perlengkapan siswa	192 Siswa	71.000.000	- Siswa	-	96 Siswa	45.000.000	- Siswa	-	- Siswa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	01	02	2.03	11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah satuan PAUD yang disediakan biaya personil peserta didik/penunjang pendidikan	14 Satuan	662.760.000	4 Satuan	567.347.000	7 Satuan	364.191.300	- Satuan	-	- Satuan	-	-	-	-	-	-	0	13.841.300	0	4	-	-	581.188.300	-	88	
1	01	02	2.03	12	Pengadaan Alat Praktis dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Permainan Edukasi (APE) yang disediakan	4 Set	312.055.800	2 Set	317.010.650	2 Set	115.350.000	- Set	-	- Set	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	317.010.650	-	102	
1	01	02	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	1. Jumlah satuan PAUD yang melaksanakan Pembelajaran sesuai kurikulum 2013 2. Jumlah jenis lomba dan kreatifitas siswa PAUD	305 Satuan 8 Jenis	95.180.200	- Satuan - Jenis	- -	155 Satuan 4 Jenis	700.000 -	- Satuan - Jenis	- -	- Satuan - Jenis	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	01	02	2.03	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD yang disediakan	14 Orang	100.800.000	5 Orang	22.000.000	7 Orang	48.350.000	1 Orang	10.000.000	1 Orang	12.000.000	-	-	-	-	-	2	22.000.000	28	46	-	-	44.000.000	-	44	
1	01	02	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD yang sesuai kompetensi	300 Orang	214.348.680	80 Orang	26.000.000	150 Orang	614.200.000	- Orang	-	- Orang	-	-	-	-	-	-	0	1.200.000	0	0	-	-	27.200.000	-	13	
1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah satuan PAUD yang diakreditasi	40 Satuan	251.399.400	1 Satuan	4.500.000	20 Satuan	1.225.000	- Satuan	-	- Satuan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.500.000	-	2	

Unsur	Kode	Unsur	Bd. Unsur	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Pemutakhiran)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJM Kota Banda Aceh pada Tahun 22- 222 Kepmendagri 5		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 221		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 222)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 221								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 221 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD OPD s/d Akhir Tahun 221		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi RPJMD OPD s/d Tahun 222 (%)		OPD Penanggung Jawab				
									Target	Rp	Kinerja	Rp	Target	Rp	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 221		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
															Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp									
1	02	01	2	06	05		Penyediaan Barang Cekikan dan Pengandaan	Jumlah jenis cekikan dan pengandaan yang disediakan	26 jenis	130.200.000	8 Jenis	35.147.585	13 Jenis	63.875.503	Jenis		1 Jenis	23.784.297								1	23.784.297	5	37	58.931.882	45		
1	02	01	2	06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan	30 laporan	735.000.000	4 laporan	30.898.200	15 Laporan	132.291.987	laporan		1 laporan	31.050.400								1	31.050.400	7	23	61.948.600	8		
1	02	01	2	07	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan	100 %	1.726.032.731	- %	-	-	-	%		- %	-							-	-	-	-	-	-			
1	02	01	2	07	02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/Operasional yang disediakan	2 unit	807.167.231	- unit	-	-	-	unit		- unit									-	-	-	-	-			
1	02	01	2	07	10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis sarana dan prasarana gedung kantor yang disediakan	10 unit	183.865.500	- unit	-	-	-	unit		- unit									-	-	-	-	-			
1	02	01	2	07	06		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dan Mesin lainnya	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang disediakan	14 unit	735.000.000	- unit	-	252.224.836	-	unit		- unit									-	-	-	-	-			
1	02	01	2	08	208		Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3.195.107.278	75 %	647.708.852	1.261.173.964	%	153.336.147	0 %	288.710.093		0	444.046.240						0	444.046.240	-	-	1.091.755.092	34		
1	02	01	2	08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	24 bulan	2.167.882.075	9 bulan	584.507.352	12 bulan	1.050.400.000	3 bulan	155.336.147	0 bulan	262.507.429		3	417.943.576		29	40			3	417.943.576	29	40	1.002.350.928	46	
1	02	01	2	08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	24 bulan	1.027.425.273	9 bulan	63.201.500	12 bulan	210.773.964	bulan		0 bulan	26.202.664		0	26.202.664		3	12			0	26.202.664	3	12	89.404.164	9	
1	02	01	2	09	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.054.678.926	15 %	293.150.400	801.650.894	%	-	1 %	195.901.917		1	195.901.917						1	195.901.917	-	-	491.052.317	12		
1	02	01	2	09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pelek, dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan kendaraan Dinas/Operasional yang dilaksanakan	426 unit	2.682.057.827	155 unit	293.390.400	588.913.800	unit		1 unit	181.475.578		1	181.475.578		-	31			1	181.475.578	-	31	474.865.978	18		
1	02	01	2	09	05		Pemeliharaan Mebel	Jumlah pemeliharaan meubelair yang dilaksanakan	26 unit	168.000.000	- unit	-	213 Kali	-	unit		- unit									-	-	-	-	-			
1	02	01	2	09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin pelengkap gedung kantor yang dilaksanakan	24 unit	291.870.929	0 unit	1.760.000	12 bulan	48.626.694	unit		8 unit	14.426.339		8	14.426.339		68	30			8	14.426.339	68	30	16.186.339	6	
1	02	01	2	09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor yang dilaksanakan	2 unit	785.583.725	- unit	-	1 Kali	164.110.400	unit		-									-	-	-	-	-			
1	02	01	2	09	10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan perlengkapan Gedung kantor yang dilaksanakan	6 unit	127.166.445	- unit	-	-	-	unit		-									-	-	-	-	-			
1	02	02					PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PERSENTASE PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT SESUAI STANDAR	90 %	82.214.370.741	32 %	17.838.145.935	42.203.643.637	-	4.249.845.413	4.249.845.413	0	4.249.845.413	22.087.991.348	22.087.991.348	27	kesehatan											
1	02	02	2	01			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UPK Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penyediaan Fasilitas Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat sesuai standar	90 %	21.516.363.278	21 %	5.617.269.677	11.615.430.312	%	-	0 %	1.093.536.417		0	1.093.536.417						0	1.093.536.417	-	-	6.710.806.094	31		
1	02	02	2	01	02		Pembangunan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun sesuai dengan regulasi pemerintah	2 Puskesmas	709.270.567	1 Puskesmas	8.947.079.494		Puskesmas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.947.079.494	1.263		
1	02	02	2	01	03		Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas kesehatan lainnya yang dibangun sesuai dengan regulasi pemerintah	2 Faskes	63.000.000	- Faskes	-	1 faskes	2.916.600.720	Faskes		- Faskes	890.031.700		-	890.031.700		-	31			-	-	890.031.700	1.413			
1	02	02	2	01	09		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang diperbaiki dan dipelihara akibat kerusakan sebagian komponen bangunan sesuai dengan regulasi pemerintah	10 Puskesmas	4.200.000.000	- Puskesmas	-	1 Puskesmas	370.000.000	Puskesmas		- Puskesmas									-	-	-	-	-			
1	02	02	2	01	10		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas kesehatan lainnya yang diperbaiki dan dipelihara akibat kerusakan sebagian komponen bangunan sesuai dengan regulasi pemerintah	2 Faskes	10.500.000	- Faskes	-	1 unit	220.000.000	Faskes		- Faskes									-	-	-	-	-			
1	02	02	2	01	12		Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah jenis sarana faskes yang disediakan	2 jenis	10.500.000.000	- jenis	-	1 Faskes	1.247.850.000	jenis		- jenis	41.525.000		-	41.525.000		-	3			-	-	41.525.000	0			
1	02	02	2	01	13		Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah jenis prasarana pendukung faskes yang disediakan	10 jenis	1.155.000.000	3 jenis	1.572.016.332	5 Jenis	2.407.531.500	jenis		0 jenis	106.881.500		0	106.881.500		1	4			0	106.881.500	1	4	1.678.897.832	145	
1	02	02	2	01	14		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah jenis alat kesehatan dan alat penunjang medis yang disediakan	120 jenis	1.219.965.503	41 jenis	1.684.585.985	15 jenis	1.748.005.000	jenis		- jenis									-	-	-	-	1.684.585.985	138		
1	02	02	2	01	15		Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Alat kalibrasi yang disediakan dan dipelihara	100 unit	6.245.742	- Bulan	-	6.245.742	Bulan		- Bulan										-	-	-	-	-			
1	02	02	2	01	16		Pengadaan Obat, Vaksin	Persentase pengadaan obat sesuai dgn RKO (Rencana Kebutuhan Obat) Puskesmas	95 %	178.500.000	74 %	1.680.293.720	95 %	1.578.135.437	%		0 %	9.526.750		0	9.526.750		0	1			0	9.526.750	0	1	1.689.820.470	947	
1	02	02	2	01	17		Pengadaan Bahan Habis Pakai	Persentase pengadaan bahan medis habis pakai sesuai dgn RKBMP (Rencana Kebutuhan Bahan Medis Habis Pakai) Puskesmas	95 %	165.227.208	85,38 %	690.373.640	95 %	986.620.313	%		0 %	2.310.250		0	2.310.250		0	0			0	2.310.250	0	0	692.683.890	413	
2	02	02	2	01	21		Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya						13 Jenis	104.441.600	Bulan		- Bulan	43.261.217		-	43.261.217		-	41			-	-	43.261.217	-			
1	02	02	2	01	04		Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah rumah dinas tenaga kesehatan yang dibangun sesuai dengan regulasi pemerintah	2 unit	63.000.000	- unit	-	-	-	unit		- unit									-	-	-	-	-			
1	02	02	2	01	06		Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dikembangkan sesuai dengan regulasi pemerintah	2 Puskesmas	63.000.000	- Puskesmas	-	-	-	Puskesmas		- Puskesmas									-	-	-	-	-			
1	02	02	2	01	07		Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang dikembangkan sesuai dengan regulasi pemerintah	2 Faskes	63.000.000	- Faskes	-	-	-	Faskes		- Faskes									-	-	-	-	-			
1	02	02	2	01	11		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah rumah dinas tenaga kesehatan yang diperbaiki dan dipelihara akibat kerusakan sebagian komponen bangunan sesuai dengan regulasi pemerintah	2 unit	10.500.000	- unit	-	-	-	unit		- unit									-	-	-	-	-			
1	02	02	2	01	18		Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah jenis sarana yang dipelihara fungsinya sebagai pendukung pelayanan kesehatan sesuai dengan regulasi pemerintah	4 jenis	630.000.000	- jenis	-	-	-	jenis		- jenis									-	-	-	-	-			

Unsur	Kode	Bid. Unsur	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Pemutakhiran)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJM Kota Banda Aceh pada Tahun 22-222 Kepmendagri 5		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 221		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 222)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 221				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 221		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 221 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD OPD sid Akhir Tahun 221		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi RPJMD OPD sid Tahun 222 (%)		OPD Penanggung Jawab						
								Target	Rp	Kinerja	Rp	Target	Rp	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
														Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp													
1	02	02	2.01	19		Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah jenis prasarana yang dipelihara fungsinya sebagai pendukung pelayanan kesehatan sesuai dengan regulasi pemerintah	10 jenis	806.400.000	- jenis	-	jenis	- jenis																					
1	02	02	2.01	20		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Perunjang Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah jenis Alat Kesehatan/Alat Perunjang Medis yang dipelihara fungsinya secara rutin dan berkala sesuai dengan regulasi pemerintah	26 jenis	1.680.000.000	- jenis	-	12 Jenis	30.000.000	jenis	- jenis																			
1	02	02	2.02			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penyediaan layanan UKM dan UKP Primer dan Rujukan sesuai standar	80 %	58.072.842.655	20 %	11.864.423.008	%	-	0 %	3.156.308.996																			
1	02	02	2.02	01		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	12.288 Bumil	467.500.000	3.465 Bumil	156.071.750	5556 ibuhamil	646.124.452	Bumil	1 Bumil	125.424.004																		
1	02	02	2.02	02		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	11.728 Bulin	6.317.098.182	1.384 Bulin	353.630.000	5304 buhamil	1.872.654.165	Bulin	2 Bulin	714.445.000																		
1	02	02	2.02	03		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal esensial sesuai standar	11.170 bayi	230.200.000	650 bayi	8.400.000	5051 bayi	53.078.900	bayi	1 bayi	11.200.000																		
1	02	02	2.02	04		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah anak balita usia 1-59 bulan yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar bagi	35.844 Balita	174.526.600	7.918 Balita	91.162.500	18856 balita	375.218.944	Balita	1 Balita	73.687.500																		
1	02	02	2.02	05		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	18.898 Anak	81.900.000	2.451 Anak	62.382.600	9449 anak	472.426.914	Anak	1 Anak	60.200.000																		
1	02	02	2.02	06		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah warga negara usia 15 tahun sampai 59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	382178 orang	149.700.001	- orang	-	200947 orang	54.827.398	orang	- orang	118.000																		
1	02	02	2.02	07		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar	27.976 Lansia	125.172.761	7.083 Lansia	127.762.500	20638 Lansia	154.196.533	Lansia	0 Lansia	33.000.000																		
1	02	02	2.02	08		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	99642 orang	145.499.999	4.244 orang	3.000.000	45260 orang	51.638.033	orang	2 orang	4.775.000																		
1	02	02	2.02	09		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah penderita diabetes mellitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	14730 orang	145.500.001	397 orang	2.100.000	70002 orang	224.615.732	orang	0 orang	875.000																		
1	02	02	2.02	10		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	1520 orang	96.776.236	197 orang	24.750.000	592 orang	142.835.200	orang	1 orang	28.606.500																		
1	02	02	2.02	11		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga Tuberkulosis (TB) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	876 orang	258.862.726	408 orang	1.564.100.000	2409 orang	1.839.617.524	orang	0 orang	9.000.000																		
1	02	02	2.02	12		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	22918 orang	258.862.726	3.511 orang	29.400.000	5952 orang	97.070.500	orang	0 orang	13.800.000																		
1	02	02	2.02	13		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi			100 %	1.922.035.080	Bulan	- Bulan	453.853.000																				
1	02	02	2.02	15		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase masyarakat mendapatkan pelayanan gizi sesuai umur dan status penyakit	90 %	406.610.942	47 %	320.920.200	90 %	1.187.083.553	%	1 %	228.410.000																		
1	02	02	2.02	16		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pembinaan Kesehatan Keselamatan Kerja (K3) dan Olah Raga	4 kegiatan	73.500.000	- kegiatan	16.300.000	2 Kegiatan	471.778.750	kegiatan	1 kegiatan	21.268.000																		
1	02	02	2.02	17		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Tempat - tempat Fasilitas Umum (TFU) yang dilakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (KL) dan memenuhi syarat	100 TFU	73.500.000	0 TFU	112.887.500	50 TFU	923.804.986	TFU	3 TFU	294.207.500																		
1	02	02	2.02	18		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Promosi Kesehatan yang dilaksanakan			Kali	100 Kali	1.476.711.295	Kali	- Kali	232.357.500																			
1	02	02	2.02	20		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase penanganan kasus penyakit berendemisial KLB	100 %	217.600.000	- %	81.000.000	100 %	129.298.120	%	0 %	14.500.000																		
1	02	02	2.02	22		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jawa dan NAPZA	Persentase penanganan Orang Dengan Gangguan Napza	80 %	96.776.236	- %	34.600.000	100 kali	226.291.200	%	2 %	53.400.000																		
1	02	02	2.02	23		Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah pelaksanaan pelayanan kesehatan khusus level 1	150 kali	1.484.700.000	43 kali	289.380.005	75 kali	285.408.200	kali	0 kali	123.442.092																		
1	02	02	2.02	25		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	Persentase Kasus pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak menular yang ditangani	90 %	1.315.804.999	48 %	6.964.485.153	90 %	2.496.803.430	%	0 %	413.033.500																		
1	02	02	2.02	26		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah kunjungan peserta JKN di puskesmas dan jaringannya	1821516 Kunj	44.756.673.358	947 %	14.668.100	910758 Orang	14.102.979.157	%	- %	-																		
1	02	02	2.02	28		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Infeksi KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Puskesmas yang menghasilkan dokumen Pengelolaan Manajemen Puskesmas			Puskesmas	100 kali	24.247.500	Puskesmas	- Puskesmas	-																			
1	02	02	2.02	29		Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Gampong yang memenuhi kriteria sehat gemilang	20 Gampong	210.000.000	1 Gampong	30.977.500	10 Gampong	149.998.800	Gampong	- Gampong	-																		
1	02	02	2.02	33		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang mendapatkan pembinaan dalam pemenuhan standar pengelolaan keuangan BLUD	2 puskesmas	336.000.000	0 puskesmas	257.625.850	1 Puskesmas	543.169.870	puskesmas	1 puskesmas	228.706.400																		
1	02	02	2.02	34		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah pelayanan pemerataan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan	24 bulan	236.647.925	- 0%	-	-	-	Bulan	- Bulan	-																		
1	02	02	2.02	35		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah puskesmas terakreditasi				50 Faskes	377.813.896	Bulan	- Bulan	18.000.000																			
1	02	02	2.02	36		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Irtukan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase pelacakan dan penanganan kasus KIPPI dan Pemberian Obat Massal	85 %	187.429.962	- %	-	85 %	131.399.960	%	- %	-																		
1	02	02	2.02	37		Pelaksanaan Kevespadaan Diri dan Respon Wabah	Cakupan Pencanangan Kegawatdaruratan Kesehatan Masyarakat	100 %	226.000.000	- %	-	100 %	46.179.733	%	- %	-																		
1	02	02	2.03			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase terseleenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi	100 %	577.500.000	- 0%	-	22.707.640	Bulan	- Bulan	-																			
1	02	02	2.03	01		Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah data dan sistem informasi kesehatan yang dipublikasi dan dihasilkan	2 buku	52.500.000	- buku	-	1 Buku	22.707.640	buku	- buku	-																		

Unsur	Kode	Bid. Unsur	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Pemutakhiran)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJM Kota Banda Aceh pada Tahun 22- 222 Kemandagri 5		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 21		Target Kinerja dan Anggaran RKPJ Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 22)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 221				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 221		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPJ Tahun 221 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD OPD sid Akhir Tahun 21		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi RPJMD OPD sid Tahun 22 (%)		OPD Penanggung Jawab				
								Target	Rp	Kinerja	Rp	Target	Rp	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
														Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp											
1	02	02	2.03	03		Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang diadakan	6 unit	525.000.000	- unit	-	unit	-	- unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	02	02	2.04			Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki izin operasional serta tata kelola terhadap jaminan kesehatan masyarakat	100 %	2.047.664.808	- 0%	356.453.250	84.196.860	Bulan	-	- Bulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17		
1	02	02	2.04	02		Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan dan pengawasan Fasilitas pelayanan kesehatan	50 Faskes	346.664.808	- Faskes	-	25 Faskes	54.518.464	Faskes	-	- Faskes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	02	02	2.04	03		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan*	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki izin operasional serta tata kelola terhadap Jaminan kesehatan masyarakat	2 puskesmas	1.701.000.000	1 puskesmas	356.453.250	5 Puskesmas	29.678.396	puskesmas	-	- puskesmas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21		
1	02	03				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	PERSENTASE PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA KESEHATAN	100 %	18.860.278.011	- %	-	718.438.535	-	-	-	-	203.397.094	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	kesehatan	
1	02	03	2.02			Perencanaan Kebutuhan dan Penyelenggaraan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100 %	18.860.278.011	- %	-	718.438.535	%	-	- %	-	203.397.094	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
1	02	03	2.02	02		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Puskesmas yang menghasilkan dokumen Pengelolaan -	-	-	-	-	50 Rasio	569.026.500	Bulan	-	- Bulan	-	203.397.094	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	02	03	2.02	03		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan*	Managemen Puskesmas	22 kali	18.860.278.011	- kali	-	11 Kali	149.412.035	kali	-	- kali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	02	03	2.03			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang mengikuti kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan kompetensi Teknis	-	-	-	-	-	-	Bulan	-	- Bulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	02	03	2.03	01		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang mengikuti kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan kompetensi Teknis	-	-	-	-	-	-	Bulan	-	- Bulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	02	04				PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	MANAJEMEN PUSKESMAS	85 %	459.990.000	54 %	198.590.250	309.973.190	-	-	-	-	36.128.970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	kesehatan	
1	02	04	2.01			Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefermasian, Alkes dan Optik yang memiliki izin operasional	75 %	113.400.000	16 %	28.073.250	50.365.368	%	-	0 %	3.925.000	0	3.925.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28		
1	02	04	2.01	01		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Sarana Pelayanan kefermasian yang dilakukan pengawasan terkait perizinan	198 sarana	64.260.000	18 sarana	24.773.250	99 Sarana	29.350.000	sarana	0 sarana	3.925.000	0	3.925.000	0	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45		
1	02	04	2.01	02		Penyediaan dan Pengendalian Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Terlaksananya Simbingan Teknis bagi pengelola/Penanggung Jawab Sarana Pelayanan Kefermasian di wilayah kota Banda Aceh	198 sarana	49.140.000	13 sarana	3.300.000	99 Sarana	21.015.368	sarana	- sarana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7		
1	02	04	2.02			Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Persentase Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 yang Memiliki Sertifikat Produksi	80 %	21.000.000	- 0%	-	-	Bulan	-	- Bulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	02	04	2.02	01		Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Persentase Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang memiliki sertifikat produksi	80 %	10.500.000	- %	-	-	%	-	- %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	02	04	2.02	02		Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Persentase Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang telah diperiksa	80 %	10.500.000	- %	-	-	%	-	- %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	02	04	2.03			Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Industri Rumah Tangga yang memiliki Sertifikat Izin Produksi Pangan	100 %	94.500.000	81 0%	91.542.000	124.630.720	Bulan	-	0 Bulan	27.414.470	0	27.414.470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126		
1	02	04	2.03	01		Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga yang memiliki sertifikat produksi	160 PIRT	94.500.000	65 PIRT	91.542.000	80 RT	124.630.720	PIRT	0 PIRT	27.414.470	0	27.414.470	0	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126		
1	02	04	2.04			Penerbitan Sertifikat Laitu Higien Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang memiliki Sertifikat Laitu Higien Sanitasi	85 %	73.500.000	- 0%	-	12.208.430	Bulan	-	- Bulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	02	04	2.04	01		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laitu Higien Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Tempat Pengolahan Makanan (TPM) yang dilakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL)	140 TPM	73.500.000	- TPM	-	70 TPM	12.208.430	TPM	-	- TPM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Unsur	Kode			Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Pemutakhiran)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJM Kota Banda Aceh pada Tahun 22- 222 Kependagri 5		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 21		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 22)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 221				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 21		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 21 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD OPD sid Akhir Tahun 21		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi RPJMD OPD sid Tahun 22 (%)		OPD Penanggung Jawab			
	Bid. Unsur	Program	Kegiatan			Sub Kegiatan	Target	Rp	Kinerja	Rp	Target	Rp	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja		Rp	Kinerja	Rp
													Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp									
1	02	04	2.05		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan yang memiliki Stiker Pembinaan	85 %	94.500.000	- 0%	-	13.575.550	Bulan	-	-	Bulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	02	04	2.05	01	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Makanan jajanan (berikan Stiker Inspeksi Kesehatan Lingkungan (KL) Makanan Jajanan	85 %	94.500.000	- %	-	13.575.550	%	-	-	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang telah dilakukan Pemeriksaan Post Market	90 %	63.000.000	25 %	78.975.000	100.193.122	%	-	0 %	4.787.500	0	4.787.500	-	-	0	4.787.500	-	-	-	-	83.762.500	133		
1	02	04	2.06	01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan - Minuman Industri Rumah Tangga yang Sederet dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Terlaksananya Bimbingan teknis bagi pelaku usaha Perusahaan Industri Rumah Tangga (PRT) di wilayah Kerja Kota Banda Aceh	160 PRT	52.500.000	39 PRT	78.975.000	100.193.122	PRT	-	0 PRT	4.787.500	0	4.787.500	7	4	0	4.787.500	7	4	0	4.787.500	83.762.500	160		
1	02	04	2.06	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Persentase lemuan pada PRT yang ditingkatkan	80 %	10.500.000	- %	-	-	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG PROMOTIF DAN PREVENTIF	100 %	3.194.260.713	29 %	217.200.000	2.058.956.175	-	-	126.520.000	-	-	126.520.000	-	-	126.520.000	-	-	-	-	343.720.000	11	keehatan		
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pelaksanaan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100 %	1.040.729.124	32 %	217.200.000	1.849.724.821	-	-	0 %	86.320.000	0	86.320.000	-	-	86.320.000	-	-	-	-	303.520.000	29			
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pembentukan dan penguatan forum pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	4 kali	1.040.729.124	1 kali	217.200.000	1.849.724.821	0 kali	86.320.000	0	86.320.000	0	86.320.000	20	5	86.320.000	20	5	0	86.320.000	303.520.000	29			
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100 %	2.153.531.589	- 0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	02	05	2.02	01	Penyenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Sehat dan Sehat	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka promosi kesehatan dan peningkatan PHBS	6 kali	2.153.531.589	- kali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumbu Daya Masyarakat (UKEM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pelaksanaan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	38 %	-	209.231.354	-	-	40.200.000	-	-	40.200.000	-	-	40.200.000	-	-	-	-	40.200.000	-	-	-	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumbu Daya Masyarakat (UKEM)	Jumlah Puskesmas yang mengahsilkan dokumen Pengelolaan Manajemen Puskesmas	4	-	10 kali	209.231.354	209.231.354	10 kali	40.200.000	40.200.000	40.200.000	40.200.000	40.200.000	19	19	40.200.000	19	19	0	40.200.000	40.200.000	-	-		
1	02				RSU MEURAXA		485.085.100.507	0	47.192.978.347	130.900.740.300	4.029.227.752	7.200.411.985	4029227752	51.221.806.099	11	RSU Meuraxa													
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	PERSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG PERANGKAT DAERAH	100 %	52.135.828.555	121 %	19.101.039.918	17.394.508.113	4.029.227.752	5.568.922.595	9.598.150.347	55	keehatan													
1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Eevaluasi Kinerja terhadap program/kegiatan kesehatan	100 %	52.156.360.430	- %	1.550.500	550.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.550.500	-	-	-	-	1.550.500	0			
1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang dihasilkan	4 Dokumen	20.531.875	- Dokumen	1.550.500	550.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.550.500	-	-	-	-	1.550.500	8			
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Administrasi Keuangan RSUD Meuraxa	100 %	52.135.828.555	61 %	19.101.039.918	16.844.508.113	4.029.227.752	0 %	5.568.922.595	0	9.598.150.347	-	-	28.699.190.265	55	28.699.190.265	-	-	-	28.699.190.265	55			
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan Aparatur yang disediakan	2 Tahun	50.427.828.555	9 Bln	18.846.539.918	12 Bulan	16.246.848.113	3 bulan	4.015.527.752	0 Bln	5.403.522.595	3	9.419.050.347	27	58	28.265.590.265	27	58	28.265.590.265	56				
1	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Waktu Jasa Tenaga Administrasi Pendukung Pelaksanaan Tugas ASN yang disediakan	2 Tahun	1.707.999.999	6 Bln	254.500.000	12 Bulan	597.660.000	3 bulan	13.700.000	1 Bln	165.400.000	4	179.100.000	30	30	433.600.000	30	30	433.600.000	25				
1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.517.056.250	- 0%	-	-	bulan	-	-	Bulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan ambulance/ mobil jenazah yang disediakan	1 unit	500.000.000	- unit	-	-	bulan	-	-	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	01	01	2.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah peralihan barang yang disediakan	2 peralihan	1.017.056.250	- peralihan	-	-	bulan	-	-	peralihan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.130.062.500	- 0%	-	-	bulan	-	-	Bulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu jasa komunikasi, SDA dan listrik yang disediakan	24 bin	1.130.062.500	- bin	-	-	bulan	-	-	bin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	02	01			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PERSENTASE PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100 %	432.949.271.932	23 %	28.091.538.429	113.106.232.187	-	-	1.711.489.400	-	-	1.711.489.400	-	-	1.711.489.400	-	-	-	-	29.803.027.829	7	keehatan		
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100 %	31.482.523.910	26 %	28.091.538.429	37.271.418.078	bulan	-	0 %	1.711.489.400	0	1.711.489.400	-	-	1.711.489.400	-	-	-	-	29.803.027.829	95			
1	02	02	2.01	01	Pembangunan Rumah Sakit Beresita Sarana Dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah sarana rumah sakit yang dibangun	13 Unit	3.674.171.922	- Unit	16.410.427.850	7 Unit	20.238.568.690	bulan	-	0 Unit	1.711.489.400	0	1.711.489.400	1	8	18.121.917.250	1	8	18.121.917.250	493				
1	02	02	2.01	03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Instalasi Pengolahan limbah rumah sakit yang dibangun	unit	-	- 0%	-	-	bulan	-	-	Bulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah jenis alat rumah sakit yang disediakan	88 Jenis	18.315.826.988	23 Jenis	5.412.932.240	14.032.849.388	45 jenis	14.032.849.388	bulan	-	Jenis	-	-	-	-	5.412.932.240	-	-	-	5.412.932.240	30			
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat/Obat	Jumlah jenis obat-obatan yang disediakan	1.100 Jenis	9.492.525.000	275 Jenis	6.268.177.339	550 Jenis	3.000.000.000	bulan	-	Jenis	-	-	-	-	-	6.268.177.339	-	-	-	6.268.177.339	66			

Usman	Kode	Bid. Usman	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Pemutakhiran)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJM Kota Banda Aceh pada Tahun 22-222 Kepmendagri 5		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 221		Target Kinerja dan Anggaran RKPJ Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 222)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 221								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD OPD sid Akhir Tahun 221 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi RPJMD OPD sid Tahun 222 (%)		OPD Penanggung Jawab						
								Target	Rp	Kinerja	Rp	Target	Rp	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 221		Kinerja	Rp		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
														Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25								
1	02	02	2.02			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UMK dan UMP-Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Layanan Kesehatan Rujukan Tingkat Daerah	100 %	401.466.748.042	25 %	-	75.834.814.109	bulan	-	- %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
1	02	02	2.02	3.02		Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah waktu jasa layanan badan layanan umum daerah (BLUD)	24 Bln	401.466.748.042	3 Bulan	-	12 Bulan	75.834.814.109	bulan	-	Bulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
1	03					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			240.099.896.301			37.547.837.178																				
1	03					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			240.099.896.301	0	0	119.713.225.960																				
1	03	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	PERSENTASE PEMENUHAN KESUTUNAN PENUNJANG PERANGKAT DAERAH	100 %	25.483.236.598	98 %	9.275.433.335	11.510.036.792																				
1	03	01	2.01			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi OPD yang tersusun	100 %	21.000.000	- %	-	32.276.555		1.130.000	- %	17.700.000																
1	03	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	4 Doku men	21.000.000	- Doku men	-	2 Dokuman	32.276.555	- dokumen	1.130.000	- Doku men	17.700.000		1	18.830.000	50	58		18.830.000								
1	03	01	2.02			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	100 %	19.728.293.598	97 %	8.660.759.644	9.745.971.744			0 %	2.083.643.283																
1	03	01	2.02	01		Penyediaan Gaj dan Tunjangan ASN	Jumlah waktu pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang disediakan	24 bulan	16.467.865.098	11 bulan	7.108.072.144	12 Bulan	8.015.748.744	3 bulan	1.639.944.617	0 bulan	1.746.521.283		3	3.386.465.900	27	42		10.494.538.044								
1	03	01	2.02	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah waktu jasa tenaga pendukung administrasi/kelemb perkarabon yang disediakan	24 bulan	3.260.428.500	12 bulan	1.352.687.500	12 Bulan	1.730.223.000	3 bulan	333.352.500	0 bulan	337.122.000		3	670.474.500	27	39		2.023.162.000								
1	03	01	2.05			Kegiatan Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	100 %	247.500.000	- %	-	14.050.000			- %	9.150.000																
1	03	01	2.05	02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserje Ahbz Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserje/kelemb yang disediakan	168 stel	247.500.000	- stel	-	252 Stel	14.050.000	- stel	9.150.000																	
1	03	01	2.06			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi umum	100 %	1.057.433.000	29 %	66.649.600	214.756.403			0 %	9.847.240																
1	03	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	24 jenis	36.303.000	4 jenis	3.960.000	12 Bulan	9.079.390	- jenis	-																	
1	03	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cukupan dan Pengandaan	Jumlah jenis barang okutan dan pengandaan yang disediakan	18 jenis	139.755.000	2 jenis	6.891.000	9 jenis	38.726.437	1 jenis	9.847.240																	
1	03	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang diselesaikan	68 laporan	881.375.000	9 laporan	55.798.600	35 Laporan	166.950.576	5 Laporan	66.950.576	- laporan	-															
1	03	01	2.07			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	800.000.000	- %	-	173.741.024			- %	-																
1	03	01	2.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	16 Unit	600.000.000	- Unit	-	8 unit	173.741.024	- Unit	-																	
1	03	01	2.07	11		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	6 Unit	200.000.000	- Unit	-	-		- Unit	-																	
1	03	01	2.08			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	1.703.840.000	86 %	375.213.791	645.735.418			0 %	130.429.754																
1	03	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik	24 bulan	957.600.000	11 bulan	303.844.791	12 bulan	488.880.000	3 bulan	49.094.168	0 bulan	91.611.598															
1	03	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	24 bulan	746.240.000	9 bulan	71.369.000	12 bulan	156.855.418	1 bulan	38.818.156																	
1	03	01	2.09			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.925.170.000	24 %	372.810.300	683.505.648			1 %	205.143.400																
1	03	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit pemeliharaan, pembayaran pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	552 Unit	1.812.400.000	4 Unit	372.810.300	276 unit	662.883.042	15 unit	19.500.000	1 Unit	202.091.400															
1	03	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	104 Unit	112.770.000	- Unit	-	52 unit	20.622.606	-	-	3.052.000																
1	03	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhab	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
1	03	02				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	PERSENTASE CAKUPAN LUAS AREA PENGENDALIAN BANJIR	94 %	7.302.379.144	95 %	10.226.651.000	624.815.472			107.363.500																	
1	03	02	2.01			Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Meningkatnya Kapasitas Pengendalian Banjir	97,00 %	3.336.102.637	29 %	69.155.000	624.815.472			107.363.500	0 %	23.625.000															
1	03	02	2.01	26		Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dilakukan Rehabilitasi	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dilakukan Rehabilitasi	30 Unit	2.738.242.500	2 Unit	25.125.000	2 Dokuman	221.001.986	1 dokumen	32.101.000	1 Unit	23.625.000															
1	03	02	2.01	55		Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang dioperasikan	20 Unit	597.860.137	3 Unit	44.030.000	1000 M	403.813.486	10 m	75.262.500	-	-															
1	03	02	2.02			Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Persentase meningkatnya pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi	96,50 %	3.966.276.507	77 %	10.157.496.000	-		-	-	-																
1	03	02	2.02	11		Peningkatan Jaringan Irigasi Tambak	Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Dilakukan Peningkatan	4 Km	3.966.276.507	2 Km	10.157.496.000	-		-	-	-																
1	03	03				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PERSAMPAHAN REGIONAL	PERSENTASE MENINGKATNYA LAYANAN AIR MINUM	90 %	42.389.756.108	86 %	18.396.525.837	408.240.009			371.340.000																	
1	03	03	2.01			Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Meningkatnya Layanan Air Minum	94,00 %	42.389.756.108	5.128 %	18.396.525.837	408.240.009			371.340.000	-	-															
1	03	03	2.01	01		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	10 Doku men	1.688.685.600	2 Doku men	672.585.000	3 Dokuman	36.900.009	-	-	-																
1	03	03	2.01	03		Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Panjang SPAM Jaringan Perpipaan yang Dibangun	19,840 M	40.701.070.508	1.005 M	17.723.940.837	-		-	-	-																

Unsur	Kode	Unsur	Bd. Unsur	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Penultahiran)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJM Kota Banda Aceh pada Tahun 22-222 Kepmendagri 5		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 221		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 222)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 221								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 221 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKP Tahun 221 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD OPD sid Akhir Tahun 221		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi RPJMD OPD sid Tahun 222 (%)		OPD Penanggung Jawab
									Target	Rp	Kinerja	Rp	Target	Rp	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 221		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 221 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD OPD sid Akhir Tahun 221		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi RPJMD OPD sid Tahun 222 (%)				
															Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	03	03	201	06			Penyediaan Sarana Persampahan	Jumlah Sarana Persampahan yang Tersedia				1	Dokumen	371.340.000	1	dokumen	371.340.000	-	Bulan	-					1	371.340.000	100	100			371.340.000	-	
1	03	04					PROGRAM PENGLOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	PERSENTASE TERSEDIANYA SARAN DAN PRASARANA PENGOLOAN PERSAMPAHAN	91,97 %	1.440.756.325	34 %	196.131.000	4.954.208.168	-	-	-	-	1.129.923.000	-	-	-	-	-	-	1	1.129.923.000			1.326.054.000		92	Pekerjaan Umum	
1	03	04	201				Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tersedianya Saran dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	90 %	1.440.756.325	64 %	196.131.000	4.954.208.168	-	6 %	1.129.923.000	-	6	1.129.923.000	-	-	-	-	6	1.129.923.000	-	-	1.326.054.000		92			
1	03	04	201	01			Penyusunan Rencana Kebijakan, Strategi dan Teks Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Teknis Pengelolaan Persampahan	2	Dokumen	240.756.325	1	Dokumen	49.800.000	1	Dokumen	301.195.159	-	1	Dokumen	49.951.000	-	-	-	1	49.951.000	100	17	99.751.000		41		
1	03	04	201	03			Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	2	Unit	1.200.000.000	0	Unit	146.331.000	1	unit	4.653.013.009	-	7	Unit	1.079.972.000	-	-	-	7	1.079.972.000	738	23	1.226.303.000		102		
1	03	05					PROGRAM PENGLOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	PERSENTASE MENINGKATNYA LAYANAN AIR LIMBAH	75 %	4.453.770.555	75 %	3.345.038.500	9.775.305.528	-	-	-	300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	300.000.000	-	-	3.645.038.500		82	Pekerjaan Umum	
1	03	05	201				Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Meningkatnya Layanan Air Limbah	91,97 %	4.453.770.555	77 %	3.345.038.500	9.775.305.528	-	-	-	300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	300.000.000	-	-	3.645.038.500		82		
1	03	05	201	01			Penyusunan Rencana Kebijakan, Strategi dan Teks Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	4	Dokumen	453.770.555	2	Dokumen	292.560.000	5	Dokumen	520.700.009	1	dokumen	300.000.000	-	Dokumen	-	-	-	1	300.000.000	20	58	592.560.000		131	
1	03	05	201	03			Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Air Limbah Terpusat Skala Kota Yang Dibangun	4	Unit	4.000.000.000	4	Unit	3.052.478.500	2	Unit	9.254.605.519	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.052.478.500		76	
1	03	06					PROGRAM PENGLOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	PERSENTASE MENINGKATNYA KUALITAS SALURAN DRAINASE/ GORONG-GORONG YANG DIBANGUN/DIPELHARA	90 %	56.999.459.934	82 %	21.968.484.324	24.212.969.357	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.968.484.324		39	Pekerjaan Umum	
1	03	06	201				Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Meningkatnya Kualitas Saluran Drainase/ Gorong-gorong yang Dibangun/Dipelihara	90 %	56.999.459.934	97 %	21.968.484.324	24.212.969.357	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.968.484.324		39		
1	03	06	201	05			Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase yang Terbangun	4	km	41.364.644.829	2	km	14.613.932.824	1	Dokumen	15.261.046.385	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.613.932.824		35	
1	03	06	201	07			Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan yang Direhabilitasi	Panjang Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan yang Direhabilitasi	2	km	4.200.000.000	1	km	911.634.000	1	Km	414.900.986	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	911.634.000		22	
1	03	06	201	09			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dilakukan Pemeliharaan	124	km	11.434.815.105	52	km	6.442.917.500	62	km	8.537.021.986	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.442.917.500		56	
1	03	08					PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	PERSENTASE MENINGKATNYA PENATAAN BANGUNAN	83,57 %	48.528.718.985	82 %	23.432.211.108	24.159.113.812	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.432.211.108		48	Pekerjaan Umum	
1	03	08	201				Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Yang Tertata Sesuai Peruntukannya	83,57 %	48.528.718.985	55 %	23.432.211.108	24.159.113.812	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.432.211.108		48		
1	03	08	201	01			Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendaftaran Bangunan Gedung, serta Implementasi SMSG	Jumlah Penyelenggaraan Bangunan Gedung Sesuai Rekomendasi TABG dan Tim SLF	32	Dokumen	557.153.100	1	Dokumen	135.000.000	16	Dokumen	154.220.340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135.000.000		24	
1	03	08	201	02			Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Peruntukannya	Persentase Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Peruntukannya	83,57 %	47.744.532.785	68 %	23.297.211.108	23.954.018.545	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.297.211.108		49		
1	03	08	201	03			Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Jumlah Regulasi Bangunan Gedung yang Tersedia	5	Dokumen	227.033.100	-	Dokumen	-	3	Dokumen	70.874.927	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	03	09					PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	PERSENTASE MENINGKATNYA PENATAAN BANGUNAN	30 %	5.016.276.506	66 %	9.709.743.559	27.769.812.350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.709.743.559		194	Pekerjaan Umum	
1	03	09	201				Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	2	kawasan	5.016.276.506	66	kawasan	9.709.743.559	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.709.743.559		194		
1	03	09	201	03			Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah kawasan yang tertata	2	kawasan	5.016.276.506	1	kawasan	9.709.743.559	1	kawasan	27.769.812.350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.709.743.559		194	
1	03	10					PROGRAM PENYELANGGARAAN JALAN	PERSENTASE MENINGKATNYA KUALITAS KONTRUKSI JALAN SESUAI SPESIFIKASI	95,52 %	42.098.054.233	78 %	22.631.911.298	37.659.042.792	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.631.911.298		54	Pekerjaan Umum	
1	03	10	201				Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase meningkatnya kualitas konstruksi jalan sesuai spesifikasi	95,52 %	42.098.054.233	39 %	22.631.911.298	37.659.042.792	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.631.911.298		54		
1	03	10	201	01			Penyusunan Rencana Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	7	Dokumen	302.400.000	-	Dokumen	-	2	Dokumen	509.669.829	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	03	10	201	02			Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan jalan yang dilakukan pembebasan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	03	10	201	04			Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Kondisi Jalan dan Jembatan yang Disurvey	2	Dokumen	827.130.150	-	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	03	10	201	05			Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pembangunan/Perbaikan	14,60	km	21.729.390.453	6	km	11.455.590.380	7,8	Km	4.277.837.942	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.455.590.380		53		
1	03	10	201	09			Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan berkala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	03	10	201	10			Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Berkala	12,60	km	16.491.241.630	4	km	10.478.496.918	6,8	Km	30.871.025.323	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.478.496.918		64		
1	03	10	201	11			Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang dilakukan Pemeliharaan Rutin	14,20	km	2.747.892.000	3	km	696.924.000	7,1		1.197.062.829	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	696.924.000		25			
1	03	12					PROGRAM PENYELANGGARAAN PENATAAN RUANG	PERSENTASE TERTATANYA RUANG YANG SESUAI RTRW	74,3 %	6.387.487.913	83 %	531.996.000	398.529.379	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	531.996.000		8	Pekerjaan Umum		
1	03	12	201				Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTU)	Persentase Tertatanya Ruang yang sesuai RTRW	-	-	-	-	18.455.490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Unsur	Kode	Bid. Unsur	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Pemutakhiran)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJM Kota Banda Aceh pada Tahun 22-222 Kepmendagri 5		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 221		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 222)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 221				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 221		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 221 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD OPD s/d Akhir Tahun 221		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi RPJMD OPD s/d Tahun 222 (%)		OPD Penanggung Jawab						
								Target	Rp	Kinerja	Rp	Target	Rp	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
														Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp													
1	04	02	2.02			Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kab / Kota	Persentase Sosialisasi dan Persiapan Rumah Korban Bencana	100 %	51.250.000	- %	-	32.467.533																						
1	04	02	2.02	02		Sosialisasi tentang Mekanisme Penggunaan Hak atas Tanah dan Bangunan	Jumlah sosialisasi yang di laksanakan tertinggi pergantian hak atas tanah	10 Kali	51.250.000	- Kali	-	5 kali	32.467.533																					
1	04	02	2.03			Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kab/Kota	Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana yang terkena Relokasi	100 %	533.000.000	- %	-	2.587.318																						
1	04	02	2.03	04		Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana yang dibangun	5 Unit	533.000.000	- Unit	-	1 unit	2.587.318																					
1	04	02	2.05			Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan atau Rumah Khusus	Persentase Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan atau Rumah Khusus	100 %	953.877.407	58 %	151.622.000	430.422.556	20.171.000	1 %	83.997.200																			
1	04	02	2.05	01		Fasilitasi Pengelolaan Kelayakan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah waktu Pemelihar Rumah Susun Sederhana	24 Bln	820.000.000	9 Bln	137.490.000	12 bulan	371.250.000	1 Bln	80.000.000																			
1	04	02	2.05	02		Penertarikan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan atau Rumah Khusus	Jumlah jenis perlengkapan pendukung pemanfaatan Rumah Susun Umum dan atau Rumah Khusus	120 Jenis	133.877.407	24 Jenis	14.132.000	60 jenis	59.172.556	10 jenis	20.171.000																			
1	04	02	2.06			Penerbitan Izin Pembangunan dan Pembangunan Perumahan	Persentase Penerbitan izin Pembangunan Perumahan	100 %	19.388.465	- %	-	120.199.960	80.051.000	- %	-																			
1	04	02	2.06	03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian dan Pembangunan Pengembangan Perumahan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi yang dilakukan	2 Laporan	19.388.465	- Laporan	-	1 laporan	120.199.960	1 laporan	80.051.000																			
1	04	02	2.07			Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Persentase Penerbitan Sertifikat Kepemilikan bangunan Gedung	100 %	18.450.000	- %	-	14.729.808																						
1	04	02	2.07	01		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi SKGB yang dilakukan	2 Laporan	18.450.000	- Laporan	-	1 Laporan	14.729.808																					
1	04	03				Program Kawasan Permukiman	Persentase Pengurangan Kawasan Permukiman Kumuh	100 %	2.197.963.801	77 %	6.049.105.000	2.144.930.029	1.023.296.000																					
1	04	03	2.01			Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase Penerbitan izin Pembangunan Kawasan Permukiman	100 %	86.108.000	9 %	158.598.000	818.118.103	673.959.000	- %	-																			
1	04	03	2.01	02		Penyusunan dan atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman kumuh	4 Dok	61.500.000	0 Dok	158.598.000	1 Laporan	711.161.258	1 laporan	673.959.000																			
1	04	03	2.01	03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Waktu Koordinasi dan sinkronisasi Pengembangan Kawasan Permukiman	12 Bln	24.600.000	- Bln	-	1 laporan	107.956.845																					
1	04	03	2.02			Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (sepuluh) ha	Persentase Penataan Kawasan Permukiman Kumuh	100 %	30.750.000	- %	-																							
1	04	03	2.02	01		Survey dan Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Survey dan Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh	2 Laporan	30.750.000	- Laporan	-																							
1	04	03	2.03			Kegiatan Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (sepuluh) ha	Persentase Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh	100 %	2.081.113.801	42,45 %	5.890.507.000	1.325.811.926	349.337.000	0 %	675.085.000																			
1	04	03	2.03	01		Penyusunan rencana Tapak (site plan) dan Detail Engineering Design (DED) Perumahan Perumahan / Pemukiman Permukiman Kumuh	Jumlah Penyusunan Dokumen Rencana Tapak dan DED Perumahan Kumuh yang dilakukan	2 Dok	30.750.000	- Laporan	-	1 Dokumen	147.095.970																					
1	04	03	2.03	02		Perbaikan Rumah tidak layak huni	Jumlah Perbaikan Rumah layak huni yang dilakukan	24 Unit	2.050.363.801	10 Unit	5.890.507.000	12 Unit	1.178.715.956	3 unit	349.337.000																			
1	04	04	2.01			Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh					2.719.148.192																						
1	04	04	2.01			Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh					2.719.148.192																						
1	04	04	2.01	01		Perbaikan Rumah tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkenbangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (sepuluh) HA	Jumlah rehap rumah tidak layak huni terhadap tumbuh kembangnya kawasan kumuh yang di lakukan					118 Unit	2.719.148.192																					
1	04	05				Program Peningkatan Prasarana, sarana dan utilitas Umum (PSU)	Persentase Lingkupnagan Permukiman yang didukung oleh PSU	100 %	2.746.037.459	76 %	1.094.646.000	2.131.512.258	328.657.600																					
1	04	05	2.01			Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Penyelenggaraan PSU	100 %	2.746.037.459	76 %	1.094.646.000	2.131.512.258	328.657.600																					
1	04	05	2.01	02		Penyediaan Prasarana, sarana dan utilitas umum di Perumahan untuk menunjang tinggi hunian	Jumlah Jenis sarana dan prasarana yang dibangun	6 Jenis	2.746.037.459	2 Jenis	1.094.646.000	3 jenis	2.131.512.258																					
1	04	06				Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Jumlah Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100 %	21.525.000	- %	-	38.826.494																						
1	04	06	2.01			Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan hukum yang Melaksanakan Perencanaan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana , Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi orang atau badan Hukum yang dilakukan	100 %	21.525.000	- %	-	38.826.494																						
1	04	06	2.01	01		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembangan Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah Waktu Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi yang dilakukan	24 Bln	21.525.000	- Bln	-	38.826.494																						
1	05					DINAS PEMADAM KEBAKARAN dan PENYELAMATAN		14.919.000.000	0	0	6.310.629.436	12.610.962.027	1.380.354.875																					

Unsur	Kode	Unsur	Bd. Unsur	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Pemutakhiran)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJM Kota Banda Aceh pada Tahun 22- 222 Kependagri 5		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 221		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 222)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 221								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD OPD sid Akhir Tahun 221		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD OPD sid Tahun 22 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi RPJMD OPD sid Tahun 22 (%)		OPD Penanggung Jawab
									Target	Rp	Kinerja	Rp	Target	Rp	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 221		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD OPD sid Akhir Tahun 221		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi RPJMD OPD sid Tahun 22 (%)		
															Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	05	01					PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	100 %	7.841.000.000	95 %	6.310.129.436	6.769.190.311	1.380.354.875	1.513.264.163	-	-	-	-	2.893.619.038	9.283.748.474	117	ketraman						
1	04	01	2.01				Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	100 %	10.250.000	90 %	2.387.000	33.910.750	-	-	-	-	-	-	-	-	2.387.000	23						
1	04	01	2.01	01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Disusun	10 Dok	10.250.000	8 Dok	2.387.000	33.910.750	-	-	-	-	-	-	-	-	2.387.000	23						
1	05	01	2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan	100 %	21.856.278.010	100 %	5.371.266.165	5.640.619.764	1.143.753.765	0 %	1.277.732.304	0,000	0,000	0	2.421.486.069	7.792.752.234	36							
1	05	01	2.02	01			Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Waktu Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN yang Disediakan	36 Bln	16.096.420.790	12 Bln	4.145.177.874	4.323.619.764	878.806.765	0 Bln	938.077.981	0	0	1.816.884.746	5.962.062.620	37								
1	05	01	2.02	02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Waktu Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Tenaga Penkambiran yang Disediakan	36 Bln	5.789.857.220	12 Bln	1.226.088.291	1.317.000.000	264.947.000	0 Bln	399.654.323	0	0	604.601.323	1.830.689.614	32								
1	05	01	2.05				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	1.150.000.000	49 0%	142.560.000		-	-	-	-	-	-	-	-	142.560.000	12						
1	05	01	2.05	02			Pengadaan Pakan Dinas Beserta Kelengkapan	Jumlah Pakan Dinas Beserta Perengkapannya yang Disediakan	270 Stel	730.000.000	81 Stel	142.560.000		-	-	-	-	-	-	-	-	142.560.000	20						
1	05	01	2.09	09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25 Peg	420.000.000	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
1	05	01	2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Administrasi Umum	100 %	1.602.493.889	71 %	8.943.600	73.475.741	24.214.959	0 %	0,000	0,000	0,000	24.214.959	33.158.559	2								
1	05	01	2.06	01			Penyediaan komponen Instalasi Listrik penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen Instalasi listrik (enerangan) bangunan kantor yang disediakan	24 Jenis	741.579.940	6 Jenis	5.792.600	12 bulan	5.201.057	-	-	-	-	-	-	-	5.792.600	1						
1	05	01	2.06	06			Penyediaan Barang Cetak dan Pencetakan	Jumlah jenis Barang Cetak dan Pencetakan yang disediakan	43 Jenis	322.713.949	11 Jenis	3.151.000	6 jenis	12.022.984	2.963.259	-	-	-	-	2.963.259	6.114.259	2							
1	05	01	2.06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan	65 Lap	538.200.000	-	-	5 jenis	56.251.700	21.251.700	-	-	-	-	21.251.700	21.251.700	4							
1	05	01	2.07				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	825.000.000	67 %	47.934.834	28.718.533	0	0 %	12.464.189	0	0	12.464.189	60.399.023	7								
1	05	01	2.07	02			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional/lapangan yang disediakan						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
1	05	01	2.07	05			Pengadaan mebel	Jumlah mebel yang disediakan						-	-	-	-	-	-	-	10.514.189	89	10.514.189	-					
1	05	01	2.07	10			Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100 Unit	825.000.000	67 Unit	47.934.834	5 jenis	16.950.000	0 Unit	1960000	0	0	1.950.000	49.884.834	6								
1	05	01	2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.158.200.904	67 %	507.528.080	608.895.279	128.319.851	0 %	142.586.220	0	0	270.906.071	778.434.151	36								
1	05	01	2.08	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36 bh	892.194.079	14 bh	142.562.630	12 bulan	200.324.000	17.681.026	0 bh	27.507.505	0	0	45.188.531	187.751.161	21							
1	05	01	2.08	04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36 bh	1.266.096.825	18 bh	364.965.450	12 Bulan	409.571.279	110.638.825	0 bh	115.078.715	0	0	225.717.540	590.682.990	47							
1	05	01	2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.878.264.365	38 %	231.896.757	382.370.244	84.066.300	0 %	80.481.450	-	-	164.547.750	396.444.507	14								
1	05	01	2.09	01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Pemeliharaan dan Pembayaran Pajak Kendaraan perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													18.679.200	30	18.679.200	-					
1	05	01	2.09	02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perorangan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Pemeliharaan, Pembayaran Pajak dan Perorangan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	792 Unit	1.498.817.336	20 Unit	219.478.507	12 Bulan	308.572.887	77.394.900	0 Unit	66.703.650	0	0	144.088.550	363.577.057	24							
1	05	01	2.09	06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	96 Unit	542.714.529	6 Unit	3.616.000	5 jenis	5.018.934	-	-	-	-	-	-	3.616.000	1							
1	05	01	2.09	09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/direhab	8 Unit	836.732.500	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
1	05	01	2.09	10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/direhab	-	-	15 Unit	8.802.250	5.706.800	0 Unit	1.770.000	0	0	1.770.000	10.572.250	-									
1	05	04					PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	PERSentase PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	100 %	7.078.000.000	0 %	500.000	5.841.771.716	-	-	-	-	-	-	500.000	0	ketraman							
1	05	04	2.01				Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 %	3.955.000.000	- %	-	5.841.771.716	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
1	05	04	2.01	01			Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Waktu Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	24 Bulan	1.190.000.000	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
1	05	04	2.01	02			Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Waktu Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	24 Bulan	975.000.000	-	-	5 kali	18.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
1	05	04	2.01	03			Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah waktu Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	24 Bulan	990.000.000	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-							
1	05	04	2.01	04			Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Waktu Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun dalam Daerah Kabupaten/Kota	24 Bulan	800.000.000	-	-	12 kali	20.020.000	-	-	-	-	-	-	-	-							
1	05	04	2.01	06			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan alat Pelindungan Diri	Jumlah Waktu Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun dalam Daerah Kabupaten/Kota					3 unit	5.803.751.716	-	-	-	-	-	-	-								
1	05	04	2.02				Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	100 %	900.000.000	2 %	500.000	0,000	-	-	-	-	-	-	500.000	0								

Unsur	Bd.	Unsur	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Pemutakhiran)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJM Kota Banda Aceh pada Tahun 22-222 Kepmendagri 5		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 221		Target Kinerja dan Anggaran RKPJ Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 222)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 221								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPJ Tahun 221 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD OPD s/d Akhir Tahun 221		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi RPJMD OPD s/d Tahun 222 (%)		OPD Penanggung Jawab						
									Target	Rp	Kinerja	Rp	Target	Rp	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 221		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
															Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp											
5	01	02	2.01	07			Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penjadwalan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RKPJ yang tersusun	4 Dokumen	597.660.000	2 dokumen	2.056.719.000	6 laporan	2.762.477.388	466.910.160	0 dokumen	514.178.232	0	961.088.392	4	36	3.037.807.392			508										
5	01	02	2.02				Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan data dan informasi pendukung perencanaan pembangunan daerah	100 %	1.017.252.000	- 0%	40.744.000	133.447.950	3.677.950	0 Bulan	6.000.000	-	-	0	9.677.950	-	-	50.421.950			5									
5	01	02	2.02	01			kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah jenis data perencanaan dan aplikasi yang dikelola	6 Jenis	1.017.252.000	3 jenis	40.744.000	133.447.950	3.677.950	0 jenis	6.000.000	-	-	0	9.677.950	5	7	50.421.950			5									
5	01	02	2.03				Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan daerah	100 %	840.000.000	17 0%	19.975.000	191.694.716	4.149.500	0 Bulan	4.200.000	-	-	0	8.349.500	-	-	28.324.500			3									
5	01	02	2.03	01			kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kota Banda Aceh	3 Dokumen	420.000.000	1 Jenis	19.975.000	2 dokumen	80.181.920	352.000	0 Jenis	4.200.000	-	-	0	4.522.000	11	6	24.527.000			6								
5	01	02	2.03	03			kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	6 Laporan	420.000.000	- Laporan	-	6 kali	111.512.796	3.797.500	- Laporan	-	-	-	3.797.500	-	3	3.797.500			1									
5	01	03					Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah yang sinkron dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	100 %	3.065.000.000	30 %	131.107.550	561.026.836	30.273.450	-	-	-	-	-	30.273.450	-	-	161.381.000			5									
5	01	03	2.01				Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang selaras dengan perencanaan daerah	100 %	690.000.000	75 %	82.650.000	137.162.500	4.275.000	- %	-	-	-	-	4.275.000	-	-	86.925.000			13									
5	01	03	2.01	01			kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPJ)	Jumlah dokumen perencanaan OPD bidang pemerintahan yang sesuai dengan dokumen perencanaan daerah	50 Dokumen	270.000.000	18 dokumen	31.250.000	25 dokumen	53.487.500	675.000	- dokumen	-	-	-	675.000	-	1	31.925.000			12									
5	01	03	2.01	05			kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPJ)	Jumlah dokumen perencanaan OPD bidang pembangunan manusia yang sesuai dengan dokumen perencanaan daerah	100 Dokumen	420.000.000	19 dokumen	51.400.000	50 Dokumen	83.675.000	3.600.000	- dokumen	-	-	-	3.600.000	-	4	55.000.000			13									
5	01	03	2.02				Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA yang selaras dengan perencanaan daerah	100 %	1.225.000.000	25 %	15.017.550	203.157.659	1.504.500	- %	-	-	-	-	1.504.500	-	-	16.522.050			1									
5	01	03	2.02	01			kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPJ)	Jumlah dokumen perencanaan OPD bidang perekonomian yang sesuai dengan dokumen perencanaan daerah	120 Dokumen	450.000.000	4 dokumen	5.525.000	30 Dokumen	62.147.556	- dokumen	-	-	-	-	-	-	-	5.525.000			1									
5	01	03	2.02	04			kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergis dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan daerah kota Banda Aceh	2 Laporan	450.000.000	- Laporan	6.440.050	2 Laporan	96.961.625	1.504.500	- Laporan	-	-	-	1.504.500	-	2	7.944.550			2									
5	01	03	2.02	05			kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPJ)	Jumlah dokumen perencanaan OPD bidang SDA yang sesuai dengan dokumen perencanaan daerah	60 Dokumen	325.000.000	18 dokumen	3.052.500	25 Dokumen	44.048.478	- dokumen	-	-	-	-	-	-	-	3.052.500			1									
5	01	03	2.03				Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan yang selaras dengan perencanaan daerah	100 %	1.150.000.000	50 %	33.440.000	220.706.677	24.493.950	- %	-	-	-	-	24.493.950	0M/0%	-	57.933.950			5									
5	01	03	2.03	01			kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPJ)	Jumlah dokumen perencanaan OPD bidang infrastruktur yang sesuai dengan dokumen perencanaan daerah	60 Dokumen	325.000.000	27 dokumen	30.777.500	30 dokumen	52.105.964	400.000	- dokumen	-	-	-	400.000	-	1	31.177.500			10									
5	01	03	2.03	04			kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergis dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan pelaksanaan sinergis dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional bidang infrastruktur	4 Laporan	550.000.000	- Laporan	-	2 laporan	103.145.599	718.950	- Laporan	-	-	-	718.950	-	1	718.950			0									
5	01	03	2.03	05			kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPJ)	Jumlah dokumen perencanaan OPD bidang kewilayahan yang sesuai dengan dokumen perencanaan daerah	50 Dokumen	275.000.000	15 dokumen	2.662.500	25 dokumen	65.455.214	23.375.000	- dokumen	-	-	-	23.375.000	-	36	26.037.500			9									
5	05						Urusan Penelitian dan Pengembangan			3.240.000.000	- 0	310.257.000											310.257.000			10									
5	05	02					Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase dokumen perencanaan daerah yang didasarkan pada hasil analisa penelitian dan pengembangan	100 %	3.240.000.000	26 %	310.257.000	1.144.603.975	312.524.500	199.350.000	-	-	-	-	199.350.000	-	-	511.874.500			25									
5	05	02	2.02				Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Tersedianya dokumen penelitian pengembangan bidang sosial dan kependudukan	2 Dokumen	525.000.000	61 %	93.650.000	134.740.090	12.384.500	- %	-	-	-	-	12.384.500	-	-	106.034.500			20									
5	05	02	2.02	01			kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Penelitian Sosial	2 Dokumen	525.000.000	1 Dokumen	93.650.000	2 laporan	134.740.090	12.384.500	- Dokumen	-	-	-	12.384.500	-	9	106.034.500			20									
5	05	02	2.03				Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang ekonomi dan pembangunan	Tersedianya dokumen penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	12 Dokumen	1.815.000.000	25 %	116.357.000	358.354.780	100.140.000	- %	-	-	-	-	100.140.000	-	-	216.497.000			12									
5	05	02	2.03	01			kegiatan Penelitian dan pengembangan Koperasi, usaha kecil dan menengah	Jumlah laporan survey pengembangan Koperasi, usaha kecil dan menengah	4 Laporan	450.000.000	- Laporan	5.000.000			- Laporan	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000			1									
5	05	02	2.03	07			kegiatan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah laporan penelitian bidang lingkungan hidup	4 Laporan	510.000.000	- Laporan	10.000.000	2 laporan	152.292.180	- Laporan	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000			2									
5	05	02	2.03	09			kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah laporan hasil survey Indeks Kota Layak Huni	2 Laporan	480.000.000	0 Laporan	1.557.000	1 laporan	206.082.600	100.140.000	- Laporan	-	-	-	100.140.000	-	49	101.697.000			21									
5	05	02	2.03	12			kegiatan Penelitian dan pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah laporan penelitian bidang penataan ruang dan pertanahan	2 Laporan	375.000.000	1 Laporan	99.800.000			- Laporan	-	-	-	-	-	-	-	99.800.000			27									
5	05	02	2.04				Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Tersedianya dokumen pengembangan inovasi dan teknologi	10 Dokumen	900.000.000	17 %	100.250.000	651.509.105	200.000.000	2 %	199.350.000	-	-	-	199.350.000	-	2	399.350.000			56									

Kode	Unsur	Bid. Unsur	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Penutakhiran)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJM Kota Banda Aceh pada Tahun 22-222 Kependagri 5		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 221		Target Kinerja dan Anggaran RKPJ Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 22)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 221								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 221		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPJ Tahun 221 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD OPD s/d Akhir Tahun 221		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi RPJMD OPD s/d Tahun 222 (%)		OPD Penanggung Jawab		
								Target	Rp	Kinerja	Rp	Target	Rp	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 221		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPJ Tahun 221 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD OPD s/d Akhir Tahun 221		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi RPJMD OPD s/d Tahun 222 (%)				
														Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		Kinerja	Rp
5	05	02	2.04	01		kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah laporan penelitian dibidang teknologi dan informasi	4 Laporan	560.000.000	- Laporan	-	2 laporan	573.752.000		200.000.000	- Laporan	199.350.000				-	399.350.000	-	70		399.350.000		73				
5	05	02	2.04	04		kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil Penelitian dan Pengembangan	Jumlah laporan Informasi Hasil-hasil Penelitian dan Pengembangan	6 Laporan	350.000.000	1 Laporan	100.250.000	3 laporan	77.757.105		- Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.250.000		29				
2	15					DINAS PERHUBUNGAN			91.271.917.154	0	23.028.422.556	37.810.031.283	3.123.711.022		11.106.109.035										31.237.110.22		26.152.133.578		29	Ditub		
2	15	01				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100	36.698.232.663	89 %	10.868.985.920	12.351.073.835	2.395.351.272		2.491.335.735	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.886.687.007		15.755.672.927		43		
2	15	01	2.01			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi OPD yang tersusun	100 %	18.592.770	- %	-	33.934.124	2.026.850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.026.850	-	2.026.850		11		
2	15	01	2.01	01		Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	10 Dok	18.592.770	- Dok	-	33.934.124	2.026.850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.026.850	-	2.026.850		11		
2	15	01	2.02			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	92 %	31.547.811.604	92 %	9.804.876.698	10.994.190.566	2.234.302.548	0 %	2.118.680.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.352.982.548	-	14.157.659.246		45	
2	15	01	2.02	01		Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah waktu pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang disediakan	24 Bln	28.160.291.604	11 bln	7.130.591.698	12 bulan	7.606.480.566	1.560.132.548	0 bln	1.396.425.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	2.956.557.548	2	39	10.087.149.246	36	
2	15	01	2.02	02		Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah waktu jasa tenaga pendukung administrasi/tenis perkariban yang disediakan	24 Bln	3.387.520.000	11 bln	2.674.285.000	12 bulan	3.297.670.000	674.170.000	0 bln	722.255.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1.396.425.000	2	42	4.070.710.000	120	
2	15	01	2.05			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	526.199.881	33 %	98.960.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98.960.000		19		
2	15	01	2.05	01		Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Dipin Peningkatan Dinding (Pepawa)	Jumlah Sarana dan Prasarana Dipin Peningkatan yang disediakan	4 Unit	64.575.000	- unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	15	01	2.05	02		Kegiatan Pengadaan Pakelan Dinas Beserta Abut Kelenokannya	Jumlah Pakelan Dinas Beserta Perlokannya yang disediakan	350 Stel	383.821.131	178 stel	98.960.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98.960.000		25		
2	15	01	2.05	09		Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	8 Pegawai	67.803.750	- Pegawai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	15	01	2.06			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi umum	100 %	516.540.354	33 %	46.154.788	142.401.833	19.276.650	2 %	69.426.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.702.950	-	134.857.738		26	
2	15	01	2.06	01		Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	18 Jenis	10.040.000	- Jenis	-	9 jenis	12.986.298	5.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.200.000	-	40	5.200.000	52	
2	15	01	2.06	05		Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian	Jumlah jenis barang cetakan dan pengandaian yang disediakan	22 Jenis	97.093.125	5 Jenis	13.817.500	11 jenis	42.865.535	11.526.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.526.650	-	27	25.344.150	26	
2	15	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi kur daerah yang dilaksanakan	40 Lap	411.407.229	5 lap	32.337.288	20 laporan	86.550.000	2.550.000	2 lap	69.426.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	71.976.300	11	83	104.313.588	25
2	15	01	2.07			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.693.044.730	25 %	3.800.000	214.429.763	-	28 %	105.823.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	105.823.000	-	109.623.000	6	
2	15	01	2.07	02		Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	10 Unit	1.170.865.450	- unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	15	01	2.07	05		Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang disediakan	6 Unit	113.006.250	1 Unit	3.800.000	8 unit	61.608.762	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.800.000		3		
2	15	01	2.07	06		Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	14 Unit	296.166.780	- Unit	-	8 unit	33.787.333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	15	01	2.07	10		Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	12 Unit	113.006.250	- Unit	-	6 unit	119.032.668	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105.823.000	-	89	105.823.000	94	
2	15	01	2.08			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	97 %	1.659.395.518	621.476.034	607.243.886	135.195.224	0 %	125.384.585	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260.579.809	-	882.055.843		53	
2	15	01	2.08	02		Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik	24 Bln	1.089.984.699	12 bln	383.696.534	12 bulan	353.460.000	71.820.224	0 bln	34.002.776	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	105.823.000	1	30	489.519.534	45
2	15	01	2.08	04		Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	24 Bln	569.410.619	12 bln	237.779.500	12 bulan	253.783.886	63.375.000	0 bln	91.381.809	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	154.756.809	3	61	392.536.309	69
2	15	01	2.09			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	734.648.006	54 %	293.718.400	448.913.663	4.550.000	0 %	72.021.850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	76.571.850	-	370.290.250	50	
2	15	01	2.09	02		Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Pemeliharaan, Pembayaran Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24 Unit	562.452.902	10 unit	201.689.900	20 unit	297.417.450	0 unit	72.021.850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	72.021.850	2	24	273.711.750	49
2	15	01	2.09	05		Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	60 Unit	21.525.000	- unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	15	01	2.09	06		Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	40 Unit	21.832.808	- unit	-	20 unit	10.324.137	4.550.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.550.000	-	44	4.550.000	21
2	15	01	2.09	09		Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhab	4 Unit	118.656.563	2 unit	79.871.000	1 Paket	130.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79.871.000		67	
2	15	01	2.09	10		Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhab	20 Unit	10.180.733	4 unit	12.157.500	24 Unit	11.172.076	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.157.500		119	
2	15	02				Program Penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	100	45.849.397.269	87 %	11.992.394.636	25.458.957.448	728.359.750	8.614.773.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.343.133.050		21.335.527.686		47	
2	15	02	2.01			Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase Jaringan LLAJ yang ditetapkan	100 %	565.031.250	- 0%	-	199.599.000	99.775.000	-	Bulan	49.824.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149.599.000	-	149.599.000		26	
2	15	02	2.01	01		Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Perencanaan induk jaringan yang disusun	6 Dok	452.025.000	- dok	-	3 Dok	199.599.000	99.775.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149.599.000	-	75	149.599.000	33	
2	15	02	2.01	02		Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah standar dan prosedur Rencana Induk Jaringan yang Tersusun	2 Dok	113.006.250	- dok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	15	02	2.02			Kegiatan Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	Persentase Perengkapan jalan yang disediakan	100 %	16.625.145.066	89 0%	3.493.791.560	13.074.260.735	202.872.000	2 Bulan	5.547.698.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5.750.570.000	-	9.244.361.360	50	
2	15	02	2.02	02		Kegiatan Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	Jumlah perlengkapan jalan yang disediakan	200 Unit	17.674.762.503	86 unit	1.085.978.360	69 Paket	10.498.994.799	19.756.000	5 unit	4.948.964.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4.968.720.000	7	47	6.054.698.360	34
2	15	02	2.02	04		Kegiatan Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan	Jumlah Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang dilaksanakan	96 Kali	950.382.563	44 kali	2.407.813.000	19 Paket	2.575.265.936	183.116.000	0 kali	598.734.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	781.850.000	1	30	3.189.663.000	336	
2	15	02	2.03			Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase sarana dan prasarana terminal yang dikelola	100 %	13.474.626.250	26 0%	190.347.000	1.762.670.576	45.787.000	2 Bulan	458.477.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	504.264.100	-	694.611.100	5	

</

Unsur	Kode	Bid. Urusan	Program	Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Pemutakhiran)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJM Kota Banda Aceh pada Tahun 22-222 Kepermdagri 5		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 221		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 222)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 221								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 221 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD OPD s/d Akhir Tahun 221		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi RPJMD OPD s/d Tahun 222 (%)		OPD Penanggung Jawab				
							Target	Rp	Kinerja	Rp	Target	Rp	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 221		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
													Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp									
2	11	01	2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi umum	100 %	2.506.543.780	41 %	418.890.006	870.077.673	204.389.171	1 %	344.829.227	1	549.138.398	-	-	968.028.404	39											
2	11	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	16 Jenis	615.907.500	16 Jenis	259.860.900	454.743.832	48.455.000	1 Jenis	191.572.500	1	240.027.500	9	53	499.888.400	81											
2	11	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	20 Jenis	1.041.405.000	jenis	66.118.000	10 jenis	66.118.000	- jenis	48.618.000	-	48.618.000	-	74	48.618.000	5											
2	11	01	2.06	05	Penyediaan barang otsakan dan pencampuran	Jumlah jenis otsak dan pengandaan yang disediakan	18 Jenis	303.231.280	5 Jenis	64.242.700	9 jenis	158.171.313	107.463.971	0 Jenis	7.000.000	-	114.463.971	1	72	178.706.671	59										
2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	44 Laporan	546.000.000	13 Laporan	94.786.406	22 laporan	191.044.528	48.390.200	1 Laporan	97.638.727	1	146.028.927	5	76	240.615.333	44										
2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							- Bulan		-	-	-	-	-	-											
2	11	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang disediakan	85 Unit	748.900.000					- Bulan		-	-	-	-	-	-											
2	11	01	2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	31.498.836.940	61 %	13.507.992.009	13.025.692.866	6.170.070.958	0 %	5.008.096.552	-	11.178.167.510	-	-	24.686.159.519	78											
2	11	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	24 Bulan	30.743.544.440	11 Bulan	13.463.886.609	134 unit	12.847.889.719	6.170.070.958	0 Bulan	4.962.823.055	-	11.122.894.013	0	87	24.586.780.622	80										
2	11	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	24 Bulan	755.292.500	11 Bulan	44.105.400	12 bulan	177.803.147	41 Bulan	55.273.497	1	55.273.497	10	31	99.378.897	13											
2	11	01	2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	17.485.228.000	70 %	6.232.019.477	6.917.819.770	985.821.894	0 %	2.764.951.182	-	3.759.873.076	-	-	9.991.892.553	57											
2	11	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pakaj, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan perorangan atau kendaraan dinas jabatan	288 Unit	16.836.504.000	109 Unit	6.024.571.677	6.902.113.560	995.821.894	0 Unit	2.753.359.982	-	3.749.181.876	-	54	9.773.753.553	58											
2	11	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	216 Unit	34.629.000	11 Unit	5.717.800	15.706.210		2 Unit	10.691.200	2	10.691.200	-	68	16.409.000	47											
2	11	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhab	2 Unit	624.095.000	1 Unit	201.730.000			- Unit		-	-	-	-	201.730.000	32											
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penyusunan Dokumen RPPLH	100 %	470.111.330	100 %	2.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100.000	0											
					Rencana Perindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Kabupaten Kota	100 %	470.111.330	2.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100.000	0											
2	11	02	2.01	02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen DOTT atau RPPLH	2 Dokumen	470.111.330	1 Dokumen	2.100.000			- Dokumen		-	-	-	-	2.100.000	0											
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100 %	3.452.931.364	5 %	38.999.159	818.151.699	483.759.100	112.217.500	483.759.100	112.217.500	483.759.100	522.758.259	15													
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Terhadap Target RAD GRK Banda Aceh	5 %	3.452.931.364	50 %	38.999.159	818.151.699	483.759.100	3 %	112.217.500	3	595.976.600	-	-	634.975.750	18											
2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengawasan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	KLH Kota Banda Aceh	64,29 Indeks	907.745.764	61 Indeks	13.305.150	63,61 indeks	311.319.640	8 Indeks	111.205.000	8	111.205.000	-	36	124.510.150	14											
2	11	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan iklim	Jumlah daya energi listrik terbarukan	42,76 kWp	2.545.185.600	1,62 kWp	25.694.000	35,76 Kwp	506.832.059	483.759.100	0 kWp	1.012.500	-	484.771.600	-	96	510.465.600	20										
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Luas RTH	15 %	20.944.051.229	85 %	8.550.554.400	9.333.754.382	212.255.000	1.474.726.500	1.686.981.500	1.686.981.500	10.237.535.900	49														
2	11	04	2.01		Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kabupaten/Kota	Persentase Luas RTH yang dipelihara untuk meningkatkan keanekaragaman hayati	15 %	20.944.051.229	39 %	8.550.554.400	9.333.754.382	212.255.000	0 %	1.474.726.500	-	1.686.981.500	-	-	10.237.535.900	49											
2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Jumlah lokasi RTH yang dipelihara	992 Lokasi	19.643.126.229	89 Lokasi	8.545.554.400	9.180.059.074	212.255.000	0 Lokasi	1.452.226.500	-	1.664.481.500	0	18	10.210.035.900	52											
2	11	04	2.01	05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Jumlah pohon penghijauan dan bunga (tanaman) yang ditanam	12000 Tanaman	1.300.925.000	2.093 Tanaman	5.000.000	6000 Tanaman	153.695.308	5 Tanaman	22.500.000	5	22.500.000	0	16	27.500.000	2											
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	60 %	200.623.400	14 %	4.150.000	20.096.900	18.346.900	18.346.900	18.346.900	18.346.900	22.496.900	11														
2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	60 %	200.623.400	50 %	4.150.000	20.096.900	18.346.900	4 %	18.346.900	4	18.346.900	-	-	22.496.900	11											
2	11	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha/kegiatan yang sudah mempunyai izin lingkungan yang diawasi	600 Usaha/Keg	200.623.400	150 Usaha/Keg	4.150.000	300 kegunaan	20.096.900	4 Usaha/Keg	18.346.900	4	18.346.900	1	91	22.496.900	11											
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	35 %	944.425.850	18 %	11.340.840	152.441.713	36.867.205	36.867.205	36.867.205	36.867.205	48.208.045	5														
2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	35 %	944.425.850	11.340.840	152.441.713	36.867.205	36.867.205	3 %	36.867.205	3	36.867.205	-	-	48.208.045	5											
2	11	08	2.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat	Jumlah sekolah yang dibina untuk mewujudkan sekolah adiwiyata dan jumlah dubs lingkungan yang dibina	80 Sekolah	486.251.950	19 Sekolah	9.646.840	40 Sekolah	83.857.538	- Sekolah		-	-	-	-	9.646.840	2											
2	11	08	2.01	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Mitra Komunitas	45 Komunitas	458.173.900	4 Komunitas	1.694.000	20 komunitas	68.584.175	22 Komunitas	36.867.205	22	36.867.205	109	54	38.561.205	8											
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100 %	838.290.700	57 %	20.943.500	20.936.365	2.479.500	2.479.500	2.479.500	2.479.500	23.423.000	3														

Unsur	Kode	Unsur	Bid. Unsur	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Pemutakhiran)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJM Kota Banda Aceh pada Tahun 22-222 Kependagri 5		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 221		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 222)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 221								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 221 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD OPD s/d Akhir Tahun 221		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi RPJMD OPD s/d Tahun 222 (%)		OPD Penanggung Jawab
									Target	Rp	Kinerja	Rp	Target	Rp	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 221		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 221 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD OPD s/d Akhir Tahun 221		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi RPJMD OPD s/d Tahun 222 (%)		
															Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	05	01	2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	133.291.190	53 %	37.917.000		315.428.132	131.587.260	1 %	34.930.400	-	-	1	166.517.660	-	-	204.434.660	153						
1	05	01	2.09	02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Pemeliharaan, Pembayaran Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14 Unit	97.487.400	6 Unit	37.216.000	7 Unit	283.244.372	123.787.260	1 Unit	34.930.400	-	-	1	158.717.660	13	56	195.933.660	201						
1	05	01	2.09	09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhab	10 Unit	35.803.790	1 Unit	701.000	5 kali	32.183.760	7.800.000	- Unit	-	-	-	7.800.000	-	24	8.501.000	24							
1	05	03					PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penanggulangan Dan Penanganan Bencana	100 %	6.942.004.659	96 %	5.139.763.221		7.404.893.480	105.000.000		1.480.253.530	-	-	-	1.585.253.530	-	-	6.725.016.751	97						
1	05	03	2.01				PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	100 %	214.779.280	75 %	99.800.000		950.000.000	-	%	-	-	-	-	-	-	-	99.800.000	46						
1	05	03	2.01	01			Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota	2 Dokumen	65.050.640	- Dokumen	-		-	Dokumen					-	-	-	-	-	-						
1	05	03	2.01	02			Sosialisasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Projeas Bencana)	Jumlah Sosialisasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Projeas Bencana) yang dilaksanakan	4 Kali	149.728.640	3 Kali	99.800.000	3 kali	950.000.000		Kali			-	-	-	-	-	99.800.000	67						
1	05	03	2.02				PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA	Persentase Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 %	5.645.728.206	58 %	3.146.355.201		6.408.600.000	105.000.000	%	1.480.253.530	-	-	-	1.585.253.530	-	25	4.731.608.731	84						
1	05	03	2.02	02			Pelatihan Penanganan Dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Pelatihan yang dilaksanakan Pencanganan Dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	2 Kali	28.420.000	1 Kali	150.000.000		-		Kali			-	-	-	-	-	150.000.000	528						
1	05	03	2.02	03			Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Waktu Pelaksanaan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	24 Bln	5.583.838.206	9 Bulan	2.996.355.201	12 bulan	6.303.600.000		Bulan	1.480.253.530	-	-	-	1.480.253.530	-	23	4.476.608.731	80						
1	05	03	2.02	08			Pembangunan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Pelatihan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	2 Kali	33.470.000	- Kali	-	1 kali	105.000.000		Kali			-	-	-	105.000.000	-	100	105.000.000	314					
1	05	03	2.03				PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA	Persentase Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	100 %	971.497.373	81 %	1.893.608.020		46.293.480	-	%	-	-	-	-	-	-	-	1.893.608.020	195						
1	05	03	2.03	03			Pencarian, Pertolongan Dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Waktu Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan Dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	12 Bulan	112.470.000	3 Bulan	1.247.974.500		-		Bulan			-	-	-	-	-	1.247.974.500	1.110						
1	05	03	2.03	04			Penyediaan Logistik Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Waktu Penyediaan Logistik Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	12 Bulan	11.631.476	4 Bulan	52.050.000	6 bulan	6.993.480		Bulan			-	-	-	-	-	52.050.000	447						
1	05	03	2.03	06			Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Jumlah Waktu Penanganan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemii/ Wabah Penyakit	24 Bulan	847.395.897	15 Bulan	593.583.520	12 Bulan	39.300.000		Bulan			-	-	-	-	-	593.583.520	70						
1	05	03	2.04				PENATAAN SISTEM DASAR PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100 %	110.000.000	- %	-		-		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
1	05	03	2.04	01			Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	2 Dokumen	110.000.000	- Dokumen	-		-	Dokumen				-	-	-	-	-	-	-						
1							URUSAN BIDANG PEMERINTAHAN SOSIAL			27.514.097.830		4.294.185.219								0,00				4.294.185.219	16						
1	06						DINAS SOSIAL			27.514.097.830		7.984.807.486		11.073.474.770		1.498.116.028		3.268.351.706						9.482.923.514	34	Dinasos					
1	06	01					Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Administrasi Keuangan)	Persentase pemenuhan kebutuhan urusan Pemerintah Daerah (administrasi keuangan)	100 %	13.898.691.475	98 %	4.782.429.801		5.678.217.539	1.146.239.928		-	-	-	-	2.403.992.764			7.166.422.565	52						
1	05	01	2.01				Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi OPD Yang Terusun	100 %	30.000.000	- %	-		42.670.903	-	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
1	05	01	2.01	01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Disusun	14 Dokumen	30.000.000	- Dokumen	-	5 Dokumen	42.670.903		Dokumen			-	-	-	-	-	-	-						
1	06	01	2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	100 %	12.197.826.077	88 %	4.183.817.513		4.588.505.750	1.055.811.288		%	1.144.869.441	-	-	-	2.200.680.729	-	-	6.394.498.242	52					
1	06	01	2.02	01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah waktu pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang disediakan	24 bln	10.757.701.077	12 bln	3.487.411.513	12 Bulan	3.889.805.750	887.761.288	0 bln	970.838.441			-	1.858.999.729	2	48	5.346.017.242	50						
1	06	01	2.02	02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah waktu Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran yang disediakan	24 bln	1.440.125.000	9 bln	696.400.000	12 Bulan	698.700.000	168.050.000	0 bln	174.031.000			-	342.081.000	2	49	1.038.481.000	72						
1	06	01	2.05				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	62.012.500	- %	-		-		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
1	06	01	2.05	02			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perengkapannya yang disediakan	104 Stel	62.012.500	- stel	-		-	stel				-	-	-	-	-	-	-						
1	06	01	2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi umum	100 %	349.095.295	38 %	50.668.100		108.498.265	19.086.500		%	11.822.927	-	-	-	30.909.427	-	-	81.577.527	23					
1	06	01	2.06	01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	19 Jenis	13.504.541	6 Jenis	5.980.000	10 jenis	6.954.645	3.100.000	- Jenis	3.100.000			-	-	-	45	9.080.000	67						
1	06	01	2.06	05			Penyediaan Barang Cetak dan Pencetakan	Jumlah jenis Barang Cetak dan Pencetakan yang disediakan	12 Jenis	28.000.754	2 Jenis	11.212.600	6 jenis	13.807.020	1.999.900	0 Jenis	1.999.900			-	3.999.800	3	29	15.212.400	54						
1	06	01	2.06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	69 laporan	307.500.000	7 laporan	33.475.500	35 laporan	87.736.600	13.986.600	0 laporan	9.823.027			-	23.809.627	1	27	57.285.127	19						
1	06	01	2.07				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	289.562.500	67 %	169.300.000		201.402.665	-	%	-	-	-	-	-	-	-	-	169.300.000	58					
1	06	01	2.07	06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	13 Jenis	289.562.500	2 Jenis	169.300.000	7 Jenis	201.402.665		Jenis			-	-	-	-	-	-	169.300.000	58					
1	06	01	2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	427.424.693	100 %	218.021.351		251.554.020	45.482.340		%	59.949.888	-	-	-	105.432.208	-	-	323.453.559	76					
1	06	01	2.08	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	24 bln	146.802.000	12 bln	124.041.351	12 Bulan	121.150.000	23.584.550	0 bln	33.061.666			-	-	-	56.646.246	2	47	180.687.597	123				
1	06	01	2.08	04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	24 bln	280.562.693	12 bln	93.980.000	12 Bulan	130.404.020	21.897.760	0 bln	26.888.202			-	-	-	48.785.962	2	37	142.765.962	51				
1	06	01	2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	572.770.410	38 %	140.622.837		485.585.936	25.859.800	0 %	41.110.600	-	-	-	-	66.970.400	-	-	207.593.237	36					

Unsur	Kode	Bid. Unsur	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Pemutakhiran)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJM Kota Banda Aceh pada Tahun 22-222 Kependagri 5		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 221		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 221				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 221		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKM Tahun 221 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD OPD s/d Akhir Tahun 221		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi RPJMD OPD s/d Tahun 222 (%)		OPD Penanggung Jawab				
								Target	Rp	Kinerja	Rp	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		11=7+8+9+1		12=11/100			13=5+11		14=12&x100	
												Target	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
1	06	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pakai, dan Perencanaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Pemeliharaan, Pembayaran Pakai dan Perencanaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	28 Unit	287.676.500	64 Unit	112.559.837	14 unit	143.605.000	23.599.800	0 Unit	41.110.600	-	64.710.400	3	45	177.270.237	62						
1	06	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	1936 Unit	48.769.910	296 Unit	15.463.000	968 unit	9.166.936	2.260.000	Unit	-	-	2.260.000	-	25	17.723.000	36						
1	06	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhab	10 Unit	236.324.000	1 Unit	12.600.000	5 unit	332.814.000	Unit	Unit	Unit	Unit	-	-	-	12.600.000	5						
1	06	02				Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Meningkatnya Kesejahteraan bagi fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	100 %	328.000.000	- %	-	-	60.067.850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
1	06	02	2.03			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		100 %	328.000.000	- %	-	-	60.067.850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
1	06	02	2.03	01		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja Sosial Yang Mengikuti Sosialisasi (Bimtek) Untuk Peningkatan Kemampuan Potensi Di Bidang Sosial	338 Orang	102.500.000	- Orang	-	169 orang	-	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
1	06	02	2.03	02		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah TSKS Yang Mengikuti Sosialisasi (Bimtek) Untuk Peningkatan Kemampuan Potensi Di Bidang Sosial	270 Orang	102.500.000	- Orang	-	135 orang	15.668.850	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
1	06	02	2.03	03		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah TSKS Yang Mengikuti Sosialisasi (Bimtek) Untuk Peningkatan Kemampuan Potensi Di Bidang Sosial	100 Orang	61.500.000	- Orang	-	50 orang	23.088.000	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
1	06	02	2.03	05		Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah TSKS Yang Mengikuti Sosialisasi (Bimtek) Untuk Peningkatan Kemampuan Potensi Di Bidang Sosial	68 Orang	61.500.000	- Orang	-	34 lembaga	21.311.000	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
1	06	04				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Meningkatnya penanganan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial	100 %	5.815.848.230	75 %	785.982.485	2.176.448.365	154.174.450	242.320.800	-	-	-	396.495.250	-	-	1.182.477.735	20						
1	06	04	2.01			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Tertantar, Lanjut Usia Tertantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		100 %	2.923.123.700	19 %	68.577.145	1.491.285.350	33.252.450	2 %	156.320.800	-	2	209.573.250	-	-	278.150.395	10						
1	06	04	2.01	01		Penyediaan Pemakanan	Terperuhnya kebutuhan dasar penyandang disabilitas tertantar, Anak tertantar, Lansia tertantar, Gelandangan Pengemis	100 %	167.923.700	68 %	20.893.545	150 orang	235.150.350	8.742.450	3 %	54.755.800	3	63.498.250	2	27	84.391.795	50						
1	06	04	2.01	02		Penyediaan Sandang	Terperuhnya kebutuhan sandang penyandang disabilitas tertantar, Anak tertantar, Lansia tertantar, Gelandangan Pengemis	100 %	164.000.000	68 %	20.437.500	-	-	-	%	-	-	-	-	-	20.437.500	12						
1	06	04	2.01	03		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah alat bantu yang tersedia	22 org	174.250.000	- org	18.830.000	11 orang	131.000.000	org	org	-	-	-	-	-	18.830.000	11						
1	06	04	2.01	04		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Terlaksananya pemulangan bagi penyandang disabilitas tertantar, Anak tertantar, Lansia tertantar, Gelandangan Pengemis	100 %	26.625.000	42 %	4.353.100	150 orang	14.000.000	%	2.065.000	-	-	2.065.000	-	15	6.418.100	25						
1	06	04	2.01	05		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Terperuhnya pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kepada PMKS	100 %	102.500.000	- %	-	150 orang	140.210.000	40.910.000	%	-	-	40.910.000	-	29	40.910.000	40						
1	06	04	2.01	06		Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Tertantar Anak Tertantar Lanjut Usia Tertantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Terperuhnya kualitas pelayanan pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas tertantar, anak tertantar, lanjut usia, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	100 %	1.779.400.000	%	-	150 orang	218.900.000	%	99.500.000	-	-	99.500.000	-	45	99.500.000	6						
1	06	04	2.01	07		Faciliasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan	100 org	5.125.000	org	-	50 orang	-	org	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
1	06	04	2.01	08		Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah akses layanan yang diberikan	40 org	2.050.000	org	-	20 orang	3.375.000	org	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
1	06	04	2.01	09		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah layanan dan pengaduan yang diberikan	150 kasus	246.000.000	kasus	-	75 kasus	46.500.000	kasus	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
1	06	04	2.01	10		Pemberian Layanan Kedarifan	jumlah kebutuhan yang terpenuhi	200 org	164.000.000	org	-	100 orang	678.000.000	org	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
1	06	04	2.01	11		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah pelayanan penelusuran keluarga yang diberikan	100 org	51.250.000	23 org	4.063.000	50 orang	13.700.000	3.600.000	org	-	-	3.600.000	-	26	7.663.000	15						
1	06	04	2.01	12		Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah pemulangan keluarga yang dilaksanakan	100 org	41.000.000	org	-	50 orang	10.450.000	Bulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
1	06	04	2.02			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial (LPKS ABH)	Persentase meningkatnya penanganan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial	100 %	2.892.724.530	- %	717.405.340	685.163.015	100.922.000	%	86.000.000	-	-	186.922.000	-	-	904.327.340	31						
1	06	04	2.02	01		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah pemberian layanan data dan pengaduan	5280 KK	1.737.390.932	1.949 KK	333.070.500	2.640 kk	576.050.000	82.800.000	0 KK	86.000.000	-	168.800.000	0	29	501.870.500	29						
1	06	04	2.02	02		Pemberian Layanan Kedarifan	Jumlah kebutuhan yang terpenuhi	140 Orang	41.867.970	- Orang	-	70 orang	-	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
1	06	04	2.02	03		Penyediaan Pemakanan	Terperuhnya kebutuhan dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial (LPKS ABH)	100 %	164.000.000	2 %	348.500	100 orang	22.122.000	1.122.000	%	-	-	1.122.000	-	5	1.470.500	1						
1	06	04	2.02	04		Penyediaan Sandang	terperuhnya kebutuhan sandang	100 %	174.250.000	%	-	100 %	7.340.000	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
1	06	04	2.02	05		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah alat bantu yang tersedia	150 org	255.000.000	org	-	80 orang	-	org	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
1	06	04	2.02	06		Penyediaan Pelayanan Kesehatan Di Luar Panti	Jumlah pelayanan kesehatan yang tersedia	150 org	153.750.000	org	-	75 orang	3.500.000	org	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
1	06	04	2.02	07		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang diberikan	120 org	205.000.000	81 org	98.993.340	60 orang	14.000.000	org	-	-	-	-	-	-	98.993.340	48						
1	06	04	2.02	08		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	jumlah bimbingan yang dilakukan terhadap keluarga penyandang disabilitas, anak tertantar, lanjut usia tertantar, serta gelandangan pengemis, dan masyarakat	140 org	102.500.000	org	-	70 orang	8.662.500	org	-	-	-	-	-	-	-	-	-					

Kode	Unsur	Bid. Unsur	Program	Program Kegiatan	Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Pemutakhiran)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJM Kota Banda Aceh pada Tahun 22- 222 Kependagri 5		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 21		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 22)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 221								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 21		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKM Tahun 21 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD OPD s/d Akhir Tahun 21		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi RPJMD OPD s/d Tahun 22 (%)		OPD Penanggung Jawab				
								Target	Rp	Kinerja	Rp	Target	Rp	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
														Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp													
								11=7+8+9+1		12=11/7*100		13=5+11		14=12Ā		15																		
2	07	01	2.07			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	861.792.325	- %	-	66.750.487	-	%	1.802.625	-	-	1.802.625	-	-	-	-	-	-	-	1.802.625	-	0						
2	07	01	2.07	01		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	1 Unit	394.000.000	- Unit	-	-	-	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
2	07	01	2.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	205 Unit	467.792.325	- Unit	-	66.750.487	-	Unit	1.802.625	-	-	1.802.625	-	-	3	-	-	-	1.802.625	-	0							
2	07	01	2.08			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	407.535.446	75 %	38.531.993	138.294.522	15.294.129	%	10.790.594	-	-	26.084.723	-	-	-	-	-	-	-	64.616.716	-	16						
2	07	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	24 Bulan	143.584.250	9 Bulan	29.632.693	12 bulan	107.520.000	15.294.129	0 Bulan	767.000	-	-	16.061.129	0	15	-	-	-	45.693.822	-	32							
2	07	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	24 Bulan	263.951.196	9 Bulan	8.899.300	12 bulan	30.774.522	1	10.023.594	1	10.023.594	9	33	-	-	-	-	18.922.894	-	7								
2	07	01	2.09			Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	466.325.000	25 %	19.117.675	1.136.745.199	35.351.300	1 %	11.540.000	1	46.891.300	-	-	-	-	-	-	-	66.008.975	-	14							
2	07	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Pemeliharaan, Pembayaran Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6 Unit	110.250.000	2 Unit	15.177.675	6 unit	95.464.000	5.486.300	1 Unit	11.540.000	1	17.026.300	13	18	-	-	-	-	32.203.975	-	29							
2	07	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	205 Unit	58.075.000	37 Unit	3.940.000	100 unit	11.416.199	-	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.940.000	-	7							
2	07	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhab	4 Unit	298.000.000	- Unit	-	2 unit	1.029.865.000	29.865.000	-	Unit	-	-	29.865.000	-	3	-	-	-	29.865.000	-	10							
2	07	03				PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase peserta pelatihan yang bekerja	55 %	789.751.725	- %	-	84.999.919	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
2	07	03	2.01			Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah pencari kerja yang dilatih	200 Orang	789.751.725	- orang	-	84.999.919	0	orang	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
2	07	03	2.01	01		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi	Jumlah kegiatan pelatihan bagi pencari kerja	30 Paket	789.751.725	- paket	-	15 paket	84.999.919	-	paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
2	07	04				PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase penempatan tenaga kerja terdaftar	70 %	287.831.399	93 %	10.000.000	34.899.174	-	-	14.000.000	-	-	14.000.000	-	-	-	-	-	-	24.000.000	-	8							
2	07	04	2.03			Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah informasi lowongan kerja	600 lowongan	287.831.399	33 Lowongan	10.000.000	34.899.174	-	1 Lowongan	14.000.000	1	14.000.000	-	-	-	-	-	-	-	24.000.000	-	8							
2	07	04	2.03	01		Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah aplikasi yang dipelihara	1 Aplikasi	77.831.399	1 Aplikasi	10.000.000	10 hari	14.000.000	1 Aplikasi	14.000.000	1	14.000.000	14	100	-	-	-	-	24.000.000	-	31								
2	07	04	2.03	02		Pelaksanaan dan Penyediaan informasi pasar kerja online	Jumlah pencari kerja yang terdaftar	1000 Pencaker	105.000.000	- Pencaker	-	500 Pencaker	20.899.174	-	Pencaker	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
2	07	04	2.03	03		Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja pada kegiatan job fair yang dilemakan	750 Pencaker	105.000.000	- Pencaker	-	400 pencari kerja	-	-	Pencaker	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
2	07	05				PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase pembinaan terhadap kelembagaan dan sarana hubungan industrial di perusahaan	25 %	491.176.099	55 %	95.644.500	244.499.582	3.000.000	-	61.124.000	-	-	64.124.000	-	-	-	-	-	-	159.768.500	-	33							
2	07	05	2.02			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang memiliki lembaga bipartit dan serikat pekerja	45 Perusahaan	491.176.099	34 Perusahaan	95.644.500	244.499.582	3.000.000	Perusahaan	61.124.000	-	-	64.124.000	-	-	-	-	-	-	159.768.500	-	33							
2	07	05	2.02	01		Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan	450 Kali	78.523.429	- Kali	-	250 kali	45.547.491	-	Kali	1.517.000	-	-	1.517.000	-	-	-	-	-	1.517.000	-	2							
2	07	05	2.02	02		Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus perselisihan HI yang diselesaikan	65 Kasus	166.905.530	16 Kasus	31.056.000	30 kasus	64.864.571	3.000.000	0 Kasus	1.477.000	-	-	4.477.000	0	7	-	-	-	35.533.000	-	21							
2	07	05	2.02	03		Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Koordinasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi	Jumlah organisasi / lembaga yang di verifikasi	35 Organisasi / Lembaga	153.820.640	- Organisasi / Lembaga	-	15 organisasi	55.999.984	-	Organisasi / Lembaga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
2	07	05	2.02	04		Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rapat LKS Tripartit	24 Kali	91.926.500	10 Kali	64.588.500	12 kali	78.087.536	-	Kali	58.130.000	-	-	58.130.000	-	74	-	-	-	122.718.500	-	133							
3.31	PERINDUSTRIAN								7.948.934.294		6.473.041.166																		81					
3	31	02				PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase gampong yang memiliki minimal satu produk industri kecil/ menengah	100 %	7.120.337.294	79 %	6.473.041.166	28.423.668.407	542.635.500	-	818.999.657	-	-	1.361.635.157	-	-	-	-	-	-	-	7.834.676.323	-	110						
3	31	02	2.01			Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah industri kecil yang mendapatkan pembinaan pelatihan, fasilitas sarana dan prasarana industri serta promosi produk industri	110 IKM	7.120.337.294	61 IKM	6.473.041.166	28.423.668.407	542.635.500	IKM	818.999.657	-	-	1.361.635.157	-	-	-	-	-	-	7.834.676.323	-	110							
3	31	02	2.01	03		Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah sumber daya industri kecil yang mendapatkan pembinaan pelatihan kerajinan dan fasilitas peralatan	200 KM	3.371.000.862	69 KM	2.612.767.800	100 KM	12.789.461.307	389.590.000	0 KM	604.480.000	-	-	994.070.000	0	8	-	-	-	3.606.837.800	-	107							
3	31	02	2.01	04		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah industri kecil yang mendapatkan pembinaan pelatihan pangan dan fasilitas sarana dan prasarana industri	120 IKM	1.191.599.640	52 IKM	16.064.650	-	-	-	IKM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.064.650	-	1							
3	31	02	2.01	05		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah industri kecil yang mendapatkan pembinaan pelatihan dan fasilitas promosi pemasaran	100 IKM	1.821.685.643	45 IKM	3.844.208.716	50 KM	15.624.207.100	153.045.500	0 KM	214.519.657	-	-	367.565.157	0	2	-	-	-	4.211.773.873	-	231							
3	31	02	2.01	06		Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah promosi produk industri kecil Kota Banda Aceh	16 Kali	736.050.949	- Kali	-	-	-	-	Kali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
3	31	04				PROGRAM PENGELOLAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Jumlah Penataan IKM	- %	828.597.000	- %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
3	31	04	2.01			Penyediaan Informasi Industri untuk RUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah industri kecil yang mendapatkan pembinaan teknologi dan fasilitas izin usaha industri	200 IKM	828.597.000	- IKM	-	-	-	-	IKM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							

Unsur	Kode				Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Pemutakhiran)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJM Kota Banda Aceh pada Tahun 22-222 Kepmendagri 5		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 221		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 222)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 221								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 221 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD OPD s/d Akhir Tahun 221		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi RPJMD OPD s/d Tahun 222 (%)		OPD Penanggung Jawab		
	Bid. Unsur	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Target	Rp	Kinerja	Rp	Target	Rp	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 221		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 221 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD OPD s/d Akhir Tahun 221			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi RPJMD OPD s/d Tahun 222 (%)	
													Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		Kinerja	Rp
2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi aktif yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	100 %	129.536.125	75 %	369.733.000	404.694.000	404.000	- %	155.371.833	-	-	-	-	-	-	155.775.833	-	39	525.508.833	406				
2	17	03	2.01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Kelengkapan, serta Akutabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diawasi dan dipantau	120 koperasi	129.536.125	45 koperasi	369.733.000	404.694.000	404.000	0 koperasi	155.371.833	-	-	-	-	-	-	155.775.833	1	39	525.508.833	406				
2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi yang memenuhi penilaian kesehatan koperasi	100 %	153.591.794	- %	-	62.083.244	1.759.300	-	-	-	-	-	-	-	-	1.759.300	-	-	1.759.300	1				
2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase KSP/USP yang sudah dinilai kesehatannya serta mendapatkan predikat sehat dan cukup sehat	100 %	153.591.794	- %	-	62.083.244	1.759.300	%	-	-	-	-	-	-	-	1.759.300	-	-	1.759.300	1				
2	17	04	2.01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah KSP/USP yang dinilai kesehatannya	60 koperasi	43.000.000	- koperasi	-	12.301.851	1.759.300	koperasi	-	-	-	-	-	-	-	1.759.300	-	14	1.759.300	4				
2	17	04	2.01	02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah KSP/USP yang mendapatkan penghargaan predikat sehat dan cukup sehat	8 koperasi	110.591.794	- koperasi	-	49.781.393	-	koperasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase jumlah koperasi yang telah mendapatkan pembinaan dan pelatihan	90 %	20.627.652.735	- %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi yang memahami pengelolaan kompetensi SDM Koperasi	90 %	20.627.652.735	- %	-	-	-	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengelolaan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Koperasi yang memahami pengelolaan kompetensi SDM koperasi	160 koperasi	222.600.000	- koperasi	-	-	-	koperasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil	80 %	20.404.452.735	74 %	7.336.816.650	8.999.894.506	26.333.750	1.768.720.000	-	-	-	-	-	-	-	1.795.053.750	-	-	9.131.869.800	45				
2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase jumlah usaha mikro yang didata, difasilitasi izin usaha, difasilitasi mitra usaha, dibina dan jumlah data base sesuai kluster	100 %	20.404.452.735	16 %	7.336.816.650	8.999.894.506	26.333.750	%	1.768.720.000	-	-	-	-	-	-	1.795.053.750	-	-	9.131.869.800	45				
2	17	07	2.01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah database Usaha Mikro sesuai cluster	1550 Usaha Mikro	58.200.000	203 Usaha Mikro	6.597.500	750 Usaha mikro	31.128.541	16.750.000	Usaha Mikro	-	-	-	-	-	-	16.750.000	-	54	23.347.500	40				
2	17	07	2.01	02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi mitra usaha	200 Usaha Mikro	53.500.000	- Usaha Mikro	-	100 Usaha mikro	31.608.805	9.583.750	Usaha Mikro	-	-	-	-	-	-	9.583.750	-	30	9.583.750	18				
2	17	07	2.01	03	Fasilitas Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi untuk mendapatkan izin usaha	1550 Usaha Mikro	950.000.000	- Usaha Mikro	-	-	-	-	Usaha Mikro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2	17	07	2.01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang dibina untuk Pengembangan Usaha	950 Usaha Mikro	19.368.452.735	232 Usaha Mikro	7.330.218.550	500 Usaha mikro	8.937.157.160	1.768.720.000	Usaha Mikro	1.768.720.000	-	-	-	-	-	1.768.720.000	-	20	9.098.938.550	47				
2	17	07	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Koordinasi	2 buku	32.500.000	- buku	-	-	-	-	buku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase terlaksananya promosi Usaha Mikro	85 %	335.412.000	- %	-	39.262.077	-	-	9.350.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah produk Usaha Mikro yang dipromosikan	85 %	335.412.000	- %	-	39.262.077	-	%	9.350.000	-	-	-	-	-	-	9.350.000	-	-	9.350.000	3				
2	17	08	2.01	01	Fasilitas Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produk dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah produk Usaha Mikro yang dipromosikan	33 produk	335.412.000	- produk	-	18 produk	39.262.077	-	produk	9.350.000	-	-	-	-	-	9.350.000	-	24	9.350.000	3				
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN PERDAGANGAN		31.281.970.942	-	7.426.018.103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.426.018.103	24				
3	30				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase meningkatnya sarana distribusi perdagangan	90 %	29.888.433.329	44 %	7.098.676.853	17.463.245.737	27.624.250	2.463.722.664	-	-	-	-	-	-	-	2.491.346.914	-	-	9.980.023.767	32				
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase jumlah pasar yang dibangun, direhab dan dilengkapi fasilitasnya	90 %	29.758.433.329	73 %	7.096.926.853	17.454.421.153	25.499.750	2.463.722.664	%	2.463.722.664	-	-	-	-	-	2.489.222.414	-	-	9.586.149.267	32				
3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar yang dibangun dan direhab	3 pasar direhab	15.906.000.303	1 Laporan	7.096.926.853	2 pasar	9.050.192.741	25.499.750	- Laporan	2.463.722.664	-	-	-	-	-	2.489.222.414	17	27	9.586.149.267	60				
3	30	03	2.01	02	Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar yang harus dilengkapi fasilitasnya	11 pasar	13.852.433.026	5 pasar	-	10 pasar	8.395.228.412	-	pasar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase jumlah pasar yang dikelola dan SDM pengelola pasar	90 %	130.000.000	8 %	1.750.000	8.824.584	2.124.500	%	-	-	-	-	-	-	-	2.124.500	-	-	3.874.500	3				
3	30	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar yang dibina dan dikelola	7 pasar	85.000.000	1 pasar	1.750.000	8.824.584	2.124.500	pasar	-	-	-	-	-	-	-	2.124.500	-	24	3.874.500	5				
3	30	03	2.02	02	Pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan	Jumlah SDM yang bisa menjadi pengelola pasar	2 orang	45.000.000	- orang	-	-	-	-	orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase jumlah data ketersediaan/ stok barang pokok, rekapitulasi harga dan pelaksanaan pasar murah	100 %	1.108.938.469	96 %	326.691.500	740.122.360	4.491.600	702.945.510	-	-	-	-	-	-	-	4.491.600	-	-	325.183.100	29				
3	30	04	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase ketersediaan/ stok barang pokok	100 %	93.522.995	67 %	6.191.500	17.287.872	2.450.850	7.537.022	%	7.537.022	-	-	-	-	-	9.987.872	-	-	16.179.372	17				
3	30	04	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang/ kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah stok jenis bahan pokok (beras, gula, telur, miring, terigu) yang terdapat pada distributor/ pedagang grosir di pasar- pasar rakyat	6 laporan	93.522.995	2 laporan	6.191.500	17.287.872	2.450.850	7.537.022	1 laporan	7.537.022	-	-	-	-	-	9.987.872	41	58	16.179.372	17				
3	30	04	2.02		Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota	Persentase data rekapitulasi harga barang pokok dan pelaksanaan pasar murah	100 %	1.015.415.474	74 %	314.500.000	722.834.488	2.040.750	695.408.488	%	695.408.488	-	-	-	-	-	697.448.238	-	-	1.011.949.238	100				
3	30	04	2.02	01	Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) kabupaten/ kota	Jumlah data rekapitulasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting dari beberapa pasar yang diformasikan setiap minggunya	37 jenis	73.599.145	30 jenis	11.400.000	20.848.022	1.289.750	4.148.022	jenis	4.148.022	-	-	-	-	-	5.437.772	-	26	16.637.772	23				

Kode	Unsur	Bd. Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Penutakhiran)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJM Kota Banda Aceh pada Tahun 22-222 Kependagri 5		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 221		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 222)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 221								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM OPD s/d Akhir Tahun 221 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM OPD s/d Akhir Tahun 221		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi RPJM OPD s/d Tahun 222 (%)		OPD Penanggung Jawab		
								Target	Rp	Kinerja	Rp	Target	Rp	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 221		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 221 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 221			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi RPJM OPD s/d Tahun 222 (%)	
														Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		Kinerja	Rp
3	30	04	2.02	03		Pelaksanaan operasi pasar regulasi dan pasar khusus yang bertempat dalam 1 (satu) kabupaten/kota	Jumlah Pelaksanaan pasar murah menjelang hari-hari besar keagamaan	3 kali	941.816.329	2 kali	303.100.000	3 kali	701.986.466	751.000	2 kali	691.260.466			2	692.011.466	76	99		995.111.466	106					
3	30	06				PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase meningkatnya perlindungan konsumen	90 %	239.599.144	25 %	6.649.750	43.423.298	11.663.250	1.842.500	-	-	-	-	2	13.505.750	-	-	-	20.155.500	8					
3	30	06	2.01			Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Terulung, dan Pengawasan	Persentase jumlah UTPP, barang yang terbungkus dan jumlah SDM di kegiatan metrologi legal	90 %	239.599.144	21 %	6.649.750	43.423.298	11.663.250	%	1.842.500	-	-	-	-	2	13.505.750	-	-	-	20.155.500	8				
3	30	06	2.01	01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Terulung	Jumlah UTPP (Ukur, Takar, Timbang dan Perengkapan lainnya) yang berada terulung	2450 UTPP	125.000.000	749 UTPP	6.649.750	1250 UTPP	43.423.298	11.663.250	0 UTPP	1.842.500			0	13.505.750	0	31		20.155.500	16					
3	30	06	2.01	02		Pengawasan/penyuluhan metrologi legal	Jumlah barang dalam keadaan terbungkus yang telah menggunakan penulisan berat dan volume yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	4 produk	54.599.144	- produk	-	-	-	-	produk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	30	06	2.01	03		Penyidikan metrologi legal	Jumlah SDM yang mampu melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran UTPP (Ukur, Takar, Timbang dan Perengkapannya)	4 orang	60.000.000	- orang	-	-	-	-	orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	30	07				PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Terpasangnya Running Text pada Pasar	90 %	45.000.000	- %	-	2.948.262	566.500	-	-	-	-	-	-	2	566.500	-	-	-	566.500	1				
3	30	07	2.01			Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Pengguna Produk Dalam Negeri	Jumlah Running text yang dipasang di pasar	90 %	45.000.000	- %	-	2.948.262	566.500	%	-	-	-	-	-	2	566.500	-	-	-	566.500	1				
3	30	07	2.01	03		Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Pemasaran	Jumlah Running text yang dipasang di pasar	2 unit	45.000.000	- unit	-	2.948.262	566.500	unit	-	-	-	-	-	2	566.500	-	19	566.500	1					
2	18					PENANAMAN MODAL			18.128.215.333	0	0	4.305.025.225												4.305.025.225	21					
2	18					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU			18.128.215.333	0	0	6.181.854.881	7.589.176.628	1.499.691.738	1.619.038.214									7.681.256.619	42	DPMPSP				
2	18	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100 %	16.966.263.588	92 %	7.680.315.183	6.816.064.600	1.395.396.738		1.527.620.164										2.923.016.902	10.063.332.605	59			
2	18	01	2.01			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi OPD yang terdapat	100 %	14.773.500	89 0%	3.279.500	4.940.123	-	Bulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.279.500	22			
2	18	01	2.01	01		Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	18 Dokumen	14.773.500	8 jenis	3.279.500	4.940.123	-	jenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.279.500	22			
2	18	01	2.02			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	100 %	11.334.790.517	100 0%	4.473.821.710	4.778.584.340	1.005.807.416	Bulan	1.031.521.225										2.037.328.641	6.511.150.351	57			
2	18	01	2.02	01		Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah waktu pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang disediakan	24 Bulan	9.444.090.517	12 Bulan	3.628.016.185	3.902.934.340	820.507.416	0 Bulan	833.261.996										1.633.769.412	2	42	5.281.785.597	65	
2	18	01	2.02	02		Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah waktu pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang disediakan	24 Bulan	1.890.700.000	12 Bulan	845.805.525	875.650.000	185.300.000	0 Bulan	198.259.229										383.599.229	2	44	1.229.364.754	56	
2	18	01	2.05			Kegiatan Administrasi Pegawai Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	101.545.000	0%	2.880.000			Bulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.880.000	3			
2	18	01	2.05	01		Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai yang disediakan	2 Unit	12.600.000	- unit	-	-	-	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	18	01	2.05	02		Kegiatan Pengadaan Pakelan Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Pakelan Dinas Beserta Perengkapannya yang disediakan	141 Stel	88.945.000	- Stel	2.880.000	-	-	Stel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.880.000	3				
2	18	01	2.06			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi umum	100 %	615.710.014	74 0%	71.502.102	119.730.077	2.879.003	Bulan	39.490.275										42.369.278	113.871.380	18			
2	18	01	2.06	01		Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	18 Jenis	15.646.331	9 Jenis	7.604.755	3.463.853	9 jenis	3.463.853	Jenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.604.755	49			
2	18	01	2.06	04		Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Jenis	91.125.000	7 Jenis	17.367.638	2.879.003	0 Jenis	4.222.435											7.101.438	3	41	28.863.738	32	
2	18	01	2.06	05		Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian	Jumlah jenis Barang Cetak dan Pengandaian yang disediakan	29 Jenis	307.938.593	9 Jenis	16.397.425	48.898.586	Jenis	22.237.840											22.237.840	45	38.635.265	13		
2	18	01	2.06	06		Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	2 Jenis	1.000.000	- Jenis	-	-	-	Jenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	18	01	2.06	09		Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	20 Laporan	200.000.000	6 Laporan	25.737.622	50.000.000	Laporan	13.030.000											13.030.000	26	38.767.622	19		
2	18	01	2.07			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	596.495.957	13 %	30.200.000	140.892.347	1.320.000	%	26.133.066										27.453.066	57.653.066	11			
2	18	01	2.07	01		Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	1 Unit	30.000.000	- 0%	-	-	-	Bulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	18	01	2.07	05		Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang disediakan	5 Unit	50.000.000	- 0%	-	-	-	Bulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	18	01	2.07	06		Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	70 Unit	341.718.957	- Unit	-	132.855.847	1.320.000	Unit	26.133.066										27.453.066	21	27.453.066	8		
2	18	01	2.07	10		Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	32 Unit	84.777.000	9 Unit	30.200.000	8.036.500	Unit	-											-	-	30.200.000	36		
2	18	01	2.08			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.069.172.600	93 %	1.481.088.991	1.674.248.774	382.876.319	%	423.106.538										805.982.857	2.287.071.848	57			
2	18	01	2.08	02		Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24 Bulan	2.784.500.000	12 Bulan	1.243.808.191	1.242.160.000	341.465.819	0 Bulan	354.000.000										0	695.465.819	2	56	1.939.274.010	70
2	18	01	2.08	04		Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	24 Bulan	1.224.672.600	10 Bulan	237.280.800	432.088.774	41.410.500	0 Bulan	69.106.538										0	110.517.038	2	26	347.797.838	28
2	18	01	2.09			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	383.716.000	49 0%	1.017.542.800	97.668.939	2.514.000	0 Bulan	7.369.060											0	9.883.060	1.027.425.860	268	
2	18	01	2.09	02		Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Pemeliharaan, Pembayaran Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14 Unit	112.060.200	1 unit	19.047.200	7 unit	44.440.000	1.914.000	unit	5.969.060										-	7.883.060	18	26.930.260	24
2	18	01	2.09	05		Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	10 Unit	10.000.000	- 0%	-	-	-	Bulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	18	01	2.09	06		Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	118 Unit	223.036.800	17 Unit	47.795.600	34.278.939	59 unit	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.795.600	21		
2	18	01	2.09	10		Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhab	64 Unit	38.619.000	37 Unit	950.700.000	32 unit	18.950.000	600.000	0 Unit	1.400.000									0	2.000.000	0	11	952.700.000	2.467
2	18	02				Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Pengembangan Iklim Penanaman Modal	100 %	256.000.000	- %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Kode	Unsur	Bid. Unsur	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Pemutakhiran)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJM Kota Banda Aceh pada Tahun 22-222 Kepmendagri 5		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 221		Target Kinerja dan Anggaran RKPJ Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 222)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 221								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPJ Tahun 221 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD OPD s/d Akhir Tahun 221		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi RPJMD OPD s/d Tahun 222 (%)		OPD Penanggung Jawab		
								Target	Rp	Kinerja	Rp	Target	Rp	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 221		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPJ Tahun 221 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD OPD s/d Akhir Tahun 221			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi RPJMD OPD s/d Tahun 222 (%)	
														Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		Kinerja	Rp
2	19	01	2.02	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah waktu Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran yang disediakan	24 Bulan	99.386.737	10 bulan	343.983.000	12 bulan	379.500.000	86.550.000	0 bulan	94.326.000	0	180.876.000	2	48	524.859.000	14-12/26x100	528							
2	19	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	52.244.484	- %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
2	19	01	2.05	02		Pengadaan Pakelan Dinas Beserta Abjad Kelengkapannya	Jumlah Pakelan Dinas Beserta Perengkapannya yang disediakan	87 stel	52.244.484	- stel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
2	19	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi umum	100 %	224.873.636	62 %	75.665.115	160.758.441	73.177.493	-	-	-	-	120.746.434	-	-	196.411.549	87								
2	19	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 Jenis	3.053.332	5 jenis	1.997.000	1.859.412	645.000	-	-	-	-	645.000	-	35	2.642.000	87								
2	19	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cekikan dan Pengandaan	Jumlah jenis Barang Cekikan dan Pengandaan yang disediakan	12 Jenis	31.989.804	4 jenis	17.064.688	9.622.900	3.547.250	0 jenis	3.824.500	0	7.371.750	7	43	16.994.659	53									
2	19	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	23 laporan	189.850.500	4 laporan	64.045.215	12 laporan	141.834.361	69.985.243	1 laporan	43.744.441	1	112.729.684	6	79	176.774.899	93								
2	19	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	195.227.978	- %	-	69.538.435	8.250.000	-	-	-	-	8.250.000	-	-	8.250.000	4								
2	19	01	2.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	30 jenis	195.227.978	- jenis	-	69.538.435	8.250.000	-	-	-	-	8.250.000	-	12	8.250.000	4								
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	-	-	unit	-	-	-	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
2	19	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	443.200.620	98 %	173.268.624	588.317.301	30.389.867	-	-	-	-	91.798.251	-	-	265.067.875	60								
2	19	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	24 Bulan	213.581.813	12 bulan	117.949.624	12 bulan	206.600.000	19.036.367	0 bulan	30.740.501	0	49.776.868	2	24	167.726.492	79								
2	19	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	24 Bulan	229.619.807	12 bulan	55.320.000	12 bulan	381.717.301	11.363.500	1 bulan	30.657.883	1	42.021.383	5	11	97.341.383	42								
2	19	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	391.797.533	75 %	118.554.825	119.977.055	3.564.275	0 %	3.980.334	-	0	7.544.609	-	-	126.099.434	32								
2	19	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Pemeliharaan, Pembayaran Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3 Unit	37.353.086	3 Unit	17.201.700	3 unit	43.226.000	1.004.900	0 Unit	1.800.000	0	2.804.900	3	6	20.006.600	54								
2	19	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhab	8 Unit	261.595.688	4 Unit	85.209.000	4 unit	52.696.000	-	-	-	-	-	-	-	85.209.000	33								
2	19	01	2.09	10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhab	96 Unit	92.848.759	17 Unit	16.144.125	48 unit	24.055.055	2.559.375	Unit	2.180.334	-	4.739.709	-	20	20.883.834	22								
2	19	02				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	80 %	719.067.353	89 %	486.668.000	392.860.253	-	-	-	-	-	75.582.613	-	-	562.256.613	78								
2	19	02	2.01			Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang diberdayakan dan dikembangkan.	Persentase Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang diberdayakan dan dikembangkan.	100 %	679.515.165	38 %	186.668.000	192.860.253	-	-	-	-	-	75.582.613	-	-	262.250.613	39								
2	19	02	2.01	02		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	Persentase wirausaha muda yang mandiri	24 Orang	71.193.938	9 Orang	114.360.000	12 orang	25.000.000	Orang	-	-	-	-	-	-	114.360.000	161								
2	19	02	2.01	06		Perencanaan, Pengadaan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	Jumlah fasilitas Prasarana dan sarana pelayanan kepemudaan	24 Fasilitas	12.430.688	- Fasilitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
2	19	02	2.01	07		Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berprestasi	jumlah pemuda yang mendapatkan penghargaan terhadap prestasi yang diraih	40 Orang	12.430.688	- Orang	-	-	-	-	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-							
2	19	02	2.01	08		Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	jumlah pemuda kader kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan	305 Orang	298.459.193	- Orang	-	155 orang	91.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
2	19	02	2.01	09		Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Peserta Pasikabra asal Kota Banda Aceh	2 Orang	96.332.647	2 Orang	72.308.000	2 orang	76.660.253	Orang	75.582.613	-	-	75.582.613	-	99	147.890.613	150								
2	19	02	2.02			Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase hasil Subkegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan yang dilaksanakan	100 %	39.552.188	33 %	300.000.000	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	300.000.000	758								
2	19	02	2.02	01		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah kegiatan pelatihan Pda kemitraan antar pemuda dengan Dunia Usaha yang dilaksanakan	2 kali	18.081.000	- kali	-	-	-	-	kali	-	-	-	-	-	-	-								
2	19	02	2.02	02		Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah OKP Kepemudaan yang menerima bantuan untuk peningkatan kapasitas organisasi	2 OKP	21.471.188	1 OKP	300.000.000	1 okp	200.000.000	OKP	-	-	-	-	-	-	300.000.000	1.397								
2	19	03				Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	80 %	5.674.654.111	54 %	4.880.388.842	14.303.233.537	2.911.004.000	-	-	-	-	6.081.943.300	-	-	10.962.332.142	187								
2	19	03	2.01			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	3.060.584.422	64 %	2.401.686.242	9.884.636.000	2.456.393.000	-	-	-	-	4.658.365.100	-	-	7.000.051.342	231								
2	19	03	2.01	03		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas Prasarana dan sarana Olahraga yang disediakan	3 fasilitas	3.060.584.422	3 fasilitas	2.401.686.242	2 fasilitas	2.456.393.000	1 fasilitas	2.201.972.100	1	4.658.365.100	46	47	7.000.051.342	231									
2	19	03	2.02			Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	1.638.187.000	36 %	457.413.600	2.783.274.537	372.118.000	-	-	-	-	1.141.305.200	-	-	1.598.718.800	98								
2	19	03	2.02	01		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event yang diselenggarakan	4 event	488.187.000	1 event	373.900.000	2 event	1.511.150.000	1 event	449.568.000	1	449.568.000	60	30	823.468.000	169									

Kode	Unsur	Bid. Unsur	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Pemutakhiran)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJM Kota Banda Aceh pada Tahun 22- 222 Kependagri 5		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 221		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 222)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 221								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 221 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD OPD s/d Akhir Tahun 221		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi RPJMD OPD s/d Tahun 222 (%)		OPD Penanggung Jawab				
								Target	Rp	Kinerja	Rp	Target	Rp	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 221		Kinerja	Rp		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
														Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		Kinerja	Rp							
2	19	03	2.02	03		Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta POPDA yang dikirim	296 atlet	1.150.000.000	- atlet	83.513.600	148 Atlet	1.272.124.537	372.118.000	4 atlet	319.619.200			4	691.737.200	3	54		775.250.800	67						
2	19	03	2.03			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	100 %	650.382.563	- %	-		200.000.000	-	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
2	19	03	2.03	01		Selaku Atlet Daerah	Jumlah atlet yang mengikuti seleksi	1000 Atlet	365.031.250	- Atlet	-		Atlet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
2	19	03	2.03	03		Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah atlet yang mengikuti pembinaan dan pembebanan	302 Atlet	143.240.688	- Atlet	-	151 Atlet	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
2	19	03	2.03	05		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah dokumen data dan informasi bidang olahraga	4 dokumen	142.110.625	- dokumen	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
2	19	03	2.04			Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	70 %	290.148.813	27 %	1.150.000.000	1.051.400.000	-	-	%	-	-	-	-	-	-	-	-	1.150.000.000	396						
2	19	03	2.04	01		Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah Organisasi Olahraga yang terstandarisasi	2 Organisasi Olahraga	45.202.500	- Organisasi Olahraga	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
2	19	03	2.04	02		Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Organisasi Olahraga yang terbita	2 Organisasi Olahraga	136.737.563	1 Organisasi Olahraga	1.150.000.000	1 Organisasi olahraga	1.051.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.150.000.000	841						
2	19	03	2.04	03		Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait	Jumlah Organisasi Cabor yang bekerjasama dengan lembaga terkait	4 Organisasi Cabor	108.208.750	- Organisasi Cabor	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
2	19	03	2.05			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	100 %	235.351.313	75 %	871.289.000	383.923.000	82.493.000	199.780.000	%	282.273.000	-	74	-	-	-	-	-	1.153.562.000	490						
2	19	03	2.05	01		Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah kegiatan Olahraga jasmani dan Rekreasi yang diselenggarakan	2 kali	137.313.125	1 kali	799.469.000	383.923.000	82.493.000	199.780.000	kali	282.273.000	-	74	-	-	-	-	-	1.081.742.000	788						
2	19	03	2.05	05		Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Event Olahraga Tradisional yang dilaksanakan	1 event	96.036.198	1 event	96.690.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.690.000	99						
2	19	04				Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	100 %	21.471.188	74 %	296.935.659	702.100.000	52.025.679	82.970.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	421.931.329	2.012						
2	19	04	2.01			Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase subkegiatan Pembinaan dan pengembangan Organisasi Kepramukaan yang dilaksanakan	100 %	21.471.188	74 %	296.935.659	702.100.000	52.025.679	82.970.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	431.931.329	2.012						
2	19	04	2.01	05		Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah lembaga yang menjalin kerjasama dalam penyelenggaraan kegiatan kepramukaan	1 lembaga	21.471.188	1 lembaga	296.935.659	702.100.000	52.025.679	82.970.000	0 lembaga	82.970.000	-	28	19	-	-	-	-	431.931.329	2.012						
						Usuran Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat		0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!						
1	05					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH		45.746.989.962	15.060.291.173	17.203.881.035	3.296.167.558	3.145.916.686	3.296.167.558	18.358.458.731	40	Satpol PP															
1	05	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100 %	36.181.810.899	96 %	13.788.359.673	15.209.430.067	2.919.890.058	3.117.746.586	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.825.996.317	55						
1	05	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi OPD yang teraspek	100 %	10.500.000	38 %	10.600.000	21.927.045	-	-	%	-	-	-	-	-	-	-	-	10.600.000	101						
1	05	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	18 Dokumen	10.500.000	8 Dokumen	10.600.000	21.927.045	-	-	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	10.600.000	101						
1	05	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	100 %	30.461.095.460	98 %	12.788.407.425	13.391.893.695	2.804.057.524	2.669.487.055	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.261.952.004	60						
1	05	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah waktu pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang disediakan	24 Bulan	17.048.442.411	12 Bulan	5.711.880.232	5.345.086.195	1.391.257.524	0 Bulan	1.408.962.055	0	2.800.219.579	2	52	-	-	-	-	8.512.099.811	50						
1	05	01	2.02	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah waktu Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perencanaan yang disediakan	24 Bulan	13.412.653.049	12 Bulan	7.076.527.193	12 Bulan	8.046.827.500	1.412.800.000	0 Bulan	1.260.525.000	0	2.673.325.000	1	33	-	-	-	-	9.749.852.193	73					
1	05	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	1.364.619.108	- %	74.894.500	310.991.825	-	-	%	-	-	-	-	-	-	-	-	74.894.500	5						
1	05	01	2.05	02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang disediakan	450 Slei	1.240.363.086	- Slei	74.894.500	230 Slei	268.750.000	-	-	Slei	-	-	-	-	-	-	-	-	74.894.500	6					
1	05	01	2.05	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	422 Pegawai	67.752.897	- Pegawai	-	130 Pegawai	42.241.825	-	-	Pegawai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
1	05	01	2.05	11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	422 Pegawai	56.503.125	- Pegawai	-	-	-	-	-	Pegawai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
1	05	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi umum	100 %	459.655.034	65 %	26.887.900	82.647.551	-	-	%	15.575.326	-	-	-	-	-	-	-	42.463.226	9						
1	05	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	20 Jenis	8.645.555	10 Jenis	3.152.000	2.091.986	-	-	Jenis	-	-	-	-	-	-	-	-	3.152.000	36						
1	05	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian	Jumlah jenis Barang Cetak dan Pengandaian yang disediakan	20 Jenis	23.845.854	9 Jenis	12.016.000	45.556.565	-	-	Jenis	3.999.226	-	9	-	-	-	-	-	16.015.226	67						
1	05	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	70 Laporan	427.163.625	- Laporan	11.719.900	36 laporan	35.000.000	-	-	Laporan	11.576.100	-	33	-	-	-	-	-	23.296.000	5					
1	05	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1.547.100.000	- %	52.800.000	65.292.531	-	-	%	52.406.700	-	-	-	-	-	-	-	105.206.700	7						
1	05	01	2.07	02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	2 Unit	1.360.000.000	- Unit	-	-	-	-	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
1	05	01	2.07	05		Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang disediakan	25 Unit	125.000.000	- Unit	-	5 unit	12.885.831	-	-	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
1	05	01	2.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	11 Unit	18.000.000	- Unit	52.800.000	12 unit	52.406.700	-	-	Unit	52.406.700	-	100	-	-	-	-	105.206.700	584						
1	05	01	2.07	10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	5 Unit	44.100.000	- Unit	-	-	-	-	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
1	05	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.221.240.848	91 %	478.575.048	698.773.923	57.250.284	189.927.355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	725.752.687	59						
1	05	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	24 Bulan	27.352.711	11 Bulan	31.494.048	49.530.000	1.507.360	-	-	-	1.507.360	-	3	-	-	-	-	33.001.408	121						
1	05	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	24 Bulan	1.193.888.137	11 Bulan	447.081.000	649.242.923	55.742.924	0 Bulan	189.927.355	0	245.670.279	4	38	-	-	-	-	692.751.279	58						
1	05	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.117.600.449	50 %	366.794.800	637.903.497	58.562.250	190.350.150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	615.727.200	55						

Unsur	Kode	Bid. Unsur	Program	Program Kegiatan	Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Pemutakhiran)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJM Kota Banda Aceh pada Tahun 22-222 Kependagri 5		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 221		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 221								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD OPD s/d Akhir Tahun 221 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD OPD s/d Akhir Tahun 221		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi RPJMD OPD s/d Tahun 222 (%)		OPD Penanggung Jawab		
								Target	Rp	Kinerja	Rp	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 221		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 221 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 221			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi RPJMD Tahun 221 (%)	
												Target	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		Kinerja	Rp
1	05	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pakai, dan Peroniran Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Pemeliharaan, Pembayaran Pakai dan Peroniran Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	53 Unit	975.779.361	30 Unit	361.475.800	27 unit	555.144.495	58.582.250	1 Unit	190.350.150	1	248.932.400	2	45	610.408.200	63						
1	05	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	74 Unit	17.239.375	31 Unit	5.319.000	37 unit	5.959.002		Unit		-	-	-	-	5.319.000	31						
1	05	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhab	1 Unit	39.375.000	- Unit	-	1 unit		Unit		-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1	05	01	2.09	10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhab	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhab	10 Unit	85.206.713	- Unit	-	2 unit	76.800.000	Unit		-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1	05	02				Program Peningkatan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum	Persentase Peningkatan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum	100 %	9.567.099.063	56 %	1.271.931.500	1.994.450.968	378.277.500	28.070.100			-	-	-	-	406.347.600	1.678.279.100	18					
1	05	02	2.01			Kegiatan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Keterlibatan umum dalam 1 (satu) Daerah	Persentase penanganan gangguan ketertarikan dan keterlibatan umum	100 %	8.046.338.787	10 %	161.406.500	1.010.643.004	378.277.500	28.070.100			-	-	-	-	406.347.600	567.754.100	7					
1	05	02	2.01	02		Penindakan atas gangguan ketertarikan dan keterlibatan umum berdasarkan perda dan Perkada	Jumlah Kasus Pelanggaran Trantum yang dilatikan	200 Kasus	339.018.750	- Kasus	-			Kasus			-	-	-	-	-	-	-	-				
1	05	02	2.01	03		Koordinasi Penyelenggaraan Ketertarikan dan keterlibatan Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi Ketertarikan dan keterlibatan umum yang dilaksanakan	11 Kali	822.666.252	4 Kali	140.206.500	652.630.000	378.277.500	Kali	-					378.277.500	58	518.484.000	63					
1	05	02	2.01	04		Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketertarikan dan keterlibatan umum	Jumlah Salimnas gampong yang diberdayakan	1,25 Orang	193.725.000	- Orang	-			Orang			-	-	-	-	-	-	-	-				
1	05	02	2.01	05		Peningkatan Kapasitas SDM Smpol Polisi Pamong Praja Dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Smpol PP VH dan Limas yang mengikut peningkatan kapasitas	1,65 Orang	949.252.500	- Orang	-	474 orang	130.192.904	Orang			-	-	-	-	-	-	-	-				
1	05	02	2.01	07		Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam bentuk pencegahan dan penanganan gangguan ketertarikan dan keterlibatan umum	Jumlah kerjasama dan kemitraan dalam upaya pencegahan dan penanganan gangguan trantum yang dilaksanakan	24 Kali	79.104.375	- Kali	-			Kali			-	-	-	-	-	-	-	-				
1	05	02	2.01	08		Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketertarikan dan keterlibatan umum	Jumlah sarana dan prasarana trantum yang dibeli dan dipelihara	6 Unit	5.618.832.346	- Unit	21.200.000	474 orang	227.820.100	Unit	28.070.100					28.070.100	12	49.270.100	1					
1	05	02	2.01	10		Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah layanan Penegakan Qanun dan Perwal yang diangan	6 Layanan	43.799.954	- Layanan	-			Layanan			-	-	-	-	-	-	-	-				
1	05	02	2.02			Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase penegakan Perda Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	100 %	1.093.921.388	100 %	924.673.000	496.379.964	-	%	-					-	-	924.673.000	85					
1	05	02	2.02	03		Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah kasus pelanggaran Perda yang diselesaikan	600 Kasus	1.093.921.388	300 Kasus	924.673.000	496.379.964	300 kasus	496.379.964	Kasus					-	-	924.673.000	85					
1	05	02	2.03			Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase pembinaan pembinaan PPNS Kabupaten/ Kota	100 %	271.794.358	67 %	12.222.000	30.248.000	-	%	-					-	-	12.222.000	4					
1	05	02	2.03	01		Pembinaan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah PNS yang dilatise untuk mengikuti Diklat PPNS	5 Orang	271.794.358	2 Orang	12.222.000	30.248.000	-	Orang						-	-	12.222.000	4					
1	05	02	2.04			Pengelolaan satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisab Aceh *****)	Persentase Pengelolaan personil Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisab Aceh *****)	100 %	154.984.530	11 %	173.630.000	457.180.000	-	%	-					-	-	173.630.000	112					
1	05	02	2.04	02		Operasionalisasi Penegakan, Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam *****)	Jumlah Operasionalisasi Penegakan, Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam yang dilaksanakan	24 Kali	67.803.750	5 Kali	173.630.000	364.755.000	12 kali	364.755.000	Kali	-				-	-	173.630.000	256					
1	05	02	2.04	04		Penyuluhan dan sosialisasi Qanun dan Peraturan Perundang-undangan Syariat Islam *****)	Jumlah Penyuluhan dan sosialisasi Qanun dan Peraturan Perundang-undangan syariat Islam yang dilaksanakan	45 Kali	41.343.750	- Kali	-	48 kali	92.425.000	Kali						-	-	-	-	-				
1	05	02	2.04	06		Bimbingan Teknis Bagi Polisi Wilayahul Hisab Aceh dan Kabupaten/Kota *****)	Jumlah Bimbingan Teknis Polisi Wilayahul Hisab Kota Banda Aceh yang dikuti	4 Kali	45.837.000	- Kali	-	2 kali		Kali						-	-	-	-	-				
8	01					Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa		0	0	-				Bulan														
8	01					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		27.443.137.425		6.265.693.833	9.828.968.014	2.364.211.083	3.500.117.611							2.364.211.083		8.629.904.936	31	Kesbangpol				
8	01	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	100 %	12.249.641.634	95 %	3.717.996.728	4.181.272.660	890.519.058	1.825.509.586							2.716.028.644	6.434.019.372	53					
8	01	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi OPD yang Tersusun	100 %	10.000.000	- bulan	1.393.050	12.388.117	500.000	2.263.366							2.763.366	4.096.436	41					
8	01	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	5 Dok	10.000.000	- 0%	1.393.050	12.388.117	500.000	2.263.366							2.763.366	4.096.436	41					
8	01	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan	100 %	11.855.147.055	96 %	3.387.373.519	3.714.506.533	821.821.072	1.633.726.338							2.455.547.410	5.842.920.929	53					
8	01	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Waktu Pembiayaan gaji dan Tunjangan ASN yang disediakan	60 bulan	10.964.303.591	11 Bulan	3.173.148.519	12 bulan	3.498.206.533	775.721.072	0 Bulan	1.536.176.338					2.311.897.410	66	5.485.045.929	50				
8	01	01	2.02	02		Penyediaan Administasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Waktu Jasa Tenaga Pendukung Administasi / Teknis Perkantoran yang disusun	60 bulan	90.843.464	12 Bulan	214.225.000	12 bulan	216.300.000	46.100.000	0 Bulan	97.550.000					143.850.000	66	357.875.000	394				
8	01	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Administrasi Umum	100 %	523.438.405	44 0%	63.594.105	292.655.757	50.063.500	155.458.457							205.461.957	269.056.062	51					
8	01	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penangan	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik / Penangan bangunan Kantor Yang Disediakan	47 jenis	6.038.432	10 0%	2.239.000	10 jenis	1.563.404	-	Bulan	1.563.404					1.563.404	100	3.802.404	63				
8	01	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan/Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 jenis	101.705.624	- 0%	-	5 jenis	159.483.333		Bulan	86.740.000					86.740.000	54	86.740.000	85				
8	01	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetaklan adan Pengandaan	Jumlah Jenis Barang Cetaklan dan Pengandaan yang Disediakan	45 jenis	20.104.932	5 0%	11.124.000	10 jenis	1.415.750		Bulan						-	-	11.124.000	55				
8	01	01	2.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 Jenis	3.038.765						Bulan						-	-	-	-				
8	01	01	2.06	09		Penyediaan Laporan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah yang Disediakan	100 laporan	392.550.662	14 Laporan	50.231.105	20 laporan	130.193.270	50.003.500	1 Laporan	67.155.063					117.158.553	90	167.389.658	43				
8	01	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	415.482.414	67 %	47.921.154	94.700.604	18.194.486	29.143.636							47.338.122	-	95.259.276	23				
8	01	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	60 bh	166.482.479	10 Bulan	33.376.154	12 bulan	53.725.800	2.814.333	0 Bulan	11.685.577					14.499.910	27	47.876.064	29				
8	01	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60 bh	248.999.935	6 Bulan	14.545.000	12 bulan	40.974.804	15.380.153	1 Bulan	17.458.059					32.838.212	80	47.383.212	19				

Unsur	Kode	Unsur	Bd.	Unsur	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Pemutakhiran)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJM Kota Banda Aceh pada Tahun 22-222 Keptandagri 5		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 221		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 222)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 221				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 221		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 221 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD OPD sid Akhir Tahun 221		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi RPJMD OPD sid Tahun 222 (%)		OPD Penanggung Jawab		
										Target	Rp	Kinerja	Rp	Target	Rp	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		Kinerja	Rp
																Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp									
8	01	01	2.09					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	245.573.160	88 %	217.708.900	67.021.049	-	4.977.769	-	-	4.977.769	-	-	4.977.769	-	222.686.669	91							
8	01	01	2.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Pecorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Pemeliharaan dan Pembayaran Pajak kendaraan Pecorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6 unit	185.482.375	3 unit	15.020.900	16.721.077	unit	1.365.000	unit	1.365.000	-	8	1.365.000	-	16.385.900	9								
8	01	01	2.09	06				Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlatan dan Mesin lainnya yang dipeelihara	4 unit	46.030.817	2 unit	3.044.000	6.515.572	unit	3.612.769	unit	3.612.769	-	55	3.612.769	-	6.656.769	14								
8	01	01	2.09	09				Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara / Direhap	2 unit	14.059.968	1 unit	199.644.000	43.784.400	unit	-	unit	-	-	-	-	-	-	199.644.000	1.420							
8	01	02						Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Meningkatnya Kesadaran Berbangsa, Bernegara dan cinta Tanah Air	85 %	1.128.909.944	75 %	800.165.000	74.225.050	7.550.000	7.550.000	-	-	7.550.000	-	-	15.100.000	-	815.265.000	72							
8	03	02	2.01					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Ideologi, Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	85 %	1.128.909.944	75 %	800.165.000	74.225.050	7.550.000	7.550.000	-	-	7.550.000	-	-	15.100.000	-	815.265.000	72							
8	01	02	2.01	03				Pelaksanaan Kebijakan di bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Gampong yang mendapatkan pembinaan Wawasan kebangsaan				10 gampong	38.833.010	Bulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
8	01	02	2.01	04				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Bela Negara, karakter bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, Sejarah Kebangsaan	5.000 -orang	1.128.909.944	64 %	800.165.000	100 orang	35.392.040	7.550.000	7.550.000	-	-	7.550.000	-	43	15.100.000	-	815.265.000	72						
8	01	03						Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Pelaksanaan Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	90 %	9.485.441.673	85 %	1.513.849.500	3.293.362.312	1.459.861.400	1.504.236.400	-	-	1.504.236.400	-	-	2.964.097.800	-	4.477.947.300	47							
8	03	03	2.01					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pematapan Situasi Politik	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Kebijakan teknis dan Pematapan Bidang Pendidikan Politik	90 %	9.485.441.673	30 %	1.513.849.500	3.293.362.312	1.459.861.400	1.504.236.400	-	-	1.504.236.400	-	-	2.964.097.800	-	4.477.947.300	47							
8	01	03	2.01	03				Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pematapan Situasi Pematapan Situasi Politik di Daerah	Jumlah peserta yang mengikuti Diskusi Politik	100 orang	359.341.148	82 %	1.513.849.500	100 orang	3.136.022.622	1.449.936.400	1.494.311.400	1 %	1.494.311.400	-	94	2.944.247.800	-	4.458.097.300	1.241							
8	01	03	2.01	04				Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pematapan Situasi Pematapan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Partai Politik Yang menyelesaikan LPJ	125 orang	8.863.280.150	- %	-	9 partai politik	46.373.780	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
8	01	03	2.01	05				Pelaksanaan Monitoring Dibidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pematapan Situasi Pematapan Situasi Politik di Daerah	Jumlah partai Politik Yang Diverifikasi untuk mendapatkan bantuan Keuangan	10 partai	262.620.375	- %	-	10 partai politik	110.965.910	9.925.000	9.925.000	-	-	9.925.000	-	18	19.850.000	-	19.850.000	8						
8	01	04						Program Pemberdayaan dan Penguasaan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Tersedianya data pemberdayaan dan Penguasaan Organisasi Kemasyarakatan	85 %	159.181.350	- %	-	29.075.690	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
8	01	04	2.01					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Penguasaan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemberdayaan dan Penguasaan Organisasi Masyarakat Kemasyarakatan	85 %	159.181.350	- %	-	29.075.690	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
8	01	04	2.01	03				Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pemberdayaan Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Penguasaan Ormas dan Ormas Asing Di Daerah	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	90 orang	159.181.350	- orang	-	90 orang	29.075.690	orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
8	01	05						Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	85 %	3.115.308.245	23 %	133.621.125	873.409.577	440.625	88.915.625	-	-	88.915.625	-	-	89.356.250	-	222.977.375	7							
8	01	05	2.01					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase pelaksanaan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Penguasaan Organisasi Kemasyarakatan		3.115.308.245	51 %	133.621.125	873.409.577	440.625	88.915.625	%	88.915.625	-	-	89.356.250	-	222.977.375	7								
8	01	05	2.01	03				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, sosial, Budaya dan Fasilitas Pengawasan Penyelenggaraan Narkotika, Fasilitas Kemukiman Umot, Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Pelaksanaan kegiatan kebijakan dibidang ketahanan ekonomi, sosial dibidang ketahanan ekonomi, sosial budaya dan fasilitas pengawasan penyelenggaraan narkotika, fasilitas kemukiman umot beragama dan penghayat kepercayaan di Daerah				1 kali	34.366.960	Bulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

Kode				Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Pemutakhiran)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJM Kota Banda Aceh pada Tahun 22-222 Kependagri 5		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 221		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 222)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 221								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 221		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 221 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD OPD s/d Akhir Tahun 221		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi RPJMD OPD s/d Tahun 222 (%)		OPD Penanggung Jawab	
Unsur	Bd. Unsur	Program	Kegiatan			Sub Kegiatan	Target	Rp	Kinerja	Rp	Target	Rp	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 221		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 221 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD OPD s/d Akhir Tahun 221		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi RPJMD OPD s/d Tahun 222 (%)		
													Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah waktu logistik yang disediakan	24 Jenis	787.422.590	3 Jenis	146.667.000	12 Jenis	275.251.450	55.043.000	1 Jenis	132.934.586					187.977.586	-	68	334.644.586	42					
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cekikan dan Pengandaan	Jumlah jenis cekikan dan pengandaan yang disediakan	2000 Jenis	339.273.889	313 Jenis	47.641.000	1000 Jenis	137.088.160	18.735.000	1 Jenis	54.549.641					73.284.641	-	53	120.925.641	36					
4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	34 Jenis	205.472.481	6 Jenis	31.343.800	17 Jenis	73.608.800	22.607.200	1 Jenis	39.284.400					61.891.600	-	84	93.235.400	45					
4	01	01	2.06	09	Rapat Koordinas dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan	240 Laporan	3.082.210.500	30 Laporan	1.151.247.462	120 Laporan	1.773.461.600	634.774.116	1 Laporan	1.447.556.438					2.082.330.554	-	117	3.233.578.016	105					
4	01	01	2.07	01	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana operasional Kantor	100 %	5.596.061.384	11 0%	81.999.000		1.181.440.052	583.862.915	13 Bulan	1.063.362.915	-	-	-	-	1.647.225.830	-	-	1.729.224.830	31					
4	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Roda Dua yang tersedia Jumlah Kendaraan Dinas Roda Empat yang tersedia	12 Unit	2.465.768.400	- Unit	-	6 unit	1.055.000.000	568.863.675	- Unit	1048363875					1.617.227.750	-	-	1.617.227.750	66					
4	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah jenis mebelur yang disediakan	40 Unit	356.303.534	8 Unit	71.999.000	20 unit	76.440.052	14.999.040	0 Unit	14.999.040					29.998.080	-	-	101.997.080	29					
4	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	100 Unit	1.232.884.200			12 bulan			Bulan						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang disediakan	100 Unit	1.541.105.250	- Unit	10.000.000	50 unit	50.000.000		Unit						-	-	-	10.000.000	1					
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran yang maksimal	100 %	16.967.035.272	56 0%	3.021.717.402		5.508.185.620	714.153.466	Bulan	2.735.342.120	-	-	-	-	3.449.495.586	-	-	6.471.212.988	38					
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surtal Menyurat	Jumlah bendu pos yang disediakan	24 Bulan	14.178.168	- Bulan	-	12 Bulan	4.957.177		Bulan					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	24 Bulan	6.960.463.232	9 Bulan	1.241.207.380	12 Bulan	1.352.100.000	337.504.267	1 Bulan	785.921.382					1.123.425.629	-	-	2.364.633.009	34					
4	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan Kantor	Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	24 Bulan	1.102.609.436	7 Bulan	41.338.000	12 Bulan	785.153.000	42.042.000	9 Bulan	386.960.000					429.002.000	-	-	470.340.000	43					
4	01	01	2.08	04	penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan Jumlah porsi makanan dan minuman yang disediakan Jumlah waktu jasa kebersihan kantor yang disediakan	24 Bulan	8.889.794.436	11 Bulan	1.739.172.022	12 Bulan	3.365.975.443	334.607.199	1 Bulan	1.562.460.758					1.897.067.957	-	-	3.636.239.979	41					
4	01	01	2.09	01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya sarana dan prasarana peralatan kantor	100 %	14.813.576.848	36 0%	3.671.551.408		5.622.666.799	1.327.657.590	1 Bulan	2.366.156.740	-	-	-	-	3.693.814.330	-	-	7.365.365.738	50					
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kedaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Pemeliharaan dan Pembayaran Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kedaraan Dinas Jabatan	664 Unit	1.438.364.900			302 kali			Bulan					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	200 Unit	3.596.260.540	34 Unit	1.388.061.331	100 unit	1.785.985.890	424.733.890	0 Unit	687.070.590					1.111.804.480	-	-	2.499.865.611	70					
4	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mobilur yang di pelihara	100 Unit	205.480.540	- Unit	-	50 unit	30.000.000	5.000.000	- Unit	5.000.000					10.000.000	-	-	10.000.000	5					
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan Mesin dan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang di pelihara Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas yang di pelihara	20 Unit	1.555.488.899	7 Unit	99.170.500	10 unit	160.000.000	0 Unit	44.876.000					44.876.000	-	-	144.046.500	9						
4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Jumlah rumah jabatan/dinas yang dipelihara	8 Unit	2.790.941.608	1 Unit	1.828.249.577	5 unit	3.084.907.209	691.150.000	1 Unit	1.368.753.450					2.059.903.450	-	-	3.888.153.027	139					
4	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelara	60 Unit	1.555.488.899	12 Unit	356.070.000	30 unit	561.773.700	206.773.700	1 Unit	260.456.700					467.230.400	-	-	823.300.400	53					
4	01	01	2.12	01	Facilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Tingkat pelaksanaan administrasi umum yang maksimal	100 %	9.026.638.726	68 0%	4.254.907.180		3.695.373.000	420.123.000	0 Bulan	1.928.703.620	-	-	-	-	2.348.826.620	-	-	6.603.733.800	73					
4	01	01	2.12	01	Penyediaan Kebuahan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Kebuahan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Dilaksanakan	24 bulan	2.525.666.024	7 bulan	763.358.000	12 bulan	2.389.300.000	94.350.000	1 bulan	1.103.310.520					1.197.660.520	-	-	1.961.018.520	78					
4	01	01	2.12	02	Penyediaan Kebuahan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Kebuahan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Dilaksanakan	24 bulan	91.849.873	5 bulan	36.750.000	12 bulan	629.700.000		10 bulan	385.131.000					385.131.000	-	-	421.881.000	459					
4	01	01	2.12	03	Penyediaan Kebuahan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Kebuahan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Dilaksanakan	24 bulan	6.409.122.829	12 bulan	3.454.799.180	12 bulan	676.373.000	325.773.000	0 bulan	440.262.100					766.035.100	-	-	4.220.834.280	66					
4	01	01	2.13	01	Penataan Organisasi	Jumlah OPD sesuai Peraturan Perundang-undangan	88 OPD	2.852.027.424	12 OPD	142.961.900		558.585.825	8.691.500	OPD	158.666.500	-	-	-	-	167.358.000	-	-	310.319.900	11					
4	01	01	2.13	01	Pengelolaan Kelambagaan dan Analisa jabatan OPD	Jumlah Perwal Kelambagaan dan Analisa jabatan OPD	4 Perwal	1.005.741.725	- Perwal	2.907.400	2 Laporan	181.148.327		Perwal	30.725.000					30.725.000	-	-	33.632.400	3					
4	01	01	2.13	02	Facilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100 %	780.488.131	18 %	139.454.500		212.781.188	13		45.825.000					45.825.000	-	-	185.279.500	24					
4	01	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Nilai SAKIP dan Nilai RB	16 Predikat	1.065.797.569	- Predikat	600.000	2 laporan	164.656.310	8.691.500	1 %	82.116.500					90.808.000	-	-	91.408.000	9					
4	01	01	2.14	01	Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Nashah Pidato dan Pembertaan yang dihasilkan	100 %	12.508.798.389	45 %	3.226.500.118		3.271.216.587	1.068.606.000	1 %	2.538.271.000	-	-	-	-	3.606.877.000	-	-	6.833.377.118	55					
4	01	01	2.14	01	Facilitasi Keprotokolan	Jumlah Keprotokolan yang disediakan	24 Bulan	1.372.611.076	10 Bulan	54.000.000	330 kali	43.290.000	6.000.000	0 Bulan	6.000.000					12.000.000	-	-	66.000.000	5					
4	01	01	2.14	02	Facilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah nashah Pidato yang disusun	660 Pidato	337.923.840	29 Pidato	272.436.100	330 kali	220.538.130	84.916.000	1 Pidato	141.616.000					226.532.000	-	-	498.968.100	148					
4	01	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah pemberitaan yang di buat	1540 Berita	10.798.263.473	340 Berita	2.900.064.018	770 Dokumen	3.007.388.457	977.690.000	1 Berita	2.390.655.000					3.368.345.000	-	-	6.268.409.018	58					
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Implementasi Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100 %	7.487.318.838	68 %	1.987.702.100		3.369.318.954	221.247.750		1.318.521.070	-	-	-	-	1.531.768.820	-	-	3.319.478.920	47					
4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Administrasi Pemerintah Daerah	100 %	1.352.471.913	51 0%	217.697.500		499.068.131	31.119.890	Bulan	65.984.355	-	-	-	-	97.104.205	-	-	314.801.705	23					
4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Gampong Terbit Administrasi	4 Gampong	267.568.748	2 Gampong	48.900.000	2 Gampong	111.955.800	6.387.300	1 Gampong	30.813.900					37.201.100	-	-	86.101.100	32					
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Administrasi dan Peta Wilayah	4 Dokumen	485.265.276	- Dokumen	173.466.776	- 2 Dokumen	173.466.776		- Dokumen					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	01	02	2.02	03	Facilitasi Pelaksanaan Otomasi Daerah	Nilai skor LPPD	6,1 angka	599.037.888	3 angka	168.797.500	3,25 Angka	213.645.555	24.732.550	0 angka	35.170.555					59.903.105	-	-	228.700.605	38					
4	01	02	2.02	04	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Tertindakannya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100 %	4.019.180.518	85 %	1.256.850.000		1.807.314.918	31.750.000	1 %	855.718.000	-	-	-	-	887.468.000	-	-	2.144.318.000	53					
4	01	02	2.02	01	Facilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Tercapainya Program Operasional Mughala Pemko	24 Bulan	714.641.327	3 Bulan	105.700.000	12 Bulan	521.686.708	31.750.000	1 Bulan	95.050.000					126.800.000	-	-	232.500.000	33					

Unsur	Kode	Bid. Urusan	Program	Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Pemutakhiran)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJM Kota Banda Aceh pada Tahun 22- 222 Kependagri 5		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 221		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 222)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 221								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 221		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKM Tahun 221 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD OPD s/d Akhir Tahun 221		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi RPJMD OPD s/d Tahun 222 (%)		OPD Penanggung Jawab			
							Target	Rp	Kinerja	Rp	Target	Rp	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 221		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKM Tahun 221 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD OPD s/d Akhir Tahun 221		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi RPJMD OPD s/d Tahun 222 (%)					
													Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		Kinerja	Rp	Kinerja
4	01	02	2.02	02	02	02	Peleaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	8 Kali	93.893.810	3 Kali	1.500.000	5 kali	371.633.510					126 Kali	189.050.000					117=117/100	51	189.050.000	-	51	190.550.000		203	
4	01	02	2.02	03	02	03	Peleaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	12 Kegiatan	3.210.645.381	9 Kegiatan	1.149.650.000	8 Kegiatan	913.994.700					0 Kegiatan	571.618.000					117=117/100	63	571.618.000	-	63	1.721.268.000		54	
4	01	02	2.03				Fasilitator dan Koordinasi Hukum	100 %	1.947.262.511	66 %	473.154.600		994.488.951		156.870.400	1 %	376.211.215							117=117/100	-	533.061.615	-	-	1.006.236.215		52	
4	01	02	2.03	01			Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah	90 Produk Hukum	680.587.010	29 Produk Hukum	179.832.000	45 produk	338.224.833		56.107.000	1 Produk Hukum	171.520.103								117=117/100	-	227.627.103	-	67	407.459.103		60
4	01	02	2.03	02			Fasilitas Bantuan Hukum	Jumlah Kasus/Gugatan yang ditangani	10 Kasus	1.065.314.689	3 Kasus	262.717.500	5 kasus	545.902.426		95.074.000	1 Kasus	194.428.868							117=117/100	-	289.902.868	-	53	552.220.368		52
4	01	02	2.03	03			Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum Yang Dipublikasikan Dan Disosialisasi Melalui Website, JIH	90 Produk Hukum	201.360.812	30 Produk Hukum	30.605.100	45 Produk hukum	110.361.690		5.689.400	0 Produk Hukum	10.262.244							117=117/100	-	15.951.644	-	14	46.556.744		23
4	01	02	2.04				Fasilitas Kerjasama Daerah	100 %	178.403.896	67 %	40.000.000		68.446.954		1.507.500	0 %	12.697.500								117=117/100	-	14.115.000	-	-	54.115.000		30
4	01	02	2.04	01			Fasilitas Kerjasama Dalam Negeri	32 Dokumen	178.403.896	11 Dokumen	40.000.000	15 Dokumen	68.446.954		1.507.500	0 Dokumen	12.697.500							117=117/100	-	14.115.000	-	21	54.115.000		30	
4	01	03					PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	100 %	6.090.497.539	79 %	1.444.786.747		2.975.582.842		91.835.000		625.169.808							117=117/100	-	717.004.808	-	-	2.161.791.555		35	
4	01	03	2.01				Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	100 %	1.266.994.202	83 %	204.800.000		417.317.973		-	%	62.325.000							117=117/100	-	62.325.000	-	-	267.125.000		21	
4	01	03	2.01	01			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Kebijakan Daerah terkait Peningkatan Investasi Daerah yang diundangkan	2 Dokumen	317.159.460	1 Dokumen	65.250.000	1 Dokumen	117.727.861		1 Dokumen	53.325.000							117=117/100	-	53.325.000	-	45	118.575.000		37	
4	01	03	2.01	02			Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Dokumen Pemantauan Inflasi Daerah Kota Banda Aceh	2 Laporan	537.549.840	1 Laporan	72.150.000	1 Laporan	206.106.767		0 Laporan	9.000.000							117=117/100	-	9.000.000	-	4	81.150.000		15	
4	01	03	2.01	03			Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Laporan tentang Usaha Kecil Menengah yang Konsultasi	2 Laporan	412.284.901	1 Laporan	67.400.000	1 Laporan	93.483.345		- Laporan	-							117=117/100	-	-	-	67.400.000		16		
4	01	03	2.02				Administrasi Pembangunan	100 %	2.567.718.677	95 %	743.837.247		1.645.921.716		-	0 %	272.734.868							117=117/100	-	272.734.868	-	-	1.016.572.055		40	
4	01	03	2.02	01			Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Laporan Program Pembangunan	2 Laporan	717.147.396	1 Laporan	298.699.997	1 Laporan	477.546.643		0 Laporan	84.959.808							117=117/100	-	84.959.808	-	18	383.659.805		53	
4	01	03	2.02	02			Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah pengelolaan pengawasan pemanfaatan ruang dan laporan bangunan yang berfungsi sesuai dengan perencanaannya	4 Laporan	899.671.739	2 Laporan	340.901.400	2 Laporan	522.789.023		0 Laporan	70.400.000							117=117/100	-	70.400.000	-	13	411.301.400		46	
4	01	03	2.02	03			Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah laporan Pelaksanaan Pembangunan	34 Laporan	950.899.542	14 Laporan	104.235.850	17 Laporan	645.586.052		1 Laporan	117.375.000							117=117/100	-	117.375.000	-	18	221.610.850		23	
4	01	03	2.03				Pengadaan Barang dan Jasa	100 %	2.255.784.660	35 %	496.149.500		912.343.151		91.835.000	1 %	290.110.000							117=117/100	-	381.945.000	-	-	878.094.500		39	
4	01	03	2.03	01			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pelayanan Pemerintah dalam melaksanakan Pelayanan Barang dan jasa	230 Paket Tender	1.102.609.436	73 Paket Tender	310.590.500	110 Paket Tender	412.831.277		0 Paket Tender	136.900.000							117=117/100	-	136.900.000	-	33	447.490.500		41	
4	01	03	2.03	02			Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Tersedianya Layanan yang Memanfaatkan SPSE v1.3	2 Laporan	516.185.054	- Laporan	7.172.000	1 Laporan	150.148.972		0 Laporan	500.000							117=117/100	-	500.000	-	0	7.722.000		1	
4	01	03	2.03	03			Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Laporan Hasil Penyelesaian Sengketa dan Advokasi Proses Pengadaan Barang dan Jasa pada SKPD	2 Laporan	636.990.170	0 Laporan	178.387.000	1 Laporan	340.362.902		1 Laporan	152.660.000							117=117/100	-	244.495.000	-	72	422.882.000		66	
							BIDANG PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRK		109.684.957.083		23.596.761.601												117=117/100	-				23.596.761.601		22		
4	02						SEKRETARIAT DPRK		109.684.957.083	- 0%	51.761.191.822		60.898.802.006		13.588.112.625		22.312.998.733						117=117/100	-	13.588.112.625			63.369.303.647		60 DPRK		
4	02	01					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100 %	101.046.430.556	96 %	38.588.635.772		42.097.066.165		10.243.962.175		18.530.648.283						117=117/100	-	28.774.610.458			67.363.246.230		67	
4	02	01	2.01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi OPD yang terpublikasi	100 %	5.000.000	- %	-		8.143.176		-	- %	-					117=117/100	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	02	01	2.01	01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	5 Dokumen	5.000.000	- Dokumen	-	8.143.176		-	0 Dokumen	-						117=117/100	-	-	-	-	-	-	-		
4	02	01	2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	100 %	21.405.683.084	100 %	5.686.408.306		5.581.943.194		1.297.365.680		2.645.088.988						117=117/100	-	3.942.454.668			9.628.862.974		45	
4	02	01	2.02	01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Waktu Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN yang disediakan	24 Bulan	19.125.626.041	12 Bulan	3.865.616.129	12 Bulan	3.397.268.194		906.732.324	0 Bulan	1.871.657.585						117=117/100	-	2.778.389.909	-	82	6.644.006.038		35	
4	02	01	2.02	02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Waktu Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Penunjang yang disediakan	24 Bulan	2.260.057.043	12 Bulan	1.620.792.177	12 Bulan	2.164.675.000		390.633.356	0 Bulan	773.431.403						117=117/100	-	1.164.064.759	-	53	2.984.856.936		131	
4	02	01	2.05				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	144.960.000	26 %	114.500.000		380.100.000		-	0 %	40.000.000					117=117/100	-	40.000.000	-	-	154.500.000		107		
4	02	01	2.05	02			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang Disediakan	36 Setel	45.360.000	- Setel	-	19 Setel	15.300.000		-	-						117=117/100	-	-	-	-	-	-	-		
4	02	01	2.05	03			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30 Pegawai	99.600.000	8 Pegawai	114.500.000	15 Pegawai	364.800.000		0 Pegawai	40000000						117=117/100	-	40.000.000	-	11	154.500.000		155		
4	02	01	2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi umum	100 %	17.323.431.100	80 %	7.700.762.047		11.693.687.953		2.466.347.623	1 %	4.383.968.330						117=117/100	-	6.850.255.953	-	-	14.551.018.000		93	
4	02	01	2.06	01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	56 Jenis	77.852.350	11 Jenis	24.209.000	28 jenis	35.110.907		14.056.000	1 Jenis	21782531						117=117/100	-	35.838.531	-	102	60.047.531		77	
4	02	01	2.06	02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	288 Jenis	211.419.600	51 Jenis	100.445.000	144 jenis	1.742.262.202		51.775.000	2 Jenis	153595000						117=117/100	-	205.370.000	-	12	305.815.000		145	
4	02	01	2.06	05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	32 Jenis	1.629.536.042	7 Jenis	333.312.000	16 jenis	618.627.805		29.231.031	0 Jenis	29.231.031						117=117/100	-	58.462.062	-	9	391.774.062		24	
4	02	01	2.06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang dilaksanakan	1252 Laporan	15.604.623.108	1.272 Laporan	7.242.796.047	606 Laporan	9.297.687.039		2.371.285.592	1 Laporan	4.179.299.768						117=117/100	-	6.550.985.360	-	70	13.793.381.407		88	
4	02	01	2.07				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3.294.095.000	38 %	2.542.429.200		2.086.931.340		287.010.000	0 %	386.610.000						117=117/100	-	673.620.000	-	-	3.216.049.200			

Kode	Unsur	Bid. Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Pemutakhiran)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJM Kota Banda Aceh pada Tahun 22-222 Kepmendagri 5		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 221		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 222)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 221								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 221 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD OPD s/d Akhir Tahun 221		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi RPJMD OPD s/d Tahun 222 (%)		OPD Penanggung Jawab				
								Target	Rp	Kinerja	Rp	Target	Rp	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 221		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
														Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp									
4	02	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	6.490.035.870	92 %	1.418.652.031	2.934.165.140	786.691.155	1 %	1.272.939.959	-	-	2.059.631.114	-	-	3.478.283.145	-	-	54								
4	02	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu, Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24 Bulan	1.679.939.612	12 Bulan	473.655.981	683.200.000	123.229.636	1 Bulan	242.158.995	-	-	365.988.631	-	53	839.044.612	-	-	50								
4	02	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Waktu, Jasa Pelayanan Umum Kantor	24 Bulan	4.810.096.258	10 Bulan	944.996.050	1.250.965.140	663.461.519	1 Bulan	1.030.780.964	-	-	1.694.242.483	-	75	2.639.238.533	-	-	55								
4	02	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3.633.409.290	36 %	5.484.773.190	2.928.340.894	228.672.913	0 %	469.096.517	-	-	697.769.430	-	-	6.182.542.620	-	-	170								
4	02	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	28 Unit	1.343.660.000	9 Unit	381.274.241	470.325.360	25.887.913	0 Unit	51.923.913	-	-	77.811.826	-	17	459.086.067	-	-	34								
4	02	01	2.09	05		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	48 Unit	25.200.000	- Unit	-	7.765.506	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
4	02	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	170 Unit	174.544.000	24 Unit	39.050.000	152.001.875	85 unit	6000000	-	-	-	6.000.000	-	4	45.050.000	-	-	26								
4	02	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhab	4 Unit	1.548.870.200	1 Unit	4.810.537.449	1.986.973.500	185.585.000	0 Unit	390.055.000	-	-	575.640.000	-	29	5.386.177.449	-	-	348								
4	02	01	2.09	10		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhab	60 Unit	941.126.000	12 Unit	253.911.500	311.274.653	17.200.000	0 Unit	21.117.604	-	-	38.317.604	-	12	292.229.104	-	-	54								
4	02	01	2.15			Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase pemenuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100 %	46.100.791.512	43 %	15.338.280.998	14.025.022.351	4.356.562.554	1 %	8.354.096.789	-	-	12.710.659.343	-	-	28.048.940.341	-	-	61								
4	02	01	2.15	01		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Waktu Pembayaran Gaji dan Tunjangan DPRD yang disedek	24 Bulan	45.009.741.512	12 Bulan	15.218.280.998	13.349.022.351	4.076.062.554	1 Bulan	8.073.596.789	-	-	12.149.699.343	-	91	27.367.940.341	-	-	61								
4	02	01	2.15	02		Penyediaan Pakian Dinas dan Akibat DPRD	Jumlah Pakian Dinas dan Akibat DPRD yang disedek	300 Slat	841.050.000	45 Slat	120.000.000	576.000.000	280.500.000	2 Slat	280500000	-	-	561.000.000	-	97	681.000.000	-	-	81								
4	02	01	2.15	03		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	60 Kali	250.000.000	- Kali	-	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
4	02	01	2.16			Layanan Administrasi DPRD	Persentase pemenuhan Layanan Administrasi DPRD	100 %	2.449.024.700	45 %	302.830.000	2.438.732.117	821.312.250	3 %	978.907.700	-	-	1.800.219.950	-	-	2.103.049.950	-	-	86								
4	02	01	2.16	02		Facilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Pelaksanaan Fasilitas Fraksi DPRD	36 Kali	45.847.300	- Kali	-	70.921.946	27.500.000	-	27.500.000	-	-	55.000.000	-	78	55.000.000	-	-	120								
4	02	01	2.16	03		Facilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD yang dilaksanakan	120 Laporan	2.206.297.400	81 Laporan	302.830.000	1.081.040.421	383.842.500	1 Laporan	441.547.500	-	-	825.390.000	-	76	1.128.220.000	-	-	51								
4	02	01	2.16	04		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang dilaksanakan	24 Bulan	196.880.000	- Bulan	-	1.306.789.750	409.969.750	-	509.860.200	-	-	919.829.950	-	70	919.829.950	-	-	467								
4	02	02				PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase terlaksananya tugas dan fungsi DPRD	100 %	8.638.526.527	77 %	13.192.555.220	18.891.735.841	3.344.150.450	-	3.782.350.450	-	-	7.126.500.900	-	-	20.319.056.150	-	-	235								
4	02	02	2.01			Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang terbentuk	100 %	1.017.409.950	31 %	315.708.400	745.221.707	82.650.000	0 %	87.650.000	-	-	170.300.000	-	-	486.008.400	-	-	48								
4	02	02	2.01	01		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Program Pembentukan Peraturan Daerah yang disusun dan dibahas	30 Perda	83.790.000	2 Perda	1.499.750	30.900.000	-	-	-	-	-	-	-	1.499.750	-	-	2									
4	02	02	2.01	02		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas	Jumlah Naskah Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas	14 Naskah	328.548.000	1 Naskah	139.208.650	7 Naskah	426.310.048	82.650.000	1 Naskah	87.650.000	-	-	170.300.000	-	40	309.508.650	-	-	94							
4	02	02	2.01	03		Penyenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Kajian Perundang-Undangan yang dilaksanakan	8 Kali	143.332.350	- Kali	-	72.138.362	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
4	02	02	2.01	04		Facilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Naskah Akademik yang dihasilkan	10 Naskah	461.739.600	5 Naskah	175.000.000	215.873.307	-	-	-	-	-	-	-	-	175.000.000	-	-	38								
4	02	02	2.02			Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Terlaksananya Rapat Pembahasan Anggaran	100 %	273.858.900	10 %	6.789.000	315.405.432	55.855.000	8 %	55.855.000	-	-	111.710.000	-	-	118.499.000	-	-	43								
4	02	02	2.02	01		Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah rapat pembahasan KUA dan PPAS yang dilaksanakan	40 kali	59.706.150	- kali	-	47.458.900	26.527.500	-	26.527.500	-	-	53.055.000	-	112	53.055.000	-	-	89								
4	02	02	2.02	02		Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah rapat pembahasan Perubahan KUA dan PPAS Perubahan yang dilaksanakan	40 kali	59.342.850	- kali	-	47.258.345	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
4	02	02	2.02	03		Pembahasan APBD	Jumlah rapat pembahasan APBD	30 Kali	51.516.150	0 Kali	189.000	62.373.391	22.842.500	121 Kali	22.842.500	-	-	45.685.000	-	73	45.874.000	-	-	89								
4	02	02	2.02	04		Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah rapat pembahasan APBD Perubahan yang dilaksanakan	40 Kali	58.056.750	- Kali	-	61.907.236	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
4	02	02	2.02	05		Pembahasan Laporan Semester	Jumlah rapat pembahasan laporan semester yang dilaksanakan	4 Kali	10.980.900	- Kali	-	28.609.730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
4	02	02	2.02	06		Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah rapat pembahasan pertanggungjawaban APBD yang dilaksanakan	40 Kali	33.707.100	9 Kali	6.600.000	67.797.830	6.485.000	1 Kali	6.485.000	-	-	12.970.000	-	19	19.570.000	-	-	58								
4	02	02	2.03			Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah rapat pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan yang dilakukan	44 Kali	37.538.800	43 Kali	4.652.000	132.789.572	-	-	-	-	-	-	-	-	4.652.000	-	-	12								
4	02	02	2.03	06		Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang dilakukan	Jumlah Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang dilakukan	40 Kali	29.915.900	17 Kali	4.652.000	69.708.790	-	-	-	-	-	-	-	-	4.652.000	-	-	16								
4	02	02	2.03	07		Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah waktu pelaksanaan pengawasan yang dilakukan	4 Kali	7.620.900	- Kali	-	63.060.782	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
4	02	02	2.04			Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase publikasi dan dokumentasi Dewan yang terpenuhi	100 %	5.287.087.142	28 %	10.356.336.000	15.141.712.713	2.466.460.000	0 %	2.868.460.000	-	-	5.334.920.000	-	-	15.691.256.000	-	-	297								
4	02	02	2.04	03		Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Publikasi dan Dokumentasi Dewan	576 Kali	3.163.382.342	132 Kali	9.908.936.000	288 kali	13.970.038.453	2.043.460.000	0 Kali	2.445.460.000	-	-	4.488.920.000	-	32	14.397.856.000	-	-	455							
4	02	02	2.04	04		Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli yang tersedia	Jumlah kelompok pakar dan Tim Ahli yang tersedia	14 Kelompok	682.753.700	1 Kelompok	9.900.000	315.594.557	-	-	-	-	-	-	-	-	9.900.000	-	-	8								
4	02	02	2.04	05		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi yang tersedia	12 Orang	264.600.000	2 Orang	72.000.000	172.800.000	72.000.000	1 Orang	72.000.000	-	-	144.000.000	-	83	216.000.000	-	-	81								
4	02	02	2.04	06		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah penyelenggaraan Hubungan Masyarakat yang dilaksanakan	52 Kali	1.148.385.000	11 Kali	365.500.000	660.528.716	351.000.000	1 Kali	351.000.000	-	-	702.000.000	-	106	1.067.500.000	-	-	93								
4	02	02	2.04	07		Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah dokumen program kerja DPRD yang selesai disusun	2 Dokumen	47.966.100	- Dokumen	-	22.840.967	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
4	02	02	2.05			Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Aspirasi Masyarakat yang dihimpun	100 %	1.965.048.900	62 %	2.568.636.350	2.460.417.686	739.185.450	0 %	770.385.450	-	-	1.509.570.900	-	-	4.018.207.250	-	-	204								
4	02	02	2.05	01		Kunjungan Kerja dalam Daerah yang dilakukan	Jumlah kunjungan Kerja dalam Daerah yang dilakukan	48 Kali	39.165.000	4 Kali	1.800.000	33.175.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.800.000	-	-	5								
4	02	02	2.05	02		Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah laporan rekapok Pikiran DPRD	2 Laporan	8.229.900	1 Laporan	1.050.000	49.542.758	-	-	-	-	-	-	-	-	1.050.000	-	-	13								

Kode				Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Penutakhiran)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJM Kota Banda Aceh pada Tahun 22-222 Kependagri 5		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 221		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 221				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 221		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKM Tahun 221 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD OPD s/d Akhir Tahun 221		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi RPJMD OPD s/d Tahun 222 (%)		OPD Penanggung Jawab					
Unsur	Bid. Unsur	Program	Kegiatan			Sub Kegiatan	Target	Rp	Kinerja	Rp	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 221		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKM Tahun 221 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD OPD s/d Akhir Tahun 221		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi RPJMD OPD s/d Tahun 222 (%)		
											Target	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja		Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	3 Kali	1.917.654.000	3 Kali	2.505.786.350	3 kali	2.377.699.928	739.185.450	0 Kali	770.385.450					1.509.570.900	-	63	4.015.357.250	209				
4	02	02	2.06	01	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100 %	49.368.690	2 %	433.500	2 %	775.950	2 %	775.950	2 %	775.950	1.551.900	-	-	1.551.900	-	-	1.985.400	4				
4	02	02	2.06	01	Penyusunan Kode Etik DPRD	2 Dokumen	49.368.690	0 Dokumen	433.500	1 Dokumen	28.679.387	775.950	2 Dokumen	775.950.000					1.551.900	-	5	1.985.400	4				
4	02	02	2.07	01	Pembahasan Kerja Sama Daerah	100 %	2.415.000	- %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
4	02	02	2.07	02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	200 lembar	2.415.000	- lembar	-	100 Lembar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
4	02	02	2.08	01	Fasilitasi Tugas DPRD	100 %	5.801.145	- %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	48 Kali	4.899.745	- Kali	-	24 kali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
4	02	02	2.08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah yang difasilitasi	176 Kali	911.400	- Kali	-	88 kali	6.208.731	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		22.015.075.160	- 0%	3.624.741.707													3.624.741.707	16				
					BIDANG PENGAWASAN PEMERINTAHAN INSPEKTORAT		22.015.075.160		3.624.741.707													3.624.741.707	16				
6	01				INSPEKTORAT		22.015.075.160	- 0%	7.193.520.350	7.763.172.352	1.685.362.708	3.553.555.460	1.685.362.708					1.685.362.708			8.878.883.058	40	Inspektorat				
6	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	100 %	18.353.116.604	104 %	5.730.946.599	6.334.988.264	1.455.492.708	2.917.465.460					4.372.958.168			10.103.904.767	55					
6	01	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi OPD yang Tersusun	100 %	10.591.350	100 0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
6	01	01	2.01	01	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	10 dokumen	10.591.350	- dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
6	01	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	100 %	16.555.959.009	100 0%	5.397.307.897	5.790.340.961	1.405.278.729	2.838.093.916	1 Bulan	2.838.093.916					4.243.372.645			9.640.680.542	58			
6	01	01	2.02	01	Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah waktu pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang disediakan	24 bulan	16.461.468.107	12 bulan	5.397.307.897	12 Bulan	5.616.049.961	3 bulan	1.369.428.729	1 bulan	2.760.468.916					4.129.897.645			9.527.205.542	58		
6	01	01	2.02	02	Kegiatan Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah waktu jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkariban yang disediakan	24 bulan	94.490.902	12 bulan	167.810.517	12 Bulan	174.300.000	3 bulan	35.850.000	0 bulan	77.625.000					113.475.000	65		281.285.517	298		
6	01	01	2.05		Kegiatan Administrasi Kependidikan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kependidikan Perangkat Daerah	100 %	185.546.544	18 0%	70.000.000																	
6	01	01	2.05	02	Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kejenjaskannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang disediakan	86 stel	105.847.304	- stel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
6	01	01	2.05	09	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	38 pegawai	79.699.240	7 pegawai	30.240.000	19 Pegawai	70.000.000												38			
6	01	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi umum	100 %	639.924.335	82 0%	2.006.000	274.751.791	30.275.993	35.020.316	17 Bulan	35.020.316					65.296.309			67.302.309	11			
6	01	01	2.06	01	Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	8 jenis	4.330.965	4 jenis	2.006.000	4 jenis	1.429.368												46			
6	01	01	2.06	05	Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan pencetakan	Jumlah jenis barang cetakan dan pencetakan yang disediakan	18 jenis	89.773.182	9 jenis	37.644.400	9 jenis	23.139.673	2.400.868	0 jenis	7.145.191					9.546.059	33		47.390.459	53			
6	01	01	2.06	09	Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	60 laporan	545.820.188	14 laporan	134.809.662	30 Laporan	244.182.750	27.875.125	0 laporan	27.875.125					55.750.250	23		190.559.912	35			
6	01	01	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	373.649.515	- 0%	-	22.000.000																
6	01	01	2.07	02	Kegiatan Pengadaan kendaraan Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	1 unit	22.000.000	- unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
6	01	01	2.07	06	Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	38 unit	351.649.515	- unit	-	16 unit	22.000.000															
6	01	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	446.168.600	100 0%	82.437.812	117.264.308	11.861.406	28.237.728	0 Bulan	28.237.728					40.099.214			122.537.026	27			
6	01	01	2.08	02	Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	24 bulan	153.603.284	12 bulan	42.180.712	12 Bulan	60.611.311	8.250.846	0 bulan	17.418.926					25.669.772	42		67.850.484	44			
6	01	01	2.08	04	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	24 bulan	292.565.316	12 bulan	40.257.100	12 Bulan	56.652.997	3.610.640	0 bulan	10.818.802					14.429.442	25		54.686.542	19			
6	01	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	141.277.251	- 0%	46.300.828	60.622.204	8.076.500	16.113.500	0 Bulan	16.113.500					24.190.000			70.490.828	50			
6	01	01	2.09	02	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Pemeliharaan, Pembayaran Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14 unit	125.206.405	10 unit	44.082.828	7 unit	53.532.000	7.856.500	0 unit	15.893.500					23.750.000	44		67.832.828	54			
6	01	01	2.09	06	Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	44 unit	13.223.088	12 unit	898.000	22 unit	5.770.204												7			
6	01	01	2.09	09	Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhab	2 unit	2.847.758	1 unit	1.320.000	1 unit	1.320.000	220.000	0 unit	220.000					440.000	33		1.760.000	62			
6	01	02			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Pengawasan yang Diselenggarakan secara Optimal	100 %	3.291.863.085	82 %	1.438.942.438	1.428.164.088	229.870.000	636.096.000							229.870.000			1.688.712.438	51			
6	01	02	2.01		Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase pengawasan internal yang dilaksanakan	100 %	3.150.541.988	472 0%	1.334.924.438	1.390.384.088	229.870.000	668.390.000	0 Bulan	668.390.000					838.260.000			2.173.214.438	69			
6	01	02	2.01	01	Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah OPD yang dilakukan pengawasan kinerja	27 OPD	257.838.000	10 OPD	135.510.000	10 OPD	76.437.500												135.510.000	53		
6	01	02	2.01	02	Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah unit kerja yang dilakukan pengawasan keuangan	169 unit kerja	616.062.300	76 unit kerja	244.825.000	117.070.000	301.336.688	151.070.000	1 unit kerja	151.070.000					268.140.000	89		512.965.000	83			
6	01	02	2.01	03	Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan kinerja yang direviu tepat waktu	8 laporan	279.562.500	4 laporan	110.625.000	9 Laporan	175.175.000	35.400.000	1 laporan	114.600.000					150.000.000	86		260.625.000	93			
6	01	02	2.01	04	Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan keuangan yang direviu tepat waktu	23 laporan	475.437.843	4 laporan	262.785.000	56 Laporan	303.225.000	77.400.000	1 laporan	165.300.000					242.700.000	80		505.485.000	106			
6	01	02	2.01	05	Kegiatan Pengawasan Desa	Jumlah gampong yang dilakukan pengawasan	93 gampong	574.350.000	27 gampong	255.540.000	45 Gampong	218.800.000								83.850.000	38		339.390.000	59			
6	01	02	2.01	06	Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah jenis kerjasama pengawasan internal	2 jenis	800.100.252	1 jenis	231.137.438	1 jenis	182.799.869								76.200.000	42		307.337.438	38			
6	01	02	2.01	07	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APP	Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI dan APP yang selesai ditindaklanjuti	694 rekomendasi	147.191.093	135 rekomendasi	94.530.000	366 Rekomendasi	132.610.031								17.370.000	13		111.900.000	76			
6	01	02	2.02		Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase kasus pengauditan dan kerugian negara/daerah yang diselesaikan	100 %	141.321.697	56 0%	103.890.000	37.800.000									27.700.000			131.590.000	93			

Usman	Bd.Usman	Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Pemutakhiran)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJM Kota Banda Aceh pada Tahun 22-222 Kepmendagri 5		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 221		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 222)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 221								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 221		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 221 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD OPD sid Akhir Tahun 221		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi RPJMD OPD sid Tahun 222 (%)		OPD Penanggung Jawab				
								Target	Rp	Kinerja	Rp	Target	Rp	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
														Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp													
7	01	02	2.04			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan pada camat	Persentase pelaksanaan koordinasi urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100 %	305.974.369	97 %	22.695.000		28.611.510		-	1 %	11.700.000								11.700.000	-			34.395.000		11			
7	01	02	2.04	03		Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	8 Kegiatan	305.974.369	4 Kegiatan	22.695.000		28.611.510		1 Kegiatan	11.700.000									11.700.000	-	41		34.395.000		11			
7	01	03				Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pelaksanaan pemberdayaan masyarakat	100 %	281.615.472	75 %	5.790.000		13.166.557		-	637.500									-				5.790.000		2			
7	01	03	2.01			Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Persentase pelaksanaan pemberdayaan masyarakat	100 %	281.615.472	39 %	5.790.000		13.166.557		-	0 %	637.500								637.500	-			6.427.500		2			
7	01	03	2.01	01		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa	Jumlah peserta musyawarah pembangunan desa	160 orang	46.235.376	5 orang	4.153.000		2.779.000		0 orang	637.500									637.500	-	23		4.790.500		10			
7	01	03	2.01	03		Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Pemuda dan jumlah kegiatan PKK	6 kegiatan	235.380.096	2 kegiatan	1.637.000		10.387.557		kegiatan										-	-		1.637.000		1				
7	01	06				Program pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Persentase pelaksanaan dan pengawasan pemerintah gampong dikecamatan	100 %	172.561.351	74 %	9.173.808		15.769.246		-	1.169.000									-				9.173.808		5			
7	01	06	2.01			Facilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 %	172.561.351	67 %	9.173.808		15.769.246		-	1.169.000									1.169.000	-			10.342.808		6			
7	01	06	2.01	02		Facilitasi administrasi tata pemerintahan desa dan perlebnaan desa	Jumlah kegiatan pembinaan administrasi desa dan perlebnaan desa	10 Kegiatan	42.872.803	- Kegiatan	-		5.648.389												-	-	-	-	-	-	-			
7	01	06	2.01	03		Facilitasi pengelolaan keuangan desa dan pembudayaan aset desa	Jumlah pembinaan dan pengawasan ADG	4 Kegiatan	96.917.649	2 Kegiatan	4.471.250		5.245.857		0 Kegiatan	1.169.000									1.169.000	-	22		5.640.250		6			
7	01	06	2.01	11		kegiatan penyelenggaraan keletterman dan keletteran umum	Jumlah Penyelenggaraan, Keletterman dan Keletteran Umum	2 kegiatan	32.770.899	1 kegiatan	4.702.558		4.875.000		kegiatan										-	-	-		4.702.558		14			
7	01					KECAMATAN BAITURRAHMAN			8.925.612.939	0	0	2.342.369.696	3.262.572.269	498.334.751	1.080.181.594								498.334.751				2.840.904.447		33	Kec				
7	01	01				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	7.823.629.890	103 %	2.237.307.196		2.223.046.639		492.722.251		1.064.376.694								492.722.251				2.730.029.447		35			
7	01	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kecamatan Baiturrahman yang tersusun	100 %	40.999.180	100 %	13.824.200		18.077.540		-										-	-		13.824.200		34				
7	01	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	8 Dokumen	40.999.180	3 Dokumen	13.824.200		18.077.540		Dokumen										-	-	-	13.824.200		34				
7	01	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan	100 %	7.171.699.772	75 %	1.970.978.835		1.978.561.849		498.451.661		986.606.609								1.445.058.270	-			3.416.037.105		48			
7	01	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah waktu pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang disediakan	24 Bulan	6.911.716.794	12 Bulan	1.719.578.835		1.686.361.849		405.901.661		1 Bulan	865.431.609							1.271.333.270	-	75		2.990.912.105		43			
7	01	01	2.02	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah waktu jasa tenaga pendukung administrasi/kelembagaan yang disediakan	24 Bulan	259.982.978	11 Bulan	251.400.000		292.200.000		52.560.000		0 Bulan	121.175.000							173.725.000	-	59		425.125.000		164			
7	01	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	44.561.461	- %	-		-		-										-	-		-	-	-				
7	01	01	2.05	02		Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perengkapannya yang disediakan	58 Stel	44.561.461	- Stel	-		-		Stel										-	-	-	-	-	-				
7	01	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Administrasi Umum	100 %	71.681.912	84 %	34.700.600		66.021.149		16.113.341		23.113.341								39.226.682	-			73.927.282		103			
7	01	01	2.06	01		Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ Penerangan bangunan kantor yang disediakan	8 Jenis	3.328.410	4 Jenis	3.961.000		736.711		0 Jenis	736.711									1.473.422	-	112		5.434.422		163			
7	01	01	2.06	05		Penyediaan barang Bekas dan pengondaan	Jumlah jenis Bekas dan pengondaan yang disediakan	10 Jenis	20.733.252	5 Jenis	16.159.000		14.705.060		895.030		0 Jenis	7.895.030							8.790.060	-	60		24.949.060		120			
7	01	01	2.06	09		Penyenggaraan rapat/koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	Jumlah laporan rapat/koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	4 Laporan	47.620.250	1 Laporan	14.580.600		50.000.000		14.481.600		1 Laporan	14.481.600							28.963.200	-	58		43.543.800		91			
7	01	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	51.144.609	- %	-		23.605.043		-		14.000.000							14.000.000	-			14.000.000		27				
7	01	01	2.07	02		Pengadaan kendaraan dinas/operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	0 Unit	-	- Unit	-		-		Unit										-	-	-	-	-	-				
7	01	01	2.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	6 Jenis	51.144.609	- Jenis	-		23.605.043		Jenis	14.000.000								14.000.000	-	59		14.000.000		27				
7	01	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	330.572.500	75 %	81.128.761		98.872.053		12.385.240		24.452.474								36.837.723	-			117.966.484		36			
7	01	01	2.08	02		Penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	24 Bulan	126.874.020	10 Bulan	43.716.461		59.526.000		10.723.944		1 Bulan	21.984.336							32.708.280	-	55		76.424.741		60			
7	01	01	2.08	04		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	24 Bulan	203.696.480	10 Bulan	37.412.300		39.346.053		1.661.305		0 Bulan	2.468.138							4.129.443	-	10		41.541.743		20			
7	01	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	114.970.456	50 %	136.674.800		37.969.005		5.772.000		0 %	16.203.670							21.975.670	-			158.650.470		138			
7	01	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pakai, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Pemeliharaan, Pembayaran Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6 Unit	51.692.790	8 Unit	20.186.800		24.457.000		5.772.000		0 Unit	9.930.000							15.702.000	-	64		35.888.800		69			
7	01	01	2.09	06		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	48 Unit	32.459.602	59 Unit	16.808.000		13.452.005		Unit	6.273.670									6.273.670	-	47		23.081.670		71			
7	01	01	2.09	09		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang diperharah/direhab	2 Unit	30.818.064	3 Unit	99.680.000		1 Unit												-	-	-	99.680.000		323				
7	01	01	2.04	05		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang disediakan	Potong	-	- Potong	-		-												-	-	-	-	-	-				
7	01	02				Program : Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	100 %	314.342.558	53 %	21.400.000		970.498.837		3.000.000		9.000.000								3.000.000				24.400.000		8			
7	01	02	2.01			Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Persentase pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan	100 %	181.184.264	100 %	21.400.000		124.770.000		3.000.000		9.000.000								12.000.000	-			33.400.000		18			
7	01	02	2.01	02		Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan kecamatan dan gampong/kelurahan	2 Kegiatan	181.184.264	1 Kegiatan	21.400.000		124.770.000		3.000.000		0 Kegiatan	9.000.000							12.000.000	-	10		33.400.000		18			

Kode	Unsur	Bid. Unsur	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Pemutakhiran)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJM Kota Banda Aceh pada Tahun 22-222 Kependagri 5		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 221		Target Kinerja dan Anggaran RKPJ Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 222)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 221				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 221		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPJ Tahun 221 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD OPD s/d Akhir Tahun 221		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi RPJMD OPD s/d Tahun 222 (%)		OPD Penanggung Jawab		
								Target	Rp	Kinerja	Rp	Target	Rp	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		11=7+8+9+1		12=11/100		13=5+11			14=12&x100	
														Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		Kinerja	Rp
7	01	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	320.319.911	100 %	31.897.400		46.993.706		3.388.000	1 %	17.970.000					21.358.000	-			53.255.400		17		
7	01	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pakaj, dan Perincian Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Pemeliharaan, Pembayaran Pakaj dan Perincian Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan	8 kali	39.221.018	5 kali	26.625.400	4 Kali	28.072.171	3.388.000	1 kali	13.470.000						16.858.000	-	60		43.683.400		111		
7	01	01	2.09	06		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	40 kali	5.375.143	20 kali	5.072.000	20 Kali	3.921.535									-	-	-		5.072.000		94		
7	01	01	2.09	09		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhab	2 kali	275.723.750	- kali	-	1 Kali	15.000.000			4.500.000						4.500.000	-	30		4.500.000		2		
7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kecamatan	100 %	607.137.249	90 %	34.962.500		39.533.875	4.050.000			10.050.000					14.100.000				49.062.500		8		
7	01	02	2.01			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Persentase pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan	100 %	322.671.641	50 %	34.212.500		29.050.000	4.050.000			10.050.000					14.100.000				48.312.500		15		
7	01	02	2.01	02		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemerintah Kecamatan Gampangkelurahan	10 keg	322.671.641	13 keg	34.212.500	5 Kegiatan	29.050.000	4.050.000		0 keg	10.050.000					14.100.000		49		48.312.500		15		
7	01	02	2.04			Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Dimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang di Limpahkan Kepada Camat	100 %	284.465.608	100 %	750.000		10.483.875									-	-	-		750.000		0		
7	01	02	2.04	03		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait Dengan Kewenangan lain yang Dimpahkan	Jumlah Urusan Pemerintahan yang terkait Dengan Kewenangan lain yang Dimpahkan	8 keg	284.465.608	4 keg	750.000	4 Kegiatan	10.483.875			keg						-	-	-		750.000		0		
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYRAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	430.785.500	99 %	46.641.500		69.297.913									-	-	-		46.641.500		11		
7	01	03	2.01			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 %	430.785.500	55 %	46.641.500		69.297.913									-	-	-		46.641.500		11		
7	01	03	2.01	01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Peserta Musyawarah Pembangunan Desa	50 org	5.999.000	50 org	2.841.500	50 Orang	4.699.950			org						-	-	-		2.841.500		47		
7	01	03	2.01	03		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan pemuda dan jumlah kegiatan PKK	2 keg	424.786.500	0 keg	43.800.000	1 Kegiatan	64.597.963			keg						-	-	-		43.800.000		10		
7	01	06				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Gampang di Kecamatan	100 %	196.944.988	78 %	8.948.500		20.922.403	1.200.000			1.200.000					2.400.000				11.348.500		6		
7	01	06	2.01			Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Facilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	196.944.988	124 %	8.948.500		20.922.403	1.200.000			1.200.000					2.400.000				11.348.500		6		
7	01	06	2.01	02		Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan pembinaan administrasi desa dan perombakan desa	10 keg	45.196.250	- keg	-	5 Kegiatan	4.324.651			keg						-	-	-		-		-		
7	01	06	2.01	03		Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pemberdayaan Aseel Desa	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan pengawasan ADG	4 keg	123.060.700	2 keg	613.500	2 Kegiatan	5.398.074			keg						-	-	-		613.500		0		
7	01	06	2.01	11		Facilitasi Penyelenggaraan Kerentanan dan Keterlambatan Umum	Jumlah penyelenggaraan Kerentanan dan Keterlambatan Umum	2 keg	28.688.038	3 keg	8.335.000	1 Kegiatan	11.190.678	1.200.000		0 keg	1.200.000					2.400.000		21		10.735.000		37		
7	01					KECAMATAN KUTA RAJA		6.853.591.383	-	3.292.983.851		2.083.616.830	500.229.687			1.005.231.143					500.229.687				3.793.213.538		55	Kec		
7	01	01				Program - Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	6.429.758.436	186 %	3.251.911.351		1.991.222.423	468.049.687			956.936.736					1.424.986.423				4.678.897.774		73		
7	01	01	2.01			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	4.205.775	100 %	-		1.193.196									-	-	-		-		-		
7	01	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	4 dok	4.205.775	2 dok	1.818.750	4 Dokumen	1.193.156			dok						-	-	-		1.818.750		43		
7	01	01	2.02			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan	100 %	2.975.262.431	100 %	3.166.799.432		1.839.663.355	432.967.209			897.986.602					1.330.953.811				4.497.753.243		151		
7	01	01	2.02	01		Penyediaan Gaj dan Tunjangan ASN	Jumlah waktu pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang disediakan	24 bin	2.901.220.232	12 bin	2.892.719.432	12 Bulan	1.678.083.356	3 bulan	405.517.209	0 bin	828.311.602					1.233.828.811		74		4.126.548.243		142		
7	01	01	2.02	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah waktu Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perantaraan yang disediakan	24 bin	74.042.199	12 bin	274.080.000	12 Bulan	161.580.000	3 bulan	27.450.000	0 bin	69.675.000					97.125.000		60		371.205.000		501		
7	01	01	2.05			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Kedisiplinan Aparatur Perangkat Daerah	100 %	24.539.708	- %	-		0									-	-	-		-		-		
7	01	01	2.05	02		Pengadaan Pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya yang disediakan	46 stel	24.539.708	- stel	-		-									-	-	-		-		-		
7	01	01	2.06			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi umum perangkat daerah	100 %	37.035.074	- %	-		34.963.899			16.131.800						32.263.600				32.263.600		87		
7	01	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	8 jenis	1.397.550	- jenis	-	4 Jenis	2.103.050	997.000		- jenis	997.000					1.994.000		95		1.994.000		143		
7	01	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Pencetakan	Jumlah jenis Barang Cetak dan Pencetakan yang disediakan	8 jenis	7.686.525	- jenis	-	4 Jenis	4.310.343	1.520.500		- jenis	1.520.500					3.041.000		71		3.041.000		40		
7	01	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	4 lap	27.960.909	- lap	-	2 Laporan	28.550.503	13.614.300		- lap	13.614.300					27.228.600		95		27.228.600		97		
7	01	01	2.07			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	41.402.419	- %	-		4.444.667				4.444.667					8.889.334				8.889.334		21		
7	01	01	2.07	02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan	2 unit	-	- unit	-		-			unit						-	-	-		-		-		
7	01	01	2.07	10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	4 jenis	41.402.419	- jenis	-		4.444.667	4.444.667		- jenis	4.444.667					8.889.334		200		8.889.334		21		
7	01	01	2.08			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi umum yang dilaksanakan	100 %	152.883.700	147 %	67.688.419		80.251.343	11.478.011		0 %	26.495.515					37.973.526				105.661.945		69		
7	01	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	24 bin	66.402.126	19 bin	52.163.419		43.916.990	4.027.511		0 bin	12.010.967					16.038.478		37		68.201.897		103		
7	01	01	2.08	04		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah waktu: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	24 bin	86.491.574	16 bin	15.525.000		36.334.350	7.450.500		1 bin	14.484.548					21.935.048		60		37.480.048		43		

Unsur	Kode	Bid. Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Penutakhir)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJM Kota Banda Aceh pada Tahun 22-222 Kepmendagri 5		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 221		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 222)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 221								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM OPD s/d Akhir Tahun 221 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM OPD s/d Akhir Tahun 221		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi RPJM OPD s/d Tahun 222 (%)		OPD Penanggung Jawab				
								Target	Rp	Kinerja	Rp	Target	Rp	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 221		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM OPD s/d Akhir Tahun 221 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM OPD s/d Akhir Tahun 221			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi RPJM OPD s/d Tahun 222 (%)			
														Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
7	01	01	2.09			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	3.194.417.329	57 %	17.423.500		30.706.003		3.028.000		%	11.878.152								14.906.152	-			32.329.652		1
7	01	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Pemeliharaan, Pembayaran Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6 unit	24.999.374	13 unit	13.821.500		14.150.000		750.000		0 unit		6.154.549							6.904.549	-	49		20.726.049		83
7	01	01	2.09	06		Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	48 kali	8.175.668	7 kali	3.602.000		5.723.603		2.278.000		2 kali		5.723.603							8.001.603	-	140		11.603.603		142
7	01	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhab	2 kali	3.161.242.287	- kali	-		10.832.400													-	-	-		-	-	
7	01	02				Program Penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik	Persentase Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik Kecamatan	100 %	211.314.542	88 %	17.750.000		27.320.000		4.500.000				9.000.000							13.500.000	-			31.250.000		15
7	01	02	2.01			Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Persentase pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan	100 %	113.960.367	190 %	16.500.000		19.750.000		4.500.000				9.000.000							13.500.000	-			30.000.000		26
7	01	02	2.01	02		Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan kecamatan	4 keg	113.960.367	6 keg	16.500.000		19.750.000		4.500.000		1 keg		9.000.000							13.500.000	-	68		30.000.000		26
7	01	02	2.04			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelaksanaan koordinasi urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100 %	97.354.175	- %	1.655.000		7.570.000						%							-	-	-		1.655.000		2
7	01	02	2.04	01		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah kegiatan pelayanan perizinan	1 keg	525.000	- keg	-		950.000						keg							-	-	-		-	-	
7	01	02	2.04	03		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5 keg	96.829.175	0 keg	1.655.000		6.620.000						keg							-	-	-		1.655.000		2
7	01	03				Program pemberdayaan masyarakat desa dan keturahan	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan masyarakat	100 %	75.148.385	70 %	16.212.500		27.522.829		10.000.000				16.977.829							26.977.829	-			43.190.329		57
7	01	03	2.01			Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Persentase pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	100 %	75.148.385	161 %	16.212.500		27.522.829		10.000.000				%	16.977.829						26.977.829	-			43.190.329		57
7	01	03	2.01	01		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa	Jumlah peserta Musyawarah Pembangunan Desa	150 org	5.162.417	300 org	1.435.000		5.577.829					org	3.777.829						3.777.829	-	68		5.212.829		101	
7	01	03	2.01	03		Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan pemuda dan Pelaksanaan kegiatan PKK	4 keg	69.985.968	1 keg	14.777.500		21.945.000		10.000.000		1 keg		13.200.000							23.200.000	-	106		37.977.500		54
7	01	06				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	137.372.020	28 %	7.110.000		37.551.578		17.680.000				22.316.578							39.996.578	-			47.106.578		34
7	01	06	2.01			Fasilitas, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase fasilitas, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 %	137.372.020	41 %	7.110.000		37.551.578		17.680.000				%	22.316.578						39.996.578	-			47.106.578		34
7	01	06	2.01	02		Fasilitas administrasi teta pemerintahan desa	Jumlah Pelaksanaan bimbingan teknis bidang manajemen pemerintahan, kegiatan Lomba Kelompok dan pembinaan Desa	4 Keg	7.775.000	- kali	-		8.751.578						kali	3.961.578						3.961.578	-	45		3.961.578		51
7	01	06	2.01	03		Fasilitas pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan pengawasan ADG	112 kali	64.157.459	11 kali	1.350.000		2.770.000						kali	675.000						675.000	-	24		2.025.000		3
7	01	06	2.01	11		Fasilitas Penyelenggaraan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, Pendataan dan Monitoring ketertarikan dan keterlibatan umum	4 Keg	65.439.561	1 kali	5.760.000		26.030.000		17.680.000		3 kali		17.680.000							35.360.000	-	136		41.120.000		63
7	01					KECAMATAN JAYA BARU			697.467.503		2.184.797.406		2.235.216.880		598.580.335			1.158.034.120							598.580.335			2.783.377.741		399	Kec	
7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100 %	9.458.570	108 %	2.143.471.806		2.147.902.330		585.180.335			1.130.927.370								1.716.107.705			3.859.579.511		40.805	
7	01	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kecamatan Jaya Baru yang tersusun	100 %	9.458.570	100 %	-		12.686.984					%	-							-	-	-		-	-	
7	01	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	6 Dokumen	9.458.570	4 0%	4.788.000		12.686.984					Bulan								-	-	-		4.788.000		51
7	01	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	100 %	6.388.217.179	100 Bulan	2.057.289.196		1.990.378.023		517.404.023			Bulan	1.042.901.261							1.560.305.284	-			3.617.594.470		57
7	01	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah waktu pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang di anjakan	24 Bulan	6.147.866.446	12 Bulan	1.862.012.186		12 Bulan	1.795.078.023		3 bulan		1 Bulan	468.579.023		1 Bulan					945.251.261	-	79		3.275.842.470		53
7	01	01	2.02	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah waktu jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran yang disediakan	24 Bulan	240.350.733	12 Bulan	195.277.000		12 Bulan	195.300.000		3 bulan		1 Bulan	48.825.000		1 Bulan					97.650.000	-	75		341.752.000		142
7	01	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	37.020.848	- %	-		-					%	-							-	-	-		-	-	
7	01	01	2.05	02		Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang disediakan	160 Stel	37.020.848	3 Bulan	-		-						Bulan							-	-	-		-	-	
7	01	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi umum	100 %	60.514.847	79 %	2.997.000		38.073.588		28.290.953			%	29.436.143							57.727.096	-			60.724.096		100
7	01	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	20 jenis	1.186.566	106 Bulan	497.000		760.999					Bulan								-	-	-		497.000		42
7	01	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis cetak dan penggandaan yang disediakan	33 jenis	11.865.656	13 Bulan	2.500.000		7.943.311		1.002.240		1 Bulan		2.147.430							3.148.670	-	40		5.649.670		48
7	01	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang di laksanakan	18 Laporan	47.462.625	- laporan	-		12 Bulan	30.369.278		27.288.713		- laporan	27288713							54.577.426	-	180		54.577.426		115
7	01	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	64.154.930	- %	-		-					%	-							-	-	-		-	-	
7	01	01	2.07	02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	2 Unit	4.200.000	- 0%	-		-					Bulan								-	-	-		-	-	
7	01	01	2.07	10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	8 Jenis	59.954.930	- 0%	-		-					Bulan								-	-	-		-	-	
7	01	01	2.08			Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	227.322.844	107 %	60.688.145		83.372.000		37.021.359			1 %	49.929.966							86.951.325	-			147.639.470		65

Kode				Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Pemutakhiran)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJM Kota Banda Aceh pada Tahun 22-222 Kependagri 5		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 221		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 222)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 221								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 221 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD OPD sid Akhir Tahun 221		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi RPJMD OPD sid Tahun 222 (%)		OPD Penanggung Jawab			
Usman	Bid. Usman	Program	Kegiatan			Sub Kegiatan	Target	Rp	Kinerja	Rp	Target	Rp	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 221		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 221 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 221 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi RPJMD OPD sid Tahun 222 (%)		
													Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja		Rp	Kinerja	Rp
7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	100 %	76.447.364	- %	-	14.000.000	-																		
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	1 Unit	25.000.000	-	-																			
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	14 unit	51.447.364	-	-	1 unit	14.000.000																	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	304.324.941	92 %	52.361.882	105.667.304	9.879.645	%	27.251.830							37.131.475	-				89.493.357		29	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 bulan	140.454.806	12 bulan	34.858.270	12 Bulan	73.405.111	6.659.735	0 bulan	17.127.643						23.787.378	-	32			58.645.648		42	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60 bulan	163.870.134	10 bulan	17.503.612	12 Bulan	32.262.193	3.219.910	1 bulan	10.124.187						13.344.097	-	41			30.847.709		19	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	217.905.042	86 %	21.403.700	31.844.940	7.156.000	1 %	14.312.000							21.468.000	-				42.871.700		20	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perincian Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Pemeliharaan, Pembayaran Pajak dan Perincian Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10 unit	45.623.625	3 unit	18.472.700	2 Unit	26.236.000	7.156.000	1 unit	14.312.000						21.468.000	-	82			39.940.700		88	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	17 unit	18.864.032	17 unit	2.931.000	33 Unit	5.608.940														2.931.000		16	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhab	5 unit	153.417.394	- unit	-																			
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN Pemerintahan dan PELAYANAN PUBLIK	Persentase meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kecamatan	100 %	500.563.108	63 %	21.475.000	156.661.174	1.950.000	%	6.450.000							8.400.000					29.875.000		6	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan	100 %	199.079.949	78 %	19.000.000	126.117.116	1.500.000	%	6.000.000							7.500.000	-				26.500.000		13	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan kecamatan	19 keg	199.079.949	3 keg	19.000.000	1 Unit	126.117.116	1.500.000	0 keg	6.000.000						7.500.000	-	6			26.500.000		13	
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	100 %	24.733.856	- %	-	6.900.000																		
7	01	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah kegiatan pelayanan umum dan informasi kecamatan	5 keg	24.733.856	- keg	-	4 Kegiatan	6.900.000																	
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelaksanaan koordinasi urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100 %	276.749.304	43 %	2.475.000	23.644.058	450.000	%	450.000							900.000	-				3.375.000		1	
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah kegiatan pelayanan pendidikan di kecamatan, Jumlah kegiatan pelayanan keselamatan di kecamatan, Jumlah penyelenggaraan kegiatan keagamaan serta Jumlah pelaksanaan pengawasan, pendataan, monitoring dan evaluasi objek pajak dan retribusi daerah	45 keg	276.749.304	4 keg	2.475.000	4 Kegiatan	23.644.058	450.000	0 keg	450.000						900.000	-	4			3.375.000		1	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pelaksanaan pemberdayaan masyarakat	100 %	85.382.708	8 %	292.500	7.503.253															292.500		0	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	100 %	85.382.708	17 %	292.500	7.503.253															292.500		0	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa	Jumlah peserta musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	160 org	3.622.752	39 org	292.500	438 Orang	3.456.545														292.500		8	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan perlombaan desa dan kecamatan dan Jumlah pemuda yang diberdayakan serta Jumlah kegiatan program polik PKK	25 keg	81.759.956	- keg	-	5 kegiatan	4.046.708																	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Gampong di Kecamatan	100 %	166.225.685	54 %	22.125.000	38.775.922	7.375.000	%	10.975.000							18.350.000	-				40.475.000		24	
7	01	06	2.01		Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan gampong di Kecamatan	100 %	166.225.685	19 %	22.125.000	38.775.922	7.375.000	%	10.975.000							18.350.000	-				40.475.000		24	
7	01	06	2.01	02	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan pemerintahan pempengurusan dan jumlah aparatur pemerintahan desa yang mengikut bimbingan teknis bidang manajemen pemerintahan	10 keg	37.480.908	- keg	-	2 Kegiatan																		
7	01	06	2.01	03	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan pengawasan ADG	90 kali	85.745.606	- kali	-	18 Kali	7.980.922																	
7	01	06	2.01	11	Facilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Keterbacaan Umum	Jumlah pelaksanaan pengawasan, pendataan, monitoring dan evaluasi perincian	60 kali	42.999.171	7 kali	22.125.000	12 Kali	30.795.000	7.375.000	0 kali	10.975.000						18.350.000	-	60			40.475.000		94	
7	01				KECAMATAN ULEE KARENG		7.944.483.489	0	0	2.881.910.789	2.694.762.021	625.367.124	%	1.421.172.400							625.367.124					3.596.577.913		44	
7	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100 %	7.338.566.183	116 %	2.788.531.715	2.555.816.521	625.567.124	%	1.310.839.400								1.936.406.524	-				4.724.938.239		64
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	14.908.626	0 %	3.092.500	6.985.100										2.636.000	-				5.728.500		38	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Penyusunan perencanaan yang disusun	6 keg	14.908.626	3 0%	3.092.500	3 Dokumen	6.985.100									2.636.000	-	38			5.728.500		38	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan perangkat daerah	Persentase pelaksanaan Administrasi Keuangan	100 %	7.213.564.054	100 0%	2.770.772.265	2.395.780.040	611.494.024	Bulan	1.241.125.972							1.852.619.996	-				4.623.392.261		64	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah waktu pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang di sediakan	24 bulan	6.828.155.678	12 Bulan	2.131.294.775	12 Bulan	2.128.460.040	550.144.024	1 Bulan	1.117.750.972						1.667.894.996	-	78			3.799.189.771		56	

Unsur	Kode	Bid. Unsur	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Pemutakhiran)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJM Kota Banda Aceh pada Tahun 22-222 Kepmendagri 5		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 221		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 222)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 221								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD OPD s/d Akhir Tahun 221		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 221 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD OPD s/d Akhir Tahun 221		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi RPJMD OPD s/d Tahun 222 (%)		OPD Penanggung Jawab
								Target	Rp	Kinerja	Rp	Target	Rp	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 221		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 221 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD OPD s/d Akhir Tahun 221		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi RPJMD OPD s/d Tahun 222 (%)		
														Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
7	01	01	2.02	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah waktu jasa tenaga pendukung administrasi/biaya perkantoran yang disediakan	24 bulan	385.408.376	12 Bulan	639.477.490	12 Bulan	267.300.000	61.350.000	0 Bulan	123.375.000					184.725.000	-	69	824.202.490	214					
7	01	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan kebutuhan peningkatan kapasitas dan disiplin aparatur	100 %	33.006.667	- %	-	-	-	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
7	01	01	2.05	02		Pengadaan Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang disediakan	60 stel	33.006.667	- stel	-	-	-	stel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
7	01	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Administrasi Umum	100 %	55.551.413	64 %	4.266.950	42.148.100	14.073.100	%	31.515.111					45.988.211	-	-	49.855.161	90						
7	01	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	10 jenis	5.220.889	4 Jenis	1.940.000	3.763.506		Jenis							-	-	1.940.000	37						
7	01	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian	Jumlah jenis cetak dan pengandaian yang disediakan	10 jenis	14.238.788	5 jenis	2.326.950	7.772.190		jenis	3.982.050					3.982.050	-	46	5.909.000	41						
7	01	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat/Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	10 Laporan	41.312.625	- Laporan	-	5 Laporan	30.613.404	14.073.100	- Laporan	27.933.061				42.006.161	-	137	42.006.161	102						
7	01	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah	100 %	19.535.424	80 %	10.400.000	80.140.714	-	%	22.327.317					22.327.317	-	-	32.727.317	168						
7	01	01	2.07	02		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan	2 unit	1.025.000	- unit	-	-	-	unit						-	-	-	-	-						
7	01	01	2.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah jenis Peralatan Gedung Kantor yang disediakan	2 unit	18.510.424	2 Unit	10.400.000	4.444.667		Unit						-	-	-	10.400.000	56						
7	01	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik	Jumlah waktu jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	24 Bulan	134.262.272	17 bulan	59.233.799	12 Bulan	45.366.000		bulan	9.966.317				9.966.317	-	22	69.200.116	52						
7	01	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	Jumlah waktu jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	24 bulan	201.307.979	10 bulan	9.026.500	12 Bulan	30.330.047		bulan	12.361.000				12.361.000	-	41	21.387.500	11						
7	01	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	72.372.673	35 %	37.128.000	30.781.567	-	%	13.235.000					13.235.000	-	-	50.363.000	70						
7	01	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pasok dan Perbaikan Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional yang dilaksanakan	60 kali	46.836.118	27 kali	18.564.000	25.736.000	2 Unit	25.736.000		kali	10.457.000			10.457.000	-	41	29.021.000	62						
7	01	01	2.09	06		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor yang dilaksanakan	10 kali	9.136.555	- kali	-	5 Kali	5.045.567		kali	2.778.000				2.778.000	-	55	2.778.000	30						
7	01	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor yang dilaksanakan	2 jenis	16.400.000	0 Jenis	18.564.000			Jenis					-	-	-	18.564.000	113							
7	01	02				Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	359.801.843	58 %	19.150.000	125.978.000	-		103.778.000				103.778.000	-	-	122.928.000	34							
7	01	02	2.01			Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Persentase pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan	100 %	145.210.387	91 0%	9.000.000	120.428.000		Bulan	102.428.000				102.428.000	-	-	111.428.000	77							
7	01	02	2.01	02		Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan kecamatan dan gampong	6 keg	145.210.387	3 0%	15.000.000	120.428.000	3 Kegiatan	120.428.000	7 Bulan	102.428.000			102.428.000	-	85	117.428.000	81							
7	01	02	2.04			Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelaksanaan koordinasi urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100 %	214.591.456	18 %	10.150.000	5.550.000	-	0 %	1.350.000				1.350.000	-	-	11.500.000	5							
7	01	02	2.04	01		Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah kegiatan pelayanan perizinan non usaha yang dilaksanakan	50 kali	2.050.000	- kali	-	25 Kali		kali					-	-	-	-	-							
7	01	02	2.04	03		Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	6 keg	212.541.456	1 kegiatan	10.570.000	3 Kegiatan	5.550.000	0 kegiatan	1.350.000				1.350.000	-	24	11.920.000	6							
7	01	03				Program pemberdayaan masyarakat desa dan kekurahan	Persentase pelaksanaan pemberdayaan masyarakat	100 %	97.726.520	13 %	900.000	3.000.000	-		1.650.000				1.650.000	-	-	2.600.000	3							
7	01	03	2.01			Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Persentase pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	100 %	97.726.520	50 0%	900.000	3.000.000	-	Bulan	1.650.000				1.650.000	-	-	2.600.000	3							
7	01	03	2.01	01		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah/perencanaan pembangunan desa	Jumlah peserta musyawarah pembangunan desa	200 orang	3.765.710	100 orang	3.763.750			orang					-	-	-	3.763.750	99							
7	01	03	2.01	03		Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan pemuda dan kegiatan PKK	4 keg	83.940.809	- kegiatan	-	2 Kegiatan	3.000.000	- kegiatan	1.650.000				1.650.000	-	55	1.650.000	2							
7	01	06				Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan Gampong di Kecamatan	100 %	150.388.943	37 %	4.118.775	9.967.500	-		4.905.000				4.905.000	-	-	9.023.775	6							
7	01	06	2.01			Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan gampong di kecamatan	100 %	150.388.943	14 %	4.118.775	9.967.500	-	%	4.905.000				4.905.000	-	-	9.023.775	6							
7	01	06	2.01	02		Fasilitasi administrasi lab pemerintahan desa	Jumlah kegiatan bimbingan teknis bidang manajemen pemerintahan bag aparat gampong dan kegiatan lomba gampong	4 keg	466.375	- kegiatan	-			kegiatan					-	-	-	-	-							
7	01	06	2.01	03		Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan pengawasan ADG	36 KALI	114.918.882	- kali	-	18 kali	3.442.500	- kali	405.000				405.000	-	12	405.000	0							
7	01	06	2.01	11		Fasilitas penyelenggaraan ketertarikan dan hiburan umum	Jumlah pelaksanaan perhibitan pedagang dan pengawasan Syariat Islam	50 KALI	35.003.686	10 kali	4.118.775	25 kali	6.525.000	1 kali	4.500.000				4.500.000	-	69	8.618.75	25							
5	02					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA			599.490.561.783	0	85.373.398.891	175.972.968.778	10.113.126.000	24.775.319.963	10.113.126.000	12.888.546.416	32.358.665.700	95.486.524.891	17	BPBK										
5	02	01				Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah		100 %	242.878.101.881	99 %	23.004.094.769	19.470.119.342	4.292.643.750	8.595.902.688				12.888.546.416			32.358.665.700	13								
5	02	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100 %	72.715.000	53 %	75.943.000	78.491.660	-	%	-				-	-	-	75.943.000	104							
5	02	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Disusun	30 dokumen	72.715.000	8 Dokumen	75.943.000	78.491.660		Dokumen					-	-	-	75.943.000	104							
5	02	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan	100 %	232.669.686.281	93 %	16.649.148.367	17.799.140.918	3.876.505.768	%	7.752.697.784				11.629.203.552	-	-	28.278.352.919	12							
5	02	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Waktu Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN yang Disediakan	28 bulan	230.620.766.261	12 Bulan	13.777.312.912	12 Bulan	14.700.814.518	3 bulan	3.428.327.368	0 Bulan	6.703.923.632			10.132.251.000	-	69	23.909.565.912	10						
5	02	01	2.02	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Waktu Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Tenaga Perkantoran yang Disediakan	24 bulan	2.048.920.000	12 Bulan	2.871.836.455	12 Bulan	3.098.326.400	3 bulan	448.178.400	0 Bulan	1.048.774.152			1.496.952.552	-	48	4.368.789.007	213						
5	02	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	228.800.000	- %	-	38.200.000	-	%	-				-	-	-	-	-							

Unsur	Kode				Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Pemutakhiran)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJM Kota Banda Aceh pada Tahun 22-222 Kependagri 5		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 21		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 22)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 221								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 221		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 221 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD OPD s/d Akhir Tahun 221		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi RPJMD OPD s/d Tahun 222 (%)		OPD Penanggung Jawab
	Bid. Unsur	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Target	Rp	Kinerja	Rp	Target	Rp	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 221		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 221 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD OPD s/d Akhir Tahun 221		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi RPJMD OPD s/d Tahun 222 (%)				
													Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
5	02	02	2.02	06	Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama dan Pembinaan Transaksi Non Tunai dengan lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah SP2D yang Diberikan	18000 SP2D	240.000.000	10.113 SP2D	440.202.850	9000 SP2D	62.100.000	0 SP2D	182.188.646							244.288.646	-	55		684.491.496	285					
5	02	02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyelidikan Pemungutan Fitak Kelapa (PFK)	Jumlah Laporan yang Disusun	30 Laporan	40.055.680	14 Laporan	13.377.400	15 Laporan	19.080.011		Laporan							-	-	-		13.377.400	33					
5	02	02	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Utang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Laporan yang Disusun	2 Laporan	40.055.680	1 Laporan	25.890.350	1 Laporan	39.921.376		Laporan							-	-	-		25.890.350	65					
5	02	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Laporan yang Disusun	8 Laporan	40.055.680	4 Laporan	24.126.500	4 Laporan	26.085.401		Laporan	315.700						315.700	-	1		24.442.200	61					
5	02	02	2.02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Kegiatan	Jumlah Produk Hukum/Petunjuk Teknis Pelaksanaan Belanja Daerah	2 Produk Hukum	40.055.680	-	-	1 Produk Hukum	32.378.465		Produk Hukum							-	-	-		-	-					
5	02	02	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan yang Disusun	24 Dokumen Laporan	40.055.680	11 Dokumen Laporan	27.625.550	12 Dokumen Laporan	40.734.241		Dokumen Laporan							-	-	-		27.625.550	69					
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Dokumen Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100 %	894.616.000	66 %	444.997.328	783.058.737			0 %	31.983.130						31.983.130	-	-		476.590.450	53					
5	02	02	2.03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Serta Pembiayaan	6 Dokumen Laporan	59.208.000	5 Dokumen Laporan	68.429.120	3 Dokumen Laporan	82.471.838		Dokumen Laporan							-	-	-		68.429.120	116					
5	02	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	1 Laporan	19.736.000	- Laporan	-	1 Laporan	101.547.845		Laporan							-	-	-		-	-					
5	02	02	2.03	04	Korelasi Laporan Keuangan SKPD, SLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Semesteran dan Akhir Tahun)	Jumlah Laporan Keuangan (Semesteran dan Akhir Tahun)	14 Laporan Keuangan	97.118.800	13 Laporan Keuangan	230.631.750	7 Laporan Keuangan	185.694.175		0 Laporan Keuangan	31.983.130						31.983.130	-	17		262.224.880	270					
5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penyelenggaraan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	4 Produk Hukum	130.181.300	5 Produk Hukum	104.161.450	2 Produk Hukum	122.046.946		Produk Hukum							-	-	-		104.161.450	80					
5	02	02	2.03	06	Penyusunan Tanggapan Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah Laporan Tanggapan terhadap LHP BPK-RI	1 Laporan	33.181.300	- Laporan	-	1 Laporan	25.413.558		Laporan							-	-	-		-	-					
5	02	02	2.03	07	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Pertentangan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Laporan penyelesaian Tuntutan Pertentangan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 Laporan	33.181.300	- Laporan	-	1 Laporan	56.179.746		Laporan							-	-	-		-	-					
5	02	02	2.03	08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Laporan Analisis Keuangan Pemerintah Kota	1 Laporan	33.181.300	- Laporan	-	1 Laporan	128.638.791		Laporan							-	-	-		-	-					
5	02	02	2.03	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Produk Hukum tentang Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	2 Produk Hukum	147.900.000	1 Produk Hukum	41.775.000	1 Produk Hukum	62.189.745		Produk Hukum							-	-	-		41.775.000	28					
5	02	02	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Produk Hukum tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Banda Aceh	2 Produk Hukum	147.900.000	- Produk Hukum	-	1 Produk Hukum	13.089.743		Produk Hukum							-	-	-		-	-					
5	02	02	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah SKPD yang Mengikuti Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	88 SKPD	193.028.000	- SKPD	-	44 OPD	5.786.350		SKPD							-	-	-		-	-					
5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Kelancaran Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	28.126.800.000	87 %	2.869.370.729	1.500.000.000			0 %	190.339.750						190.339.750	-	-		2.999.710.479	11					
5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Ketersediaan Dana Belanja Bantuan Tidak Terduga (BTT) Pemerintah Kota Banda Aceh	2 Tahun	28.126.800.000	1 Tahun	2.869.370.729	12 Bulan	1.500.000.000		0 Tahun	190.339.750						190.339.750	-	13		2.999.710.479	11					
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase terbitnya pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan perundang-undangan	100 %	5.378.964.000	75 %	2.432.293.270	3.238.920.257		63.200.000		425.538.520						488.738.520	-	-		2.921.031.790	54					
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase hasil koordinasi dan pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %	5.378.964.000	52 %	2.432.293.270	3.238.920.257		63.200.000	%	425.538.520						488.738.520	-	-		2.921.031.790	54					
5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Keputusan Penetapan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	719.287.750	1 Dokumen	286.051.250	1 Dokumen	306.758.666		Dokumen							-	-	-		286.051.250	40					
5	02	03	2.01	02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Keputusan Penetapan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	719.287.750	- Dokumen	-	1 Dokumen	4.777.662		Dokumen							-	-	-		-	-					
5	02	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Adanya Keputusan Penetapan Perencanaan Kebutuhan BMD	4 Dokumen	363.142.500	1 Dokumen	147.790.500	2 Dokumen	180.662.514		Dokumen							-	-	-		147.790.500	41					
5	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Adanya Daftar Inventarisasi Barang Milik Daerah	8 Dokumen	402.024.000	0 Dokumen	122.261.100	4 Dokumen	146.201.562		0 Dokumen	19.950.000						19.950.000	-	14		142.211.100	35					
5	02	03	2.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Adanya Dokumen Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah	2 Dokumen	229.320.000	0 Dokumen	66.203.300	2 Dokumen	118.713.250		Dokumen							-	-	-		66.203.300	29					

Unsur	Kode	Unsur	Bd. Unsur	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Pemutakhiran)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJM Kota Banda Aceh pada Tahun 22-222 Kepmendagri 5		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 21		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 22)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 221								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM OPD sid Akhir Tahun 21 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM OPD sid Akhir Tahun 21		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi RPJM OPD sid Tahun 22 (%)		OPD Penanggung Jawab						
									Target	Rp	Kinerja	Rp	Target	Rp	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 21		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
															Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp											
5	03	01	2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	648.524.489	122 %	64.557.600		98.604.811		8.288.000	0 %	22.788.400								31.076.400	-		95.634.200		15				
5	03	01	2.09	02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Pemeliharaan, Pembayaran Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9 unit	132.183.411	24 Unit	55.635.800		62.600.000		0 Unit	14.500.400									14.500.400	-	23	70.136.200		53				
5	03	01	2.09	06			Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	30 unit	64.190.754	15 Unit	8.922.000		26.594.811		8.288.000	1 Unit	8.288.000								16.576.000	-	62	25.498.000		40				
5	03	01	2.09	09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehab	2 unit	452.150.324	- unit	-		9.410.000		unit	-	-							-	-	-	-	-	-					
5	03	02					Program Kepegawaian Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi dan data Kepegawaian ASN	100 %	3.749.067.637	52 %	1.385.305.000		2.042.310.392		232.423.700		621.784.700		-	-					854.208.400	-		2.239.513.400		60				
5	03	02	2.01				Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Kepegawaian ASN	100 %	962.598.060	25 %	148.785.000		956.283.890		177.834.500	%	394.160.500		-	-						571.995.000	-		720.780.000		75			
5	03	02	2.01	02			Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah dokumen penyusunan Kebutuhan Formasi dan pengadaan ASN	3 Dokumen	656.610.386	2 Dokumen	76.835.000		776.552.425		177.834.500	5 Dokumen	377.090.500									554.925.000	-	71	631.760.000		96			
5	03	02	2.01	05			Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian PNS	Jumlah ASN yang diberhentikan dan yang mendapat pensiun	230 orang	145.147.878	64 Orang	71.950.000		42.368.965		0 Orang	2.970.000									2.970.000	-	7	74.920.000		52				
5	03	02	2.01	08			Facilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah ASN yang ikut serta dalam pengurusan dan Kegiatan KORPRI	23 orang	96.765.252	- Orang	-		23 Orang		100.000.000		-	-							-	-	-	-	-	-				
5	03	02	2.01	10			Pengelolaan Sistem Informasi kepegawaian	Jumlah Data dan Informasi Kepegawaian yang tersedia	5 data	64.074.544	10 Data	-		37.362.500		(1.410.000) Data	14.100.000									14.100.000	-	38	14.100.000		22				
5	03	02	2.02				Mutasi dan Promosi ASN	Persentase PNS yang Dimutasi dan Promosi pada Jabatan	100 %	1.249.329.206	88 %	643.862.500		471.154.002		54.589.200	0 %	224.489.200		-	-						279.078.400	-		922.940.900		74			
5	03	02	2.02	01			Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Pelaksanaan pengelolaan Mutasi Jabatan	20 Kali	87.579.844	8 Kali	51.125.000		41.500.000		0 Kali	11.100.000									11.100.000	-	27	62.225.000		71				
5	03	02	2.02	02			Pengelolaan Naik pangkat ASN	Jumlah ASN yang akan diproses kenaikan pangkat	900 orang	47.575.631	373 Orang	53.050.000		74.757.470		2.622.000	1 Orang	28.422.000								31.044.000	-	42	84.094.000		177				
5	03	02	2.02	03			Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Pelaksanaan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	5 Kali	1.114.173.821	2 Kali	539.687.500		354.896.532		51.967.200	0 Kali	184.967.200									236.934.400	-	67	776.621.900		70			
5	03	02	2.03				Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi dan Peningkatan Kinerja	100 %	1.211.128.550	78 %	592.657.500		578.085.000		-	0 %	3.135.000		-	-						3.135.000	-		595.792.500		49			
5	03	02	2.03	01			Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang melewati kedisiplinan dan kinerja secara objektif, terukur dan akutabel	2 dokumen	370.943.016	2 Dokumen	80.157.500		44.485.000		0 Dokumen	3.135.000										3.135.000	-	7	83.292.500		22			
5	03	02	2.03	04			Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mengikuti tugas belajar, Inz Belajar dan katan dinas	145 orang	840.185.534	44 Orang	512.500.000		533.600.000		- Orang	-										-	-	-	512.500.000		61			
5	03	02	2.04				Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Sipil Negara	Persentase Evaluasi Kinerja Aparatur Sipil Negara	100 %	326.011.731	- %	-		36.787.500		-	-									-	-	-	-	-	-				
5	03	02	2.04	01			Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah dokumen Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-	-	0%	-		-		-	Bulan									-	-	-	-	-					
5	03	02	2.04	06			Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah ASN yang mendapatkan penghargaan dan tanda jasa	30 orang	165.381.822	0%	-		-		-	Bulan									-	-	-	-	-					
5	03	02	2.04	08			Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin PNS	20 orang	71.578.159	- Orang	-		10 Orang		10.462.500		-	-							-	-	-	-	-					
5	03	02	2.04	09			Pelayanan Proses Izin Perencanaan Pegawai rumah tangga	Jumlah konsultasi dan mediasi singkat rumah tangga	30 kasus	89.051.750	- Orang	-		15 Kasus		17.325.000		-	-							-	-	-	-	-					
5	04						PENDIDIKAN DAN PELATIHAN program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	100 %	1.846.093.474	41 %	574.575.500		1.661.213.225		709.062.000		732.775.800		-	-						1.441.837.800	-		2.016.413.300		109			
5	04	02	2.01				Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi dan fungsional	100 %	326.388.319	69 %	31.775.000		57.909.572		-	0 %	7.500.000									7.500.000	-		39.275.000		12			
5	04	02	2.01	03			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Pengelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangko Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis dan fungsional	900 orang	326.388.319	208 Orang	31.775.000		57.909.572		0 Orang	7.500.000										7.500.000	-	13	39.275.000		12			
5	04	02	2.02				Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manjerial dan Fungsional	Persentase ASN yang mengikuti sertifikasi dan pengembangan Kompetensi Manjerial dan Fungsional	100 %	1.519.705.155	73 %	542.800.550		1.603.303.653		709.062.000	1 %	725.275.800									1.434.337.800	-		1.977.138.350		130			
5	04	02	2.02	08			Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitas, Pembantuan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pembembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Pegabatan	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi Manjerial dan Struktural	261 Orang	1.519.705.155	141 Orang	542.800.550		1.603.303.653		709.062.000	1 Orang	725.275.800									1.434.337.800	-	89	1.977.138.350		130			
2	09						DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN			66.959.921.546	-	0	13.586.108.124		30.641.031.492		2.227.852.921		7.291.675.330							2.227.852.921	-		15.813.961.045		24	DPKP			
2	09	01					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100 %	31.319.646.134	111 %	9.594.848.669		10.244.019.725		2.227.852.921		4.682.829.330		-	-						6.910.682.231	-		16.495.530.920		53			
2	09	01	2.01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi OPD yang tersusun	100 %	0	- %	-		-		-	%	-								-	-	-	-	-					
2	09	01	2.01	01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	10 dokumen	0	- dokumen	-		-		dokumen										-	-	-	-	-					
2	09	01	2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	100 %	27.054.096.256	78 %	9.150.215.286		9.437.448.609		2.184.671.147	0 %	4.520.815.655		-	-						6.705.486.802	-		15.655.702.088		59			
2	09	01	2.02	01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah waktu pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang disediakan	24 bin	25.300.187.794	12 bin	8.618.551.456		8.877.798.609		2.094.061.147	0 bin	4.267.573.655									6.331.634.802	-	71	14.960.186.258		59			
2	09	01	2.02	02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Waktu Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perantoran yang disediakan	24 bin	1.634.000.000	12 bin	527.483.180		541.400.000		120.610.000	0 bin	253.242.000									373.852.000	-	69	901.335.180		55			
2	09	01	2.02	08			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	20 laporan	60.000.000	4 bin	4.180.650		18.250.000		- bin	-									-	-	-	4.180.650		7				
2	09	01	2.05				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	144.200.000	- %	-		-		-	-									-	-	-	-	-					

Unsur	Kode				Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Pemutakhiran)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJM Kota Banda Aceh pada Tahun 22-222 Kepmendagri 5		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 221		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 221								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD OPD s/d Akhir Tahun 221		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi RPJMD OPD s/d Tahun 222 (%)		OPD Penanggung Jawab		
	Bid. Unsur	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Target	Rp	Kinerja	Rp	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 221		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD OPD s/d Akhir Tahun 221			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi RPJMD OPD s/d Tahun 222 (%)	
											Target	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		Kinerja	Rp
2	16	03	2.01	02	Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Kota	Persentase layanan e-government yang dikelola	100 %	2.580.910.047	36 %	19.785.000		4.343.074.961		524.982.000	85 %	1.688.928.843		2.213.910.843	-	-	2.233.695.843		87		
2	16	03	2.01	01	Kegiatan Penatalaksanaan dan Peningkatan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah SKPK	Jumlah SDM Penda yang Dilatih Untuk Pembuatan Dokumen Proses Bisnis SKPK	94 Orang	82.518.021	- Orang	-	47 Orang	100.960.000		- Orang	100.960.000		100.960.000	-	100	100.960.000		122			
2	16	03	2.01	03	Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Jangka Waktu Pelayanan Operasional Pusat Data	2 Tahun	74.180.000	1 Tahun	35.235.000	12 Bulan	82.216.936		- Tahun	-	-	-	-	-	-	35.235.000		47		
2	16	03	2.01	06	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Dokumen Arsitektur SPBE Kota	2 Dokumen	11.865.656	- Dokumen	-	1 Dokumen	247.940.000		- Dokumen	247.940.000		495.880.000	-	200	495.880.000		4.179			
2	16	03	2.01	07	Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi Khusus yang Dikembangkan	6 Aplikasi	2.284.139.968	2 Aplikasi	30.338.000	3 Aplikasi	72.347.144		- Aplikasi	-	-	-	-	-	-	30.338.000		1		
2	16	03	2.01	09	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ecosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Jenis Penguatan Command Center Kota yang Dilaksanakan	4 Jenis	79.272.883	1 Jenis	2.036.477.250	2 Jenis	3.839.610.881		1 Jenis	1.340.028.843		1.617.070.843	-	42	3.653.548.093		4.609			
2	16	03	2.01	12	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ecosistem SPBE	Jumlah Laporan Monev SPBE	1 Laporan	48.933.499	- Laporan	-	-	-		Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	20	02			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase terpenuhinya data base statistik daerah	100 %	1.068.352.297	- %	-		88.337.528		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	20	02	2.01		Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kota	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kota	100 %	1.068.352.297	- %	-		88.337.528		-	%	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	20	02	2.01	02	Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Penda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM Penda yang Memiliki Kapasitas Mutu Integrasi Statistik Daerah	136 Orang	919.305.844	- Orang	-	-	-		Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	20	02	2.01	04	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah OPD yang diverifikasi/validasi diupdate dan dianalisis open/public datasetnya	68 OPD	149.046.463	- OPD	-	34 OPD	88.337.528		OPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	21	02			Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	100 %	68.987.625	22 %	43.545.000		-		-	-	-	-	-	-	-	43.545.000		63		
2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Kota	Persentase kegiatan persandian dan pengamanan informasi yang terlaksana	100 %	47.462.625	100 %	43.545.000		-		%	-	-	-	-	-	-	43.545.000		92		
2	21	02	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Bertbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Jangka Waktu Layanan Sistem Keamanan Jaringan yang Didadakan	2 Tahun	47.462.625	1 Tahun	43.545.000		-		Tahun	-	-	-	-	-	-	43.545.000		92		
2	21	02	2.01	02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kota	Persentase jaring komunikasi sandi daerah yang dilaksanakan	100 %	21.525.000	100 %	-		-		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	21	02	2.01	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Kota	Jumlah Surat Sandi yang Dikelola	400 Surat	21.525.000	200 Surat	-	-	-		Surat	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	23				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		8.532.789.573	0	12.186.573.782		3.884.702.280		672.626.405		1.500.606.280		672.626.405			12.859.200.187		151	Dinas Kearsipan		
2	23	01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Administrasi Keuangan)	Persentase pemenuhan kebutuhan urusan Pemerintah Daerah (administrasi keuangan)	100 %	8.105.572.328	109 %	2.667.333.782		3.543.139.335		655.226.405		1.471.636.730		2.126.263.135			4.793.596.917		59		
2	16	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi OPD yang terusun	100 %	10.250.000	- %	-		5.575.734		-	%	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	16	01	2.01	01	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	10 Dokumen	10.250.000	- Dokumen	-	5 Dokumen	5.575.734		Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	100 %	7.287.025.212	96 %	2.531.547.862		2.830.934.258		621.093.605	1 %	1.327.334.044		1.948.427.649			4.479.975.511		61		
2	23	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah waktu pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang disediakan	24 bh	6.914.673.432	12 bh	2.309.247.862	12 Bulan	2.373.434.258	3 bulan	575.493.605	1 bh	1.188.959.044		1.764.452.649	-	74	4.073.700.511		59		
2	23	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah waktu Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkarantoran yang disediakan	24 bh	372.351.780	11 bh	222.300.000	12 Bulan	457.500.000	3 bulan	45.600.000	1 bh	138.375.000		183.975.000	-	40	406.275.000		109		
2	23	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	32.343.248	- 0%	-	-	-		- Bulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	23	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Perengkapannya yang disediakan	25 Setel	32.343.248	- 0%	-	-	-		- Bulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi umum	100 %	229.094.402	43 %	23.307.000		61.194.314		6.227.000	1 %	25.299.945		31.526.945	-		54.833.945		24		
2	23	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	47 Jenis	7.236.438	- Jenis	-	37 Jenis	17.559.877		969.000	- Jenis	14.291.945		15.260.945	-	87	15.260.945		211		
2	23	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	37 Jenis	57.400.464	4 Jenis	3.807.000	20 Jenis	18.634.437		5.258.000	3 Jenis	11.008.000		16.266.000	-	87	20.073.000		35		
2	23	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang disediakan	32 laporan	164.457.500	4 laporan	19.500.000	17 laporan	25.000.000		- laporan	-	-	-	-	-	-	19.500.000		12		
2	23	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	110.000.000	100 %	49.973.000		365.414.823		-	1 %	39.772.666		39.772.666	-		89.745.666		82		
2	23	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	22 Jenis	110.000.000	3 Jenis	49.973.000	12 Unit	365.414.823		1 Jenis	39.772.666		39.772.666	-	11	89.745.666		82			
2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	279.892.014	71 %	36.962.930		212.505.393		27.965.800	2 %	59.523.275		87.429.075	-		124.392.005		44		
2	23	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	24 bh	93.479.465	9 bh	26.339.430	12 Bulan	141.390.000		2.905.800	1 bh	17.782.318		20.688.118	-	15	47.027.548		50		
2	23	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	24 bh	186.412.559	16 bh	10.623.500	12 Bulan	71.115.393		25.000.000	4 bh	41.740.957		66.740.957	-	84	77.384.457		42		
2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	167.217.452	17 %	25.542.990		67.514.813		-	1 %	19.106.800		19.106.800	-		44.649.790		27		
2	23	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pakan, dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Pemeliharaan, Pembayaran Pakan dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	96 Unit	149.384.070	24 Unit	25.542.990	48 Unit	61.865.212		1 Unit	15.663.800		15.663.800	-	25	41.206.790		28			
2	23	01	2.09	06	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	32 Unit	9.538.786	- Unit	-	16 Unit	5.649.601		- Unit	3.443.000		3.443.000	-	61	3.443.000		36			

Unsur	Kode	Bid. Unsur	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Pemutakhiran)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJM Kota Banda Aceh pada Tahun 22-222 Kepmendagri 5		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 221		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 222)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 221								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 221 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD OPD s.d Akhir Tahun 221		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi RPJMD OPD s.d Tahun 222 (%)		OPD Penanggung Jawab				
								Target	Rp	Kinerja	Rp	Target	Rp	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 221		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
														Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29				
2	23	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhab	2 Unit	8.294.616	1 Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2	23	03				Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase Peningkatan Jumlah Naskah Kuno yang dilestarikan	100 %	65.000.000	- %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2	23	03	2.01			Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	100 %	65.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2	23	03	2.01	02		Pengembangan, Pengolahan dan Pengalimediaan Naskah Kuno yang dimiliki Masyarakat Untuk dilestarikan dan didayagunakan	Jumlah Pendataan dan Pengalimediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat Untuk dilestarikan dan didayagunakan	5 Naskah Kuno	65.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2	23	02				Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Perpustakaan	100 %	299.985.304	95 %	9.519.240.000	318.778.545	2.400.000	12.399.050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2	23	02	2.01			Pengelolaan perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Perpustakaan	-	263.516.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2	23	02	2.01	01		Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Pengembangan dan pemeliharaan layanan perpustakaan	1 Kali	3.516.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2	23	02	2.01	09		Pengelolaan dan Pengembangan bahan Pustaka	Jumlah Bahan pustaka yang disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2	23	02	2.02			Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Sosialisa Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	100 %	299.985.304	9 %	9.519.240.000	55.262.545	2.400.000	0 %	12.399.050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2	23	02	2.02	01		Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Dasar dan Masyarakat	3 Kegiatan	289.245.304	- %	-	-	3 Kegiatan	53.540.045	2.400.000	- %	10.676.550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2	23	02	2.02	02		Pembangunan dan pemeliharaan sarana perpustakaan di tempat umum yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota	Sarana Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan di Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota	2 Unit	10.750.000	27 %	9.519.240.000	1.722.500	0 %	1.722.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2	23	02	2.02	13		Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah penulisan keluarga yang dilaksanakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2	24	02				Program Pengelolaan Arsip	Persentase Peningkatan Tata Kelola Arsip	100 %	62.221.941	- %	-	-	32.784.400	15.000.000	17.170.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2	24	02	2.01			Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	100 %	33.110.970	- %	-	-	32.784.400	15.000.000	17.170.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2	24	02	2.01	01		Penciptaan dan penguasaan Arsip Dinamis	Jumlah penciptaan dan penguasaan arsip dinamis	-	-	-	-	1 LKD 44 OPD	15.088.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2	24	02	2.01	02		Pemeliharaan dan penyusunan arsip dinamis	Jumlah pemeliharaan dan penyusunan arsip dinamis	4 OPD	33.110.970	-	-	-	2 OPD	17.695.500	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2	24	02	2.01	03		Pengawasan Arsip Dinamis Kewangan	Jumlah OPD yang masuk dalam daftar pengawasan arsip dinamis daerah kota	2 OPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2	24	02	2.03			Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat kabupaten/kota	100 %	28.110.971	25 %	-	-	12.465.300	11.400.000	%	12.465.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2	24	02	2.03	01		Penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten/kota melalui JKN	Jumlah OPD yang menerapkan layanan kearsipan berbasis JKN	4 OPD	28.110.971	60	-	-	2 OPD	12.465.300	11.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2	24	02	2.03	05		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah alat bantu yang tersedia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
2	24	02	2.03	06		Penyediaan Perbekalan Kesehatan Di Luar Parit	Jumlah perbekalan kesehatan yang tersedia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
3						UNSUR PEMERINTAHAN PILIHAN	#REF!																									
3	26					URUSAN WALIS BIDANG PEMERINTAHAN PARIWISATA	#REF!	0	0	11.406.838.409																						
3	26					DINAS PARIWISATA	#REF!	0	0	11.406.838.409																						
3	26					DINAS PARIWISATA	#REF!	18.230.887.616		21.251.589.313		1.435.657.405		3.414.289.004		14.35857405																
3	26	01				Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	100 %	#REF!	95 %	5.157.417.913	5.785.160.059	1.085.237.655	2.121.400.154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
3	26	01	2.01			Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	jumlah laporan Renstra dan renja sesuai peraturan perundang-undangan	24 bulan	42.691.320	100 %	6.791.100	13.909.218	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
3	26	01	2.01	07		Evaluasi kinerja perangkat daerah	Tersusunnya Renstra dan renja sesuai peraturan perundang-undangan	24 bulan	42.691.320	1 Lapora	6.791.100	13.909.218	Lapora	Lapora	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
3	26	01	2.02			Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	100 %	67.798.721.868	39 0%	4.003.924.763	4.622.163.435	928.831.511	0 Bulan	1.874.597.201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
3	01	02	2.02	01		Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah waktu pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang disediakan	24 bulan	10.062.635.830	11 Bulan	2.848.074.763	12 Bulan	3.326.463.435	Bulan	680.831.511	0 Bulan	1.357.397.201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
3	01	02	2.02	02		Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah waktu Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran yang disediakan	24 bulan	2.665.110.000	12 Bulan	1.155.850.000	12 Bulan	1.295.700.000	Bulan	248.000.000	0 Bulan	517.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
3	01	02	2.02	05		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun OPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun OPD yang diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
3	01	02	2.03	06		Penyusunan Laporan capaian kinerja dan kinerja realisasi kinerja SKPD	jumlah Laporan capaian kinerja dan kinerja realisasi kinerja SKPD	8 laporan	50.000.000	- 0%	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
3	01	02	2.03	07		Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/ semesteran	Jumlah Laporan Keuangan bulanan/ semesteran	100 persen	18.340.325.346	- 0%	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
3	01	02	2.03	08		Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran	100 persen	18.340.325.346	- 0%	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
3	01	02	2.03	09		Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	100 %	18.340.325.346	- 0%	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
3	26	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
3	01	02	2.05	01		Pengadaan mesin/ kartu absensi	jumlah mesin/ kartu absensi yang disediakan	-	-	- 0%	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
3	01	02	2.05	02		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	3 stel	21.450.000	- 0%	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
3	01	02	2.05	03		Pengadaan pakaian kerja lapangan	jumlah pakaian kerja lapangan	46 -	37.400.000	- 0%	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
3	01	02	2.05	05		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu	37 stel	21.450.000	- 0%	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
3	01	02	2.05	10		Sosialisasi peraturan perundang-undangan	jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	100 orang	60.000.000	- 0%	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
3	01	02	2.05	11		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	jumlah peserta yang mengikuti Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	40 orang	40.000.000	- 0%	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					

Unsur	Kode				Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Penutakhir)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJM Kota Banda Aceh pada Tahun 22- 222 Kependagri 5		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 21		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 22)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 221								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 21		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 21 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD OPD s/d Akhir Tahun 21		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi RPJMD OPD s/d Tahun 22 (%)		OPD Penanggung Jawab	
	Bid. Unsur	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Target	Rp	Kinerja	Rp	Target	Rp	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Kinerja		Kinerja		Kinerja		Kinerja			
													Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		Kinerja
3	26	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Umum	24	Bulan	4.509.994.396	15	0%	835.759.300		453.697.091		35.052.990		0	Bulan	69.283.149		104.336.099		-		940.095.399		65		
3	01	02	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	pembelian Komponen Listrik/Penerangan	30	jenis	23.122.660	11.922.252	23	jenis	11.922.252	2.280.000	1	jenis	5.428.036		7.708.036		65		15.080.036		-		15.080.036		44	
3	01	02	2.06	05	Penyediaan barang otsakan dan pengalangan	jumlah jenis otsak dan pengalangan yang disediakan	14	jenis	34.234.800	2	jenis	2.037.000		12	Bulan	26.128.914	jenis	13.123.450		8	jenis	16.294.506		29.417.956		113		31.454.956		92
3	01	02	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	pembelian bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	24	jenis	12.000.000	-	0%	-		-	Bulan					-	Bulan			-	-	-		-	-	
3	01	02	2.06	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah waktu jasa kebersihan kantor yang disediakan	24	bulan	50.000.000	-	0%	-		-	Bulan					-	Bulan			-	-	-		-	-	
3	01	02	2.06	09	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	pembayaran Undangan Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi	30	laporan	2.062.203.652	29	laporan	394.743.000		12	Bulan	415.645.925	laporan	29	laporan	19.649.500		47.560.607		67.210.107		16		461.953.107		22
3	01	02	2.06	10	Penyediaan alat tulis kantor	jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	100	jenis	69.897.284	-	0%	-		0%							-				-	-	-		-	
3	01	02	2.06	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	pembelian peralatan rumah tangga	14	jenis	40.000.000	-	0%	-		0%							-				-	-	-		-	
3	01	02	2.06	16	Penyediaan bahan logistik kantor	pembelian bahan logistik kantor	24	bulan	20.000.000	-	0%	-		0%							-				-	-	-		-	
3	01	02	2.06	17	Penyediaan makan dan minuman	jumlah porsi makanan dan minuman yang disediakan	13398	porsi	180.900.000	-	0%	-		0%							-				-	-	-		-	
3	01	02	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																									
3	01	02	2.07	02	Pengadaan kendaraan Dinas/ Operasional	jumlah kendaraan operasional yang disediakan	-		-	0%	-		0%																	
3	01	02	2.07	19	Pengadaan mobil jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang disediakan	-		-	0%	-		0%																	
3	01	02	2.07	21	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	jumlah jenis Pengadaan perlengkapan gedung kantor	8	jenis	140.000.000	-	0%	-		0%																
3	01	02	2.07	25	Pengadaan meubeler	jumlah jenis meubeler yang disediakan	6	jenis	100.000.000	-	0%	-		0%																
3	01	02	2.07	28	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor yang dilaksanakan	2	kali	366.000.000	-	0%	-		0%																
3	01	02	2.07	30	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/operasional	jumlah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/operasional	96	kali	156.302.000	76	kali	36.864.300		kali																
3	01	02	2.07	32	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan	32	kali	30.000.000	-	%	-		%																
3	01	02	2.07	34	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	32	kali	39.540.000	-	%	-		%																
3	01	02	2.07	35	Pemeliharaan rutin/berkala meubeler	jumlah Pemeliharaan meubeler yang dilaksanakan	10	kali	40.000.000	-	%	-		%																
3	01	02	2.07	38	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	jumlah rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	1	kali	100.000.000	-	%	-		%																
3	01	02	2.07	39	Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan	jumlah Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan yang dilaksanakan	2	kali	30.000.000	-	%	-		%																
3	01	02	2.07	40	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan Dinas/operasional	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan Dinas/operasional	2	kali	50.000.000	-	%	-		%																
3	26	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					52	%	51.772.750		588.924.847		94.122.194		3	%	139.161.739		233.283.933		40		285.056.683		-		
3	01	02	2.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	persentase pemenuhan benda pos yang disediakan	6	benda pos	10.000.000	-	%	-		%																
3	01	02	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	jumlah waktu jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	24	bulan	249.444.000	11	Bulan	394.743.000		12	Bulan	240.760.000	Bulan	43.059.341		0	Bulan	77.833.265		50		120.892.606		50	515.635.606	207
3	01	02	2.08	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	pembelian Barang Inventaris kantor untuk kelancaran tugas kantor	8	jenis	706.350.000	-	%	-		3	Jenis	57.753.000	%	-		-										
3	26	01	2.03	09	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	-		-	-	%	-		%																
3	26	01	2.03	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Pelayanan umum	-		-	12	bulan	51.772.750		290.411.847		bulan	51.062.853		1	bulan	61.328.474		112.391.327		39		164.164.077		-	
3	26	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					100	%	899.593.800		259.179.000		106.465.468		27.231.000		0	%	38.358.065		65.989.065		-	324.759.065		36	
3	01	02	2.09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan cerangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	jumlah Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	24	Bulan	131.787.600	-	%	-		12	Bulan	65.429.200	%	8.500.000		-		19.077.065		27.577.065		42		27.577.065		21
3	01	02	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	jumlah Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	24	Bulan	767.806.200	13	bulan	259.170.000		12	Bulan	41.036.268	bulan	18.731.000		0	bulan	19.281.000		38.012.000		93		297.182.000		39
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	persentase peningkatan jumlah sarana dan prasarana pariwisata	100	%	11.841.104.881	93	%	14.921.609.900		9.971.867.452		268.336.000		969.330.100		-		1.237.666.100		-		16.159.276.000		136		
3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	jumlah Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	100	%	7.988.266.962	128	0%	14.767.169.900		671.460.100		0%	199.628.000		0	Bulan	671.460.100		871.088.100		-		15.638.258.000		196	
3	02	02	2.01	02	Perencanaan pengembangan daya tarik wisata kabupaten/kota	jumlah Perencanaan pengembangan daya tarik wisata kabupaten/kota	2	keg	4.908.942.800	11	Keg	11.569.288.000		1	Kegiatan	259.424.000	Keg	199.628.000		0	Keg	259.424.000		459.052.000		177		12.028.340.000		245
3	02	02	2.01	03	Pengembangan daya tarik wisata kabupaten/kota	jumlah Pengembangan daya tarik wisata kabupaten/kota	2	keg	3.089.324.162	16	bulan	3.197.881.900		1	Kegiatan	412.036.100	bulan	0	bulan	412.036.100		412.036.100		100		3.609.918.000		117		
3	26	02	2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	jumlah Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	24	Bulan	1.025.000.000	-	bulan	113.256.000		385.996.000		bulan	30.008.000		1	bulan	61.720.000		91.728.000		-		204.984.000		20	
3	26	02	2.02	02	Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota	jumlah Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota	24	Bulan	200.000.000	16	Bulan	113.256.000		-	Bulan															
3	02	02	2.02	03	Pengembangan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota	jumlah Pengembangan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota	24	Bulan	825.000.000	-	0%	-		0%																
3	02	02	2.02	04	Pengadaan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota	jumlah Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota						200.000.000		0%																
3	02	02	2.02	06	Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota	jumlah pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota								12	Bulan	185.998.000		0%	30.008.000		-	Bulan	61.720.000		91.728.000		49		91.728.000	
3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	jumlah Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	24	Bulan	2.375.000.000	-	bulan	41.184.000		8.914.409.352		bulan	38.700.000		6	bulan	236.150.000		274.850.000		-		316.034.000		13	
3	02	02	2.03	01	Penetapan Destinasi pariwisata kabupaten/kota	jumlah Penetapan Destinasi pariwisata kabupaten/kota	2	keg	145.000.000	-	0%	-		0%																
3	26	02	2.03	02	Perencanaan Destinasi pariwisata kabupaten/kota	jumlah Perencanaan Destinasi pariwisata kabupaten/kota	2	keg	1.000.000.000	-	0%	-		0%																
3	02	02	2.03	03	Pengembangan destinasi kabupaten/kota	jumlah Pengembangan destinasi kabupaten/kota	2	keg	1.000.000.000	-	0%	-		1	Kegiatan	8.312.663.000		0%												
3	02	02	2.03	04	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota	jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota	24	Bulan	80.000.000	-	0%	-		12	Bulan	397.246.352		0%												

Unsur	Kode	Bid. Unsur	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Pemutakhiran)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJM Kota Banda Aceh pada Tahun 22-222 Keperdagang 5		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 221		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 221				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 221		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKM OPD sid Akhir Tahun 221 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD OPD sid Akhir Tahun 221		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi RPJMD OPD sid Tahun 222 (%)		OPD Penanggung Jawab						
								Target	Rp	Kinerja	Rp	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
												Target	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp											
3	02	02	2.03	05		Monitoring dan evaluasi pengelolaan destinasi pariwisata kab/kota	jumlah Monitoring dan evaluasi pengelolaan destinasi pariwisata kab/kota	24 Bulan	100.000.000	6 bulan	41.184.000	12 Bulan	204.500.000	bulan	38.700.000	1 bulan	56.700.000			95.400.000	-	47	136.584.000	137						
3	02	02	2.03	06		Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata kab/kota	jumlah Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata kab/kota	24 Bulan	100.000.000	- 0%	-			0%		Bulan				-	-	-	-	-	-					
3	26	02	2.04			Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	jumlah Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	2 keg	442.837.919	- 0%	-			0%		Bulan				-	-	-	-	-	-					
3	02	02	2.04	01		Penyediaan layanan pendaftran usaha pariwisata kab/kota	sub. Pendaftaran layanan pendaftran usaha pariwisata kab/kota	24 Bulan	82.837.919	- 0%	-			0%		Bulan				-	-	-	-	-	-					
3	02	02	2.04	02		Penerbitan tanda daftar usaha pariwisata kab/kota	jumlah Penerbitan tanda daftar usaha pariwisata kab/kota	2 keg	110.000.000	- 0%	-			0%		Bulan				-	-	-	-	-	-					
3	02	02	2.04	03		Pengelolaan investasi pariwisata	jumlah Pengelolaan investasi pariwisata	2 keg	250.000.000	- 0%	-			0%		Bulan				-	-	-	-	-	-					
3	26	03				PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	persentase peningkatan kualitas dan kuantitas promosi wisata kota banda aceh	100 %	5.200.000.000	92 %	1.124.581.500	1.821.127.420		77.288.750			300.488.750			-	-	-	377.777.500		1.502.359.000	29				
3	26	03	2.01			Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	jumlah Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	100 %	5.200.000.000	58 0%	1.124.581.500	1.821.127.420		0%		0 Bulan		300.488.750			-	-	-	1.502.359.000	29					
3	03	03	2.01	01		Penggiatan promosi melalui media cetak elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri	jumlah Penggiatan promosi melalui media cetak elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri	24 Bulan	2.000.000.000	19 Bulan	1.122.866.500	1.526.638.980	Bulan	61.000.000	0 Bulan		275.200.000			-	-	22	1.459.066.500	73						
3	03	03	2.01	02		Facilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri bagi industri pariwisata kab/kota	jumlah kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri bagi industri pariwisata kab/kota	12 event	1.600.000.000	9 Bulan	1.715.000	40.972.800	Bulan	15.000.000	9 Bulan		15.000.000			-	-	73	31.715.000	2						
3	03	03	2.01	03		Penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata provinsi, baik dalam dan luar negeri	jumlah data dan penyebaran informasi pariwisata provinsi, baik dalam dan luar negeri	24 Bulan	600.000.000	- 0%	-	12 Bulan	22.750.000	0%		- Bulan				-	-	-	-	-	-					
3	03	03	2.01	04		Peningkatan kerjasama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri	jumlah Peningkatan kerjasama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri	2 keg	1.000.000.000	- 0%	-	1 Kegiatan	230.764.640	0%	1.288.750	- Bulan		10.288.750			-	-	5	11.577.500	1					
3	26	04				PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	persentase PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	100 %	275.000.000	- %	-	51.717.579		-						-	-	-	-	-	-					
3	26	04	2.01			Penyediaan Prasarana (Zona kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) Sebagai Ruang Berekreasi, Berpromosi dan Berinteraksi Bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	meningkatkan Prasarana (Zona kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) Sebagai Ruang Berekreasi, Berpromosi dan Berinteraksi Bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	6 kali	275.000.000	- 0%	-	51.717.579	0%		Bulan					-	-	-	-	-	-					
3	04	04	2.01	01		Pengembangan dan revitalisasi prasarana kota kreatif	jumlah Pengembangan dan revitalisasi prasarana kota kreatif	2 keg	275.000.000	- 0%	-	1 Kegiatan	51.717.579	0%		Bulan				-	-	-	-	-	-	-				
3	26	05				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	persentase terlaksananya kerjasama dengan pelaku usaha jasa pariwisata	100 %	2.565.000.000	15 %	47.990.000	601.015.106		4.995.000			23.070.000			-	-	-	28.065.000		76.055.000	3				
3	26	05	2.01			Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	meningkatkan seni budaya daerah	100 %	2.565.000.000	22 0%	47.990.000	601.015.106	0%	4.995.000	0 Bulan		23.070.000			-	-	-	28.065.000		76.055.000	3				
3	26	05	2.01	01		Pengembangan kompetensi sdm pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar	jumlah kerjasama Pengembangan kompetensi sdm pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar	2 kali	415.000.000	- 0%	-	1 Kegiatan	196.645.106	0%		- Bulan				-	-	-	-	-	-					
3	26	05	2.01	02		Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	jumlah pemberian dukungan kemitraan dan bantuan kepada pihak ke tiga masyarakat	94 kali	500.000.000	- 0%	-	47 Kali	152.200.000	0%		- Bulan				-	-	-	-	-	-					
3	26	05	2.01	03		Pelatihan dasar sdm kepariwisataan bagi masyarakat,uru dan pelajar (mahasiswa dan siswa)	jumlah pelatihan dasar sdm kepariwisataan bagi masyarakat,uru dan pelajar (mahasiswa dan siswa)	1000 orang	400.000.000	- 0%	-			0%		- Bulan				-	-	-	-	-	-					
3	26	05	2.01	04		Sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata	jumlah Sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata	2 kali	250.000.000	- 0%	-			0%		- Bulan				-	-	-	-	-	-					
3	26	05	2.01	05		Facilitasi proses kreasi ,produksi, distribusi konsumsi dan konservasi ekonomi kreatif	jumlah fasilitasi proses kreasi ,produksi, distribusi konsumsi dan konservasi ekonomi kreatif	24 Bulan	500.000.000	7 Bulan	4.275.000	154.995.000	Bulan	4.995.000	1 Bulan		4.995.000			-	-	6	14.265.000	3						
3	26	05	2.01	06		Facilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif	jumlah peserta kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif	24 Bulan	500.000.000	9 Bulan	43.715.000	97.175.000	Bulan		0 Bulan		18.075.000			-	-	19	61.790.000	12						
									- 0%	-			0%		Bulan				-	-	-	-	-	-						
9						UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN			88.422.973.147	0	0	39.707.336.322								-	-	-	39.707.336.322	45						
9	01					KEKHUSUSAN ACEH			88.422.973.147	0	0	39.707.336.322								-	-	-	39.707.336.322	45						
9	01					DINAS SYARIAH ISLAM			28.621.130.281	-	0	8.639.155.500	23.374.504.998	2.158.851.291			4.158.481.918			2.158.851.291			10.798.006.791	38	DSI					
9	01	01				Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	100 %	10.824.180.728	98 %	3.591.242.850	4.037.019.722		874.113.091			1.758.829.888			-	-	-	2.632.942.979		6.224.185.829	58				
9	01	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi OPD yang terbit	100 %	22.348.200	40 0%	-	11.765.000	0%		Bulan					-	-	-	-	-	-					
9	01	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	10 Dokumen	22.348.200	2 dokumen	4.166.500		5 Dokumen	11.765.000			dokumen			-	-	-	-	4.166.500	19					
9	01	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan administrasi keuangan	100 %	9.636.655.795	100 %	3.097.925.581	3.334.020.138	%	804.483.530	1 %		1.653.207.080			-	-	-	2.457.700.610		5.555.626.191	58				
9	01	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Waktu Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN yang disediakan	24 Bulan	9.509.794.979	12 Bulan	2.903.445.581	3.086.040.138	Bulan	755.843.530	1 Bulan		1.549.582.080			-	-	75	5.208.871.191	55						
9	01	01	2.02	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Waktu Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkariban yang disediakan	24 Bulan	126.860.816	12 Bulan	194.480.000	247.980.000	Bulan	48.650.000	1 Bulan		103.625.000			-	-	61	346.755.000	273						
9	01	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	34.383.721	- 0%	-		0%		- Bulan					-	-	-	-	-	-					
9	01	01	2.05	02		Pengadaan Pakelan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakelan Dinas Beserta Perlengkapannya yang disediakan	66 Swl	34.383.721	- 0%	-				- Bulan					-	-	-	-	-	-					

Kode	Unsur	Bid. Unsur	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Pemutakhiran)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJM Kota Banda Aceh pada Tahun 22- 222 Kepmendagri 5		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 21		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 22)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 221								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 21		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 21 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD OPD sid Akhir Tahun 21		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi RPJMD OPD sid Tahun 22 (%)		OPD Penanggung Jawab				
								Target	Rp	Kinerja	Rp	Target	Rp	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
														Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp													
9	01	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	288.161.670	- %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
9	01	01	2.05	02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang disediakan	192 stel	288.161.670	- stel	-	stel	- stel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
9	01	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi umum	100 %	578.933.000	67 %	30.133.350	108.347.334	%	13.004.672	2 %	60.755.066	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18			
9	01	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	15 Jenis	21.263.591	3 jenis	1.594.000	3 jenis	2.146.914	jenis	1.053.346	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12			
9	01	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	25 Jenis	235.456.951	5 jenis	-	5 Jenis	46.016.300	jenis	46.016.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20			
9	01	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Pencetakan	Jumlah jenis Barang Cetak dan Pencetakan yang disediakan	40 Jenis	45.930.025	8 jenis	11.730.950	8 Jenis	4.384.120	jenis	1.499.072	0 jenis	2.179.820	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34		
9	01	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat/Konferensi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	25 Laporan	276.281.563	4 Laporan	16.808.400	5 laporan	55.800.000	Laporan	11.505.600	1 Laporan	11.505.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14		
9	01	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	16.500.000	100 %	-	-	%	-	- %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
9	01	01	2.07	01		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	1 Unit	15.000.000	- unit	-	-	unit	- unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
9	01	01	2.07	10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	60 Unit	1.500.000	- unit	-	-	unit	- unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
9	01	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	469.734.618	56 %	60.245.785	68.339.968	%	8.135.801	0 %	17.442.631	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18		
9	01	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	150 Bulan	4.144.221	- Bulan	-	-	Bulan	- Bulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
9	01	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	60 Bulan	240.827.661	9 Bulan	20.663.785	12 Bulan	26.086.000	Bulan	5.686.866	1 Bulan	10.807.170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15		
9	01	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	60 Bulan	224.762.736	11 Bulan	39.582.000	12 Bulan	42.253.968	Bulan	2.448.935	0 Bulan	6.634.861	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22		
9	01	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	207.943.527	124 %	143.888.315	34.246.839	%	3.696.000	0 %	19.192.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80		
9	01	01	2.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Pemeliharaan dan Pembayaran Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	240 Unit	150.659.352	73 unit	34.397.500	48 Unit	26.968.200	unit	3.696.000	1 unit	17.422.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37		
9	01	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhab	58 Unit	27.423.155	1 unit	99.834.815	-	unit	- unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	364			
9	01	01	2.09	10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhab	86 Unit	29.861.020	34 unit	9.656.000	1 unit	7.278.639	unit	0 unit	1.770.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38			
9	01	03				PROGRAM MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) ACEH	PERSENTASE MENINGKATNYA KAPASITAS DAN PERAN ULAMA	100 %	2.209.210.846	7 %	26.621.800	382.420.273	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1			
9	01	03	1.01			Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama dalam menghasilkan sumber daya ulama yang berkualitas	Persentase meningkatnya peran serta ulama dalam menghasilkan sumber daya ulama yang berkualitas	100 %	1.869.362.419	12 %	-	346.425.992	%	-	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
9	01	03	1.01	03		Pendidikan Kader Ulama	Jumlah Peserta Kader Ulama yang Mendapatkan Pendidikan	200 orang	602.363.430	- orang	-	40 Orang	192.232.832	orang	- orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
9	01	03	1.01	04		Rapat Koordinasi Permusyawaratan Ulama	Jumlah rumusan/rekomendasi yang dihasilkan	118 orang	178.812.500	- orang	-	-	orang	- orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9	01	03	1.01	05		Mutakarah Masalah Keagamaan	Jumlah rumusan/rekomendasi yang dihasilkan	5 rumusan	87.805.119	- rumusan	-	1 rumusan	17.267.229	rumusan	- rumusan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9	01	03	1.01	06		Pengajian Aliran Sempalan	Jumlah penelitian yang dilaksanakan	5 Penelitian	254.002.769	- penelitian	-	1 Penelitian	32.750.708	penelitian	- penelitian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9	01	03	1.01	09		Penerbitan Media Majelis Permusyawaratan Ulama	Jumlah edisi buku panduan yang diterbitkan	10 Edisi	131.165.998	- edisi	-	2 Edisi	22.163.150	edisi	- edisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9	01	03	1.01	10		Nadwah/Mubahasah Ilmiah	Jumlah rumusan yang dihasilkan terhadap pemecahan masalah	5 rumusan	71.891.835	- rumusan	-	1 rumusan	7.946.386	rumusan	- rumusan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9	01	03	1.01	11		Sosialisasi Ifta dan hukum Islam	Jumlah peserta sosialisasi ifta dan hukum Islam	100 Orang	118.812.500	- orang	-	25 Orang	21.074.879	orang	- orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9	01	03	1.01	13		Kajian Pedoman Keagamaan	Jumlah kajian yang dilaksanakan	220 Kali	424.418.268	44 kali	22.434.000	44 Kali	52.990.808	kali	- kali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5			
9	01	03	1.02			Silaturahmi Ulama-Ulama	Persentase meningkatnya peran serta Ulama dalam menghasilkan Sumber Daya Ulama yang berkualitas	100 %	339.848.427	96 %	26.621.800	35.994.281	%	-	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8		
9	01	03	1.02	01		Lokakarya Ulama Ulama Bidang Muamalah	Jumlah lokakarya yang dilaksanakan	5 Kegiatan	167.713.959	1 kegiatan	12.820.500	1 Kegiatan	10.452.580	kegiatan	- kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8			
9	01	03	1.02	02		Ekstensi Peran Ulama dalam Pembangunan Daerah	Jumlah rumusan/rekomendasi yang dihasilkan	5 rumusan	172.134.468	1 rumusan	13.801.300	1 Rumusan	16.541.701	rumusan	- rumusan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8			
9	01					SEKRETARIAT MAA		5.632.768.029	0	2.425.992.482	2.378.055.005	531.592.106	1.161.892.602	531.592.106	1.161.892.602	1.693.484.708	2.957.584.588	53	MAA															
2	22	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	PERSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN DAERAH PERANGKAT DAERAH	100 %	5.272.392.847	103 %	2.347.242.482	2.215.144.032	531.592.106	1.161.892.602	1.693.484.708	4.040.727.190	77																	
9	01	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	100 %	10.000.000	- %	-	9.047.270	%	-	- %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
9	01	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	5 Dokumen	10.000.000	-	-	5 Dokumen	9.047.270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2	22	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Administrasi Umum	100 %	4.392.278.287	102 %	1.937.456.511	2.043.725.152	%	520.956.750	1 %	1.100.955.437	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81			
2	22	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Waktu Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN yang Disediakan	24 Bulan	3.550.694.752	12 Bulan	1.126.270.511	12 Bulan	1.170.425.152	Bulan	307.406.750	1 Bulan	669.080.437	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59			
2	22	01	2.02	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Waktu Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Telnis Perkantoran yang Disediakan	24 Bulan	841.583.535	12 Bulan	811.180.000	12 Bulan	873.300.000	Bulan	213.550.000	1 Bulan	431.875.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	173			
2	22	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Administrasi Umum	100 %	182.302.064	66 %	38.132.176	51.418.862	%	-	1 %	27.956.170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36			
2	22	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik dan bangunan kantor yang disediakan	22 jenis	8.824.726	12 jenis	3.564.803	11 jenis	1.575.879	jenis	- jenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40			
2	22	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6 jenis	34.637.293	- jenis	-	3 Jenis	15.000.000	jenis	- jenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43			

Kode				Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Pemutakhiran)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJM Kota Banda Aceh pada Tahun 22- 222 Kepmendagri 5		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 21		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 22)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 221				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 221		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 221 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD OPD sid Akhir Tahun 21		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi RPJMD OPD sid Tahun 22 (%)		OPD Penanggung Jawab			
Usman	Bd.Usman	Program	Kegiatan			Sub Kegiatan	Target	Rp	Kinerja	Rp	Target	Rp	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		11=7+8+9+1		12=11/100		13=5+11		14=12x100		15
													Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	48 Unit	37.066.050	37 Unit	15.071.800	24 kali	9.754.561	Unit		0 Unit	3.600.000					3.600.000	-	37		18.671.800		50			
1	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Kali	2.152.500	- Kali	-	1 Unit	299.376.953	Kali	99.445.858	- Kali	199.376.953					298.822.811	-	100		298.822.811		13.883			
1	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24 Bulan	7.712.676	12 unit	3.248.200	76 kali	3.213.538	unit		1 unit	2.419.003				2.419.003	-	75		5.667.203		73				
1	01				Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan																						#DIV/0!		
1	01	08			PROGRAM PENYELENGGARA SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN ACEH	100 %	624.806.536	19 %	13.054.000	445.271.277	-	-	-	-	199.988.000				199.988.000					213.042.000		34	Pendidikan		
1	01	08	2.01		Penyelenggaraan Kebijakan Pendidikan di bidang pendidikan yang di hasilkan	100 %	86.696.354	- %	-	-	-	%	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	Pendidikan		
1	01	08	2.01	01	Penetapan Standar Pendidikan Aceh	2 Laporan	86.696.354	- Laporan	-	-	-	Laporan	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	Pendidikan		
1	01	08	2.03		Penyelenggaraan Kurikulum dan Pengajaran Pendidikan Aceh	100 %	57.594.211	100 %	6.527.000	2.323.713	-	%	-	-	-					-	-	-	-	6.527.000		11	Pendidikan		
1	01	08	2.03	02	Pengawasan Kurikulum/Pendidikan Agama pada Sekolah Umum dan Madrasah	2 Laporan	57.594.211	1 Laporan	6.527.000	1 Laporan	2.323.713	Laporan	-	-	-					-	-	-	-	6.527.000		11	Pendidikan		
1	01	08	2.05		Penyelenggaraan Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh	100 %	168.109.703	- %	-	442.947.564	-	%	-	-	199.988.000				199.988.000	-	-	-	-	199.988.000		119	Pendidikan		
1	01	08	2.05	02	Supervisi dan Fasilitas Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh	2 kali	89.005.328	-	-	442.947.564	0%	-	-	-	Bulan	199.988.000			199.988.000	-	45		199.988.000		225	Pendidikan			
1	01	08	2.05	03	Evaluasi Pencapaian Standar Pendidikan Aceh pada setiap Satuan Pendidikan di Aceh	2 Laporan	79.104.375	- Laporan	-	-	-	Laporan	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	Pendidikan		
9	01				SEKRETARIAT BAITUL MAL		48.396.059.935	0	14.621.868.821	24.727.777.776	-	741.108.820	-	6.357.964.944					741.108.820					14.762.977.641		31	Baitul Mal		
9	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	100 %	9.587.922.152	99 %	2.343.942.321	2.656.047.776	-	568.598.820	-	1.251.435.522					1.820.034.342					4.163.976.663		43			
9	01	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	10.500.000	- Dokumen	2.617.000	3.446.629	-	Dokumen	-	-	-					-	-	-	-	2.617.000		25			
9	01	01	2.01	01	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10.500.000	- Dokumen	2.617.000	5 Dokumen	3.446.629	Dokumen	-	-	-					-	-	-	-	2.617.000		25			
9	01	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	8.730.837.129	- 0%	2.240.868.131	2.327.769.545	0%	599.598.820	1 Bulan	1.187.406.885					1.747.065.705	-	-	-	-	3.987.874.836		46			
9	01	01	2.02	01	Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	24 Bulan	3.560.390.783	12 bulan	1.048.819.131	12 Bulan	1.059.069.545	bulan	277.298.820	1 bulan	586.531.885				863.830.705	-	82		1.912.649.836		54				
9	01	01	2.02	02	Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24 Bulan	1.990.390.270	12 bulan	1.192.050.000	12 Bulan	1.268.700.000	bulan	282.300.000	1 bulan	600.875.000				883.175.000	-	70		2.075.225.000		104				
9	01	01	2.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	51.700.000	- 0%	-	-	0%	-	Bulan	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-			
9	01	01	2.05	02	kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang disediakan	94 stel/org	51.700.000	- stel	-	-	steel	-	-	steel				-	-	-	-	-	-	-	-			
9	01	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	341.760.858	39 0%	24.977.200	8.511.063	0%	-	0 Bulan	1.729.402					1.729.402	-	20		26.706.602		8				
9	01	01	2.06	01	kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	24 Bulan	1.373.094	- bulan	-	-	-	bulan	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-			
9	01	01	2.06	02	kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24 Bulan	31.681.089	9 bulan	3.109.000	12 Bulan	2.201.238	bulan	-	-	-					-	-	-	-	3.109.000		10			
9	01	01	2.06	04	kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah porsi makanan yang disediakan	8596 Porsi	56.337.409	8 bulan	8.081.000	-	bulan	-	-	-					-	-	-	-	8.081.000		14			
9	01	01	2.06	05	kegiatan barang cetak dan pengadaan yang disediakan	Jumlah jenis cetak dan pengadaan yang disediakan	24 Bulan	53.026.241	6 bulan	8.787.200	12 Bulan	6.309.825	bulan	0 bulan	1.729.402				1.729.402	-	27		10.516.602		20				
9	01	01	2.06	09	kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	10 Laporan	199.343.025	- laporan	5.000.000	-	laporan	-	-	laporan				-	-	-	-	-	5.000.000		3			
9	01	01	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	160.000.000	- 0%	-	-	0%	-	Bulan	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-			
9	01	01	2.07	02	kegiatan Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang disediakan	2 Unit	160.000.000	- unit	-	-	unit	-	-	unit				-	-	-	-	-	-	-	-			
9	01	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	142.485.909	89 0%	31.068.590	49.990.539	0%	9.000.000	1 Bulan	24.066.735					33.806.735	-	-	-	-	64.875.325		46			
9	01	01	2.08	02	kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	24 Bulan	97.493.690	13 bulan	24.820.590	12 Bulan	41.540.135	bulan	9.000.000	1 bulan	20.524.507				29.524.507	-	71		54.345.097		56			
9	01	01	2.08	04	kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	24 Bulan	44.992.219	9 bulan	6.248.000	12 Bulan	8.450.404	bulan	1 bulan	4.282.228				4.282.228	-	51		10.530.228		23				
9	01	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	150.638.256	32 0%	44.410.400	266.328.000	0%	-	1 Bulan	37.492.500					37.492.500	-	-	-	-	81.902.900		54			
9	01	01	2.09	01	kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Pemeliharaan dan Pembayaran Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	96 unit	108.921.029	46 unit	44.410.400	48 Kali	121.272.000	unit		1 unit	37.492.500			37.492.500	-	31		81.902.900		75				
9	01	01	2.09	07	kegiatan pemeliharaan Aset tetap lainnya yang dipelihara	Jumlah pemeliharaan Gedung kantor yang dipelihara	56 kali	14.047.703	- kali	-	-	kali			kali				-	-	-	-	-	-	-	-			



Berdasarkan Tabel 2.154 di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja OPD Tahun 2022 Triwulan I sebahagian besar telah memenuhi target kinerja yang ditetapkan. Namun demikian, masih terdapat beberapa OPD yang belum dapat mencapai target capaian kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa kegiatan yang belum dapat dilaksanakan karena dampak *Refocussing* anggaran untuk penanggulangan pandemi *Covid-19* dan juga disebabkan oleh adanya pelaksanaan kegiatan yang tertunda karena adanya pergeseran anggaran.

Permasalahan yang muncul akibat dampak pandemi *Covid-19* di Kota Banda Aceh dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Berkurangnya anggaran untuk program dan kegiatan prioritas Tahun 2023 akibat pergeseran anggaran Tahun 2021-2022 sebagai dampak pandemi *Covid-19*.
2. Berkurangnya penerimaan Kota Banda Aceh yang bersumber dari APBN pada tahun berjalan 2022 akibat pandemi *Covid-19* secara nasional.
3. Berkurangnya penerimaan Kota Banda Aceh yang bersumber dari APBA pada tahun berjalan 2022 akibat pandemi *Covid-19* di Provinsi Aceh.
4. Berkurangnya penerimaan Kota Banda Aceh yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun berjalan 2022 akibat pandemi *Covid-19* di Kota Banda Aceh.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh akibat dampak negatif pandemi *Covid-19* ini adalah:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber penerimaan PAD dan sumber pendapatan lainnya.
2. Optimalisasi dan efisiensi penggunaan anggaran belanja daerah tahun berjalan untuk program dan kegiatan prioritas.
3. Menindaklanjuti dan mengutamakan program dan kegiatan prioritas yang tertunda dan belum tuntas akibat *Covid-19*.
4. Memprioritaskan program dan kegiatan strategis kesehatan;
5. Memprioritaskan program dan kegiatan strategis pendidikan;
6. Memprioritaskan program dan kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil dan menengah;
7. Memprioritaskan program dan kegiatan masalah sosial kemasyarakatan.

2.3 Permasalahan Pembangunan

Kota Banda Aceh sebagai Ibukota Provinsi Aceh yang sedang membangun, dihadapkan kepada permasalahan diberbagai bidang khususnya di bidang pembangunan baik sarana maupun prasarana. Permasalahan pembangunan yang dihadapi pada tahun pertama RPD Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026, merupakan *Gap Expectation* antara kinerja pembangunan yang dicapai dengan yang direncanakan sebagaimana yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan. Permasalahan ini muncul dari kekuatan (*strengths*) Kota Banda Aceh yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan (*weaknesses*) yang belum dapat diatasi, peluang (*opportunities*) yang belum dimanfaatkan secara maksimal, dan ancaman (*threats*) yang belum dapat diantisipasi dan juga belum bisa dijadikan sebagai peluang.

Di samping itu, permasalahan dan tantangan yang dihadapi menjadi penting untuk diperhatikan dan dianalisis agar di pembangunan periode selanjutnya hal yang menjadi kesenjangan antara kinerja pembangunan dengan rencana dapat ditutupi. Secara umum, yang menjadi masalah dan tantangan dalam pembangunan tercipta dari ketidakmampuan dan pemahaman dalam memaksimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang/kesempatan, dan meminimalisir ancaman. Sumber daya yang dimiliki sebagai kekuatan dan peluang yang dapat





mendorong pembangunan belum dimanfaatkan secara optimal sehingga kelemahan dan ancaman yang dapat mengganggu pembangunan yang sudah direncanakan dapat dicegah dan diminimalisirkan efeknya.

2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Permasalahan Kota Banda Aceh yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun pertama RPD Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 akan menjadi target kinerja yang akan diselesaikan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh pada tahun berjalan. Adapun permasalahan daerah yang berhubungan prioritas dan sasaran pembangunan Pemerintah Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Tabel 2.155 sebagai berikut:

Tabel 2. 155 Permasalahan Pembangunan Kota Banda Aceh Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan

No	Permasalahan	Prioritas	Sasaran
1	Belum Optimalnya Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam	Optimalisasi Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam	Optimalnya Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam
2	Belum Optimalnya Partisipasi Publik dalam Pemilu, Pilkada, dan Pilchikung	Peningkatan Kualitas Demokrasi dan Ketenteraman Umum	Meningkatnya Kualitas Demokrasi dan Ketenteraman Umum
3	Adanya Potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan terhadap Ketenteraman Umum		
4	Belum Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah	Optimalisasi Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah	Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah
5	Belum Optimalnya Optimalisasi Peningkatan Kualitas Pendidikan	Optimalisasi Kualitas Pendidikan	Optimalnya Kualitas Pendidikan
6	Belum Optimalnya Optimalisasi Peningkatan Kualitas Kesehatan	Optimalisasi Kualitas Kesehatan	Optimalnya Kualitas Kesehatan
7	Berfluktuasinya Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Peningkatan Penguatan Ekonomi dan Sosial	Meningkatnya Penguatan Ekonomi dan Sosial
8	Belum Optimalnya Pelayanan dan Penanganan Sosial		
9	Penurunan kunjungan wisatawan akibat pandemi	Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisata	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata
10	Belum Optimalnya Pelestarian Budaya	Optimalisasi Upaya Pelestarian Budaya	Optimalnya Upaya Pelestarian Budaya
11	Belum optimalnya akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman	Peningkatan Pengembangan Infrastruktur dan Tertatanya Kawasan Permukiman	Meningkatnya Pengembangan Infrastruktur dan Tertatanya Kawasan Permukiman
12	Belum Optimalnya Penanganan Kerusakan Jalan		
13	Masih Terjadinya Kemacetan Lalu Lintas		
14	Belum Optimalnya Penataan Kawasan Permukiman		
15	Adanya Kawasan Banjir Genangan		
16	Belum Optimalnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Optimalisasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Optimalnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
17	Menurunnya Kualitas Lingkungan Hidup		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, Tata





18	Terbatasnya Lahan RTH Perkotaan	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Tata Kelola RTH, dan Mitigasi Bencana	Kelola RTH, dan Mitigasi Bencana
19	Belum Optimalnya Pengelolaan Kawasan RTH		
20	Belum optimalnya penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)		
21	Belum optimalnya pengelolaan Mitigasi Bencana		
22	Belum Optimalnya Pembedayaan Pemuda dan Pembinaan Olahraga	Optimalisasi Pembedayaan Pemuda dan Pembinaan Olahraga	Optimalnya Pembedayaan Pemuda dan Pembinaan Olahraga
23	Menurunnya Sumber Dana OTSUS Aceh, DOKA Kabupaten/Kota, dan Realisasi PAD Akibat Pandemi	Peningkatan Sumber Pendapatan Daerah	Meningkatnya Sumber Pendapatan Daerah

Sumber : RPD Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan pembangunan Kota Banda Aceh pada bagian ini mengidentifikasi permasalahan pembangunan berdasarkan urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/ fungsi untuk masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintah Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

- 1) Belum optimalnya optimalisasi peningkatan kualitas pendidikan;
- 2) Belum optimalnya optimalisasi prasarana dan sarana pendidikan;
- 3) Belum optimalnya kualitas dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan;
- 4) Belum optimalnya sistim pendidikan berbasis Islami dari jenjang PAUD sampai dengan SMP;
- 5) Belum optimalnya upaya peningkatan kualitas pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP);
- 6) Kecenderungan berkurangnya jumlah guru PNS.

2. Kesehatan

- 1) Belum optimalnya optimalisasi peningkatan kualitas dan pelayanan kesehatan;
- 2) Belum optimalnya optimalisasi sarana dan prasarana kesehatan;
- 3) Belum optimalnya penanganan terhadap prevalensi gizi kurang pada balita;
- 4) Masih adanya stunting;
- 5) Belum optimalnya tenaga medis dan spesialis;

3. Pekerjaan Umum

A. Penyediaan Air Bersih

- 1) Belum optimalnya akses air minum dan sanitasi layak dan aman;
- 2) Terbatasnya sumber air baku yang sampai saat ini hanya memanfaatkan sumber air baku dari Sungai Krueng Aceh;
- 3) Meningkatnya permintaan akan pelayanan air minum masyarakat Kota Banda Aceh yang semakin tinggi.





B. Drainase

- 1) Belum optimalnya koordinasi pihak terkait dalam pembangunan sarana dan prasarana masyarakat;
- 2) Masih adanya kawasan banjir genangan;
- 3) Belum optimalnya pembangunan drainase baru ke wilayah-wilayah yang muncul permukiman-permukiman baru;
- 4) Belum optimalnya pemeliharaan dan peningkatan drainase;
- 5) Masih adanya saluran drainase yang belum terkoneksi dengan sistem drainase primer kota.

C. Pemeliharaan Jalan Kota

- 1) Belum optimalnya penanganan kerusakan jalan;
- 2) Masih terbatasnya peningkatan jalan;
- 3) Belum optimalnya penanganan genangan air di atas badan jalan;
- 4) Masih adanya kendaraan yang bertonase tinggi yang menggunakan fasilitas jalan.

D. Permasalahan Tata Ruang

- 1) Terbatasnya lahan RTH perkotaan;
- 2) Belum optimalnya pengelolaan kawasan RTH;
- 3) Terbatasnya alokasi ruang kota untuk intensitas pembangunan;
- 4) Belum optimalnya pemberdayaan lahan-lahan yang telah terbangun untuk mendukung berbagai investasi pembangunan dan penguatan ekonomi perkotaan;
- 5) Belum optimalnya pemanfaatan kawasan RTH perkotaan yang berdampak ekonomis bagi masyarakat perkotaan, sehingga masih adanya berbagai tuntutan oleh pihak masyarakat;
- 6) Masih adanya penyimpangan dan pelanggaran aturan tata ruang di lapangan, seperti pelanggaran penataan bangunan, penyimpangan pemanfaatan pada jalur hijau jalan dan area Garis Sempadan Bangunan pada koridor kawasan perdagangan dan jasa (komersil).

4. Perumahan

- 1) Belum optimalnya penataan kawasan permukiman;
- 2) Belum optimalnya fasilitasi penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
- 3) Terbatasnya lahan untuk pembangunan perumahan;
- 4) Belum optimalnya penanganan rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- 5) Meningkatnya pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang tidak diimbangi dengan penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas umum (PSU) yang memadai.

5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- 1) Adanya potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan terhadap ketentraman umum;
- 2) Belum optimalnya jumlah personil Satpol PP dan WH (sesuai amanat Permendagri Nomor 60 Tahun 2012 tentang pedoman penetapan jumlah polisi pamong praja);
- 3) Masih terbatasnya sarana dan prasarana untuk operasional penunjang kegiatan Satpol PP dan WH.





6. Sosial

- 1) Belum optimalnya pelayanan dan penanganan sosial;
- 2) Belum optimalnya prasarana dan sarana sosial kemasyarakatan;
- 3) Masih adanya pengangguran akibat terbatasnya lapangan pekerjaan dan urbanisasi penduduk;
- 4) Belum optimalnya sarana umum yang ramah disabilitas;
- 5) Masih adanya penyandang sosial.

B. Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar

1. Tenaga Kerja

- 1) Masih terbatasnya kesempatan kerja dan keterampilan pencari kerja;
- 2) Masih terbatasnya perlindungan tenaga kerja;
- 3) Masih terdapatnya ketidaksesuaian antara kualifikasi jabatan, lowongan kerja dengan bakat, minat, dan kemampuan pencari kerja;
- 4) Belum optimalnya peranan dan fungsi BLK dalam meningkatkan kualitas sumber daya tenaga kerja.

2. Memperkuat Upaya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- 1) Belum optimalnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 2) Belum optimalnya layanan bagi perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
- 3) Belum optimalnya pelayanan terhadap tindak kekerasan pada perempuan dan anak.

3. Ketahanan Pangan

- 1) Belum optimalnya sarana dan prasarana ketahanan pangan;
- 2) Belum optimalnya pemantauan dan pengawasan bahan pangan secara rutin/ berkala guna mengetahui ketersediaan dan keamanannya;
- 3) Belum optimalnya budidaya tanaman anik (bebas pestisida) oleh masyarakat.

4. Lingkungan Hidup dan Kebencanaan

1.1 Lingkungan Hidup

- 1) Menurunnya kualitas lingkungan hidup;
- 2) Belum optimalnya penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK);
- 3) Belum optimalnya sarana dan prasarana lingkungan hidup;
- 4) Masih rendahnya partisipasi masyarakat dan instansi terkait dalam pengolahan sampah;
- 5) Masih rendahnya partisipasi masyarakat untuk membayar retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan;
- 6) Belum optimalnya Ruang Terbuka Hijau (RTH).

1.2 Mitigasi Bencana

- 1) Belum optimalnya pengelolaan mitigasi bencana;
- 2) Terbatasnya regulasi/Qanun pengurangan resiko bencana;
- 3) Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM untuk mendukung pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;
- 4) Masih rendahnya pemahaman masyarakat dan aparat pemerintahan dalam menyikapi kondisi alam yang rawan bencana;
- 5) Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;





1.3 Pemadam Kebakaran

- 1) Belum optimalnya kualitas dan kuantitas tenaga pemadam kebakaran;
- 2) Belum optimalnya sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
- 3) Terbatasnya regulasi tentang pemadam kebakaran.

5. Pemberdayaan Masyarakat Desa

- 1) Belum optimalnya penguatan dan pengembangan kelembagaan masyarakat dan pemerintahan gampong;
- 2) Belum optimalnya sarana dan prasarana pemberdayaan masyarakat gampong;
- 3) Belum optimalnya pembinaan terhadap pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.

6. Perhubungan

- 1) Masih terjadinya kemacetan lalu lintas;
- 2) Belum seimbangnya pertumbuhan jumlah kendaraan dengan jaringan jalan;
- 3) Masih kurangnya bus dan feeder angkutan untuk melayani semua koridor;
- 4) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mentaati rambu-rambu lalu lintas dan melaksanakan uji berkala bermotor;
- 5) Masih terbatasnya SDM perhubungan;
- 6) Belum profesionalnya sistem pengelolaan parkir;
- 7) Belum terkelolanya sistem angkutan barang.

7. Komunikasi dan Informatika

- 1) Belum optimalnya sarana dan prasarana komunikasi dan informatika;
- 2) Belum tersedianya panduan dan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik (SPBE) dan payung hukum implementasi *Smart City* di level kota;
- 3) Lemahnya koordinasi antar OPD dalam mengembangkan aplikasi yang sesuai SOP, aman, terintegrasi, memiliki tingkat interoperabilitas yang baik dan didukung ketersediaan manual book dan source code yang terdokumentasi dengan baik dan terpusat;
- 4) Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi pembangunan.

8. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

- 1) Belum optimalnya sarana dan prasarana koperasi dan usaha kecil menengah;
- 2) Belum berfungsinya pasar secara optimal dan belum tertibnya PKL;
- 3) Masih terbatasnya sumber daya pedagang dalam penerapan pemasaran secara *online*;
- 4) Lemahnya kualitas sumber daya usaha kecil dan menengah;
- 5) Masih menggunakan teknologi tradisional dalam proses produksi usaha kecil dan menengah.

C. Urusan Pelayanan Pilihan

1. Industri

- 1) Belum optimalnya sarana dan prasarana industri;
- 2) Masih terbatasnya pembinaan industri kecil, usaha kecil menengah;
- 3) Belum tersedianya sentra industri yang dapat menjadi pusat produksi, promosi dan pemasaran produk industri kecil;
- 4) Terbatasnya pasar industri kecil dan menengah;
- 5) Masih rendahnya kualitas produk industri kecil dan menengah;
- 6) Belum optimalnya penggunaan teknologi dalam proses produksi barang industri.





2. Kelautan dan Perikanan

- 1) Terbatasnya prasarana dan sarana perikanan dan kelautan;
- 2) Hasil tangkap masih tergantung kepada musim;
- 3) Masih rendahnya kualitas sumber daya nelayan, perikanan dan kelautan;
- 4) Belum optimalnya penggunaan teknologi dalam penangkapan ikan.

D. Penunjang Urusan

1. Perencanaan Pembangunan

- 1) Belum optimalnya ketersediaan dan keterpaduan data dalam perencanaan;
- 2) Masih terbatasnya tenaga perencana dan fungsional perencana;
- 3) Belum optimalnya sinergisitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
- 4) Belum meratanya kualitas dan kompetensi sumber daya perencana;
- 5) Masih terbatasnya prasarana dan sarana dalam perencanaan.

2. Keuangan

- 1) Menurunnya sumber dana OTSUS Aceh dan DOKA;
- 2) Rendahnya realisasi PAD akibat pandemi;
- 3) Belum optimalnya pengelolaan aset produktif;
- 4) Belum optimalnya intensifikasi ekstensifikasi potensi PAD;
- 5) Tingginya ketergantungan keuangan kepada pemerintah provinsi dan pusat.

3. Pengawasan

- 1) Terbatasnya sumber daya pengawasan;
- 2) Belum meratanya kualitas dan kompetensi sumber daya pengawasan;
- 3) Terbatasnya prasarana dan sarana pengawasan.

E. Otonomi Daerah

1. Otonomi Daerah Pemerintahan Umum, Administrasi, Keuangan Daerah, Kepegawaian

- 1) Terbatasnya sumber daya Otonomi Daerah;
- 2) Belum efisiennya administrasi pemerintahan;
- 3) Belum maksimalnya pengelolaan keuangan daerah;
- 4) Masih rendahnya komitmen dan disiplin kepegawaian.
- 5) Jumlah sumber daya pemeriksa tidak sebanding dengan banyaknya objek pemeriksaan.

2. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

- 1) Belum Optimalnya Partisipasi Publik dalam Pemilu, Pilkada, dan Pilchikung;
- 2) Minimnya jumlah gampong bebas narkoba;
- 3) Belum maksimalnya pendataan, pemantauan dan pembinaan organisasi kemasyarakatan daerah;
- 4) Belum maksimalnya pemantauan terhadap perkembangan politik daerah;
- 5) Belum maksimalnya pemantapan ideologi dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat.

F. Urusan Keistimewaan

1. Syariat Islam

- 1) Belum optimalnya pemahaman dan pengamalan Syariat Islam;
- 2) Belum optimalnya sarana dan prasarana Syariat Islam;
- 3) Masih adanya pelanggaran terhadap Qanun Syariat syiar Islam;
- 4) Masih terbatasnya jumlah masjid yang memenuhi standar kebersihan dan masjid yang ramah disabilitas;





- 5) Belum optimalnya proses rekrutmen peserta MTQ mulai dari tingkat gampong kecamatan dan tingkat kota;
- 6) Belum optimalnya minat masyarakat masuk dayah;
- 7) Belum efektifnya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Syariat Islam.





BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kebijakan pembangunan ekonomi daerah tentunya akan dipengaruhi oleh kondisi perekonomian di tingkat global, nasional dan regional. Perkembangan kondisi perekonomian setiap tahun akan berbeda dengan kondisi perekonomian pada saat rencana pembangunan daerah ditetapkan. Oleh karena itu dibutuhkan penyesuaian prioritas dan fokus pembangunan ekonomi yang lebih fleksibel setiap tahunnya, meskipun arah kebijakan pembangunan ekonominya tetap mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan

Kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah merupakan upaya untuk memberikan gambaran perkembangan ekonomi makro diberbagai level yang akan mempengaruhi penerimaan pendapatan dan belanja daerah. Fakta-fakta kondisi perekonomian pada tahun 2021 dan gambaran kondisi perekonomian tahun 2022 serta proyeksi kondisi perekonomian pada tahun 2023 baik global, nasional dan regional akan menjadi bahan analisis dalam penyusunan anggaran dan pendapatan belanja daerah tahun 2023 yang proporsional, sesuai dengan perkembangan isu-isu pembangunan yang harus diprioritaskan pembiayaannya dan diselaraskan dengan target capaian kinerja yang telah ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2023 – 2026.

3.1.1 Kondisi dan Arah Perekonomian Nasional

Proses pemulihan ekonomi nasional terus berlangsung dengan stabilitas yang tetap terjaga. Proses pemulihan perekonomian domestik pada 2022 akan terus membaik walaupun masih terpengaruh oleh bayang-bayang pandemi Covid-19. Hal ini tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi domestik yang terus membaik pada tahun 2021, dimana tercatat ekonomi domestik pada triwulan II 2021 tumbuh positif dan tinggi sebesar 7,07% (yoy), meningkat tajam dari kontraksi pada triwulan sebelumnya sebesar 0,71%. Merebaknya Covid-19 varian Delta pada triwulan III 2021 menahan proses pemulihan ekonomi Indonesia, sehingga mempengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi yang melambat menjadi 3,51% (yoy). Kinerja ekonomi diperkirakan meningkat pada triwulan IV 2021 didukung oleh mobilitas yang terus meningkat sejalan dengan akselerasi vaksinasi dan meredanya penyebaran Covid-19, pembukaan sektor-sektor ekonomi yang lebih luas, stimulus kebijakan yang berlanjut, dan kinerja ekspor yang tetap kuat. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi 2021 diperkirakan dalam kisaran 3,2-4,0%.

Sementara itu, stabilitas eksternal terjaga tercermin dari peningkatan surplus Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada 2021, didukung oleh surplus transaksi berjalan dan transaksi modal dan finansial. Sejalan dengan kinerja NPI, nilai tukar Rupiah terkendali didukung oleh kebijakan stabilisasi Bank Indonesia. Inflasi tercatat rendah di tengah permintaan domestik yang mulai meningkat, stabilitas nilai tukar yang terjaga, dan konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam mengarahkan ekspektasi inflasi. Stabilitas sistem keuangan tetap baik dengan fungsi intermediasi yang meningkat.

Berdasarkan Laporan Perekonomian Indonesia yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, Perekonomian Indonesia diperkirakan meningkat lebih tinggi pada 2022 dalam kisaran 4,7-5,5%, sejalan dengan membaiknya permintaan domestik, dengan stabilitas eksternal yang tetap terjaga, inflasi yang terkendali, dan stabilitas sistem keuangan yang tetap baik. Konsumsi swasta diperkirakan akan kembali pulih dan





mencapai pertumbuhan sekitar 5% pada semester II 2022, ditopang oleh terkendalinya penyebaran Covid-19 seiring dengan tercapainya imunitas massal, dan berangsur pulihnya mobilitas masyarakat. Kinerja ekspor juga tetap akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dengan masih akan tingginya permintaan dan harga komoditas global. Investasi diperkirakan tumbuh meningkat seiring dengan peningkatan permintaan domestik, tetap kuatnya kinerja ekspor, berlanjutnya proyek-proyek infrastruktur strategis nasional, dan kenaikan Penanaman Modal Asing (PMA) seiring dengan membaiknya iklim investasi di dalam negeri. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi akan didukung sejumlah sektor yang diperkirakan tumbuh kuat, seperti sektor pertambangan, industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian.

Akselerasi pemulihan ekonomi juga dibarengi dengan stabilitas yang tetap terjaga. Stabilitas eksternal pada 2022 diperkirakan tetap terjaga dengan defisit transaksi berjalan yang tetap rendah dan berada pada kisaran 1,1-1,9% dari PDB, dengan surplus neraca transaksi modal dan finansial yang meningkat. Stabilitas nilai tukar Rupiah terjaga ditopang kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang tetap baik, di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang masih berlangsung seiring dengan normalisasi kebijakan moneter di negara maju. Inflasi diperkirakan terkendali dalam kisaran sasaran yaitu $3\pm 1\%$, meskipun meningkat sejalan dengan kenaikan permintaan domestik. Dalam hal ini, inflasi tetap terkendali dengan dukungan kapasitas produksi nasional yang mencukupi untuk mengimbangi kenaikan permintaan agregat, di tengah dampak kenaikan harga energi global yang tetap perlu diwaspadai.

Pertumbuhan Perekonomian Nasional Tahun 2022 secara umum akan terus meningkat, yang terlihat dari proses pemulihan ekonomi nasional yang terus menunjukkan perkembangan positif. Didalam asumsi dasar ekonomi makro APBN 2022 dan target pembangunan tahun 2022, ditetapkan hal sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi nasional berada di level 4,5-5,5 persen;
2. Tingkat inflasi berkisar 3,0 persen;
3. Tingkat kemiskinan berada di angka 8,5% - 9,0 persen;
4. IPM berada di kisaran 73,41 - 73,46;
5. Gini ratio 0,376 - 0,378;
6. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berada di angka 5,5% - 6,3 persen.

3.1.2 Kondisi dan Arah Perekonomian Aceh

Berdasarkan Laporan Perekonomian Provinsi Aceh yang dikeluarkan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, ekonomi Aceh pada triwulan IV 2021 tumbuh sebesar 7,39% (yoy), meningkat cukup tinggi dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 3,01% (yoy). Pada sisi permintaan, peningkatan pertumbuhan didorong oleh konsumsi pemerintah, konsumsi rumah tangga dan ekspor luar negeri. Sementara, pada sisi Lapangan Usaha (LU), perbaikan ekonomi utamanya disumbangkan oleh LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta Konstruksi. Pertumbuhan ekonomi Aceh secara tahunan pada 2021 sebesar 2,79% (yoy) meningkat dibandingkan tahun lalu yang mengalami kontraksi sebesar -0,37% (yoy). Pertumbuhan tersebut didorong oleh konsumsi swasta, pemerintah, dan investasi.

Pertumbuhan ekonomi Aceh tahun 2021 bersumber dari komponen pengeluaran konsumsi pemerintah memberikan sumber pertumbuhan paling tinggi yaitu sebesar 1,33 %. Sumber pertumbuhan tertinggi berikutnya adalah berasal dari komponen ekspor luar negeri yaitu sebesar 1,32 %, dan komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga yaitu sebesar 0,65 %. Komponen Pembentukan Modal Tetap





Bruto (PMTB)/Investasi memberikan sumber pertumbuhan positif yaitu sekitar 0,13 %. Sementara itu komponen pengeluaran konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRM) memberikan sumber pertumbuhan negatif yaitu sebesar 0,08 % dan impor luar negeri sebagai komponen pengurang pada PDRB juga menyumbang sumber pertumbuhan negatif yaitu sekitar 0,05%.

Dari sisi Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi diantaranya transportasi dan pergudangan sebesar 19,51 persen, jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 9,71 persen, informasi dan komunikasi sebesar 7,57 persen. Sebaliknya beberapa lapangan usaha masih mengalami kontraksi dengan kontraksi tertinggi diantaranya penyediaan akomodasi makan dan minum sebesar 6,11 persen dan jasa keuangan sebesar 5,08 persen.

Perkembangan Indeks Harga Konsumen di Aceh pada Desember 2021 mengalami inflasi sebesar 0,71 persen. Secara keseluruhan tingkat inflasi Provinsi Aceh Tahun 2021 sebesar 2,24 persen, lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi tahun 2020 sebesar 3,59 persen.

Sedangkan inflasi bulan Mei Tahun 2022 tercatat sebesar 1,00 persen atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) menjadi 112,61 persen. laju inflasi tersebut dipengaruhi oleh perkembangan harga yang secara umum mengalami kenaikan khususnya selama periode libur Idul Fitri 1443 H. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh, tercatat Aceh mengalami laju inflasi Tahun Kalender 2022 sebesar 3,38 persen. Sedangkan Inflasi dari Tahun ke Tahun (yoy) yaitu periode Mei 2022 terhadap Mei 2021 tercatat sebesar 5,14 persen.

Inflasi yang terjadi di Aceh sampai dengan periode mei tahun 2022 terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 2,23 persen, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,23 persen, kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,05 persen, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,48 persen, kelompok kesehatan sebesar 0,05 persen, kelompok transportasi sebesar 1,20 persen, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,03 persen, kelompok pendidikan sebesar 0,03 persen, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,72 persen, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,56 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang tidak mengalami perubahan, yaitu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan.

Pertumbuhan perekonomian Aceh pada tahun 2022 diperkirakan meningkat dibanding tahun 2021. Kinerja perekonomian Aceh pada tahun 2022 diperkirakan tumbuh 3,42%-4,22% (yoy) atau lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya (2,79%, yoy). Kondisi tersebut utamanya diperkirakan oleh perbaikan konsumsi rumah tangga dan investasi. Lebih lanjut, program vaksinasi massal dan vaksin booster tahap ketiga juga diperkirakan akan mendongkrak aktivitas dan mobilitas masyarakat. Disamping optimalisasi realisasi belanja daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA).

Merujuk Rencana pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026, Kebijakan Pembangunan Aceh Tahun 2023 ialah “Meningkatkan Kemandirian Pangan dan Kesejahteraan Masyarakat untuk Penurunan Angka Pengangguran dan Kemiskinan dalam rangka Mengatasi Dampak Sosial Ekonomi dari Covid-19”. Selain itu Pemerintah Aceh menetapkan rencana capaian terhadap indikator makro tahun 2023 seperti yang tertuang Rencana pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026, sebagai berikut :

1. Persentase pertumbuhan ekonomi berkisar 3,6 persen;





2. Tingkat kemiskinan berada di angka 15,03 persen;
3. IPM berada di kisaran 72,58;
4. Tingkat Pengangguran Terbuka berada di angka 5,48 persen;
5. GINI Ratio 0,307.

3.1.3 Kondisi dan Arah Perekonomian Kota Banda Aceh

Keberhasilan penanganan Covid-19 ditandai oleh perbaikan ekonomi yang terus membaik. Perbaikan kinerja perekonomian tahun 2021 ditandai oleh laju pertumbuhan ekonomi yang positif. Berdasarkan data statistik yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banda Aceh, laju pertumbuhan ekonomi Kota Banda Aceh Tahun 2021 sebesar 5,53 persen meningkat dibandingkan tahun 2020 yang sempat minus 3,29 persen. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Banda Aceh diatas rata-rata pencapaian nasional dan provinsi Aceh. Tumbuhnya ekonomi banda aceh tidak terlepas dari mulai menggeliat kembali sektor-sektor unggulan sepanjang 2021, terutama perdagangan dan jasa.

Dalam upaya menggeliatkan kembali perekonomian Kota Banda Aceh, pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kualitas serta fungsionalisasi infrastruktur menjadi salah satu prioritas pembangunan Kota Banda Aceh pada tahun 2023. Arah kebijakan pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2023 sebagaimana yang tertuang dalam RPD Kota Banda Aceh 2023-2026, dan telah melalui Forum Konsultasi Publik yang dilaksanakan pada tanggal 5 April 2022, ialah “Penguatan Penegakan Syariat Islam, Reformasi Birokrasi, Pemberdayaan Ekonomi, Pelayanan Kesehatan dan Peningkatan Kualitas dan Fungsionalisasi Infrastruktur”.

Selain itu pada tahun 2023 pemerintah Kota Banda Aceh menetapkan beberapa sasaran dan target, antara lain :

1. Pertumbuhan ekonomi berada di angka 4,00 persen;
2. Laju inflasi berkisar 2,35 persen;
3. Jumlah penduduk miskin dapat turun hingga 20.874 jiwa;
4. IPM berada di kisaran 86,59;
5. Gini ratio 0,337;
6. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berada di angka 8,54 persen.

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan ekonomi Kota Banda Aceh pada tahun 2022 diproyeksikan akan kembali menunjukkan kinerja yang positif dan akan terus berlanjut di tahun 2023. Normalisasi kondisi pandemi Covid-19 tentunya akan mendorong berkembangnya sektor jasa yang menjadi penopang perekonomian Kota Banda Aceh. Sektor perdagangan besar dan eceran termasuk reparasi mobil dan sepeda motor, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib serta sektor transportasi dan pergudangan menjadi sektor yang paling besar memberikan kontribusi terhadap ekonomi Kota Banda Aceh. Disamping peningkatan konsumsi rumah tangga seiring membaiknya daya beli dan pendapatan masyarakat juga akan mendorong ekonomi Kota Banda Aceh kearah yang lebih baik.

Program-program strategis pemulihan ekonomi yang telah dilaksanakan diyakini mampu meningkatkan kinerja ekonomi yang lebih baik. Salah satu indikator makro ekonomi yang menunjukkan perbaikan yakni nilai PDRB Kota Banda Aceh, baik PDRB atas Dasar Harga Berlaku maupun Atas Dasar Harga Konstan. Perkembangan perekonomian Kota Banda Aceh terbaru tahun 2021 ditunjukkan dalam tabel berikut :





**Tabel 3. 1 PDRB ADHB dan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha
Kota Banda Aceh Tahun 2020-2021**

Lapangan Usaha PDRB	PDRB Menurut Lapangan Usaha (juta Rupiah)			
	ADHB		ADHK	
	2020	2021	2020	2021
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	246.291,97	253.952,91	170.013,74	170.112,36
Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00
Industri Pengolahan	395.970,93	434.442,75	307.513,39	315.963,67
Pengadaan Listrik dan Gas	70.812,82	71.944,48	68.836,54	68.743,45
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	30.268,36	30.020,48	16.816,63	16.668,64
Konstruksi	1.175.724,80	1.194.854,01	1.008.501,14	1.019.217,92
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.875.509,40	4.208.231,83	2.940.617,62	3.073.180,80
Transportasi dan Pergudangan	1.352.987,57	1.714.524,96	1.366.707,15	1.711.308,91
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	785.438,32	767.319,70	467.193,46	447.920,51
Informasi dan Komunikasi	960.394,57	999.344,14	1.245.756,98	1.350.921,96
Jasa Keuangan dan Asuransi	611.614,75	621.348,14	415.505,15	400.824,63
Real Estate	1.545.839,00	1.604.639,22	1.097.917,00	1.135.074,09
Jasa Perusahaan	464.110,00	475.346,61	345.917,00	348.240,96
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan	4.326.810,00	4.729.948,02	3.206.042,00	3.346.178,79





Lapangan Usaha PDRB	PDRB Menurut Lapangan Usaha (juta Rupiah)			
	ADHB		ADHK	
	2020	2021	2020	2021
Sosial Wajib				
Jasa Pendidikan	1.473.452,80	1.548.024,82	1.036.331,84	1.065.121,62
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	796.385,26	875.691,63	639.728,10	669.862,65
Jasa lainnya	390.017,58	403.011,48	310.890,33	315.030,51
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	18.501.628,13	19.932.645,17	14.644.288,07	15.454.371,48

Sumber : Kota Banda Aceh Dalam Angka 2022

Pada Tabel terlihat bahwa perekonomian Kota Banda Aceh berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2021 mencapai Rp. 19.932.645,17 juta, jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2020 yang berjumlah Rp. 18.501.628,13 juta. Dari sisi sektoral, perekonomian Kota Banda Aceh didorong oleh hampir semua lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif. Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib masih memberikan kontribusi yang tertinggi bagi perekonomian Kota Banda Aceh sebesar Rp. 4.729.948,02 juta. Lapangan usaha yang berkontribusi tinggi selanjutnya yaitu Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp. 4.208.231,83 juta.

Selaras dengan peningkatan PDRB Kota Banda Aceh yang mengalami peningkatan, hal yang sama terjadi di PDRB Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK). Pada Tabel, nilai PDRB ADHK Kota Banda Aceh pada tahun 2021 sebesar Rp. 15.454.371,48 juta, jumlah ini lebih tinggi dari PDRB ADHK tahun 2020 sebesar Rp. 14.644.288,07 juta. Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib merupakan kategori dengan nilai PDRB terbesar dibandingkan nilai PDRB kategori yang lainnya, yaitu sebesar Rp. 3.346.178,79 juta. Pada urutan berikutnya adalah Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan PDRB atas dasar harga konstan sebesar Rp. 3.073.180,80 juta, serta kategori Transportasi dan Pergudangan dengan nilai PDRB sebesar Rp. 1.711.308,91 juta.

Berdasarkan peranan sektoral, struktur perekonomian Kota Banda Aceh memiliki pola yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya, dimana sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib memiliki kontribusi besar dalam perekonomian Kota Banda Aceh. Selanjutnya lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor juga memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam menopang perekonomian Kota Banda Aceh. Hal ini menunjukkan bahwa produktivitas lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terus meningkat di tahun 2021. Tumbuhnya sektor ini dipengaruhi oleh kehidupan masyarakat yang mulai kembali normal sehingga mendorong meningkatnya kembali konsumsi masyarakat akibat keyakinan masyarakat terhadap perekonomian kedepan yang semakin membaik.





b. Tingkat Inflasi

Inflasi Kota Banda Aceh hingga tahun 2021 cenderung menunjukkan kecenderungan yang menurun. Secara kumulatif, Inflasi Kota Banda Aceh di tahun 2021 tergolong rendah sebesar 2,41 persen, lebih rendah dari tahun 2020 sebesar 3,46 persen. Namun tingkat inflasi tersebut lebih tinggi dibanding realisasi inflasi nasional dan Provinsi Aceh.

Berdasarkan rilis terbaru Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, Perkembangan harga berbagai komoditas di Kota Banda Aceh pada April 2022 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Pada April 2022 terjadi inflasi sebesar 1,23 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 109,85 pada Maret 2022 menjadi 111,20 pada April 2022. Tingkat inflasi tahun kalender (Januari–April) 2022 sebesar 2,51 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (April 2022 terhadap April 2021) sebesar 4,68 persen

Inflasi yang terjadi di Banda Aceh terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,86 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,11 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,21 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,40 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,60 persen; kelompok transportasi sebesar 3,37 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,11 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,74 persen. Kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi, yaitu: kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,08 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang tidak mengalami perubahan, yaitu: kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan; dan kelompok pendidikan.

**Tabel 3. 2 Laju Inflasi Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Nasional
Tahun 2016-2020**

Uraian	Tahun		
	2019	2020	2021
Kota Banda Aceh	1,38	3,46	2,41
Provinsi Aceh	1,69	3,59	2,24
Nasional	2,72	1,68	1,87

Sumber : *BPS Kota Banda Aceh dan BPS Provinsi Aceh, 2022*

c. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan terus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah dalam meningkatkan program pembangunan di masa yang akan datang. Dalam hal ini pemerintah memiliki program-program yang telah terealisasi di masing-masing kecamatan di Kota Banda Aceh berupa bantuan program keluarga harapan dan bantuan pangan non tunai (BPNT).

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS Kota Banda Aceh), Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Kota Banda Aceh pada bulan Maret 2021 mencapai 20,95 ribu orang dengan tingkat kemiskinan mencapai 7,61 persen. Jumlah ini bertambah 1,98 ribu orang dibandingkan penduduk miskin periode maret 2020 sebanyak 18,97 ribu orang dengan tingkat kemiskinan 6,90 persen.





**Tabel 3. 3 Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin
Kota Banda Aceh 2017-2021**

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin
2017	572.295	19,23	7,44
2018	607.391	19,13	7,25
2019	628.493	19,42	7,22
2020	674.977	18,97	6,90
2021	698.617	20,95	7,61

Sumber : Kota Banda Aceh Dalam Angka 2022

Dari tabel di atas terlihat jumlah penduduk miskin di Kota Banda Aceh pada tahun 2021 sebesar 7,61 persen, mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020 sebesar 6,90 persen, walaupun tingkat kemiskinan di Kota Banda Aceh tahun 2021 lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan provinsi Aceh yang mencapai 15,33 persen dan nasional yang berada pada 9,71 persen. Meningkatnya penduduk miskin Kota Banda Aceh pada tahun 2021, tidak terlepas dari dampak pandemi covid-19. Diberlakukannya kebijakan pembatasan kegiatan sosial pada tahun 2021, sangat berdampak pada tingkat pendapatan masyarakat yang mata pencariannya bersumber dari sektor jasa terutama jasa perdagangan. Roda perekonomian Kota Banda Aceh yang sebagian besar ditopang oleh sektor jasa perdagangan dan memiliki cakupan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat, terimbas cukup signifikan akibat kebijakan pembatasan sosial selama pandemi covid-19 sehingga menyebabkan daya beli masyarakat menjadi lemah.

Selain itu, permasalahan pokok kemiskinan di Kota Banda Aceh berkaitan dengan arus urbanisasi dari daerah ke Banda Aceh sebagai ibukota provinsi yang memiliki daya tarik tersendiri bagi pencari kerja. Meningkatnya jumlah pencari kerja yang tidak diimbangi dengan kesempatan dan ketersediaan lapangan kerja menjadikan tingkat pengangguran terbuka semakin bertambah, disamping banyaknya para lulusan dari tingkat sekolah menengah atas ataupun perguruan tinggi yang tidak tertampung oleh lapangan kerja.

Upaya menurunkan tingkat kemiskinan, Pemerintah Kota Banda Aceh pada tahun 2023 dalam kebijakan prioritas pembangunan, dilakukan melalui Pemberdayaan Ekonomi masyarakat, diantaranya memberikan bantuan fasilitas dan modal bagi pelaku UMKM di Kota Banda Aceh dalam mengembangkan usahanya, sehingga dapat membuka peluang usaha dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Peningkatan kualitas dan fungsionalisasi infrastruktur juga menjadi salah satu fokus Pemerintah Kota Banda Aceh di Tahun 2023, yang nantinya dapat menjadi sarana yang mendukung investasi dan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha

d. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Berdasarkan data rilis BPS Kota Banda Aceh, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kota Banda Aceh pada tahun 2021 mengalami penurunan yaitu sebesar 8,94 persen yang mulanya sebesar 9,54 persen atau turun sebesar 0,60 persen dibandingkan tahun 2020. Ditinjau dari tingkat pendidikan yang ditamatkan, nilai TPT Kota Banda Aceh tahun 2021 didominasi oleh tenaga kerja berlatar pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 44,51 persen, diikuti oleh tenaga kerja jenjang pendidikan perguruan tinggi mencapai 31,30%. Sementara pekerja dengan latar





belakang pendidikan Sekolah Dasar (SD) sebesar 12,89% dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar 11,31%.

Tabel 3. 4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Banda Aceh 2018-2021

Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
2018	7,24
2019	6,89
2020	9,54
2021	8,94

Sumber : Kota Banda Aceh Dalam Angka 2022

e. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Banda Aceh Tahun 2020 adalah sebesar 85,41. Sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Banda Aceh Tahun 2021 adalah sebesar 85,71. Angka ini meningkat 0,30 poin dibanding dengan IPM Kota Bandung Tahun 2020. IPM Kota Banda Aceh merupakan tertinggi kedua secara nasional dibawah Kota Yogyakarta. Tingginya IPM merepresentasikan bagaimana penduduk Kota Banda Aceh dapat mengakses hasil pembangunan dengan memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan layanan lainnya dengan layak.

Umur Harapan Hidup penduduk Kota Banda Aceh Tahun 2021 mencapai 71,52 tahun, naik 0,08 tahun dari tahun 2020. Rata-rata lama sekolah penduduk Kota Banda Aceh Tahun 2021 mencapai 12,83 tahun, naik 0,18 tahun dibandingkan tahun 2020. Sementara pengeluaran perkapita penduduk Kota Banda Aceh tahun 2021 sebesar Rp. 16.891.000,- lebih tinggi dari tahun 2020 sebesar Rp. 16.778.000,-.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah dalam kurun waktu satu tahun anggaran, serta merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah serta penyempurnaan program pembangunan. Keuangan Daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah dan mengikuti Peraturan Menteri serta Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditetapkan setiap tahun, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disinkronkan dan dikelola secara sistematis.

Perubahan kebijakan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan dampak yang cukup besar bagi berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah, termasuk pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ditetapkan Presiden pada tanggal 6 Maret 2019 di Jakarta merupakan instrumen hukum yang menjadi dasar pengelolaan keuangan bagi daerah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 293 dan Pasal 330 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.





Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 ini disusun untuk menyempurnakan pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, berdasarkan identifikasi masalah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang terjadi dalam pelaksanaannya selama ini. Penyempurnaan pengaturan tersebut juga dilakukan untuk menjaga 3 (tiga) pilar tata Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

Terdapat banyak perubahan dalam PP Nomor 12 Tahun 2019, salah satu perubahannya adalah pada struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Perubahan tersebut menyesuaikan dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Secara garis besar struktur APBD yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) PP 12 Tahun 2019 merupakan bagian kesatuan yang terdiri atas:

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;

2. Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun tahun anggaran berikutnya.

Arah kebijakan keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh dilakukan berdasarkan pendekatan kinerja dan berkomitmen untuk menetapkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. Hal ini dilakukan dengan mengefektifkan fungsi pengawasan serta upaya-upaya penghematan sehingga dana yang terbatas dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk pembangunan dan pemerintahan dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam pengambilan kebijakan pembangunan dengan tujuan peningkatan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat serta keberlanjutan pembangunan.

Dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan fungsi pemerintahan perlu didukung sumber pendanaan keuangan yang diupayakan melalui pemanfaatan sumber daya secara maksimal dari pemerintah pusat maupun daerah sendiri. Kerangka pendanaan keuangan daerah Kota Banda Aceh sesuai dengan PP 12 Tahun 2019 ditopang melalui:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pendapatan Transfer merupakan dana transfer dari pemerintah pusat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah dan dana transfer antar daerah. Dana transfer pemerintah pusat terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah (DID), Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa. Sedangkan Dana Transfer Antar Daerah meliputi Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan. Yang diterima dari daerah lain
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.





Kerangka kebijakan keuangan daerah yang direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Banda Aceh Tahun 2023, dan merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah Kota Banda Aceh berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta disusun dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Banda Aceh Tahun 2023 merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:

- a. Pendapatan Daerah terdiri dari:
 - Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - Dana Transfer
 - Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
- b. Belanja Daerah terdiri dari:
 - Belanja Operasi
 - Belanja Modal
 - Belanja Tidak Terduga
 - Belanja Transfer
- c. Pembiayaan Daerah terdiri dari:
 - Penerimaan Pembiayaan
 - Pengeluaran Pembiayaan

3.2.1 Pendapatan Daerah

Terdapat perbedaan pada struktur Pendapatan Daerah yang diatur PP Nomor 12 Tahun 2019 dengan PP Nomor 58 Tahun 2005. Perbedaan tersebut terdapat pada rincian pada pendapatan transfer. Pada PP Nomor 12 Tahun 2019, memberi rincian pada pendapatan transfer yaitu transfer dari pemerintah pusat dan transfer antar-daerah. Dana Perimbangan merupakan bagian dari Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat. Selain itu terdapat rincian lain berupa Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Desa. Kemudian juga terdapat rincian pada transfer antar-daerah yang tidak terdapat pada PP 58 Tahun 2005.

Mengacu kepada proyeksi asumsi makro ekonomi Kota Banda Aceh tahun 2023 serta melihat performa pendapatan daerah tahun 2022, diharapkan Pendapatan daerah dapat lebih meningkat setiap tahunnya dengan diikuti beberapa upaya dan kebijakan untuk mencapainya. Dengan memperhatikan perhitungan APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2022 khususnya evaluasi kinerja bidang pendapatan, mempertimbangkan kebijakan Pendapatan Daerah serta beberapa hal-hal, sebagai berikut:

1. Perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber baik Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan maupun Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
2. Realisasi pendapatan daerah sampai dengan Triwulan I tahun 2022.
3. Penyesuaian atas Dana Transfer yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh.

Untuk mengetahui proyeksi/target pendapatan Kota Banda Aceh Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.5 di bawah ini:





Tabel 3. 5 Proyeksi/Target Pendapatan Kota Banda Aceh Tahun 2022

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun (n-3) 2020	Realisasi Berjalan (n-2) 2021	Tahun Berjalan (n-1) 2022	Proyeksi/Target Pada Tahun Rencana (n) 2023	Proyeksi/Target Pada Tahun Rencana (n+1) 2024
1	2	4	5	6	7	8
4.	PENDAPATAN DAERAH	1.259.058.432.366	1.319.511.486.346	1.374.271.730.417	1.303.088.344.063	1.251.166.816.349
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	227.847.318.872	326.994.747.464	279.624.722.566	285.142.273.443	290.785.371.460
4.1.01.	Pajak Daerah	74.863.963.376	110.504.490.000	111.905.791.887	114.254.242.590	116.651.977.790
4.1.02.	Retribusi Daerah	20.061.904.939	56.757.140.032	43.544.169.903	43.643.901.058	43.743.860.630
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.999.134.330	8.000.000.000	7.000.000.000	7.140.000.000	7.282.800.000
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	126.922.316.227	151.733.117.432	117.174.760.776	120.104.129.795	123.106.733.040
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	994.538.413.494	969.250.938.882	1.094.647.007.851	1.017.946.070.620	960.381.444.889
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	825.714.653.961	823.180.995.000	861.720.548.000	863.075.697.316	864.459.887.585
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	168.823.759.533	146.069.943.882	232.926.459.851	154.870.373.304	95.921.557.304
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	39.183.527.017	37.865.470.756	37.865.470.756	37.865.470.756	37.865.470.756
4.2.02.02	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	129.640.232.516	108.204.473.126	195.060.989.095	117.004.902.548	58.056.086.548
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	36.672.700.000	23.265.800.000	-	-	-





No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun (n-3) 2020	Realisasi Berjalan (n-2) 2021	Tahun Berjalan (n-1) 2022	Proyeksi/Target Pada Tahun Rencana (n) 2023	Proyeksi/ Target Pada Tahun Rencana (n+1) 2024
1	2	4	5	6	7	8
4.3.01	Pendapatan Hibah	4.500.450.000	-	-	-	-
4.3.01.01.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	4.500.450.000	-	-	-	-
4.3.03.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	32.172.250.000	23.265.800.000	-	-	-
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	32.172.250.000	23.265.800.000	-	-	-
	Jumlah Pendapatan	1.259.058.432.366	1.319.511.486.346	1.374.271.730.417	1.303.088.344.063	1.251.166.816.349

Sumber : Proyeksi BPKK Kota Banda Aceh dan Dokumen RPD Kota Banda Aceh 2023-2026





Berdasarkan Tabel 3.5 di atas dapat dilihat untuk proyeksi pendapatan pada tahun 2023 sebesar Rp 1.303.088.344.063,- dengan asumsi terjadi penurunan sebesar (-5,18%) dibandingkan dengan pendapatan daerah pada tahun 2022 sebesar Rp 1.374.271.730.417,-. Penurunan tersebut disebabkan oleh menurunnya pendapatan transfer antar daerah pada tahun 2023 sebesar Rp 154.870.373.304,- dengan asumsi penurunan sebesar (-33,51%) dibandingkan dengan tahun dasar 2022 sebesar Rp 232.926.459.851,-. Penurunan ini disebabkan oleh pendapatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Kota Banda Aceh yang turun sangat signifikan dari tahun sebelumnya.

Dengan keterbatasan anggaran pembangunan, Pemerintah Kota Banda Aceh pada tahun 2023 merencanakan sumber pendapatan dalam bentuk hibah dari Pemerintah Pusat. Sumber pendapatan ini sangat diharapkan untuk mendukung program dan kegiatan strategis nasional serta juga dalam rangka mewujudkan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Banda Aceh.

Untuk mewujudkan peningkatan Pendapatan Daerah di Kota Banda Aceh, akan dilakukan upaya sebagai berikut:

1. Meningkatkan manajemen tata-kelola pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah sesuai dengan mekanisme dan standar baku serta memanfaatkan teknologi terkini.
2. Perluasan obyek dan intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara optimal.
3. Pendayagunaan aset daerah.
4. Mengadakan peninjauan kembali (*annual-review*) atas berbagai Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dan memperumit birokrasi guna mempermudah investasi.
5. Peningkatan koordinasi antar lembaga dan stake holder terkait penerimaan daerah.
6. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat.
7. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi.

Terkait dengan komponen Pendapatan Daerah sesuai PP Nomor 12 Tahun 2019 dapat kami jelaskan sebagai berikut:

3.2.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah, yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh Daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana kepada pemerintah. Kemampuan Daerah dalam memajukan perekonomian daerahnya salah satunya dapat dilihat dalam perkembangan PAD.

Besaran PAD dapat menjadi salah satu indikator dalam menilai peran dan kemampuan Daerah dalam membiayai pembangunan dan rumah tangganya sendiri (*self-supporting*). PAD memiliki posisi strategis dalam proses pelaksanaan pembangunan daerah, karena digunakan untuk membiayai belanja pembangunan setiap tahunnya. Selaras dengan peningkatan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah, serta dengan memperhatikan perkembangan realisasi pendapatan daerah dari tahun ke tahun yang menunjukkan adanya peningkatan, Pemerintah Kota Banda Aceh merencanakan peningkatan pendapatan daerah baik yang bisa diupayakan oleh daerah sendiri (PAD), dari pusat (dana perimbangan), serta pendapatan lain-lain yang sah termasuk bagi hasil dengan pemerintah provinsi.





Adapun dalam perencanaan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilakukan dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi masing-masing penerimaan daerah. Upaya peningkatan PAD ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketetapan dan kecepatan pelayanan.

Dalam rangka penyusunan Rencana Pendapatan Tahun Anggaran 2023 khususnya PAD didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Situasi dan kondisi daerah serta perkembangan ekonomi masyarakat saat ini;
- 2) Proyeksi penerimaan tahun berjalan;
- 3) Perkembangan Objek Penerimaan Daerah;
- 4) Kebijakan dan ketentuan-ketentuan dari pemerintah atasan.

3.2.1.2. Dana Transfer

Sesuai Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Dana Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Transfer Pemerintah Pusat merupakan dana transfer dari pemerintah pusat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah. Dalam pelaksanaan desentralisasi penyelenggaraan pemerintah daerah, diberikan dana transfer yang terdiri dari:

1. Dana Perimbangan, yang terdiri atas:
 - a. Dana Transfer Umum, terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU);
 - b. Dana Transfer Khusus terdiri dari DAK fisik dan DAK Non Fisik;
2. Dana Insentif Daerah (DID), merupakan pendapatan transfer yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu;
3. Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA), merupakan pendapatan transfer yang dialokasikan kepada Daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan;
4. Dana Desa (DD), merupakan pendapatan transfer yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
5. Pendapatan Bagi Hasil;
6. Bantuan Keuangan.

Kebijakan alokasi anggaran tersebut untuk mendukung kegiatan prioritas nasional, dengan menjaga konsistensi dan keberlanjutan pelaksanaan desentralisasi fiskal guna menunjang pelaksanaan otonomi daerah. Tujuan pemberian dana adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dengan daerah dan antar daerah, serta meningkatkan kapasitas daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah. Dana Transfer yang diproyeksikan untuk tahun-tahun berikutnya diasumsikan tidak mengalami peningkatan, hal ini disebabkan dana Transfer dari pemerintah pusat bersifat dinamis yang sangat tergantung dari penerimaan negara.

Transfer antar daerah merupakan dana transfer dari pemerintah daerah yang bersumber dari APBD, terdiri dari:





1. Pendapatan Bagi Hasil, merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

3.2.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah (Pemerintah Pusat), dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kota Banda Aceh menyadari bahwa pendanaan pembangunan daerah selama ini sebagian besar bersumber dari dana perimbangan. Hal ini disebabkan belum optimalnya sumber pendapatan daerah dari obyek retribusi dan pajak daerah. Dalam rangka memenuhi tuntutan pembangunan daerah yang terus meningkat dengan kondisi pendanaan yang masih terbatas, maka terhadap seluruh komponen pendapatan daerah khususnya dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdapat potensi yang masih bisa dioptimalkan untuk dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah sehingga daerah tersebut dapat lebih mandiri.

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Terdapat perbedaan pada struktur Belanja Daerah yang diatur dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 dengan PP Nomor 58 Tahun 2005. Perbedaan hanya pada klasifikasi belanja daerah. Sesuai PP 12 Tahun 2019 klasifikasi belanja daerah terdiri atas 4 (empat) komponen, yaitu:

- 1) belanja operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
- 2) belanja modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
- 3) belanja tidak terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- 4) belanja transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Arah Kebijakan belanja daerah pada tahun 2023, mengacu pada prinsip *money follow program* dengan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta situasi dan kondisi pada tahun mendatang, artinya program dan kegiatan strategis yang memang menjadi prioritaslah yang mendapatkan anggaran. Kebijakan belanja daerah Tahun 2023, diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan program RPD serta Urusan Wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Banda Aceh yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupu program dan kegiatan, yang bertujuan untuk





meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Kecenderungan semakin meningkatnya kebutuhan belanja pegawai, pemenuhan belanja rutin perkantoran (*fixed cost*) dan belanja bantuan keuangan, tidak berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan daerah. Hal ini berdampak pada kemampuan riil keuangan daerah yang cenderung semakin menurun. Dengan menggunakan indikator ruang fiskal (ketersediaan dana dalam APBD yang dapat digunakan secara bebas oleh daerah), ruang fiskal Kota Banda Aceh menunjukkan kecenderungan menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun Arah kebijakan belanja daerah untuk Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Sesuai dengan RPD 2023-2026, Prioritas Pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2023 adalah Penguatan Penegakan Syariat Islam, Reformasi Birokrasi, Pemberdayaan Ekonomi, Pelayanan Kesehatan dan Peningkatan Kualitas dan Fungsionalisasi Infrastruktur.
2. Penggunaan dana fungsi pendidikan 20% dari belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan;
3. Mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD
4. Mengalokasikan belanja Bantuan keuangan kepada Pemerintahan desa sebesar 10%, hibah, bansos dan belanja tak terduga;
5. Mengalokasikan belanja dukungan untuk optimalisasi penggunaan aset milik daerah;
6. Mengalokasikan Belanja untuk Pembangunan dan pengembangan pusat pelayanan publik dan sosial;

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah tiga (3) tahun terakhir, arah kebijakan belanja daerah pada Tahun 2023 dituangkan dalam tabel di bawah ini:





Tabel 3. 6 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi APBD Tahun (n-3)	Realisasi APBD Tahun (n-2)	APBD Tahun Berjalan (n-1)	Proyeksi/Target pada Tahun RKPD (n)	Proyeksi pada Tahun (n+1)
		2020 (Rp.)	2021 (Rp.)	2022 (Rp.)	2023 (Rp.)	2024 (Rp.)
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
5.1	Belanja Operasi	946.969.335.289	890.260.557.707	1.013.228.651.229	979.924.915.906	879.858.177.210
5.1.01	Belanja Pegawai	436.060.250.991	443.495.524.864	440.733.767.545	428.439.041.632	416.259.377.933
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	426.854.477.670	390.145.490.646	444.045.268.722	393.664.787.572	336.132.434.315
5.1.03	Belanja Bunga	2.541.992.607	2.121.063.639	3.511.000.000	3.511.000.000	3.400.000.000
5.1.04	Belanja Subsidi	-	285.400.000	131.250.000	636.000.000	189.000.000
5.1.05	Belanja Hibah	76.698.586.021	52.421.197.558	120.024.948.750	151.415.564.950	122.024.948.750
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4.814.028.000	1.791.881.000	4.782.416.212	2.258.521.752	1.852.416.212
5.2	Belanja Modal	194.069.510.384	186.488.463.086	228.953.224.562	186.373.573.531	234.695.267.790
5.3	Belanja Tak Terduga	4.680.098.372	2.223.104.729	1.500.000.000	1.500.000.000	1.201.544.155
5.4	Belanja Transfer	125.862.204.661	128.641.963.436	135.289.854.626	135.289.854.626	135.411.827.193
	TOTAL JUMLAH BELANJA	1.271.581.148.706	1.207.614.088.958	1.378.971.730.417	1.303.088.344.063	1.251.166.816.349

Sumber : Proyeksi BPKK Kota Banda Aceh dan Dokumen RPD Kota Banda Aceh 2023-2026





Berdasarkan tabel di atas, juga dapat diketahui bahwa pada tahun 2020, realisasi APBD Kota Banda Aceh sebesar Rp1.271.581.148.706,-, sedangkan pada tahun 2021 realisasi APBD sebesar Rp 1.207.614.088.958,- atau mengalami penurunan sebesar (-5,03%). Selanjutnya APBD Kota Banda Aceh tahun 2022 sebesar Rp 1.378.971.730.417,- dan berdasarkan data terkait realisasi belanja pada tahun-tahun sebelumnya maka proyeksi belanja program pembangunan daerah tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp 1.303.088.344.063,-. Sementara untuk proyeksi lanjutan belanja program pembangunan pada tahun 2024 sebesar Rp 1.251.166.816.349,-.

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran disebut sebagai pembiayaan. Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD. Surplus APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah lebih besar dari anggaran belanja daerah, sementara defisit APBD terjadi bila anggaran pendapatan diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja.

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, diutamakan untuk membiayai pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah pemberian pinjaman kepada Pemerintah Daerah lainnya, atau pendanaan jaminan sosial. Sementara dalam hal APBD diperkirakan defisit, pembiayaan diutamakan untuk menutup defisit yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan baik penerimaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, dari pinjaman, dan dari hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah timbul karena ada surplus/kelebihan anggaran. Pengeluaran pembiayaan daerah Kota Banda Aceh diantaranya diperuntukan bagi penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah dan pembayaran pokok utang. Jumlah sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan yang dianggarkan pada APBK Tahun Anggaran 2023 merupakan angka estimasi.

Struktur Pembiayaan Daerah yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan pada Tahun 2023 seperti terlihat pada Tabel 3.7 berikut ini:





Tabel 3. 7 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2020 s.d Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi APBD Tahun (n-3) 2020 (Rp)	Realisasi APBD Tahun (n-2) 2021 (Rp)	APBD Tahun Berjalan (n-1) 2022 (Rp)	Proyeksi/Target pada Tahun RKPD (n) 2023 (Rp)	Proyeksi pada Tahun (n+1) 2024 (Rp)
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
6.1	Penerimaan Pembiayaan	36.499.603.370	19.349.907.595	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	3.800.000.000	10.925.769.376	5.300.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
	Pembiayaan Netto	32.699.603.370	8.424.138.219	4.700.000.000	0	0

Sumber : Proyeksi BPKK Kota Banda Aceh dan Dokumen RPD Kota Banda Aceh 2023-2026





Berdasarkan Tabel 3.7 di atas diketahui bahwa rencana jumlah penerimaan pembiayaan Pemerintah Kota Banda Aceh tahun 2023 sebesar Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar) dan rencana jumlah pengeluaran pembiayaan Pemerintah Kota Banda Aceh sebesar Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar) sehingga berdasarkan proyeksi yang disusun tidak dapat selisih yang menyebabkan defisit atau surplus dalam pembiayaan netto Pemerintah Kota Banda Aceh.





BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH



Prioritas pembangunan daerah berhubungan dengan sasaran pembangunan daerah yang ingin dicapai. Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah.

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah bertujuan agar proses pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan lima tahunan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Dalam merumuskan prioritas pembangunan daerah, hasil evaluasi pelaksanaan rencana tahunan yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun lalu juga dipertimbangkan, sehingga beberapa permasalahan yang telah diidentifikasi dan belum selesai dapat segera ditindaklanjuti.

Penjabaran Program dan kegiatan pembangunan daerah untuk pelaksanaan pembangunan daerah Tahun 2023 direncanakan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Perencanaan pembangunan Tahun 2023 ini merupakan tahun pertama dari Rencana Pemerintah Daerah (RPD) Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2022.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam pelaksanaan pembangunan tahunan dijabarkan berdasarkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan RPD Kota Banda Aceh Tahun 2023 dengan memperhatikan seluruh potensi yang ada. Hubungan tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut:





Tabel 4. 1 Hubungan Tujuan, Tujuan Indikator dan Sasaran Pembangunan Kota Banda Aceh Berdasarkan RPD Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran
1. Mengoptimalkan Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam	1. Peningkatan Indeks Kota Syariah (IKS)	1. Optimalnya Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam
2. Meningkatkan Kualitas Demokrasi dan Ketenteraman Umum	1. Peningkatan Indeks Ketenteraman Umum	1. Meningkatnya Kualitas Demokrasi dan Ketenteraman Umum
3. Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah	1. Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Peningkatan Nilai AKIP	1. Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah
4. Mengoptimalkan Kualitas Pendidikan	1. Peningkatan Indeks Kualitas Pendidikan	1. Optimalnya Kualitas Pendidikan
5. Mengoptimalkan Kualitas Kesehatan	1. Peningkatan Indeks Kualitas Kesehatan	1. Optimalnya Kualitas Kesehatan
6. Meningkatkan Penguatan Ekonomi dan Sosial	1. Persentase Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi 2. Persentase Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 3. Persentase Peningkatan Pemenuhan Layanan SPM Sosial.	1. Meningkatnya Penguatan Ekonomi dan Sosial
7. Meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisata	1. Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisata	1. Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata
8. Mengoptimalkan Upaya Pelestarian Budaya	1. Peningkatan Indeks Pelestarian Budaya Daerah	1. Optimalnya Upaya Pelestarian Budaya
9. Meningkatkan Pengembangan Infrastruktur dan Penataan Kawasan Permukiman	1. Persentase Peningkatan Rata-Rata Capaian Layanan Infrastruktur Perkotaan	1. Meningkatnya Pengembangan Infrastruktur dan Tertatanya Kawasan Permukiman
10. Mengoptimalkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Peningkatan Indeks Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Optimalnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
11. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, tata kelola RTH, dan Mitigasi Bencana	1. Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 2. Peningkatan Luasan RTH Publik Sebesar	1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, tata kelola RTH, dan Mitigasi Bencana





Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran
	20% dari Luas Wilayah Kota 3. Penurunan Nilai Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	
12. Mengoptimalkan Pemberdayaan Pemuda dan Pembinaan Olahraga	1. Peningkatan Indeks Pemberdayaan Pemuda Dan Pembinaan Olahraga	1. Optimalnya Pemberdayaan Pemuda dan Pembinaan Olahraga
13. Meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Daerah	1. Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	1. Meningkatnya Sumber Pendapatan Asli Daerah

Sumber : RPD Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026

4.2 Permasalahan dan Isu Strategis

Berdasarkan permasalahan pembangunan secara umum yang telah dijelaskan secara rinci dalam BAB II sebelumnya, maka dapat diketahui permasalahan pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2023 yang merupakan tahun ke-1 RPD Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Belum Optimalnya Penguatan Syariat Islam.
- 2) Belum Optimalnya Partisipasi Publik dalam Pemilu, Pilkada, dan Pilchiksung.
- 3) Adanya Potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan terhadap Ketentraman Umum.
- 4) Belum Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah.
- 5) Belum Optimalnya Optimalisasi Peningkatan Kualitas Kesehatan.
- 6) Berfluktuasinya Pertumbuhan Ekonomi Daerah.
- 7) Penurunan Kunjungan Wisatawan Akibat Pandemi.
- 8) Belum Optimalnya Pelestarian Budaya.
- 9) Belum optimalnya akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman.
- 10) Belum Optimalnya Penanganan Kerusakan Jalan.
- 11) Belum Optimalnya Penataan Permukiman.
- 12) Belum Optimalnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- 13) Menurunnya Kualitas Lingkungan Hidup.
- 14) Terbatasnya Lahan RTH Perkotaan.
- 15) Belum Optimalnya Pengelolaan Kawasan RTH.
- 16) Belum Optimalnya Pengelolaan Mitigasi Bencana.
- 17) Belum Optimalnya Pemberdayaan Pemuda dan Pembinaan Olahraga.
- 18) Menurunnya Sumber Dana OTSUS Aceh, DOKA Kabupaten/Kota, dan Realisasi PAD Akibat Pandemi.

Dalam perencanaan pembangunan, isu strategis merupakan hal penting yang harus diperhatikan atau dikedepankan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan untuk menjadi sebuah isu strategis adalah bersifat penting, mendasar, mendesak, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Atas dasar permasalahan pembangunan Kota Banda Aceh tahun 2023 di atas, maka ditetapkan isu strategis pembangunan Kota Banda Aceh tahun 2023 sebagai berikut:





- 1) Penguatan Syariat Islam.
- 2) Peningkatan Kualitas Demokrasi dan Ketentraman Umum.
- 3) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah.
- 4) Optimalisasi Kualitas Kesehatan.
- 5) Penguatan Ekonomi dan Sosial.
- 6) Pariwisata dan Budaya.
- 7) Pengembangan Infrastruktur dan Penataan Kawasan Permukiman.
- 8) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- 9) Lingkungan Hidup, Tata Kelola RTH Perkotaan, dan Mitigasi Bencana.
- 10) Pemuda dan Olah raga.
- 11) Sumber Pendapatan.

4.3 Program Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh yang Mendukung IKU

Untuk mengetahui program pembangunan daerah Kota Banda Aceh tahun 2023 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:





Tabel 4. 2 Program Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh yang Mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) Berdasarkan RPD Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026

No	Sasaran	IKU	Realisasi IKU 2021	Program /Kegiatan Pendukung IKU	OPD Penanggung Jawab
1	Optimalnya Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam	Indeks Kota Syariah (IKS)	76,77 (Indeks)	Program Syariat Islam Aceh	DSI
				Program Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh	Sekretariat MPU
2	Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,97 (Indeks)	Program hubungan industrial	Dinas Tenaga Kerja
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publik	Kecamatan Syiah Kuala
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publik	Kecamatan Kuta Raja
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publik	Kecamatan Kuta Alam
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publik	Kecamatan Lueng Bata
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publik	Kecamatan Ulee Kareng
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publik	Kecamatan Baiturrahman





No	Sasaran	IKU	Realisasi IKU 2021	Program /Kegiatan Pendukung IKU	OPD Penanggung Jawab
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publik	Kecamatan Banda Raya
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publik	Kecamatan Meuraxa
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publik	Kecamatan Jaya Baru
				Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Kecamatan Syiah Kuala
				Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Kecamatan Kuta Raja
				Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Kecamatan Baiturrahman
				Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Kecamatan Banda Raya
				Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Kecamatan Meuraxa
				Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Kecamatan Jaya Baru
				Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Kecamatan Ulee Kareng





No	Sasaran	IKU	Realisasi IKU 2021	Program /Kegiatan Pendukung IKU	OPD Penanggung Jawab
				Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Kecamatan Kuta Alam
				Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Kecamatan Lueng Bata
				Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Kecamatan Syiah Kuala
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Meuraxa
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Baiturrahman
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Banda Raya
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Kuta Raja
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Kuta Alam
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Ulee Kareng





No	Sasaran	IKU	Realisasi IKU 2021	Program /Kegiatan Pendukung IKU	OPD Penanggung Jawab
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Lueng Bata
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Jaya Baru
				Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Syiah Kuala
				Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Kuta Raja
				Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Baiturrahman
				Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Meuraxa
				Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Banda Raya
				Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Kuta Alam
				Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Ulee Kareng
				Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Lueng Bata





No	Sasaran	IKU	Realisasi IKU 2021	Program /Kegiatan Pendukung IKU	OPD Penanggung Jawab
				Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Jaya Baru
				Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	DPMPSTP
				Program Pendaftaran Penduduk	DISDUKCAPIL
				Program Pencatatan Sipil	DISDUKCAPIL
				Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	DISDUKCAPIL
				Program Pengelolaan Profil Kependudukan	DISDUKCAPIL
				Program Pembinaan Perpustakaan	DISPERSIP
				Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	DISPERSIP
				Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM
				Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPSDM
				Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan NON Kebakaran	DAMKAR





No	Sasaran	IKU	Realisasi IKU 2021	Program /Kegiatan Pendukung IKU	OPD Penanggung Jawab
				Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	SATPOL PP & WH
		Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	B (Nilai)	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
				Program Perumusan Kebijakan, pendampingan dan Asistensi	Inspektorat
				Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
				Program Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
				Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRK
				Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	BAPPEDA
				Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	BAPPEDA
				Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	BAPPEDA





No	Sasaran	IKU	Realisasi IKU 2021	Program /Kegiatan Pendukung IKU	OPD Penanggung Jawab
				Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKK
				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKK
				Program Pengelolaan Arsip	DISPERSIP
				Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	DISPERSIP
				Program Perizinan Penggunaan Arsip	DISPERSIP
				Program Informasi dan Komunikasi Publik	Diskominfotik
				Program Aplikasi Informatika	Diskominfotik
				Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengaman Informasi	Diskominfotik
				Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Diskominfotik
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	SATPOL PP & WH
3	Optimalnya Kualitas Pendidikan	Indeks Kualitas Pendidikan	82.64 (Indeks)	Program Pengelolaan Pendidikan	DISDIKBUD
				Program Pengembangan Kurikulum	DISDIKBUD





No	Sasaran	IKU	Realisasi IKU 2021	Program /Kegiatan Pendukung IKU	OPD Penanggung Jawab
				Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	DISDIKBUD
				Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	DISDIKBUD
				Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	DISDIKBUD
				Program Pendidikan Dayah	DISDIKDAY
				Program Penyelenggaraan Majelis Pendidikan Aceh	Sekretariat MPD
4	Optimalnya Kualitas Kesehatan	Indeks Kualitas Kesehatan	85.451 (Indeks)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RSUD Meuraxa
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Dinas Kesehatan
				Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan





No	Sasaran	IKU	Realisasi IKU 2021	Program /Kegiatan Pendukung IKU	OPD Penanggung Jawab
				Program Pengendalian Penduduk	DP3AP2KB
				Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	DP3AP2KB
				Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	DP3AP2KB
5	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata	Jumlah Kunjungan Wisata	251.836 (Jiwa)	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
				Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata
				Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Dinas Pariwisata
				Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata
6	Meningkatnya Pengembangan Infrastruktur dan Tertatanya Kawasan Permukiman	Rata-rata Capaian Layanan Infrastruktur Dasar Perkotaan	83.75 (%)	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas PUPR
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas PUPR





No	Sasaran	IKU	Realisasi IKU 2021	Program /Kegiatan Pendukung IKU	OPD Penanggung Jawab
				Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas PUPR
				Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
				Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perkim
				Program Kawasan Permukiman	Dinas Perkim
				Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas Perkim
				Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perkim
				Program Peningkatan Pelayanan sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perkim
				Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Dinas PUPR
				Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas PUPR
				Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Dinas PUPR





No	Sasaran	IKU	Realisasi IKU 2021	Program /Kegiatan Pendukung IKU	OPD Penanggung Jawab
				Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas PUPR
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas PUPR
				Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas PUPR
7	Optimalnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	63.05 (Indeks)	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	DP3AP2KB
Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak				DP3AP2KB	
Program Perlindungan Perempuan				DP3AP2KB	
Program Peningkatan Kualitas Keluarga				DP3AP2KB	
Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)				DP3AP2KB	
Program Perlindungan Khusus Anak				DP3AP2KB	
		Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	Sedang(117,02)	Program Penanggulangan Bencana	BPBD

Sumber : RPD Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026





4.4 Arah Kebijakan Pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2023

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2023 yang mengacu kepada RPD Kota Banda Aceh, yaitu: “Penguatan Penegakan Syariat Islam, Reformasi Birokrasi, Pemberdayaan Ekonomi, Pelayanan Kesehatan dan Peningkatan Kualitas Fungsionalisasi Infrastruktur“, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4. 3
Arah Kebijakan Pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2023

No	Tujuan	No	Sasaran	No	Strategi	Arah Kebijakan
1	Mengoptimalkan Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam	1.1	Optimalnya Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam	1.1.1	Optimalisasi Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam	Optimalisasi Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam
2	Meningkatkan Kualitas Demokrasi dan Ketenteraman Umum	2.1	Meningkatnya Kualitas Demokrasi dan Ketenteraman Umum	2.1.1	Peningkatan Kualitas Demokrasi dan Ketenteraman Umum	Peningkatan Kualitas Demokrasi dan Ketenteraman Umum
3	Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah	3.1	Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah	3.1.1	Optimalisasi Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola pemerintahan	Optimalisasi Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola pemerintahan
4	Mengoptimalkan Kualitas Pendidikan	4.1	Optimalnya Kualitas Pendidikan	4.1.1	Optimalisasi Kualitas Pendidikan	Optimalisasi Kualitas Pendidikan
5	Mengoptimalkan Kualitas Kesehatan	5.1	Optimalnya Kualitas Kesehatan	5.1.1	Optimalisasi Kualitas Kesehatan	Optimalisasi Kualitas Kesehatan
6	Meningkatkan Penguatan Ekonomi dan Sosial	6.1	Meningkatnya Penguatan Ekonomi dan Sosial	6.1.1	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Sosial	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Sosial
7	Meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisata	7.1	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata	7.1.1	Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisata	Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisata
8	Mengoptimalkan Upaya Pelestarian Budaya	8.1	Optimalnya Upaya Pelestarian Budaya	8.1.1	Optimalisasi Upaya pelestarian Budaya	Optimalisasi Upaya pelestarian Budaya
9	Meningkatkan Pengembangan Infrastruktur dan Penataan Kawasan Permukiman	9.1	Meningkatnya Pengembangan Infrastruktur dan Tertatanya Kawasan Permukiman	9.1.1	Peningkatan Pengembangan Infrastruktur dan Penataan Kawasan Permukiman	Peningkatan Pengembangan Infrastruktur dan Penataan Kawasan Permukiman
10	Mengoptimalkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10.1	Optimalnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10.1.1	Optimalisasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Optimalisasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
11	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, tata kelola RTH, dan Mitigasi Bencana	11.1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, Tata kelola RTH, dan	11.1.1	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Tata Kelola RTH, dan Mitigasi Bencana	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Tata Kelola RTH, dan Mitigasi Bencana





No	Tujuan	No	Sasaran	No	Strategi	Arah Kebijakan
			Mitigasi Bencana			
12	Mengoptimalkan Pemberdayaan Pemuda dan Pembinaan Olahraga	12.1	Optimalnya Pemberdayaan Pemuda dan Pembinaan Olahraga	12.1.1	Optimalisasi Pemberdayaan Pemuda dan Pembinaan Olahraga	Optimalisasi Pemberdayaan Pemuda dan Pembinaan Olahraga
13	Meningkatkan Sumber Pendapatan Daerah	13.1	Meningkatnya Sumber Pendapatan Daerah	13.1.1	Peningkatan Sumber Pendapatan Daerah	Peningkatan Sumber Pendapatan Daerah

4.5 Tema dan Prioritas Pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2023

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Banda Aceh ditetapkan prioritas pembangunan tahun 2023 yang dirumuskan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Di samping itu, juga ditetapkan tema pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2023 yang diselaraskan dengan tema Pembangunan Nasional dan Provinsi Aceh. Secara rinci, tema dan prioritas Pembangunan Nasional, Propinsi Aceh, dan Kota Banda Aceh Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. 4 Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Aceh, dan Kota Banda Aceh Tahun 2023

Tema RKP Nasional Tahun 2023	Tema RKP Aceh Tahun 2023	Tema RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2023
“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”	“Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Produktifitas Pangan, Penurunan Angka Pengangguran dan Kemiskinan Dalam Rangka Mengatasi Dampak COVID-19 untuk Kesejahteraan Masyarakat”	“Penguatan Penegakan Syariat Islam, Reformasi Birokrasi, Pemberdayaan Ekonomi, Pelayanan Kesehatan dan Peningkatan Kualitas Fungsionalisasi Infrastruktur“
Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Aceh	Prioritas Pembangunan Kota Banda Aceh
⇓	⇓	⇓
1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	1. Memperkuat kemandirian pangan, ketahanan ekonomi yang produktif dan kompetitif 2. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing 3. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar yang	1. Mengoptimalkan Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam 2. Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah 3. Meningkatkan Penguatan Ekonomi





4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	terintegrasi dan berwawasan lingkungan	
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	4. Penguatan tata kelola pemerintahan dan keistimewaan Aceh	4. Mengoptimalkan Kualitas Kesehatan
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim		5. Meningkatkan Pengembangan Infrastruktur dan Penataan Kawasan Permukiman
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan		

Sumber: RKP Nasional Tahun 2023, RKPA Tahun 2023 dan RKP Kota Banda Aceh Tahun 2023

4.6 Keterkaitan Program Prioritas Pembangunan Kota Banda Aceh dengan Pembangunan Prioritas Provinsi Aceh dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023

Untuk mengetahui keterkaitan Program Prioritas Pembangunan Kota Banda Aceh dengan Pembangunan Provinsi Aceh dan Pembangunan Nasional Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.5 Keterkaitan Program Prioritas Kota Banda Aceh dengan Program Prioritas Provinsi Aceh dan Program Prioritas Nasional Tahun 2023

Program Prioritas Nasional	Program Prioritas Provinsi Aceh	Program Prioritas Kota Banda Aceh
Program Prioritas Pendukung PN 1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Program Prioritas Pendukung PA 1 : Memperkuat Kemandirian Pangan, Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif	Program Prioritas Pendukung P-BNA 3: Meningkatkan Penguatan Ekonomi
Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan	Program Penyuluhan Pertanian	Program Penyuluhan Pertanian
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian





Program Prioritas Nasional	Program Prioritas Provinsi Aceh	Program Prioritas Kota Banda Aceh
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Program Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Program Peningkatan Diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Program penanganan kerawanan pangan
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Program pengawasan keamanan pangan
Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan, dan Kelautan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Program pengelolaan perikanan tangkap
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Program pengelolaan perikanan budidaya
Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
	Program Pemasaran Pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata
	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Program Administrasi Pemerintahan Desa
Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)
	Program Pengembangan UMKM	Program Pengembangan UMKM
	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	Program Pengembangan Ekspor	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri





Program Prioritas Nasional	Program Prioritas Provinsi Aceh	Program Prioritas Kota Banda Aceh
Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor riil, dan Industrialisasi	Program Promosi Penanaman Modal	Program Promosi Penanaman Modal
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Program Prioritas Pendukung PN 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Program Prioritas Pendukung PA 2 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Program Prioritas Pendukung P-BNA 4 : Mengoptimalkan Kualitas Kesehatan
Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja
	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Program Perencanaan Tenaga Kerja
	Program Prioritas Pendukung PN 2 :Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi dan Menjamin Pemerataan	Program Prioritas Pendukung PA 3 : Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan
Program Prioritas Pendukung PN 5 :Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar		
Program Prioritas Pendukung PN 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim		
Pembangunan Rendah Karbon	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup





Program Prioritas Nasional	Program Prioritas Provinsi Aceh	Program Prioritas Kota Banda Aceh
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
Infrastruktur Pelayanan Dasar	Program Penyelenggaraan Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
	Program Pengembangan Perumahan	Program Pengembangan Perumahan
	Program Kawasan Permukiman	Program Kawasan Permukiman
Infrastruktur Perkotaan	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
	Program Penataan Bangunan Gedung	Program Penataan Bangunan Gedung
	Program Penataan Pembangunan dan Lingkungannya	Program Penataan Pembangunan dan Lingkungannya
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	Program Penanggulangan Bencana	Program Penanggulangan Bencana
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran





Program Prioritas Nasional	Program Prioritas Provinsi Aceh	Program Prioritas Kota Banda Aceh
Program Prioritas Pendukung PN 2: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Program Prioritas Pendukung PA 4 : Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Keistimewaan Aceh	Program Prioritas Pendukung P-BNA 1 : Mengoptimalkan Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam
Program Prioritas Pendukung PN 7: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		Program Prioritas Pendukung P-BNA 2 : Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah
Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter	Program Syariat Islam Aceh	Program Syariat Islam Aceh
	Program Majelis Adat Aceh (MAA)	Program Majelis Adat Aceh (MAA)
Konsolidasi Demokrasi	Program Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh	Program Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh
	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Program Penyelenggaraan Pengawasan
	Program Penataan Organisasi	Program Penunjang urusan Pemerintahan daerah kabupaten/Kota
	Program Kepegawaian Daerah	Program Kepegawaian Daerah
	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik





Program Prioritas Nasional	Program Prioritas Provinsi Aceh	Program Prioritas Kota Banda Aceh
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
	Program Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	Program Penanganan Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

Sumber : RKP Tahun 2023, RKPA Tahun 2023, dan RPD Kota Banda Aceh 2023-2026

4.7 Program Prioritas Kota Banda Aceh Tahun 2023

Program prioritas pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2023 berdasarkan arah kebijakan pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2023, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. 6 Program Prioritas Kota Banda Aceh Tahun 2023

OPD	Program	Kegiatan	Sub-kegiatan	Pagu
Program Prioritas 1: Upaya Penguatan Penegakan Syariat Islam				14.512.674.661
Dinas Syariat Islam	Program Syariat Islam Aceh	Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Alquran	Pelaksanaan MTQ	14.003.216.066
Sekretariat MPU	Program Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh	Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama	Pendidikan Kader Ulama	509.458.595
			Rapat Koordinasi Permusyawaratan Ulama	





OPD	Program	Kegiatan	Sub-kegiatan	Pagu
			Muzakarah Masalah Keagamaan	
			Kajian Pedoman Keagamaan	
			Sosialisasi Fatwah dan Hukum Islam (Migas Kabupaten/Kota)	
		Silaturahmi Ulama-Ulama	Lokakarya Ulama Umara Bidang Muamallah	
			Eksistensi Peran Ulama dalam Pembangunan Daerah	
		Peningkatan Kualitas Kelembagaan Agama, Pelayanan Kehidupan Beragama dan Peran Ulama	Pelaksanaan, Penataan dan Pengawasan Produk Halal	
			Sosialisasi Sertifikasi Produk Halal	
Program Prioritas 2: Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah				193.323.429.214
Dinas Tenaga Kerja	Program hubungan industrial	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000
			Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	
Seluruh Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publik	Menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Kecamatan. Rincian Kegiatan dapat dilihat pada Tabel 5.1	Menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Kecamatan. Rincian Sub-Kegiatan dapat dilihat pada Tabel 5.1	372.647.476
Seluruh Kecamatan	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Kecamatan. Rincian Kegiatan dapat dilihat pada Tabel 5.1	Menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Kecamatan. Rincian Sub-Kegiatan dapat dilihat pada Tabel 5.1	255.596.276
Seluruh Kecamatan	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Kecamatan. Rincian Kegiatan dapat dilihat pada Tabel 5.1	Menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Kecamatan. Rincian Sub-Kegiatan dapat dilihat pada Tabel 5.1	5.425.114





OPD	Program	Kegiatan	Sub-kegiatan	Pagu
Seluruh Kecamatan	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Kecamatan. Rincian Kegiatan dapat dilihat pada Tabel 5.1	Menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Kecamatan. Rincian Sub-Kegiatan dapat dilihat pada Tabel 5.1	11.481.088
DPMPTSP	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	107.600.000
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	73.399.743
			Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	
			Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	110.860.717
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	67.177.150
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Penyusunan Profil Kependudukan	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	49.925.159
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Program Pembinaan Perpustakaan	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	1.811.381.015
			Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	





OPD	Program	Kegiatan	Sub-kegiatan	Pagu
			Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	
			Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	
			Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	
			Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	
			Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	8.850.305
			Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Kepegawaian Daerah	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	2.296.253.202
			Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	
			Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	
			Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	
		Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Mutasi ASN	
			Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	
			Pengelolaan Promosi ASN	
		Pengembangan Kompetensi ASN	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	





OPD	Program	Kegiatan	Sub-kegiatan	Pagu
			Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	
			Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pengembangan Kompetensi Teknis	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	642.769.890
		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	
			Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	
DAMKAR	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan NON Kebakaran	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	92.886.332
			Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	





OPD	Program	Kegiatan	Sub-kegiatan	Pagu
SATPOL PP & WH	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	2.551.191.548
			Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	
			Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	
			Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	
		Pengelolaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh	Operasionalisasi Penegakan, Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam	
Penyuluhan dan Sosialisasi Qanun dan Peraturan Perundang-Undangan Syariat Islam				
Pelaksanaan Eksekusi Cambuk sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku				
Inspektorat	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1.418.414.207
			Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	
			Reviu Laporan Kinerja	
			Reviu Laporan Keuangan	
			Pengawasan Desa	





OPD	Program	Kegiatan	Sub-kegiatan	Pagu
			Kerja Sama Pengawasan Internal	
			Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	
		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	
			Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
Inspektorat	Program Perumusan Kebijakan, pendampingan dan Asistensi	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	22.283.750
		Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	
			Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	
			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	
			Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	
Sekretariat Daerah	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	1.578.515.592
			Fasilitasi Bantuan Hukum	
			Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	
		Administrasi Tata Pemerintahan	Penataan Administrasi Pemerintahan	
			Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	
			Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	
		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	
Sekretariat Daerah	Program Perekonomian dan Pembangunan	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1.377.178.202
			Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	
			Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	





OPD	Program	Kegiatan	Sub-kegiatan	Pagu
		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	
Sekretariat DPRK	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	5.685.855.461
			Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	
			Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	
			Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	
		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Pembahasan KUA dan PPAS	
			Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	
			Pembahasan APBD	
			Pembahasan APBD Perubahan	
			Pembahasan Laporan Semester	
			Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	
		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	
			Pengawasan Penggunaan Anggaran	
		Peningkatan Kapasitas DPRD	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	
			Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	
			Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	
			Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	
			Penyusunan Program Kerja DPRD	
		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kunjungan Kerja dalam Daerah	
			Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	
			Pelaksanaan Reses	
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Penyusunan Kode Etik DPRD			
Fasilitasi Tugas DPRD	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah			





OPD	Program	Kegiatan	Sub-kegiatan	Pagu
BAPPEDA	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	2.459.406.087
			Pelaksanaan Konsultasi Publik	
			Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	
			Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	
			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah				
Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah			
BAPPEDA	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	845.999.420
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	





OPD	Program	Kegiatan	Sub-kegiatan	Pagu
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	
BAPPEDA	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	872.339.685
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	
			Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasa di Bidang Teknologi dan Inovasi	
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				
BPKK	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	47.453.239.514





OPD	Program	Kegiatan	Sub-kegiatan	Pagu
		Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA- SKPD	
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA- SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	
			Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	
			Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	
			Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	
			Penatausahaan Pembiayaan Daerah	
			Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	
			Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	





OPD	Program	Kegiatan	Sub-kegiatan	Pagu
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	
			Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	
			Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	
			Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	
			Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	
			Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	
			Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	
			Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	





OPD	Program	Kegiatan	Sub-kegiatan	Pagu
			Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	
			Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	
			Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	
			Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	
			Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	
			Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	
			Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	
			Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	
			Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	
			Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	





OPD	Program	Kegiatan	Sub-kegiatan	Pagu
		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	
BPKK	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyusunan Standar Harga	2.988.286.738
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	
			Penatausahaan Barang Milik Daerah	
			Inventarisasi Barang Milik Daerah	
			Pengamanan Barang Milik Daerah	
			Penilaian Barang Milik Daerah	
			Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	
			Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	
			Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	
			Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Program Pengelolaan Arsip	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	138.179.200
			Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	
			Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	
		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	
			Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	





OPD	Program	Kegiatan	Sub-kegiatan	Pagu
		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	47.251.800
			Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	
		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	
		Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	
			Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	
		Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	
Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)				
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	14.569.000
			Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	
Diskominfotik	Program Pengelolaan	Pengelolaan Informasi dan	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1.098.390.603





OPD	Program	Kegiatan	Sub-kegiatan	Pagu
	Informasi dan Komunikasi Publik	Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik Pelayanan Informasi Publik Layanan Hubungan Media Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	
Diskominfotik	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	505.549.393
Diskominfotik	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengaman Informasi	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	18.127.000
Diskominfotik	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektor	175.002.770





OPD	Program	Kegiatan	Sub-kegiatan	Pagu
SATPOL PP & WH	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.917.395.777
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
Program Prioritas 3: Meningkatkan Penguatan Ekonomi				52.247.562.732
Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	5.000.000
Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	57.083.244
			Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	





OPD	Program	Kegiatan	Sub-kegiatan	Pagu
Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	2.244.464.000
Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	3.148.358.805
			Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	
			Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	
Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	39.262.077
Dinas Tenaga Kerja	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	13.966.758.000
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	
Dinas Tenaga Kerja	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	80.000.000
			Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	
Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	16.125.876.193
			Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	





OPD	Program	Kegiatan	Sub-kegiatan	Pagu
		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	402.534.802
		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
			Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	43.423.298
Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	2.948.262
DPMPTSP	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	5.000.000
DPMPTSP	Program Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	20.123.000





OPD	Program	Kegiatan	Sub-kegiatan	Pagu
DPMPTSP	Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	80.118.164
			Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	
DPMPTSP	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	393.394.000
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong	Program Penataan Desa	Penyelenggaraan Penataan Desa	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	1.142.000.000
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	90.000.000
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	861.900.000
			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	
			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	
			Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	
			Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	
			Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	
			Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	
			Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	





OPD	Program	Kegiatan	Sub-kegiatan	Pagu
			Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1.112.737.472
			Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	
			Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	
			Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	
			Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	
Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan	Program Peningkatan Diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	954.007.000
			Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	





OPD	Program	Kegiatan	Sub-kegiatan	Pagu
		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
Dinas Pangan, Pertanian, kelautan dan Perikanan	Program pengawasan keamanan pangan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	154.654.000
Dinas Pangan, Pertanian, kelautan dan Perikanan	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	319.650.000
		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	
Dinas Pangan, Pertanian, kelautan dan Perikanan	Program Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	3.416.861.506
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
Dinas Pangan, Pertanian, kelautan dan Perikanan	Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	50.038.500
Dinas Pangan, Pertanian, kelautan dan Perikanan	Program pengelolaan perikanan tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	2.515.000.000
			Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	





OPD	Program	Kegiatan	Sub-kegiatan	Pagu
		Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		
Dinas Pangan, Pertanian, kelautan dan Perikanan	Program pengelolaan perikanan budidaya	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	942.120.000
Dinas Pangan, Pertanian, kelautan dan Perikanan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	650.000.000
Dinas Tenaga Kerja	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	50.000.000
Dinas Tenaga Kerja	Program pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	490.000.000
			Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	
Dinas Tenaga Kerja	Program penempatan tenaga kerja	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Perluasan Kesempatan Kerja	30.000.000
		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	
Dinas Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	60.067.850
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	
Dinas Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak	Penyediaan Permakanan	1.454.389.915
			Penyediaan Sandang	
			Penyediaan Alat Bantu	
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	





OPD	Program	Kegiatan	Sub-kegiatan	Pagu
		Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Pemberian Layanan Rujukan	
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Penyediaan Permakanan Penyediaan Sandang Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	
Dinas Sosial	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Rujukan Anak-Anak Terlantar Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.092.466.244





OPD	Program	Kegiatan	Sub-kegiatan	Pagu
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	
Dinas Sosial	Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan	247.326.400
			Penyediaan Sandang	
			Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	
			Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	
			Pelayanan Dukungan Psikososial	
Program Prioritas 4: Mengoptimalkan Kualitas Kesehatan				139.773.468.380
Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	7.407.022.806
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
			Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
			Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
			Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	
			Pengadaan Obat, Vaksin	
			Pengadaan Bahan Habis Pakai	
			Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
			Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	





OPD	Program	Kegiatan	Sub-kegiatan	Pagu
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	
			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	
			Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	
			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	
			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
			Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	
			Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	
			Operasional Pelayanan Puskesmas	





OPD	Program	Kegiatan	Sub-kegiatan	Pagu
			Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	
			Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	
			Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	
			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	
			Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	
RSUD Meuraxa	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	96.696.461.030
			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
			Operasional Pelayanan Rumah Sakit	
Dinas Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	841.438.214
			Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
Dinas Kesehatan	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	285.193.805





OPD	Program	Kegiatan	Sub-kegiatan	Pagu
			Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	
		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	
		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	
		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	
Dinas Kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	832.562.525
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	





OPD	Program	Kegiatan	Sub-kegiatan	Pagu
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pengendalian Program KKBPK	3.710.790.000
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	
Program Prioritas 5: Meningkatkan Pengembangan Infrastruktur dan Penataan Kawasan Permukiman				100.362.578.611
Dinas PUPR	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	19.933.484.999
			Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	
Dinas PUPR	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.678.638.100
			Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	
Dinas PUPR	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	23.262.065.580
			Survey Kondisi Jalan/Jembatan	
			Pembangunan Jalan	
			Rehabilitasi Jalan	
			Pemeliharaan Berkala Jalan	
			Pemeliharaan Rutin Jalan	
Dinas Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	7.384.929.615





OPD	Program	Kegiatan	Sub-kegiatan	Pagu
	Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	
		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	
			Pembangunan Gedung Terminal	
			Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	
		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
			Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
			Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	





OPD	Program	Kegiatan	Sub-kegiatan	Pagu
			Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
			Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	
Dinas Perkim	Program Pengembangan Perumahan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	570.879.380
			Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	
			Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	
		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan	
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	
			Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	
		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	
			Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	
		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	
		Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	
Dinas Perkim	Program Kawasan Permukiman	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan	6.150.032.013





OPD	Program	Kegiatan	Sub-kegiatan	Pagu
		Kawasan Permukiman	Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	
		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	
			Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED)	
			Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	
			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	
			Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	
			Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	
			Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	
Dinas Perkim	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	4.999.846
Dinas Perkim	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	2.065.670.331
			Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	
			Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	
			Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	





OPD	Program	Kegiatan	Sub-kegiatan	Pagu
Dinas Perkim	Program Peningkatan Pelayanan sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	8.075.240
Dinas PUPR	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	13.004.449.253
Dinas PUPR	Program Penataan Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret dalam rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi	13.814.361.066
Dinas PUPR	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	81.189.681
Dinas PUPR	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	999.999.189
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	





OPD	Program	Kegiatan	Sub-kegiatan	Pagu
		Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	
Dinas PUPR	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	8.401.926.114
Dinas PUPR	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	308.426.972
Dinas PUPR	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	434.363.900
BPBD	Program Penanggulangan bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	259.087.332
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	





OPD	Program	Kegiatan	Sub-kegiatan	Pagu
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Penanganan Pasca bencana Kabupaten/Kota	

Sumber : Aplikasi SIPD RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2022, diolah

4.8 Konsistensi Prioritas Pembangunan dengan Program Prioritas Kota Banda Aceh Tahun 2023

Di samping penetapan tema dan prioritas pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2023, juga ditetapkan program prioritas pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2023 dengan memperhatikan pencapaian kinerja Tahun 2022 Triwulan 1 dan proyeksi pencapaian kinerja Tahun 2022. Prioritas pembangunan daerah diharapkan mampu menjawab permasalahan pembangunan daerah. Adapun program prioritas pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2023 dan juga program prioritas pembangunan nasional dan program prioritas Provinsi Aceh dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Untuk mengetahui konsistensi Prioritas Pembangunan dengan program Prioritas Pembangunan Kota Banda Aceh tahun 2023, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:





Tabel 4. 7 Konsistensi Prioritas Pembangunan Kota Banda Aceh dengan Program Prioritas Kota Banda Aceh Tahun 2023

No	Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Keterkaitan		Program	Pagu (Rp.)	OPD Penanggung Jawab
				Permasalahan	Isu Strategis			
I	Prioritas I: Mengoptimalkan Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam	Peningkatan Indeks Kota Syariah (IKS)	100%	Belum Optimalnya Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam	Penguatan Syariat Islam	Program Syariat Islam Aceh	14.003.216.066	Dinas Syariat Islam
						Program Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh	509.458.595	Sekretariat MPU
Total Pagu							<u>14.512.674.661</u>	
II	Prioritas 2: Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah	Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Peningkatan Nilai AKIP	100%	Belum Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah	Program hubungan industrial	250.000.000	Dinas Tenaga Kerja
						Program Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publik	34.452.792	Kecamatan Syiah Kuala
						Program Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publik	31.250.000	Kecamatan Kuta Raja
						Program Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publik	71.397.582	Kecamatan Kuta Alam





No	Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Keterkaitan		Program	Pagu (Rp.)	OPD Penanggung Jawab
				Permasalahan	Isu Strategis			
						Program Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publik	85.677.456	Kecamatan Lueng Bata
						Program Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publik	50.911.735	Kecamatan Ulee Kareng
						Program Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publik	52.778.158	Kecamatan Baiturrahman
						Program Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publik	42.900.325	Kecamatan Banda Raya
						Program Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publik	78.169.800	Kecamatan Meuraxa
						Program Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publik	66.668.500	Kecamatan Jaya Baru
						Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	41.212.649	Kecamatan Syiah Kuala
						Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	57.252.829	Kecamatan Kuta Raja
						Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	58.196.834	Kecamatan Kuta Alam





No	Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Keterkaitan		Program	Pagu (Rp.)	OPD Penanggung Jawab
				Permasalahan	Isu Strategis			
						Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	75.097.181	Kecamatan Lueng Bata
						Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	27.203.550	Kecamatan Ulee Kareng
						Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	30.175.000	Kecamatan Baiturrahman
						Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	31.753.500	Kecamatan Banda Raya
						Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	40.729.613	Kecamatan Meuraxa
						Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	43.080.137	Kecamatan Jaya Baru
						Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	1.000.000	Kecamatan Syiah Kuala
						Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	10.000.000	Kecamatan Kuta Raja
						Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	2.000.000	Kecamatan Kuta Alam





RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA BANDA ACEH TAHUN 2023

No	Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Keterkaitan		Program	Pagu (Rp.)	OPD Penanggung Jawab
				Permasalahan	Isu Strategis			
						Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	10.000.000	Kecamatan Lueng Bata
						Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	2.400.000	Kecamatan Ulee Kareng
						Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	2.000.000	Kecamatan Baiturrahman
						Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	2.000.010	Kecamatan Banda Raya
						Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	2.297.364	Kecamatan Meuraxa
						Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	10.250.000	Kecamatan Jaya Baru
						Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1.000.000	Kecamatan Syiah Kuala
						Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	2.000.000	Kecamatan Kuta Raja
						Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	3.000.000	Kecamatan Kuta Alam





RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA BANDA ACEH TAHUN 2023

No	Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Keterkaitan		Program	Pagu (Rp.)	OPD Penanggung Jawab
				Permasalahan	Isu Strategis			
						Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	10.000.000	Kecamatan Lueng Bata
						Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	10.000.000	Kecamatan Ulee Kareng
						Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	2.000.000	Kecamatan Baiturrahman
						Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	2.000.010	Kecamatan Banda Raya
						Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	2.630.000	Kecamatan Meuraxa
						Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	10.250.000	Kecamatan Jaya Baru
						Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	157.600.000	DPMPSTSP
						Program Pendaftaran Penduduk	73.399.743	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Program Pencatatan Sipil	110.860.717	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	49.925.159	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil





RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA BANDA ACEH TAHUN 2023

No	Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Keterkaitan		Program	Pagu (Rp.)	OPD Penanggung Jawab
				Permasalahan	Isu Strategis			
						Program Pengelolaan Profil Kependudukan	61.407.361	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Program Pembinaan Perpustakaan	1.491.381.015	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
						Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	8.850.305	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
						Program Kepegawaian Daerah	2.296.253.202	BKPSDM
						Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	642.769.890	BKPSDM
						Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan NON Kebakaran	92.886.332	DAMKAR
						Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	2.551.191.548	SATPOL PP & WH
						Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.418.414.207	Inspektorat
						Program Perumusan Kebijakan, pendampingan dan Asistensi	22.283.750	Inspektorat





No	Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Keterkaitan		Program	Pagu (Rp.)	OPD Penanggung Jawab
				Permasalahan	Isu Strategis			
						Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1.578.515.592	Sekretariat Daerah
						Program Perekonomian dan Pembangunan	1.377.178.202	Sekretariat Daerah
						Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	5.685.855.461	Sekretariat DPRK
						Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.459.406.087	BAPPEDA
						Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	845.999.420	BAPPEDA
						Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	872.339.685	BAPPEDA
						Program Pengelolaan Keuangan Daerah	147.453.239.515	BPKK
						Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.988.286.737	BPKK
						Program Pengelolaan Arsip	138.179.200	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
						Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	47.251.800	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan





No	Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Keterkaitan		Program	Pagu (Rp.)	OPD Penanggung Jawab
				Permasalahan	Isu Strategis			
						Program Perizinan Penggunaan Arsip	14.569.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
						Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1.098.390.603	DISKOMINFOTIK
						Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	505.549.393	DISKOMINFOTIK
						Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengaman Informasi	18.127.000	DISKOMINFOTIK
						Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	175.002.770	DISKOMINFOTIK
						Program Penunjang Urusan Pamarintahan Daerah Kabupaten/Kota	17.917.395.777	SATPOL PP & WH
Total Pagu							<u>187.167.175.747</u>	
III	Prioritas 3: Meningkatkan Penguatan Ekonomi	Persentase Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	100%	Berfluktuasinya Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Penguatan Ekonomi dan Sosial	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	23.000.000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
						Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	42.000.000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
						Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	411.700.000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan





No	Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Keterkaitan		Program	Pagu (Rp.)	OPD Penanggung Jawab
				Permasalahan	Isu Strategis			
						Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	6.000.000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
						Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)	37.000.000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
						Program Pengembangan UMKM	30.000.000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
						Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	11.302.022.000	Dinas Tenaga Kerja
						Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	55.000.000	Dinas Tenaga Kerja
						Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	120.000.000	Dinas Tenaga Kerja
						Program Perizinan dan pendaftaran perusahaan	3.000.000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
						Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	16.429.097.561	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
						Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	737.000.000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan





No	Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Keterkaitan		Program	Pagu (Rp.)	OPD Penanggung Jawab
				Permasalahan	Isu Strategis			
						Program Pengembangan Ekspor	6.000.000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
						Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	41.500.000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
						Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri	3.500.000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
						Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	37.000.000	DPMPPTSP
						Program Promosi Penanaman Modal	48.123.000	DPMPPTSP
						Program Pelayanan Penanaman Modal	130.118.164	DPMPPTSP
						Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	433.394.000	DPMPPTSP
						Program Penataan Desa	10.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong
						Program Peningkatan Kerjasama Desa	98.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong
						Program Administrasi Pemerintahan Desa	1.000.800.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong





No	Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Keterkaitan		Program	Pagu (Rp.)	OPD Penanggung Jawab
				Permasalahan	Isu Strategis			
						Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	997.737.472	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong
						Program Peningkatan Diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	584.257.000	Dinas Pangan, Pertanian, kelautan dan Perikanan
						Program penanganan kerawanan pangan	50.800.000	Dinas Pangan, Pertanian, kelautan dan Perikanan
						Program pengawasan keamanan pangan	155.654.000	Dinas Pangan, Pertanian, kelautan dan Perikanan
						Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	103.300.000	Dinas Pangan, Pertanian, kelautan dan Perikanan
						Program Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	3.417.711.506	Dinas Pangan, Pertanian, kelautan dan Perikanan
						Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	151.188.500	Dinas Pangan, Pertanian, kelautan dan Perikanan





RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA BANDA ACEH TAHUN 2023

No	Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Keterkaitan		Program	Pagu (Rp.)	OPD Penanggung Jawab
				Permasalahan	Isu Strategis			
						Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	900.000	Dinas Pangan, Pertanian, kelautan dan Perikanan
						Program Perizinan Usaha Pertanian	200.000	Dinas Pangan, Pertanian, kelautan dan Perikanan
						Program Penyuluhan Pertanian	6.500.000	Dinas Pangan, Pertanian, kelautan dan Perikanan
						Program pengelolaan perikanan tangkap	620.250.000	Dinas Pangan, Pertanian, kelautan dan Perikanan
						Program pengelolaan perikanan budidaya	392.120.000	Dinas Pangan, Pertanian, kelautan dan Perikanan
						Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	500.300.000	Dinas Pangan, Pertanian, kelautan dan Perikanan
						Program Perencanaan Tenaga Kerja	60.000.000	Dinas Tenaga Kerja
						Program pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja	205.000.000	Dinas Tenaga Kerja
						Program penempatan tenaga kerja	185.000.000	Dinas Tenaga Kerja
						Program Pemberdayaan Sosial	60.067.850	Dinas Sosial





No	Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Keterkaitan		Program	Pagu (Rp.)	OPD Penanggung Jawab
				Permasalahan	Isu Strategis			
						Program Rehabilitasi Sosial	1.103.373.915	Dinas Sosial
						Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	1.958.882.560	Dinas Sosial
						Program Penanganan Bencana	169.104.390	Dinas Sosial
Total Pagu							<u>41.732.601.918</u>	
IV	Prioritas 4: Mengoptimalkan Kualitas Kesehatan	Peningkatan Indeks Kualitas Kesehatan	100%	Belum Optimalnya Optimalisasi Peningkatan Kualitas Kesehatan	Optimalisasi Kualitas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	37.407.022.806	Dinas Kesehatan
						Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	96.696.461.030	RSUD Meuraxa
						Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	841.438.214	Dinas Kesehatan
						Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	285.193.805	Dinas Kesehatan
						Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	832.562.525	Dinas Kesehatan





No	Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Keterkaitan		Program	Pagu (Rp.)	OPD Penanggung Jawab
				Permasalahan	Isu Strategis			
						Program Pengendalian Penduduk	55.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
						Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	3.710.790.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
						Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	253.379.016	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Total Pagu							<u>140.081.847.396</u>	
V	Prioritas 5: Meningkatkan Pengembangan Infrastruktur dan Penataan	Persentase Peningkatan Rata-Rata Capaian Layanan	100%	Belum optimalnya akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman	Pengembangan Infrastruktur dan Penataan Kawasan Permukiman	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	19.593.484.999	Dinas PUPR





No	Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Keterkaitan		Program	Pagu (Rp.)	OPD Penanggung Jawab
				Permasalahan	Isu Strategis			
	Kawasan Permukiman	Infrastruktur Perkotaan		Belum Optimalnya Penanganan Kerusakan Jalan		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	3.678.638.100	Dinas PUPR
				Masih Terjadinya Kemacetan Lalu Lintas		Program Penyelenggaraan Jalan	23.262.065.580	Dinas PUPR
				Belum Optimalnya Penataan Kawasan Permukiman		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	7.384.929.615	Dinas Perhubungan
				Adanya Kawasan Banjir Genangan		Program Pengembangan Perumahan	570.879.380	Dinas Perkim
						Program Kawasan Permukiman	6.150.032.013	Dinas Perkim
						Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	4.999.846	Dinas Perkim
						Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	2.065.670.331	Dinas Perkim





No	Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Keterkaitan		Program	Pagu (Rp.)	OPD Penanggung Jawab
				Permasalahan	Isu Strategis			
						Program Peningkatan Pelayanan sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	8.075.240	Dinas Perkim
						Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	13.004.449.253	Dinas PUPR
						Program Penataan Bangunan Gedung	13.814.361.066	Dinas PUPR
						Program Pengembangan Jasa Konstruksi	81.189.676	Dinas PUPR
						Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	999.999.189	Dinas PUPR
						Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	8.401.926.114	Dinas PUPR
						Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	308.426.972	Dinas PUPR
Total Pagu							99.329.127.374	

Sumber: SIPD, diolah, 2022





4.9 Konsistensi Prioritas Pembangunan Aceh dengan Program Prioritas Kota Banda Aceh Tahun 2023

Untuk mengetahui konsistensi Prioritas Pembangunan Aceh dengan program Prioritas Pembangunan Kota Banda Aceh tahun 2022, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. 8 Konsistensi Program Prioritas Aceh dengan Program Prioritas Kota Banda Aceh Tahun 2023

RKP Aceh 2023	RKPD 2023		
	Program Prioritas Provinsi Aceh	Program Prioritas Kota Banda Aceh	Pagu
Program Prioritas Pendukung PA 1 : Memperkuat Kemandirian Pangan, Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif	Program Prioritas Pendukung P-BNA 3: Meningkatkan Penguatan Ekonomi	18.702.842.406	
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	319.650.000	Dinas Pangan, Pertanian, kelautan dan Perikanan
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	50.038.500	Dinas Pangan, Pertanian, kelautan dan Perikanan
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	402.534.802	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Program Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	3.416.861.506	Dinas Pangan, Pertanian, kelautan dan Perikanan
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Program Peningkatan Diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	954.007.000	Dinas Pangan, Pertanian, kelautan dan Perikanan
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Program pengawasan keamanan pangan	154.654.000	Dinas Pangan, Pertanian, kelautan dan Perikanan
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Program pengelolaan perikanan tangkap	2.515.000.000	Dinas Pangan, Pertanian, kelautan dan Perikanan
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Program pengelolaan perikanan budidaya	942.120.000	Dinas Pangan, Pertanian, kelautan dan Perikanan
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	1.112.737.472	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.221.970.602	Dinas Pariwisata
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (Umkm)	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)	3.148.358.805	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan





RKP Aceh 2023	RKPD 2023		
Program Prioritas Provinsi Aceh	Program Prioritas Kota Banda Aceh	Pagu	OPD
Program Pengembangan UMKM	Program Pengembangan UMKM	39.262.077	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	5.000.000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	2.244.464.000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri	2.948.262	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
Program Promosi Penanaman Modal	Program Promosi Penanaman Modal	20.123.000	DPMPSTP
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	393.394.000	DPMPSTP
Program Pemasaran Pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata	1.759.718.380	Dinas Pariwisata
Program Prioritas Pendukung PA 2 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Program Prioritas Pendukung P-BNA 4 : Mengoptimalkan Kualitas Kesehatan	136.869.950.819	
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	37.407.022.806	Dinas Kesehatan
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	96.696.461.030	Dinas Kesehatan
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	832.562.525	Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	841.438.214	Dinas Kesehatan
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.092.466.244	Dinas Sosial
Program Prioritas Pendukung PA 3 : Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan	Program Prioritas Pendukung P-BNA 5 : Meningkatkan Pengembangan Infrastruktur dan Penataan Kawasan Permukiman	104.897.197.348	
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	3.678.638.100	Dinas PUPR





RKP Aceh 2023	RKPD 2023		
Program Prioritas Provinsi Aceh	Program Prioritas Kota Banda Aceh	Pagu	OPD
Program Penyelenggaraan Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	23.262.065.580	Dinas PUPR
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	7.384.929.615	Dinas Perhubungan
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	308.426.972	Dinas PUPR
Program Pengembangan Perumahan	Program Pengembangan Perumahan	570.879.380	Dinas Perkim
Program Kawasan Permukiman	Program Kawasan Permukiman	6.150.032.013	Dinas Perkim
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	999.999.189	Dinas PUPR
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	2.065.670.331	Dinas Perkim
Program Penataan Bangunan Gedung	Program Penataan Bangunan Gedung	13.814.361.066	Dinas PUPR
Program Penataan Pembangunan dan Lingkungannya	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	13.004.449.253	Dinas PUPR
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	3.678.638.100	Dinas PUPR
Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	434.363.900	Dinas PUPR
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	8.401.926.114	Dinas PUPR
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	19.933.484.999	Dinas PUPR
Program Pengendalian Pencemaran/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	428.258.928	DLHK3
Program Penanggulangan Bencana	Program Penanggulangan Bencana	688.187.476	BPBD
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	92.886.332	DPKP





RKP Aceh 2023	RKPD 2023		
Program Prioritas Provinsi Aceh	Program Prioritas Kota Banda Aceh	Pagu	OPD
Program Prioritas Pendukung PA 4 : Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Keistimewaan Aceh	Program Prioritas Pendukung P-BNA 1 : Mengoptimalkan Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam	37.062.222.911	
	Program Prioritas Pendukung P-BNA 2 : Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah	170.476.745.249	
Total		207.538.968.160	
Program Syariat Islam Aceh	Program Syariat Islam Aceh	14.003.216.066	Dinas Syariat Islam
Program Majelis Adat Aceh (MAA)	Program Majelis Adat Aceh (MAA)	198.600.000	Sek. MAA
Program Baitul Mal Aceh	Program Baitul Mal Aceh	22.350.948.250	Baitul Mal
Program Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh	Program Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh	509.458.595	Sekretariat MPU
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	147.453.239.514	BPKK
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.988.286.738	BPKK
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.989.648.149	BPKK
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	22.283.750	Inspektorat
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.418.414.207	Inspektorat
Program Kepegawaian Daerah	Program Kepegawaian Daerah	2.296.253.202	BKPSDM
Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	1.098.390.603	Diskominfo
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	505.549.393	Diskominfo
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	18.127.000	Diskominfo
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	175.002.770	Diskominfo
Program Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.459.406.087	BAPPEDA
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Program Pengelolaan Informasi	67.177.150	Disdukcapil





RKP Aceh 2023	RKPD 2023		
Program Prioritas Provinsi Aceh	Program Prioritas Kota Banda Aceh	Pagu	OPD
	Administrasi Kependudukan		
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	2.551.191.548	SATPOL PP & WH
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1.120.996.800	Badan Kesbangpol
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	103.232.930	Badan Kesbangpol
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	667.989.680	Badan Kesbangpol
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	5.483.745.260	Badan Kesbangpol
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	57.810.468	Badan Kesbangpol

Sumber : RKPA, diolah, 2022





4.10 Konsistensi Prioritas Pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2023 Pendukung Prioritas Nasional Tahun 2023

Berikut akan diuraikan konsistensi prioritas pembangunan Kota Banda Aceh dengan pendukung prioritas nasional beserta rencana alokasi anggaran setiap programnya yang dapat dilihat pada tabel 4.9 dibawah ini:

Tabel 4.9 Konsistensi Program Prioritas Kota Banda Aceh dengan Program Prioritas Nasional Tahun 2023

RKP Nasional 2023		RKPD 2023		
Prioritas Nasional/Program Prioritas Nasional	Indikator Kinerja	Program Prioritas Kota Banda Aceh	Pagu	OPD
Program Prioritas Pendukung		Program Prioritas Pendukung P-BNA 3: Meningkatkan Penguatan Ekonomi	47.062.999.178	
PN 1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan				
Program Prioritas Pendukung				
PN 2 : Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan				
Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan	Meningkatnya ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	954.007.000	Dinas Pangan, Pertanian, kelautan dan Perikanan
		Program pengawasan keamanan pangan	154.654.000	Dinas Pangan, Pertanian, kelautan dan Perikanan
Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan, dan Kelautan	Meningkatnya pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan	Program pengelolaan perikanan tangkap	2.515.000.000	Dinas Pangan, Pertanian, kelautan dan Perikanan
		Program pengelolaan perikanan budidaya	942.120.000	Dinas Pangan, Pertanian, kelautan dan Perikanan





RKP Nasional 2023		RKPD 2023		
Prioritas Nasional/Program Prioritas Nasional	Indikator Kinerja	Program Prioritas Kota Banda Aceh	Pagu	OPD
Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi	Menguatnya pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	16.125.876.193	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	402.534.802	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.221.970.602	Dinas Pariwisata
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)	3.148.358.805	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Program Pengembangan UMKM	39.262.077	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	5.000.000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	2.244.464.000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	393.394.000	DPMPSTP
		Program Pemasaran Pariwisata	1.759.718.380	Dinas Pariwisata
		Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi	Menguatnya kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen





RKP Nasional 2023		RKPD 2023		
Prioritas Nasional/Program Prioritas Nasional	Indikator Kinerja	Program Prioritas Kota Banda Aceh	Pagu	OPD
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)	3.148.358.805	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Program Pengembangan UMKM	39.262.077	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	Meningkatnya ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	393.394.000	DPMPSTP
		Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	43.423.298	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri	2.948.262	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor riil, dan Industrialisasi	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	Program Peningkatan Diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	954.007.000	Dinas Pangan, Pertanian, kelautan dan Perikanan
		Program Penempatan Tenaga Kerja	30.000.000	Dinas Tenaga Kerja
		Program Perencanaan Tenaga Kerja	50.000.000	Dinas Tenaga Kerja
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	490.000.000	Dinas Tenaga Kerja
		Program Pelayanan Penanaman Modal	80.118.164	DPMPSTP





RKP Nasional 2023		RKPD 2023		
Prioritas Nasional/Program Prioritas Nasional	Indikator Kinerja	Program Prioritas Kota Banda Aceh	Pagu	OPD
		Program Promosi Penanaman Modal	20.123.000	DPMPSTP
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	5.000.000	DPMPSTP
Pembangunan Wilayah Sumatera	Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Sumatera	Program Peningkatan Diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	954.007.000	Dinas Pangan, Pertanian, kelautan dan Perikanan
		Program pengawasan keamanan pangan	154.654.000	Dinas Pangan, Pertanian, kelautan dan Perikanan
		Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	319.650.000	Dinas Pangan, Pertanian, kelautan dan Perikanan
		Program Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	3.416.861.506	Dinas Pangan, Pertanian, kelautan dan Perikanan
		Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	50.038.500	Dinas Pangan, Pertanian, kelautan dan Perikanan
		Program pengelolaan perikanan tangkap	2.515.000.000	Dinas Pangan, Pertanian, kelautan dan Perikanan
		Program pengelolaan perikanan budidaya	942.120.000	Dinas Pangan, Pertanian, kelautan dan Perikanan
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	650.000.000	Dinas Pangan, Pertanian, kelautan dan Perikanan





RKP Nasional 2023		RKPD 2023		
Prioritas Nasional/Program Prioritas Nasional	Indikator Kinerja	Program Prioritas Kota Banda Aceh	Pagu	OPD
		Program Pemberdayaan Sosial	60.067.850	Dinas Sosial
		Program Rehabilitasi Sosial	1.454.389.915	Dinas Sosial
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	1.092.466.244	Dinas Sosial
		Program Penanganan Bencana	247.326.400	Dinas Sosial
Program Prioritas Pendukung		Program Prioritas Pendukung P-BNA 4 : Mengoptimalkan Kualitas Kesehatan	141.253.019.492	
PN 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing				
Program Prioritas Pendukung				
PN 4 : Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan				
Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda	Menguatnya perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan, pemberdayaan perempuan di ekonomi, politik, dan ketenagakerjaan, serta partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, organisasi, berwirausaha, dan pencegahan perilaku berisiko	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	78.705.852	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	3.710.790.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana





RKP Nasional 2023		RKPD 2023		
Prioritas Nasional/Program Prioritas Nasional	Indikator Kinerja	Program Prioritas Kota Banda Aceh	Pagu	OPD
Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing	Meningkatnya produktivitas dan daya saing	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	841.438.214	Dinas Kesehatan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	832.562.525	Dinas Kesehatan
		Program Pengendalian Penduduk	55.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	253.379.016	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial	Menguatnya pelaksanaan perlindungan sosial dalam menjangkau penduduk miskin dan kelompok rentan	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	1.092.466.244	Dinas Sosial
Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, melalui peningkatan kapasitas sistem kesehatan di seluruh wilayah	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	37.407.022.806	Dinas Kesehatan
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	96.696.461.030	RSUD Meuraxa





RKP Nasional 2023		RKPD 2023		
Prioritas Nasional/Program Prioritas Nasional	Indikator Kinerja	Program Prioritas Kota Banda Aceh	Pagu	OPD
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	285.193.805	Dinas Kesehatan
Program Prioritas Pendukung		Program Prioritas Pendukung P-BNA 5 : Meningkatkan Pengembangan Infrastruktur dan Penataan Kawasan Permukiman	82.016.831.224	
PN 5 :Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar				
Program Prioritas Pendukung				
PN 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim				
Pembangunan Rendah Karbon	Meningkatnya capaian penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor energi, lahan, limbah, IPPU, serta pesisir dan kelautan (%)	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	434.363.900	Dinas PUPR
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	3.678.638.100	Dinas PUPR
Infrastruktur Pelayanan Dasar	Meningkatnya layanan keselamatan dan keamanan transportasi	Program Penyelenggaraan Jalan	23.262.065.580	Dinas Perhubungan
	Meningkatnya layanan keselamatan dan keamanan transportasi	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	7.384.929.615	Dinas Perhubungan
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau	Program Pengembangan Perumahan	570.879.380	Dinas Perkim
	Meningkatnya layanan pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan	Program Kawasan Permukiman	6.150.032.013	Dinas Perkim





RKP Nasional 2023		RKPD 2023		
Prioritas Nasional/Program Prioritas Nasional	Indikator Kinerja	Program Prioritas Kota Banda Aceh	Pagu	OPD
	Meningkatnya optimalisasi waduk multiguna dan modernisasi irigasi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	308.426.972	Dinas PUPR
Infrastruktur Ekonomi	Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi yang layak dan aman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	2.065.670.331	Dinas Perkim
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau	Program Peningkatan Pelayanan sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	8.075.240	Dinas Perkim
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	13.004.449.253	Dinas PUPR
Infrastruktur Perkotaan	Meningkatnya Infrastruktur Wilayah	Program Penataan Bangunan Gedung	13.814.361.066	Dinas PUPR
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	81.189.676	Dinas PUPR
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	999.999.189	Dinas PUPR
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	8.401.926.114	Dinas PUPR
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas air, kualitas air laut, kualitas udara, serta kualitas tutupan lahan dan ekosistem gambut	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	1.163.637.319	DLHK3





RKP Nasional 2023		RKPD 2023		
Prioritas Nasional/Program Prioritas Nasional	Indikator Kinerja	Program Prioritas Kota Banda Aceh	Pagu	OPD
Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	Berkurangnya potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan bahaya iklim, serta meningkatnya kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat	Program Penanggulangan Bencana	688.187.476	BPBD
Program Prioritas Pendukung		Program Prioritas Pendukung P-BNA 1 : Mengoptimalkan Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam	37.062.222.911	
PN 7: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		Program Prioritas Pendukung P-BNA 2 : Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah	162.718.569.546	
		Jumlah Pagu	199.780.792.457	
Konsolidasi Demokrasi	Terwujudnya Stabilitas Politik yang Kondusif serta Komunikasi Publik yang Efektif, Integratif, dan Partisipatif	Program Syariat Islam Aceh	14.003.216.066	Dinas Syariat Islam
		Program Majelis Adat Aceh (MAA)	198.600.000	Sek. MAA
		Program Baitul Mal Aceh	22.350.948.250	Baitul Mal
		Program Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh	509.458.595	Sekretariat MPU
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik melalui perbaikan Tata Kelola dan Birokrasi	Program Hubungan Industrial	250.000.000	Dinas Tenaga Kerja





RKP Nasional 2023		RKPD 2023		
Prioritas Nasional/Program Prioritas Nasional	Indikator Kinerja	Program Prioritas Kota Banda Aceh	Pagu	OPD
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	147.453.239.514	BPKK
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.988.286.738	BPKK
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	22.283.750	Inspektorat
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.418.414.207	Inspektorat
		Program Penunjang urusan Pemerintahan daerah kabupaten/Kota	631.908.352	Sekretariat Daerah
		Program Kepegawaian Daerah	2.296.253.202	BKPSDM
		Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	1.098.390.603	Diskominfo
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	505.549.393	Diskominfo
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	18.127.000	Diskominfo
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	175.002.770	Diskominfo





RKP Nasional 2023		RKPD 2023		
Prioritas Nasional/Program Prioritas Nasional	Indikator Kinerja	Program Prioritas Kota Banda Aceh	Pagu	OPD
		Program Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.459.406.087	BAPPEDA
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	67.177.150	Disdukcapil
		Program Pencatatan Sipil	110.860.717	Disdukcapil
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	107.600.000	DPMPSTP
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.989.648.149	BPKK
Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	Terjaganya Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	5.425.114	Kecamatan
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1.120.996.800	Badan Kesbangpol

Sumber : RKP Nasional Tahun 2022, RPD Tahun 2023, SIPD





Selain program prioritas pembangunan yang telah ditetapkan sesuai tabel 4.5 dalam pencapaian visi dan misi Walikota, terdapat program-program pendukung masing-masing tujuan tersebut seperti tercantum dalam tabel 4.10 berikut:

Tabel 4. 10 Program Pembangunan Daerah Tahun 2023

NO	Tujuan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Target 2023	OPD Penanggung Jawab
1	Mengoptimalkan Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam	Program Syariat Islam Aceh	Indeks Kota Syariah (IKS)	78.27	Dinas Syariat Islam
		Program Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh	Persentase meningkatnya kapasitas dan peran ulama	100	Sekretariat MPU
2	Meningkatkan Kualitas Demokrasi dan Ketenteraman Umum	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Pelaksanaan Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	90	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	Kecamatan Kuta Alam
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	Kecamatan Lueng Bata
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	Kecamatan Ulee Kareng
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	Kecamatan Meuraxa
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	Kecamatan Kuta Raja
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	Kecamatan Syiah Kuala
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	Kecamatan Syiah Kuala





NO	Tujuan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Target 2023	OPD Penanggung Jawab
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	Kecamatan Baiturrahman
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	Kecamatan Banda Raya
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	Kecamatan Jaya Baru
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	85	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	85	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Program penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Peningkatan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	85	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	85	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
3	Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah	Program hubungan industrial	Persentase pembinaan terhadap kelembagaan dan sarana hubungan industrial di perusahaan	30	Dinas Tenaga Kerja
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publik	Persentase meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	100	Kecamatan Syiah Kuala
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publik	Persentase meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	100	Kecamatan Kuta Raja





NO	Tujuan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Target 2023	OPD Penanggung Jawab
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publik	Persentase meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	100	Kecamatan Kuta Alam
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publik	Persentase meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	100	Kecamatan Lueng Bata
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publik	Persentase meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	100	Kecamatan Ulee Kareng
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publik	Persentase meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	100	Kecamatan Baiturrahman
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publik	Persentase meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan		Kecamatan Banda Raya
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publik	Persentase meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	100	Kecamatan Meuraxa
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publik	Persentase meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	100	Kecamatan Jaya Baru
		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100	Kecamatan Syiah Kuala
		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100	Kecamatan Kuta Raja
		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100	Kecamatan Baiturrahman
		Program pemberdayaan	Persentase Pemberdayaan	100	Kecamatan Banda Raya





NO	Tujuan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Target 2023	OPD Penanggung Jawab
		masyarakat desa dan kelurahan	masyarakat desa dan kelurahan		
		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100	Kecamatan Meuraxa
		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100	Kecamatan Jaya Baru
		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100	Kecamatan Ulee Kareng
		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100	Kecamatan Kuta Alam
		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100	Kecamatan Lueng Bata
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	100	Kecamatan Syiah Kuala
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	Kecamatan Meuraxa
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	Kecamatan Baiturrahman
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	Kecamatan Banda Raya
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	Kecamatan Kuta Raja
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	Kecamatan Kuta Alam
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	Kecamatan Ulee Kareng
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	Kecamatan Lueng Bata





NO	Tujuan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Target 2023	OPD Penanggung Jawab
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	Kecamatan Jaya Baru
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	Kecamatan Syiah Kuala
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	Kecamatan Kuta Raja
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	Kecamatan Baiturrahman
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	Kecamatan Meuraxa
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	Kecamatan Banda Raya
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	Kecamatan Kuta Alam
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	Kecamatan Ulee Kareng
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	Kecamatan Lueng Bata
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	Kecamatan Jaya Baru
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase peningkatan Pengunjung MPP	100	DPMPTSP
		Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pencatatan Sipil	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pemenuhan dan Penyajian Informasi	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil





NO	Tujuan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Target 2023	OPD Penanggung Jawab
			Administrasi Kependudukan		
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Profil Kependudukan	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Pembinaan Perpustakaan	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Persentase Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Program Kepegawaian Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Dan Data Kepegawaian Asn	100	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pengembangan Kompetensi Asn	100	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan NON Kebakaran	Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan NON Kebakaran	100	DAMKAR
		Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	SATPOL PP & WH
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Pengawasan yang diselenggarakan secara optimal	100	Inspektorat
		Program Perumusan Kebijakan, pendampingan dan Asistensi	Persentase OPD yang menerapkan SPIP secara memadai minimal level 3 dari skala 5	100	Inspektorat
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Implementasi Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100	Sekretariat Daerah
		Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Implementasi Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan	100	Sekretariat Daerah





NO	Tujuan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Target 2023	OPD Penanggung Jawab
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase terlaksananya tugas dan fungsi DPRD	100	Sekretariat DPRK
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Kegiatan Pembangunan Daerah yang terlaksana sesuai dengan Dokumen Perencanaan	100	BAPPEDA
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100	BAPPEDA
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan daerah	100	BAPPEDA
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase tertibnya pengelolaan keuangan sesuai dengan perundang-undangan	100	BPKK
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase tertibnya pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan perundang-undangan	100	BPKK
		Program Pengelolaan Arsip	Persentase Pengelolaan Arsip	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase Pelaksanaan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Program Perizinan Penggunaan Arsip	Persentase Perizinan Penggunaan Arsip yang dikeluarkan	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase terlaksananya diseminasi informasi kepada masyarakat	100	Diskominfo
		Program Aplikasi Informatika	Persentase terpenuhinya layanan infrastruktur dan Aplikasi informatika	100	Diskominfo
		Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengaman Informasi	Persentase penyelenggaraan Persandian untuk Pengaman Informasi	100	Diskominfo





NO	Tujuan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Target 2023	OPD Penanggung Jawab
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase terpenuhinya database Statistik Sektoral Daerah	100	Diskominfotik
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat daerah	100	SATPOL PP & WH
4	Mengoptimalkan Kualitas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Terakreditasi	70.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Tersedianya Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	100.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan berkualifikasi akademik minimal S1/D4 dan bersertifikasi pendidik	94.86	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase peningkatan penerbitan izin penyelenggaraan satuan pendidikan milik masyarakat	77.68	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	Persentase sekolah yang melaksanakan pengembangan bahasa dan sastra	40.65	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		Program Pendidikan Dayah	Persentase Dayah yang Terakreditasi	76.32%	Dinas Pendidikan Dayah
		Program Penyelenggaraan Majelis Pendidikan Aceh	Persentase kebijakan yang dihasilkan terkait pengembangan mutu pendidikan Aceh	100	Sekretariat MPD
5	Mengoptimalkan Kualitas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Peningkatan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	90	Dinas Kesehatan
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Peningkatan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan	100	RSUD Meuraxa





NO	Tujuan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Target 2023	OPD Penanggung Jawab
			Upaya Kesehatan Masyarakat		
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	95	Dinas Kesehatan
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Pemenuhan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	84	Dinas Kesehatan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	100	Dinas Kesehatan
		Program Pengendalian Penduduk	Persentase Pengendalian Penduduk	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
6	Meningkatkan Penguatan Ekonomi dan Sosial	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Peningkatan Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	75	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Peningkatan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	80	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan





NO	Tujuan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Target 2023	OPD Penanggung Jawab
		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Peningkatan penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	80	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Peningkatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	80	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi	80	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	80	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Program Pengembangan UMKM	Persentase Peningkatan Pengembangan UMKM	80	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase gampong yang memiliki minimal satu produk industri kecil/menengah	100	Dinas Tenaga Kerja
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase industri yang mendapatkan izin usaha Industri Kabupaten/Kota	100	Dinas Tenaga Kerja
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Jumlah Penataan IKM	100	Dinas Tenaga Kerja
		Program Perizinan dan pendaftaran perusahaan	Persentase Penerbitan Rekomendasi Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	80	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase meningkatnya sarana distribusi perdagangan	80	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Peningkatan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	80	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Program Pengembangan Ekspor	Persentase Peningkatan Pengembangan Ekspor	80	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan





NO	Tujuan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Target 2023	OPD Penanggung Jawab
		Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Peningkatan Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	80	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri	Persentase Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	80	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Pengembangan Iklim Penanaman Modal	100	DPMPTSP
		Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Promosi Penanaman Modal	100	DPMPTSP
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat	100	DPMPTSP
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Nilai Penanaman Modal	100	DPMPTSP
		Program Penataan Desa	Persentase Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Gampong yang baik	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong
		Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Kerjasama antar gampong dan pihak ketiga yang terbentuk	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase gampong yang memiliki tata kelola pemerintahan gampong yang baik	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat yang baik	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong
		Program Peningkatan Diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Persentase Deversifikasi Jenis Pangan Baru	100	Dinas Pangan, Pertanian, kelautan dan Perikanan
		Program penanganan kerawanan pangan	Jumlah Gampong lokasi rawan pangan yang ditangani sesuai FSVA	100	Dinas Pangan, Pertanian, kelautan dan Perikanan
		Program pengawasan keamanan pangan	Pangan yang Memenuhi syarat	100	Dinas Pangan, Pertanian, kelautan dan Perikanan





NO	Tujuan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Target 2023	OPD Penanggung Jawab
		Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase pemamfaatan sarana pertanian	40	Dinas Pangan, Pertanian, kelautan dan Perikanan
		Program Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentase prasarana pertanian	30	Dinas Pangan, Pertanian, kelautan dan Perikanan
		Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase pengendalian kesehatan hewan dan Kesmavet	50	Dinas Pangan, Pertanian, kelautan dan Perikanan
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Pengendalian dan Penanggulanagn Bencana Pertanian	50	Dinas Pangan, Pertanian, kelautan dan Perikanan
		Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase perizinan usaha pertanian	50	Dinas Pangan, Pertanian, kelautan dan Perikanan
		Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningkatan Penyuluh Pertanian / Perkebunan	25	Dinas Pangan, Pertanian, kelautan dan Perikanan
		Program pengelolaan perikanan tangkap	Persentase jumlah wilayah penangkapan	25	Dinas Pangan, Pertanian, kelautan dan Perikanan
		Program pengelolaan perikanan budidaya	Persentase Pengelolaan Perikanan Budidaya	25	Dinas Pangan, Pertanian, kelautan dan Perikanan
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Olahan Perikanan	25	Dinas Pangan, Pertanian, kelautan dan Perikanan
		Program Perencanaan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Daerah	1	Dinas Tenaga Kerja
		Program pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja	Persentase peserta pelatihan yang bekerja	100	Dinas Tenaga Kerja
		Program penempatan tenaga kerja	Persentase jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	40	Dinas Tenaga Kerja
		Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Sosial	100	Dinas Sosial
		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Peningkatan Rehabilitasi Sosial	100	Dinas Sosial





NO	Tujuan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Target 2023	OPD Penanggung Jawab
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Peningkatan Perlindungan Dan Jaminan Sosial	100	Dinas Sosial
		Program Penanganan Bencana	Persentase Peningkatan Penanganan Bencana	100	Dinas Sosial
7	Meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	90	Dinas Pariwisata
		Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Meningkatnya Pemasaran Pariwisata	90	Dinas Pariwisata
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	85	Dinas Pariwisata
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	85	Dinas Pariwisata
8	Mengoptimalkan Upaya Pelestarian Budaya	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Pengembangan Kebudayaan	43.50	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional	62.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		Program Pembinaan Sejarah	Persentase Pembinaan Sejarah	62.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	75.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase pengelolaan koleksi museum secara digital	14.12	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		Program Majelis Adat Aceh (MAA)	Persentase kebijakan yang dihasilkan terkait Pelestarian Adat Aceh	100	Sekretariat MAA
9	Meningkatkan Pengembangan Infrastruktur dan	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Meningkatnya Layanan Air Minum	92.07	Dinas PUPR





NO	Tujuan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Target 2023	OPD Penanggung Jawab
	Penataan Kawasan Permukiman	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Meningkatnya Layanan Air Limbah	87.61	Dinas PUPR
		Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Meningkatnya Kualitas Kontruksi Jalan sesuai Spesifikasi	95.75	Dinas PUPR
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase layanan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	100	Dinas Perhubungan
		Program Pengembangan Perumahan	Persentase peningkatan pengembangan perumahan	100	Dinas Perkim
		Program Kawasan Permukiman	Persentase Pengurangan Kawasan Permukiman kumuh	100	Dinas Perkim
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Presentase Peningkatan Kualitas Perumahan dan Lingkungan Permukiman Kumuh	100	Dinas Perkim
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	100	Dinas Perkim
		Program Peningkatan Pelayanan sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100	Dinas Perkim
		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Kawasan Strategis Yang Tertata	31	Dinas PUPR
		Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Meningkatnya Penataan Bangunan	84.07	Dinas PUPR
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Meningkatnya Pengembangan jasa Konstruksi	56	Dinas PUPR
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Tertatanya Ruang yang Sesuai RTRW/RRTR	81.37	Dinas PUPR





NO	Tujuan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Target 2023	OPD Penanggung Jawab
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Meningkatnya Kualitas Saluran Drainase/ Gorong-gorong yang Dibangun/Dipelihara	82.03	Dinas PUPR
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Cakupan Luas Area Pengendalian Banjir	44.09	Dinas PUPR
10	Mengoptimalkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Peningkatan Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase Peningkatan Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		Program Perlindungan Perempuan	Persentase Peningkatan Perlindungan Perempuan	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Persentase Peningkatan Pemenuhan Hak Anak (PHA)	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana





NO	Tujuan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Target 2023	OPD Penanggung Jawab
		Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Peningkatan Perlindungan Khusus Anak	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
11	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Tata Kelola RTH, dan Mitigasi Bencana	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Sampah Terkelola	97.5	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota
		Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	91	Dinas PUPR
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (kehati)	Persentase Luasan RTH	14.365	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Persentase Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	100	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Penyusunan Dokumen RPPLH	100	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota
		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Pelanggaran Usaha/Kegiatan terhadap izin lingkungan/PPLH yang diterbitkan	18	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota
		Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait Dengan PPLH	Persentase Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	100	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota





NO	Tujuan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Target 2023	OPD Penanggung Jawab
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Diberi Diklat Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	65	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	100	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota
		Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penanggulangan dan Penanganan Bencana	100	BPBD
12	Mengoptimalkan Pemberdayaan Pemuda dan Pembinaan Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	100	Dinas Pemuda Dan Olah Raga
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Daya saing Keolahragaan	95	Dinas Pemuda Dan Olah Raga
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	100	Dinas Pemuda Dan Olah Raga
13	Meningkatkan Sumber Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	40.07	BPKK
		Program Baitul Mal	Persentase Pelaksanaan Baitul Mal	100	Sek. Baitul Mal

Sumber : RPD Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026





BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan serta mewujudkan Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Strategi Pembangunan Pemerintah Kota Banda Aceh, ditetapkan program dan kegiatan pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2023 sesuai dengan arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan serta mewujudkan implementasi program prioritas pembangunan sesuai dengan RPD Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 dan dinamika pembangunan. Penyusunan perencanaan program pembangunan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, sebagaimana yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Adapun anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2023 diperkirakan sebesar Rp. 1.303.088.344.063,- yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tak Terduga, Anggaran yang digunakan untuk membiayai pembelanjaan tersebut direncanakan melalui proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp. 1.303.088.344.063,-. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2023 dan prakiraan maju rencana Tahun 2024 pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menurut urusan ditampilkan pada Tabel 5.1 berikut:



Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
										Nasional	Daerah							
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat daerah	100 %		0 %	100 %	3,512,991,724						100 %	3,714,435,844				
1 01 01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	100 %		0 %	100 %	24,954,968					100 %	24,954,968				
1	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	24,954,968	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Mibo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kantor Dinas Pendidikan Dayah	5 Dokumen	24,954,968	Dinas Pendidikan Dayah
1 01 01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	3,023,276,918					100 %	3,418,476,918				
1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21 Orang/bulan	2,860,976,918	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Mibo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pegawai Dinas Pendidikan Dayah	21 Orang/bulan	3,270,576,918	Dinas Pendidikan Dayah
1	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				5 Dokumen	162,300,000	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Mibo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pegawai Dinas Pendidikan Dayah	5 Dokumen	147,900,000	Dinas Pendidikan Dayah
1 01 01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	13,750,000						100 %	13,750,000			
1	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				24 Paket	13,750,000	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Mibo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pegawai Dinas Pendidikan Dayah	24 Paket	13,750,000	Dinas Pendidikan Dayah
1 01 01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat daerah	100 %		0 %	100 %	173,829,508						100 %	106,155,515			
1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	2,402,871	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Mibo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kantor Dinas Pendidikan Dayah	10 Paket	2,402,871	Dinas Pendidikan Dayah
1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Paket	68,749,253	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Mibo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kantor Dinas Pendidikan Dayah	15 Paket	43,565,918	Dinas Pendidikan Dayah
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	10,186,726	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Mibo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kantor Dinas Pendidikan Dayah	7 Paket	10,186,726	Dinas Pendidikan Dayah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	92,490,658	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Mibo			Kantor Dinas Pendidikan Dayah	10 Laporan	50,000,000	Dinas Pendidikan Dayah	
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %		0 %	100 %	25,000,000					100 %	20,000,000		
1.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	25,000,000	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Mibo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kantor Dinas Pendidikan Dayah	1 Unit	20,000,000	Dinas Pendidikan Dayah	
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	100 %		0 %	100 %	97,585,494					100 %	83,003,607		
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	39,950,000	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Mibo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kantor Dinas Pendidikan Dayah	12 Laporan	39,950,000	Dinas Pendidikan Dayah	
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	57,635,494	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Mibo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kantor Dinas Pendidikan Dayah	12 Laporan	43,053,607	Dinas Pendidikan Dayah	
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %		0 %	100 %	154,594,836					100 %	48,094,836		
1.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				0 Unit 2 Unit	19,511,000	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Mibo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kantor Dinas Pendidikan Dayah	0 Unit 2 Unit	18,011,000	Dinas Pendidikan Dayah	
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	130,000,000	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Mibo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kantor Dinas Pendidikan Dayah	1 Unit	25,000,000	Dinas Pendidikan Dayah	
1.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				24 Unit	5,083,836	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Mibo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kantor Dinas Pendidikan Dayah	24 Unit	5,083,836	Dinas Pendidikan Dayah	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat daerah	100 %		0 %	100 %	1,999,521,418						100 %	2,103,279,127	
1 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	100 %		0 %	100 %	24,319,500						100 %	11,577,155	
1 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	24,319,500	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Peunayong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Sekretariat MPD	5 Dokumen	11,577,155	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
1 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	1,772,911,268						100 %	1,889,411,322	
1 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				108 Orang/bulan	987,211,268	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Peunayong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Sekretariat MPD	108 Orang/bulan	1,103,711,322	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
1 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	785,700,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Peunayong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Sekretariat MPD	1 Dokumen	785,700,000	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
1 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	8,800,000						100 %	8,800,000	
1 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				1 Paket	8,800,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Peunayong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Sekretariat MPD	1 Paket	8,800,000	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
1 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	62,792,650						100 %	62,792,650	
1 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2,476,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Peunayong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Sekretariat MPD	1 Paket	2,476,000	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
1 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	30,000,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Peunayong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Sekretariat MPD	1 Paket	30,000,000	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	10,316,650	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Peunayong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Sekretariat MPD	1 Paket	10,316,650	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	20,000,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Peunayong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Sekretariat MPD	4 Laporan	20,000,000	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		0 %	100 %	88,910,000						100 %	88,910,000	
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	36,600,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Peunayong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Sekretariat MPD	1 Laporan	36,600,000	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	52,310,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Peunayong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Sekretariat MPD	1 Laporan	52,310,000	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		0 %	100 %	41,788,000						100 %	41,788,000	
1.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	28,605,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Peunayong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Sekretariat MPD	6 Unit	28,605,000	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	3,000,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Peunayong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Sekretariat MPD	1 Unit	3,000,000	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
1.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire				12 Unit	10,183,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Peunayong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Sekretariat MPD	12 Unit	10,183,000	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
1.01.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN MAJELIS PENDIDIKAN ACEH	Persentase kebijakan yang dihasilkan terkait pengembangan mutu pendidikan Aceh	100 %		0 %	100 %	187,257,709						100 %	150,000,000	
1.01.08.7.01	Penyelenggaraan Kebijakan Pendidikan Aceh	Persentase kebijakan pemerintah di bidang pendidikan yang di hasilkan	100 %		0 %	100 %	10,700,516						100 %	10,700,516	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.08.7.01.01	Penetapan Standar Pendidikan Aceh	Jumlah Standar Pendidikan Aceh Tersusun				1 Dokumen	5,350,258	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Peunayong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Satuan Pendidikan	1 Dokumen	5,350,258	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
1.01.08.7.01.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Aceh	Jumlah Satuan Pendidikan yang Telah Menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Aceh				2 Satuan Pendidikan	5,350,258	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Peunayong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Satuan Pendidikan	2 Satuan Pendidikan	5,350,258	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
1.01.08.7.03	Penyelenggaraan Kurikulum dan Pengajaran Pendidikan Aceh	Persentase Penyelenggaraan Kurikulum dan Pengajaran Pendidikan Aceh yang diselenggarakan	100 %		0 %	100 %	43,705,901						100 %	6,448,192	
1.01.08.7.03.01	Penyusunan Kurikulum Aceh yang Islami untuk Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Jumlah Kurikulum Aceh yang Islami untuk Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang Tersusun				1 Dokumen	38,355,643	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Peunayong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Satuan Pendidikan	1 Dokumen	0	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
1.01.08.7.03.02	Pengawasan Kurikulum Pendidikan Agama pada Sekolah Umum dan Madrasah	Jumlah Dokumen Pengawasan Kurikulum Pendidikan Agama pada Sekolah Umum dan Madrasah				1 Dokumen	5,350,258	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Peunayong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Satuan Pendidikan	1 Dokumen	6,448,192	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
1.01.08.7.05	Penyelenggaraan Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh	Persentase Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh yang diselenggarakan	100 %		0 %	100 %	132,851,292						100 %	132,851,292	
1.01.08.7.05.01	Penyediaan Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik pada Sekolah/Madrasah dan Dayah yang Berskala Provinsi	Jumlah Peserta Didik pada Sekolah/Madrasah dan Dayah yang Berskala Kabupaten/Kota yang Menerima Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar				20 Peserta Didik	5,350,258	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Peunayong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Satuan Pendidikan, Guru dan Peserta Didik	20 Peserta Didik	5,350,258	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
1.01.08.7.05.02	Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang Telah Disupervisi dan Difasilitasi Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh				2 Satuan Pendidikan	115,800,518	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Peunayong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Satuan Pendidikan, Guru dan Peserta Didik	2 Satuan Pendidikan	115,800,518	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
1.01.08.7.05.03	Evaluasi Pencapaian Standar Pendidikan Aceh pada Setiap Satuan Pendidikan di Aceh	Jumlah Satuan Pendidikan di Aceh yang Dievaluasi Pencapaian Standar Pendidikannya				2 Satuan Pendidikan	6,350,258	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Peunayong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Satuan Pendidikan, Guru dan Peserta Didik	2 Satuan Pendidikan	6,350,258	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.08.7.05.04	Penilaian Pencapaian Standar Pendidikan Aceh dan Standar Pelayanan Minimal pada Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang Telah Dilakukan Penilaian Terkait Pencapaian Standar Pendidikan Aceh dan Standar Pelayanan Minimal				2 Satuan Pendidikan	5,350,258	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Peunayong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Satuan Pendidikan, Guru dan Peserta Didik	2 Satuan Pendidikan	5,350,258	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						308,027,198,548							290,070,841,469	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat daerah	100 %		0 %	100 %	214,310,903,289						100 %	214,362,616,447	
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	100 %		0 %	100 %	48,122,921						100 %	48,122,921	
1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	48,122,921	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kota Baru		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh	3 Dokumen	48,122,921	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %		0 %	100 %	212,042,866,011						100 %	212,042,866,011	
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				2108578860114 Orang	210,857,886,011	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh	2108578860114 Orang	210,857,886,011	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3 Dokumen	1,184,980,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh	3 Dokumen	1,184,980,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	1,119,750,000						100 %	1,119,750,000	
1.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1989 Paket	1,119,750,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh	1989 Paket	1,119,750,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		0 %	100 %	288,794,285						100 %	288,794,285	
1.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	77,702,800	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh	7 Unit	77,702,800	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	31,301,485	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh	10 Unit	31,301,485	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	179,790,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh	2 Unit	179,790,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan yang Terakreditasi	84 %		0 %	70 %	93,569,897,259						70 %	75,439,977,022	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang Terakreditasi A	42 %		0 %	36 %	57,924,254,111						36 %	41,294,748,903	
1.01.02.2.01.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				1 Unit	15,451,355,208	Kota Banda Aceh, Meuraxa, Gampong Baro		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh	1 Unit	51,850,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				4 Ruang	51,850,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh	4 Ruang	51,850,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				10 Unit	1,893,910,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SD Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh	10 Unit	1,893,910,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat				11 Ruang	751,912,500	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SD Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh	11 Ruang	751,912,500	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi				15 Unit	1,010,262,500	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SD Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh	15 Unit	1,010,262,500	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				22 Paket	501,000,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SD Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh	22 Paket	501,000,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				26 Paket	2,701,050,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SD Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh	26 Paket	2,701,050,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				500 Unit	441,050,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh	500 Unit	1,050,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				18101 Peserta Didik	2,017,940,600	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh	18101 Peserta Didik	1,717,940,600	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				10 Paket	791,100,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh	10 Paket	791,100,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				18101 Satuan Pendidikan	2,920,595,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh	18101 Satuan Pendidikan	2,520,595,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				745 Peserta Didik	417,960,778	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh	745 Peserta Didik	327,960,778	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				351 Orang	2,161,750,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh	351 Orang	2,161,750,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				790 Orang	1,156,510,698	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh	790 Orang	1,156,510,698	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				40 Satuan Pendidikan	22,844,827	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh	40 Satuan Pendidikan	22,844,827	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				91 Satuan Pendidikan	25,633,162,000	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOS Reguler DAK Non Fisik-BOS Kinerja	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh	91 Satuan Pendidikan	25,633,162,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Terakreditasi A	50 %		0 %	34 %	27,613,343,148						34 %	26,352,928,119	
1.01.02.2.02.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				1 Unit	53,575,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh	1 Unit	53,575,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				2 Ruang	103,575,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh	2 Ruang	103,575,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				12 Unit	1,052,650,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh	12 Unit	1,052,650,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				15 Ruang	2,372,300,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh	15 Ruang	2,272,300,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				17 Unit	1,452,350,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh	17 Unit	1,202,350,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				20 Paket	501,325,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh	20 Paket	501,325,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				32 Paket	3,000,880,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh	32 Paket	3,000,880,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia				500 Paket	250,880,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh	500 Paket	880,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				0 Paket 8937 Peserta Didik	1,939,400,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh	0 Paket 8937 Peserta Didik	1,739,400,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				5 Paket	1,379,582,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh	5 Paket	1,379,582,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian				8937 Peserta Didik	2,851,444,920	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh	8937 Peserta Didik	2,501,444,920	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				850 Peserta Didik	281,797,530	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh	850 Peserta Didik	171,382,501	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				37 Orang	360,950,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh	37 Orang	360,950,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				540 Orang	913,160,698	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh	540 Orang	913,160,698	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				5 Satuan Pendidikan	95,200,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh	5 Satuan Pendidikan	95,200,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				29 Satuan Pendidikan	11,004,273,000	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOS Reguler DAK Non Fisik-BOS Kinerja			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh	29 Satuan Pendidikan	11,004,273,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	64 %		0 %	52 %	7,202,595,000						52 %	6,962,595,000	
1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun				1 Unit	1,202,200,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh	1 Unit	1,202,200,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				2 Unit	1,650,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh	2 Unit	1,650,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				3 Unit	403,825,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh	3 Unit	403,825,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.02.2.03.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Unit	850,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh	2 Unit	850,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.02.2.03.05	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan				2 Unit	850,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh	2 Unit	850,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023**

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
															Nasional					Daerah
1	01	02	2.03	06		Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan				2 Unit	850,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-PAUD Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh	2 Unit	850,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1	01	02	2.03	07		Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia				3 Paket	1,000,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-PAUD Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh	3 Paket	1,000,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1	01	02	2.03	10		Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia				500 Paket	500,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-PAUD Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh	500 Paket	500,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1	01	02	2.03	11		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				357 Peserta Didik	350,900,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-PAUD Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh	357 Peserta Didik	350,900,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1	01	02	2.03	12		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia				5 Paket	40,625,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-PAUD Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh	5 Paket	625,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1	01	02	2.03	13		Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				560 Peserta Didik	950,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh	560 Peserta Didik	950,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.2.03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				8 Orang	48,600,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh	8 Orang	48,600,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				207 Orang	203,650,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh	207 Orang	3,650,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				100 Satuan Pendidikan	1,475,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh	100 Satuan Pendidikan	1,475,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				170 Satuan Pendidikan	4,944,670,000	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOP PAUD			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh	170 Satuan Pendidikan	4,944,670,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Satuan Pendidikan Non Formal (PNF) yang Mendapatkan Minimal Akreditasi C	71 %		0 %	28 %	829,705,000						28 %	829,705,000	
1.01.02.2.04.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun				1 Unit	500,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh	1 Unit	500,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.02.2.04.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun				1 Unit	500,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh	1 Unit	500,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.2.04.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Unit	500,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh	2 Unit	500,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.02.2.04.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat				3 Unit	1,645,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh	3 Unit	1,645,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.02.2.04.07	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia				4 Paket	1,325,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh	4 Paket	1,325,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.02.2.04.09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia				1 Paket	500,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh	1 Paket	500,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.02.2.04.10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				50 Peserta Didik	500,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh	50 Peserta Didik	500,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.02.2.04.11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia				1 Paket	500,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh	1 Paket	500,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				50 Peserta Didik	500,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh	50 Peserta Didik	500,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.02.2.04.14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				2 Orang	48,600,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh	2 Orang	48,600,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.02.2.04.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				16 Orang	500,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh	16 Orang	500,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				7 Satuan Pendidikan	625,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh	7 Satuan Pendidikan	625,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				7 Satuan Pendidikan	773,510,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh	7 Satuan Pendidikan	773,510,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Tersedianya Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	100 %		0 %	100 %	81,000,000						100 %	120,500,000	
1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Tersedianya Perangkat Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Tahap I, II dan III	4 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	81,000,000						1 Dokumen	120,500,000	
1.01.03.2.01.03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia				2000 Buku	80,500,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh	2000 Buku	80,500,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.03.2.01.04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya				40 Orang	500,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh	40 Orang	40,000,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	"Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan berkualifikasi akademik minimal S1/D4 dan bersertifikasi pendidik	%		%	94.86 %	27,748,000						94.86 %	27,748,000	
1 01 04 2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai kualifikasi akademik pada satuan pendidikan	%		%	43.82 %	27,748,000						43.82 %	27,748,000	
1 01 04 2.01 01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				2 Dokumen	23,973,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh	2 Dokumen	23,973,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
1 01 04 2.01 02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				1 Laporan	3,775,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh	1 Laporan	3,775,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
1 01 05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase peningkatan penerbitan izin penyelenggaraan satuan pendidikan milik masyarakat	82,21 %		0 %	77,68 %	35,650,000						77,68 %	70,000,000	
1 01 05 2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase SD dan SMP swasta yang memenuhi persyaratan izin pendirian dan operasional	98 %		0 %	93 %	17,650,000						93 %	25,000,000	
1 01 05 2.01 01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				10 Dokumen	17,650,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh	10 Dokumen	25,000,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
1 01 05 2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase PAUD dan PNF swasta yang memenuhi persyaratan izin pendirian dan operasional	%		%	62.36 %	18,000,000						62.36 %	45,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.05.2.02.01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				25 Dokumen	18,000,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh	25 Dokumen	45,000,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase sekolah yang melaksanakan pengembangan bahasa dan sastra	%		%	40.65 %	2,000,000						40.65 %	50,000,000	
1.01.06.2.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase guru yang dibina pengembangan dalam penuturan bahasa Aceh	%		%	40.65 %	2,000,000						40.65 %	50,000,000	
1.01.06.2.01.05	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten / Kota	Jumlah Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terdistribusi				1750 Buku	750,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh	1750 Buku	35,000,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.06.2.01.06	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota				27038 Peserta Didik	1,250,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh	27038 Peserta Didik	15,000,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						1,173,463,848							773,563,848	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Pengembangan Kebudayaan	48,50 %		0 %	43,50 %	350,350,768						43,50 %	350,350,768	
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Gampong yang berpartisipasi dalam pelestarian adat budaya daerah	67 %		0 %	62 %	250,000						62 %	250,000	
2.22.02.2.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				50 Orang	250,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh	50 Orang	250,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitasi pelestarian kesenian tradisional kepada pelaku seni	30 %		0 %	25 %	350,100,768						25 %	350,100,768	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
2	22	02	2.02	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				1 Laporan	100,250,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh	1 Laporan	100,250,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
2	22	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan				4 Sertifikat	249,850,768	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh	4 Sertifikat	249,850,768	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional	69 %		0 %	62 %	28,564,870						62 %	28,564,870	
2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sanggar/pelaku seni tradisional yang dibina	31 %		0 %	25 %	28,564,870						25 %	28,564,870	
2	22	03	2.01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				50 Orang	28,564,870	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh	50 Orang	28,564,870	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Pembinaan Sejarah	69 %		0 %	62 %	28,564,870						62 %	28,564,870	
2	22	04	2.01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat dan siswa yang mengunjungi situs sejarah	31 %		0 %	25 %	28,564,870						25 %	28,564,870	
2	22	04	2.01	03	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat				2 Dokumen	28,564,870	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh	2 Dokumen	28,564,870	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	83 %		0 %	75 %	665,383,340						75 %	365,383,340	
2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase cagar budaya dan situs sejarah yang ditetapkan Walikota dan terintegrasi nasional	75 %		0 %	70 %	665,383,340						70 %	365,383,340	
2	22	05	2.02	01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi				6 Objek	328,485,740	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh	6 Objek	328,485,740	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2	22 05 2.02 02	Pengembangan Cagar Budaya				3 Objek	300,625,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh	3 Objek	625,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
2	22 05 2.02 03	Pemanfaatan Cagar Budaya				2 Objek	36,272,600	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh	2 Objek	36,272,600	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
2	22 06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase pengelolaan kelekisi museum secara digital	%	%	14.12 %	100,600,000						14.12 %	700,000	
2	22 06 2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan kelekisi museum secara digital	%	%	14.1 %	100,600,000						14.1 %	700,000	
2	22 06 2.01 03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum			25 Unit	100,600,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh	25 Unit	700,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						90,798,771,775						83,680,042,343	
1	02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat daerah	100 %	0 %	100 %	51,432,554,425						100 %	54,747,859,382	
1	02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	100 %	0 %	100 %	245,045,120						100 %	245,045,370	
1	02 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			5 Dokumen	69,899,700	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Sukaramai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Kesehatan	5 Dokumen	69,899,950	Dinas Kesehatan
1	02 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2 Laporan	175,145,420	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Sukaramai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Kesehatan	2 Laporan	175,145,420	Dinas Kesehatan
1	02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100 %	0 %	100 %	48,544,970,754						100 %	52,038,570,755	
1	02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			561 Orang/bulan	46,478,370,754	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Sukaramai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Kesehatan	561 Orang/bulan	49,971,970,755	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	2,066,600,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Sukaramai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Kesehatan	12 Dokumen	2,066,600,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	332,200,000						100 %	332,200,000	
1 02 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1272 Paket	332,200,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Sukaramai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Kesehatan	1272 Paket	332,200,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	161,603,911						100 %	149,699,293	
1 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	6,599,732	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Sukaramai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Kesehatan	8 Paket	6,600,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				13 Paket	55,004,179	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Sukaramai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Kesehatan	13 Paket	44,004,290	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	100,000,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Sukaramai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Kesehatan	12 Laporan	99,095,003	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %		0 %	100 %	96,394,000						100 %	50,000,000	
1 02 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	96,394,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Sukaramai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Kesehatan	7 Unit	50,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		0 %	100 %	1,312,374,014						100 %	1,278,243,964	
1 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	1,101,600,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Sukaramai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Kesehatan	12 Laporan	1,101,600,000	Dinas Kesehatan

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	210,774,014	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Sukaramai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Kesehatan	12 Laporan	176,643,964	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		0 %	100 %	739,966,626						100 %	654,100,000	
1 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				186 Unit	600,000,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Sukaramai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Kesehatan	186 Unit	560,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 12 Unit	39,966,626	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Sukaramai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Kesehatan	0 Unit 12 Unit	0	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	100,000,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Sukaramai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Kesehatan	1 Unit	94,100,000	Dinas Kesehatan
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	90 %		0 %	90 %	37,407,022,806						90 %	27,226,600,926	
1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	90 %		0 %	90 %	9,177,749,756						90 %	2,715,006,372	
1 02 02 2.01 09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				1 Unit	190,000,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Sukaramai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pajak Rokok	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Kesehatan	1 Unit	150,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.01 10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Unit	50,000,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Sukaramai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Kesehatan	1 Unit	6,000,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				1 Unit	4,560,583,023	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Sukaramai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Otonomi Khusus	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Kesehatan	1 Unit	0	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				5 Unit	994,299,995	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Sukaramai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Kesehatan	5 Unit	30,000,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				60 Unit	659,339,346	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Sukaramai	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Kesehatan	60 Unit	65,000,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center				15 Unit	26,312,602	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Sukaramai	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Kesehatan	15 Unit	45,000,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan				95 Paket	1,554,174,982	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Sukaramai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Kesehatan	95 Paket	1,454,174,982	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan				95 Paket	984,310,063	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Sukaramai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Kesehatan	95 Paket	809,101,645	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				12 Unit	30,000,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Sukaramai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Kesehatan	12 Unit	30,000,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya				12 Paket	128,729,745	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Sukaramai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Kesehatan	12 Paket	125,729,745	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	90 %		0 %	90 %	27,900,923,564						90 %	24,183,345,154	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5556 Orang	701,124,452	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Sukaramai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pajak Rokok Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat penerima layanan	5556 Orang	651,124,452	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5556 Orang	419,700,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Sukaramai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat penerima layanan	5556 Orang	550,411,870	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5304 Orang	53,078,800	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Sukaramai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat penerima layanan	5304 Orang	58,386,790	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				18856 Orang	377,218,894	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Sukaramai	Pajak Rokok Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat penerima layanan	18856 Orang	375,218,944	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				9449 Orang	472,426,457	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Sukaramai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat penerima layanan	9449 Orang	462,426,654	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200947 Orang	54,000,016	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Sukaramai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat penerima layanan	200947 Orang	54,000,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				20638 Orang	134,907,473	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Sukaramai	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat penerima layanan	20638 Orang	134,907,473	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				45260 Orang	53,404,468	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Sukaramai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat penerima layanan	45260 Orang	53,404,733	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				7002 Orang	223,740,600	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Sukaramai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat penerima layanan	7002 Orang	213,740,732	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				541 Orang	112,838,600	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Sukaramai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat penerima layanan	541 Orang	112,838,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				6466 Orang	1,839,617,524	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Sukaramai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat penerima layanan	6466 Orang	563,961,750	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				6687 Orang	77,070,500	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Sukaramai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat penerima layanan	6687 Orang	76,070,500	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				12 Dokumen	1,922,035,430	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Sukaramai	Pajak Rokok Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat penerima layanan	12 Dokumen	600,000,000	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	1,437,188,411	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Sukaramai	Pajak Rokok Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat penerima layanan	12 Dokumen	787,188,553	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	144,778,600	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Sukaramai	Pajak Rokok Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat penerima layanan	12 Dokumen	142,778,750	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	585,673,350	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Sukaramai	Pajak Rokok Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat penerima layanan	12 Dokumen	365,673,486	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0 Dokumen 12 Dokumen	1,476,711,295	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Sukaramai	Pajak Rokok Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat penerima layanan	0 Dokumen 12 Dokumen	776,711,295	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	117,326,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Sukaramai	Pajak Rokok Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat penerima layanan	12 Dokumen	117,326,250	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				63 Orang	227,657,350	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Sukaramai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat penerima layanan	63 Orang	227,657,600	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus				12 Dokumen	263,491,268	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Sukaramai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat penerima layanan	12 Dokumen	253,491,368	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	1,508,154,565	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Sukaramai	Pajak Rokok Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat penerima layanan	12 Dokumen	858,154,565	Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				12 Dokumen	14,455,553,636	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Sukaramai	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat penerima layanan	12 Dokumen	15,901,109,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				0 Paket 12 Paket	23,947,500	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Sukaramai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat penerima layanan	0 Paket 12 Paket	26,342,250	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				10 Dokumen	149,999,800	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Sukaramai	Pajak Rokok	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat penerima layanan	10 Dokumen	100,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				11 Dokumen	511,999,658	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Sukaramai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat penerima layanan	11 Dokumen	250,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				0 Unit 12 Unit	377,699,650	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Sukaramai	Pajak Rokok Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat penerima layanan	0 Unit 12 Unit	277,699,850	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	131,399,684	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Sukaramai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat penerima layanan	12 Laporan	144,539,956	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				12 Dokumen	48,179,583	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Sukaramai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat penerima layanan	12 Dokumen	48,179,733	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	90 %		0 %	90 %	106,904,886						90 %	106,904,500	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan				1 Dokumen	22,707,640	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Sukaramai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat penerima layanan	1 Dokumen	22,707,640	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				10 Dokumen	54,518,850	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Sukaramai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat penerima layanan	10 Dokumen	54,518,464	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.03.03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan				3 Unit	29,678,396	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Sukaramai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat penerima layanan	3 Unit	29,678,396	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	90 %		0 %	90 %	221,444,600						90 %	221,344,900	
1.02.02.2.04.02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar				26 Unit	76,445,050	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Sukaramai	Pajak Rokok Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Fasilitas Kesehatan	26 Unit	76,445,050	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				0 Unit 11 Unit	144,999,550	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Sukaramai	Pajak Rokok Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Fasilitas Kesehatan	0 Unit 11 Unit	144,899,850	Dinas Kesehatan
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	95 %		0 %	95 %	841,438,214						95 %	925,582,035	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	95 %		0 %	95 %	841,438,214						95 %	925,582,035	
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				0 Orang 23 Orang	569,026,500	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Sukaramai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat penerima layanan	0 Orang 23 Orang	625,929,150	Dinas Kesehatan	
1 02 03 2.02 03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				12 Dokumen	272,411,714	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Sukaramai	Pajak Rokok Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat penerima layanan	12 Dokumen	299,652,885	Dinas Kesehatan	
1 02 04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Pemenuhan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	84 %		0 %	84 %	285,193,805					84 %	310,000,000		
1 02 04 2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Fasilitas pelayanan Kefarmasian, Alkes dan Optikal yang memiliki izin Operasional	75 %		0 %	75 %	48,786,910					75 %	60,189,614		
1 02 04 2.01 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				12 Dokumen	34,149,842	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Sukaramai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat penerima layanan	12 Dokumen	34,150,000	Dinas Kesehatan	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.04.2.01.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				15 Sarana	14,637,068	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Sukaramai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat penerima layanan	15 Sarana	26,039,614	Dinas Kesehatan	
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Industri Rumah Tangga yang memiliki Sertifikat izin Produksi Pangan	85 %	0 %	85 %		102,370,815					85 %	102,370,808		
1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				80 Dokumen	102,370,815	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Sukaramai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat penerima layanan	80 Dokumen	102,370,808	Dinas Kesehatan	
1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	85 %	0 %	85 %		12,208,430					85 %	13,429,273		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				12 Dokumen	673,331,661	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Sukaramai	Pajak Rokok Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat penerima layanan	12 Dokumen	294,846,161	Dinas Kesehatan	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %		0 %	100 %	159,230,864					100 %	175,153,839		
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				10 Dokumen	159,230,864	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Sukaramai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat penerima layanan	10 Dokumen	175,153,839	Dinas Kesehatan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						117,511,457,085						122,230,580,156		
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat daerah	100 %		0 %	100 %	20,814,996,055					100 %	20,814,996,055		
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	20,814,996,055					100 %	20,814,996,055		
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				286 Orang/bulan	20,217,336,055	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Mibo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	RSUD Meuraxa	286 Orang/bulan	20,217,336,055	RSUD Meuraxa	
1.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	597,660,000	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Mibo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	RSUD Meuraxa	12 Dokumen	597,660,000	RSUD Meuraxa	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100 %		0 %	100 %	96,696,461,030					100 %	101,415,584,101		
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Sesuai Standar	100 %		0 %	100 %	24,392,047,768					100 %	27,303,560,508		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
1 02 02 2.01 03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				3 Unit	13,830,879,000	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Mibo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat penerima layanan	3 Unit	13,830,879,000	RSUD Meuraxa	
1 02 02 2.01 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				45 Unit	10,561,168,768	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Mibo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat penerima layanan	45 Unit	13,472,681,508	RSUD Meuraxa	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Sesuai Standar	100 %		0 %	100 %	72,304,413,262						100 %	74,112,023,593		
1 02 02 2.02 32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				12 Dokumen	72,304,413,262	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Mibo	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat penerima layanan	12 Dokumen	74,112,023,593	RSUD Meuraxa	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						97,779,938,646							107,590,932,538	
1 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat daerah	100 %		0 %	100 %	13,861,033,792							100 %	15,247,137,172	
1 03 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	100 %		0 %	100 %	49,435,396							100 %	54,378,936	
1 03 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	49,435,396	Kota Banda Aceh, Ulee Kareng, Pango Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2 Dokumen	54,378,936	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
1 03 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %		0 %	100 %	10,638,015,928							100 %	11,701,817,521	
1 03 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				80 Orang/bulan	8,934,792,928	Kota Banda Aceh, Ulee Kareng, Pango Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	80 Orang/bulan	9,828,272,221	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
1 03 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	1,703,223,000	Kota Banda Aceh, Ulee Kareng, Pango Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12 Dokumen	1,873,545,300	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %		0 %	100 %	183,449,000						100 %	201,793,900	
1 03 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				88 Paket	163,944,000	Kota Banda Aceh, Ulee Kareng, Pango Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	88 Paket	180,338,400	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1 03 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				25 Orang	19,505,000	Kota Banda Aceh, Ulee Kareng, Pango Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	25 Orang	21,455,500	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1 03 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 %		0 %	100 %	337,922,355						100 %	371,714,591	
1 03 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				14 Paket	12,933,176	Kota Banda Aceh, Ulee Kareng, Pango Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	14 Paket	14,226,494	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1 03 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	24,702,123	Kota Banda Aceh, Ulee Kareng, Pango Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2 Paket	27,172,335	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1 03 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	50,287,056	Kota Banda Aceh, Ulee Kareng, Pango Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12 Paket	55,315,762	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1 03 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35 Laporan	250,000,000	Kota Banda Aceh, Ulee Kareng, Pango Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	35 Laporan	275,000,000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1 03 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %		0 %	100 %	746,906,000						100 %	821,596,600	
1 03 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	500,000,000	Kota Banda Aceh, Ulee Kareng, Pango Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1 Unit	550,000,000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1 03 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	99,906,000	Kota Banda Aceh, Ulee Kareng, Pango Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5 Unit	109,896,600	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	47,000,000	Kota Banda Aceh, Ulee Kareng, Pango Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12 Unit	51,700,000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1 03 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	100,000,000	Kota Banda Aceh, Ulee Kareng, Pango Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4 Unit	110,000,000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1 03 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %		0 %	100 %	943,483,940						100 %	1,037,832,334	
1 03 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	5,000,000	Kota Banda Aceh, Ulee Kareng, Pango Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12 Laporan	5,500,000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1 03 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	531,571,723	Kota Banda Aceh, Ulee Kareng, Pango Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12 Laporan	584,728,895	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1 03 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	406,912,217	Kota Banda Aceh, Ulee Kareng, Pango Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12 Laporan	447,603,439	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1 03 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		0 %	100 %	961,821,173						100 %	1,058,003,290	
1 03 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				50 Unit	596,819,902	Kota Banda Aceh, Ulee Kareng, Pango Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	50 Unit	656,501,892	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1 03 01 2.09 03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				5 Unit	140,000,000	Kota Banda Aceh, Ulee Kareng, Pango Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5 Unit	154,000,000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1 03 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				52 Unit	25,001,271	Kota Banda Aceh, Ulee Kareng, Pango Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	52 Unit	27,501,398	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	200,000,000	Kota Banda Aceh, Ulee Kareng, Pango Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6 Unit	220,000,000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1 03 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Cakupan Luas Area Pengendalian Banjir	%		%	44.09 %	308,426,972						44.09 %	339,269,670	
1 03 02 2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Meningkatnya Kapasitas Pengendalian Banjir	%		%	44.09 %	308,426,972						44.09 %	339,269,670	
1 03 02 2.01 11	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun				1 Unit	84,375,986	Kota Banda Aceh, Ulee Kareng, Pango Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Kawasan Sungai di Kota Banda Aceh	1 Unit	92,813,585	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1 03 02 2.01 55	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara				6 Unit	224,050,986	Kota Banda Aceh, Ulee Kareng, Pango Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Kawasan Sungai di Kota Banda Aceh	6 Unit	246,456,085	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1 03 03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Meningkatnya Layanan Air Minum	94,17 %		0 %	92,07 %	19,933,484,999						92,07 %	21,926,833,526	
1 03 03 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Meningkatnya Layanan Air Minum	%		%	92.07 %	19,933,484,999						92.07 %	21,926,833,526	
1 03 03 2.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun				2 Dokumen	201,633,350	Kota Banda Aceh, Ulee Kareng, Pango Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Pembangunan Jaringan Sarana Air Bersih	2 Dokumen	221,796,685	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1 03 03 2.01 03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun				10 Liter/Detik	19,731,851,649	Kota Banda Aceh, Ulee Kareng, Pango Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Pembangunan Jaringan Sarana Air Bersih	10 Liter/Detik	21,705,036,841	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1 03 04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	94 %		0 %	91 %	434,363,900						91 %	477,800,290	
1 03 04 2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	%		%	91 %	434,363,900						91 %	477,800,290	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 04 2.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	31,558,350	Kota Banda Aceh, Ulee Kareng, Pango Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum	1 Dokumen	34,714,185	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
1 03 04 2.01 03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS				500 Rumah Tangga	402,805,550	Kota Banda Aceh, Ulee Kareng, Pango Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum	500 Rumah Tangga	443,086,105	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
1 03 05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Meningkatnya Layanan Air Limbah	87,7 %		0 %	87,61 %	3,678,638,100					87,61 %	4,046,501,910		
1 03 05 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Meningkatnya Layanan Air Limbah	%		%	87.61 %	3,678,638,100					87.61 %	4,046,501,910		
1 03 05 2.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	57,558,350	Kota Banda Aceh, Ulee Kareng, Pango Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum	1 Dokumen	63,314,185	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
1 03 05 2.01 12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman				350 Rumah Tangga	3,621,079,750	Kota Banda Aceh, Ulee Kareng, Pango Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum	350 Rumah Tangga	3,983,187,725	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
1 03 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Meningkatnya Kualitas Saluran Drainase/ Gorong-gorong yang Dibangun/Dipelihara	82,09 %		0 %	82,03 %	8,401,926,114					82,03 %	9,275,118,726		
1 03 06 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Meningkatnya Kualitas Saluran Drainase/ Gorong-gorong yang Dibangun/Dipelihara	%		%	82.03 %	8,401,926,114					82.03 %	9,275,118,726		
1 03 06 2.01 05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun				3000 M	4,477,956,545	Kota Banda Aceh, Ulee Kareng, Pango Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Otonomi Khusus	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Kawasan Kota yang Mengalami Banjir/Genangan	3000 M	4,925,752,200	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.03.06.2.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara				42000 M	3,923,969,569	Kota Banda Aceh, Ulee Kareng, Pango Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Kawasan Kota yang Mengalami Banjir/Genangan	42000 M	4,349,366,526	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Meningkatnya Penataan Bangunan	85,57 %		0 %	84,07 %	13,814,361,066					84,07 %	15,195,797,173		
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Yang Tertata Sesuai Peruntukan	%		%	84.07 %	13,814,361,066					84.07 %	15,195,797,173		
1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG				6 Dokumen	230,912,249	Kota Banda Aceh, Ulee Kareng, Pango Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6 Dokumen	254,003,474	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota				7 Dokumen	13,417,345,479	Kota Banda Aceh, Ulee Kareng, Pango Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Otonomi Khusus	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7 Dokumen	14,759,080,027	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
1.03.08.2.01.03	Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Jumlah Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	92,110,529	Kota Banda Aceh, Ulee Kareng, Pango Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1 Dokumen	101,321,582	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
1.03.08.2.01.11	Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret dalam rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi	Jumlah Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret yang Telah Dilakukan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi				5 Unit	73,992,809	Kota Banda Aceh, Ulee Kareng, Pango Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5 Unit	81,392,090	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Kawasan Strategis Yang Tertata	32,5 %		0 %	31 %	13,004,449,253					31 %	14,304,894,178		
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	1 Kawasan		0 Kawasan	1 Kawasan	13,004,449,253					1 Kawasan	14,304,894,178		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 09 2.01 02	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya				1 Kawasan	13,004,449,253	Kota Banda Aceh, Ulee Kareng, Pango Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1 Kawasan	14,304,894,178	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1 03 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Meningkatnya Kualitas Kontruksi Jalan sesuai Spesifikasi	96,35 %		0 %	95,75 %	23,262,065,580						95,75 %	25,588,272,136	
1 03 10 2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase meningkatnya kualitas kontruksi jalan sesuai spesifikasi	%		%	95.75 %	23,262,065,580						95.75 %	25,588,272,136	
1 03 10 2.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian				3 Dokumen	262,857,143	Kota Banda Aceh, Ulee Kareng, Pango Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Peningkatan Jalan dalam Kota Banda Aceh	3 Dokumen	289,142,857	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1 03 10 2.01 04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan				1 Dokumen	422,857,143	Kota Banda Aceh, Ulee Kareng, Pango Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Peningkatan Jalan dalam Kota Banda Aceh	1 Dokumen	465,142,857	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1 03 10 2.01 05	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun				0.15 KM	2,072,857,143	Kota Banda Aceh, Ulee Kareng, Pango Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Otonomi Khusus	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Peningkatan Jalan dalam Kota Banda Aceh	0.15 KM	2,280,142,857	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1 03 10 2.01 09	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi				3 KM	1,472,857,143	Kota Banda Aceh, Ulee Kareng, Pango Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Otonomi Khusus	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Peningkatan Jalan dalam Kota Banda Aceh	3 KM	1,620,142,857	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1 03 10 2.01 10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala				5 KM	17,034,322,722	Kota Banda Aceh, Ulee Kareng, Pango Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Peningkatan Jalan dalam Kota Banda Aceh	5 KM	18,737,754,994	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 10 2.01 11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin				7.1 KM	1,462,857,143	Kota Banda Aceh, Ulee Kareng, Pango Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Peningkatan Jalan dalam Kota Banda Aceh	7.1 KM	1,609,142,857	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1 03 10 2.01 23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan				6 Dokumen	533,457,143	Kota Banda Aceh, Ulee Kareng, Pango Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Peningkatan Jalan dalam Kota Banda Aceh	6 Dokumen	586,802,857	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1 03 11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Meningkatnya Pengembangan jasa Konstruksi	57,5 %		0 %	56 %	81,189,681						56 %	89,308,649	
1 03 11 2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi yang Terlatih	100 Orang		0 Orang	0 Orang	81,189,681						0 Orang	89,308,649	
1 03 11 2.01 03	Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis				0 Dokumen	81,189,681	Kota Banda Aceh, Ulee Kareng, Pango Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0 Dokumen	89,308,649	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1 03 12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Tertatanya Ruang yang Sesuai RTRW/RRTR	82,27 %		0 %	81,37 %	999,999,189						81,37 %	1,099,999,108	
1 03 12 2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah ImplementasiAturan Perencanaan Tata Ruang	8 Dokumen		0 Dokumen	2 Dokumen	249,999,574						2 Dokumen	274,999,531	
1 03 12 2.01 04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang				1 Dokumen	249,999,574	Kota Banda Aceh, Ulee Kareng, Pango Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1 Dokumen	274,999,531	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1 03 12 2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota Sesuai RTRW	31 Dokumen		0 Dokumen	7 Dokumen	749,999,615						7 Dokumen	824,999,577	
1 03 12 2.04 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang				5 Dokumen	599,999,709	Kota Banda Aceh, Ulee Kareng, Pango Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5 Dokumen	659,999,680	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				2 Dokumen	149,999,906	Kota Banda Aceh, Ulee Kareng, Pango Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2 Dokumen	164,999,897	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						15,443,668,926						9,036,833,118		
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat daerah	100 %		0 %	100 %	6,644,012,116					100 %	7,151,361,733		
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	%		%	100 %	5,000,218					100 %	5,000,218		
1.04.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5,000,218	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Merduati	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	5 Dokumen	5,000,218	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan	%		%	100 %	5,627,851,472					100 %	6,135,201,089		
1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	4,573,951,472	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Merduati	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	35 Orang/bulan	5,081,301,089	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	
1.04.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	1,053,900,000	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Merduati	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	12 Dokumen	1,053,900,000	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		%	100 %	74,745,000					100 %	74,745,000		
1.04.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				75 Paket	74,745,000	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Merduati	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	75 Paket	74,745,000	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	112,749,173					100 %	112,749,173		
1.04.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	4,969,080	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Merduati	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	7 Paket	4,969,080	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	15,000,000	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Merduati	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2 Paket	15,000,000	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
1.04.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	8,549,528	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Merduati	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	7 Paket	8,549,528	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	14,230,565	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Merduati	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	12 Paket	14,230,565	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
1.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	70,000,000	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Merduati	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	30 Laporan	70,000,000	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	39,844,800						100 %	39,844,800	
1.04.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	20,000,000	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Merduati	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2 Unit	20,000,000	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
1.04.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	19,844,800	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Merduati	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	10 Unit	19,844,800	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		0 %	100 %	668,809,234						100 %	668,809,234	
1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				6 Laporan	458,634,853	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Merduati	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	6 Laporan	458,634,853	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
1.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				86 Laporan	210,174,381	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Merduati	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	86 Laporan	210,174,381	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		0 %	100 %	115,012,219						100 %	115,012,219	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.04.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	52,457,000	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Merduati	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	5 Unit	52,457,000	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
1.04.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	12,555,219	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Merduati	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	5 Unit	12,555,219	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
1.04.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	50,000,000	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Merduati	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1 Unit	50,000,000	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase peningkatan pengembangan perumahan	100 %		0 %	100 %	570,879,380						100 %	520,879,380	
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Pendataan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	100 %		0 %	100 %	182,145,340						100 %	132,145,340	
1.04.02.2.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				1 Dokumen	74,082,480	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Merduati	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1 Dokumen	64,082,480	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
1.04.02.2.01.02	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan				1 Dokumen	54,062,930	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Merduati	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1 Dokumen	34,062,930	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
1.04.02.2.01.06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus				1 Dokumen	53,999,930	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Merduati	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1 Dokumen	33,999,930	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Sosialisasi dan Persiapan Rumah Korban Bencana	100 %		0 %	100 %	9,977,790						100 %	9,977,790	
1.04.02.2.02.02	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan				30 Orang	9,977,790	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Merduati	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat	30 Orang	9,977,790	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 04 02 2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana yang terkena Relokasi	100 %		0 %	100 %	128,853,680						100 %	128,853,680	
1 04 02 2.03 01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi				1 Unit Rumah	28,975,140	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Merduati	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat	1 Unit Rumah	28,975,140	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
1 04 02 2.03 04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun				2 Unit Rumah	99,878,540	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Merduati	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat	2 Unit Rumah	99,878,540	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
1 04 02 2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase Pembinaan Pengelolaan Rusunawa	100 %		0 %	100 %	205,402,490						100 %	205,402,490	
1 04 02 2.05 01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun				12 Laporan	166,400,000	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Merduati	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat	12 Laporan	166,400,000	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
1 04 02 2.05 02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				12 Dokumen	39,002,490	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Merduati	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat	12 Dokumen	39,002,490	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
1 04 02 2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Penerbitan izin Pembangunan Perumahan	100 %		0 %	100 %	34,589,000						100 %	34,589,000	
1 04 02 2.06 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				1 Laporan	34,589,000	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Merduati	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat	1 Laporan	34,589,000	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
1 04 02 2.07	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Persentase Penerbitan Sertifikat Kepemilikan bangunan Gedung	100 %		0 %	100 %	9,911,080						100 %	9,911,080	
1 04 02 2.07 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)				1 Laporan	9,911,080	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Merduati	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat	1 Laporan	9,911,080	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
1 04 03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Pengurangan Kawasan Permukiman kumuh	100 %		0 %	100 %	6,150,032,013						100 %	490,032,013	
1 04 03 2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase Penerbitan izin Pembangunan Kawasan Permukiman	100 %		0 %	100 %	121,447,804						100 %	121,447,804	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.04.03.2.01.02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview serta Terlegalisasi				2 Dokumen	34,500,000	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Merduati	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat	2 Dokumen	34,500,000	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
1.04.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh				1 Laporan	86,947,804	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Merduati	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat	1 Laporan	86,947,804	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Penataan Kawasan Permukiman Kumuh	100 %		0 %	100 %	33,221,931						100 %	33,221,931	
1.04.03.2.02.01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh				1 Dokumen	2,003,500	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Merduati	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat	1 Dokumen	2,003,500	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
1.04.03.2.02.04	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh				1 Laporan	31,218,431	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Merduati	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat	1 Laporan	31,218,431	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	100 %		0 %	100 %	5,995,362,278						100 %	335,362,278	
1.04.03.2.03.01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh				1 Dokumen	198,651,870	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Merduati	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat	1 Dokumen	148,651,870	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				1 Unit Rumah	635,000,066	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Merduati	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat	1 Unit Rumah	5,000,066	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
1.04.03.2.03.06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar				2 Ha	46,010,580	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Merduati	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat	2 Ha	46,010,580	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
1.04.03.2.03.07	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi				1 Dokumen	2,000,000	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Merduati	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat	1 Dokumen	2,000,000	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.04.03.2.03.08	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun				1 Unit	5,113,699,762	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Merduati	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat	1 Unit	133,699,762	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Presentase Peningkatan Kualitas Perumahan dan Lingkungan Permukiman Kumuh	100 %		0 %	100 %	4,999,846						100 %	4,999,846	
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Perumahan dan Permukiman Kumuh	100 %		0 %	100 %	4,999,846						100 %	4,999,846	
1.04.04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki				1 Unit Rumah	4,999,846	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Merduati	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat	1 Unit Rumah	4,999,846	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	100 %		0 %	100 %	2,065,670,331						100 %	861,484,906	
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Penyelenggaraan PSU	100 %		0 %	100 %	2,065,670,331						100 %	861,484,906	
1.04.05.2.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				1 Dokumen	9,999,800	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Merduati	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat	1 Dokumen	9,999,800	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				5 Lokasi	2,026,225,911	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Merduati	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat	5 Lokasi	822,040,486	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
1.04.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan				1 Laporan	9,999,820	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Merduati	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat	1 Laporan	9,999,820	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
1.04.05.2.01.04	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang				1 Laporan	19,444,800	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Merduati	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat	1 Laporan	19,444,800	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 04 06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100 %		0 %	100 %	8,075,240						100 %	8,075,240	
1 04 06 2.01	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi orang atau badan Hukum	100 %		0 %	100 %	8,075,240						100 %	8,075,240	
1 04 06 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil				1 Laporan	8,075,240	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Merduati	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat	1 Laporan	8,075,240	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						20,468,587,325							23,226,186,391	
1 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat daerah	100 %		0 %	100 %	17,917,395,777						100 %	18,905,227,445	
1 05 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	100 %		0 %	100 %	52,377,384						100 %	52,901,158	
1 05 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	28,694,495	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh	8 Dokumen	28,981,440	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah
1 05 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	3,187,798	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh	1 Dokumen	3,219,676	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah
1 05 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	3,187,798	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh	1 Dokumen	3,219,676	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.05.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	3,187,798	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh	1 Dokumen	3,219,676	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah
1.05.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	3,187,798	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh	1 Dokumen	3,219,676	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	10,931,697	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh	6 Laporan	11,041,014	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	15,913,830,769						100 %	16,888,325,769	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				55 Orang/bulan	7,246,480,769	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai negeri Sipil, Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran Non-PNS Satpol PP & WH serta TNI/Polri	55 Orang/bulan	8,220,980,769	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah
1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	8,667,350,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin			Pegawai negeri Sipil, Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran Non-PNS Satpol PP & WH serta TNI/Polri	12 Dokumen	8,667,345,000	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	919,437,936						100 %	870,033,000	
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				250 Paket	825,000,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			PNS dan Non-PNS Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh	250 Paket	825,033,000	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				200 Orang	94,437,936	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			PNS dan Non-PNS Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh	200 Orang	40,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah
1 05 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	48,698,848						100 %	50,068,734	
1 05 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				14 Paket	4,263,235	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh	14 Paket	4,689,559	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah
1 05 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				9 Paket	9,435,613	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh	9 Paket	5,379,175	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah
1 05 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35 Laporan	35,000,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh	35 Laporan	35,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah
1 05 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %		0 %	100 %	128,042,200						100 %	184,558,864	
1 05 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	10,750,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor dan Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh	1 Unit	10,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah
1 05 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	117,292,200	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor dan Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh	5 Unit	50,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah
1 05 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		0 %	100 %	427,523,640						100 %	450,520,600	
1 05 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				6 Laporan	49,530,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh	6 Laporan	50,520,600	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	377,993,640	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh	6 Laporan	400,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		0 %	100 %	427,485,000						100 %	408,819,320	
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				26 Unit	418,753,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kendaraan Dinas/ Operasional, Peralatan Gedung Kantor Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh	26 Unit	300,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				37 Unit	8,732,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kendaraan Dinas/ Operasional, Peralatan Gedung Kantor Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh	37 Unit	8,819,320	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %		0 %	100 %	2,551,191,548						100 %	4,320,958,946	
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	100 %		0 %	100 %	1,189,327,134						100 %	2,931,421,633	
1.05.02.2.01.02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				100 Kasus	298,777,500	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Masyarakat Umum Pelanggar Qanun Trantibum dan Satlinmas Gampong dalam Wilayah Kota Banda Aceh	100 Kasus	200,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Dokumen	679,429,700	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Masyarakat Umum Pelanggar Qanun Trantibum dan Satlinmas Gampong dalam Wilayah Kota Banda Aceh	1 Dokumen	2,500,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah
1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				90 Orang	125,169,934	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Masyarakat Umum Pelanggar Qanun Trantibum dan Satlinmas Gampong dalam Wilayah Kota Banda Aceh	90 Orang	100,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah
1.05.02.2.01.09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani				300 Laporan	85,950,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Masyarakat Umum Pelanggar Qanun Trantibum dan Satlinmas Gampong dalam Wilayah Kota Banda Aceh	300 Laporan	55,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase penegakan Perda Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	100 %		0 %	100 %	447,745,314						100 %	452,222,767	
1.05.02.2.02.03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP				300 Laporan	447,745,314	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Pelanggar Perda/Qanun	300 Laporan	400,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pembinaan PPNS Kabupaten/Kota	100 %		0 %	100 %	57,624,000						100 %	58,776,480	
1.05.02.2.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada				2 Laporan	57,624,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		PPNS Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh	2 Laporan	58,776,480	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
1 05 02 7.04	Pengelolaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh	Persentase Pengelolaan personil Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah yang dilaksanakan	100 %		0 %	100 %	856,495,100						100 %	878,538,066		
1 05 02 7.04 02	Operasionalisasi Penegakan, Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Penegakan, Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam				12 Laporan	581,355,000	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Pelanggar Qanun Syariat Isam, Pelajar/Mahasiswa, Pengusaha Hotel/Hiburan dan Kafe serta Masyarakat Umum	12 Laporan	583,099,065	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah	
1 05 02 7.04 04	Penyuluhan dan Sosialisasi Qanun dan Peraturan Perundang-Undangan Syariat Islam	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penyuluhan dan sosialisasi Qanun dan peraturan Perundang-undangan Syariat Islam				24 Laporan	54,890,100	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Pelanggar Qanun Syariat Isam, Pelajar/Mahasiswa, Pengusaha Hotel/Hiburan dan Kafe serta Masyarakat Umum	24 Laporan	55,439,001	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah	
1 05 02 7.04 07	Pelaksanaan Eksekusi Cambuk sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Eksekusi Cambuk Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku				24 Laporan	220,250,000	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Pelanggar Qanun Syariat Isam, Pelajar/Mahasiswa, Pengusaha Hotel/Hiburan dan Kafe serta Masyarakat Umum	24 Laporan	180,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						8,513,330,623							8,861,024,623		
1 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat daerah	100 %		0 %	100 %	8,420,444,291							100 %	8,811,112,360	
1 05 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi kinerja perangkat daerah Yang Tersusun	100 %		0 %	100 %	35,317,984							100 %	5,000,000	
1 05 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	35,317,984	Kota Banda Aceh, Jaya Baru, Geuceu Meunara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		DPKP	7 Dokumen	5,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		
1 05 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	6,914,896,860							100 %	7,392,580,860	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				43 Orang/bulan	5,554,786,860	Kota Banda Aceh, Jaya Baru, Geuceu Meunara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			DPKP	43 Orang/bulan	6,032,480,860	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				24 Dokumen	1,360,110,000	Kota Banda Aceh, Jaya Baru, Geuceu Meunara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			DPKP	24 Dokumen	1,360,100,000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	327,531,428						100 %	327,531,500	
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				82 Paket	327,531,428	Kota Banda Aceh, Jaya Baru, Geuceu Meunara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			DPKP	82 Paket	327,531,500	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	90,699,829						100 %	73,000,000	
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5,201,057	Kota Banda Aceh, Jaya Baru, Geuceu Meunara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			DPKP	5 Paket	5,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Paket	26,608,778	Kota Banda Aceh, Jaya Baru, Geuceu Meunara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			DPKP	15 Paket	20,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				6 Paket	10,539,760	Kota Banda Aceh, Jaya Baru, Geuceu Meunara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			DPKP	6 Paket	10,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	8,350,234	Kota Banda Aceh, Jaya Baru, Geuceu Meunara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			DPKP	10 Paket	8,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	40,000,000	Kota Banda Aceh, Jaya Baru, Geuceu Meunara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			DPKP	3 Laporan	30,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		0 %	100 %	655,873,051						100 %	640,000,000	
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	213,824,000	Kota Banda Aceh, Jaya Baru, Geuceu Meunara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			DPKP	12 Laporan	200,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	442,049,051	Kota Banda Aceh, Jaya Baru, Geuceu Meunara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			DPKP	12 Laporan	440,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1 05 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	396,125,139						100 %	373,000,000	
1 05 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	66,546,600	Kota Banda Aceh, Jaya Baru, Geuceu Meunara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			DPKP	6 Unit	65,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1 05 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				19 Unit	318,645,855	Kota Banda Aceh, Jaya Baru, Geuceu Meunara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			DPKP	19 Unit	300,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1 05 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	5,018,934	Kota Banda Aceh, Jaya Baru, Geuceu Meunara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			DPKP	3 Unit	4,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1 05 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	5,913,750	Kota Banda Aceh, Jaya Baru, Geuceu Meunara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			DPKP	3 Unit	4,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1 05 04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan NON Kebakaran	100 %		0 %	100 %	92,886,332						100 %	49,912,263	
1 05 04 2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 %		0 %	100 %	56,820,000						100 %	30,000,000	
1 05 04 2.01 02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				30 Laporan	36,800,000	Kota Banda Aceh, Jaya Baru, Geuceu Meunara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat	30 Laporan	15,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
1 05 04 2.01 04	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota				12 Dokumen	20,020,000	Kota Banda Aceh, Jaya Baru, Geuceu Meunara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat	12 Dokumen	15,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
1 05 04 2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	100 %		0 %	100 %	36,066,332						100 %	19,912,263		
1 05 04 2.02 01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Diperkirakan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran				6 Dokumen	36,066,332	Kota Banda Aceh, Jaya Baru, Geuceu Meunara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat	6 Dokumen	19,912,263	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						6,958,554,545							7,252,824,545		
1 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat daerah	100 %		0 %	100 %	6,270,367,069							100 %	7,160,424,545	
1 05 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	100 %		0 %	100 %	11,339,989							100 %	11,339,989	
1 05 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	11,339,989	Kota Banda Aceh, Jaya Baru, Lamteumen Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7 Dokumen	11,339,989	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1 05 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	5,186,376,569							100 %	5,837,376,569	
1 05 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				38 Orang/bulan	4,439,226,569	Kota Banda Aceh, Jaya Baru, Lamteumen Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Badan Penanggulangan Bencana Daerah	38 Orang/bulan	5,057,826,569	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1 05 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	747,150,000	Kota Banda Aceh, Jaya Baru, Lamteumen Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12 Dokumen	779,550,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1 05 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	35,750,000							100 %	35,750,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				65 Paket	35,750,000	Kota Banda Aceh, Jaya Baru, Lamteumen Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Badan Penanggulangan Bencana Daerah	65 Paket	35,750,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	172,467,875						100 %	131,237,875	
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				11 Paket	4,795,715	Kota Banda Aceh, Jaya Baru, Lamteumen Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11 Paket	4,925,715	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				9 Paket	42,000,000	Kota Banda Aceh, Jaya Baru, Lamteumen Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9 Paket	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	2,360,000	Kota Banda Aceh, Jaya Baru, Lamteumen Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4 Paket	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	6,312,160	Kota Banda Aceh, Jaya Baru, Lamteumen Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4 Paket	6,312,160	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	117,000,000	Kota Banda Aceh, Jaya Baru, Lamteumen Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Badan Penanggulangan Bencana Daerah	20 Laporan	120,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		0 %	100 %	420,834,207						100 %	352,621,683	
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	114,680,000	Kota Banda Aceh, Jaya Baru, Lamteumen Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Badan penanggulangan Bencana Daerah	12 Laporan	114,680,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	306,154,207	Kota Banda Aceh, Jaya Baru, Lamteumen Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Badan penanggulangan Bencana Daerah	12 Laporan	237,941,683	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		0 %	100 %	443,598,429						100 %	243,598,429	
1 05 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	214,075,091	Kota Banda Aceh, Jaya Baru, Lamteumen Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7 Unit	214,075,091	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	29,523,338	Kota Banda Aceh, Jaya Baru, Lamteumen Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7 Unit	29,523,338	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	200,000,000	Kota Banda Aceh, Jaya Baru, Lamteumen Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5 Unit	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penanggulangan dan Penanganan Bencana	100 %		0 %	100 %	688,187,476						100 %	92,400,000	
1 05 03 2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Presentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	100 %		0 %	100 %	203,000,000						100 %	5,000,000	
1 05 03 2.01 02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya				9 orang	203,000,000	Kota Banda Aceh, Jaya Baru, Lamteumen Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9 orang	5,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Presentase Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 %		0 %	100 %	259,087,332						100 %	10,000,000	
1 05 03 2.02 02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana				18 orang	39,087,332	Kota Banda Aceh, Jaya Baru, Lamteumen Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Badan Penanggulangan Bencana Daerah	18 orang	3,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
1 05 03 2.02 03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota				1 Dokumen	210,000,000	Kota Banda Aceh, Jaya Baru, Lamteumen Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1 Dokumen	3,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1 05 03 2.02 04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas				4 Unit	10,000,000	Kota Banda Aceh, Jaya Baru, Lamteumen Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4 Unit	4,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1 05 03 2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Presentase Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	100 %		0 %	100 %	181,105,572						100 %	77,400,000		
1 05 03 2.03 01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas				1 Laporan	161,525,000	Kota Banda Aceh, Jaya Baru, Lamteumen Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1 Laporan	77,400,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1 05 03 2.03 03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				1000 Orang	19,580,572	Kota Banda Aceh, Jaya Baru, Lamteumen Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1000 Orang	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1 05 03 2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Presentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100 %		0 %	100 %	44,994,572						100 %	0		
1 05 03 2.04 06	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)				1 Dokumen	44,994,572	Kota Banda Aceh, Jaya Baru, Lamteumen Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1 Dokumen	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1 06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						8,669,642,699							9,626,742,699		
1 06 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat daerah	100 %		0 %	100 %	5,815,392,290							100 %	6,532,180,544	
1 06 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	100 %		0 %	100 %	32,670,903							100 %	29,537,463	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	32,670,903	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Geuceu Komplek	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	29,537,463	Dinas Sosial
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	5,031,418,261						100 %	5,982,926,699	
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				36 Orang/bulan	4,332,718,261	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Geuceu Komplek	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Sosial	36 Orang/bulan	5,284,226,699	Dinas Sosial
1.06.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	698,700,000	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Geuceu Komplek	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Sosial	12 Dokumen	698,700,000	Dinas Sosial
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	30,250,000						100 %	30,250,000	
1.06.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				56 Paket	30,250,000	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Geuceu Komplek	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Sosial	56 Paket	30,250,000	Dinas Sosial
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	75,661,765						100 %	75,661,765	
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3,854,645	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Geuceu Komplek	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Sosial	1 Paket	3,854,645	Dinas Sosial
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	11,807,120	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Geuceu Komplek	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Sosial	6 Paket	11,807,120	Dinas Sosial
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				34 Laporan	60,000,000	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Geuceu Komplek	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Sosial	34 Laporan	60,000,000	Dinas Sosial
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %		0 %	100 %	20,000,000						100 %	20,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 06 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	20,000,000	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Sosial	6 Unit	20,000,000	Dinas Sosial
1 06 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		0 %	100 %	439,646,182						100 %	208,059,438	
1 06 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	338,986,744	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Geuceu Komplek	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Sosial	12 Laporan	107,400,000	Dinas Sosial
1 06 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	100,659,438	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Geuceu Komplek	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Sosial	12 Laporan	100,659,438	Dinas Sosial
1 06 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		0 %	100 %	185,745,179						100 %	185,745,179	
1 06 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	128,680,000	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Sosial	14 Unit	128,680,000	Dinas Sosial
1 06 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah Mebel yang Dipelihara				0 Unit 1 Unit	10,000,000	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Sosial	0 Unit 1 Unit	10,000,000	Dinas Sosial
1 06 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				968 Unit	6,906,936	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Sosial	968 Unit	6,906,936	Dinas Sosial
1 06 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	40,158,243	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Sosial	4 Unit	40,158,243	Dinas Sosial
1 06 02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Sosial	100 %		0 %	100 %	60,067,850						100 %	60,067,850	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 06 02 2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100 %		0 %	100 %	60,067,850						100 %	60,067,850	
1 06 02 2.03 02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				135 Orang	15,668,850	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	135 Orang	15,668,850	Dinas Sosial
1 06 02 2.03 03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Keluarga	23,088,000	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	10 Keluarga	23,088,000	Dinas Sosial
1 06 02 2.03 05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Sertifikat	21,311,000	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	30 Sertifikat	21,311,000	Dinas Sosial
1 06 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Peningkatan Rehabilitasi Sosial	100 %		0 %	100 %	1,454,389,915						100 %	1,088,373,915	
1 06 04 2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar	100 %		0 %	100 %	770,148,900						100 %	504,132,900	
1 06 04 2.01 01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				150 Orang	226,407,900	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial	150 Orang	211,407,900	Dinas Sosial

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				150 Orang	40,000,000	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial	150 Orang	40,000,000	Dinas Sosial
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				11 Orang	301,016,000	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial	11 Orang	50,000,000	Dinas Sosial
1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				150 Orang	14,000,000	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial	150 Orang	14,000,000	Dinas Sosial
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				150 Orang	99,300,000	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial	150 Orang	99,300,000	Dinas Sosial
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				150 Orang	19,000,000	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial	150 Orang	19,000,000	Dinas Sosial

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.06.04.2.01.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	3,375,000	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial	20 Orang	3,375,000	Dinas Sosial
1.06.04.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				75 Orang	46,500,000	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial	75 Orang	46,500,000	Dinas Sosial
1.06.04.2.01.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	10,100,000	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial	50 Orang	10,100,000	Dinas Sosial
1.06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	10,450,000	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial	50 Orang	10,450,000	Dinas Sosial
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Di Luar Panti Sosial Yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	100 %		0 %	100 %	684,241,015						100 %	584,241,015	
1.06.04.2.02.01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				2640 Orang	493,250,000	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Di Luar Panti Sosial	2640 Orang	493,250,000	Dinas Sosial

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.06.04.2.02.03	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	21,000,000	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Di Luar Panti Sosial	100 Orang	21,000,000	Dinas Sosial
1.06.04.2.02.04	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	7,340,000	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Di Luar Panti Sosial	100 Orang	7,340,000	Dinas Sosial
1.06.04.2.02.06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota				75 Orang	3,500,000	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Di Luar Panti Sosial	75 Orang	3,500,000	Dinas Sosial
1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				60 Orang	14,000,000	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Di Luar Panti Sosial	60 Orang	14,000,000	Dinas Sosial
1.06.04.2.02.08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota				70 Orang	8,662,500	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Di Luar Panti Sosial	70 Orang	8,662,500	Dinas Sosial
1.06.04.2.02.10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	2,050,000	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Di Luar Panti Sosial	20 Orang	2,050,000	Dinas Sosial

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.06.04.2.02.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	2,100,000	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Di Luar Panti Sosial	50 Orang	2,100,000	Dinas Sosial
1.06.04.2.02.12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	2,800,000	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Di Luar Panti Sosial	50 Orang	2,800,000	Dinas Sosial
1.06.04.2.02.14	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota				5 Dokumen	129,538,515	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Di Luar Panti Sosial	5 Dokumen	29,538,515	Dinas Sosial
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Peningkatan Perlindungan Dan Jaminan Sosial	100 %		0 %	100 %	1,092,466,244						100 %	1,777,016,000	
1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase Anak Terlantar yang Terpelihara	100 %		0 %	100 %	25,290,000						100 %	25,290,000	
1.06.05.2.01.01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	17,600,000	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Anak Terlantar	30 Orang	17,600,000	Dinas Sosial
1.06.05.2.01.02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	5,590,000	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Anak Terlantar	30 Orang	5,590,000	Dinas Sosial
1.06.05.2.01.03	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	2,100,000	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Anak Terlantar	30 Orang	2,100,000	Dinas Sosial
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Yang Dikelola	100 %		0 %	100 %	1,067,176,244						100 %	1,751,726,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				50 Orang	242,150,045	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Yang Dikelola	50 Orang	242,150,045	Dinas Sosial
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				50 Keluarga	264,198,849	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Yang Dikelola	50 Keluarga	748,732,289	Dinas Sosial
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				1000 Keluarga	560,827,350	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Yang Dikelola	1000 Keluarga	760,843,666	Dinas Sosial
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Peningkatan Penanganan Bencana	100 %		0 %	100 %	247,326,400						100 %	169,104,390	
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah orang yang mendapatkan sandang, pangan dan bantuan dasar bagi korban bencana alam	100 %		0 %	100 %	247,326,400						100 %	169,104,390	
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	183,725,850	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Korban Bencana Alam dan Sosial	30 Orang	105,503,840	Dinas Sosial
1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	36,760,000	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Korban Bencana Alam dan Sosial	30 Orang	36,760,000	Dinas Sosial
1.06.06.2.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Unit	5,697,250	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Korban Bencana Alam dan Sosial	1 Unit	5,697,250	Dinas Sosial
1.06.06.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	12,170,000	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Korban Bencana Alam dan Sosial	30 Orang	12,170,000	Dinas Sosial

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 06 06 2.01 05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	8,973,300	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Korban Bencana Alam dan Sosial	30 Orang	8,973,300	Dinas Sosial
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2 07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						6,013,706,000							5,668,706,000	
2 07 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat daerah	100 %		0 %	100 %	5,193,706,000						100 %	4,918,706,000	
2 07 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi OPD yang Tersusun	100 %		0 %	100 %	16,473,000						100 %	16,472,940	
2 07 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	16,473,000	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Mibo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Dinas Tenaga Kerja	8 Dokumen	16,472,940	Dinas Tenaga Kerja
2 07 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	4,176,909,357						100 %	4,176,909,357	
2 07 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				31 Orang/bulan	3,785,859,357	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Mibo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Tenaga Kerja	31 Orang/bulan	3,785,859,357	Dinas Tenaga Kerja
2 07 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	391,050,000	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Mibo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Tenaga Kerja	12 Dokumen	391,050,000	Dinas Tenaga Kerja
2 07 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	22,550,000						100 %	22,550,000	
2 07 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				40 Paket	22,550,000	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Mibo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Dinas Tenaga Kerja	40 Paket	22,550,000	Dinas Tenaga Kerja
2 07 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	100 %		0 %	100 %	514,695,061						100 %	416,479,181	
2 07 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	2,200,000	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Mibo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Tenaga Kerja	10 Paket	6,479,181	Dinas Tenaga Kerja
2 07 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	12,371,350	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Mibo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Tenaga Kerja	10 Paket	10,000,000	Dinas Tenaga Kerja

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				55 Laporan	500,123,711	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Mibo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Tenaga Kerja	55 Laporan	400,000,000	Dinas Tenaga Kerja
2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %		0 %	100 %	85,000,000						100 %	45,000,000	
2.07.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				105 Unit	85,000,000	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Mibo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Dinas Tenaga Kerja	105 Unit	45,000,000	Dinas Tenaga Kerja
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %		0 %	100 %	138,294,582						100 %	138,294,522	
2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	107,520,000	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Mibo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Dinas Tenaga Kerja	12 Laporan	107,520,000	Dinas Tenaga Kerja
2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	30,774,582	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Mibo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Dinas Tenaga Kerja	12 Laporan	30,774,522	Dinas Tenaga Kerja
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %		0 %	100 %	239,784,000						100 %	103,000,000	
2.07.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	74,464,000	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Mibo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Tenaga Kerja	7 Unit	41,000,000	Dinas Tenaga Kerja
2.07.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				105 Unit	15,320,000	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Mibo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Tenaga Kerja	105 Unit	12,000,000	Dinas Tenaga Kerja
2.07.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	150,000,000	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Mibo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Tenaga Kerja	2 Unit	50,000,000	Dinas Tenaga Kerja
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Jumlah Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	50,000,000						1 Dokumen	0	
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	50,000,000						1 Dokumen	0	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 07 02 2.01 01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro				1 Dokumen	50,000,000	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Mibo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Tenaga Kerja	1 Dokumen	0	Dinas Tenaga Kerja	
2 07 03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase peserta pelatihan yang bekerja	100 %		0 %	100 %	490,000,000					100 %	185,000,000		
2 07 03 2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja yang Dilatih	448 Orang		0 Orang	112 Orang	480,000,000					112 Orang	155,000,000		
2 07 03 2.01 01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				112 Orang	430,000,000	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Mibo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pencari Kerja	112 Orang	155,000,000	Dinas Tenaga Kerja	
2 07 03 2.01 03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja				1 Unit	50,000,000	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Mibo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pencari Kerja	1 Unit	0	Dinas Tenaga Kerja	
2 07 03 2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina	7 Lembaga		0 Lembaga	7 Lembaga	10,000,000					7 Lembaga	10,000,000		
2 07 03 2.02 01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina				7 Lembaga	10,000,000	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Mibo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	7 Lembaga	10,000,000	Dinas Tenaga Kerja	
2 07 04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	55 %		0 %	40 %	30,000,000					40 %	190,000,000		
2 07 04 2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan antar kerja di daerah kab/kota	100 %		0 %	100 %	10,000,000					100 %	15,000,000		
2 07 04 2.01 05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja				16 Orang	10,000,000	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Mibo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tenaga Kerja	16 Orang	10,000,000	Dinas Tenaga Kerja	
2 07 04 2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase jumlah pencari kerja yang mengikuti kegiatan jobfair yang mendapatkan pekerjaan	100 %		0 %	100 %	20,000,000					100 %	175,000,000		
2 07 04 2.03 01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online				1 Dokumen	20,000,000	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Mibo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Tenaga Kerja	1 Dokumen	20,000,000	Dinas Tenaga Kerja	
2 07 05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase pembinaan terhadap kelembagaan dan sarana hubungan industrial di perusahaan	45 %		0 %	30 %	250,000,000					30 %	375,000,000		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 07 05 2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang Memiliki Lembaga Bipartit dan Serikat Pekerja	30 Perusahaan		0 Perusahaan	26 Perusahaan	250,000,000						26 Perusahaan	350,000,000	
2 07 05 2.02 02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan				32 Perkara	45,000,000	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Mibo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pekerja dan Pengusaha	32 Perkara	75,000,000	Dinas Tenaga Kerja
2 07 05 2.02 04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				13 Lembaga	205,000,000	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Mibo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pekerja dan Pengusaha	13 Lembaga	200,000,000	Dinas Tenaga Kerja
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3 31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						14,046,758,000							11,477,022,000	
3 31 02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase gampong yang memiliki minimal satu produk industri kecil/menengah	100 %		0 %	100 %	13,966,758,000						100 %	11,402,022,000	
3 31 02 2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah industri kecil yang mendapatkan pembinaan pelatihan, fasilitasi sarana dan prasarana industri serta promosi produk industri	100 IKM		0 IKM	100 IKM	13,966,758,000						100 IKM	11,402,022,000	
3 31 02 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				2 Dokumen	4,230,000,000	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Mibo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		IKM	2 Dokumen	80,000,000	Dinas Tenaga Kerja
3 31 02 2.01 04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				2 Dokumen	100,000,000	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Mibo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		IKM	2 Dokumen	80,000,000	Dinas Tenaga Kerja
3 31 02 2.01 05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				2 Dokumen	9,636,758,000	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Mibo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		IKM	2 Dokumen	11,142,022,000	Dinas Tenaga Kerja
3 31 04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Jumlah Penataan IKM	100 %		0 %	100 %	80,000,000						100 %	45,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 31 04 2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah industri kecil yang mendapatkan pembinaan teknologi dan fasilitasi izin usaha industri	100 IKM		0 IKM	100 IKM	80,000,000						100 IKM	45,000,000	
3 31 04 2.01 01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				1 Dokumen	40,000,000	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			IKM	1 Dokumen	15,000,000	Dinas Tenaga Kerja
3 31 04 2.01 02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas				1 Dokumen	40,000,000	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Miibo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			IKM	1 Dokumen	15,000,000	Dinas Tenaga Kerja
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2 08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						8,013,601,321						7,020,531,777		
2 08 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat daerah	100 %		0 %	100 %	6,036,779,304						100 %	5,595,330,337	
2 08 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	100 %		0 %	100 %	31,425,500						100 %	31,425,500	
2 08 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	31,425,500	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Merduati	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		DP3AP2KB	1 Dokumen	31,425,500	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	4,705,511,132						100 %	4,705,511,132	
2 08 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32 Orang/bulan	4,002,611,132	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Merduati	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			DP3AP2KB	32 Orang/bulan	4,002,611,132	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	702,900,000	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Merduati	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			DP3AP2KB	12 Dokumen	702,900,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 08 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	25,300,000						100 %	25,300,000	
2 08 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				46 Paket	25,300,000	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Merduati	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			DP3AP2KB	46 Paket	25,300,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	127,363,630						100 %	127,363,630	
2 08 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	4,808,702	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Merduati	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			DP3AP2KB	10 Paket	4,808,702	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	22,554,928	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Merduati	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			DP3AP2KB	6 Paket	22,554,928	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	100,000,000	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Merduati	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			DP3AP2KB	12 Laporan	100,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %		0 %	100 %	574,347,731						100 %	150,000,000	
2 08 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	574,347,731	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Merduati	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			DP3AP2KB	8 Unit	150,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		0 %	100 %	279,300,000						100 %	279,300,000	
2 08 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	179,300,000	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Merduati	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			DP3AP2KB	12 Laporan	179,300,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.08.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	100,000,000	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Merduati	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			DP3AP2KB	12 Laporan	100,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		0 %	100 %	293,531,311						100 %	276,430,075	
2.08.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				35 Unit	182,038,000	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Merduati	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			DP3AP2KB	35 Unit	182,038,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				48 Unit	13,493,311	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Merduati	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			DP3AP2KB	48 Unit	13,493,311	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	98,000,000	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Merduati	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			DP3AP2KB	1 Unit	80,898,764	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Peningkatan Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	100 %		0 %	100 %	523,401,440						100 %	248,401,440	
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	100 %		0 %	100 %	62,405,200						100 %	62,405,200	
2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota				44 Perangkat Daerah	42,328,600	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD Kota Banda Aceh	44 Perangkat Daerah	42,328,600	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.08.02.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota				44 Perangkat Daerah	20,076,600	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD Kota Banda Aceh	44 Perangkat Daerah	20,076,600	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 %		0 %	100 %	225,396,240						100 %	50,396,240	
2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	225,396,240	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Perempuan di Kota Banda Aceh	1 Dokumen	50,396,240	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 %		0 %	100 %	235,600,000						100 %	135,600,000	
2.08.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				29 Orang	235,600,000	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			WDC dan Balee Inong	29 Orang	135,600,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Peningkatan Perlindungan Perempuan	100 %		0 %	100 %	290,740,395						100 %	275,000,000	
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100 %		0 %	100 %	80,275,000						100 %	64,534,605	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	80,275,000	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kota Banda Aceh	1 Dokumen	64,534,605	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan	100 %		0 %	100 %	108,159,395						100 %	108,159,395	
2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan				70 Orang	108,159,395	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Perempuan di Kota Banda Aceh	70 Orang	108,159,395	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 %		0 %	100 %	102,306,000						100 %	102,306,000	
2.08.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				70 Orang	102,306,000	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak			Paralegal dan staf UPTD PPA	70 Orang	102,306,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga	100 %		0 %	100 %	78,705,852						100 %	90,000,000	
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %		0 %	100 %	78,705,852						100 %	90,000,000	
2.08.04.2.01.02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	78,705,852	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Keluarga di Kota Banda Aceh	1 Dokumen	90,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 08 05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Peningkatan Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	100 %		0 %	100 %	54,480,330						100 %	30,000,000	
2 08 05 2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %		0 %	100 %	54,480,330						100 %	30,000,000	
2 08 05 2.01 01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	54,480,330	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		OPD Kota Banda Aceh	1 Dokumen	30,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2 08 06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Peningkatan Pemenuhan Hak Anak (PHA)	100 %		0 %	100 %	290,000,000						100 %	280,000,000	
2 08 06 2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	100 %		0 %	100 %	290,000,000						100 %	280,000,000	
2 08 06 2.01 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha				9 Organisasi	290,000,000	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Masyarakat Kota Banda Aceh	9 Organisasi	280,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2 08 07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Peningkatan Perlindungan Khusus Anak	100 %		0 %	100 %	739,494,000						100 %	501,800,000	
2 08 07 2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kab/Kota	100 %		0 %	100 %	390,450,000						100 %	152,756,000	
2 08 07 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	390,450,000	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak		Masyarakat Kota Banda Aceh	1 Dokumen	152,756,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 08 07 2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %		0 %	100 %	349,044,000						100 %	349,044,000	
2 08 07 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Layanan	349,044,000	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak			Perempuan dan Anak	1 Layanan	349,044,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					4,019,169,016							3,785,640,000	
2 14 02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Pengendalian Penduduk	100 %		0 %	100 %	55,000,000						100 %	45,000,000	
2 14 02 2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	100 %		0 %	100 %	55,000,000						100 %	45,000,000	
2 14 02 2.01 02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	55,000,000	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kota Banda Aceh	1 Dokumen	45,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	100 %		0 %	100 %	3,710,790,000						100 %	3,710,790,000	
2 14 03 2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	100 %		0 %	100 %	2,763,923,000						100 %	2,763,923,000	
2 14 03 2.01 08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				1 Laporan	2,763,923,000	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB			Masyarakat Kota Banda Aceh	1 Laporan	2,763,923,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 14 03 2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	100 %		0 %	100 %	946,867,000						100 %	946,867,000	
2 14 03 2.03 06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB				5 Unit	946,867,000	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB		Balai Penyuluh	5 Unit	946,867,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2 14 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	100 %		0 %	100 %	253,379,016						100 %	29,850,000	
2 14 04 2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100 %		0 %	100 %	253,379,016						100 %	29,850,000	
2 14 04 2.01 07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				1 Laporan	253,379,016	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Masyarakat Kota Banda Aceh	1 Laporan	29,850,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2 09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						14,264,506,159						16,849,338,165		
2 09 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100 %		0 %	100 %	13,155,845,159						100 %	15,979,606,065	
2 09 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi OPD yang tersusun	100 %		0 %	100 %	8,321,000						100 %	9,978,100	
2 09 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	8,321,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh	5 Dokumen	9,153,100	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan	
2 09 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	100 %		0 %	100 %	12,502,028,036						100 %	15,258,240,840	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan	11,952,628,036	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh	0 Orang/bulan	14,653,900,840	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan
2.09.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	549,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh	1 Dokumen	600,490,000	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan
2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	56,650,000						100 %	62,315,000	
2.09.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				115 Paket	56,650,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh	115 Paket	62,315,000	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Administrasi Umum	100 %		0 %	100 %	136,991,540						100 %	151,130,694	
2.09.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	5,909,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh	3 Paket	6,500,120	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan
2.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	19,202,750	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh	7 Paket	21,123,025	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan
2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	111,879,590	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh	4 Laporan	123,067,549	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan
2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100 %		0 %	100 %	3,977,600						100 %	4,375,360	
2.09.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3,977,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh	3 Unit	4,375,360	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 09 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %		0 %	100 %	218,986,103						100 %	241,786,103	
2 09 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	168,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh	12 Laporan	184,800,000	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan
2 09 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	50,986,103	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh	12 Laporan	56,986,103	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan
2 09 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		0 %	100 %	228,890,880						100 %	251,779,968	
2 09 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				55 Unit	212,165,380	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh	55 Unit	233,381,918	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan
2 09 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 20 Unit	2,610,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh	0 Unit 20 Unit	2,871,550	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan
2 09 01 2.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	14,115,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh	3 Unit	15,526,500	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan
2 09 03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Deversifikasi Jenis Pangan Baru	100 %		0 %	100 %	954,007,000						100 %	642,632,700	
2 09 03 2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan dan penyaluran pangan pokok	100 %		0 %	100 %	351,300,000						100 %	332,755,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 09 03 2.01 01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan				2 Laporan	300,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kelompok Wanita Tani	2 Laporan	330,000	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan
2 09 03 2.01 02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia				30 Laporan	351,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Kelompok Wanita Tani	30 Laporan	331,100,000	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan
2 09 03 2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Gampong yang Bebas dari Status Rawan Pangan	30 Gampong		0 Gampong	30 Gampong	523,800,000						30 Gampong	222,035,000	
2 09 03 2.02 03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				20 Ton	523,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Otonomi Khusus	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Kelompok Wanita Tani	20 Ton	220,330,000	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan
2 09 03 2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah hasil analisis pola dan kebutuhan konsumsi pangan	100 %		0 %	100 %	78,907,000						100 %	87,402,700	
2 09 03 2.04 02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				1 Laporan	78,907,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kelompok Wanita Tani	1 Laporan	86,797,700	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan
2 09 05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pangan yang Memenuhi syarat	100 %		0 %	100 %	154,654,000						100 %	171,219,400	
2 09 05 2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian yang tersedia	1 Unit		0 Unit	1 Unit	154,654,000						1 Unit	171,219,400	
2 09 05 2.01 05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	154,654,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas / SKPD Terkait	1 Dokumen	170,119,400	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3 25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					4,107,120,000							4,518,437,000	
3 25 03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase jumlah wilayah penangkapan	100 %		0 %	25 %	2,515,000,000						25 %	2,766,775,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 25 03 2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	100 %		0 %	100 %	2,515,000,000						100 %	2,766,775,000	
3 25 03 2.01 02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia				20 Unit	1,100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh	20 Unit	1,210,000,000	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan
3 25 03 2.01 03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia				10 Unit	1,415,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Otonomi Khusus			Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh	10 Unit	1,556,500,000	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan
3 25 04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Pengelolaan Perikanan Budidaya	100 %		0 %	25 %	942,120,000						25 %	1,036,332,000	
3 25 04 2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase jumlah pembudidaya ikan	100 %		0 %	100 %	942,120,000						100 %	1,036,332,000	
3 25 04 2.02 01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				5 Kelompok	942,120,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh	5 Kelompok	1,036,332,000	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan
3 25 06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Olahan Perikanan	100 %		0 %	25 %	650,000,000						25 %	715,330,000	
3 25 06 2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase jumlah bahan baku industri	100 %		0 %	100 %	650,000,000						100 %	715,000,000	
3 25 06 2.03 02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi				6 Pelaku Usaha	650,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Pengolah	6 Pelaku Usaha	715,000,000	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							3,786,550,006						4,169,618,857	
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase pemamfaatan sarana pertanian	100 %		0 %	40 %	319,650,000						40 %	352,330,000	
3 27 02 2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Sarana Pertanian	2 Kali		0 Kali	2 Kali	102,500,000						2 Kali	112,915,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
3	27	02	2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi					2 Laporan	102,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Masyarakat	2 Laporan	112,750,000	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan
3	27	02	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	100 %		0 %	100 %		217,150,000					100 %	238,975,000	
3	27	02	2.05	05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia				20 Ton	217,150,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Petani Ternak	20 Ton	238,865,000	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan	
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana pertanian	100 %		0 %	30 %		3,416,861,506					30 %	3,752,621,507	
3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian	8 Unit		0 Unit	8 Unit		3,416,861,506					8 Unit	3,751,686,507	
3	27	03	2.02	07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				5 Unit	68,611,506	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh	5 Unit	68,611,507	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan	
3	27	03	2.02	08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				3 Unit	1,821,300,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh	3 Unit	2,003,430,000	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan	
3	27	03	2.02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				2 Unit	1,526,950,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh	2 Unit	1,679,645,000	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan	
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase pengendalian kesehatan hewan dan Kesmavet	50 %		0 %	50 %		50,038,500					50 %	56,307,350	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.11.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	5,024,000	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh	1 Dokumen	5,024,000	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan
2.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	4,509,650	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh	1 Laporan	4,509,650	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	100 %		0 %	100 %	25,463,451,766						100 %	25,455,051,766	
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				48 Orang/bulan	6,270,430,966	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		ASN Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh	48 Orang/bulan	6,270,430,966	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan
2.11.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	19,193,020,800	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		ASN Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh	1 Dokumen	19,184,620,800	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan
2.11.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	80 %		0 %	80 %	252,580,530						80 %	252,580,530	
2.11.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				12 Dokumen	252,580,530	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Warga Kota Banda Aceh/Wajib Retribusi	12 Dokumen	252,580,530	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	818,695,600						100 %	818,695,600	
2.11.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				11 Paket	818,695,600	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			PNS, Tenaga Kontrak dan Pekerja DLHK3	11 Paket	818,695,600	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi umum	100 %		0 %	100 %	979,968,292						100 %	979,968,292	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				26 Paket	432,613,975	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, Tamu, Kantor dan Gedung Sarana dan Prasarana DLHK3	26 Paket	432,613,975	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan
2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	205,228,338	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, Tamu, Kantor dan Gedung Sarana dan Prasarana DLHK3	6 Paket	205,228,338	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				9 Paket	122,125,979	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, Tamu, Kantor dan Gedung Sarana dan Prasarana DLHK3	9 Paket	122,125,979	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	220,000,000	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, Tamu, Kantor dan Gedung Sarana dan Prasarana DLHK3	20 Laporan	220,000,000	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		0 %	100 %	30,000,000						100 %	30,000,000	
2.11.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Unit	30,000,000	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor dan Gedung Sarana dan Prasarana DLHK3	6 Unit	30,000,000	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		0 %	100 %	14,477,312,625						100 %	14,524,893,725	
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	14,276,293,423	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, Kantor dan LPJU Se-Kota Banda Aceh	12 Laporan	14,323,874,523	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	201,019,202	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN, Kantor dan LPJU Se-Kota Banda Aceh	12 Laporan	201,019,202	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		0 %	100 %	6,366,378,486						100 %	6,366,378,486	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				150 Unit	6,350,625,000	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Peralatan dan mesin kantor, kantor dan gedung Sarana dan Prasarana, kendaraan dinas/operasional	150 Unit	6,350,625,000	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan
2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				90 Unit	15,753,486	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Peralatan dan mesin kantor, kantor dan gedung Sarana dan Prasarana, kendaraan dinas/operasional	90 Unit	15,753,486	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penyusunan Dokumen RPPLH	100 %		0 %	100 %	125,112,528						100 %	225,112,528	
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	2 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	125,112,528						1 Dokumen	225,112,528	
2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	125,112,528	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		ASN dan tenaga ahli	1 Dokumen	225,112,528	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100 %		0 %	100 %	428,258,928						100 %	478,258,928	
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Penurunan emisi gas rumah kaca terhadap target RAD GRK Banda Aceh	100 %		0 %	100 %	428,258,928						100 %	478,258,928	
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				1 Dokumen	166,017,092	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat dan lingkungan Kota Banda Aceh	1 Dokumen	216,017,092	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan
2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	262,241,836	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat dan lingkungan Kota Banda Aceh	1 Dokumen	262,241,836	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 11 04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Luasan RTH	14380 %		0 %	14365 %	1,163,637,319						14365 %	413,637,319	
2 11 04 2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Luas RTH yang dipelihara untuk meningkatkan keanekaragaman hayati	14.380 %		0 %	14.365 %	1,163,637,319						14.365 %	413,637,319	
2 11 04 2.01 04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				115.23 Ha	1,083,342,011	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pembibitan DLHK3 dan RTH Kota Banda Aceh	115.23 Ha	333,342,011	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan
2 11 04 2.01 05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				56.95 Ha	50,295,308	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pembibitan DLHK3 dan RTH Kota Banda Aceh	56.95 Ha	50,295,308	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan
2 11 04 2.01 07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola				2 Unit	30,000,000	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pembibitan DLHK3 dan RTH Kota Banda Aceh	2 Unit	30,000,000	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan
2 11 05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	100 %		0 %	100 %	10,000,000						100 %	10,000,000	
2 11 05 2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 %		0 %	100 %	10,000,000						100 %	10,000,000	
2 11 05 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya				1 Dokumen	10,000,000	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kota Banda Aceh	1 Dokumen	10,000,000	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 11 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pelanggaran Usaha/Kegiatan terhadap izin lingkungan/PPLH yang diterbitkan	12 %		0 %	18 %	135,889,800						18 %	135,889,800	
2 11 06 2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelanggaran Usaha/Kegiatan terhadap izin lingkungan/PPLH yang diterbitkan	12 %		0 %	18 %	135,889,800						18 %	135,889,800	
2 11 06 2.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan				1 Dokumen	114,697,548	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Usaha dan/atau Kegiatan dan Instansi Pemerintah	1 Dokumen	114,697,548	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan	
2 11 06 2.01 03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				242 Laporan	21,192,252	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Usaha dan/atau Kegiatan dan Instansi Pemerintah	242 Laporan	21,192,252	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan	
2 11 07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	100 %		0 %	100 %	4,999,920						100 %	4,999,920	
2 11 07 2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Persentase Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	100 %		0 %	100 %	4,999,920						100 %	4,999,920	
2 11 07 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH				1 Dokumen	4,999,920	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Masyarakat Hukum Adat (MHA)	1 Dokumen	4,999,920	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 11 08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Diberi Diklat Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	100 %		0 %	65 %	106,903,763						65 %	106,903,763	
2 11 08 2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Diberi Diklat Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	100 %		0 %	65 %	106,903,763						65 %	106,903,763	
2 11 08 2.01 01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH				50 Lembaga	55,927,588	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Lembaga kemasyarakata n peduli lingkungan hidup (Sekolah dan Komunitas) di Kota Banda Aceh	50 Lembaga	55,927,588	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan
2 11 08 2.01 02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	50,976,175	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Lembaga kemasyarakata n peduli lingkungan hidup (Sekolah dan Komunitas) di Kota Banda Aceh	1 Dokumen	50,976,175	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan
2 11 09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	100 %		0 %	100 %	77,317,500						100 %	77,317,500	
2 11 09 2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %		0 %	100 %	77,317,500						100 %	77,317,500	
2 11 09 2.01 01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				1 Entitas	77,317,500	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Gampong, Sekolah, Siswa dan Usaha dan/atau Kegiatan	1 Entitas	77,317,500	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan
2 11 10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100 %		0 %	100 %	28,401,180						100 %	28,401,180	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 11 10 2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Penegakan Hukum Lingkungan yang diselesaikan	100 %		0 %	100 %	28,401,180						100 %	28,401,180	
2 11 10 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan				1 Dokumen	28,401,180	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Seluruh warga Kota Banda Aceh dan tamu yang datang di Kota Banda Aceh	1 Dokumen	28,401,180	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan
2 11 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Sampah Terkelola	98,25 %		0 %	97,5 %	5,185,315,354						97,5 %	7,740,565,354	
2 11 11 2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase Sampah Terkelola	98.25 %		0 %	97.5 %	5,083,187,664						97.5 %	7,588,437,664	
2 11 11 2.01 02	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali				2 Laporan	263,887,275	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Warga Kota Banda Aceh/Wajib Retribusi, pengurus Bank Sampah, pengurus TPS3R dan pelapak, TPA Gampong Jawa dan TPA Regional Blang Bintang	2 Laporan	385,137,275	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan
2 11 11 2.01 03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota				76043.5 Ton	76,208,458	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Warga Kota Banda Aceh/Wajib Retribusi, pengurus Bank Sampah, pengurus TPS3R dan pelapak, TPA Gampong Jawa dan TPA Regional Blang Bintang	76043.5 Ton	176,208,458	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				35 Kelompok	524,049,514	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			35 Kelompok	574,049,514	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan	
2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada				1 Dokumen	149,250,000	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Dokumen	149,250,000	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan	
2.11.11.2.01.06	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang Ditetapkan				1 Dokumen	800,000,000	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Dokumen	800,000,000	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan	
2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				10 Unit	3,269,792,417	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10 Unit	5,503,792,417	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 11 11 2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Persentase lokasi yang di monitoring kebersihan dan keindahannya	100 %		0 %	100 %	102,127,690						100 %	152,127,690	
2 11 11 2.03 03	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota				11 Laporan	102,127,690	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Relawan Lingkungan, para manager lapangan di wilayah Kota Banda Aceh	11 Laporan	152,127,690	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2 12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						6,941,842,518						6,929,731,251		
2 12 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat daerah	100 %		0 %	100 %	6,640,479,749						100 %	6,892,731,251	
2 12 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	100 %		0 %	100 %	37,235,604						100 %	40,000,000	
2 12 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	37,235,604	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Sukaramai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Disdukcapil	1 Dokumen	40,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	5,387,509,646						100 %	5,883,949,360	
2 12 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	4,922,509,646	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Sukaramai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Disdukcapil	35 Orang/bulan	5,418,949,360	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	465,000,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Sukaramai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Disdukcapil	12 Dokumen	465,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	25,300,000						100 %	25,850,000	
2 12 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				47 Paket	25,300,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Sukaramai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Disdukcapil	47 Paket	25,850,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	97,862,436						100 %	139,449,019	
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1,223,464	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Sukaramai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Disdukcapil	1 Paket	5,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	24,282,455		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Disdukcapil	1 Paket	16,832,935	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	15,318,334		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Disdukcapil	1 Paket	17,616,084	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	57,038,183	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Sukaramai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Disdukcapil	30 Laporan	100,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	%		%	100 %	20,000,000						100 %	0	
2.12.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	20,000,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Sukaramai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Disdukcapil	1 Unit	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		0 %	100 %	1,015,094,083						100 %	713,482,872	
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	24,934,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Sukaramai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Disdukcapil	1 Laporan	27,427,400	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	990,160,083	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Sukaramai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Disdukcapil	12 Laporan	686,055,472	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		0 %	100 %	57,477,980						100 %	90,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	37,609,600	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Sukaramai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Disdukcapil	3 Unit	40,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				80 Unit	19,868,380	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Sukaramai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Disdukcapil	80 Unit	50,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	100 %		0 %	100 %	73,399,743					100 %	7,000,000		
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan	100 %		0 %	100 %	73,399,743					100 %	7,000,000		
2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				1 Dokumen	41,267,289	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Sukaramai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Masyarakat penerima layanan	1 Dokumen		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				1 Dokumen	26,132,454	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Sukaramai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Masyarakat penerima layanan	1 Dokumen		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.02.2.01.03	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk				120 Orang	6,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Masyarakat penerima layanan	120 Orang	7,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	100 %		0 %	100 %	110,860,717					100 %	0		
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Pencatatan Sipil	100 %		0 %	100 %	33,065,492					100 %	0		
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				1 Layanan	33,065,492	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Sukaramai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Masyarakat penerima layanan	1 Layanan		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase capaian Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100 %		0 %	100 %	77,795,225					100 %	0		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif								
										Nasional	Daerah											
2	12	03	2.02	03	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non- Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil						1 Laporan	30,598,390	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Masyarakat penerima layanan	1 Laporan	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	03	2.02	08	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil						1 Laporan	47,196,835	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Sukaramai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Masyarakat penerima layanan	1 Laporan	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pemenuhan dan Penyajian Informasi Administrasi Kependudukan	100 %		0 %	100 %			67,177,150						100 %	0		
2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase Capaian Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Data base kependudukan	100 %		0 %	100 %			67,177,150						100 %	0		
2	12	04	2.01	02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				1 Dokumen	67,177,150	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Sukaramai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Masyarakat penerima layanan	1 Dokumen	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Profil Kependudukan	100 %		0 %	100 %			49,925,159						100 %	30,000,000		
2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	100 %		0 %	100 %			49,925,159						100 %	30,000,000		
2	12	05	2.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun				1 Dokumen	49,925,159	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Sukaramai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Masyarakat penerima layanan	1 Dokumen	30,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						7,839,377,345										7,142,977,345	
2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat daerah	100 %		0 %	100 %			4,632,739,873						100 %	5,036,839,873		
2	13	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	100 %		0 %	100 %			15,000,000						100 %	25,000,000		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 13 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	15,000,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Laksana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		DPMG Kota Banda Aceh	3 Dokumen	25,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
2 13 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	3,626,494,073						100 %	4,112,094,073	
2 13 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	3,333,694,073	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Laksana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		ASN DPMG Kota Banda Aceh	14 Orang/bulan	3,819,294,073	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
2 13 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	292,800,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Laksana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		ASN DPMG Kota Banda Aceh	4 Dokumen	292,800,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
2 13 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	19,800,000						100 %	19,800,000	
2 13 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	19,800,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Laksana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		ASN DPMG Kota Banda Aceh	1 Paket	19,800,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
2 13 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	414,809,800						100 %	440,459,800	
2 13 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	6,000,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Laksana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		DPMG Kota Banda Aceh dan ASN DPMG Kota Banda Aceh	1 Paket	8,800,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
2 13 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	15,000,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Laksana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		DPMG Kota Banda Aceh dan ASN DPMG Kota Banda Aceh	1 Paket	15,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
2 13 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60 Laporan	393,809,800	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Laksana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		DPMG Kota Banda Aceh dan ASN DPMG Kota Banda Aceh	60 Laporan	416,659,800	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
2 13 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %		0 %	100 %	329,000,000						100 %	187,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 13 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				12 Unit	35,000,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Laksana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		DPMG Kota Banda Aceh	12 Unit	40,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
2 13 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	214,000,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Laksana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		DPMG Kota Banda Aceh	1 Unit	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
2 13 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	80,000,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Laksana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		DPMG Kota Banda Aceh	10 Unit	122,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
2 13 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		0 %	100 %	160,180,000						100 %	179,680,000	
2 13 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	105,180,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Laksana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		DPMG Kota Banda Aceh	1 Laporan	105,180,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
2 13 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	55,000,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Laksana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		DPMG Kota Banda Aceh	1 Laporan	74,500,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
2 13 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		0 %	100 %	67,456,000						100 %	72,806,000	
2 13 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	55,456,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Laksana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		DPMG Kota Banda Aceh	9 Unit	59,806,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
2 13 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	12,000,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Laksana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		DPMG Kota Banda Aceh	20 Unit	13,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
2 13 02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Gampong yang baik	100 %		0 %	100 %	1,142,000,000						100 %	10,000,000	
2 13 02 2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase prasarana dan sarana pelayanan pemerintahan Gampong yang tersedia	100 %		0 %	100 %	1,142,000,000						100 %	10,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.13.02.2.01.06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi				600 Unit	1,142,000,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Laksana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Masyarakat Gampong	600 Unit	10,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Kerjasama antar gampong dan pihak ketiga yang terbentuk	100 %		0 %	100 %	90,000,000						100 %	98,800,000	
2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Persentase Gampong yang Melakukan Kerjasama antar Gampong dan Pihak Ke Tiga	100 %		0 %	100 %	90,000,000						100 %	98,800,000	
2.13.03.2.01.01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota				1 Dokumen	90,000,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Laksana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		BUMG Bersama Dalam Kota Banda Aceh	1 Dokumen	98,800,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase gampong yang memiliki tata kelola pemerintahan gampong yang baik	100 %		0 %	100 %	861,900,000						100 %	925,300,000	
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa yang baik	100 %		0 %	100 %	861,900,000						100 %	925,300,000	
2.13.04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				1 dokumen	100,000,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Laksana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Pemerintahan Gampong dalam Kota Banda Aceh	1 dokumen	121,800,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
2.13.04.2.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa				1 Dokumen	65,000,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Laksana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Pemerintahan Gampong dalam Kota Banda Aceh	1 Dokumen	25,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
2.13.04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				90 Dokumen	35,000,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Laksana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Pemerintahan Gampong dalam Kota Banda Aceh	90 Dokumen	38,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				90 Dokumen	260,000,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Laksana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Pemerintahan Gampong dalam Kota Banda Aceh	90 Dokumen	270,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
2.13.04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				90 Orang	18,300,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Laksana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Pemerintahan Gampong dalam Kota Banda Aceh	90 Orang	20,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 13 04 2.01 06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa				1 Laporan	20,600,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Laksana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Pemerintahan Gampong dalam Kota Banda Aceh	1 Laporan	28,500,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
2 13 04 2.01 08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				1 Dokumen	55,000,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Laksana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Pemerintahan Gampong dalam Kota Banda Aceh	1 Dokumen	130,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
2 13 04 2.01 09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				1 Laporan	100,000,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Laksana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Pemerintahan Gampong dalam Kota Banda Aceh	1 Laporan	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
2 13 04 2.01 11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun				1 Dokumen	65,000,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Laksana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Pemerintahan Gampong dalam Kota Banda Aceh	1 Dokumen	16,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
2 13 04 2.01 18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	143,000,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Laksana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Pemerintahan Gampong dalam Kota Banda Aceh	1 Dokumen	150,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
2 13 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat yang baik	100 %	0 %		100 %	1,112,737,472						100 %	1,072,037,472	
2 13 05 2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang di Bina	100 %	0 %		100 %	1,112,737,472						100 %	1,072,037,472	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah									
2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				1 Dokumen	70,000,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Laksana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Masyarakat Gampong	1 Dokumen	24,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong		
2	13	05	2.01	04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				200 Unit	4,000,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Laksana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Masyarakat Gampong	200 Unit	5,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong		
2	13	05	2.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				1 Dokumen	40,000,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Laksana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Masyarakat Gampong	1 Dokumen	50,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong		
2	13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				1 Laporan	280,000,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Laksana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Masyarakat Gampong	1 Laporan	360,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong		
2	13	05	2.01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				0 Laporan	100,000,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Laksana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Masyarakat Gampong	0 Laporan	64,300,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong		
2	13	05	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				8 Dokumen	618,737,472	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Laksana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Masyarakat Gampong	8 Dokumen	568,737,472	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						22,652,956,760								22,171,215,949	
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat daerah	100 %	0 %	100 %	15,268,027,145							100 %	15,447,755,651		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	100 %		0 %	100 %	31,871,274						100 %	31,871,274	
2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	31,871,274	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Peurada	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh	8 Dokumen	31,871,274	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	13,709,102,043						100 %	14,175,177,577	
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				71 Orang/bulan	10,593,902,043	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Peurada	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			PNS dan Non PNS	71 Orang/bulan	11,059,977,577	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	3,115,200,000	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Peurada	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			PNS dan Non PNS	12 Dokumen	3,115,200,000	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	88,330,000						100 %	88,330,000	
2.15.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				160 Paket	88,330,000	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Peurada	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			PNS dan Non PNS	160 Paket	88,330,000	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	123,299,133						100 %	123,299,133	
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				9 Paket	7,786,298	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Peurada	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Dinas Perhubungan, PNS dan Non PNS	9 Paket	7,786,298	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				11 Paket	31,512,835	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Peurada	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Dinas Perhubungan, PNS dan Non PNS	11 Paket	31,512,835	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	84,000,000	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Peurada	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Dinas Perhubungan, PNS dan Non PNS	20 Laporan	84,000,000	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %		0 %	100 %	439,719,068						100 %	182,902,334	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 15 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				6 Unit	300,000,000	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Peurada	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pengguna Jasa Kantor	6 Unit	100,000,000	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	9,735,000	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Peurada	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pengguna Jasa Kantor	5 Unit	9,735,000	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	106,816,734	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Peurada	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pengguna Jasa Kantor	7 Unit	50,000,000	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	23,167,334	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Peurada	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pengguna Jasa Kantor	4 Unit	23,167,334	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		0 %	100 %	543,961,814						100 %	543,961,814	
2 15 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	353,460,000	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Peurada	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pengguna Jasa Kantor	12 Laporan	353,460,000	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	190,501,814	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Peurada	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pengguna Jasa Kantor	12 Laporan	190,501,814	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		0 %	100 %	331,743,813						100 %	302,213,519	
2 15 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	314,797,600	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Peurada	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pengguna Jasa Kantor	12 Unit	285,267,306	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	5,774,137	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Peurada	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pengguna Jasa Kantor	20 Unit	5,774,137	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	11,172,076	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Peurada	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pengguna Jasa Kantor	10 Unit	11,172,076	Dinas Perhubungan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 15 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase layanan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	100 %		0 %	100 %	7,384,929,615						100 %	6,723,460,298	
2 15 02 2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase Jaringan LLAJ yang ditetapkan	100 %		0 %	100 %	150,000,000						100 %	150,000,000	
2 15 02 2.01 01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				1 Dokumen	150,000,000	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Peurada	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		OPD Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh	1 Dokumen	150,000,000	Dinas Perhubungan
2 15 02 2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Perlengkapan Jalan yang disediakan	100 %		0 %	100 %	3,023,259,802						100 %	3,544,750,485	
2 15 02 2.02 02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				18 Unit	2,024,609,866	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Pengguna Jalan	18 Unit	3,372,600,549	Dinas Perhubungan
2 15 02 2.02 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				10 Unit	998,649,936	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Pengguna Jalan	10 Unit	172,149,936	Dinas Perhubungan
2 15 02 2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Sarana dan Prasarana Terminal yang dikelola	100 %		0 %	100 %	954,423,742						100 %	306,563,742	
2 15 02 2.03 01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun				2 Dokumen	127,860,000	Kota Banda Aceh, Lueng Bata, Leung Bata Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Keudah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Pengguna Jasa Terminal	2 Dokumen	50,000,000	Dinas Perhubungan
2 15 02 2.03 02	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun				1 Unit	101,200,000	Kota Banda Aceh, Lueng Bata, Leung Bata Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Keudah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Pengguna Jasa Terminal	1 Unit	101,200,000	Dinas Perhubungan
2 15 02 2.03 03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan				3 Unit	673,700,000	Kota Banda Aceh, Lueng Bata, Leung Bata Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Keudah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Pengguna Jasa Terminal	3 Unit	103,700,000	Dinas Perhubungan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara				3 Unit	51,663,742	Kota Banda Aceh, Lueng Bata, Leung Bata Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Keudah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengguna Jasa Terminal	3 Unit	51,663,742	Dinas Perhubungan	
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Izin Pembangunan Fasilitas Parkir yang diselenggarakan	100 %		0 %	100 %	654,148,162					100 %	554,148,162		
2.15.02.2.04.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				4 Dokumen	234,525,983	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Peunayong Kota Banda Aceh, Ulee Kareng, Lamteh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengguna Jalan, Pengguna Parkir, Juru Parkir	4 Dokumen	234,525,983	Dinas Perhubungan	
2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Laporan	419,622,179	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengguna Jalan, Pengguna Parkir, Juru Parkir	3 Laporan	319,622,179	Dinas Perhubungan	
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Peningkatan Keselamatan Pengguna Jasa Jalan	100 %		0 %	100 %	1,662,859,599					100 %	1,662,859,599		
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				2 Unit	1,303,249,500	Kota Banda Aceh, Lueng Bata, Batoh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengguna Jalan, Pengguna Kendaraan, Alat Uji	2 Unit	1,303,249,500	Dinas Perhubungan	
2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				6000 Dokumen	179,553,933	Kota Banda Aceh, Lueng Bata, Batoh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengguna Jalan, Pengguna Kendaraan, Alat Uji	6000 Dokumen	179,553,933	Dinas Perhubungan	
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				10 Unit	131,229,529	Kota Banda Aceh, Lueng Bata, Batoh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengguna Jalan, Pengguna Kendaraan, Alat Uji	10 Unit	131,229,529	Dinas Perhubungan	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
2	15	02	2.05	10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				2 Laporan	48,826,637	Kota Banda Aceh, Lueng Bata, Batoh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengguna Jalan, Pengguna Kendaraan, Alat Uji	2 Laporan	48,826,637	Dinas Perhubungan	
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan yang dilaksanakan	100 %		0 %	100 %	940,238,310					100 %	465,138,310		
2	15	02	2.06	02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas				1 Unit	40,000,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengguna Jalan, Masyarakat dan siswa sekolah, Pengguna Angkutan	1 Unit	40,000,000	Dinas Perhubungan	
2	15	02	2.06	03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				4 Dokumen	413,952,514	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Neusu Jaya Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Lamgugob Kota Banda Aceh, Banda Raya, Mibo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengguna Jalan, Masyarakat dan siswa sekolah, Pengguna Angkutan	4 Dokumen	38,852,514	Dinas Perhubungan	
2	15	02	2.06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				1 Laporan	486,285,796	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Peurada	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengguna Jalan, Masyarakat dan siswa sekolah, Pengguna Angkutan	1 Laporan	386,285,796	Dinas Perhubungan	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						9,276,928,745							9,815,408,785	
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat daerah	100 %		0 %	100 %	7,672,988,749						100 %	8,435,945,852	
2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	6,308,863,265						100 %	6,950,463,265	
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/bulan	4,214,053,265	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		ASN Diskominfo	33 Orang/bulan	4,855,653,265	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.16.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	2,094,810,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Diskominfo	12 Dokumen	2,094,810,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	80,300,000						100 %	80,300,000	
2.16.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				60 Paket	80,300,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Diskominfo	60 Paket	80,300,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	121,357,103						100 %	242,714,206	
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	5,861,356	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Diskominfo	6 Paket	5,861,356	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	15,495,747	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Diskominfo	7 Paket	15,495,747	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	100,000,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Diskominfo	20 Laporan	221,357,103	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %		0 %	100 %	133,319,890						100 %	133,319,890	
2.16.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	133,319,890	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Diskominfo	10 Unit	133,319,890	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		0 %	100 %	750,534,443						100 %	750,534,443	
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	698,609,113	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Diskominfo	12 Laporan	698,609,113	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	51,925,330	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Diskominfo	12 Laporan	51,925,330	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		0 %	100 %	278,614,048						100 %	278,614,048	
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	90,487,100	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Diskominfo	4 Unit	90,487,100	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				58 Unit	188,126,948	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Diskominfo	58 Unit	188,126,948	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase terlaksananya diseminasi informasi kepada masyarakat	100 %		0 %	100 %	1,098,390,603						100 %	922,263,021	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase informasi dan komunikasi publik pemerintah yang disampaikan kepada masyarakat	100 %		0 %	100 %	1,098,390,603						100 %	922,263,021	
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik				1 Dokumen	55,888,307	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Masyarakat Kota Banda Aceh	1 Dokumen	55,888,307	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik				1 Dokumen	258,371,382	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Masyarakat Kota Banda Aceh	1 Dokumen	58,371,382	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik				1 Dokumen	98,837,848	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Masyarakat Kota Banda Aceh	1 Dokumen	60,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media				5 Layanan	576,240,432	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Otonomi Khusus	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Masyarakat Kota Banda Aceh	5 Layanan	687,067,432	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 16 02 2.01 08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan				1 Dokumen	30,935,900	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Masyarakat Kota Banda Aceh	1 Dokumen	30,935,900	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
2 16 02 2.01 10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya				45 Orang	30,816,734	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Masyarakat Kota Banda Aceh	45 Orang	15,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
2 16 02 2.01 12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan				1 Dokumen	47,300,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Masyarakat Kota Banda Aceh	1 Dokumen	15,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
2 16 03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase terpenuhinya layanan infrastruktur dan Aplikasi informatika	100 %		0 %	100 %	505,549,393					100 %	457,199,912		
2 16 03 2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase domain jaring komunikasi yang dikelola	100 %		0 %	100 %	153,115,626					100 %	153,115,626		
2 16 03 2.01 03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				44 Unit	153,115,626	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Seluruh SKPD Kota Banda Aceh	44 Unit	153,115,626	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
2 16 03 2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	persentase layanan e-government yang dikelola	100 %		0 %	100 %	352,433,767					100 %	304,084,286		
2 16 03 2.02 01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	76,204,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Seluruh SKPD Kota Banda Aceh	1 Dokumen	76,204,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
2 16 03 2.02 03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola				1 Unit	38,150,919	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Seluruh SKPD Kota Banda Aceh	1 Unit	38,150,919	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 16 03 2.02 06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik				44 Perangkat Daerah	46,742,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Seluruh SKPD Kota Banda Aceh	44 Perangkat Daerah	46,742,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2 16 03 2.02 07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan				3 Unit	42,987,367	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Seluruh SKPD Kota Banda Aceh	3 Unit	42,987,367	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2 16 03 2.02 09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City				1 Dokumen	148,349,481	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Seluruh SKPD Kota Banda Aceh	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2 20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						175,002,770						100,000,000		
2 20 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase terpenuhinya database Statistik Sektoral Daerah	100 %		0 %	100 %	175,002,770						100 %	100,000,000	
2 20 02 2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kota	100 %		0 %	100 %	175,002,770						100 %	100,000,000	
2 20 02 2.01 04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS				34 Orang	175,002,770	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Seluruh SKPD Kota Banda Aceh	34 Orang	100,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2 21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						18,127,000						7,076,730		
2 21 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase penyelenggaraan Persandian untuk Pengaman Informasi	100 %		0 %	100 %	18,127,000						100 %	7,076,730	
2 21 02 2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan persandian dan pengamanan informasi yang terlaksana	100 %		0 %	100 %	18,127,000						100 %	7,076,730	
2 21 02 2.01 03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				1 Laporan	18,127,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Seluruh SKPD Kota Banda Aceh	1 Laporan	7,076,730	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2 17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						13,151,420,387						9,118,128,044		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 17 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat daerah	100 %		0 %	100 %	7,657,252,261						100 %	8,562,428,044	
2 17 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan yang tersusun	100 %		0 %	100 %	25,777,626						100 %	24,500,000	
2 17 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	25,777,626	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Mibo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh	6 Dokumen	24,500,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
2 17 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	7,105,498,894						100 %	8,019,728,044	
2 17 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				48 Orang/bulan	6,475,918,894	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Mibo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh	48 Orang/bulan	7,390,148,044	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
2 17 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Waktu Jasa Tenaga Pedukung Administrasi/ Teknis Perkantoran yang disediakan				12 Bulan	629,580,000	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Mibo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh	12 Bulan	629,580,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
2 17 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	42,000,000						100 %	42,000,000	
2 17 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang Disediakan				67 Stell	42,000,000	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Mibo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh	67 Stell	42,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
2 17 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Administrasi Umum	100 %		0 %	100 %	118,282,017						100 %	117,000,000	
2 17 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan				3 Jenis	6,119,874	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Mibo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh	3 Jenis	3,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
2 17 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan				5 Jenis	12,162,143	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Mibo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh	5 Jenis	12,500,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 17 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang Dilaksanakan				5 Laporan	100,000,000	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Mibo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh	5 Laporan	101,500,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
2 17 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %		0 %	100 %	77,427,997						100 %	78,000,000	
2 17 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Saranan dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan				10 Unit	77,427,997	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Mibo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh	10 Unit	63,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
2 17 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0 %		0 %	100 %	149,948,422						100 %	139,200,000	
2 17 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 Bulan	107,165,534	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Mibo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh	12 Bulan	95,700,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
2 17 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor				12 Bulan	42,782,888	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Mibo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh	12 Bulan	43,500,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
2 17 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		0 %	100 %	138,317,305						100 %	142,000,000	
2 17 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Pemeliharaan, Pembayaran Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				14 Unit	108,860,400	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Mibo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh	14 Unit	109,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
2 17 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara				4 Unit	9,456,905	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Mibo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh	4 Unit	10,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
2 17 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhab				1 Unit	20,000,000	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Mibo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh	1 Unit	23,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
2 17 03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Peningkatan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	100 %		0 %	80 %	5,000,000						80 %	23,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 17 03 2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase koperasi aktif yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	100 %		0 %	80 %	5,000,000						80 %	23,000,000	
2 17 03 2.01 01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Unit Usaha	5,000,000	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Mibo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Koperasi	30 Unit Usaha	20,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
2 17 04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Peningkatan penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	100 %		0 %	80 %	57,083,244						80 %	42,000,000	
2 17 04 2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase KSP/USP yang sudah dinilai kesehatannya serta mendapatkan predikat sehat dan cukup sehat	100 %		0 %	80 %	57,083,244						80 %	42,000,000	
2 17 04 2.01 01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				51 Unit Usaha	12,301,851	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Mibo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Koperasi	51 Unit Usaha	12,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
2 17 04 2.01 02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan				45 Unit Usaha	44,781,393	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Mibo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Koperasi	45 Unit Usaha	30,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
2 17 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Peningkatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	95 %		0 %	80 %	2,244,464,000						80 %	411,700,000	
2 17 05 2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang memahami pengelolaan kompetensi SDM koperasi	100 %		0 %	80 %	2,244,464,000						80 %	405,700,000	
2 17 05 2.01 01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				210 Orang	2,244,464,000	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Mibo	DAK Non Fisik-BOS Reguler			Koperasi	210 Orang	405,700,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
2 17 07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	100 %		0 %	80 %	3,148,358,805						80 %	37,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 30 03 2.01 01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				1 Unit	7,511,942,487	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Mibo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Otonomi Khusus			Pedagang dan Masyarakat	1 Unit	2,815,988,439	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
3 30 03 2.01 02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				1 Unit	8,605,109,122	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Mibo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pedagang dan Masyarakat	1 Unit	8,605,109,122	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
3 30 03 2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase dokumen hasil pembinaan dan pengendalian pengelolaan sarana distribusi perdagangan	100 %		0 %	80 %	8,824,584						80 %	8,000,000	
3 30 03 2.02 01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				3 Dokumen	8,824,584	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Mibo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pedagang dan Masyarakat	3 Dokumen	7,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
3 30 04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Peningkatan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	100 %		0 %	80 %	402,534,802						80 %	587,000,000	
3 30 04 2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase jumlah laporan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat	100 %		0 %	80 %	17,287,872						80 %	15,000,000	
3 30 04 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				2 Laporan	17,287,872	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Mibo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat	2 Laporan	15,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
3 30 04 2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase jumlah laporan pemantauan harga Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku usaha distribusi barang	100 %		0 %	80 %	385,246,930						80 %	572,000,000	
3 30 04 2.02 01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				12 Laporan	20,848,022	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Mibo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat	12 Laporan	20,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
3	30	04	2.02	03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota											Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan		
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Peningkatan Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	100 %	0 %	80 %	43,423,298					80 %	41,500,000			
3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat UTTP (Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapan lainnya) yang bertanda tera sah	100 %	0 %	80 %	43,423,298					80 %	41,500,000			
3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang											Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan		
3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	100 %	0 %	80 %	2,948,262					80 %	3,500,000			
3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Penggunaan Sistem Informasi Perdagangan	100 %	0 %	80 %	2,948,262					80 %	3,500,000			
3	30	07	2.01	03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan											Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						8,209,841,476							8,259,841,476	
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat daerah	100 %	0 %	100 %	7,603,606,312							100 %	7,551,606,312	
2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi OPD yang tersusun	100 %	0 %	100 %	4,940,123							100 %	4,940,123	
2	18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	100 %	0 %	100 %	5,831,048,118							100 %	5,831,048,118	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	4,924,373,118	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12 Orang/bulan	4,924,373,118	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	906,675,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1 Dokumen	906,675,000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	43,835,000						100 %	43,835,000	
2.18.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				50 Paket	43,835,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	50 Paket	43,835,000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi umum	100 %		0 %	100 %	146,988,077						100 %	146,988,077	
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				11 Paket	3,463,853	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	11 Paket	3,463,853	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	17,367,638	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6 Paket	17,367,638	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				13 Paket	76,156,586	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	13 Paket	76,156,586	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	50,000,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10 Laporan	50,000,000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi umum	%		%	100 %	67,574,082						100 %	17,574,082	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 18 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				55 Unit	59,537,582	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	55 Unit	9,537,582	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				12 Unit	8,036,500	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Unit	8,036,500	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		0 %	100 %	1,377,354,973						100 %	1,375,354,973	
2 18 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	1,190,000,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12 Laporan	1,190,000,000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	187,354,973	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12 Laporan	185,354,973	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		0 %	100 %	131,865,939						100 %	131,865,939	
2 18 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	43,670,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7 Unit	43,670,000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				63 Unit	69,389,474	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	63 Unit	69,389,474	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				24 Unit	18,806,465	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	24 Unit	18,806,465	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Pengembangan Iklim Penanaman Modal	100 %		0 %	100 %	5,000,000						100 %	27,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 18 02 2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal	100 %		0 %	100 %	2,504,500						100 %	20,000,000	
2 18 02 2.01 01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				1 Dokumen	2,504,500	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Pelaku Usaha	1 Dokumen	20,000,000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 02 2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Pembuatan Peta Potensi Penanaman Modal	100 %		0 %	100 %	2,495,500						100 %	7,000,000	
2 18 02 2.02 01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	2,495,500	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Investor	1 Dokumen	7,000,000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Promosi Penanaman Modal	100 %		0 %	100 %	20,123,000						100 %	37,623,000	
2 18 03 2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Laporan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	100 %		0 %	100 %	20,123,000						100 %	37,623,000	
2 18 03 2.01 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				1 Dokumen	20,123,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Aparatur dan Investor	1 Dokumen	37,623,000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat	100 %		0 %	100 %	80,118,164						100 %	100,118,164	
2 18 04 2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal	100 %		0 %	100 %	80,118,164						100 %	100,118,164	
2 18 04 2.01 02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal				1 Kegiatan Usaha	75,298,164	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Pelaku Usaha dan Masyarakat	1 Kegiatan Usaha	75,298,164	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 18 04 2.01 03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan				500 Orang	4,820,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pelaku Usaha dan Masyarakat	500 Orang	24,820,000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2 18 05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Nilai Penanaman Modal	100 %		0 %	100 %	393,394,000					100 %	433,394,000		
2 18 05 2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Laporan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100 %		0 %	100 %	393,394,000					100 %	433,394,000		
2 18 05 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal				0 Kegiatan Usaha.	1,000,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Investor	0 Kegiatan Usaha.	40,000,000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2 18 05 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal				0 Pelaku Usaha	373,815,200	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Investor	0 Pelaku Usaha	373,815,200	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2 18 05 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan				0 Kegiatan Usaha	18,578,800	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Investor	0 Kegiatan Usaha	19,578,800	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2 18 06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan Pengunjung MPP	100 %		0 %	100 %	107,600,000					100 %	110,100,000		
2 18 06 2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sistem Informasi Perizinan Berbasis Elektronik yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	100 %		0 %	100 %	107,600,000					100 %	110,100,000		
2 18 06 2.01 01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				1 Dokumen	107,600,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pelaku Usaha	1 Dokumen	110,100,000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 19							11,144,483,978						8,401,688,826		
2 19 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat daerah	100 %		0 %	100 %	5,344,971,159						100 %	5,678,888,826	
2 19 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	100 %		0 %	100 %	44,999,750						100 %	44,999,750	
2 19 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	44,999,750	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dispota Kota Banda Aceh	5 Dokumen	44,999,750	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	4,334,871,023						100 %	4,897,629,023	
2 19 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				34 Orang/bulan	3,931,371,023	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dispota Kota Banda Aceh	34 Orang/bulan	4,494,129,023	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	403,500,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dispota Kota Banda Aceh	1 Dokumen	403,500,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	24,750,000						100 %	24,750,000	
2 19 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				45 Paket	24,750,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dispota Kota Banda Aceh	45 Paket	24,750,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	170,680,076						100 %	170,680,076	
2 19 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	2,093,510	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dispota Kota Banda Aceh	6 Paket	2,093,510	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	18,586,566	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dispota Kota Banda Aceh	6 Paket	18,586,566	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	150,000,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dispota Kota Banda Aceh	12 Laporan	150,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 19 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %		0 %	100 %	213,840,333						100 %	80,000,000	
2 19 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	213,840,333	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dispora Kota Banda Aceh	10 Unit	80,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		0 %	100 %	288,959,434						100 %	288,959,434	
2 19 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	207,900,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dispora Kota Banda Aceh	12 Laporan	207,900,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	81,059,434	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dispora Kota Banda Aceh	12 Laporan	81,059,434	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		0 %	100 %	266,870,543						100 %	171,870,543	
2 19 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	47,468,600	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dispora Kota Banda Aceh	3 Unit	47,468,600	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	195,000,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dispora Kota Banda Aceh	4 Unit	100,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				48 Unit	24,401,943	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dispora Kota Banda Aceh	48 Unit	24,401,943	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	100 %		0 %	100 %	748,315,661						100 %	550,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 19 02 2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader.	100 %		0 %	100 %	468,315,661						100 %	350,000,000	
2 19 02 2.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				50 Orang	147,481,879	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dispora Kota Banda Aceh	50 Orang	50,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 02 2.01 06	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan				1 Unit	200,000,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Lambaro Skep	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dispora Kota Banda Aceh	1 Unit	200,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 02 2.01 09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan				60 Orang	120,833,782	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dispora Kota Banda Aceh	60 Orang	100,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 02 2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan yang dilaksanakan	100 %		0 %	100 %	280,000,000						100 %	200,000,000	
2 19 02 2.02 02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan				1 Dokumen	280,000,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dispora Kota Banda Aceh	1 Dokumen	200,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Daya saing Keolahragaan	95 %		0 %	95 %	4,449,797,158						95 %	1,571,400,000	
2 19 03 2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100 %		0 %	100 %	821,200,000						100 %	200,000,000	
2 19 03 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				10 Unit	821,200,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dispora Kota Banda Aceh	10 Unit	200,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 19 03 2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %		0 %	100 %	151,200,000						100 %	200,000,000	
2 19 03 2.02 01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				5 Dokumen	151,200,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dispora Kota Banda Aceh	5 Dokumen	200,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 03 2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	100 %		0 %	100 %	343,797,158						100 %	0	
2 19 03 2.03 03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan				125 Orang	343,797,158	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dispora Kota Banda Aceh	125 Orang	0	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 03 2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	100 %		0 %	100 %	3,001,400,000						100 %	1,001,400,000	
2 19 03 2.04 02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan				2 Organisasi	3,001,400,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dispora Kota Banda Aceh	2 Organisasi	1,001,400,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 03 2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	100 %		0 %	100 %	132,200,000						100 %	170,000,000	
2 19 03 2.05 01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				2 Dokumen	81,100,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dispora Kota Banda Aceh	2 Dokumen	100,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 03 2.05 05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat				2 Dokumen	51,100,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dispora Kota Banda Aceh	2 Dokumen	70,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	100 %		0 %	100 %	601,400,000						100 %	601,400,000	
2 19 04 2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Pembinaan dan pengembangan Organisasi Kepramukaan yang dilaksanakan	100 %		0 %	100 %	601,400,000						100 %	601,400,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 19 04 2.01 05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah				1 Laporan	401,400,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dispora Kota Banda Aceh	1 Laporan	401,400,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 04 2.01 06	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				1 Unit	200,000,000	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Mibo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dispora Kota Banda Aceh	1 Unit	200,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2 22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							2,788,512,153						2,851,850,358	
2 22 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat daerah	100 %		0 %	100 %	2,589,912,153						100 %	2,691,897,273	
2 22 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	100 %		0 %	100 %	7,000,000						100 %	3,000,000	
2 22 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	7,000,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Neusu Aceh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sekretariat MAA	5 Dokumen	3,000,000	Sekretariat Majelis Adat Aceh
2 22 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	2,311,393,273						100 %	2,495,393,273	
2 22 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	1,433,893,273	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Neusu Aceh		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Sekretariat MAA	14 Orang/bulan	1,617,893,273	Sekretariat Majelis Adat Aceh
2 22 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	877,500,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Neusu Aceh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Sekretariat MAA	1 Dokumen	877,500,000	Sekretariat Majelis Adat Aceh
2 22 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	9,900,000						100 %	9,900,000	
2 22 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				19 Paket	9,900,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Neusu Aceh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sekretariat MAA	19 Paket	9,900,000	Sekretariat Majelis Adat Aceh
2 22 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	93,953,085						100 %	34,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.22.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	4,000,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Neusu Aceh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sekretariat MAA	10 Paket	3,000,000	Sekretariat Majelis Adat Aceh
2.22.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	49,953,085	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Neusu Aceh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sekretariat MAA	5 Paket	3,000,000	Sekretariat Majelis Adat Aceh
2.22.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5,000,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Neusu Aceh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sekretariat MAA	5 Paket	3,000,000	Sekretariat Majelis Adat Aceh
2.22.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	35,000,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Neusu Aceh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sekretariat MAA	3 Laporan	25,000,000	Sekretariat Majelis Adat Aceh
2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		0 %	100 %	61,000,000						100 %	48,100,000	
2.22.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	36,000,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Neusu Aceh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sekretariat MAA	1 Laporan	36,100,000	Sekretariat Majelis Adat Aceh
2.22.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	25,000,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Neusu Aceh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sekretariat MAA	3 Laporan	12,000,000	Sekretariat Majelis Adat Aceh
2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		0 %	100 %	106,665,795						100 %	101,504,000	
2.22.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	61,504,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Neusu Aceh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sekretariat MAA	7 Unit	61,504,000	Sekretariat Majelis Adat Aceh
2.22.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	10,161,795	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Neusu Aceh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sekretariat MAA	7 Unit	5,000,000	Sekretariat Majelis Adat Aceh
2.22.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	35,000,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Neusu Aceh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sekretariat MAA	1 Unit	35,000,000	Sekretariat Majelis Adat Aceh

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 22 07	PROGRAM MAJELIS ADAT ACEH (MAA)	Persentase kebijakan yang dihasilkan terkait Pelestarian Adat Aceh	100 %		0 %	100 %	198,600,000						100 %	159,953,085	
2 22 07 7.01	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat	Persentase Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat yang dilaksanakan	100 %		0 %	100 %	125,000,000						100 %	110,000,000	
2 22 07 7.01 01	Pembinaan Adat Seumapa/Narit Maja, Meunasib dan Tarian Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Adat Seumapa/Narit Maja, Meunasib dan Tarian Tradisional				1 Laporan	50,000,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Neusu Aceh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Tokoh Adat dan Masyarakat	1 Laporan	50,000,000	Sekretariat Majelis Adat Aceh
2 22 07 7.01 02	Pemasyarakatan Adat Do Da Idi	Jumlah Lembaga Pemasyarakatan Adat Do Da Idi				1 Lembaga	30,000,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Neusu Aceh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Tokoh Adat dan Masyarakat	1 Lembaga	30,000,000	Sekretariat Majelis Adat Aceh
2 22 07 7.01 03	Sosialisasi Adat Istiadat	Jumlah Peserta Sosialisasi Adat Istiadat				90 Orang	30,000,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Neusu Aceh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Tokoh Adat dan Masyarakat	90 Orang	30,000,000	Sekretariat Majelis Adat Aceh
2 22 07 7.01 05	Pengadaan Buku-Buku tentang Adat Aceh	Jumlah Pengadaan Buku-Buku tentang Adat Aceh				150 Buku	15,000,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Neusu Aceh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Tokoh Adat dan Masyarakat	150 Buku	0	Sekretariat Majelis Adat Aceh
2 22 07 7.02	Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat yang dilaksanakan	100 %		0 %	100 %	40,000,000						100 %	40,000,000	
2 22 07 7.02 01	Penguatan Peradilan Adat	Jumlah Peserta Pelatihan Peradilan Adat				30 Orang	40,000,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Neusu Aceh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Tokoh Adat dan Masyarakat	30 Orang	40,000,000	Sekretariat Majelis Adat Aceh
2 22 07 7.03	Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat	Persentase Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat yang dilaksanakan	100 %		0 %	100 %	33,600,000						100 %	9,953,085	
2 22 07 7.03 07	Pengadaan Pakaian dan Perlengkapan Adat	Jumlah Pakaian dan Perlengkapan Adat				22 Unit	33,600,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Neusu Aceh				Tokoh Adat dan Masyarakat	22 Unit	0	Sekretariat Majelis Adat Aceh
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2 23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						5,708,565,579							4,234,645,579	
2 23 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat daerah	100 %		0 %	100 %	3,888,334,259						100 %	3,762,914,259	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 23 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	14,221,195	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Keudah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			DISPERSIP	1 Paket	14,221,195	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				1 Dokumen	2,280,000	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Keudah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			DISPERSIP	1 Dokumen	2,280,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				13 Laporan	80,000,000	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Keudah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			DISPERSIP	13 Laporan	55,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	8,792,600	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Keudah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			DISPERSIP	1 Dokumen	5,792,600	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	10,289,500	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Keudah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			DISPERSIP	1 Dokumen	7,289,500	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %		0 %	100 %	117,829,300						100 %	73,329,300	
2 23 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	25,000,000	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Keudah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			DISPERSIP	1 Unit	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	7,863,000	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Keudah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			DISPERSIP	1 Unit	6,863,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	13,900,000	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Keudah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			DISPERSIP	1 Unit	8,400,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	60,668,000	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Keudah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			DISPERSIP	10 Unit	45,668,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	10,398,300	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Keudah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			DISPERSIP	3 Unit	12,398,300	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		0 %	100 %	299,730,288						100 %	270,730,288	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.23.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	5,690,000	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			DISPERSIP	1 Laporan	5,690,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	201,600,000	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Keudah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			DISPERSIP	1 Laporan	201,600,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	16,500,000	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Keudah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			DISPERSIP	1 Laporan	7,500,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	75,940,288	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Keudah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			DISPERSIP	1 Laporan	55,940,288	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		0 %	100 %	124,225,363						100 %	114,225,363	
2.23.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	77,616,488	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Keudah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			DISPERSIP	5 Unit	67,616,488	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				6 Unit	4,238,639	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Keudah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			DISPERSIP	6 Unit	4,238,639	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	9,827,236	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Keudah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			DISPERSIP	10 Unit	9,827,236	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	13,294,200	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Keudah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			DISPERSIP	1 Unit	13,294,200	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	10,569,800	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Keudah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			DISPERSIP	5 Unit	10,569,800	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	8,679,000	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Keudah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			DISPERSIP	6 Unit	8,679,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Pembinaan Perpustakaan	100 %		0 %	100 %	1,811,381,015						100 %	462,881,015	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 23 02 2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan kunjungan ke perpustakaan daerah	100 %		0 %	100 %	278,545,015						100 %	113,045,015	
2 23 02 2.01 01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)				1 Layanan	63,552,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Laksana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Satuan Pendidikan dan Masyarakat	1 Layanan	16,900,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 02 2.01 02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				20 Perpustakaan	9,475,000	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Satuan Pendidikan dan Masyarakat	20 Perpustakaan	9,475,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 02 2.01 03	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				10 Eksemplar	7,273,015	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Keudah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Satuan Pendidikan dan Masyarakat	10 Eksemplar	5,273,015	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 02 2.01 04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				10 Perpustakaan	16,563,000	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Satuan Pendidikan dan Masyarakat	10 Perpustakaan	16,563,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 02 2.01 05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				5 Perpustakaan	7,800,000	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Satuan Pendidikan dan Masyarakat	5 Perpustakaan	5,800,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 02 2.01 06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				5 Orang	7,300,000	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Keudah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Satuan Pendidikan dan Masyarakat	5 Orang	7,300,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 02 2.01 07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi				1 Layanan	6,900,000	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Keudah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Satuan Pendidikan dan Masyarakat	1 Layanan	7,300,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
										Nasional	Daerah							
2	23	02	2.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				200 Eksemplar	150,000,000	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Keudah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Satuan Pendidikan dan Masyarakat	200 Eksemplar	37,652,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	2.01	10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	9,682,000	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Keudah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Satuan Pendidikan dan Masyarakat	1 Dokumen	6,782,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan layanan perpustakaan	100 %		0 %	100 %	1,532,836,000					100 %	349,836,000	
2	23	02	2.02	01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan				20 Lokus	15,650,000	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Satuan Pendidikan dan Masyarakat	20 Lokus	12,650,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	2.02	02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				1 Perpustakaan	1,480,000,000	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Keudah			Satuan Pendidikan dan Masyarakat	1 Perpustakaan	300,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota				3 Orang	16,586,000	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Satuan Pendidikan dan Masyarakat	3 Orang	16,586,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	2.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				2 Perpustakaan	7,000,000	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Satuan Pendidikan dan Masyarakat	2 Perpustakaan	7,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	2.02	05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya				5 Orang	13,600,000	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Satuan Pendidikan dan Masyarakat	5 Orang	13,600,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	100 %		0 %	100 %	8,850,305					100 %	8,850,305	
2	23	03	2.01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pelestarian bahan pustaka dan naskah kuno	100 %		0 %	100 %	8,850,305					100 %	8,850,305	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah									
2	23	03	2.01	01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno				3 Orang	4,425,152	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Manuskrip	3 Orang	4,425,152	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2	23	03	2.01	02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan				5 Eksemplar	4,425,153	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Keudah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Manuskrip	5 Eksemplar	4,425,153	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						200,000,000							200,000,000		
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Pengelolaan Arsip	100 %		0 %	100 %	138,179,200							100 %	138,179,200	
2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Tertibnya Pengelolaan Arsip Dinamis	100 %		0 %	100 %	101,273,900							100 %	101,273,900	
2	24	02	2.01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan				3000 Berkas	76,693,900	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Keudah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	3000 Berkas	76,693,900	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2	24	02	2.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				500 Berkas	16,167,500	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Seutui	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	500 Berkas	16,167,500	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2	24	02	2.01	03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Laporan	8,412,500	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Keudah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	1 Laporan	8,412,500	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Tertibnya Penyelamatan Arsip Statis	100 %		0 %	100 %	16,668,300							100 %	16,668,300	
2	24	02	2.02	01	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI				1 Arsip	7,342,000	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Keudah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	1 Arsip	7,342,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2	24	02	2.02	02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				1 Arsip	9,326,300	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Keudah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	1 Arsip	9,326,300	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Penginputan Arsip Kedalam Aplikasi	100 %		0 %	100 %	20,237,000							100 %	20,237,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
2	24	02	2.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN				1 Pengguna	12,345,000	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Keudah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	1 Pengguna	12,345,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	02	2.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	7,892,000	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Keudah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	1 Laporan	7,892,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Pelaksanaan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	100 %		0 %	100 %	47,251,800						100 %	47,251,800	
2	24	03	2.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Terlaksananya pemusnahan Arsip sesuai dengan peraturan	100 %		0 %	100 %	15,030,200						100 %	15,030,200	
2	24	03	2.01	01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				1 Arsip	9,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	1 Arsip	9,800,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	03	2.01	02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan				200 Berkas	5,230,200	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Keudah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	200 Berkas	5,230,200	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	03	2.03		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Tersusunnya Daftar Penilaian, penyerahan dan penyusunan Arsip	100 %		0 %	100 %	10,726,900						100 %	10,726,900	
2	24	03	2.03	01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota				1 Daftar	6,340,000	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Keudah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	1 Daftar	6,340,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah									
2	24	03	2.03	02	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota				1 Arsip	4,386,900	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Sukaramai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	1 Arsip	4,386,900	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2	24	03	2.04		Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Terlaksananya Autentikasi Arsip Hasil Alih Media	100 %		0 %	100 %	11,194,700							100 %	11,194,700	
2	24	03	2.04	01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan				1 Arsip	5,460,200	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Keudah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	1 Arsip	5,460,200	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2	24	03	2.04	02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip				1 Arsip	5,734,500	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Keudah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	1 Arsip	5,734,500	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2	24	03	2.05		Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Tersusun Daftar Pencarian Arsip	100 %		0 %	100 %	10,300,000							100 %	10,300,000	
2	24	03	2.05	02	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang				1 Arsip	5,800,000	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Keudah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	1 Arsip	5,800,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2	24	03	2.05	03	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman				1 Arsip	4,500,000	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Keudah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	1 Arsip	4,500,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2	24	04			PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase Perizinan Penggunaan Arsip yang dikeluarkan	100 %		0 %	100 %	14,569,000							100 %	14,569,000	
2	24	04	2.01		Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Tersusun Daftar Pencarian Arsip	100 %		0 %	100 %	14,569,000							100 %	14,569,000	
2	24	04	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup yang disusun dan ditetapkan				1 SOP	7,869,000	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Keudah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	1 SOP	7,869,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2	24	04	2.01	02	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup				1 Arsip	6,700,000	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Keudah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	1 Arsip	6,700,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
3 26							9,183,869,076						9,298,869,076		
3 26 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100 %		0 %	100 %	5,511,485,094					100 %	5,506,485,094		
3 26 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi OPD yang Tersusun	80 %		0 %	80 %	4,476,733					80 %	4,476,733		
3 26 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 bulan	4,476,733	Kota Banda Aceh, Meuraxa, Ulee Lheue	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh	12 bulan	4,476,733	Dinas Pariwisata	
3 26 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Adminstrasi Keuangan	100 %		0 %	100 %	4,611,729,662					100 %	4,611,729,662		
3 26 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 bulan	3,634,904,662	Kota Banda Aceh, Meuraxa, Ulee Lheue	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		ASN dan Non ASN	12 bulan	3,634,904,662	Dinas Pariwisata	
3 26 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 bulan	976,825,000	Kota Banda Aceh, Meuraxa, Ulee Lheue	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		ASN dan Non ASN	12 bulan	976,825,000	Dinas Pariwisata	
3 26 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	75 %		0 %	75 %	44,550,000					75 %	44,550,000		
3 26 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				81 stel 0 Paket	44,550,000	Kota Banda Aceh, Meuraxa, Ulee Lheue	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		ASN dan Non ASN Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh	81 stel 0 Paket	44,550,000	Dinas Pariwisata	
3 26 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	90 %		0 %	90 %	394,452,137					90 %	394,452,137		
3 26 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 bulan	9,642,252	Kota Banda Aceh, Meuraxa, Ulee Lheue	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh	12 bulan	9,642,252	Dinas Pariwisata	
3 26 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 bulan	9,137,703	Kota Banda Aceh, Meuraxa, Ulee Lheue	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh	12 bulan	9,137,703	Dinas Pariwisata	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah									
3	26	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 bulan 0 Laporan	375,672,182	Kota Banda Aceh, Meuraxa, Ulee Lheue	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh	12 bulan 0 Laporan	375,672,182	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95 %		0 %	95 %	404,362,694							95 %	399,362,694	
3	26	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 bulan	221,360,894	Kota Banda Aceh, Meuraxa, Ulee Lheue	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh	12 bulan	216,360,894	Dinas Pariwisata	
3	26	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 bulan	64,000,000	Kota Banda Aceh, Meuraxa, Ulee Lheue	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh	12 bulan	64,000,000	Dinas Pariwisata	
3	26	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 bulan	119,001,800	Kota Banda Aceh, Meuraxa, Ulee Lheue	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh	12 bulan	119,001,800	Dinas Pariwisata	
3	26	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terjaganya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 %		0 %	90 %	51,913,868							90 %	51,913,868	
3	26	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 bulan	43,929,200	Kota Banda Aceh, Meuraxa, Ulee Lheue	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh	12 bulan	43,929,200	Dinas Pariwisata	
3	26	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 bulan	7,984,668	Kota Banda Aceh, Meuraxa, Ulee Lheue	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh	12 bulan	7,984,668	Dinas Pariwisata	
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	90 %		0 %	90 %	1,221,970,602							90 %	1,341,970,602	
3	26	02	2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan kepariwisataan	90 %		0 %	90 %	266,970,602							90 %	266,970,602	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 26 02 2.02 03	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan,Berkembang, Pematapan, Revitalisasi)				0 Kawasan 1 kegiatan	73,977,602	Kota Banda Aceh, Meuraxa, Ulee Lheue	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Objek Wisata dan Masyarakat	0 Kawasan 1 kegiatan	73,977,602	Dinas Pariwisata
3 26 02 2.02 06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				12 bulan	192,993,000	Kota Banda Aceh, Meuraxa, Ulee Lheue	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Objek Wisata dan Masyarakat	12 bulan	192,993,000	Dinas Pariwisata
3 26 02 2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Meningkatnya monitoring dan evaluasi Destinasi	90 %		0 %	90 %	955,000,000						90 %	955,000,000	
3 26 02 2.03 04	Pengadaan/Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				1 kegiatan	200,000,000	Kota Banda Aceh, Meuraxa, Ulee Lheue				Objek wisata dan Pelaku Usaha	1 kegiatan	200,000,000	Dinas Pariwisata
3 26 02 2.03 05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				1 kegiatan	755,000,000	Kota Banda Aceh, Meuraxa, Ulee Lheue	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Objek wisata dan Pelaku Usaha	1 kegiatan	755,000,000	Dinas Pariwisata
3 26 03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Meningkatnya Pemasaran Pariwisata	90 %		0 %	90 %	1,759,718,380						90 %	1,759,718,380	
3 26 03 2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Meningkatnya kerjasama dalam memfasilitasi pemasaran industri pariwisata	90 %		0 %	90 %	1,759,718,380						90 %	1,759,718,380	
3 26 03 2.01 01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				12 bulan	1,274,118,380	Kota Banda Aceh, Meuraxa, Ulee Lheue	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Wisatawan	12 bulan	1,274,118,380	Dinas Pariwisata
3 26 03 2.01 03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri				12 bulan	47,750,000	Kota Banda Aceh, Meuraxa, Ulee Lheue	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Wisatawan	12 bulan	47,750,000	Dinas Pariwisata

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah									
3	26	03	2.01	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri					12 bulan	437,850,000	Kota Banda Aceh, Meuraxa, Ulee Lheue	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Wisatawan	12 bulan	437,850,000	Dinas Pariwisata
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	85 %		0 %	85 %	690,695,000							85 %	690,695,000	
3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	85 %		0 %	85 %	690,695,000							85 %	690,695,000	
3	26	05	2.01	02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata				12 bulan	274,940,000	Kota Banda Aceh, Meuraxa, Ulee Lheue	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Wisatawan lokal dan mancanegara	12 bulan	274,940,000	Dinas Pariwisata	
3	26	05	2.01	03	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)				12 bulan	151,650,000	Kota Banda Aceh, Meuraxa, Ulee Lheue	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Wisatawan lokal dan mancanegara	12 bulan	151,650,000	Dinas Pariwisata	
3	26	05	2.01	05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif				12 bulan	155,430,000	Kota Banda Aceh, Meuraxa, Ulee Lheue	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Wisatawan lokal dan mancanegara	12 bulan	155,430,000	Dinas Pariwisata	
3	26	05	2.01	06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				12 bulan	108,675,000	Kota Banda Aceh, Meuraxa, Ulee Lheue	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Wisatawan lokal dan mancanegara	12 bulan	108,675,000	Dinas Pariwisata	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
4	01				SEKRETARIAT DAERAH						1,358,520,919								1,358,520,919	
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Implementasi Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100 %		0 %	100 %	1,358,520,919							100 %	1,358,520,919	
4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang difasilitasi/ditangani	100 %		0 %	100 %	1,358,520,919							100 %	1,358,520,919	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
4 01 02 2.03 01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				45 Dokumen	437,826,665	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Sekretariat Daerah	45 Dokumen	437,826,665	Sekretariat Daerah	
4 01 02 2.03 02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				5 Kasus	598,484,621	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Sekretariat Daerah	5 Kasus	598,484,621	Sekretariat Daerah	
4 01 02 2.03 03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				45 Dokumen	322,209,633	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Sekretariat Daerah	45 Dokumen	322,209,633	Sekretariat Daerah	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
4 01	SEKRETARIAT DAERAH						568,598,330							568,598,330		
4 01 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Implementasi Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100 %		0 %	100 %	568,598,330							100 %	568,598,330	
4 01 02 2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Terpenuhinya Administrasi Pemerintah Daerah yang Optimal	100 %		0 %	100 %	500,828,278							100 %	500,828,278	
4 01 02 2.01 01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				2 Dokumen	106,220,550	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Sekretariat Daerah	2 Dokumen	106,220,550	Sekretariat Daerah	
4 01 02 2.01 02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				2 Dokumen	203,157,773	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Sekretariat Daerah	2 Dokumen	203,157,773	Sekretariat Daerah	
4 01 02 2.01 03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				2 Dokumen	191,449,955	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Sekretariat Daerah	2 Dokumen	191,449,955	Sekretariat Daerah	
4 01 02 2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Implementasi Kerjasama Dalam Negeri	100 %		0 %	100 %	67,770,052							100 %	67,770,052	
4 01 02 2.04 01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				15 Dokumen	67,770,052	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sekretariat Daerah	15 Dokumen	67,770,052	Sekretariat Daerah	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
4 01	SEKRETARIAT DAERAH						450,394,140							450,394,140		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Implementasi Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan	100 %		0 %	100 %	450,394,140						100 %	450,394,140	
4 01 03 2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Kebijakan Perekonomian yang dilaksanakan	100 %		0 %	100 %	450,394,140						100 %	450,394,140	
4 01 03 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				1 Dokumen	138,773,891	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Sekretariat Daerah	1 Dokumen	138,773,891	Sekretariat Daerah
4 01 03 2.01 02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				1 Laporan	209,243,667	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Sekretariat Daerah	1 Laporan	209,243,667	Sekretariat Daerah
4 01 03 2.01 03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				1 Dokumen	102,376,582	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Sekretariat Daerah	1 Dokumen	102,376,582	Sekretariat Daerah
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4 01	SEKRETARIAT DAERAH						631,908,352							631,908,352	
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat daerah	100 %		0 %	100 %	631,908,352						100 %	631,908,352	
4 01 01 2.13	Penataan Organisasi	Persentase Pelaksanaan Penataan Organisasi	100 %		0 %	100 %	631,908,352						100 %	631,908,352	
4 01 01 2.13 01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				2 Dokumen	222,680,404	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Sekretariat Daerah	2 Dokumen	222,680,404	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				2 Laporan	253,941,569	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Sekretariat Daerah	2 Laporan	253,941,569	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.13 03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				2 Dokumen	155,286,379	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Sekretariat Daerah	2 Dokumen	155,286,379	Sekretariat Daerah
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4 01	SEKRETARIAT DAERAH						41,329,376,765							42,763,876,765	
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat daerah	100 %		0 %	100 %	41,329,376,765						100 %	42,763,876,765	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				120 Laporan	1,900,000,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sekretariat Daerah	120 Laporan	1,700,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %		0 %	100 %	168,818,849						100 %	187,993,515	
4 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	118,818,849	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sekretariat Daerah	20 Unit	137,993,515	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				50 Unit	50,000,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sekretariat Daerah	50 Unit	50,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		0 %	100 %	4,605,067,388						100 %	4,605,067,388	
4 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1000 Laporan	8,000,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sekretariat Daerah	1000 Laporan	8,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	1,637,100,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sekretariat Daerah	12 Laporan	1,637,100,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	437,771,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sekretariat Daerah	12 Laporan	437,771,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	2,522,196,388	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sekretariat Daerah	12 Laporan	2,522,196,388	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %		0 %	100 %	4,112,119,300						100 %	4,112,119,300	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				100 Unit	1,692,278,873	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sekretariat Daerah	100 Unit	1,692,278,873	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah Mebel yang Dipelihara				0 Unit 50 Unit	25,000,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sekretariat Daerah	0 Unit 50 Unit	25,000,000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 10 Unit	140,000,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sekretariat Daerah	0 Unit 10 Unit	140,000,000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	1,719,840,427	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sekretariat Daerah	4 Unit	1,719,840,427	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				30 Unit	535,000,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sekretariat Daerah	30 Unit	535,000,000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %		0 %	100 %	950,902,026						100 %	950,902,026	
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	234,102,026	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sekretariat Daerah	2 Orang/Bulan	234,102,026	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				10 Paket	86,800,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sekretariat Daerah	10 Paket	86,800,000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang	30,000,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sekretariat Daerah	2 Orang	30,000,000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	600,000,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sekretariat Daerah	2 Orang/Bulan	600,000,000	Sekretariat Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 2.12	Fasilitas Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	100 %		0 %	100 %	2,660,850,000						100 %	2,660,850,000	
4 01 01 2.12 01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	2,265,550,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sekretariat Daerah	12 Paket	2,265,550,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.12 02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	44,700,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sekretariat Daerah	12 Paket	44,700,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.12 03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				12 Paket	350,600,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sekretariat Daerah	12 Paket	350,600,000	Sekretariat Daerah
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4 01	SEKRETARIAT DAERAH						1,431,108,561						1,545,702,077		
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat daerah	100 %		0 %	100 %	53,930,359						100 %	53,930,359	
4 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	100 %		0 %	100 %	53,930,359						100 %	53,930,359	
4 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	53,930,359	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sekretariat Daerah	5 Dokumen	53,930,359	Sekretariat Daerah
4 01 03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Implementasi Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan	100 %		0 %	100 %	1,377,178,202						100 %	1,491,771,718	
4 01 03 2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Kebijakan Pembangunan Daerah yang dilaksanakan	100 %		0 %	100 %	1,377,178,202						100 %	1,491,771,718	
4 01 03 2.02 01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	jumlah dokumen hasil fasilitasi penyusunan program pembangunan daerah				1 dokumen	357,000,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Sekretariat Daerah	1 dokumen	357,000,000	Sekretariat Daerah

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 03 2.02 02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				2 Laporan	572,426,484	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Sekretariat Daerah	2 Laporan	487,200,000	Sekretariat Daerah
4 01 03 2.02 03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				17 Laporan	447,751,718	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Sekretariat Daerah	17 Laporan	647,571,718	Sekretariat Daerah
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4 01	SEKRETARIAT DAERAH							1,578,515,592						1,578,515,592	
4 01 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Implementasi Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100 %		0 %	100 %	1,578,515,592						100 %	1,578,515,592	
4 01 02 2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Terlaksananya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100 %		0 %	100 %	1,578,515,592						100 %	1,578,515,592	
4 01 02 2.02 01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				2 Dokumen	398,686,708	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Sekretariat Daerah	2 Dokumen	398,686,708	Sekretariat Daerah
4 01 02 2.02 02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				2 Dokumen	227,633,510	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Sekretariat Daerah	2 Dokumen	227,633,510	Sekretariat Daerah
4 01 02 2.02 03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				2 Dokumen	952,195,374	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Sekretariat Daerah	2 Dokumen	952,195,374	Sekretariat Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4						UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
4	01						3,188,319,366						3,288,319,366		
4	01	01													
4	01	01													
4	01	01	2.06												
4	01	01	2.06	06											
4	01	01	2.14												
4	01	01	2.14	01											
4	01	01	2.14	02											
4	01	01	2.14	03											
4															
4	01														
4	01	03													
4	01	03	2.03												
4	01	03	2.03	01											

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 03 2.03 02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				1 Dokumen	179,920,729	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sekretariat Daerah	1 Dokumen	179,920,729	Sekretariat Daerah
4 01 03 2.03 03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				44 Orang	270,233,491	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sekretariat Daerah	44 Orang	270,233,491	Sekretariat Daerah
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4 02	SEKRETARIAT DPRD						47,349,488,876							45,283,514,086	
4 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat daerah	100 %		0 %	100 %	41,663,633,415						100 %	39,448,037,752	
4 02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	100 %		0 %	100 %	8,143,176						100 %	8,143,176	
4 02 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	8,143,176	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sekretariat DPRK Banda Aceh	5 Dokumen	8,143,176	Sekretariat DPRK
4 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	7,135,437,939						100 %	7,649,937,939	
4 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				39 Orang/bulan	4,952,337,939	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai PNS dan Non PNS Sekretariat DPRK	39 Orang/bulan	5,466,837,939	Sekretariat DPRK
4 02 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				56 Dokumen	2,183,100,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai PNS dan Non PNS Sekretariat DPRK	56 Dokumen	2,183,100,000	Sekretariat DPRK
4 02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	473,600,000						100 %	473,600,000	
4 02 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				96 Paket	108,800,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Anggota Dewan, Pegawai Sekretariat DPRK	96 Paket	108,800,000	Sekretariat DPRK

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 02 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 Orang	364,800,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Anggota Dewan, Pegawai Sekretariat DPRK	15 Orang	364,800,000	Sekretariat DPRK
4 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	10,686,322,338						100 %	10,592,822,338	
4 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				28 Paket	35,111,055	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai Sekretariat DPRK, Kantor Sekretariat DPRK	28 Paket	35,111,055	Sekretariat DPRK
4 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				144 Paket	767,584,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai Sekretariat DPRK, Kantor Sekretariat DPRK	144 Paket	767,584,000	Sekretariat DPRK
4 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				16 Paket	558,627,805	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai Sekretariat DPRK, Kantor Sekretariat DPRK	16 Paket	465,127,805	Sekretariat DPRK
4 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				626 Laporan	9,324,999,478	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai Sekretariat DPRK, Kantor Sekretariat DPRK	626 Laporan	9,324,999,478	Sekretariat DPRK
4 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %		0 %	100 %	486,380,000						100 %	1,326,380,000	
4 02 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				35 Unit	486,380,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Anggota DPRK, Pegawai Sekretariat DPRK, Gedung Kantor Sekretariat DPRK dan Rumah Dinas Jabatan	35 Unit	486,380,000	Sekretariat DPRK
4 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		0 %	100 %	3,048,751,171						100 %	2,152,630,298	
4 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	683,200,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Gedung Kantor Sekretariat DPRK dan Rumah Dinas Jabatan	36 Laporan	683,200,000	Sekretariat DPRK

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	2,365,551,171	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Gedung Kantor Sekretariat DPRK dan Rumah Dinas Jabatan	12 Laporan	1,469,430,298	Sekretariat DPRK
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		0 %	100 %	2,102,801,561						100 %	2,102,801,561	
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	470,325,360	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kendaraan Dinas/ operasional Sekretariat DPRK, Gedung Kantor Sekretariat DPRK dan Rumah Dinas Jabatan	15 Unit	470,325,360	Sekretariat DPRK
4.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				24 Unit	7,765,506	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kendaraan Dinas/ operasional Sekretariat DPRK, Gedung Kantor Sekretariat DPRK dan Rumah Dinas Jabatan	24 Unit	7,765,506	Sekretariat DPRK
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				85 Unit	63,001,875	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kendaraan Dinas/ operasional Sekretariat DPRK, Gedung Kantor Sekretariat DPRK dan Rumah Dinas Jabatan	85 Unit	63,001,875	Sekretariat DPRK
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	1,311,392,500	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kendaraan Dinas/ operasional Sekretariat DPRK, Gedung Kantor Sekretariat DPRK dan Rumah Dinas Jabatan	2 Unit	1,311,392,500	Sekretariat DPRK

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 02 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				30 Unit	250,316,320	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kendaraan Dinas/ operasional Sekretariat DPRK, Gedung Kantor Sekretariat DPRK dan Rumah Dinas Jabatan	30 Unit	250,316,320	Sekretariat DPRK
4 02 01 2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Pemenuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100 %		0 %	100 %	16,323,535,541						100 %	13,743,060,751	
4 02 01 2.15 01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				30 Orang/Bulan	15,928,035,541	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Anggota DPRK	30 Orang/Bulan	13,347,560,751	Sekretariat DPRK
4 02 01 2.15 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				150 Paket	295,500,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Anggota DPRK	150 Paket	295,500,000	Sekretariat DPRK
4 02 01 2.15 03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				30 Orang	100,000,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Anggota DPRK	30 Orang	100,000,000	Sekretariat DPRK
4 02 01 2.16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Pemenuhan Terpenuhinya Layanan Administrasi DPRD	100 %		0 %	100 %	1,398,661,689						100 %	1,398,661,689	
4 02 01 2.16 02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				18 Laporan	48,041,946	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Anggota DPRK	18 Laporan	48,041,946	Sekretariat DPRK
4 02 01 2.16 03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				60 Laporan	937,819,743	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Anggota DPRK	60 Laporan	937,819,743	Sekretariat DPRK
4 02 01 2.16 04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				12 Paket	412,800,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Anggota DPRK	12 Paket	412,800,000	Sekretariat DPRK
4 02 02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase terlaksananya tugas dan fungsi DPRD	100 %		0 %	100 %	5,685,855,461						100 %	5,835,476,334	
4 02 02 2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang terbentuk	100 %		0 %	100 %	751,674,603						100 %	771,674,603	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 02 02 2.01 01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				15 Dokumen	30,900,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD, Anggota DPRK dan Masyarakat	15 Dokumen	30,900,000	Sekretariat DPRK
4 02 02 2.01 02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				7 Dokumen	430,460,048	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD, Anggota DPRK dan Masyarakat	7 Dokumen	430,460,048	Sekretariat DPRK
4 02 02 2.01 03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				4 Dokumen	72,491,248	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD, Anggota DPRK dan Masyarakat	4 Dokumen	72,491,248	Sekretariat DPRK
4 02 02 2.01 04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				5 Dokumen	217,823,307	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD, Anggota DPRK dan Masyarakat	5 Dokumen	217,823,307	Sekretariat DPRK
4 02 02 2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Terlaksananya Rapat Pembahasan Anggaran	100 %		0 %	100 %	315,205,765						100 %	315,205,765	
4 02 02 2.02 01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				1 Dokumen	47,431,400	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD dan Anggota DPRK	1 Dokumen	47,431,400	Sekretariat DPRK
4 02 02 2.02 02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				1 Dokumen	47,258,345	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD dan Anggota DPRK	1 Dokumen	47,258,345	Sekretariat DPRK
4 02 02 2.02 03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	62,198,375	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD dan Anggota DPRK	1 Dokumen	62,198,375	Sekretariat DPRK
4 02 02 2.02 04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen	61,907,236	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD dan Anggota DPRK	1 Dokumen	61,907,236	Sekretariat DPRK
4 02 02 2.02 05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester				2 Dokumen	28,609,730	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD dan Anggota DPRK	2 Dokumen	28,609,730	Sekretariat DPRK

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	67,800,679	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD dan Anggota DPRK	1 Dokumen	67,800,679	Sekretariat DPRK
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100 %		0 %	100 %	130,261,552						100 %	138,261,552	
4.02.02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				2 Dokumen	68,088,500	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD dan Anggota DPRK	2 Dokumen	58,088,500	Sekretariat DPRK
4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				2 Dokumen	62,173,052	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD dan Anggota DPRK	2 Dokumen	62,173,052	Sekretariat DPRK
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	100 %		0 %	100 %	1,908,832,713						100 %	1,935,832,713	
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan				47 Dokumen	877,978,453	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Sekretariat DPRK, Anggota DPRK dan Masyarakat	47 Dokumen	877,978,453	Sekretariat DPRK
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				21 Orang	126,504,557	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Sekretariat DPRK, Anggota DPRK dan Masyarakat	21 Orang	126,504,557	Sekretariat DPRK
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				6 Orang	216,000,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Sekretariat DPRK, Anggota DPRK dan Masyarakat	6 Orang	216,000,000	Sekretariat DPRK
4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				26 Dokumen	665,788,716	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Sekretariat DPRK, Anggota DPRK dan Masyarakat	26 Dokumen	665,788,716	Sekretariat DPRK
4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				1 Dokumen	22,560,987	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Sekretariat DPRK, Anggota DPRK dan Masyarakat	1 Dokumen	22,560,987	Sekretariat DPRK

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 02 02 2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Laporan Aspirasi Masyarakat yang ditampung	600 Laporan		0 Laporan	150 Laporan	2,545,018,660						150 Laporan	2,545,018,660	
4 02 02 2.05 01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				30 Laporan	33,175,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Anggota DPRK dan Masyarakat	30 Laporan	33,175,000	Sekretariat DPRK
4 02 02 2.05 02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				30 Dokumen	49,542,758	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Anggota DPRK dan Masyarakat	30 Dokumen	49,542,758	Sekretariat DPRK
4 02 02 2.05 03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				90 Dokumen	2,462,300,902	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Anggota DPRK dan Masyarakat	90 Dokumen	2,462,300,902	Sekretariat DPRK
4 02 02 2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase pengawasan kode etik DPRD yang terlaksana	100 %		0 %	100 %	28,653,437						100 %	28,653,437	
4 02 02 2.06 01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD				2 Dokumen	28,653,437	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Anggota DPRK	2 Dokumen	28,653,437	Sekretariat DPRK
4 02 02 2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Tugas DPRD yang terlaksana	100 %		0 %	100 %	6,208,731						100 %	68,529,604	
4 02 02 2.08 03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				90 Dokumen	6,208,731	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Anggota DPRK	90 Dokumen	6,829,604	Sekretariat DPRK
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5 01	PERENCANAAN						12,773,908,438							14,089,235,367	
5 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat daerah	100 %		0 %	100 %	9,468,502,931						100 %	10,713,571,287	
5 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	100 %		0 %	100 %	76,982,850						100 %	76,982,850	
5 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	76,982,850	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Neusu Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Bappeda Kota Banda Aceh	12 Dokumen	76,982,850	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	7,871,882,693						100 %	8,612,582,693	
5 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				45 Orang/bulan	6,904,182,693	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Neusu Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Bappeda Kota Banda Aceh	45 Orang/bulan	7,619,882,693	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
5 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	967,700,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Neusu Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Bappeda Kota Banda Aceh	1 Dokumen	992,700,000	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
5 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	88,750,000						100 %	163,750,000	
5 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	63,750,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Neusu Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Bappeda Kota Banda Aceh	1 Paket	63,750,000	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
5 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	25,000,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Neusu Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Bappeda Kota Banda Aceh	3 Orang	100,000,000	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
5 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	721,261,044						100 %	986,603,600	
5 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	6,920,874	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Neusu Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Bappeda Kota Banda Aceh	1 Paket	6,920,874	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
5 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	421,661,334	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Neusu Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Bappeda Kota Banda Aceh	1 Paket	453,661,334	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
5 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	26,021,392	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Neusu Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Bappeda Kota Banda Aceh	1 Paket	26,021,392	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
5 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	266,657,444	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Neusu Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Bappeda Kota Banda Aceh	20 Laporan	500,000,000	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
5 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		0 %	100 %	461,158,532						100 %	461,158,532	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	330,680,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Neusu Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Bappeda Kota Banda Aceh	1 Laporan	330,680,000	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	130,478,532	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Neusu Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Bappeda Kota Banda Aceh	1 Laporan	130,478,532	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		0 %	100 %	248,467,812						100 %	312,493,612	
5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				11 Unit	90,357,376	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Neusu Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Bappeda Kota Banda Aceh	11 Unit	85,357,376	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				114 Unit	41,686,936	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Neusu Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Bappeda Kota Banda Aceh	114 Unit	41,332,736	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	116,423,500	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Neusu Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Bappeda Kota Banda Aceh	1 Unit	185,803,500	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Kegiatan Pembangunan Daerah yang terlaksana sesuai dengan Dokumen Perencanaan	100 %		0 %	100 %	2,459,406,087						100 %	2,529,664,660	
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase kegiatan pembangunan daerah yang terlaksana sesuai dengan dokumen perencanaan	100 %		0 %	100 %	1,411,207,024						100 %	1,411,207,024	
5.01.02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah				1 Dokumen	142,236,850	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Neusu Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan		OPD, Masyarakat, Stakeholder	1 Dokumen	142,236,850	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				1 Berita Acara	99,355,335	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Neusu Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan		OPD, Masyarakat, Stakeholder	1 Berita Acara	99,355,335	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				20 Berita Acara	116,545,535	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Neusu Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan		OPD, Masyarakat, Stakeholder	20 Berita Acara	116,545,535	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	168,127,580	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Neusu Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan		OPD, Masyarakat, Stakeholder	1 Berita Acara	168,127,580	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)				4 Dokumen	884,941,724	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Neusu Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan		OPD, Masyarakat, Stakeholder	4 Dokumen	884,941,724	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase jumlah Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %		0 %	100 %	118,941,000						100 %	129,199,573	
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah masukan analisis data untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah				2 Masukan	118,941,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Neusu Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD, Masyarakat, Stakeholder	2 Masukan	129,199,573	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %		0 %	100 %	655,448,063						100 %	655,448,063	
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				4 Laporan	466,634,075	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Neusu Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD, Masyarakat, Stakeholder	4 Laporan	466,634,075	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				2 Laporan	188,813,988	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Neusu Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD, Masyarakat, Stakeholder	2 Laporan	188,813,988	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase implementasi sistem informasi pemerintahan daerah di bidang pembangunan daerah	100 %		0 %	100 %	273,810,000						100 %	333,810,000	
5.01.02.2.04.01	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola				3 Dokumen	273,810,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Neusu Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD	3 Dokumen	333,810,000	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 01 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %		0 %	100 %	845,999,420						100 %	845,999,420	
5 01 03 2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %		0 %	100 %	267,679,500						100 %	267,679,500	
5 01 03 2.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				1 Laporan	44,594,250	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Neusu Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD	1 Laporan	44,594,250	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
5 01 03 2.01 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan renstra/renja bidang pembangunan manusia				15 Perangkat Daerah	149,050,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Neusu Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD	15 Perangkat Daerah	149,050,000	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
5 01 03 2.01 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	74,035,250	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Neusu Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD	1 Laporan	74,035,250	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
5 01 03 2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100 %		0 %	100 %	328,291,010						100 %	328,291,010	
5 01 03 2.02 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan renstra/renja bidang perekonomian				18 Perangkat Daerah	112,548,030	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Neusu Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD	18 Perangkat Daerah	112,548,030	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
5 01 03 2.02 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				1 Laporan	147,817,780	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Neusu Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD	1 Laporan	147,817,780	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
5 01 03 2.02 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				1 Laporan	67,925,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Neusu Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD	1 Laporan	67,925,200	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 01 03 2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %		0 %	100 %	250,028,910						100 %	250,028,910	
5 01 03 2.03 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan renstra/renja bidang infrastruktur				11 Perangkat Daerah	120,929,430	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Neusu Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD	11 Perangkat Daerah	120,929,430	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
5 01 03 2.03 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				6 Laporan	69,419,730	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Neusu Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD	6 Laporan	69,419,730	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
5 01 03 2.03 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				5 Laporan	59,679,750	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Neusu Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD	5 Laporan	59,679,750	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
5 05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							872,339,685						1,381,385,105	
5 05 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Peresentase hasil penelitian dan pengembangan daerah	100 %		0 %	100 %	872,339,685						100 %	1,381,385,105	
5 05 02 2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	100 %		0 %	100 %	178,322,510						100 %	387,889,930	
5 05 02 2.02 01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial				1 Dokumen	178,322,510	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Neusu Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD, Masyarakat, Stakeholder	1 Dokumen	178,322,510	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
5 05 02 2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	100 %		0 %	100 %	415,492,420						100 %	714,970,420	
5 05 02 2.03 02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan				1 Dokumen	205,925,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Neusu Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD, Masyarakat, Stakeholder	1 Dokumen		Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
5 05 02 2.03 07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup				4 Dokumen	209,567,420	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Neusu Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD, Masyarakat, Stakeholder	4 Dokumen		Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
5 05 02 2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase hasil Pengembangan Inovasi dan Teknologi	100 %		0 %	100 %	278,524,755						100 %	278,524,755	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 05 02 2.04 01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				5 Dokumen	202,500,500	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Neusu Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD, Masyarakat, Stakeholder	5 Dokumen	202,500,500	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
5 05 02 2.04 04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				2 Laporan	76,024,255	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Neusu Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD, Masyarakat, Stakeholder	2 Laporan	76,024,255	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5 02	KEUANGAN						174,333,201,578							174,705,480,123	
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat daerah	100 %		0 %	100 %	21,902,027,177						100 %	22,613,526,889	
5 02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	100 %		0 %	100 %	125,922,026						100 %	123,000,000	
5 02 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	91,448,496	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		BPKK Banda Aceh	6 Dokumen	60,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Kota
5 02 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				18 Laporan	34,473,530	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		BPKK Banda Aceh	18 Laporan	25,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Kota
5 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	18,024,281,507						100 %	18,060,877,175	
5 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14,840,650,777	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai ASN dan Non ASN BPKK Banda Aceh	14 Orang/bulan	14,840,650,775	Badan Pengelolaan Keuangan Kota
5 02 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	3,121,127,200	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai ASN dan Non ASN BPKK Banda Aceh	12 Dokumen	3,170,226,400	Badan Pengelolaan Keuangan Kota

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				7 Laporan	62,503,530	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai ASN dan Non ASN BPKK Banda Aceh	7 Laporan	20,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Kota
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	118,300,000						100 %	156,200,000	
5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				152 Paket	83,300,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai BPKK Banda Aceh	152 Paket	114,700,000	Badan Pengelolaan Keuangan Kota
5.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	35,000,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai BPKK Banda Aceh	4 Orang	6,500,000	Badan Pengelolaan Keuangan Kota
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	860,210,675						100 %	865,376,000	
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	5,036,181	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor BPKK Banda Aceh	4 Paket	5,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Kota
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4,155,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor BPKK Banda Aceh	4 Paket	3,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Kota
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	40,546,069	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor BPKK Banda Aceh	10 Paket	40,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Kota
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				50 Paket	409,148,583	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor BPKK Banda Aceh	50 Paket	320,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Kota
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2,397,600	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor BPKK Banda Aceh	2 Dokumen	2,376,000	Badan Pengelolaan Keuangan Kota

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				70 Laporan	398,927,242	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor BPKK Banda Aceh	70 Laporan	350,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Kota
5 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %		0 %	100 %	334,622,116						100 %	1,124,073,714	
5 02 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				4 Unit	155,400,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor BPKK Banda Aceh	4 Unit	120,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Kota
5 02 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	44,400,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor BPKK Banda Aceh	3 Unit	350,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Kota
5 02 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	23,615,694	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor BPKK Banda Aceh	10 Unit	20,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Kota
5 02 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				40 Unit	111,206,422	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor BPKK Banda Aceh	40 Unit	614,073,714	Badan Pengelolaan Keuangan Kota
5 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		0 %	100 %	1,064,193,969						100 %	1,068,000,000	
5 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	8,500,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor BPKK Banda Aceh	12 Laporan	8,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Kota
5 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	360,000,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor BPKK Banda Aceh	12 Laporan	360,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Kota
5 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	695,693,969	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor BPKK Banda Aceh	12 Laporan	700,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Kota

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		0 %	100 %	1,374,496,884						100 %	1,211,000,000	
5 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				32 Unit	394,152,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor BPKK Banda Aceh	32 Unit	300,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Kota
5 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	364,752,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor BPKK Banda Aceh	8 Unit	300,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Kota
5 02 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	12,837,794	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor BPKK Banda Aceh	10 Unit	6,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Kota
5 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 Unit	68,496,692	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor BPKK Banda Aceh	40 Unit	50,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Kota
5 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	534,258,398	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor BPKK Banda Aceh	1 Unit	500,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Kota
5 02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase tertibnya pengelolaan keuangan sesuai dengan perundang-undangan	100 %		0 %	100 %	147,453,239,514						100 %	147,114,018,348	
5 02 02 2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Ketersediaan dokumen pelaksanaan APBK	100 %		0 %	100 %	4,220,049,795						100 %	5,034,654,995	
5 02 02 2.01 01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	447,893,420	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Organisasi Perangkat Daerah	2 Dokumen	1,105,300,000	Badan Pengelolaan Keuangan Kota
5 02 02 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	443,231,420	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Organisasi Perangkat Daerah	2 Dokumen	150,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Kota

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 02 2.01 03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				88 Dokumen	457,138,500	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Organisasi Perangkat Daerah	88 Dokumen	40,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Kota
5 02 02 2.01 04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				44 Dokumen	11,655,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Organisasi Perangkat Daerah	44 Dokumen	42,250,000	Badan Pengelolaan Keuangan Kota
5 02 02 2.01 05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				44 Dokumen	529,943,763	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Organisasi Perangkat Daerah	44 Dokumen	100,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Kota
5 02 02 2.01 06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				44 Dokumen	425,055,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Organisasi Perangkat Daerah	44 Dokumen	35,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Kota
5 02 02 2.01 07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	521,227,512	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Organisasi Perangkat Daerah	2 Dokumen	1,100,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Kota
5 02 02 2.01 08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen	708,363,911	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Organisasi Perangkat Daerah	2 Dokumen	566,326,162	Badan Pengelolaan Keuangan Kota
5 02 02 2.01 09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				1 Dokumen	553,376,106	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Organisasi Perangkat Daerah	1 Dokumen	1,150,778,833	Badan Pengelolaan Keuangan Kota
5 02 02 2.01 13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				2 Orang	122,165,163	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Organisasi Perangkat Daerah	2 Orang	45,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Kota
5 02 02 2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100 %		0 %	100 %	1,511,147,330						100 %	845,449,990	
5 02 02 2.02 01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				12 Dokumen	140,872,354	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Organisasi Perangkat Daerah	12 Dokumen	113,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Kota

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				528 Dokumen	440,577,684	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Organisasi Perangkat Daerah	528 Dokumen	40,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Kota
5.02.02.2.02.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah				4 Dokumen	3,387,006	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Organisasi Perangkat Daerah	4 Dokumen	1,500,000	Badan Pengelolaan Keuangan Kota
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				12 Dokumen	159,500,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Organisasi Perangkat Daerah	12 Dokumen	119,700,000	Badan Pengelolaan Keuangan Kota
5.02.02.2.02.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				9000 Dokumen	474,029,414	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Organisasi Perangkat Daerah	9000 Dokumen	430,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Kota
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemetongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				1 Laporan	54,926,983	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Organisasi Perangkat Daerah	1 Laporan	20,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Kota
5.02.02.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas				12 Dokumen	58,893,322	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Organisasi Perangkat Daerah	12 Dokumen	39,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Kota

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Potongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Potongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				12 Dokumen	56,390,270	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Organisasi Perangkat Daerah	12 Dokumen	22,249,990	Badan Pengelolaan Keuangan Kota
5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				1 Dokumen	73,416,475	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Organisasi Perangkat Daerah	1 Dokumen	30,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Kota
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				88 Orang	49,153,822	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Organisasi Perangkat Daerah	88 Orang	30,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Kota
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase dokumen pelaksanaan Akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	100 %		0 %	100 %	1,358,563,442						100 %	783,058,737	
5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				2 Laporan	4,349,987	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Organisasi Perangkat Daerah	2 Laporan	53,058,737	Badan Pengelolaan Keuangan Kota
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				3 Dokumen	142,523,467	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Organisasi Perangkat Daerah	3 Dokumen	80,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Kota
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				1 Laporan	166,088,335	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Organisasi Perangkat Daerah	1 Laporan	95,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Kota
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				7 Laporan	292,253,703	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Organisasi Perangkat Daerah	7 Laporan	180,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Kota

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				2 Dokumen	182,106,091	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Organisasi Perangkat Daerah	2 Dokumen	100,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Kota
5.02.02.2.03.06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				2 Dokumen	126,341,922	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Organisasi Perangkat Daerah	2 Dokumen	20,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Kota
5.02.02.2.03.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				1 Dokumen	109,612,090	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Organisasi Perangkat Daerah	1 Dokumen	25,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Kota
5.02.02.2.03.08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1 Dokumen	160,495,322	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Organisasi Perangkat Daerah	1 Dokumen	120,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Kota
5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				1 Dokumen	140,859,262	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Organisasi Perangkat Daerah	1 Dokumen	45,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Kota
5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah				1 Dokumen	18,211,306	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Organisasi Perangkat Daerah	1 Dokumen	10,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Kota
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				44 Orang	7,174,112	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Organisasi Perangkat Daerah	44 Orang	5,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Kota
5.02.02.2.03.12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina				2 Lembaga	5,032,862	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Organisasi Perangkat Daerah	2 Lembaga	20,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Kota

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 02 2.03 13	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota				2 Laporan	3,514,983	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Organisasi Perangkat Daerah	2 Laporan	30,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Kota
5 02 02 2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Kelancaran Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %		0 %	100 %	140,300,854,626						100 %	140,405,854,626	
5 02 02 2.04 04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah				1 Laporan	3,511,000,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Perangkat Daerah	1 Laporan	3,511,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Kota
5 02 02 2.04 09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	1,500,000,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Organisasi Perangkat Daerah	1 Laporan	1,500,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Kota
5 02 02 2.04 10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				1 Laporan	135,289,854,626	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Desa			Organisasi Perangkat Daerah	1 Laporan	135,289,854,626	Badan Pengelolaan Keuangan Kota
5 02 02 2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	100 %		0 %	100 %	62,624,321						100 %	45,000,000	
5 02 02 2.05 03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				1 Orang	62,624,321	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Organisasi Perangkat Daerah	1 Orang	15,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Kota
5 02 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase tertibnya pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan perundang-undangan	100 %		0 %	100 %	2,988,286,738						100 %	2,988,286,737	
5 02 03 2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %		0 %	100 %	2,988,286,738						100 %	2,988,286,737	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	333,473,947	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Organisasi Perangkat Daerah	1 Dokumen	299,700,000	Badan Pengelolaan Keuangan Kota
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	188,089,838	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Organisasi Perangkat Daerah	1 Dokumen	175,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Kota
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	193,419,338	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Organisasi Perangkat Daerah	1 Laporan	140,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Kota
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				1 Laporan	155,396,395	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Organisasi Perangkat Daerah	1 Laporan	100,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Kota
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				1 Laporan	395,068,267	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Organisasi Perangkat Daerah	1 Laporan	863,286,737	Badan Pengelolaan Keuangan Kota
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				1 Laporan	158,587,645	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Organisasi Perangkat Daerah	1 Laporan	250,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Kota
5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	130,668,612	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Organisasi Perangkat Daerah	1 Laporan	125,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Kota
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	599,712,810	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Organisasi Perangkat Daerah	1 Dokumen	450,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Kota
5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				1 Laporan	472,447,620	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Organisasi Perangkat Daerah	1 Laporan	350,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Kota
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				1 Laporan	171,610,257	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Organisasi Perangkat Daerah	1 Laporan	110,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Kota

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 03 2.01 13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				88 Orang	189,812,009	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Organisasi Perangkat Daerah	88 Orang	120,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Kota
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	40.20 %		0 %	40.07 %	1,989,648,149						40.07 %	1,989,648,149	
5 02 04 2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pajak Terhadap Pendapatan Asli Daerah	%		%	40.07 %	1,989,648,149						40.07 %	1,989,648,149	
5 02 04 2.01 01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				1 Dokumen	65,950,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Wajib Pajak Kota Banda Aceh	1 Dokumen	77,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Kota
5 02 04 2.01 02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				1 Dokumen	63,877,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Wajib Pajak Kota Banda Aceh	1 Dokumen	300,006,715	Badan Pengelolaan Keuangan Kota
5 02 04 2.01 03	Penyuluhan dan Penyebarnya Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarnya Kebijakan Pajak Daerah				1 Laporan	177,928,200	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Wajib Pajak Kota Banda Aceh	1 Laporan	69,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Kota
5 02 04 2.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				1 Laporan	86,302,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Wajib Pajak Kota Banda Aceh	1 Laporan	53,500,000	Badan Pengelolaan Keuangan Kota
5 02 04 2.01 06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				1 Laporan	256,963,575	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Wajib Pajak Kota Banda Aceh	1 Laporan	127,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Kota
5 02 04 2.01 07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				5000 Obyek Pajak	608,345,494	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Wajib Pajak Kota Banda Aceh	5000 Obyek Pajak	500,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Kota
5 02 04 2.01 08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				1 Dokumen	80,077,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Wajib Pajak Kota Banda Aceh	1 Dokumen	91,948,516	Badan Pengelolaan Keuangan Kota
5 02 04 2.01 09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				1 Layanan	40,914,771	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Wajib Pajak Kota Banda Aceh	1 Layanan	33,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Kota

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 04 2.01 10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				1 Dokumen	80,077,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Wajib Pajak Kota Banda Aceh	1 Dokumen	60,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Kota
5 02 04 2.01 11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				1 Dokumen	461,794,904	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Wajib Pajak Kota Banda Aceh	1 Dokumen	320,692,918	Badan Pengelolaan Keuangan Kota
5 02 04 2.01 13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				1 Dokumen	67,418,205	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Wajib Pajak Kota Banda Aceh	1 Dokumen	53,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Kota
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5 03	KEPEGAWAIAN						10,524,334,021							11,418,386,911	
5 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat daerah	100 %		0 %	100 %	8,228,080,819						100 %	8,895,215,911	
5 03 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	100 %		0 %	100 %	36,412,500						100 %	36,200,000	
5 03 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	36,412,500	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		BKPSDM Kota Banda Aceh	5 Dokumen	36,200,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	7,183,674,558						100 %	7,842,057,558	
5 03 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				65 Orang/bulan	6,670,994,558	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		BKPSDM Kota Banda Aceh	65 Orang/bulan	7,329,377,558	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	512,680,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		BKPSDM Kota Banda Aceh	1 Dokumen	512,680,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	53,500,000						100 %	58,500,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 03 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	38,500,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			BKPSDM Kota Banda Aceh	1 Paket	38,500,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	15,000,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			BKPSDM Kota Banda Aceh	5 Orang	20,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	229,592,176						100 %	232,379,985	
5 03 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10,707,693	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru				BKPSDM Kota Banda Aceh	1 Paket	13,179,985	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	53,884,483	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			BKPSDM Kota Banda Aceh	1 Paket	54,200,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	165,000,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			BKPSDM Kota Banda Aceh	25 Laporan	165,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %		0 %	100 %	33,859,201						100 %	33,859,201	
5 03 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	33,859,201	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		BKPSDM Kota Banda Aceh	8 Unit	33,859,201	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		0 %	100 %	584,811,920						100 %	583,992,356	
5 03 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	478,500,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			BKPSDM Kota Banda Aceh	1 Laporan	480,500,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	106,311,920	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			BKPSDM Kota Banda Aceh	1 Laporan	103,492,356	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		0 %	100 %	106,230,464						100 %	108,226,811	
5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	64,100,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			BKPSDM Kota Banda Aceh	9 Unit	64,100,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	23,310,464	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			BKPSDM Kota Banda Aceh	20 Unit	28,306,811	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	18,820,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			BKPSDM Kota Banda Aceh	1 Unit	15,820,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Peningkatan Administrasi Dan Data Kepegawaian ASN	100 %		0 %	100 %	2,296,253,202						100 %	2,523,171,000	
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Kepegawaian ASN	100 %		0 %	100 %	582,444,003						100 %	712,990,583	
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				3 Dokumen	390,540,345	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		ASN Pemerintah Kota Banda Aceh	3 Dokumen	487,486,925	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.01.05	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN				0 Dokumen 1 Dokumen	58,278,658	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		ASN Pemerintah Kota Banda Aceh	0 Dokumen 1 Dokumen	65,603,658	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				1 Lembaga	100,000,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		ASN Pemerintah Kota Banda Aceh	1 Lembaga	115,950,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				5 Dokumen	33,625,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		ASN Pemerintah Kota Banda Aceh	5 Dokumen	43,950,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 03 02 2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase PNS yang Dimutasi dan Promosi pada Jabatan	100 %		0 %	100 %	473,050,839						100 %	501,950,000	
5 03 02 2.02 01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				1 Dokumen	105,900,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Pemerintah Kota Banda Aceh	1 Dokumen	100,950,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.02 02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				1 Dokumen	74,370,725	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Pemerintah Kota Banda Aceh	1 Dokumen	100,500,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.02 03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				1 Dokumen	292,780,114	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Pemerintah Kota Banda Aceh	1 Dokumen	300,500,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	100 %		0 %	100 %	1,088,000,000						100 %	1,139,497,917	
5 03 02 2.03 04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				117 Orang	1,088,000,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru				PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh	117 Orang	1,139,497,917	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Evaluasi Kinerja Aparatur Sipil Negara	100 %		0 %	100 %	152,758,360						100 %	168,732,500	
5 03 02 2.04 02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Dokumen	43,415,860	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh	1 Dokumen	45,500,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.04 04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				5 Orang	36,780,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh	5 Orang	50,670,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.04 08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				1 Laporan	72,562,500	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh	1 Laporan	72,562,500	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							642,769,890						657,100,000	
5 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	100 %		0 %	100 %	642,769,890						100 %	657,100,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 04 02 2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase Aparatur yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional	100 %		0 %	100 %	88,669,965						100 %	60,450,000	
5 04 02 2.01 04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum				1 Dokumen	88,669,965	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh	1 Dokumen	60,450,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 04 02 2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang mengikuti sertifikasi dan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	100 %		0 %	100 %	554,099,925						100 %	596,650,000	
5 04 02 2.02 07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				1 Laporan	66,519,965	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		CPNS dan PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh	1 Laporan	75,800,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 04 02 2.02 08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama				1 Dokumen	487,579,960	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		CPNS dan PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh	1 Dokumen	520,850,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN														
6 01	INSPEKTORAT DAERAH						9,245,698,728							10,390,298,728	
6 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat daerah	100 %		0 %	100 %	7,805,000,771						100 %	8,949,600,771	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	100 %		0 %	100 %	1,315,000						100 %	1,315,000	
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	1,315,000	Kota Banda Aceh, Ulee Kareng, Pango Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Inspektorat Kota Banda Aceh	5 Dokumen	1,315,000	Inspektorat
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	7,167,316,337						100 %	8,311,916,337	
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				51 Orang/bulan	6,993,016,337	Kota Banda Aceh, Ulee Kareng, Pango Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai Inspektorat Kota Banda Aceh	51 Orang/bulan	8,137,616,337	Inspektorat
6.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	174,300,000	Kota Banda Aceh, Ulee Kareng, Pango Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai Inspektorat Kota Banda Aceh	12 Dokumen	174,300,000	Inspektorat
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	137,760,000						100 %	117,760,000	
6.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				51 Paket	67,760,000	Kota Banda Aceh, Ulee Kareng, Pango Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai Inspektorat Kota Banda Aceh	51 Paket	67,760,000	Inspektorat
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	70,000,000	Kota Banda Aceh, Ulee Kareng, Pango Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai Inspektorat Kota Banda Aceh	10 Orang	50,000,000	Inspektorat
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	274,751,791						100 %	274,751,791	
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	1,429,368	Kota Banda Aceh, Ulee Kareng, Pango Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Inspektorat Kota Banda Aceh, Pegawai Inspektorat Kota Banda Aceh	4 Paket	1,429,368	Inspektorat
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	29,139,673	Kota Banda Aceh, Ulee Kareng, Pango Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Inspektorat Kota Banda Aceh, Pegawai Inspektorat Kota Banda Aceh	12 Paket	29,139,673	Inspektorat

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				16 Laporan	244,182,750	Kota Banda Aceh, Ulee Kareng, Pango Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Inspektorat Kota Banda Aceh, Pegawai Inspektorat Kota Banda Aceh	16 Laporan	244,182,750	Inspektorat
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %		0 %	100 %	36,886,131						100 %	56,886,131	
6.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	36,886,131	Kota Banda Aceh, Ulee Kareng, Pango Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Inspektorat Kota Banda Aceh	10 Unit	36,886,131	Inspektorat
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		0 %	100 %	115,949,308						100 %	115,949,308	
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	59,296,311	Kota Banda Aceh, Ulee Kareng, Pango Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Inspektorat Kota Banda Aceh	12 Laporan	59,296,311	Inspektorat
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	56,652,997	Kota Banda Aceh, Ulee Kareng, Pango Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Inspektorat Kota Banda Aceh	12 Laporan	56,652,997	Inspektorat
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		0 %	100 %	71,022,204						100 %	71,022,204	
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	53,532,000	Kota Banda Aceh, Ulee Kareng, Pango Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kendaraan Dinas, Peralatan dan gedung kantor Inspektorat Kota Banda Aceh	7 Unit	53,532,000	Inspektorat
6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	5,770,204	Kota Banda Aceh, Ulee Kareng, Pango Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kendaraan Dinas, Peralatan dan gedung kantor Inspektorat Kota Banda Aceh	10 Unit	5,770,204	Inspektorat
6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	11,720,000	Kota Banda Aceh, Ulee Kareng, Pango Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kendaraan Dinas, Peralatan dan gedung kantor Inspektorat Kota Banda Aceh	1 Unit	11,720,000	Inspektorat

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
6 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Pengawasan yang diselenggarakan secara optimal	100 %		0 %	100 %	1,418,414,207						100 %	1,418,414,207	
6 01 02 2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Pengawasan Internal yang Dilaksanakan	100 %		0 %	100 %	1,374,738,207						100 %	1,374,738,207	
6 01 02 2.01 01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				6 Laporan	76,437,500	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Seluruh OPD Pemerintah Kota Banda Aceh	6 Laporan	76,437,500	Inspektorat
6 01 02 2.01 02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				114 Laporan	293,356,688	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Seluruh OPD Pemerintah Kota Banda Aceh	114 Laporan	293,356,688	Inspektorat
6 01 02 2.01 03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				8 Laporan	172,775,000	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Seluruh OPD Pemerintah Kota Banda Aceh	8 Laporan	172,775,000	Inspektorat
6 01 02 2.01 04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				12 Laporan	305,625,000	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Seluruh OPD Pemerintah Kota Banda Aceh	12 Laporan	305,625,000	Inspektorat
6 01 02 2.01 05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				42 Laporan	218,800,000	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Seluruh OPD Pemerintah Kota Banda Aceh	42 Laporan	218,800,000	Inspektorat
6 01 02 2.01 06	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				1 Kesepakatan	190,779,869	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Seluruh OPD Pemerintah Kota Banda Aceh	1 Kesepakatan	190,779,869	Inspektorat
6 01 02 2.01 07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				6 Dokumen	116,964,150	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Seluruh OPD Pemerintah Kota Banda Aceh	6 Dokumen	116,964,150	Inspektorat
6 01 02 2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Kasus Pengaduan dan Kerugian Negara/Daerah yang Diselesaikan	100 %		0 %	100 %	43,676,000						100 %	43,676,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				1 Laporan	5,876,000	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Seluruh OPD Pemerintah Kota Banda Aceh dan Masyarakat di Kota Banda Aceh	1 Laporan	5,876,000	Inspektorat
6.01.02.2.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				14 Laporan	37,800,000	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Seluruh OPD Pemerintah Kota Banda Aceh dan Masyarakat di Kota Banda Aceh	14 Laporan	37,800,000	Inspektorat
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase OPD yang menerapkan SPIP secara memadai minimal level 3 dari skala 5	100 %		0 %	100 %	22,283,750						100 %	22,283,750	
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Level Kapabilitas APIP	3 Level		0 Level	3 Level	2,375,000						3 Level	2,375,000	
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				2 Rekomendasi	2,375,000	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Seluruh OPD Pemerintah Kota Banda Aceh	2 Rekomendasi	2,375,000	Inspektorat
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase Penerapan SPIP Secara Memadai pada OPD yang Ditetapkan	100 %		0 %	100 %	19,908,750						100 %	19,908,750	
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				10 perangkat daerah	12,783,750	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Seluruh OPD Pemerintah Kota Banda Aceh	10 perangkat daerah	12,783,750	Inspektorat
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				14 perangkat daerah	2,375,000	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Seluruh OPD Pemerintah Kota Banda Aceh	14 perangkat daerah	2,375,000	Inspektorat
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				4 Kegiatan	2,375,000	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Seluruh OPD Pemerintah Kota Banda Aceh	4 Kegiatan	2,375,000	Inspektorat
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				10 perangkat daerah	2,375,000	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Seluruh OPD Pemerintah Kota Banda Aceh	10 perangkat daerah	2,375,000	Inspektorat
7	UNSUR KEWILAYAHAN														

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7	01						2,749,601,614						2,797,601,614		
7	01	01					2,631,716,152					100 %	2,631,716,152		
7	01	01	2.01				19,001,840					100 %	19,001,840		
7	01	01	2.01	01			4 Dokumen	19,001,840	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Neusu Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kecamatan	4 Dokumen	19,001,840	Kecamatan Baiturrahman
7	01	01	2.02					2,403,820,031				100 %	2,403,820,031		
7	01	01	2.02	01			12 Orang/bulan	2,111,620,031	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Neusu Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tenaga Administrasi/teknis perkantoran pada Kantor Camat Baiturrahman	12 Orang/bulan	2,111,620,031	Kecamatan Baiturrahman
7	01	01	2.02	02			12 Dokumen	292,200,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Neusu Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tenaga Administrasi/teknis perkantoran pada Kantor Camat Baiturrahman	12 Dokumen	292,200,000	Kecamatan Baiturrahman
7	01	01	2.05					21,750,000				100 %	21,750,000		
7	01	01	2.05	02			2 Paket	21,750,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Neusu Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		ASN dan Tenaga Kontrak pada Kantor Camat Baiturrahman	2 Paket	21,750,000	Kecamatan Baiturrahman
7	01	01	2.06					51,386,285				100 %	51,386,285		
7	01	01	2.06	01			1 Paket	2,346,225	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Neusu Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pegawai dan Kantor Camat Baiturrahman	1 Paket	2,346,225	Kecamatan Baiturrahman
7	01	01	2.06	05			2 Paket	14,040,060	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Neusu Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pegawai dan Kantor Camat Baiturrahman	2 Paket	14,040,060	Kecamatan Baiturrahman

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				21 Laporan	35,000,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Neusu Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai dan Kantor Camat Baiturrahman	21 Laporan	35,000,000	Kecamatan Baiturrahman
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %		0 %	100 %	3,240,752						100 %	3,240,752	
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	3,240,752	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Neusu Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Camat Baiturrahman	4 Unit	3,240,752	Kecamatan Baiturrahman
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		0 %	100 %	94,737,904						100 %	94,737,904	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	59,521,543	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Neusu Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Camat Baiturrahman	12 Laporan	59,521,543	Kecamatan Baiturrahman
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	35,216,361	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Neusu Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Camat Baiturrahman	12 Laporan	35,216,361	Kecamatan Baiturrahman
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		0 %	100 %	37,779,340						100 %	37,779,340	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	25,232,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Neusu Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Camat Baiturrahman	3 Unit	25,232,000	Kecamatan Baiturrahman
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				24 Unit	12,547,340	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Neusu Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Camat Baiturrahman	24 Unit	12,547,340	Kecamatan Baiturrahman
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	100 %		0 %	100 %	52,765,542						100 %	52,778,158	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %		0 %	100 %	20,035,000						100 %	20,035,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				3 Dokumen	20,035,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Neusu Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			MUSPIKA dan Masyarakat	3 Dokumen	20,035,000	Kecamatan Baiturrahman
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 %		0 %	100 %	4,987,500						100 %	5,000,000	
7 01 02 2.02 01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				1 Dokumen	4,987,500	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Neusu Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			MUSPIKA dan Masyarakat	1 Dokumen	5,000,000	Kecamatan Baiturrahman
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100 %		0 %	100 %	27,743,042						100 %	27,743,158	
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				1 Dokumen	3,999,884	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Neusu Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen	4,000,000	Kecamatan Baiturrahman
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				3 Laporan	23,743,158	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Neusu Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat di Kecamatan	3 Laporan	23,743,158	Kecamatan Baiturrahman
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100 %		0 %	100 %	23,368,494						100 %	33,696,834	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 %		0 %	100 %	19,597,494						100 %	12,814,834	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				10 Lembaga	2,518,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Neusu Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat di Kecamatan	10 Lembaga	2,518,000	Kecamatan Baiturrahman
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	17,079,494	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Neusu Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat di Kecamatan	3 Laporan	10,296,834	Kecamatan Baiturrahman
7 01 03 7.04	Pemberdayaan Mukim	Persentase Pemberdayaan Mukim	100 %		0 %	100 %	3,771,000						100 %	3,771,000	
7 01 03 7.04 01	Penyelenggaraan Mukim	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Mukim				1 Dokumen	1,360,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Neusu Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Gampong dan Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen	1,360,000	Kecamatan Baiturrahman

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 7.04 04	Pelantikan Imeum Mukim	Jumlah Laporan Pelantikan Imeum Mukim				1 Laporan	2,411,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Neusu Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Gampong dan Masyarakat di Kecamatan	1 Laporan	2,411,000	Kecamatan Baiturrahman
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %		0 %	100 %	2,404,188						100 %	2,500,000	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %		0 %	100 %	2,404,188						100 %	2,500,000	
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	2,404,188	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Neusu Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Camat Baiturrahman	1 Dokumen	2,500,000	Kecamatan Baiturrahman
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %		0 %	100 %	39,347,238						100 %	74,910,470	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %		0 %	100 %	39,347,238						100 %	74,910,470	
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	16,414,178	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Neusu Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Gampong dan Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen	16,250,000	Kecamatan Baiturrahman
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				2 Dokumen	10,343,930	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Neusu Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Gampong dan Masyarakat di Kecamatan	2 Dokumen	40,334,730	Kecamatan Baiturrahman
7 01 06 2.01 06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				10 Dokumen	3,562,500	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Neusu Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Gampong dan Masyarakat di Kecamatan	10 Dokumen	8,490,270	Kecamatan Baiturrahman
7 01 06 2.01 07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				1 Dokumen	5,950,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Neusu Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Gampong dan Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen	5,200,000	Kecamatan Baiturrahman
7 01 06 2.01 11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Dokumen	3,076,630	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Neusu Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Gampong dan Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen	1,885,470	Kecamatan Baiturrahman
7	UNSUR KEWILAYAHAN														

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7	01						2,806,462,933						2,823,330,588		
7	01	01					2,692,482,589					100 %	2,690,357,258		
7	01	01	2.01				7,186,864					100 %	7,186,864		
7	01	01	2.01	01			4 Dokumen	7,186,864	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Lam Ara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kantor Camat Banda Raya	4 Dokumen	7,186,864	Kecamatan Banda Raya
7	01	01	2.02					2,518,282,812				100 %	2,518,282,812		
7	01	01	2.02	01			14 Orang/bulan	2,268,982,812	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Lam Ara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	ASN dan Non ASN Kantor Camat Banda Raya	14 Orang/bulan	2,268,982,812	Kecamatan Banda Raya
7	01	01	2.02	02			12 Dokumen	249,300,000	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Lam Ara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	ASN dan Non ASN Kantor Camat Banda Raya	12 Dokumen	249,300,000	Kecamatan Banda Raya
7	01	01	2.05					12,650,000				100 %	12,650,000		
7	01	01	2.05	02			26 Paket	12,650,000	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Lam Ara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		ASN dan Non ASN Kantor Camat Banda Raya	26 Paket	12,650,000	Kecamatan Banda Raya
7	01	01	2.06					34,838,323				100 %	32,838,323		
7	01	01	2.06	01			5 Paket	1,891,925	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Lam Ara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kantor Camat Banda Raya	5 Paket	1,891,925	Kecamatan Banda Raya
7	01	01	2.06	05			7 Paket	4,946,398	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Lam Ara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kantor Camat Banda Raya	7 Paket	4,946,398	Kecamatan Banda Raya
7	01	01	2.06	09			2 Laporan	28,000,000	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Lam Ara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kantor Camat Banda Raya	2 Laporan	26,000,000	Kecamatan Banda Raya

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		0 %	100 %	76,144,619						100 %	77,831,934	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	41,100,000	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Lam Ara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Kantor Camat Banda Raya	12 Laporan	42,800,000	Kecamatan Banda Raya
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	35,044,619	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Lam Ara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Kantor Camat Banda Raya	12 Laporan	35,031,934	Kecamatan Banda Raya
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		0 %	100 %	43,379,971						100 %	41,567,325	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	28,528,000	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Lam Ara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Kantor Camat Banda Raya	4 Unit	28,528,000	Kecamatan Banda Raya
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	6,395,605	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Lam Ara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Kantor Camat Banda Raya	15 Unit	4,586,272	Kecamatan Banda Raya
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	8,456,366	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Lam Ara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Kantor Camat Banda Raya	1 Unit	8,453,053	Kecamatan Banda Raya
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	100 %		0 %	100 %	34,485,659						100 %	36,900,325	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %		0 %	100 %	25,000,000						100 %	25,500,000	
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokumen	25,000,000	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Muspika Kecamatan	12 Dokumen	25,500,000	Kecamatan Banda Raya

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100 %		0 %	100 %	2,585,334						100 %	2,500,000	
7 01 02 2.02 01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				1 Dokumen	2,585,334	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Lam Ara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Masyarakat Kecamatan	1 Dokumen	2,500,000	Kecamatan Banda Raya	
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %		0 %	100 %	6,900,325					100 %	8,900,325		
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				4 Laporan	6,900,325	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Lam Ara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Masyarakat Kecamatan	4 Laporan	7,400,325	Kecamatan Banda Raya	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100 %		0 %	100 %	54,939,836					100 %	54,939,836		
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 %		0 %	100 %	33,641,904					100 %	33,641,904		
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				0 Lembaga Kemasyarakatan	7,069,920	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Lam Ara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Masyarakat Kecamatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	7,069,920	Kecamatan Banda Raya	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	26,571,984	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Lam Ara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Masyarakat Kecamatan	2 Laporan	26,571,984	Kecamatan Banda Raya	
7 01 03 2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	100 %		0 %	100 %	1,687,500					100 %	1,687,500		
7 01 03 2.05 02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	1,687,500	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Lam Ara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Masyarakat Kecamatan	1 Dokumen	1,687,500	Kecamatan Banda Raya	
7 01 03 2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	100 %		0 %	100 %	19,610,432					100 %	19,610,432		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.06 03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				50 Keluarga	19,610,432	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Lam Ara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Masyarakat Kecamatan	50 Keluarga	19,610,432	Kecamatan Banda Raya	
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %		0 %	100 %	24,554,849				Masyarakat Kecamatan	100 %	37,133,169		
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %		0 %	100 %	24,554,849				Masyarakat Kecamatan	100 %	37,133,169		
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				10 Dokumen	4,324,651	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Lam Ara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kecamatan	10 Dokumen	4,324,651	Kecamatan Banda Raya	
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				10 Dokumen	7,493,570	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Lam Ara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kecamatan	10 Dokumen	7,493,570	Kecamatan Banda Raya	
7 01 06 2.01 06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				10 Dokumen	2,315,270	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Lam Ara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kecamatan	10 Dokumen	2,315,270	Kecamatan Banda Raya	
7 01 06 2.01 07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				1 Dokumen	5,181,680	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Lam Ara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kecamatan	1 Dokumen	6,750,000	Kecamatan Banda Raya	
7 01 06 2.01 11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0 Dokumen 2 Laporan	5,239,678	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Lam Ara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kecamatan	0 Dokumen 2 Laporan	10,499,678	Kecamatan Banda Raya	
9	UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN														
9 01	KEKHUSUSAN ACEH							4,500,000						2,000,000	
9 01 02	PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH	Indeks Kota Syariah (IKS)	82,77 %		0 %	78,27 %	4,500,000					78,27 %	2,000,000		
9 01 02 7.02	Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Alquran	Persentase Peningkatan Pemahaman Penghayatan dan Pengamalan Alquran	%		%	78.27 %	4,500,000					78.27 %	2,000,000		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
9 01 02 7.02 04	Pelaksanaan MTQ	Jumlah Orang yang Mengikuti MTQ				45 Orang	4,500,000	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Lam Ara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kecamatan	45 Orang	2,000,000	Kecamatan Banda Raya	
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						2,761,459,596							3,113,959,596	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat daerah	100 %		0 %	100 %	2,660,545,046					100 %	2,984,545,046		
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	14,086,984					100 %	14,086,984		
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	14,086,984	Kota Banda Aceh, Jaya Baru, Lampoh Daya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kecamatan Jaya Baru	7 Dokumen	14,086,984	Kecamatan Jaya Baru	
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	2,506,606,156					100 %	2,830,606,156		
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	2,311,306,156	Kota Banda Aceh, Jaya Baru, Lampoh Daya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		ASN di Kecamatan Jaya Baru	14 Orang/bulan	2,635,306,156	Kecamatan Jaya Baru	
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	195,300,000	Kota Banda Aceh, Jaya Baru, Lampoh Daya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		ASN di Kecamatan Jaya Baru	12 Dokumen	195,300,000	Kecamatan Jaya Baru	
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	12,650,000					100 %	12,650,000		
7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				23 Paket	12,650,000	Kota Banda Aceh, Jaya Baru, Lampoh Daya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		ASN Kecamatan Jaya Baru	23 Paket	12,650,000	Kecamatan Jaya Baru	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	23,573,588					100 %	23,573,588		
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	760,999	Kota Banda Aceh, Jaya Baru, Lampoh Daya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		ASN Kecamatan Jaya Baru	12 Paket	760,999	Kecamatan Jaya Baru	
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	7,943,311	Kota Banda Aceh, Jaya Baru, Lampoh Daya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		ASN Kecamatan Jaya Baru	12 Paket	7,943,311	Kecamatan Jaya Baru	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	14,869,278	Kota Banda Aceh, Jaya Baru, Lampoh Daya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Kecamatan Jaya Baru	2 Laporan	14,869,278	Kecamatan Jaya Baru
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %		0 %	100 %	500,000						100 %	500,000	
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	500,000	Kota Banda Aceh, Jaya Baru, Lampoh Daya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kecamatan Jaya Baru	1 Unit	500,000	Kecamatan Jaya Baru
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		0 %	100 %	80,736,583						100 %	80,736,583	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	53,906,000	Kota Banda Aceh, Jaya Baru, Lampoh Daya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kecamatan Jaya Baru	12 Laporan	53,906,000	Kecamatan Jaya Baru
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	26,830,583	Kota Banda Aceh, Jaya Baru, Lampoh Daya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kecamatan Jaya Baru	12 Laporan	26,830,583	Kecamatan Jaya Baru
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		0 %	100 %	22,391,735						100 %	22,391,735	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	20,134,000	Kota Banda Aceh, Jaya Baru, Lampoh Daya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kecamatan Jaya Baru	3 Unit	20,134,000	Kecamatan Jaya Baru
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	2,257,735	Kota Banda Aceh, Jaya Baru, Lampoh Daya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kecamatan Jaya Baru	10 Unit	2,257,735	Kecamatan Jaya Baru
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	100 %		0 %	100 %	59,518,500						100 %	62,668,500	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %		0 %	100 %	37,290,500						100 %	37,290,500	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				4 Dokumen	37,290,500	Kota Banda Aceh, Jaya Baru, Lampoh Daya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Masyarakat Dalam Kecamatan Jaya Baru	4 Dokumen	37,290,500	Kecamatan Jaya Baru	
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100 %		0 %	100 %	22,228,000					100 %	25,378,000		
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1,000,000	Kota Banda Aceh, Jaya Baru, Lampoh Daya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Masyarakat di Kecamatan Jaya Baru	1 Dokumen	1,500,000	Kecamatan Jaya Baru	
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				2 Laporan	21,228,000	Kota Banda Aceh, Jaya Baru, Lampoh Daya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Masyarakat di Kecamatan Jaya Baru	2 Laporan	23,878,000	Kecamatan Jaya Baru	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100 %		0 %	100 %	8,925,000					100 %	18,925,000		
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 %		0 %	100 %	8,925,000					100 %	18,925,000		
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						3,925,000	Kota Banda Aceh, Jaya Baru, Lampoh Daya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Masyarakat di Kecamatan Jaya Baru		3,925,000	Kecamatan Jaya Baru	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	5,000,000	Kota Banda Aceh, Jaya Baru, Lampoh Daya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Masyarakat di Kecamatan Jaya Baru	1 Laporan	15,000,000	Kecamatan Jaya Baru	
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %		0 %	100 %	32,471,050					100 %	47,821,050		
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %		0 %	100 %	32,471,050					100 %	47,821,050		
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	13,762,500	Kota Banda Aceh, Jaya Baru, Lampoh Daya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Masyarakat di Kecamatan Jaya Baru	1 Dokumen	13,762,500	Kecamatan Jaya Baru	
7 01 06 2.01 06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				3 Dokumen	10,000,000	Kota Banda Aceh, Jaya Baru, Lampoh Daya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Masyarakat di Kecamatan Jaya Baru	3 Dokumen	20,000,000	Kecamatan Jaya Baru	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 06 2.01 11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Dokumen	8,708,550	Kota Banda Aceh, Jaya Baru, Lampoh Daya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat di Kecamatan Jaya Baru	1 Dokumen	14,058,550	Kecamatan Jaya Baru
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN														
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat daerah	100 %		0 %	100 %	2,616,847,787						100 %	2,929,347,787	
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	100 %		0 %	100 %	17,568,554						100 %	17,568,554	
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	17,568,554	Kota Banda Aceh, Lueng Bata, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Kecamatan Lueng Bata	3 Dokumen	17,568,554	Kecamatan Lueng Bata
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	2,401,021,534						100 %	2,713,521,534	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	2,233,621,534	Kota Banda Aceh, Lueng Bata, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN di Kantor Kecamatan Lueng Bata	20 Orang/bulan	2,546,121,534	Kecamatan Lueng Bata
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	167,400,000	Kota Banda Aceh, Lueng Bata, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN di Kantor Kecamatan Lueng Bata	12 Dokumen	167,400,000	Kecamatan Lueng Bata
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	12,650,000						100 %	12,650,000	
7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				23 Paket	12,650,000	Kota Banda Aceh, Lueng Bata, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN di Kantor Kecamatan Lueng Bata	23 Paket	12,650,000	Kecamatan Lueng Bata
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	34,971,115						100 %	34,971,115	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	2,338,748	Kota Banda Aceh, Lueng Bata, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Kantor Kecamatan Lueng Bata	4 Paket	2,338,748	Kecamatan Lueng Bata

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	4,932,367	Kota Banda Aceh, Lueng Bata, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Kantor Kecamatan Lueng Bata	7 Paket	4,932,367	Kecamatan Lueng Bata
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	27,700,000	Kota Banda Aceh, Lueng Bata, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Kantor Kecamatan Lueng Bata	4 Laporan	27,700,000	Kecamatan Lueng Bata
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %		0 %	100 %	17,590,000						100 %	17,590,000	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	17,590,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Kecamatan Lueng Bata	1 Unit	17,590,000	Kecamatan Lueng Bata
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		0 %	100 %	106,179,803						100 %	106,179,803	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	73,020,000	Kota Banda Aceh, Lueng Bata, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Kecamatan Lueng Bata	12 Laporan	73,020,000	Kecamatan Lueng Bata
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	33,159,803	Kota Banda Aceh, Lueng Bata, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Kecamatan Lueng Bata	12 Laporan	33,159,803	Kecamatan Lueng Bata
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		0 %	100 %	26,866,781						100 %	26,866,781	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	21,257,841	Kota Banda Aceh, Lueng Bata, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Kecamatan Lueng Bata	2 Unit	21,257,841	Kecamatan Lueng Bata
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				33 Unit	5,608,940	Kota Banda Aceh, Lueng Bata, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Kecamatan Lueng Bata	33 Unit	5,608,940	Kecamatan Lueng Bata

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di publik	100 %		0 %	100 %		54,677,456						100 %	60,677,456	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %		0 %	100 %		24,250,000						100 %	26,250,000	
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				4 Dokumen		24,250,000	Kota Banda Aceh, Lueng Bata, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Masyarakat di Kecamatan Lueng Bata	4 Dokumen	26,250,000	Kecamatan Lueng Bata	
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100 %		0 %	100 %		6,650,000						100 %	8,650,000	
7 01 02 2.02 01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				1 Dokumen		6,650,000	Kota Banda Aceh, Lueng Bata, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Masyarakat di Kecamatan Lueng Bata	1 Dokumen	8,650,000	Kecamatan Lueng Bata	
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %		0 %	100 %		23,777,456						100 %	25,777,456	
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				2 Laporan		833,398	Kota Banda Aceh, Lueng Bata, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Masyarakat di Kecamatan Lueng Bata	2 Laporan	1,168,398	Kecamatan Lueng Bata	
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				9 Laporan		22,944,058	Kota Banda Aceh, Lueng Bata, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Masyarakat di Kecamatan Lueng Bata	9 Laporan	24,609,058	Kecamatan Lueng Bata	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100 %		0 %	100 %		28,080,137						100 %	43,080,137	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 %		0 %	100 %		6,341,975						100 %	21,341,975	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				438 lembaga		3,795,267	Kota Banda Aceh, Lueng Bata, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Masyarakat di Kecamatan Lueng Bata	438 lembaga	3,795,267	Kecamatan Lueng Bata	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	2,546,708	Kota Banda Aceh, Lueng Bata, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Masyarakat di Kecamatan Lueng Bata	5 Laporan	17,546,708	Kecamatan Lueng Bata	
7.01.03.2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	100 %		0 %	100 %	16,590,000					100 %	16,590,000		
7.01.03.2.05.01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				4 Dokumen	16,590,000	Kota Banda Aceh, Lueng Bata, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Masyarakat di Kecamatan Lueng Bata	4 Dokumen	16,590,000	Kecamatan Lueng Bata	
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100 %		0 %	100 %	297,364					100 %	297,364		
7.01.03.2.06.03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				27 Keluarga	297,364	Kota Banda Aceh, Lueng Bata, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Masyarakat di Kecamatan Lueng Bata	27 Keluarga	297,364	Kecamatan Lueng Bata	
7.01.03.7.04	Pemberdayaan Mukim	Persentase Pemberdayaan Mukim	100 %		0 %	100 %	4,850,798					100 %	4,850,798		
7.01.03.7.04.01	Penyelenggaraan Mukim	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Mukim				1 Dokumen	502,390	Kota Banda Aceh, Lueng Bata, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kemukiman Kecamatan Lueng Bata	1 Dokumen	502,390	Kecamatan Lueng Bata	
7.01.03.7.04.04	Pelantikan Imeum Mukim	Jumlah Laporan Pelantikan Imeum Mukim				1 Laporan	4,348,408	Kota Banda Aceh, Lueng Bata, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kemukiman Kecamatan Lueng Bata	1 Laporan	4,348,408	Kecamatan Lueng Bata	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %		0 %	100 %	297,364					100 %	2,297,364		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %		0 %	100 %	297,364					100 %	2,297,364		
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	297,364		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Gampong di Kecamatan Lueng Bata	2 Laporan	2,297,364	Kecamatan Lueng Bata	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %		0 %	100 %	630,000						100 %	630,000	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %		0 %	100 %	630,000						100 %	630,000	
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				2 Dokumen	630,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		FORKOPIMKA di Kecamatan Lueng Bata	2 Dokumen	630,000	Kecamatan Lueng Bata
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %		0 %	100 %	18,856,052						100 %	66,856,052	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %		0 %	100 %	18,856,052						100 %	66,856,052	
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				2 Dokumen	297,364	Kota Banda Aceh, Lueng Bata, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Gampong di Kecamatan Lueng Bata	2 Dokumen	3,297,364	Kecamatan Lueng Bata
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				18 Dokumen	7,730,922	Kota Banda Aceh, Lueng Bata, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Gampong di Kecamatan Lueng Bata	18 Dokumen	12,730,922	Kecamatan Lueng Bata
7 01 06 2.01 06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				9 Dokumen	743,422		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Gampong di Kecamatan Lueng Bata	9 Dokumen	32,743,422	Kecamatan Lueng Bata
7 01 06 2.01 07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				9 Dokumen	743,422	Kota Banda Aceh, Lueng Bata, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Gampong di Kecamatan Lueng Bata	9 Dokumen	2,743,422	Kecamatan Lueng Bata
7 01 06 2.01 08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				9 Dokumen	630,922	Kota Banda Aceh, Lueng Bata, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Gampong di Kecamatan Lueng Bata	9 Dokumen	1,630,922	Kecamatan Lueng Bata
7 01 06 2.01 11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				12 Dokumen	8,710,000	Kota Banda Aceh, Lueng Bata, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Gampong di Kecamatan Lueng Bata	12 Dokumen	13,710,000	Kecamatan Lueng Bata

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
9	UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN														
9 01	KEKHUSUSAN ACEH														
9 01 02	PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH	Indeks Kota Syariah (IKS)	82,77 %		0 %	78,27 %	7,800,000						78,27 %	7,800,000	
9 01 02 7.02	Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Alquran	Persentase Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Alquran	100 %		0 %	100 %	7,800,000						100 %	7,800,000	
9 01 02 7.02 04	Pelaksanaan MTQ	Jumlah Orang yang Mengikuti MTQ				54 Orang	7,800,000	Kota Banda Aceh, Lueng Bata, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat di Kecamatan Lueng Bata	54 Orang	7,800,000	Kecamatan Lueng Bata
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN														
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat daerah	100 %		0 %	100 %	3,126,956,681						100 %	3,126,956,681	
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	100 %		0 %	100 %	6,612,350						100 %	6,612,350	
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	6,612,350	Kota Banda Aceh, Ulee Kareng, Pango Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Dokumen perencanaan yang di susun	3 Dokumen	6,612,350	Kecamatan Ulee Kareng
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	2,974,922,685						100 %	2,974,922,685	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	2,707,622,685	Kota Banda Aceh, Ulee Kareng, Pango Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN dan Non ASN Kantor Camat Ulee Kareng	14 Orang/bulan	2,707,622,685	Kecamatan Ulee Kareng
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	267,300,000	Kota Banda Aceh, Ulee Kareng, Pango Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN dan Non ASN Kantor Camat Ulee Kareng	12 Dokumen	267,300,000	Kecamatan Ulee Kareng
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	16,500,000						100 %	16,500,000	
7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket pakaian dinas beserta Atribut kelengkapan				30 stell	16,500,000	Kota Banda Aceh, Ulee Kareng, Pango Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN dan Non ASN Kantor Camat Ulee Kareng	30 stell	16,500,000	Kecamatan Ulee Kareng

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	27,268,062						100 %	27,268,062	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Jenis	3,079,106	Kota Banda Aceh, Ulee Kareng, Pango Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN dan Non ASN Kantor Camat Ulee Kareng	12 Jenis	3,079,106	Kecamatan Ulee Kareng
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Bulan	4,188,956	Kota Banda Aceh, Ulee Kareng, Pango Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN dan Non ASN Kantor Camat Ulee Kareng	12 Bulan	4,188,956	Kecamatan Ulee Kareng
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	20,000,000	Kota Banda Aceh, Ulee Kareng, Pango Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN dan Non ASN Kantor Camat Ulee Kareng	5 Laporan	20,000,000	Kecamatan Ulee Kareng
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %		0 %	100 %	255,000						100 %	255,000	
7 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	100,000	Kota Banda Aceh, Ulee Kareng, Pango Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Camat Ulee Kareng	1 Unit	100,000	Kecamatan Ulee Kareng
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	50,000	Kota Banda Aceh, Ulee Kareng, Pango Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Camat Ulee Kareng	2 Unit	50,000	Kecamatan Ulee Kareng
7 01 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	25,000	Kota Banda Aceh, Ulee Kareng, Pango Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Camat Ulee Kareng	1 Unit	25,000	Kecamatan Ulee Kareng
7 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	80,000	Kota Banda Aceh, Ulee Kareng, Pango Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Camat Ulee Kareng	2 Unit	80,000	Kecamatan Ulee Kareng
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		0 %	100 %	78,135,349						100 %	78,135,349	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	48,006,000	Kota Banda Aceh, Ulee Kareng, Pango Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Camat Ulee Kareng	12 Laporan	48,006,000	Kecamatan Ulee Kareng
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	30,129,349	Kota Banda Aceh, Ulee Kareng, Pango Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Camat Ulee Kareng	12 Laporan	30,129,349	Kecamatan Ulee Kareng

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		0 %	100 %	23,263,235						100 %	23,263,235	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Bulan	20,236,000	Kota Banda Aceh, Ulee Kareng, Pango Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sarana dan Prasarana Kantor Camat Ulee Kareng	12 Bulan	20,236,000	Kecamatan Ulee Kareng
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	2,877,235	Kota Banda Aceh, Ulee Kareng, Pango Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sarana dan Prasarana Kantor Camat Ulee Kareng	5 Unit	2,877,235	Kecamatan Ulee Kareng
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	150,000	Kota Banda Aceh, Ulee Kareng, Pango Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sarana dan Prasarana Kantor Camat Ulee Kareng	1 Unit	150,000	Kecamatan Ulee Kareng
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	100 %		0 %	100 %	25,936,735						100 %	25,936,735	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan	100 %		0 %	100 %	21,780,000						100 %	21,780,000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	21,780,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Muspika dan Masyarakat di Kecamatan Ulee Kareng	2 Dokumen	21,780,000	Kecamatan Ulee Kareng
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100 %		0 %	100 %	550,000						100 %	550,000	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				1 Dokumen	550,000	Kota Banda Aceh, Ulee Kareng, Pango Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat di Kecamatan Ulee Kareng	1 Dokumen	550,000	Kecamatan Ulee Kareng
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %		0 %	100 %	3,606,735						100 %	3,606,735	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				1 Dokumen	525,000	Kota Banda Aceh, Ulee Kareng, Pango Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat di Kecamatan Ulee Kareng	1 Dokumen	525,000	Kecamatan Ulee Kareng
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				2 Laporan	3,081,735	Kota Banda Aceh, Ulee Kareng, Pango Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat di Kecamatan Ulee Kareng	2 Laporan	3,081,735	Kecamatan Ulee Kareng
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100 %		0 %	100 %	14,512,550						100 %	14,512,550	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	100 %		0 %	100 %	10,897,550						100 %	10,897,550	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						4,077,500	Kota Banda Aceh, Ulee Kareng, Pango Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat di Kecamatan Ulee Kareng		4,077,500	Kecamatan Ulee Kareng
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	6,820,050	Kota Banda Aceh, Ulee Kareng, Pango Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat di Kecamatan Ulee Kareng	2 Laporan	6,820,050	Kecamatan Ulee Kareng
7 01 03 2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Persentase dan sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	100 %		0 %	100 %	550,000						100 %	550,000	
7 01 03 2.05 02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				30 Dokumen	550,000	Kota Banda Aceh, Ulee Kareng, Pango Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Masyarakat di Kecamatan Ulee Kareng	30 Dokumen	550,000	Kecamatan Ulee Kareng
7 01 03 2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100 %		0 %	100 %	25,000						100 %	25,000	
7 01 03 2.06 03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				20 Keluarga	25,000	Kota Banda Aceh, Ulee Kareng, Pango Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Masyarakat di Kecamatan Ulee Kareng	20 Keluarga	25,000	Kecamatan Ulee Kareng
7 01 03 7.04	Pemberdayaan Mukim	Persentase pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan mukim	100 %		0 %	100 %	3,040,000						100 %	3,040,000	
7 01 03 7.04 01	Penyelenggaraan Mukim	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Mukim				2 Dokumen	1,500,000	Kota Banda Aceh, Ulee Kareng, Pango Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat di Kecamatan Ulee Kareng	2 Dokumen	1,500,000	Kecamatan Ulee Kareng

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 7.04 04	Pelantikan Imeum Mukim	Jumlah Laporan Pelantikan Imeum Mukim				2 Laporan	1,540,000	Kota Banda Aceh, Ulee Kareng, Pango Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat di Kecamatan Ulee Kareng	2 Laporan	1,540,000	Kecamatan Ulee Kareng
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %		0 %	100 %	2,950						100 %	2,950	
7 01 04 7.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban Umum	%		%	100 %	2,950						100 %	2,950	
7 01 04 7.03 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	2,950	Kota Banda Aceh, Ulee Kareng, Pango Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Muspika dan Masyarakat di Kecamatan Ulee Kareng	3 Laporan	2,950	Kecamatan Ulee Kareng
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %		0 %	100 %	250,000						100 %	250,000	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %		0 %	100 %	250,000						100 %	250,000	
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	250,000	Kota Banda Aceh, Ulee Kareng, Pango Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Muspika dan Masyarakat di Kecamatan Ulee Kareng	1 Dokumen	250,000	Kecamatan Ulee Kareng
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %		0 %	100 %	7,920,500						100 %	7,920,500	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi rekomendasi dan koordiasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan gampong di kecamatan ulee kareng	100 %		0 %	100 %	7,920,500						100 %	7,920,500	
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	250,000	Kota Banda Aceh, Ulee Kareng, Pango Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat di Kecamatan Ulee Kareng	1 Dokumen	250,000	Kecamatan Ulee Kareng

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				3 Dokumen	4,395,000	Kota Banda Aceh, Ulee Kareng, Pango Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat di Kecamatan Ulee Kareng	3 Dokumen	4,395,000	Kecamatan Ulee Kareng
7 01 06 2.01 06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				10 Dokumen	295,000	Kota Banda Aceh, Ulee Kareng, Pango Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat di Kecamatan Ulee Kareng	10 Dokumen	295,000	Kecamatan Ulee Kareng
7 01 06 2.01 07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				1 Dokumen	500	Kota Banda Aceh, Ulee Kareng, Pango Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat di Kecamatan Ulee Kareng	1 Dokumen	500	Kecamatan Ulee Kareng
7 01 06 2.01 08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				5 Dokumen	430,000	Kota Banda Aceh, Ulee Kareng, Pango Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat di Kecamatan Ulee Kareng	5 Dokumen	430,000	Kecamatan Ulee Kareng
7 01 06 2.01 11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				40 Kali	2,550,000	Kota Banda Aceh, Ulee Kareng, Pango Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat di Kecamatan Ulee Kareng	40 Kali	2,550,000	Kecamatan Ulee Kareng
9	UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN														
9 01	KEKHUSUSAN ACEH						417,250							417,250	
9 01 02	PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH	Indeks Kota Syariah (IKS)	82,77 %		0 %	78,27 %	417,250						78,27 %	417,250	
9 01 02 7.02	Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Alquran	Indeks Kota Syariah (IKS)	%		%	78,27 %	417,250						78,27 %	417,250	
9 01 02 7.02 04	Pelaksanaan MTQ	Jumlah Orang yang Mengikuti MTQ				45 Orang	417,250	Kota Banda Aceh, Ulee Kareng, Pango Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat di Kecamatan Ulee Kareng	45 Orang	417,250	Kecamatan Ulee Kareng
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						3,183,587,205							3,609,587,205	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat daerah	100 %		0 %	100 %	3,099,589,073						100 %	3,458,448,509	
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kecamatan Kuta Alam yang Tersusun	100 %		0 %	100 %	4,323,160						100 %	4,323,160	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4,323,160	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Kantor Camat Kuta Alam	4 Dokumen	4,323,160	Kecamatan Kuta Alam
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan	100 %		0 %	100 %	2,882,909,090						100 %	3,233,909,090	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21 Orang/bulan	2,663,609,090	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Pegawai Kantor Camat Kuta Alam	21 Orang/bulan	3,014,609,090	Kecamatan Kuta Alam
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah waktu penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi pelaksanaan tugas ASN				12 Bulan	219,300,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Pegawai Kantor Camat Kuta Alam	12 Bulan	219,300,000	Kecamatan Kuta Alam
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	17,700,000						100 %	17,700,000	
7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				30 Paket	17,700,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Pegawai Kantor Camat Kuta Alam	30 Paket	17,700,000	Kecamatan Kuta Alam
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Administrasi Umum	100 %		0 %	100 %	23,397,245						100 %	31,256,681	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	886,179	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Kantor Camat Kuta Alam	5 Paket	886,179	Kecamatan Kuta Alam
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	2,410,798	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Kantor Camat Kuta Alam	4 Paket	2,410,798	Kecamatan Kuta Alam
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	20,100,268	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Kantor Camat Kuta Alam	2 Laporan	27,959,704	Kecamatan Kuta Alam
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %		0 %	100 %	26,217,000						100 %	26,217,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	26,217,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Kantor Camat Kuta Alam	8 Unit	26,217,000	Kecamatan Kuta Alam
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		0 %	100 %	100,646,578						100 %	100,646,578	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan				12 Bulan	74,880,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Camat Kuta Alam	12 Bulan	74,880,000	Kecamatan Kuta Alam
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan				12 Bulan	25,766,578	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Camat Kuta Alam	12 Bulan	25,766,578	Kecamatan Kuta Alam
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		0 %	100 %	44,396,000						100 %	44,396,000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	20,936,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Kantor Camat Kuta Alam	2 Unit	20,936,000	Kecamatan Kuta Alam
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	2,758,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Kantor Camat Kuta Alam	5 Unit	2,758,000	Kecamatan Kuta Alam
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	20,702,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Kantor Camat Kuta Alam	1 Unit	20,702,000	Kecamatan Kuta Alam
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	100 %		0 %	100 %	39,397,582						100 %	48,397,582	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	100 %		0 %	100 %	24,358,232						100 %	33,358,232	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	24,358,232	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Bandar Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat di Gampong	2 Dokumen	33,358,232	Kecamatan Kuta Alam
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	100 %		0 %	100 %	3,000,000						100 %	2,500,000	
7 01 02 2.02 01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				1 Dokumen	3,000,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat di Gampong	1 Dokumen	2,500,000	Kecamatan Kuta Alam
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang di Limpahkan Kepada Camat	100 %		0 %	100 %	12,039,350						100 %	12,539,350	
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				0 Dokumen 1 Laporan	2,000,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Masyarakat di Gampong	0 Dokumen 1 Laporan	2,500,000	Kecamatan Kuta Alam
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				3 Laporan	10,039,350	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Masyarakat di Gampong	3 Laporan	10,039,350	Kecamatan Kuta Alam
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100 %		0 %	100 %	25,229,613						100 %	35,989,257	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 %		0 %	100 %	17,561,057						100 %	24,761,057	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa				2 Lembaga	2,141,500	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan		11 Gampong di Kecamatan Kuta Alam	2 Lembaga	2,141,500	Kecamatan Kuta Alam
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	15,419,557	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan		11 Gampong di Kecamatan Kuta Alam	1 Laporan	22,619,557	Kecamatan Kuta Alam

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	100 %		0 %	100 %	1,928,200						100 %	8,428,200	
7 01 03 2.05 02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	1,928,200	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Masyarakat di Gampong	1 Dokumen	8,428,200	Kecamatan Kuta Alam
7 01 03 2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	100 %		0 %	100 %	1,000,000						100 %	2,800,000	
7 01 03 2.06 03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				2 Keluarga	1,000,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		11 Gampong di Kecamatan Kuta Alam	2 Keluarga	2,800,000	Kecamatan Kuta Alam
7 01 03 7.04	Pemberdayaan Mukim	Persentase Pemberdayaan Mukim	100 %		0 %	100 %	4,740,356						100 %	0	
7 01 03 7.04 01	Penyelenggaraan Mukim	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Mukim				1 Dokumen	1,586,276	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		11 Gampong di Kecamatan Kuta Alam	1 Dokumen	0	Kecamatan Kuta Alam
7 01 03 7.04 04	Pelantikan Imeum Mukim	Jumlah Laporan Pelantikan Imeum Mukim				1 Laporan	3,154,080	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		11 Gampong di Kecamatan Kuta Alam	1 Laporan	0	Kecamatan Kuta Alam
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %		0 %	100 %	1,000,000						100 %	2,000,000	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %		0 %	100 %	1,000,000						100 %	2,000,000	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1,000,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Masyarakat di Gampong	1 Laporan	2,000,000	Kecamatan Kuta Alam
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %		0 %	100 %	1,000,000						100 %	1,900,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %		0 %	100 %	1,000,000						100 %	1,900,000	
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1,000,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat di Gampong	1 Dokumen	1,900,000	Kecamatan Kuta Alam
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %		0 %	100 %	17,370,937						100 %	62,851,857	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %		0 %	100 %	17,370,937						100 %	62,851,857	
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				2 Dokumen	5,775,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			11 Gampong di Kecamatan Kuta Alam	2 Dokumen	10,325,220	Kecamatan Kuta Alam
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				3 Dokumen	4,076,857	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			11 Gampong di Kecamatan Kuta Alam	3 Dokumen	20,697,254	Kecamatan Kuta Alam
7 01 06 2.01 06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				1 Dokumen	3,019,080	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			11 Gampong di Kecamatan Kuta Alam	1 Dokumen	0	Kecamatan Kuta Alam
7 01 06 2.01 07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				1 Dokumen	1,000,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			11 Gampong di Kecamatan Kuta Alam	1 Dokumen	8,221,150	Kecamatan Kuta Alam
7 01 06 2.01 08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				1 Dokumen	500,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			11 Gampong di Kecamatan Kuta Alam	1 Dokumen	7,103,246	Kecamatan Kuta Alam
7 01 06 2.01 11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Dokumen	3,000,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			11 Gampong di Kecamatan Kuta Alam	1 Dokumen	16,504,987	Kecamatan Kuta Alam
9	UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN														
9 01	KEKHUSUSAN ACEH							3,000,000						1,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
9 01 02	PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH	Indeks Kota Syariah (IKS)	82,77 %		0 %	78,27 %	3,000,000						78,27 %	1,000,000	
9 01 02 7.02	Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Alquran	Persentase Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Alquran	82,77 %		0 %	78,27 %	3,000,000						78,27 %	1,000,000	
9 01 02 7.02 04	Pelaksanaan MTQ	Jumlah Orang yang Mengikuti MTQ				45 Orang	3,000,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		11 Gampong di Kecamatan Kuta Alam	45 Orang	1,000,000	Kecamatan Kuta Alam
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						2,897,150,997							3,284,740,997	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat daerah	100 %		0 %	100 %	2,853,245,307						100 %	3,145,405,128	
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	100 %		0 %	100 %	9,607,909						100 %	9,607,909	
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	9,607,909	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Dokumen perencanaan yang disusun	2 Dokumen	9,607,909	Kecamatan Syiah Kuala
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %		0 %	100 %	2,599,019,457						100 %	2,912,574,457	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/bulan	2,373,839,457	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN dan Non ASN Kantor Camat Syiah Kuala	15 Orang/bulan	2,687,394,457	Kecamatan Syiah Kuala
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	225,180,000	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN dan Non ASN Kantor Camat Syiah Kuala	12 Dokumen	225,180,000	Kecamatan Syiah Kuala
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentasde pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %		0 %	100 %	13,750,000						100 %	13,750,000	
7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				23 Paket	13,750,000	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Lamgugob	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN dan Non ASN Kantor Camat Syiah Kuala	23 Paket	13,750,000	Kecamatan Syiah Kuala
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 %		0 %	100 %	61,164,592						100 %	36,732,845	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	919,221	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN dan Kantor Camat Syiah Kuala	3 Paket	919,221	Kecamatan Syiah Kuala
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	10,813,624	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN dan Kantor Camat Syiah Kuala	4 Paket	10,813,624	Kecamatan Syiah Kuala
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	49,431,747	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN dan Kantor Camat Syiah Kuala	2 Laporan	25,000,000	Kecamatan Syiah Kuala
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %		0 %	100 %	7,434,000						100 %	23,706,716	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	7,434,000	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Camat Syiah Kuala	3 Unit	23,706,716	Kecamatan Syiah Kuala
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %		0 %	100 %	127,175,376						100 %	109,939,228	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	81,103,300	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Camat Syiah Kuala	12 Laporan	63,867,152	Kecamatan Syiah Kuala
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	46,072,076	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Camat Syiah Kuala	12 Laporan	46,072,076	Kecamatan Syiah Kuala
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %		0 %	100 %	35,093,973						100 %	39,093,973	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	26,418,600	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sarana dan Prasarana Kantor Camat Syiah Kuala	3 Unit	26,418,600	Kecamatan Syiah Kuala
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	8,675,373	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sarana dan Prasarana Kantor Camat Syiah Kuala	20 Unit	8,675,373	Kecamatan Syiah Kuala

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100 %		0 %	100 %	18,971,202						100 %	35,452,792	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100 %		0 %	100 %	18,570,000						100 %	18,570,000	
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokumen	18,570,000	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Muspika dan masyarakat di Kecamatan Syiah Kuala	12 Dokumen	18,570,000	Kecamatan Syiah Kuala
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100 %		0 %	100 %	401,202						100 %	15,882,792	
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				1 Laporan	169,920	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat di Kecamatan Syiah Kuala	1 Laporan	1,180,228	Kecamatan Syiah Kuala
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				4 Laporan	231,282	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat di Kecamatan Syiah Kuala	4 Laporan	14,702,564	Kecamatan Syiah Kuala
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100 %		0 %	100 %	20,261,080						100 %	64,383,077	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	100 %		0 %	100 %	19,732,430						100 %	30,351,348	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa				10 lembaga	4,695,349	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Masyarakat dalam wilayah Kecamatan Syiah Kuala	10 lembaga	4,695,349	Kecamatan Syiah Kuala
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	15,037,081	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Masyarakat dalam wilayah Kecamatan Syiah Kuala	2 Laporan	25,655,999	Kecamatan Syiah Kuala
7 01 03 2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Perentase Koordinasi dan sinkronisasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM)	100 %		0 %	100 %	147,000						100 %	25,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.05 02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	147,000	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Masyarakat di wilayah Kecamatan Syiah Kuala	1 Dokumen	25,000,000	Kecamatan Syiah Kuala	
7 01 03 2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga	100 %		0 %	100 %	228,990					100 %	5,031,729		
7 01 03 2.06 03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				20 Keluarga	228,990	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Masyarakat di wilayah Kecamatan Syiah Kuala	20 Keluarga	5,031,729	Kecamatan Syiah Kuala	
7 01 03 7.04	Pemberdayaan Mukim	Persentase pemberdayaan mukim	100 %		0 %	100 %	152,660					100 %	4,000,000		
7 01 03 7.04 01	Penyelenggaraan Mukim	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Mukim				1 Dokumen	76,330	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Mukim dan Masyarakat di Kecamatan syiah Kuala	1 Dokumen	4,000,000	Kecamatan Syiah Kuala	
7 01 03 7.04 04	Pelantikan Imeum Mukim	Jumlah Laporan Pelantikan Imeum Mukim				1 Laporan	76,330	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Mukim dan Masyarakat di Kecamatan syiah Kuala	1 Laporan	0	Kecamatan Syiah Kuala	
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100 %		0 %	100 %	35,000					100 %	1,000,000		
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	100 %		0 %	100 %	35,000					100 %	1,000,000		
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				6 Dokumen	35,000	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Muspika Kecamatan Syiah Kuala	6 Dokumen	1,000,000	Kecamatan Syiah Kuala	
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %		0 %	100 %	4,638,408					100 %	37,500,000		
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan desa	100 %		0 %	100 %	4,638,408					100 %	37,500,000		
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				3 Dokumen	228,990	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Masyarakat di wilayah Kecamatan syiah Kuala	3 Dokumen	6,011,729	Kecamatan Syiah Kuala	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen	315,000	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat di wilayah Kecamatan syiah Kuala	1 Dokumen	22,155,000	Kecamatan Syiah Kuala	
7 01 06 2.01 06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				1 Dokumen	58,558	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat di wilayah Kecamatan syiah Kuala	1 Dokumen	5,195,707	Kecamatan Syiah Kuala	
7 01 06 2.01 07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				1 Dokumen	70,000	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat di wilayah Kecamatan syiah Kuala	1 Dokumen	0	Kecamatan Syiah Kuala	
7 01 06 2.01 08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				1 Dokumen	130,390	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat di wilayah Kecamatan syiah Kuala	1 Dokumen	0	Kecamatan Syiah Kuala	
7 01 06 2.01 11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Dokumen	3,835,470	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat di wilayah Kecamatan syiah Kuala	1 Dokumen	4,137,564	Kecamatan Syiah Kuala	
9	UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN															
9 01	KEKHUSUSAN ACEH						35,000							1,000,000		
9 01 02	PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH	Indeks Kota Syariah (IKS)	82,77 %		0 %	78,27 %	35,000							78,27 %	1,000,000	
9 01 02 7.02	Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Alquran	Persentase Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Al Quran	100 %		0 %	100 %	35,000							100 %	1,000,000	
9 01 02 7.02 04	Pelaksanaan MTQ	Jumlah Orang yang Mengikuti MTQ				40 Orang	35,000	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat di Kecamatan syiah Kuala	40 Orang	1,000,000	Kecamatan Syiah Kuala	
7	UNSUR KEWILAYAHAN															
7 01	KECAMATAN						2,514,789,234							2,712,175,593		
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat daerah	100 %		0 %	100 %	2,370,133,300							100 %	2,593,376,186	
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	100 %		0 %	100 %	5,100,135							100 %	1,193,156	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	5,100,135	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	2 Dokumen	1,193,156	Kecamatan Kuta Raja
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	2,206,087,694						100 %	2,433,347,694	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	1,996,507,694	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		PNS dan Tenaga Kontrak di Kecamatan Kuta Raja	20 Orang/bulan	2,271,767,694	Kecamatan Kuta Raja
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	209,580,000	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		PNS dan Tenaga Kontrak di Kecamatan Kuta Raja	12 Dokumen	161,580,000	Kecamatan Kuta Raja
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	9,900,000						100 %	9,900,000	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				18 Paket	9,900,000	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			PNS dan Tenaga Kontrak di Kecamatan Kuta Raja	18 Paket	9,900,000	Kecamatan Kuta Raja
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	25,498,722						100 %	25,498,722	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	2,708,879	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Keudah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai, Saran dan Prasarana Kantor Kecamatan Kuta Raja	3 Paket	2,708,879	Kecamatan Kuta Raja
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	2,789,843	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Keudah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai, Saran dan Prasarana Kantor Kecamatan Kuta Raja	4 Paket	2,789,843	Kecamatan Kuta Raja
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai, Saran dan Prasarana Kantor Kecamatan Kuta Raja	2 Laporan	20,000,000	Kecamatan Kuta Raja
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%		%	100 %	4,444,667						100 %	4,444,667	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	4,444,667	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Keudah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 Unit	4,444,667	Kecamatan Kuta Raja
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		0 %	100 %	74,125,479						100 %	74,125,267	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	43,916,993	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Keudah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemeliharaan Kendaraan dan Peralatan Kantor di Kecamatan Kuta Raja	12 Laporan	43,916,993	Kecamatan Kuta Raja
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	30,208,486	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemeliharaan Kendaraan dan Peralatan Kantor di Kecamatan Kuta Raja	12 Laporan	30,208,274	Kecamatan Kuta Raja
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		0 %	100 %	44,976,603						100 %	44,866,680	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	17,065,000	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Keudah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Kantor Camat Kuta Raja	1 Unit	17,065,000	Kecamatan Kuta Raja
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	3,445,603	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Keudah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Kantor Camat Kuta Raja	20 Unit	3,445,603	Kecamatan Kuta Raja
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	24,466,000	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Keudah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Kantor Camat Kuta Raja	1 Unit	24,356,077	Kecamatan Kuta Raja
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	100 %		0 %	100 %	30,150,000						100 %	21,250,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %		0 %	100 %	19,000,000						100 %	17,600,000	
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokumen	19,000,000	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat di Kecamatan Kuta Raja	12 Dokumen	17,600,000	Kecamatan Kuta Raja
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100 %		0 %	100 %	7,750,000						100 %	0	
7 01 02 2.02 01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				12 Dokumen	7,750,000	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Masyarakat di Kecamatan Kuta Raja	12 Dokumen	0	Kecamatan Kuta Raja
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %		0 %	100 %	3,400,000						100 %	3,650,000	
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				1 Laporan	700,000	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat di Kecamatan Kuta Raja	1 Laporan	950,000	Kecamatan Kuta Raja
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				4 Laporan	2,700,000	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat di Kecamatan Kuta Raja	4 Laporan	2,700,000	Kecamatan Kuta Raja
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100 %		0 %	100 %	53,076,016						100 %	42,252,829	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 %		0 %	100 %	35,832,829						100 %	32,827,829	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				6 Lembaga	5,827,829	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Masyarakat di Kecamatan Kuta Raja	6 Lembaga	5,827,829	Kecamatan Kuta Raja
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	30,005,000	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Masyarakat di Kecamatan Kuta Raja	2 Laporan	27,000,000	Kecamatan Kuta Raja

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	100 %		0 %	100 %	14,720,000						100 %	9,425,000	
7 01 03 2.05 03	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	14,720,000	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Gampong di Kecamatan Kuta Raja	1 Dokumen	9,425,000	Kecamatan Kuta Raja
7 01 03 2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	100 %		0 %	100 %	1,203,000						100 %	0	
7 01 03 2.06 03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				20 Keluarga	1,203,000	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat di Kecamatan Kuta Raja	20 Keluarga	0	Kecamatan Kuta Raja
7 01 03 7.04	Pemberdayaan Mukim	Persentase Pemberdayaan Mukim	100 %		0 %	100 %	1,320,187						100 %	0	
7 01 03 7.04 01	Penyelenggaraan Mukim	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Mukim				1 Dokumen	344,687	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Tokoh Masyarakat / Imum Mukim di Kecamatan Kuta Raja	1 Dokumen	0	Kecamatan Kuta Raja
7 01 03 7.04 04	Pelantikan Imeum Mukim	Jumlah Laporan Pelantikan Imeum Mukim				1 Laporan	975,500	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Keudah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Tokoh Masyarakat / Imum Mukim di Kecamatan Kuta Raja	1 Laporan	0	Kecamatan Kuta Raja
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %		0 %	100 %	61,429,918						100 %	50,896,578	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %		0 %	100 %	61,429,918						100 %	50,896,578	
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				3 Dokumen	8,830,000	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat di Kecamatan Kuta Raja	3 Dokumen	8,450,000	Kecamatan Kuta Raja
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				3 Dokumen	15,383,188	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat di Kecamatan Kuta Raja	3 Dokumen	7,550,000	Kecamatan Kuta Raja
7 01 06 2.01 06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				1 Dokumen	9,326,730	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat di Kecamatan Kuta Raja	1 Dokumen	4,500,000	Kecamatan Kuta Raja

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 06 2.01 11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Dokumen	27,890,000	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat di Kecamatan Kuta Raja	1 Dokumen	21,000,000	Kecamatan Kuta Raja
9	UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN														
9 01	KEKHUSUSAN ACEH						1,215,000							50,000,000	
9 01 02	PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH	Indeks Kota Syariah (IKS) Indeks Kota Syariah (IKS)	82,77 % %		0 % %	78,27 % 78.27 %	1,215,000						78,27 % 78.27 %	50,000,000	
9 01 02 7.02	Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Alquran	Persentase Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Alquran	%		%	78.27 %	1,215,000						78.27 %	50,000,000	
9 01 02 7.02 04	Pelaksanaan MTQ	Jumlah Orang yang Mengikuti MTQ				42 Orang	1,215,000	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat di Kecamatan Kuta Raja	42 Orang	50,000,000	Kecamatan Kuta Raja
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						2,725,952,801							3,036,886,071	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat daerah	100 %		0 %	100 %	2,578,961,101						100 %	2,869,625,221	
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kecamatan yang tersusun	100 %		0 %	100 %	5,437,769						100 %	4,437,769	
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	5,437,769	Kota Banda Aceh, Meuraxa, Gampong Pie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Camat Meuraxa	4 Dokumen	4,437,769	Kecamatan Meuraxa
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	100 %		0 %	100 %	2,393,656,261						100 %	2,693,152,461	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	2,198,356,261	Kota Banda Aceh, Meuraxa, Gampong Pie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai Kantor Camat Meuraxa	12 Orang/bulan	2,497,852,461	Kecamatan Meuraxa
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	195,300,000	Kota Banda Aceh, Meuraxa, Gampong Pie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai Kantor Camat Meuraxa	12 Dokumen	195,300,000	Kecamatan Meuraxa
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	18,000,000						100 %	18,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				26 Paket	18,000,000	Kota Banda Aceh, Meuraxa, Gampong Pie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai dan Non PNS Kantor Camat Meuraxa	26 Paket	18,000,000	Kecamatan Meuraxa
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi umum	100 %		0 %	100 %	33,022,162						100 %	21,822,082	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	1,467,130	Kota Banda Aceh, Meuraxa, Gampong Pie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Camat Meuraxa	4 Paket	1,467,130	Kecamatan Meuraxa
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	7,078,256	Kota Banda Aceh, Meuraxa, Gampong Pie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Camat Meuraxa	4 Paket	7,078,256	Kecamatan Meuraxa
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	24,476,776	Kota Banda Aceh, Meuraxa, Gampong Pie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Camat Meuraxa	2 Laporan	13,276,696	Kecamatan Meuraxa
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %		0 %	100 %	3,422,000						100 %	5,000,000	
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	3,422,000	Kota Banda Aceh, Meuraxa, Gampong Pie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Peralatan Operasional Kantor Camat Meuraxa	6 Unit	5,000,000	Kecamatan Meuraxa
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		0 %	100 %	98,811,204						100 %	98,351,204	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	56,460,000	Kota Banda Aceh, Meuraxa, Gampong Pie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Camat Meuraxa	12 Laporan	56,000,000	Kecamatan Meuraxa
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	42,351,204	Kota Banda Aceh, Meuraxa, Gampong Pie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Camat Meuraxa	12 Laporan	42,351,204	Kecamatan Meuraxa
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		0 %	100 %	26,611,705						100 %	28,861,705	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	19,750,000	Kota Banda Aceh, Meuraxa, Gampong Pie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Camat Meuraxa	3 Unit	19,000,000	Kecamatan Meuraxa
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	6,861,705	Kota Banda Aceh, Meuraxa, Gampong Pie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Camat Meuraxa	15 Unit	6,861,705	Kecamatan Meuraxa
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	100 %		0 %	100 %	56,744,800						100 %	63,544,800	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan	100 %		0 %	100 %	23,920,000						100 %	23,670,000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	23,920,000	Kota Banda Aceh, Meuraxa, Gampong Pie	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			MUSPIKA dan Masyarakat di Kecamatan Meuraxa	2 Dokumen	23,670,000	Kecamatan Meuraxa
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelaksanaan koordinasi urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	1 %		0 %	100 %	32,824,800						100 %	39,374,800	
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				1 Dokumen	10,000,000	Kota Banda Aceh, Meuraxa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat di Kecamatan Meuraxa	1 Dokumen	3,500,000	Kecamatan Meuraxa
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				1 Laporan	5,000,000	Kota Banda Aceh, Meuraxa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat di Kecamatan Meuraxa	1 Laporan	2,500,000	Kecamatan Meuraxa
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				3 Laporan	17,824,800	Kota Banda Aceh, Meuraxa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat di Kecamatan Meuraxa	3 Laporan	33,374,800	Kecamatan Meuraxa
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100 %		0 %	100 %	27,203,550						100 %	32,203,550	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase pelaksanaan pemberdayaan masyarakat	100 %		0 %	100 %	27,203,550						100 %	27,203,550	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				16 Lembaga	8,488,550	Kota Banda Aceh, Meuraxa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat di Kecamatan Meuraxa	16 Lembaga	8,488,550	Kecamatan Meuraxa
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	18,715,000	Kota Banda Aceh, Meuraxa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat di Kecamatan Meuraxa	2 Laporan	18,715,000	Kecamatan Meuraxa
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %		0 %	100 %	4,124,800						100 %	2,500,000	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %		0 %	100 %	1,624,800						100 %	500,000	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	812,400	Kota Banda Aceh, Meuraxa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat di Kecamatan Meuraxa	1 Laporan	250,000	Kecamatan Meuraxa
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	812,400	Kota Banda Aceh, Meuraxa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat di Kecamatan Meuraxa	1 Laporan	250,000	Kecamatan Meuraxa
7 01 04 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 %		0 %	100 %	2,500,000						100 %	500,000	
7 01 04 2.02 01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan	2,500,000	Kota Banda Aceh, Meuraxa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat di Kecamatan Meuraxa	1 Laporan	500,000	Kecamatan Meuraxa
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %		0 %	100 %	7,161,900						100 %	2,500,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %		0 %	100 %	7,161,900						100 %	2,500,000	
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				16 Orang	812,400	Kota Banda Aceh, Meuraxa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat di Kecamatan Meuraxa	16 Orang	500,000	Kecamatan Meuraxa
7 01 05 2.01 02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				16 Orang	812,400	Kota Banda Aceh, Meuraxa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat di Kecamatan Meuraxa	16 Orang	500,000	Kecamatan Meuraxa
7 01 05 2.01 03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				16 Orang	1,200,000	Kota Banda Aceh, Meuraxa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat di Kecamatan Meuraxa	16 Orang	250,000	Kecamatan Meuraxa
7 01 05 2.01 04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				16 Orang	812,400	Kota Banda Aceh, Meuraxa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat di Kecamatan Meuraxa	16 Orang	250,000	Kecamatan Meuraxa
7 01 05 2.01 05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				1 Laporan	1,087,500	Kota Banda Aceh, Meuraxa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat di Kecamatan Meuraxa	1 Laporan	250,000	Kecamatan Meuraxa
7 01 05 2.01 06	Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila				16 Lembaga Masyarakat	812,400	Kota Banda Aceh, Meuraxa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat di Kecamatan Meuraxa	16 Lembaga Masyarakat	250,000	Kecamatan Meuraxa

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 05 2.01 07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				1 Dokumen	812,400	Kota Banda Aceh, Meuraxa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat di Kecamatan Meuraxa	1 Dokumen	250,000	Kecamatan Meuraxa
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	812,400	Kota Banda Aceh, Meuraxa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat di Kecamatan Meuraxa	1 Dokumen	250,000	Kecamatan Meuraxa
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %		0 %	100 %	51,756,650						100 %	66,512,500	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 %		0 %	100 %	51,756,650						100 %	66,512,500	
7 01 06 2.01 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				1 Dokumen	4,499,900	Kota Banda Aceh, Meuraxa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat di Kecamatan Meuraxa	1 Dokumen	5,000,000	Kecamatan Meuraxa
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	4,500,000	Kota Banda Aceh, Meuraxa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat di Kecamatan Meuraxa	1 Dokumen	6,000,000	Kecamatan Meuraxa
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen	20,219,850	Kota Banda Aceh, Meuraxa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat di Kecamatan Meuraxa	1 Dokumen	23,000,000	Kecamatan Meuraxa
7 01 06 2.01 06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				4 Dokumen	4,499,900	Kota Banda Aceh, Meuraxa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat di Kecamatan Meuraxa	4 Dokumen	7,000,000	Kecamatan Meuraxa
7 01 06 2.01 07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				2 Dokumen	4,499,900	Kota Banda Aceh, Meuraxa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat di Kecamatan Meuraxa	2 Dokumen	7,000,000	Kecamatan Meuraxa
7 01 06 2.01 08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				2 Dokumen	4,499,900	Kota Banda Aceh, Meuraxa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat di Kecamatan Meuraxa	2 Dokumen	7,000,000	Kecamatan Meuraxa

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 06 2.01 11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				2 Dokumen	9,037,200	Kota Banda Aceh, Meuraxa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat di Kecamatan Meuraxa	2 Dokumen	11,512,500	Kecamatan Meuraxa
8		UNSUR PEMERINTAHAN UMUM													
8 01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					12,147,567,932							12,977,946,477	
8 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat daerah	100 %		0 %	100 %	4,713,792,794						100 %	5,239,791,866	
8 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	100 %		0 %	100 %	30,588,107						100 %	30,588,107	
8 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen 6 Dokumen	30,588,107	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Mulia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh	0 Dokumen 6 Dokumen	30,588,107	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	4,213,971,759						100 %	4,843,271,164	
8 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 bulan	3,996,471,759	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Mulia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh	12 bulan	4,625,771,164	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	217,500,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Mulia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh	12 Dokumen	217,500,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	19,800,000						100 %	19,800,000	
8 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				36 Paket	19,800,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Mulia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh	36 Paket	19,800,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	195,527,228						100 %	119,081,895	
8 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	1,563,599	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Mulia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh	10 Paket	1,563,599	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	94,300,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Mulia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh	5 Paket	17,854,667	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	14,663,629	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Mulia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh	10 Paket	14,663,629	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	85,000,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Mulia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh	20 Laporan	85,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		0 %	100 %	89,529,350						100 %	87,674,350	
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	53,725,800	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Mulia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12 Laporan	53,725,800	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	35,803,550	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Mulia				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12 Laporan	33,948,550	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		0 %	100 %	164,376,350						100 %	139,376,350	
8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	7,844,350	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Mulia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh	3 Unit	7,844,350	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	6,532,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Mulia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh	2 Unit	6,532,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	150,000,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Mulia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh	1 Unit	125,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.02	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Peningkatan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	85 %		0 %	85 %	103,232,930						85 %	90,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
8 01 02 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemanjapan pelaksanaan bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	85 %		0 %	85 %	103,232,930						85 %	90,000,000	
8 01 02 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pambauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pambauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				100 Orang	68,028,390	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Mulia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Masyarakat	100 Orang	74,500,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8 01 02 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pambauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pambauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				100 Orang	35,204,540	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Mulia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Masyarakat	100 Orang	15,500,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8 01 03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Pelaksanaan Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	90 %		0 %	90 %	5,483,745,260						90 %	6,153,154,611	
8 01 03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Pelaksanaan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.	90 %		0 %	90 %	5,483,745,260						90 %	6,153,154,611	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				100 Orang	5,360,834,260	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Mulia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Partai Politik	100 Orang	5,963,154,611	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				100 Orang	38,088,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Mulia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Partai Politik	100 Orang	95,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				2 Laporan	84,823,000	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Mulia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Partai Politik	2 Laporan	95,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	85 %		0 %	85 %	57,810,468						85 %	65,000,000	
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	85 %		0 %	85 %	57,810,468						85 %	65,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				100 Orang	28,185,920	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Mulia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Organisasi Kemasyarakatan, LSM dan OKP	100 Orang	30,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				1 Laporan	29,624,548	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Organisasi Kemasyarakatan, LSM dan OKP	1 Laporan	35,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	85 %		0 %	85 %	667,989,680						85 %	350,000,000	
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	85 %		0 %	85 %	667,989,680						85 %	350,000,000	
8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				100 Orang	38,281,480	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Mulia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat	100 Orang	40,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				100 Orang	607,677,540	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Mulia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat	100 Orang	280,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
8 01 05 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				3 Laporan	22,030,660	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Mulia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat	3 Laporan	30,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	85 %		0 %	85 %	1,120,996,800						85 %	1,080,000,000	
8 01 06 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Pelaksanaan Kebijakan teknis dan Pelaksanaan Pemantauan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	85 %		0 %	85 %	1,120,996,800						85 %	1,080,000,000	
8 01 06 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				100 Orang	965,459,000	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat	100 Orang	900,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 06 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				100 Orang	47,095,800	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat	100 Orang	60,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				2 Laporan	38,746,000	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat	2 Laporan	55,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				2 Laporan	69,696,000	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat	2 Laporan	65,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9	UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN														
9.01	KEKHUSUSAN ACEH						18,766,804,278							13,638,212,692	
9.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat daerah	100 %		0 %	100 %	4,763,588,212						100 %	5,098,679,999	
9.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	100 %		0 %	100 %	58,265,000						100 %	36,815,000	
9.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	58,265,000	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Mibo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Dinas Syariat Islam	5 Dokumen	36,815,000	Dinas Syariat Islam
9.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	4,024,297,087						100 %	4,578,397,091	
9.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	3,787,717,087	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Mibo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Syariat Islam	30 Orang/bulan	4,341,817,091	Dinas Syariat Islam
9.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	236,580,000	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Mibo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Syariat Islam	12 Dokumen	236,580,000	Dinas Syariat Islam
9.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	20,570,000						100 %	20,570,000	
9.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	20,570,000	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Mibo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Syariat Islam	1 Paket	20,570,000	Dinas Syariat Islam

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
9 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	249,623,495						100 %	149,465,268	
9 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3,907,374	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Mibo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Syariat Islam	1 Paket	3,907,374	Dinas Syariat Islam
9 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	107,800,000	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Mibo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Syariat Islam	1 Paket	15,000,000	Dinas Syariat Islam
9 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	37,916,121	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Mibo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Syariat Islam	1 Paket	30,557,894	Dinas Syariat Islam
9 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6 Laporan	100,000,000	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Mibo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Syariat Islam	6 Laporan	100,000,000	Dinas Syariat Islam
9 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %		0 %	100 %	27,400,000						100 %	1,000,000	
9 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	27,400,000	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Mibo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Syariat Islam	3 Unit	1,000,000	Dinas Syariat Islam
9 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		0 %	100 %	249,062,522						100 %	227,062,532	
9 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	187,100,257	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Mibo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Syariat Islam	12 Laporan	165,100,267	Dinas Syariat Islam
9 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	61,962,265	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Mibo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Syariat Islam	12 Laporan	61,962,265	Dinas Syariat Islam
9 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		0 %	100 %	134,370,108						100 %	85,370,108	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
9 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	66,204,000	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Mibo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Syariat Islam	7 Unit	66,204,000	Dinas Syariat Islam
9 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	50,000,000	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Mibo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Syariat Islam	1 Unit	1,000,000	Dinas Syariat Islam
9 01 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				45 Unit	18,166,108	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Mibo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Syariat Islam	45 Unit	18,166,108	Dinas Syariat Islam
9 01 02	PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH	Indeks Kota Syariah (IKS)	82,77 Indeks		0 Indeks	78,27 Indeks	14,003,216,066						78,27 Indeks	8,539,532,693	
9 01 02 7.01	Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam	Persentase Masyarakat yang mendapatkan Pelatihan Wawasan Keislaman	100 %		0 %	100 %	106,209,350						100 %	106,209,350	
9 01 02 7.01 01	Pelatihan Mawaris	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Mawaris				100 Orang	49,170,980	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Mibo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kota Banda Aceh dan Siswa/Siswi SMP	100 Orang	49,170,980	Dinas Syariat Islam
9 01 02 7.01 06	Pembinaan Mental Spritual Siswa/Siswi Sekolah Menengah Atas Sederajat	Jumlah Siswa/Siswi Sekolah Menengah Atas Sederajat yang Terbina Mental Spiritualnya				60 Orang	57,038,370	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kota Banda Aceh dan Siswa/Siswi SMP	60 Orang	57,038,370	Dinas Syariat Islam
9 01 02 7.02	Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Alquran	Persentase Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan Al-Qur"an	100 %		0 %	100 %	3,079,078,970						100 %	2,116,033,460	
9 01 02 7.02 01	Pembinaan Kelembagaan Tilawatil Quran	Jumlah Lembaga Tilawah Quran yang Mengikuti Pembinaan Kelembagaan				9 Lembaga	216,033,460	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Mibo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kader MTQ dan Kafilah MTQ	9 Lembaga	216,033,460	Dinas Syariat Islam
9 01 02 7.02 04	Pelaksanaan MTQ	Jumlah Orang yang Mengikuti MTQ				56 Orang	2,863,045,510	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Mibo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kader MTQ dan Kafilah MTQ	56 Orang	1,900,000,000	Dinas Syariat Islam
9 01 02 7.04	Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam	Persentase Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam yang dilaksanakan	100 %		0 %	100 %	8,845,840,971						100 %	4,696,542,111	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
9.01.02.7.04.01	Peningkatan Kualitas Dakwah dan Penyemarakan Syariat Islam	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kualitas Dakwah dan Penyemarakan Syariat Islam				1 Dokumen	1,099,499,806	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat, Da'i Perkotaan, Pengurus Masjid, Gampong Percontohan Syariat dan Masjid dalam Wilayah Kota Banda Aceh	1 Dokumen	808,049,531	Dinas Syariat Islam
9.01.02.7.04.03	Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Dai dan Koordinator Lapangan	Jumlah Dai dan Koordinator Lapangan yang Dibina dan Meningkatkan Kualitasnya				55 Orang	808,200,174	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat, Da'i Perkotaan, Pengurus Masjid, Gampong Percontohan Syariat dan Masjid dalam Wilayah Kota Banda Aceh	55 Orang	646,143,176	Dinas Syariat Islam
9.01.02.7.04.05	Pelatihan Takmir Masjid	Jumlah Takmir Masjid yang Mengikuti Pelatihan				116 Orang	166,886,664	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat, Da'i Perkotaan, Pengurus Masjid, Gampong Percontohan Syariat dan Masjid dalam Wilayah Kota Banda Aceh	116 Orang	166,711,664	Dinas Syariat Islam

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
9.01.02.7.04.07	Pembinaan Gampong Percontohan Syariat	Jumlah Gampong Percontohan Syariat yang Dibina				10 Gampong	54,225,000	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Peuniti Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Beurawe Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Lambaro Skep Kota Banda Aceh, Meuraxa, Blang Oi Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Pineung Kota Banda Aceh, Lueng Bata, Cot Mesjid Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Gampong Jawa Kota Banda Aceh, Banda Raya, Lhong Raya Kota Banda Aceh, Jaya Baru, Punge Blang Cut Kota Banda Aceh, Ulee Kareng, Lamteh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat, Da"i Perkotaan, Pengurus Masjid, Gampong Percontohan Syariat dan Masjid dalam Wilayah Kota Banda Aceh	10 Gampong	54,050,000	Dinas Syariat Islam
9.01.02.7.04.11	Penyediaan, Pendistribusian dan Pengawasan Sarana Peribadatan	Jumlah Unit Sarana Peribadatan yang Didistribusikan dan Diawasi				50 Unit	779,162,500	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat, Da"i Perkotaan, Pengurus Masjid, Gampong Percontohan Syariat dan Masjid dalam Wilayah Kota Banda Aceh	50 Unit	49,537,500	Dinas Syariat Islam

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
9 01 02 7.04 13	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Agama	Jumlah Sarana dan Prasarana Agama yang Ditingkatkan Pembangunannya				15 Unit	5,937,866,827	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Otonomi Khusus			Masyarakat, Da'i Perkotaaan, Pengurus Masjid, Gampong Percontohan Syariat dan Masjid dalam Wilayah Kota Banda Aceh	15 Unit	2,972,050,240	Dinas Syariat Islam
9 01 02 7.05	Pengkajian, Pengembangan dan Pembinaan Syariat Islam	Persentase Pengkajian, Pengembangan dan Pembinaan Syariat Islam yang dilaksanakan	100 %		0 %	100 %	1,158,910,771						100 %	909,659,466	
9 01 02 7.05 01	Pemasyarakatan dan Penyebaran Informasi Keislaman	Jumlah Laporan Hasil Pemasyarakatan dan Penyebaran Informasi Keislaman				1 Laporan	463,015,000	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD, Santri Hafizh dan Masyarakat Kota Banda Aceh	1 Laporan	156,428,000	Dinas Syariat Islam
9 01 02 7.05 02	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Syariat Islam	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Syariat Islam				1 Laporan	147,982,064	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD, Santri Hafizh dan Masyarakat Kota Banda Aceh	1 Laporan	147,117,914	Dinas Syariat Islam
9 01 02 7.05 04	Pembinaan Keluarga Islami	Jumlah Keluarga Islam yang Mengikuti Pembinaan				50 Keluarga	49,685,212	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD, Santri Hafizh dan Masyarakat Kota Banda Aceh	50 Keluarga	49,335,212	Dinas Syariat Islam
9 01 02 7.05 06	Pelatihan Penyelenggaraan Fardu Kifayah/Tajhiz Mayat	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Penyelenggaraan Fardu Kifayah/Tajhiz Mayat				180 Orang	174,871,560	Kota Banda Aceh, Banda Raya, Mibo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD, Santri Hafizh dan Masyarakat Kota Banda Aceh	180 Orang	54,521,560	Dinas Syariat Islam
9 01 02 7.05 09	Pembinaan Hafizh Hafizhah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Hafizh Hafizhah				54 Orang	323,356,935	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kota Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Otonomi Khusus			OPD, Santri Hafizh dan Masyarakat Kota Banda Aceh	54 Orang	502,256,780	Dinas Syariat Islam
9 01 02 7.06	Penguatan, Pengembangan, Pemberdayaan dan Peningkatan Kerja Sama Peradilan Syariat Islam	Persentase Penguatan, Pengembangan, Pemberdayaan dan Pengawasan Syariat Islam	100 %		0 %	100 %	813,176,004						100 %	711,088,306	
9 01 02 7.06 01	Penyuluhan Regulasi Syariat Islam	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan Regulasi Syariat Islam				1 Laporan	130,728,068	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kota Banda Aceh	1 Laporan	102,876,300	Dinas Syariat Islam

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
9 01 02 7.06 06	Pengawasan Penegakan Hukum Syariat Islam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penegakan Hukum Syariat Islam				1 Laporan	682,447,936	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kota Banda Aceh	1 Laporan	608,212,006	Dinas Syariat Islam
UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN															
9 01	KEKHUSUSAN ACEH						3,204,956,680							3,025,956,680	
9 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat daerah	100 %		0 %	100 %	2,695,498,085						100 %	2,695,498,085	
9 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	100 %		0 %	100 %	31,000,000						100 %	31,000,000	
9 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	31,000,000	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Lamgugob	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Sekretariat MPU	5 Dokumen	31,000,000	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
9 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	2,375,469,780						100 %	2,375,469,780	
9 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	1,454,469,780	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Lamgugob	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sekretariat MPU	12 Orang/bulan	1,454,469,780	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
9 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	921,000,000	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Lamgugob	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sekretariat MPU	12 Dokumen	921,000,000	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
9 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	9,900,000						100 %	9,900,000	
9 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				18 Paket	9,900,000	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Lamgugob	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sekretariat MPU	18 Paket	9,900,000	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
9 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	113,128,305						100 %	113,128,305	
9 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3,000,000	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Lamgugob	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sekretariat MPU	3 Paket	3,000,000	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
9 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	50,128,305	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Lamgugob	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sekretariat MPU	5 Paket	50,128,305	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
9 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				8 Paket	5,000,000	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Lamgugob	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sekretariat MPU	8 Paket	5,000,000	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
9 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	55,000,000	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Lamgugob	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sekretariat MPU	5 Laporan	55,000,000	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
9 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %		0 %	100 %	8,000,000						100 %	8,000,000	
9 01 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit 0 Unit	8,000,000	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Lamgugob	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sekretariat MPU	1 Unit 0 Unit	8,000,000	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
9 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		0 %	100 %	100,000,000						100 %	100,000,000	
9 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	30,000,000	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Lamgugob	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sekretariat MPU	12 Laporan	30,000,000	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
9 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	70,000,000	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Lamgugob	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sekretariat MPU	12 Laporan	70,000,000	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
9 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		0 %	100 %	58,000,000						100 %	58,000,000	
9 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	30,000,000	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Lamgugob	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Sekretariat MPU	4 Unit	30,000,000	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
9 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	8,000,000	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Lamgugob	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Sekretariat MPU	1 Unit	8,000,000	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
9 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	20,000,000	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Lamgugob	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Sekretariat MPU	5 Unit	20,000,000	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
9 01 03	PROGRAM MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) ACEH	Persentase Meningkatnya Kapasitas dan Peran Ulama	100 %		0 %	100 %	509,458,595						100 %	330,458,595	
9 01 03 7.01	Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama	Persentase meningkatnya peran serta ulama dalam menghasilkan sumber daya ulama yang berkualitas	100 %		0 %	100 %	369,458,595						100 %	244,000,000	
9 01 03 7.01 03	Pendidikan Kader Ulama	Jumlah Kader Ulama yang Mengikuti Pendidikan				40 Orang	220,000,000	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Lamgugob	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Ulama Dayah	40 Orang	166,000,000	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
9 01 03 7.01 04	Rapat Koordinasi Permusyawaratan Ulama	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Permusyawaratan Ulama				25 Laporan	25,000,000	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Lamgugob	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Ulama Dayah	25 Laporan	20,000,000	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
9 01 03 7.01 05	Muzakarah Masalah Keagamaan	Jumlah Laporan Hasil Muzakarah Masalah Keagamaan				1 rumusan	27,000,000	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Lamgugob	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Ulama Dayah	1 rumusan	15,000,000	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
9 01 03 7.01 13	Kajian Pedoman Keagamaan	Jumlah Laporan Hasil Kajian Pedoman Keagamaan				50 kali	77,000,000	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Lamgugob	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Ulama Dayah	50 kali	28,000,000	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
9 01 03 7.01 15	Sosialisasi Fatwah dan Hukum Islam (Migas Kabupaten/Kota)	Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi Fatwah dan Hukum Islam (Migas Kabupaten/Kota)				60 Orang	20,458,595	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Lamgugob	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Ulama Dayah	60 Orang	15,000,000	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
9 01 03 7.02	Silaturahmi Ulama-Ulama	Persentase meningkatnya peran serta Ulama dalam menghasilkan Sumber Daya Ulama yang berkualitas	100 %		0 %	100 %	80,000,000						100 %	49,000,000	
9 01 03 7.02 01	Lokakarya Ulama Umara Bidang Muamallah	Jumlah Ulama Umara Bidang Muamallah yang Mengikuti Lokakarya				40 Orang	45,000,000	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Lamgugob	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Ulama Dayah	40 Orang	25,000,000	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
9 01 03 7.02 02	Eksistensi Peran Ulama dalam Pembangunan Daerah	Jumlah Ulama yang Berperan dalam Pembangunan Daerah				20 Orang	35,000,000	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Lamgugob	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Ulama Dayah	20 Orang	24,000,000	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
9 01 03 7.03	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Agama, Pelayanan Kehidupan Beragama dan Peran Ulama	Presentase Peningkatan Kualitas Kelembagaan Agama, Pelayanan Kehidupan Beragama dan Peran Ulama	100 %		0 %	100 %	60,000,000						100 %	37,458,595	
9 01 03 7.03 02	Pelaksanaan, Penataan dan Pengawasan Produk Halal	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan, Penataan dan Pengawasan Produk Halal				1 Dokumen	25,000,000	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Lamgugob	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Ulama Dayah	1 Dokumen	18,000,000	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
9 01 03 7.03 05	Sosialisasi Sertifikasi Produk Halal	Jumlah Peserta/Pelaku Usaha yang Mengikuti Sosialisasi Sertifikasi Produk Halal				50 Orang	35,000,000	Kota Banda Aceh, Syiah Kuala, Lamgugob	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Ulama Dayah	50 Orang	19,458,595	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
9	UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN														
9 01	KEKHUSUSAN ACEH						25,218,167,101							25,405,602,101	
9 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat daerah	100 %		0 %	100 %	2,867,218,851						100 %	2,867,218,851	
9 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	100 Persen		0 Persen	100 Persen	3,439,371						100 Persen	3,439,371	
9 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	3,439,371	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Keudah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH	5 Dokumen	3,439,371	Sekretariat Baitul Mal
9 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen		0 Persen	100 Persen	2,650,970,620						100 Persen	2,650,970,620	
9 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	1,382,270,620	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Keudah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN	12 Orang/bulan	1,382,270,620	Sekretariat Baitul Mal
9 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	1,268,700,000	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Keudah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN	12 Dokumen	1,268,700,000	Sekretariat Baitul Mal
9 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen		0 Persen	100 Persen	25,850,000						100 Persen	25,850,000	
9 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				50 Paket	25,850,000	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Keudah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		ASN dan NON ASN	50 Paket	25,850,000	Sekretariat Baitul Mal

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
9 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen		0 Persen	100 Persen	9,096,213						100 Persen	9,096,213	
9 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	2,741,238	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Keudah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH	12 Paket	2,741,238	Sekretariat Baitul Mal
9 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	6,354,975	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Keudah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH	12 Paket	6,354,975	Sekretariat Baitul Mal
9 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen		0 Persen	100 Persen	12,700,000						100 Persen	12,700,000	
9 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	12,700,000	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Keudah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH	2 Unit	12,700,000	Sekretariat Baitul Mal
9 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen		0 Persen	100 Persen	42,437,647						100 Persen	42,437,647	
9 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	33,726,000	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Keudah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH	12 Laporan	33,726,000	Sekretariat Baitul Mal
9 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	8,711,647	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Keudah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH	1 Laporan	8,711,647	Sekretariat Baitul Mal
9 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen		0 Persen	100 Persen	122,725,000						100 Persen	122,725,000	
9 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				21 Unit	119,892,000	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Keudah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH	21 Unit	119,892,000	Sekretariat Baitul Mal
9 01 01 2.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2,833,000	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Keudah				BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH	2 Unit	2,833,000	Sekretariat Baitul Mal
9 01 04	PROGRAM BAITUL MAL	Persentase Pelaksanaan Baitul Mal	100 %		0 %	100 %	22,350,948,250						100 %	22,538,383,250	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
9 01 04 7.01	Pengelolaan ZISWAF	Persentase Jumlah Perencanaan ZISWAF yang disusun	100 %		0 %	100 %	5,640,000						100 %	5,640,000	
9 01 04 7.01 01	Penyusunan Perencanaan ZISWAF	Jumlah Perencanaan Ziswaf yang Disusun				1 Dokumen	5,640,000	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	0	1 Dokumen	5,640,000	Sekretariat Baitul Mal	
9 01 04 7.02	Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Baitul Mal	Persentase Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Baitul Mal Gampong	100 Persen		0 Persen	100 Persen	11,450,000					100 Persen	82,385,000		
9 01 04 7.02 01	Sosialisasi dan Edukasi Kesadaran ZISWAF	Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi dan Edukasi Kesadaran Ziswaf				1000 Orang	4,500,000	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Keudah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		MASYARAKAT DI KOTA BANDA ACEH	1000 Orang	45,135,000	Sekretariat Baitul Mal	
9 01 04 7.02 03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM				1 Dokumen	3,950,000	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Keudah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		MASYARAKAT DI KOTA BANDA ACEH	1 Dokumen	31,250,000	Sekretariat Baitul Mal	
9 01 04 7.02 04	Pengembangan Data dan Informasi Baitul Mal	Jumlah Dokumen tentang Pengembangan Data dan Informasi Baitul Mal				1 Dokumen	3,000,000	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Keudah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		MASYARAKAT DI KOTA BANDA ACEH	1 Dokumen	6,000,000	Sekretariat Baitul Mal	
9 01 04 7.03	Peningkatan Pendistribusian dan Pendayagunaan Ziswaf	Persentase Peningkatan Pendistribusian dan Pendayagunaan Ziswaf	100 %		0 %	100 %	22,333,858,250					100 %	22,450,358,250		
9 01 04 7.03 01	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fakir	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Fakir				3688 Orang	5,510,000,000	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf		PARA MUSTAHIQ DI KOTA BANDA ACEH	3688 Orang	5,595,200,000	Sekretariat Baitul Mal	
9 01 04 7.03 02	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Miskin	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Miskin				4635 Orang	7,059,300,000	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf		PARA MUSTAHIQ DI KOTA BANDA ACEH	4635 Orang	7,012,600,000	Sekretariat Baitul Mal	
9 01 04 7.03 03	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Amil	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Amil				50 Orang	483,200,000	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf		PARA MUSTAHIQ DI KOTA BANDA ACEH	50 Orang	561,200,000	Sekretariat Baitul Mal	
9 01 04 7.03 04	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Muallaf	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Muallaf				30 Orang	30,000,000	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf		PARA MUSTAHIQ DI KOTA BANDA ACEH	30 Orang	30,000,000	Sekretariat Baitul Mal	
9 01 04 7.03 05	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Gharimin	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Gharimin				45 Orang	90,000,000	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf		PARA MUSTAHIQ DI KOTA BANDA ACEH	45 Orang	90,000,000	Sekretariat Baitul Mal	

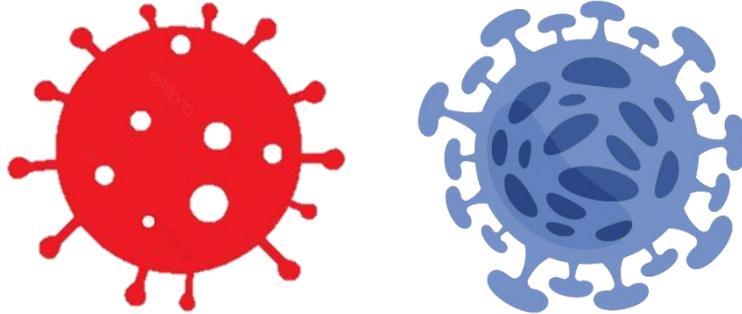
Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
9.01.04.7.03.06	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fisabilillah	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Fisabilillah				7000 Orang	6,881,500,000	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf			PARA MUSTAHIQ DI KOTA BANDA ACEH	7000 Orang	6,881,500,000	Sekretariat Baitul Mal
9.01.04.7.03.07	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Ibnu Sabil	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Fakir				40 Orang	20,000,000	Kota Banda Aceh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf			PARA MUSTAHIQ DI KOTA BANDA ACEH	40 Orang	20,000,000	Sekretariat Baitul Mal
9.01.04.7.03.08	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Infaq	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Infaq				1700 Orang	2,259,858,250	Kota Banda Aceh, Kuta Raja, Keudah	Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf			PARA MUSTAHIQ DI KOTA BANDA ACEH	1700 Orang	2,259,858,250	Sekretariat Baitul Mal
TOTAL							1,303,088,044,062						1,278,362,534,100		



BAB VI

KEBIJAKAN PEMULIHAN EKONOMI DALAM PENANGANAN DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 19



Kondisi Pandemi *Covid-19* hingga akhir desember 2021 masih melanda seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia yang tersebar di seluruh kabupaten/kota, termasuk Kota Banda Aceh. Melihat kondisi tren perkembangan terhadap pandemi *Covid-19* yang sudah menunjukkan penurunan yang signifikan, namun demikian kondisi ini belum bisa dipastikan masa berakhirnya. Atas dasar ini, pemerintah pusat hingga pemerintah kabupaten/kota di seluruh Indonesia diwajibkan untuk tetap memprioritaskan program dan kegiatan terkait dengan penanganan *Covid-19* dan pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak akibat *Covid-19*.

Untuk mengetahui perkembangan *Covid-19* di Kota Banda Aceh sampai dengan 23 Desember 2021, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6. 1 Perkembangan Covid-19 di Kota Banda Aceh Berdasarkan Kecamatan per-23 Desember 2021

DINAS KESEHATAN KOTA BANDA ACEH																
DATA POSITIF COVID-19 KOTA BANDA ACEH																
Update Tanggal 23 Desember 2021 Jam : 12.00 WIB																
		TERKONFIRMASI		DALAM PERAWATAN				SEMBUH			MENINGGAL					
		8474		1				8150			323					
NO	KECAMATAN	TERKONFIRMASI POSITIF			DALAM PERAWATAN			SEMBUH			MENINGGAL					
		SD 22 Desember-2021	23 Desember-2021	KOMULATIF	SD 22 Desember-2021	23 Desember-2021		KOMULATIF	SD 22 Desember-2021	23 Desember-2021	KOMULATIF	SD 22 Desember-2021	23 Desember-2021	KOMULATIF		
					ISOMAN	RAWAT RS										
1	SYIAH KUALA	1420	0	1420	0	0	0	1360	0	1360	60	0	60			
2	KUTA ALAM	1777	0	1777	1	0	1	1702	0	1702	74	0	74			
3	BAITURRAHMAN	900	0	900	0	0	0	861	0	861	39	0	39			
4	MEURAXA	615	0	615	0	0	0	594	0	594	21	0	21			
5	KUTA RAJA	302	0	302	0	0	0	294	0	294	8	0	8			
6	JAYA BARU	811	0	811	0	0	0	782	0	782	29	0	29			
7	BANDA RAYA	835	0	835	0	0	0	799	0	799	36	0	36			
8	LUENG BATA	827	0	827	0	0	0	794	0	794	33	0	33			
9	ULEE KARENG	987	0	987	0	0	0	964	0	964	23	0	23			
JUMLAH		8474	0	8474	1	0	1	8150	0	8150	323	0	323			
ANGKA INSIDENSI				3,1%	ANGKA PERAWATAN				0,0%	ANGKA KESEMBUHAN			96,2%	ANGKA KEMATIAN		3,8%

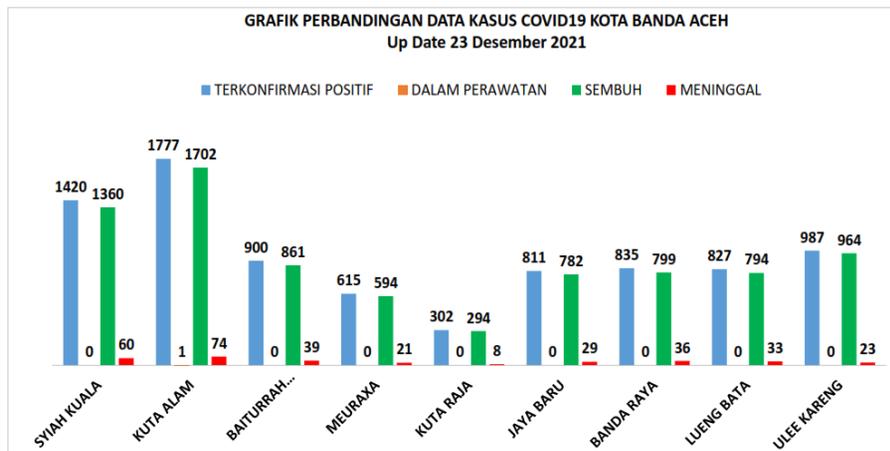
*Jumlah Penduduk Kota Banda Aceh Tahun 2020 276.223 jiwa (Sumber DISDUKCAPIL Kota Banda Aceh)

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, 2022





Berdasarkan Tabel 6.1 di atas dapat diketahui bahwa sampai dengan 23 Desember 2021, jumlah yang terkonfirmasi *Covid-19* di Kota Banda Aceh sebanyak 8.474 orang (3,1 %) yang tersebar di sembilan Kecamatan. Jumlah yang terpapar *Covid-19* yang dalam status perawatan sebanyak 1 orang (0,0%), jumlah pasien *Covid-19* yang sembuh sebanyak 8.150 orang (96,2%), sedangkan yang meninggal dunia sebanyak 323 orang (3,8%).



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, 2021

Gambar 6. 1 Perkembangan Covid-19 di Kota Banda Aceh Berdasarkan Kecamatan per-23 Desember 2021

Berdasarkan Gambar 6.1 di atas menunjukkan bahwa sampai dengan 23 Desember 2021, Kecamatan Kuta Alam merupakan kecamatan dengan jumlah terkonfirmasi positif *Covid-19* tertinggi dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Namun demikian, Kecamatan Kuta Alam memiliki jumlah kesembuhan yang tertinggi yaitu sebanyak 1.702 orang dari 1.777 orang yang dinyatakan terkonfirmasi positif *Covid-19*. Sementara itu, Kecamatan Kuta Raja merupakan kecamatan yang memiliki jumlah yang terkonfirmasi positif *Covid-19* terendah yaitu sebanyak 302 orang dengan jumlah kesembuhan sebanyak 294 orang.

Disamping itu, Pemerintah Kota Banda Aceh pada tahun 2021 hingga tahun 2022 ini telah melakukan upaya preventif terhadap *Covid-19* dan upaya pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak akibat *Covid-19*.

Adapun kebijakan penanganan *Covid-19*, Pemerintah Kota Banda Aceh melakukan upaya meliputi:

1. Kebijakan penanganan kesehatan masyarakat akibat *Covid-19* Pemerintah Kota Banda Aceh tetap mengacu kepada kebijakan yang ditetapkan oleh *World Health Organization* (WHO), Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kota Banda Aceh dengan melakukan:
 - 1) Imbauan kepada masyarakat untuk menggunakan masker di luar rumah (ruangan terbuka);
 - 2) Cuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer*;
 - 3) Menjaga jarak (*physical distancing*);





- 4) Penguraian kerumunan yang menyebabkan terjadinya kontak fisik secara dekat;
 - 5) Konsumsi makanan yang bergizi;
 - 6) Pengadaan sarana kesehatan khusus *Covid-19* ;
 - 7) Peningkatan sarana Rumah Sakit dan Puskesmas untuk kebutuhan *Covid-19* ;
 - 8) Peningkatan kuantitas dan kualitas dokter spesialis dan tenaga medis *Covid-19* ;
2. Kebijakan pemulihan ekonomi masyarakat akibat *Covid-19* dilakukan melalui:
- 1) Bantuan peralatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM);
 - 2) Pelatihan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM);
 - 3) Membangun Pusat Industri Kerajinan;
 - 4) Bantuan Peralatan Alat Tangkap;
 - 5) Membuka usaha kegiatan ekonomi masyarakat dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.





BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Indikator kinerja menjadi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome) dan dampak (impact). Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi walikota dan wakil walikota yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD).

7.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Realisasi Capaian 2021

Pemerintah Daerah harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik. Untuk itu perlu ditetapkan indikator-indikator yang dapat dijadikan alat ukur untuk menilai pencapaian kinerja yang telah ditetapkan. Selain pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan untuk mencapai suatu tujuan, sasaran juga menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pencapaian kinerja pemerintah daerah.

Keberhasilan pencapaian indikator pembangunan dari tahun ke tahun merupakan potret kinerja pemerintah dapat digunakan untuk membantu pemerintah dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Target capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 6.1 berikut ini:

Tabel 7.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2023

No	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Realisasi 2021	Target Capaian Tahun 2023	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
Tujuan: Mengoptimalkan Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam					
1.	Indeks Kota Syariah (IKS)	Indeks	76,77	78,27	Dinas Syariat Islam, Semua Kecamatan, Sekreatariat MPU
Tujuan: Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah					
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	87,97	91,12	Dinas Tenaga Kerja, Semua Kecamatan, DPMPTSP, Disdukcapil, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, BKPSDM, DPKP, Satpol PP & WH
2	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	B	BB	Semua OPD
Tujuan : Mengoptimalkan Kualitas Pendidikan					
1	Indeks Kualitas Pendidikan	Indeks	82,64	90,08	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan,





No	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Realisasi 2021	Target Capaian Tahun 2023	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
					Dinas Pendidikan Dayah, Sekretariat MPD
Tujuan: Mengoptimalkan Kualitas Kesehatan					
1	Indeks Kualitas Kesehatan	Indeks	85,451	94,715	Dinas Kesehatan, RSUD Meuraxa, DP3AP2KB
Tujuan : Meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisata					
1	Jumlah Kunjungan Wisata	Jiwa	251.836	350.000	Dinas Pariwisata
Tujuan: Meningkatkan Pengembangan Infrastruktur dan Penataan Kawasan Permukiman					
1	Rata-Rata Capaian Layanan Infrastruktur Perkotaan	%	89,49	90,49	Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas Perkim, Dinas PUPR
Tujuan: Mengoptimalkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
1	Indeks Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks	63,05	69,35	DP3AP2KB
Tujuan: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Tata Kelola RTH, dan Mitigasi Bencana					
1	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	Kelas Risiko (Skor)	Sedang 117,02	Sedang 107,02	BPBD

Sumber : RPD Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026

7.2 Indeks Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Capaian Tahun 2021

Selain Indikator Kinerja Utama (IKU), terdapat target capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD). Penentuan indikator kinerja daerah dibuat untuk menjadi panduan bagi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menjalankan program-programnya, dengan demikian indikator kinerja daerah merupakan akumulasi kinerja OPD. Target indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah terbagi dalam 3 (tiga) aspek, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Target pencapaian IKD untuk Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 6.2 berikut ini:





Tabel 7. 2 Indikator Kinerja Daerah Pemerintah Kota Banda Aceh terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi 2021	Target Capaian Tahun 2023	OPD Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi:					
1	Pertumbuhan PDRB	%	5,53***	4	
2	Laju Inflasi	%	2,41	2,35	
3	PDRB per kapita (ADHK)	Juta Rupiah	60,59***	64,59	
4	PDRB per kapita (ADHB)	Juta Rupiah	78,16***	82,16	
5	Indeks Gini	Indeks	0,347***	0,337	
6	Persentase Penduduk Miskin	%	7,61	7,25	
7	Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa	20.950	20.874	
8	IPM	Indeks	85,71	86,59	
9	Persentase Peningkatan Pendapatan Daerah	%	1,61	1,96	
Kesejahteraan Sosial					
Pendidikan					
1	Harapan Lama Sekolah	Tahun	17,80	17,82	Disdikbud
2	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	12,83	12,84	Disdikbud
Kesehatan					
3	Angka harapan hidup	Tahun	71,52	72,00	Dinkes
4	Persentase balita gizi buruk	%	0,23	0,22	Dinkes
5	Prevalensi balita gizi kurang	%	1,07	1,06	Dinkes
Ketenagakerjaan					
6	Tingkat pengangguran terbuka	%	8,94	8,15	Disnaker
Kuangan					
7	Peroleh Opini dari BPK terhadap laporan Keuangan daerah	Opini BPK	WTP	WTP	BPKK
8	Persentase PAD terhadap Pendapatan	%	19	20	BPKK
ASPEK PELAYANAN UMUM					
Layanan Urusan Wajib Dasar					
1. PENDIDIKAN					
1.1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 5-6 tahun dalam pendidikan PAUD	%	60,12	100	Disdikbud
1.2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7-12 tahun dalam Pendidikan SD	%	99,99	100	Disdikbud





No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi 2021	Target Capaian Tahun 2023	OPD Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6
1.3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 13-15 tahun dalam pendidikan SMP	%	99,99	100	Disdikbud
1.4	Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7-18 tahun dalam pendidikan kesetaraan	Nilai	97,05	100	Disdikbud
1.5	Rata-rata Kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	1,76	1,96	Disdikbud
1.6	Rata-rata Kemampuan Numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	1,60	1,80	Disdikbud
1.7	Rata-rata Kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	1,85	2,05	Disdikbud
1.8	Rata-rata Kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	1,70	1,90	Disdikbud
1.9	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) yang Mendapatkan Akreditasi A	%	49,45	50	Disdikbud
1.10	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang Mendapatkan Akreditasi A	%	33,33	36	Disdikbud
1.11	Persentase Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	%	39,90	48	Disdikbud
1.12	Persentase Satuan Pendidikan Non Formal (PNF) yang Mendapatkan Minimal Akreditasi C	%	28,50	37	Disdikbud
1.13	Persentase Pendidik SD yang Memiliki Sertifikat Pendidik	%	39,78	41	Disdikbud
1.14	Persentase Pendidik SMP yang Memiliki Sertifikat Pendidik	%	56,59	58	Disdikbud
1.15	Persentase Pendidik PAUD Formal yang Memiliki Sertifikat Pendidik	%	25,30	27	Disdikbud
1.16	Persentase Pendidik PAUD Formal yang Memiliki Kualifikasi S1/D IV	%	79,45	82	Disdikbud
1.17	Rasio Pengawas/Penilik PAUD	Rasio	1:34	1:28	Disdikbud





No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi 2021	Target Capaian Tahun 2023	OPD Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6
1.18	Persentase Lulusan SD yang mampu menghafal minimal satu juz Al Qur'an	%	6,69	9	Disdikbud
1.19	Persentase Lulusan SMP yang mampu menghafal minimal dua juz Al Qur'an	%	5,55	9	Disdikbud
1.20	Jumlah Dayah yang terakreditasi sesuai standar	Dayah	26	29	Disdikdayah
1.21	Jumlah rekomendasi Majelis Pendidikan Daerah (MPD) yang dihasilkan	Rekomendasi	2	2	Sek. MPD
2.	KESEHATAN				
2.1	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	%	100	100	Dinkes
2.2	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	%	95,4	100	Dinkes
2.3	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	%	100	100	Dinkes
2.4	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	60,9	100	Dinkes
2.5	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	73,9	100	Dinkes
2.6	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	123	100	Dinkes
2.7	Persentase warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	14	100	Dinkes
2.8	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	33	100	Dinkes
2.9	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	154	100	Dinkes





No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi 2021	Target Capaian Tahun 2023	OPD Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6
2.10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	100	Dinkes
2.11	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	87	100	Dinkes
2.12	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	99,19	100	Dinkes
2.13	Persentase pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	%	80	100	Dinkes
2.14	Persentase ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana sesuai tipe rumah sakit	%	76	80	Dinkes
3.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
3.1	Layanan pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	68,82	100	Dinas PUPR
3.2	Layanan pengolahan air limbah domestik	%	100	100	Dinas PUPR
3.3	Cakupan Pelayanan Air Minum	%	91,37	92,07	Dinas PUPR
3.4	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Layak	%	87,58	87,61	Dinas PUPR
3.5	Persentase Drainase Kota Dalam Kondisi Baik	%	82,01	82,03	Dinas PUPR
3.6	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	%	44,11	44,09	Dinas PUPR
3.7	Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	%	95,55	95,75	Dinas PUPR
3.8	Rasio Bangunan Ber-IMB Per Satuan Bangunan	%	74,43	74,53	Dinas PUPR
3.9	Tenaga Kerja Konstruksi yang Bersertifikasi	Orang	50	50	Dinas PUPR
3.10	Ketaatan terhadap RTRW/RDTR	%	81,07	81,37	Dinas PUPR
3.11	Persentase bangunan Umum yang Memiliki Aksesibilitas	%	56,85	60,43	Dinas PUPR





No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi 2021	Target Capaian Tahun 2023	OPD Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6
3.12	Jumlah kawasan Strategis Yang Tertata	Kawasan	0	0	Dinas PUPR
4. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
4.1	Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	Dinas Perkim
4.2	Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100	100	Dinas Perkim
4.3	Persentase Luas Permukiman yang Tertata	%	76,70	76,90	Dinas Perkim
4.4	Cakupan ketersediaan Rumah Layak Huni	%	92,20	92,60	Dinas Perkim
4.5	Persentase lingkungan permukiman kumuh	%	7,64	7,24	Dinas Perkim
4.6	Cakupan lingkungan Yang sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	%	96,61	98,00	Dinas Perkim
5. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
5.1	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	%	100	87,7	Satpol PP & WH
5.2	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	Rasio	5,27	5,52	Satpol PP & WH
5.3	Persentase Penegakan Perda/Qanun	%	100	80	Satpol PP & WH
5.4	Indeks Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Indeks	0,58	0,60	BPBD
5.5	Layanan informasi rawan bencana	%	N/A	100	BPBD
5.6	Layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	N/A	100	BPBD
5.7	Layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	N/A	100	BPBD
5.8	Layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	%	100	100	DPKP





No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi 2021	Target Capaian Tahun 2023	OPD Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6
5.9	Layanan pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran (Balakar, Satlakar dan atau komunitas masyarakat lainnya) yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	%	N/A	10	DPKP
5.10	Layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (Operasi nonkebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	Kali	56	60	DPKP
5.11	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kab/Kota	%	100	100	DPKP
6. SOSIAL					
6.1	Persentase Penyandang Disabilitas yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	%	59	100	Dinas Sosial
6.2	Persentase Terpenuhinya kebutuhan dasar anak Terlantar di Luar Panti	%	100	100	Dinas Sosial
6.3	Persentase Terpenuhinya kebutuhan dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	%	100	100	Dinas Sosial
6.4	Persentase Terpenuhinya kebutuhan dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti	%	93	100	Dinas Sosial
6.5	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial daerah Kab/Kota	%	100	100	Dinas Sosial
Layanan Urusan Wajib Non Dasar					
1. TENAGA KERJA					
1.1	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	40	50,60	Disnaker
1.2	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	17,47	19,22	Disnaker
1.3	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	%	1,17	1,03	Disnaker





No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi 2021	Target Capaian Tahun 2023	OPD Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6
1.4	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	%	59,00	61,00	Disnaker
1.5	Besaran Pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	%	37,06	38,91	Disnaker
1.6	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	%	7,41	11,11	Disnaker
1.7	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	26,36	26,97	Disnaker
1.8	Jumlah Industri Kecil Menengah Produktif	Jumlah IKM	1.310	1.330	Disnaker
1.9	Persentase jumlah IKM yang terdaftar di SIINas	%	1,80	3,70	Disnaker
2.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
2.1	Persentase perempuan yang mendapatkan pemberdayaan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	%	16	48	Dinas P3AP2KB
2.3	Rasio KDRT	%	0,13	0,12	Dinas P3AP2KB
2.4	Persentase Gampong Layak Anak	%	25,56	44,44	Dinas P3AP2KB
2.5	Prevalensi pemakaian kontrasepsi	%	72,99	80,47	Dinas P3AP2KB
2.6	Persentase Indikator Gampong KB yang di penuhi	%	46,15	61,54	Dinas P3AP2KB
3.	PANGAN				
3.1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	82,56	83,00	DP2KP
4.	LINGKUNGAN HIDUP				
4.1	Timbulan Sampah yang Ditangani	%	N/A	97,75	DLHK3
4.2	Luasan RTH Publik sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota	%	14,330	14,360	DLHK3
4.2	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	N/A	45,66	DLHK3
4.3	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	N/A	83,49	DLHK3
4.4	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks	N/A	29,18	DLHK3





No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi 2021	Target Capaian Tahun 2023	OPD Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6
4.5	Persentase Penerangan Jalan Umum	%	82,42	86,00	DLHK3
4.6	Persentase Cakupan Area Pelayanan Persampahan	%	N/A	97,50	DLHK3
4.7	Penghargaan Adipura	Ada/Tidak Ada	Belum ada pengumuman dari KLHK	Ada	DLHK3
5. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
5.1	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	%	99,31	99,35	Disdukcapil
5.2	Cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	74,26	75,00	Disdukcapil
5.3	Cakupan Kepemilikan Akta Kematian	%	96,73	96,73	Disdukcapil
5.4	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran	%	84,00	84,20	Disdukcapil
5.5	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	95,36	95,38	Disdukcapil
6. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG					
6.1	Indeks Gampong Membangun (IGM)	Indeks	0,758	0,788	DPMG
6.2	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan desa yang Baik	%	100	100	DPMG
6.3	Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Kelompok Binaan	2,60	2,70	DPMG
6.4	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Kelompok Binaan	22,10	22,20	DPMG
6.5	Persentase PKK Aktif	%	100	100	DPMG
6.6	Persentase Posyandu Aktif	%	100	100	DPMG
7. PERHUBUNGAN					
7.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Orang	1.649.464	1.665.795	Dishub
7.2	Rasio ijin trayek	%	0,22	0,23	Dishub
7.3	Jumlah uji kir angkutan umum	Kendaraan	10.500	10.600	Dishub
7.4	Jumlah Terminal Bis	Unit	3	3	Dishub
7.5	Persentase layanan Angkutan Darat	%	0,15	0,16	Dishub
7.6	Persentase Kepemilikan KIR angkutan umum	%	20	19	Dishub





No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi 2021	Target Capaian Tahun 2023	OPD Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6
7.7	Pemasangan Rambu-rambu	%	102,71	100	Dishub
8. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
8.1	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Skor	2,62	2,67	Diskominfotik
8.2	Persentase website OPD yang aktif	%	75	82	Diskominfotik
8.3	Cakupan layanan E-Government yang dilaksanakan	%	50	57	Diskominfotik
9. KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN					
9.1	Persentase koperasi aktif	%	77	79	DISKOP UKM & DAG
9.2	Persentase peningkatan usaha mikro yang produktif dan bernilai tambah	%	2	7	DISKOP UKM & DAG
9.3	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang berfungsi optimal	Unit	7	8	DISKOP UKM & DAG
9.4	Persentase Pasar yang Representatif	%	50	50	DISKOP UKM & DAG
9.5	Jumlah Usaha Mikro	UM	16.970	17.818	DISKOP UKM & DAG
9.6	Jumlah Koperasi	Unit Usaha	513	513	DISKOP UKM & DAG
9.7	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam /Usaha Simpan Pinjam	Unit Usaha	395	395	DISKOP UKM & DAG
9.8	Jumlah pasar yang sudah berfungsi optimal	Jumlah Pasar	5	5	DISKOP UKM & DAG
9.9	Jumlah UTTP (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) yang Bertanda Tera Sah	UTTP	1250	1378	DISKOP UKM & DAG
10. PENANAMAN MODAL					
10.1	Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp (milyar)	547,88	575,27	DPMPPTSP
11. PEMUDA DAN OLAHRAGA					
11.1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	14,81	18,52	Dispora
11.2	Cakupan pembinaan atlet muda	%	24,12	26,13	Dispora





No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi 2021	Target Capaian Tahun 2023	OPD Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6
12. STATISTIK					
12.1	Persentase data statistik sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu	%	20	27	Diskominfotik
13. KEBUDAYAAN					
13.1	Indeks Pelestarian Budaya Daerah	Indeks	73,41	77,73	Disdikbud
13.2	Persentase sanggar seni dan budaya daerah yang aktif	%	65	65	Disdikbud
13.3	Persentase cagar budaya dan situs sejarah yang ditetapkan	%	68	73	Disdikbud
13.4	Jumlah rekomendasi Majelis Adat Aceh (MAA) yang dihasilkan	Rekomendasi	1	2	Sek. MAA
14. PERPUSTAKAAN					
14.1	Jumlah kunjungan pemustaka ke perpustakaan	Jiwa	9.852	17.023	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
15. KEARSIPAN					
15.1	Persentase OPD yang telah menerapkan pengelolaan arsip secara manual dan berbasis TIK sesuai peraturan	%	N/A	25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Layanan Urusan Pilihan					
1. PARIWISATA					
1.1	Jumlah Kunjungan Wisataan	Jiwa	251.836	350.000	Dinas Pariwisata
1.2	Persentase kontribusi PAD sektor pariwisata terhadap total PAD Kota Banda Aceh	%	N/A	5,1	Dinas Pariwisata
2. KELAUTAN DAN PERIKANAN					
2.1	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	N/A	917,06	DP2KP
2.2	Jumlah Produksi Hasil Perikanan Tangkap	Ton	N/A	19.388,464	DP2KP





No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi 2021	Target Capaian Tahun 2023	OPD Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6
2.3	Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanan	Ton	N/A	374,50	DP2KP
3. PETERNAKAN					
Jumlah Produksi Ternak					
3.1	a. Sapi	Ton	N/A	299,86	DP2KP
	b. Kambing	Ton	N/A	24,22	DP2KP
	c. Unggas	Ton	N/A	1.916	DP2KP
PENUNJANG URUSAN:					
1. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
1.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada/Tidak	Ada	Ada	Bappeda
1.2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD/RPD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada	Ada/Tidak	Ada	Ada	Bappeda
1.3	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	Ada/Tidak	Ada	Ada	Bappeda
1.4	Penjabaran konsistensi Program RPJMD/RPD kedalam RKPD	%	94,73	100	Bappeda
2. KEUANGAN					
2.1	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Opini BPK	WTP	WTP	BPKK
2.2	Persentase PAD terhadap Pendapatan	%	19	20	BPKK
3. KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					
3.1	Indeks Kepuasan ASN Kota Banda Aceh terhadap pelayanan kepegawaian dan pengembangan kompetensi	Indeks	75	77	BKPSDM
4. INSPEKTORAT					





No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi 2021	Target Capaian Tahun 2023	OPD Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6
4.1	Presentase tindak lanjut temuan	%	89,02	89,54	Inspektorat
5. SEKRETARIAT DPRK					
5.1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat Kelengkapan DPRD Kota	Ada/Tidak ada	Ada	Ada	Set. DPRK Banda Aceh
5.2	Tersusun dan terintegrasi Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada/Tidak ada	Ada	Ada	Set. DPRK Banda Aceh
5.3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/Tidak ada	Ada	Ada	Set. DPRK Banda Aceh
KESATUAN BANGSA					
1.	Kesatuan Bangsa dan Politik				
1.1	Capaian Tingkat Penanganan Konflik Sosial	%	100	100	Kesbangpol
1.2	Persentase Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pilkada	%	-	-	Kesbangpol
KEISTIMEWAAN DAN KEKHUSUSAN ACEH					
1.	KEAGAMAAN				
1.1	Indeks Kota Syariah (IKS)	Indeks	76,77	78,27	DSI
1.2	Jumlah rekomendasi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) yang dihasilkan	Rekomendasi	9	22	Sek. MPU
ASPEK DAYA SAING DAERAH :					
1	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	%	0,26	0,48	Dishub
2		Orang	839.128	1.220.000	Dishub





No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi 2021	Target Capaian Tahun 2023	OPD Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6
	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	Barang	168.912	76.311	
3	Jumlah orang/ barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	Orang/Barang	1.582.397	1.665.795	Dishub

Sumber : OPD Pemerintah Kota Banda Aceh, BPS Kota Banda Aceh

7.3 Capaian Prestasi Pembangunan Pemerintah Kota Banda Aceh

Kota Banda Aceh sebagai Ibu Kota Provinsi Aceh telah mampu meraih berbagai penghargaan dan prestasi di berbagai bidang pembangunan, baik di tingkat internasional, nasional dan Provinsi Aceh. Selama Tahun 2021-2022, Pemerintah Kota Banda Aceh telah mengukir prestasi ditingkat Internasional, Nasional, dan Provinsi Aceh sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 6.3 di bawah ini :

Tabel 7.3 Penghargaan Pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2021/2022

No	Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Bulan/ Tahun
1	Juara 1 Kategori Destinasi Wisata Unik Terpopuler pada Anugerah Pesona Indonesia (API) ke-5	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Mei 2021
2	Penghargaan Kota Layak Anak	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2021
3	Penghargaan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020 Predikat Nilai B	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	2021
4	Nominasi dengan Kategori Perencanaan dan Pencapaian Daerah Tingkat Kota	BAPPENAS R.I	2021
5	Penghargaan Opini WTP Ke-13	BPK-RI Perwakilan Aceh	2021
6	Tokoh Pelopor Literasi	Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) Provinsi Aceh	2021
7	Anugerah Prof A Majid Ibrahim (AMI) Ke-VII Tahun 2021 sebagai Kota dengan Rencana Kerja Pemerintahan Terbaik Tahun 2021	Pemerintah Aceh	2021
8	Anugerah FEBI UIN AR-Raniry Award 2021 kepada LKMS Mahirah Muamalah	UIN AR-Raniry	2021
9	Penghargaan BAZNAZ Award 2022 katagori “Kepala Daerah Pendukung kebangkitan Zakat Terbaik”	Badan Amil Zakat Nasional	2022





No	Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Bulan/ Tahun
10	Anugerah Prof A Majid Ibrahim (AMI) Ke-VIII Tahun 2022 sebagai Kota Perencanaan dan Pencapaian daerah Tingkat Kota se-Aceh Terbaik I	Pemerintah Aceh	2022

Sumber : Bagian Hubungan Masyarakat Setda Kota Banda Aceh, 2022

Selama periode tahun 2021 sampai 2022 Kota Banda Aceh banyak memperoleh penghargaan baik Internasional, Nasional, maupun tingkat Provinsi. Ditingkat Internasional Kota Banda Aceh memperoleh satu penghargaan, ditingkat Nasional memperoleh 14 penghargaan dan ditingkat Propinsi Aceh memperoleh 5 penghargaan.

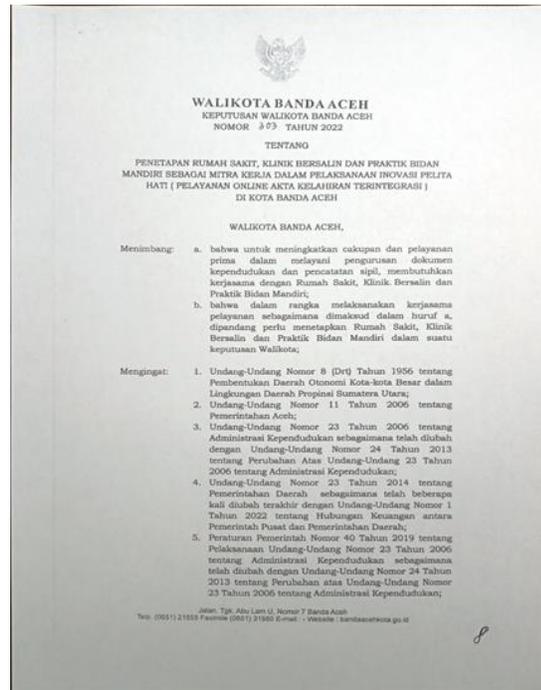
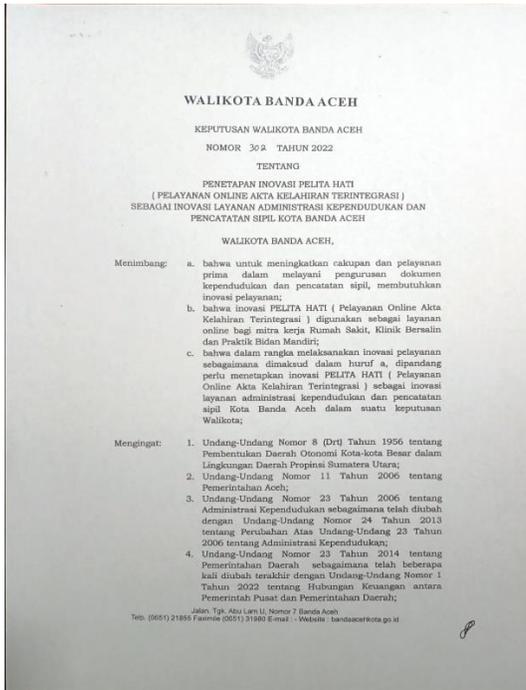
7.4 Inovasi Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2022

Inovasi adalah perubahan metode atau teknologi bersifat positif yang berguna dan berawal dari cara-cara yang sudah ada sebelumnya atau cara baru dalam melakukan sesuatu. Untuk daerah, inovasi merupakan salah satu keunggulan kompetitif dan daya saing suatu daerah. Inovasi ini merupakan kebutuhan mendasar yang memerlukan ide-ide baru dalam pembangunan sebagai dampak dari keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Daerah didorong untuk menciptakan inovasi yang kompetitif di berbagai sektor pembangunan dengan kelemahan dan keunggulan yang dimiliki dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan yang dihadapi. Selain keterbatasan sumber daya yang dimiliki, keterbatasan sumber keuangan daerah juga menjadi pertimbangan yang mendasar untuk melahirkan inovasi-inovasi baru dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan di daerah.

1. Nama Inovasi dan Dasar Hukum

Inovasi dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banda Aceh Tahun 2023 adalah **“PELAYANAN ONLINE AKTA KELAHIRAN TERINTEGRASI (PELITA HATI)”** yang merupakan inovasi daerah bidang Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh. Inovasi PELITA HATI ini telah dituangkan melalui Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 302 Tahun 2022 tentang Penetapan Inovasi PELITA HATI (Pelayanan Online Akta Kelahiran Terintegrasi) sebagai Inovasi Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh. Untuk mendukung keberhasilan inovasi ini, juga telah ditetapkan Rumah Sakit, Klinik Bersalin dan Praktik Bidan Mandiri sebagai mitra kerja dalam pelaksanaan inovasi PELITA HATI yang dituangkan dalam Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 303 Tahun 2022 tentang Penetapan Rumah Sakit, Klinik Bersalin dan Praktik Bidan Mandiri sebagai Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Inovasi PELITA HATI (Pelayanan Online Akta Kelahiran Terintegrasi) di Kota Banda Aceh.





Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 302 dan 303 Tahun 2022



Balai Kota Banda Aceh



SDM Disdukcapil Kota Banda Aceh

2. Mitra Kerja Inovasi PELITA HATI

Untuk mendukung capaian target cakupan kepemilikan Akte Kelahiran di Kota Banda Aceh telah dilakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan 18 mitra kerja layanan akte kelahiran yang terdiri dari 8 (delapan) Rumah Sakit, 5 (lima) Klinik Bersalin, dan 5 (lima) Praktik Bidan, yaitu:

1. Rumah Sakit Harapan Bunda
2. Rumah Sakit Pertamina Ummi Rosnati
3. Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh
4. Rumah Sakit Ibu dan Anak Cempaka Az-Zahra
5. Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa
6. Rumah Sakit Kesdam Iskandar Muda
7. Rumah Sakit Bhayangkara Polda Aceh
8. Rumah Sakit Tgk. Fakinah
9. Klinik Umum dan Bersalin Muhammadiyah Aceh
10. Klinik Bersalin New Putroe Phang





11. Klinik Bersalin Bungong Seulanga
12. Klinik Bersalin Hartini DJ
13. Klinik Bersalin Cut Khairiati
14. Praktik Bidan Mandiri Jawiriah
15. Praktik Bidan Mandiri Erni Munir
16. Praktik Bidan Mandiri Nuraini
17. Praktik Bidan Mandiri Fitriani
18. Praktik Bidan Mandiri Sabarina



RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh



RSIA Aceh Kota Banda Aceh

Untuk mengetahui jumlah akta kelahiran hasil Perjanjian Kerja Sama (PKS) di atas tahun 2019-2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 7. 4 Perkembangan Akta Kelahiran Hasil Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Kota Banda Aceh Tahun 2019-2021

No	RS/Klinik Bersalin	Tahun			Keterangan
		2019	2020	2021	
1	Rumah Sakit Harapan Bunda	1.149	1.357	1.657	
2	Rumah Sakit Pertamedika Umni Rosnati	120	152	182	
3	Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh	22	45	85	
4	Rumah Sakit Ibu dan Anak Cempaka Az-Zahra	42	64	94	
5	Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa	28	35	55	
6	Rumah Sakit Kesdam Iskandar Muda	43	52	82	
7	Rumah Sakit Bhayangkara Polda Aceh	19	23	43	
8	Rumah Sakit Tgk. Fakinah	21	21	41	
9	Klinik Umum dan Bersalin Muhammadiyah Aceh	28	39	52	
10	Klinik Bersalin New Putroe Phang	64	71	93	
11	Klinik Bersalin Bungong Seulanga	72	92	122	
12	Klinik Bersalin Hartini DJ	23	43	58	
13	Klinik Bersalin Cut Khairiati	36	56	76	
14	Praktik Bidan Mandiri Jawiriah	130	153	233	
15	Praktik Bidan Mandiri Erni Munir	32	42	54	
16	Praktik Bidan Mandiri Nuraini	15	15	25	





No	RS/Klinik Bersalin	Tahun			Keterangan
		2019	2020	2021	
17	Praktik Bidan Mandiri Fitriani	-	14	24	Belum PKS
18	Praktik Bidan Mandiri Sabarina	-	27	37	Belum PKS
Jumlah		1.844	2.301	3.013	

Sumber: Disdukcapil Kota Banda Aceh, 2019-2021 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah akte kelahiran di Rumah Sakit, Klinik Bersalin dan Praktik Bidan yang merupakan hasil Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Kota Banda Aceh selama periode tahun 2019-2021 mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Apabila dibandingkan dengan jumlah akta kelahiran di Rumah Sakit, Klinik Bersalin dan Praktik Bidan melalui PKS, pada tahun 2019 sebanyak 1.844 akta kelahiran. Namun demikian, setelah melalui PKS, jumlah akta kelahiran di Kota Banda Aceh pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 24,78 persen menjadi 2.301 akta kelahiran. Jumlah ini mengalami peningkatan kembali pada tahun 2021 menjadi 3.013 akta kelahiran atau mengalami peningkatan sebesar 30,94 persen dibandingkan dengan jumlah akta kelahiran pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Disdukcapil Kota Banda Aceh dengan Rumah Sakit, Klinik Bersalin dan Praktik Bidan memberikan hasil dan manfaat yang sangat positif dan menggembirakan.



Penandatanganan PKS PELITA HATI dengan RSU Meuraxa dan RSIA Aceh, 2022

3. Latar Belakang Inovasi PELITA HATI

Akte kelahiran merupakan dokumen negara yang mengakui keberadaan bayi atas segala hak-haknya sebagai warga negara. Hak atas identitas ini juga sebagai bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan seseorang di depan hukum. Meski sudah di era digitalisasi, tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini masih banyak anak di





daerah-daerah yang belum memiliki akta kelahiran. Hal ini akan berdampak kepada masih banyaknya anak yang kehilangan haknya terutama untuk mendapatkan pendidikan yang layak maupun jaminan sosial.

Inovasi PELITA HATI merupakan kolaborasi kerjasama dengan pihak Rumah Sakit, Klinik Bersalin dan Praktik Bidan Mandiri. Hal ini merupakan wujud kepedulian Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Banda Aceh untuk membahagiakan ibu-ibu rumah tangga yang melahirkan anaknya dengan sesegera mungkin mencatatkan anaknya dalam dokumen negara. Mitra kerjasama yang dibangun dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) memiliki visi dan misi yang sama dalam dalam pelayanan yaitu mempermudah pengurusan Akta Kelahiran, sedangkan Disdukcapil Kota Banda Aceh berupaya untuk memenuhi persentase capaian akta kelahiran bagi semua masyarakat Kota Banda Aceh, dengan kata lain Disdukcapil peduli terhadap setiap kelahiran di Kota Banda. Aceh.

**Tabel 7. 5 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk
di Kota Banda Aceh Tahun 2018-2021**

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Pertumbuhan Penduduk (%)
2018	244.686	2,00
2019	245.779	1,97
2020	248.892	1,21
2021	251.288	1,72
Pertumbuhan Rata-rata		1,73

Sumber: BPS Kota Banda Aceh, 2018-2021 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Kota Banda Aceh selama periode tahun 2018-2021 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan penduduk pertahun sebesar 1,73 persen.

4. Tujuan Inovasi PELITA HATI

Inovasi PELITA HATI ini bertujuan untuk:

1. Mempermudah dan mempercepat proses pembuatan akta kelahiran yang lebih awal dimulai dari tempat kelahiran;
2. Memperoleh data kelahiran sesuai dengan akta kelahiran yang akurat dan *up-date*;
3. Mempermudah dan mempercepat pencapaian cakupan kepemilikan akte kelahiran di Kota Banda Aceh.

5. Sasaran Inovasi PELITA HATI

Sasaran Inovasi PELITA HATI ini adalah:

1. Mudah dan cepatnya proses pembuatan akta kelahiran yang lebih awal dimulai dari tempat kelahiran;





2. Tersedianya data kelahiran sesuai dengan akta kelahiran yang akurat dan *up-date*;
3. Tercapainya cakupan kepemilikan akte kelahiran di Kota Banda Aceh.

6. Input, Output, Outcome, Benefit dan Impact

Untuk mengetahui Input, Output, Outcome, Benefit, dan Impact yang diharapkan dari inovasi PELITA HATI ini, secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 7. 6 Input, Output, Outcome, Benefit, dan Impact
Inovasi PELITA HATI Kota Banda Aceh Tahun 2022**

Input	<ol style="list-style-type: none"> 1. RPJPD Kota Banda Aceh Tahun 2007-2027; 2. RPJMD Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022; 3. RPD Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026; 4. Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 302 Tahun 2022; 5. Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 303 Tahun 2022; 6. Mitra Kerja Pelaksanaan Inovasi; 7. Aplikasi PELITA HATI (Pelayanan Online Akta Kelahiran Terintegrasi); 8. Sarana dan Sarana pendukung Pelayanan Inovasi.PELITA HATI
Output	AKTA KELAHIRAN Masyarakat Kota Banda Aceh
Outcome	Masyarakat Kota Banda Aceh memiliki Akta Kelahiran lebih awal di tempat kelahiran
Benefit	Tersedia Data Kelahiran sesuai dengan Akta Kelahiran Penduduk Kota Banda Aceh yang akurat dan <i>up-date</i> setiap tahunnya
Impact	Tercapainya Target Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran di Kota Banda Aceh

7. Tahapan dan Proses Inovasi Pelita Hati bagi Masyarakat

- 1) Masyarakat/pasien melengkapi persyaratan melalui petugas Rumah Sakit/Klinik Bersalin/Bidan Mandiri.
- 2) Staf Rumah Sakit/Klinik Bersalin/Bidan Mandiri tempat proses Persalinan melakukan penginputan data dalam Sistem Aplikasi SiHati Online.
- 3) Pelaksana Disdukcapil melakukan validasi data yang di input melalui aplikasi SiHati Online dan pengajuan pencetakan dokumen Akte Kelahiran, KK dan KIA melalui Aplikasi SIAK.





- 4) Verifikasi data yang di input melalui aplikasi SIAK oleh Kabid Pendaftaran Penduduk dan Kabid Pencatatan Sipil.
- 5) Penandatanganan Dokumen Akte kelahiran, KK dan KIA secara Elektronik oleh Kepala Dinas melalui aplikasi SiHati Online.
- 6) Petugas Rumah Sakit/Klinik Bersalin/Bidan Mandiri melakukan Pencetakan Dokumen (Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga) yang dikirimkan oleh Aplikasi SIAK Terpusat ke email admin tempat persalinan.
- 7) Penyerahan dokumen Akta Kelahiran, KK dan KIA ke pihak masyarakat/pasien
- 8) Masyarakat/pasien menerima Akte Kelahiran, KK dan KIA

8. Persyaratan Untuk Mengajukan Akta Kelahiran Terintegrasi (Akte Kelahiran, KK dan KIA) melalui Aplikasi Si Hati Online

- 1) Surat Keterangan Kelahiran (Asli)
- 2) Fotocopy Buku Nikah
- 3) Fotocopy KTP 2 (dua) Orang Tua Kandung
- 4) Fotocopy KTP 2 (dua) Orang Saksi
- 5) KK (Asli)

Semua persyaratan di atas di scan/di foto lalu di upload ke:
sihati.bandaacehkota.go.id

9. Tahapan dan Proses Inovasi Pelita Hati Bagi Calon Mitra Kerja:

- 1) Surat permintaan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama dari Disdukcapil yang ditujukan ke Rumah Sakit/Klinik Bersalin/Bidan Mandiri
- 2) Rumah Sakit/Klinik Bersalin/Bidan Mandiri menerima surat permintaan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama dari Disdukcapil, untuk kemudian menyampaikan Surat Persetujuan/Penolakan.
- 3) Disdukcapil menerima Surat Persetujuan melaksanakan Perjanjian Kerjasama dari Rumah Sakit/Klinik Bersalin/Bidan Mandiri.
- 4) Disdukcapil menyiapkan draf Perjanjian Kerjasama dan melakukan pembahasan dengan Pihak Rumah Sakit/Klinik Bersalin/Bidan Mandiri
- 5) Kedua belah Pihak melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (Pelita Hati).

10. Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran

Target dan realisasi cakupan kepemilikan akta kelahiran di Kota Banda Aceh selama periode 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 7. 7 Target dan Realisasi Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran
di Kota Banda Aceh Tahun 2018-2022
(dalam persen)**

Tahun	Target	Realisasi
2018	72	76,30
2019	74	78,50





2020	76	80,00
2021	78	96,81
2022	80	-

Sumber: Disdukcapil Kota Banda Aceh, 2018-2022 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi cakupan kepemilikan akta kelahiran di Kota Banda Aceh selama periode tahun 2018-2021 melampaui target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2018, target cakupan kepemilikan akta kelahiran sebesar 72 persen, sedangkan realisasinya mencapai 76,30 persen. Pada tahun 2021, target cakupan kepemilikan akta kelahiran di Kota Banda Aceh ditetapkan sebesar 78 persen, sementara realisasinya telah mencapai 96,81 persen. Angka ini menunjukkan hasil yang sangat menggembirakan dengan peningkatan persentase realisasi cakupan kepemilikan akta kelahiran yang sangat tinggi. Diharapkan pada tahun-tahun berikutnya, persentase ini dapat ditingkatkan lagi mendekati angka 100 persen.





BAB VIII PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banda Aceh Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan tahunan dengan prioritas pembangunan terarah selaras dengan Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan yang tercantum didalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 tahun pertama. Dokumen RKPD ini dimaksudkan sebagai acuan resmi bagi eksekutif dan legislatif dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2023 dan sebagai pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyempurnakan rancangan Rencana Kerja Tahun 2023. Selain itu, penyusunan RKPD juga untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Penyusunan dokumen RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2023 ini dilakukan secara partisipatif berdasarkan usulan masyarakat, OPD, DPRD, pemangku pembangunan lainnya serta mempertimbangkan terjadinya pandemi *Corona Virus Disease* Tahun 2019 (*Covid-19*). Dengan demikian, usulan kegiatan yang diajukan telah mempertimbangkan tingkat prioritas dan kemampuan keuangan daerah, serta mempertimbangkan aspek penanganan dan pemulihan terhadap dampak *Covid-19* yang masa berakhirnya belum dapat diprediksikan. Diharapkan mekanisme perencanaan yang partisipatif dalam Musrenbang RKPD Tahun 2023 mendapatkan respon positif pada tahap penganggaran, sehingga kegiatan perencanaan program dan kegiatan dapat berjalan secara sinergis dengan kegiatan perencanaan anggaran. Berikut kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD Banda Aceh Tahun 2023 yang telah disepakati untuk dijadikan pedoman dalam penerapannya adalah:

1. RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2023 ini, tidak hanya memuat program, kegiatan dan sub kegiatan tetapi juga memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
2. RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2023 ini, merupakan bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, penyelarasan prioritas pembangunan dan sinergitas perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, dan antar tingkat pemerintah serta pedoman dalam penyusunan Rancangan KUA-PPAS.
3. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergisitas pelaksanaan setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan setiap OPD menyusun Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja) Tahun 2023 sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra) dengan mempedomani RKPD ini.
4. Pelaksanaan Forum OPD serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD ditujukan untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat serta merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan.
5. Perangkat Daerah dan seluruh stakeholders pembangunan termasuk masyarakat, berkewajiban dan berperan serta untuk melaksanakan program-program RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2023 dengan sebaik-baiknya





6. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.
7. Pada akhir tahun anggaran 2023 setiap OPD wajib melakukan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang sudah ditetapkan dalam APBD.

Komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal, melaksanakan dan mewujudkan keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan sebagaimana tertuang dalam RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2023 ini sangat diperlukan. Di samping itu, OPD juga harus mengoptimalkan dan mengefektifkan kinerjanya, sehingga pelaksanaan pembangunan yang mengacu kepada RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2023 mampu mendukung tercapainya Kebijakan Pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2023 yaitu "Penguatan Penegakan Syariat Islam, Reformasi Birokrasi, Pemberdayaan Ekonomi, Pelayanan Kesehatan dan Peningkatan Kualitas dan Fungsionalisasi Infrastruktur".

 WAKIL KOTA BANDA ACEH

AMINULLAH USMAN





BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

JALAN NYAK ADAM KAMIL NO. 19, NEUSU JAYA, KOTA BANDA ACEH, PROVINSI ACEH
TELP. (0651) 32398 FAX. (0651) 32397 EMAIL: BAPPEDA@BANDAACEHKOTA.GO.ID

